



HAK POLITIK
DAN PARTISIPASI
PEREMPUAN

dalam Partai Keadilan Sejahtera

Ari Darmastuti

Ari Darmastuti

HAK POLITIK DAN PARTISIPASI PEREMPUAN

dalam Partai Keadilan Sejahtera

AURA
ANUGRAH UTAMA RAHARJA

Perpustakaan Nasional RI:
Katalog Dalam Terbitan (KDT)

HAK POLITIK DAN PARTISIPASI PEREMPUAN
dalam Partai Keadilan Sejahtera

Penulis:
Ari Darmastuti

Editor:
Moh. Nizar

Desain Cover & Layout
Team Aura Creative

Penerbit
AURA
CV. Anugrah Utama Raharja
Anggota IKAPI
No.003/LPU/2013

vi + 256 hal : 15,5 x 23 cm
Cetakan, Desember 2017

ISBN: 978-602-6739-69-8

Alamat

Jl. Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro, Komplek Unila
Gedongmeneng Bandar Lampung
HP. 081281430268
E-mail : redaksiaura@gmail.com
Website : www.aura-publishing.com

Hak Cipta dilindungi Undang-undang

Daftar Isi

BAB 1 PEREMPUAN DAN POLITIK.....	1
BAB 2 PEREMPUAN DALAM STRUKTUR PARTAI Keadilan Sejahtera.....	19
BAB 3 HAK POLITIK PEREMPUAN DI KALANGAN PEREMPUAN PARTAI Keadilan Sejahtera.....	66
BAB 4 PERAN PEREMPUAN PARTAI Keadilan Sejahtera dalam proses Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat	97
BAB 5 FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP PEREMPUAN DALAM RELASI Kekuasaan di PKS	179
BAB 6 KESIMPULAN.....	244

Lampiran

Tabel 1 Ketua dan Wakil Ketua DPRD di Indonesia Berdasar Kategori Jender

Tingkat Provinsi	Laki-Laki	Perempuan	Total
Ketua	26	1	27
Wakil Ketua 1	24	0	24
Wakil Ketua 2	23	1	24
Wakil Ketua 3	22	0	22
Tingkat Kabupaten/Kota			
Ketua	239	6	245
Wakil Ketua 1	241	5	246
Wakil Ketua 2	233	5	238
Wakil Ketua 3	173	0	173

Sumber: *Jurnal Perempuan* nomor 19, 2001, hal. 22

Tabel 2 Jumlah Perempuan Anggota DPR di Indonesia dari 1955-2004

Tahun Keanggotaan	Perempuan	Jumlah Total	Persentase (%)
1950-1955*	9	236	3.8
1955-1960	17	272	6.3
1956-1959**	25	488	5.1
1971-1977	36	460	7.8
1977-1982	29	460	6.3
1982-1987	39	460	8.5
1987-1992	65	500	13
1992-1997	62	500	12.5
1997-1999***	54	500	10.8
1999-2004	45	500	9

Sumber: *Jurnal Perempuan* Nomor 19, 2001, hal. 21

Catatan: * DPRS

** Konstituante

*** Keanggotaan Jangka Pendek pada masa transisi menuju era reformasi

Tabel 3 Persentase Perempuan di DPR Berdasar Partai, 1992-2004

Partai	1992-1997	%	1997-1999	%	1999-2004	%
PPP	4(62)	6.4	6(89)	6.7	3(58)	5.2
Golkar	48(282)	17	43(325)	13.2	16(120)	13.3
PDI	6(56)	10.7	1(11)	9	15(153)	9.8
Militer	4(100)	4	4(75)	5.3	3(38)	7.9
Total	62(500)	12.4	54(500)	10.8	-	-

Sumber: *Jurnal Perempuan* Nomor 19, 2001 hal. 29

Tabel 4 Perbandingan Jumlah Perempuan di DPR RI Periode 2004-2009 dan 1999-2004 Berdasarkan Partai

No	Partai	2004-2009			1999-2004		
		P	L	Jumlah	P	L	Jumlah
1	PG	19 (14,28%)	114 (85,71%)	133	16 (13,3%)	104 (86,7%)	120
2	PDI-P	12 (11,11%)	96 (88,88%)	108	15 (9,8%)	138 (90,2%)	153
3	PPP	3 (5,26%)	54 (84,74%)	57	3 (5,2%)	55 (94,8%)	58
4	PD	8 (14,04)	49 (85,71%)	57	-	-	-
5	PKB	7 (13,20)	46 (86,79%)	53	3 (5,9%)	48 (94,45%)	51
6	PAN	7 (13,20)	42 (85,71%)	49	2 (4,9%)	39 (94,1%)	41
7	PKS	3 (6,6%)	45 (93,4%)	48	-	-	-
8	PBR	2 (15,38)	11 (84,61%)	13	-	-	-
9	PBB	0	11 (100%)	11	1 (7,7%)	12 (92,3%)	13
10	PDS	2 (25%)	8 (75%)	10	-	-	-
11	PKPI	0	3 (100%)	3	-	-	-
12	PM	0	2 (100%)	2	-	-	-
13	PKPB	0	2 (100%)	2	-	-	-
14	PPDK	0	2 (100%)	2	-	-	-
15	PPIB	0	1 (100%)	1	-	-	-
16	PPDI	0	1 (100%)	1	-	-	-
	Total	65 (11,81%)	485	550	40 (9,2%)	396 (90,8%)	436*

Sumber: www.cetro.or.id. 4 Januari 2007

*Jumlah total wakil DPR RI: 500 (sisanya perwakilan dari TNI dan partai-partai lain yang tidak lolos *electoral treshold*)

Tabel 5 Perbandingan Gender Calon Anggota Legislatif PKS pada Pemilu Legislatif 2004

No	Daerah Pemilihan	P	L	No	Daerah Pemilihan	P	L
1	Daerah Ist. Aceh 1	2	4	36	Jawa Tengah 8	3	3
2	Daerah Ist. Aceh 2	2	4	37	Jawa Tengah 9	4	6
3	Sumatra Utara 1	2	5	38	Jawa Tengah 10	3	4
4	Sumatra Utara 2	2	5	39	DIY	3	3
5	Sumatra Utara 3	1	3	40	Jawa Timur 1	2	4
6	Sumatra Barat 1	3	6	41	Jawa Timur 2	3	4
7	Sumatra Barat 2	1	6	42	Jawa Timur 3	2	1
8	Riau	3	3	43	Jawa Timur 4	1	2
9	Jambi	2	3	44	Jawa Timur 5	3	5
10	Sumatra Selatan 1	2	4	45	Jawa Timur 6	3	2
11	Sumatra Selatan 2	2	4	46	Jawa Timur 7	3	3
					<i>Lanjutan</i>		
12	Bengkulu	2	2	47	Jawa Timur 8	3	3
13	Lampung 1	2	3	48	Jawa Timur 9	2	6
14	Lampung 2	2	3	49	Jawa Timur 10	3	4
15	Bangka Belitung	1	2	50	Banten 1	4	4
16	Kepulauan Riau	1	2	51	Banten 2	3	6
17	DKI Jakarta 1	4	8	52	Bali	2	1
18	DKI Jakarta 2	4	7	53	NTB	2	3
19	Jawa Barat 1	3	4	54	NTT 1	1	1
20	Jawa Barat 2	3	6	55	NTT 2	1	0
21	Jawa Barat 3	5	6	56	Kalimantan Barat	3	3
22	Jawa Barat 4	4	4	57	Kalimantan Tengah	1	1
23	Jawa Barat 5	4	7	58	Kalimantan Timur	4	5
24	Jawa Barat 6	3	2	59	Kalimantan Selatan	3	8
25	Jawa Barat 7	3	7	60	Sulawesi Utara	1	3
26	Jawa Barat 8	4	6	61	Sulawesi Tengah	3	3
27	Jawa Barat 9	3	4	62	Sulawesi Selatan 1	4	4
28	Jawa Barat 10	4	6	63	Sulawesi Selatan 2	4	6
29	Jawa Tengah 1	3	4	64	Sulawesi Tenggara	2	3
30	Jawa Tengah 2	2	3	65	Gorontalo	1	2
31	Jawa Tengah 3	2	3	66	Maluku	1	4
32	Jawa Tengah 4	1	3	67	Maluku Utara	1	3

33	Jawa tengah 5	3	4	68	Irian Jaya Barat	1	2
34	Jawa Tengah 6	2	4	69	Papua	5	4
35	Jawa Tengah 7	2	4		Jumlah	274	267

Sumber: www.cetro.co.id, 20 Oktober, 2006

Tabel 5 Perbandingan Gender Calon Anggota Legislatif PKS pada Pemilu Legislatif 2004

No	Daerah Pemilihan	P	L	No	Daerah Pemilihan	P	L
1	NAD 1	1	4	40	Jawa Tengah 9	3	7
2	NAD 2	1	3	41	Jawa Tengah 10	2	5
3	Sumut 1	4	4	42	DIY	3	5
4	Sumut 2	2	4	43	Jawa Timur 1	5	7
5	Sumut 3	3	4	44	Jawa Timur 2	2	6
6	Sumbar 1	3	5	45	Jawa Timur 3	3	5
7	Sumbar 2	2	4	46	Jawa Timur 4	2	5
8	Riau 1	2	2	46	Jawa Timur 5	2	5
9	Riau 2	1	3	47	Jawa Timur 6	1	5
10	Jambi 1	3	5	48	Jawa Timur 7	2	5
11	Sumsel 1	2	7	49	Jawa Timur 8	3	4
12	Sumsul 2	1	5	50	Jawa Timur 9	1	3
13	Bengkulu 1	3	2	51	Jawa Timur 10	2	5
14	Lampung 1	2	8	52	Jawa Timur 11	1	5
15	Lampung 2	3	6	53	Banten 1	2	5
16	Bangka Belitung	1	3	54	Banten 2	2	5
17	Kepulauan Riau	2	1	55	Banten 3	3	8
18	DKI Jakarta 1	2	5	56	Bali	4	7
19	DKI Jakarta 2	3	5	57	NTB	1	2
20	DKI Jakarta 3	4	6	58	NTT 1	-	2
21	Jawa Barat 1	2	6	59	NTT 2	1	2
22	Jawa Barat 2	4	8	60	Kalbar	5	6
23	Jawa Barat 3	2	9	61	Kalteng	2	2
24	Jawa Barat 4	2	5	62	Kalsel 1	2	5
25	Jawa Barat 5	3	8	63	Kalsel 2	1	5
26	Jawa Barat 6	2	5	64	Kaltim	3	3
27	Jawa Barat 7	4	8	65	Sulut	3	4
28	Jawa Barat 8	3	8	66	Sulteng	2	4

29	Jawa Barat 9	3	7	67	Sulsel 1	3	7
30	Jawa Barat 10	3	5	68	Sulsel 2	4	7
31	Jawa Barat 11	4	8	69	Sulsel 3	3	5
32	Jawa Tengah 1	3	7	70	Sultra	3	3
33	Jawa Tengah 2	3	5	71	Gorontalo	1	3
34	Jawa Tengah 3	5	6	72	Sulbar	1	3
35	Jawa Tengah 4	4	5	73	Maluku	2	3
36	Jawa Tengah 5	3	7	74	Maluku Utara	-	3
37	Jawa Tengah 6	3	7	75	Papua Barat	1	3
38	Jawa Tengah 7	4	4	76	Papua	5	6
39	Jawa Tengah 8	3	7				
					Total	179	384

Sumber: Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera, 2008

Pendahuluan

Posisi perempuan dalam kehidupan politik, dan secara khusus dalam partai-partai politik di Indonesia masih berada pada kondisi marginal.¹ Posisi marginal ini tergambar dalam data yang menunjukkan bahwa pada masa-masa awal reformasi sampai dengan tahun 2001 hanya terdapat seorang perempuan yang mampu menjadi ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disingkat DPRD) Provinsi dari 27 orang ketua DPRD Provinsi, dan pada waktu yang sama hanya ada satu perempuan lain yang mampu menjadi wakil ketua 2 (dua) DPRD Provinsi². Seperti diketahui bahwa pada saat artikel di Jurnal Perempuan sebagai dasar referensi tersebut diterbitkan, masih terdapat seorang perempuan sebagai Ketua DPRD Provinsi, yaitu di Provinsi Lampung, tetapi setelah itu, tidak ada lagi karena kemudian digantikan oleh laki-laki.³ Data tersebut menunjukkan bahwa perempuan masih termarginalkan dari posisi strategis dalam jabatan politik di legislatif tingkat Provinsi. Data yang sama juga terdapat pada DPRD tingkat Kabupaten/Kota. Jumlah perempuan yang dapat menduduki posisi pimpinan DPRD Kabupaten/Kota masih sangat rendah.

Selain dalam struktur kepemimpinan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, jumlah dan persentase perempuan sebagai anggota DPR secara total maupun berdasar partai juga masih rendah. Hal ini tergambar pada Tabel 2, Tabel 3 dan Tabel 4 pada lampiran. Persentase tertinggi keanggotaan perempuan dalam lembaga legislatif terjadi pada masa keanggotaan 1992-1997, yaitu 12,5%. Memang pada masa keanggotaan 2004-2009 terjadi peningkatan lebih dari 2% dibanding masa keanggotaan 1999-2004, tetapi tetap saja secara total belum pernah mencapai keterwakilan 15%. Dibandingkan dengan beberapa wilayah yang sudah lebih maju, terutama negara-negara Skandinavia, persentase keanggotaan perempuan dalam legislatif nasional di Indonesia masih sangat rendah. Di negara-negara Eropa, angka tersebut sudah mencapai lebih 20%, bahkan di Skandinavia sudah berada pada angka sekitar 30% sampai 45%.

Dari sisi partai, persentase tertinggi keanggotaan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (selanjutnya disingkat DPR) periode 2004-2009 berasal dari Partai Bintang Reformasi (selanjutnya disingkat PBR), yaitu 15,38% dari 13 orang anggotanya, disusul Partai Gol 1 1 Karya (selanjutnya disingkat Golkar) dengan 14,28% (dari 133 orang anggota DPR dari Golkar). Meski demikian tingginya persentase keanggotaan DPR dari Partai Bintang Reformasi lebih disebabkan jumlah total anggota DPR dari PBR yang sangat sedikit, yaitu 11

¹ Siti Musdah Mulia dan Anik Farida, 2005. *Perempuan dan Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Hal.16-17. Lihat juga Ani Widayanti Soetjipto, 2005. *Politik Perempuan Bukan Gerhana*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, hal. 2 dan hal. 15-17.

² Tabel 1 Lampiran

³ Sri Atidah digulingkan oleh kelompok Abbas Hadisunyoto melalui sebuah proses “*impeachment*” yang dimotori oleh 11 anggota DPRD Provinsi Lampung yang menyatakan bahwa Sri Atidah tidak memiliki kemampuan untuk memimpin, antara lain ditunjukkan dengan ketidakmampuan melakukan tugas administratif di Dewan serta permintaan Sri Atidah agar lingkungan gedung DPRD Provinsi Lampung diberi pagar kawat untuk mencegah demonstran (pernyataan ini tertulis dalam surat “*impeachment*” tersebut)

orang, sehingga persentase perempuan menjadi tinggi meski jumlah absolutnya hanya sedikit, yaitu 2 (dua) orang. Diantara 10 partai yang mempunyai 10 orang anggota DPR atau lebih, Partai Bulan Bintang (selanjutnya disingkat PBB) tidak memiliki seorang perempuanpun di antara 11 orang anggota DPRnya. Partai Persatuan Pembangunan (selanjutnya disingkat PPP) hanya memiliki 5,26% sementara Partai Keadilan Sejahtera (selanjutnya disingkat PKS) 6,66%. Persentase tersebut cenderung lebih tinggi pada partai-partai nasionalis atau nasionalis religius, yaitu Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (selanjutnya disingkat PDIP), Golkar, Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa (selanjutnya disingkat PKB, dan Partai Amanat Nasional (selanjutnya disingkat PAN).

Kondisi yang mirip terjadi pada masa keanggotaan 1999-2004. Persentase keterwakilan perempuan pada partai-partai agama (yaitu PBB dan PPP) serta partai nasionalis religius (PAN dan PKB) jauh lebih rendah dibanding pada partai-partai nasionalis, yaitu Partai Golkar dan PDI-P. Jika persentase keterwakilan perempuan pada masa keanggotaan DPR periode 1999-2004 diperbandingkan secara berturut-turut antara Partai Golkar: PDI-P: PPP: PKB: PAN: PBB, maka perbandingannya adalah 13,3%: 9,8%: 3,52%: 5,9%: 4,9%: dan 7,7%. Persentase di Partai Golkar dan PDI-P jauh lebih tinggi dibanding dengan persentase di PPP, PKB, PAN dan PBB.

Merujuk pada keterwakilan perempuan di DPR masa 1999-2004 dan 2004-2009 yang sudah dikemukakan dalam paragraf-paragraf terdahulu, dapat dinyatakan bahwa perempuan masih merupakan minoritas dalam struktur kekuasaan di DPR. Posisi minoritas tersebut cenderung terjadi pada: (1) partai-partai agama, dan (2) partai-partai nasionalis religius.⁴ Data ini memperkuat argumen Siti Musdah Mulia dan Anik Farida bahwa perempuan merupakan minoritas dalam kehidupan politik karena memang benar-benar masih memiliki masalah dengan posisi mereka dalam struktur kekuasaan di DPR dan partai-partai, khususnya partai-partai Islam. Alasan yang mendasari argumen Musdah Mulia dan Farida bahwa perempuan masih menjadi minoritas dalam kehidupan politik adalah bahwa dalam pemilu yang menggunakan sistim proporsional daftar tertutup (pemilu legislatif 1999 dan 2004 menggunakan sistim ini), maka sedikitnya jumlah perempuan di DPR disebabkan oleh tidak diletakkannya perempuan dalam posisi yang menguntungkan dalam daftar calon usulan partai yang memungkinkan mereka terpilih dalam pemilu. Karena itu dapat disimpulkan bahwa sedikitnya jumlah dan persentase perempuan di DPR merupakan indikator kuat masih lemahnya posisi perempuan dalam partai sehingga tidak memiliki daya tawar untuk dicalonkan pada posisi yang memungkinkan terpilih menjadi anggota DPR.⁵

Lemahnya peran perempuan dalam kehidupan politik, khususnya di partai, dan lebih khusus lagi di partai Islam berupa sedikitnya perempuan yang dapat menduduki berbagai jabatan penting di partai dan sedikitnya perempuan yang dapat menduduki kursi DPR sebagai wakil partai di lembaga perwakilan rakyat

⁴ Tulisan ini tidak secara khusus membahas perbedaan partai-partai agama dan partai-partai nasionalis religius.

⁵ Siti Musdah Mulia dan Anik Farida. *Loc. Cit.*

merupakan fenomena yang akan berimplikasi terhadap kualitas demokrasi. Hal ini terlihat dari pernyataan Inter-Parliamentary Union berikut⁶:

The achievement of democracy presupposes a genuine partnership between men and women in the conduct of the affairs of society in which they work in equality and complementarity, drawing mutual enrichment from their differences. (Pencapaian tujuan demokrasi mensyaratkan sebuah kemitraan yang sungguh-sungguh antara laki-laki dan perempuan untuk melaksanakan berbagai urusan kemasyarakatan dalam kondisi saling bekerjasama secara setara dan saling melengkapi, dengan saling memperkaya atas dasar perbedaan yang ada di antara mereka).

Begitu pentingnya peran perempuan dalam kehidupan politik sehingga dinilai berhubungan langsung dengan kualitas demokrasi. Pencapaian tujuan demokrasi mensyaratkan kerjasama antara laki-laki dan perempuan untuk melaksanakan urusan-urusan masyarakat atas dasar saling melengkapi karena perbedaan yang ada di antara perempuan dan laki-laki. Dua prinsip penting terdapat dalam deklarasi ini. Pertama, kerjasama yang sungguh-sungguh antara perempuan dengan laki-laki dalam kehidupan politik adalah prasyarat demokrasi. Kedua, perbedaan antara laki-laki dan perempuan adalah kekuatan yang harus saling melengkapi untuk melaksanakan urusan masyarakat, bukan alasan diskriminasi terhadap perempuan seperti selama ini terjadi.

Jika kualitas demokrasi ditentukan salah satunya oleh peran serta perempuan dalam kehidupan politik, dan peran perempuan dalam kehidupan politik ditentukan oleh partai politik, penting untuk menjelaskan bagaimana sebenarnya posisi perempuan dalam hubungan kekuasaan di partai politik. Partai Keadilan Sejahtera sebagai sebuah partai Islam yang cukup baru dalam kehidupan politik di Indonesia ikut menentukan kualitas demokrasi di Indonesia, terutama dengan fungsinya untuk menyalurkan kepentingan politik dari warga masyarakat yang diwakilinya. Kemampuan Partai Keadilan Sejahtera memenuhi ketentuan *electoral treshold* pada pemilu 2004 menunjukkan bahwa partai ini memiliki pendukung yang cukup besar dan akan mempunyai pengaruh jangka panjang terhadap kehidupan demokrasi di Indonesia. Meski demikian, data yang ada menunjukkan bahwa jumlah perempuan PKS sebagai pengurus partai maupun sebagai anggota DPR dari PKS masih sangat sedikit dibanding laki-laki. Perempuan anggota DPR dari PKS periode 2004-2009 hanya merupakan 6.66% dari keseluruhan anggota DPR dari PKS. Berdasar data yang ada perempuan PKS juga masih terkonsentrasi dalam Bidang Kewanitaan di Dewan Pimpinan Pusat PKS, belum di Bidang-Bidang dan lembaga lain. Menjadi pertanyaan kemudian mengapa hal ini terjadi? Apakah hal ini karena perempuan memang tidak memandang penting dunia politik sehingga tidak berminat melakukan upaya untuk dapat menduduki berbagai jabatan politik di partai maupun menjadi anggota DPR ataukah ada sebab-sebab lain, pandangan, sikap dan tindakan pejabat PKS terhadap hak politik perempuan? Jika mekanisme internal dalam PKS menyebabkan perempuan tidak dapat menduduki berbagai jabatan penting dalam partai dan terpilih dalam pemilu, tentu hal ini akan berimplikasi terhadap kualitas demokrasi, baik demokrasi dalam partai maupun pada masyarakat yang lebih luas

⁶ Inter-Parliamentary Union, "Reports and Documents" , No. 35, 1999, ISBN 92-942-065-2

yaitu bangsa Indonesia. Menjelaskan mengenai bagaimana peran perempuan dalam relasi kekuasaan di Partai Keadilan Sejahtera merupakan upaya penting untuk melihat bagaimana demokratisasi terjadi dalam partai ini.

Beberapa penelitian berkenaan dengan tema perempuan dan PKS telah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Penelitian Irma Ervina⁷ mengambil tema Pengaruh Pemikiran Politik Ikhwanul Muslimin tentang Partisipasi Politik Wanita di PKS. Aay M. Furqon⁸ menulis tesis sejenis, meski temanya sedikit berbeda. Furqon melakukan penelitian mengenai pengaruh pemikiran Al-Ikhwan Al-Muslimun terhadap gerakan politik Islam Indonesia dengan studi pada Partai Keadilan Sejahtera. Fokus studi ini sekali lagi adalah pada aspek pemikiran politik yang dianggap dominan di Partai Keadilan Sejahtera Sementara itu M. Deden Lily Qz⁹ meneliti dampak ketentuan peraturan terhadap penempatan calon anggota legislatif dalam daftar yang disusun oleh partai, sedangkan Yonalita Vevia¹⁰ meneliti perspektif pengurus partai terhadap partisipasi politik perempuan. Penelitian-penelitian ini mengkaji tentang perempuan dan PKS dalam potret yang terpisah-pisah, yaitu dari sisi pemikiran tentang peran politik, dari sisi dampak undang-undang dan dari sisi perspektif pengurus partai tentang peran politik perempuan. Ketiganya belum mengkaji peran perempuan dalam hubungan kekuasaan di PKS secara utuh, khususnya dilihat dari kemampuan perempuan PKS mempengaruhi proses politik penting dalam partai yang akan berpengaruh pada terpilih atau tidaknya perempuan dalam pemilu legislatif. Proses terpenting yang berpengaruh terhadap kesempatan untuk terpilih dalam pemilu legislatif adalah proses penyusunan daftar calon anggota DPR.

Penelusuran terhadap hasil-hasil penelitian tesis dan disertasi di Indonesia menyangkut perempuan dan politik menunjukkan adanya tiga tema besar yang menjadi fokus kajian para peneliti. Tema pertama adalah rekrutmen calon anggota legislatif dan demokratisasi internal pada rekrutmen calon anggota legislatif. Peneliti-peneliti tersebut antara lain adalah Endang Sulastris¹¹, Lince Magriasti¹², Debbie Affianty¹³, Nuraina¹⁴, dan Amelia Ahmad¹⁵. Tema kedua

⁷ Ibid.

⁸ Aay M. Furqon. 2004. *Pengaruh Pemikiran Al-ikhwan Al-muslimun terhadap gerakan politik Islam Indonesia (1998-2000) : studi kasus Partai Keadilan*. Universitas Indonesia: tesis dalam PPS Ilmu Politik

⁹ M. Deden Lily Qz. 2004. *Dampak Keterwakilan Perempuan dalam Undang-Undang Pemilu nomor 12 tahun 2003 terhadap Penempatan Calon Anggota Legislatif dari Partai Politik yang Berazaskan Islam (Studi di DPW Partai Bulan Bintang dan Partai Keadilan Sejahtera)*. Universitas Lampung: skripsi dalam PS Ilmu Pemerintahan

¹⁰ Yonalita Vevia. 2003. *Partisipasi Politik Perempuan dalam Perspektif Pengurus Partai-Partai Politik Islam (Studi pada DPC Partai Bulan Bintang dan Partai Keadilan Sejahtera Bandarlampung)*. Universitas Lampung: skripsi dalam PS Ilmu Pemerintahan.

¹¹ Endang Sulastris. 2003. *Pola rekrutmen caleg perempuan Partai Persatuan Pembangunan pada Pemilu 1999*. Univesitas Indonesia: tesis dalam PPS Ilmu Politik.

¹² Lince Magriasti. 2005. *Pola Rekrutmen Caleg danPengaruhnya terhadapKeterwakilan Perempuan di DPRD Propinsi Sumatera Barat pada Pemilihan Umum 2004 (studi pada Partai Golongan Karya dan Partai Bulan Bintang)*. Univesitas Indonesia: tesis dalam PPS Ilmu Politik.

¹³ Debbie Affianty. 2006. *Proses rekrutmen calon walikota dan wakil walikota oleh partai politik untuk pemilihan kepala daerah secara langsung di Kota Depok 2005 : studi kasus PKS, PD, dan PAN*. Universitas Indonesia: tesis dalam PPS Ilmu Politik.

¹⁴ Nuraina. 2007. *Demokrasi Internal Partai Politik Islam : Studi Rekrutmen Perempuan pada Jabatan-Jabatan Politik PKS Pemilu 2004*. Universitas Indonesia; tesis dalam PPS Ilmu Politik.

adalah mengenai masalah keterwakilan politik, khususnya pemenuhan kuota 30% calon anggota legislatif perempuan, partisipasi politik perempuan, kepemimpinan politik perempuan, dan studi kemenangan perempuan pada pemilihan kepala daerah. Tema ini dikembangkan antara lain oleh Nurul Q. Arifin¹⁶, Aditya Perdana¹⁷, Faridah¹⁸, Evida Kartini¹⁹, Rieta Fuad²⁰, Maryam Fithriati²¹, Dewi Coryati²², Ni Nyoman Tesnawati²³, Muhammad Karim²⁴. Tema ketiga adalah tentang esadaran gender, keadilan gender, pengarusutamaan gender, dan kebijakan anggaran gender. Tema ini diteliti oleh Banu Prabowo²⁵, S. Maryamah²⁶, Sarah Colin²⁷, dan Anik Dwi Martuti²⁸.

Sementara itu, para peneliti mengenai Partai Keadilan Sejahtera juga secara garis besar telah melakukan penelitian yang meliputi tiga tema besar, yaitu: *pertama*, pengaruh pemikiran ikhwanul muslimin dan pemikiran politik Masyumi terhadap PKS. Para peneliti yang telah melakukan penelitian dalam tema ini adalah M. Herawan Eriadi²⁹, Aay M. Furqon³⁰. *Tema kedua* adalah negara dalam perspektif Islam PKS serta peran PKS untuk demokratisasi politik

¹⁵ Amelia Ahmad. 2008. *Pola rekrutmen calon Anggota Legislatif Perempuan PDI Perjuangan Tahun 1999 dan Tahun 2004*. Universitas Indonesia: disertasi dalam PPS Ilmu Politik.

¹⁶ Nurul Q Arifin. 2007. *Perempuan dan Politik : Sebuah Studi Kemenangan Tiga Kepala Daerah Perempuan Dalam Pilkada*. Universitas Indonesia: tesis pada PPS Ilmu Politik.

¹⁷ Aditya Perdana. 2007. *Kesempatan Politik dan Sukses Gerakan Sosial : Gerakan Keterwakilan Perempuan di Donggala (2004-2007)*. Universitas Indonesia: tesis pada PPS Ilmu Politik.

¹⁸ Faridah. 2006. *Kebijakan partai politik dalam meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen (studi kasus Partai Golkar periode tahun 1999 - 2004)*. Universitas Indonesia: tesis pada PPS Ilmu Politik.

¹⁹ Evida Katini. 2006. *Pelaksanaan sistem kuota 30% untuk keterwakilan perempuan di DPR pada pemilu legislatif tahun 2004 di Indonesia*. Universitas Indonesia: tesis pada PPS Ilmu Politik

²⁰ Rieta Fuad. 2006. *Perempuan dan politik (kepatuhan Partai Golkar, PDI-P dan PKB terhadap pemberlakuan kuota perempuan 30% bagi caleg DPR-RI*. Universitas Indonesia: tesis pada PPS Ilmu Politik..

²¹ Maryam Fithriati. 2006. *Peran partai dan perempuan partai dalam meningkatkan keterwakilan perempuan menjelang Pemilu 2004 (studi kasus pada enam partai peserta pemilu 2004)*. Universitas Indonesia: tesis pada PPS Ilmu Politik.

²² Dewi Coryati. 2006. *Masalah peningkatan keterwakilan perempuan di DPR-RI (studi kasus Partai Amanat Nasional dalam Pemilu 2004)*. Universitas Indonesia: tesis pada PPS Ilmu Politik.

²³ Ni Nyoman Tesnawati. 2005. *Faktor-faktor yang mempengaruhi keterwakilan perempuan di DPRD Provinsi Bali hasil Pemilu 1999*. Universitas Indonesia: tesis pada PPS Ilmu Politik.

²⁴ Muhammad Karim. 2004. *Kepemimpinan politik perempuan dalam pandangan Nahdlatul Ulama (NU) berdasarkan keputusan Muktamar XXX NU tahun 1999*. Universitas Indonesia: tesis pada PPS Ilmu Politik.

²⁵ Banu Prabowo. 2005. *Kesadaran gender pemilih perempuan dalam pemilu legislatif 2004 (studi kasus terhadap perempuan PNS di kantor Arsip Nasional RI)*. Universitas Indonesia: tesis pada PPS Ilmu Politik.

²⁶ S Maryamah. 2007. *NU dan Keadilan Jender: Posisi perempuan dalam Perspektif Keadilan Jender di Kepemimpinan PBNU*. Universitas Indonesia: tesis pada PPS Ilmu Politik.

²⁷ Sarah Colin. 2007. *Pengarusutamaan gender dalam praktek : pengalaman Kementerian pemberdayaan perempuan dan kerjasamanya dengan lima sector pemerintah sejak 2000*. Universitas Indonesia: tesis pada PPS Ilmu Politik.

²⁸ Anik Dwi Martuti. 2008. *Formulasi Kebijakan Anggaran Gender : Studi Kasus APBD DKI tahun 2005 untuk Pemberdayaan Perempuan*. Universitas Indonesia: tesis pada PPS Ilmu Politik.

²⁹ M. Hermawan Eriadi. 2007. *Pengaruh Pemikiran Politik Masyumi di Partai Keadilan/ Partai Keadilan Sejahtera*. Universitas Indonesia: tesis pada PPS Ilmu Politik..

³⁰ Aay M. Furqon. 2004. *Pengaruh pemikiran Al-ikhwan Al-muslimun terhadap gerakan politik Islam Indonesia (1998-2000) : studi kasus Partai Keadilan*. Universitas Indonesia: Tesis pada PPS Ilmu Politik.

Indonesia. Peneliti yang melakukan riset untuk tema ini antara lain adalah Mohammad Anwar³¹, Sri Yunanto³², Anton Munardi³³. Tema ketiga adalah strategi pemenangan pemilu, pola komunikasi politik kampanye 2004, serta pola rekrutmen calon walikota Depok (oleh PKS) pada pemilihan Walikota Depok tahun 2005. Peneliti yang melakukan penelitian pada tema ini antara lain adalah Debbie Affianty³⁴, Ujang Komarudin³⁵, Abdul Azis³⁶, Amri Yusra³⁷.

Tema-tema penelitian tentang perempuan yang telah dipilih para peneliti yang telah disarikan menjadi tiga tema besar menunjukkan bahwa hubungan kekuasaan yang merupakan esensi studi politik belum menjadi fokus penelitian yang dikembangkan secara khusus. Satu-satunya penelitian yang mendekati tema perempuan dengan kekuasaan adalah penelitian Nuraina yang membahas demokrasi internal partai politik Islam dengan mengambil kasus rekrutmen perempuan pada jabatan politik PKS Pemilu 2004. Demokrasi internal tentu menyangkut persoalan kekuasaan. Meski demikian, penelitian ini tidak menjadikan hubungan kekuasaan yang muncul antara pihak-pihak yang terlibat sebagai fokus penjelasannya. Penelitian ini tidak mengungkap bagaimana kemampuan perempuan mempengaruhi keputusan lembaga-lembaga penting dalam partai dan lembaga yang berpengaruh terhadap proses pencalonan anggota DPR. Penelitian ini juga belum mengkaji variasi pemikiran, sikap dan tindakan pihak-pihak yang terlibat di berbagai lembaga yang berpengaruh terhadap proses pencalonan anggota DPR oleh DPP PKS, serta bagaimana berbagai pemikiran, sikap dan tindakan ini berpengaruh terhadap pemikiran perempuan tentang hak politik mereka serta sikap dan tindakan mereka dalam proses pencalonan anggota DPR.

Sementara itu penelitian tentang PKS (yang berdasar data yang ada kebanyakan dilakukan oleh peneliti laki-laki) pada umumnya belum menjadikan tema perempuan dan kekuasaan sebagai tema yang cukup layak diteliti. Hal ini ironis dengan kenyataan bahwa perempuan sungguh memiliki masalah dengan kekuasaan karena data yang ada menunjukkan bahwa meski secara kuantitatif perempuan merupakan separoh jumlah warga negara, peran politik mereka masih sangat kecil. Kecilnya peran politik perempuan, sebagaimana telah dikemukakan di bagian lebih awal, berpengaruh terhadap kualitas demokrasi. Argumen

³¹ Mohammad Anwar. 2004. *Islam dan Negara dalam Perspektif Partai Keadilan Sejahtera*. Universitas Indonesia: Tesis pada PPS Ilmu Politik.

³² Sri Yunanto. 2004. *Demokratisasi gerakan fundamentalis moderat Islam di Indonesia : studi kasus Partai Keadilan Sejahtera*. Universitas Indonesia: Tesis pada PPS Ilmu Politik

³³ Anton Munardi. 2007. *Negara Menurut Islam: Perspektif Partai Keadilan Sejahtera dan Hizbut Tahrir*. Universitas Indonesia: disertasi pada PPS Ilmu Politik..

³⁴ Debbie Affianty. 2006. *Proses rekrutmen calon walikota dan wakil walikota oleh partai politik untuk pemilihan kepala daerah secara langsung di Kota Depok 2005 : studi kasus PKS, PD, dan PAN*. Universitas Indonesia: tesis pada PPS Ilmu Politik.

³⁵ Ujang Komarudin. 2006. *Strategi Partai Keadilan Sejahtera dalam memenangkan pemilu legislatif 2004 di Provinsi DKI Jakarta*. Universitas Indonesia: tesis pada PPS Ilmu Politik.

³⁶ Abdul Azis. 2006. *Pola komunikasi politik Partai Keadilan Sejahtera pada kampanye pemilu 2004 di wilayah Jakarta Timur*. Universitas Indonesia: tesis pada PPS Ilmu Politik.

³⁷ Amri Yusra. 2006. *Mekanisme Partai Politik dalam Pencalonan Kepala Daerah: (Studi Kasus Partai Keadilan Sejahtera Dalam Pilkada Depok 2005)*. Universitas Indonesia: tesis pada PPS Ilmu Politik.

mengenai hal ini dikemukakan oleh Anne Philips³⁸ “*When policies are worked out for rather than with a politically excluded constituency, they are unlikely to engage with all relevant concerns*”. (Jika kebijakan bersifat lebih *dilakukan untuk* dibanding *dilakukan bersama* dengan kosntituen yang secara sengaja tidak dilibatkan, maka kebijakan-kebijakan tersebut sangat mungkin tidak akan memperhatikan semua kepentingan yang terkait).

Proses politik yang meminggirkan perempuan serta menyerahkan perwakilan perempuan kepada wakil yang pada umumnya laki-laki sangat besar kemungkinannya untuk menghasilkan kebijakan yang tidak memperhatikan semua *concerns* atau kebutuhan, prioritas, cara pandang dan pengalaman perempuan yang berbeda (dari laki-laki). Hal ini disebabkan karena “*range of political ideas and preferences is significantly constrained by the characteristics of the people who convey them*”.³⁹ (jangkauan ide dan preferensi politik secara signifikan dibatasi oleh karakter atau sifat orang-orang yang membawa atau memilikinya). Penulis bahkan berpendapat bahwa bukan hanya ide dan preferensi yang berbeda, tetapi prioritas, pendekatan dan cara-cara memecahkan masalah kemungkinan besar sangat berbeda dengan adanya perbedaan karakteristik (antara laki-laki dan perempuan). Menjelaskan hubungan perempuan dalam relasi kekuasaan di PKS berarti menjelaskan tema sentral studi politik.

1.2 Pokok Permasalahan dan Garis Besar Buku

Gambaran umum di muka menunjukkan bahwa secara umum perempuan masih menjadi minoritas dalam kehidupan politik di Indonesia, baik dalam lingkungan legislatif maupun eksekutif. Secara khusus dalam kehidupan partai politik dan lebih khusus di PKS, perempuan juga masih menjadi minoritas, tepatnya jika dilihat dari kemampuan pencapain secara pencapaian kuantitatif keanggotaan DPR bagi perempuan PKS. Sementara itu pernyataan pejabat PKS maupun data di lapangan menunjukkan bahwa perempuan PKS meliputi jumlah yang hampir sama banyak dengan laki-laki dengan kualitas yang tidak kalah dengan laki-laki.⁴⁰

Selain itu terdapat beberapa fakta lain yang juga menunjukkan bahwa perempuan masih mengalami masalah dengan kekuasaan dalam partai, dalam hal ini PKS. *Pertama*, pada pencalonan anggota DPR untuk pemilihan umum tahun 2004, PKS telah jauh melampaui ketentuan pasal 65 ayat (1) Undang-Undang nomor 12/2003, yaitu dengan mengajukan perempuan calon anggota DPR sebesar 274 dari total 541, atau meliputi 50,64% jumlah calon anggota DPR dari PKS (Lampiran Tabel 5). Dari 271 perempuan calon anggota DPR tersebut, hanya 3 orang terpilih menjadi anggota DPR periode 2004-2009, sementara dari 267 laki-laki calon anggota DPR dari PKS, 42 orang diantaranya terpilih menjadi anggota

³⁸ Anne Phillips. 1995. *The Politics of Present. The Political Representation of Gender, Ethnicity, and Race*. Oxford: Oxford University Press. Hal 13

³⁹ Anne Phillips, *Ibid*.

⁴⁰ Anis Matta dalam wawancara tanggal 19 Juni 2010 menyatakan bahwa kuantitas dan kualitas perempuan PKS pada semua jenjang kekaderan hampir sama dengan laki-laki. Satu-satunya bidang yang kualitas perempuan kurang adalah pada bidang syari'ah dimana tidak banyak perempuan PKS yang mempunyai keahlian di bidang ini. Sementara itu pernyataan Hidayat Nurwachid yang dikutip oleh Burhanuddin dalam tulisannya yang berjudul *Islamisme, PKS dan Representasi Politik* yang dimuat dalam www.yahoo.com 4 Januari 2007 menyatakan bahwa 57% kader aktif PKS adalah perempuan.

DPR. Persentase anggota DPR perempuan dari PKS sebesar 6,66% ini ketiga terendah diantara 9 partai dengan perolehan suara dan kursi pemilu terbesar, yaitu hanya di atas Partai Bulan Bintang (0%) dan Partai Persatuan Pembangunan (5.26%).

Kedua, adanya pernyataan elit partai bahwa PKS telah menyatakan komitmen bagi pemberdayaan politik perempuan⁴¹. Komitmen pemberdayaan ini juga tercermin dalam fatwa Dewan Syariah Partai Keadilan Sejahtera bahwa politik adalah urusan *amar ma'ruf nahi munkar* yang harus dilakukan bersama-sama laki-laki dan perempuan⁴². Meski terdapat beberapa hal di muka, kenyataannya perempuan PKS masih menjadi minoritas dalam relasi kekuasaan di PKS. Mereka tidak menduduki posisi-posisi penting dalam partai, tidak diletakkan dalam posisi *safe seat* (baik dalam nomor dalam daftar maupun daerah pemilihan yang memungkinkan untuk terpilih); mereka masih berada di nomor bawah dalam daftar calon anggota dan diletakkan pada daerah-daerah yang bukan “kantong suara PKS”, sehingga tidak dapat terpilih dalam pemilu, terbukti dari sangat sedikitnya jumlah perempuan PKS yang terpilih pada pemilu 2004 dibanding dengan laki-laki, atau 3 dari 48 anggota DPR dari PKS. Menjadi pertanyaan kemudian, apa sebenarnya makna keberadaan perempuan di PKS, apakah mereka hanyalah alat yang dijadikan obyek oleh partai untuk memenangkan suara pemilih ataukah mereka juga subyek yang mempunyai posisi dan peran penting di partai.

Untuk menjelaskan bagaimana posisi perempuan dalam relasi kekuasaan di PKS secara lebih rinci, penulis harus mampu mengungkap beberapa permasalahan penting. Pertama, penjelasan harus mampu mengungkap bagaimana posisi perempuan dalam struktur kewenangan PKS. Untuk itu perlu dijelaskan terlebih dahulu secara ringkas peran perempuan dalam sejarah PKS dan posisi perempuan dalam ideologi PKS. Ketiga sub masalah ini saling berkait karena posisi dalam struktur kewenangan sangat terkait dengan bagaimana ideologi partai melatakan perempuan dalam kerangka ideologi tersebut. Sementara itu ideologi PKS jelas mempunyai kaitan erat dengan sejarah berdirinya partai ini.

Kedua, posisi dalam relasi kekuasaan berkait dengan cara pandang perempuan terhadap hak politik mereka sendiri. Keyakinan perempuan bahwa mereka merupakan subyek politik yang setara laki-laki akan mempengaruhi apakah mereka dapat menjadi subyek politik yang dapat efektif menjalankan peran politik atau tidak. Jika mereka memandang sebagai subyek yang setara laki-laki maka mereka akan menjadi subyek yang setara laki-laki, bukan justru

⁴¹ Hasil wawancara dengan Muzammil Yusuf, salah satu pendiri PKS, di Jakarta tgl 12 Januari 2007. Yang bersangkutan menyatakan bahwa manifesto politik PKS jelas menunjukkan bahwa politik adalah urusan *amar ma'ruf nahi munkar*, merupakan kewajiban bersama laki-laki dan perempuan. Yang bersangkutan menjelaskan bahwa mengenai posisi perempuan sebagai kepala negara memang terjadi debat *antara* kalangan ulama yang berpegang pada pendapat bahwa kepala negara harus bisa menjadi imam sholat, panglima perang dan sebagainya, maka perempuan tidak boleh menjadi kepala negara, *dengan* kalangan lain yang tidak secara tegas mengadopsi argumen para ulama tersebut. Karena itu, menurut yang bersangkutan, persoalan kepala negara masih tetap menjadi perdebatan internal partai dan PKS memang tidak pernah secara tegas mengeluarkan pernyataan formal tentang masalah ini..

⁴² Irma Ervina. 2006. *Pengaruh Pemikiran Politik Ikhwanul Muslimin tentang Partisipasi Politik Wanita di PKS*. Universitas Indonesia: thesis master dalam PS Kajian Timur Tengah

ingin meniru laki-laki atau sekedar mengikuti pandangan, sikap dan tindakan politik laki-laki semata. Karena itu permasalahan kedua yang perlu dijelaskan adalah mengenai pandangan perempuan PKS tentang hak politik mereka sendiri.

Posisi perempuan dalam relasi kekuasaan dalam partai tidak hanya perlu dikaji dari posisi perempuan dalam struktur kewenangan partai dan pandangan mereka tentang hak politik mereka sendiri. Proses pencalonan anggota DPR adalah medan kontestasi kekuasaan yang sangat intens. Peristiwa ini merupakan medan interaksi kekuasaan berbagai unsure dalam partai baik secara horizontal maupun vertical. Dalam kasus pencalonan anggota DPR dari PKS, secara horizontal dalam kepengurusan pusat PKS, peristiwa ini melibatkan Majelis Syura Pusat (MSP), Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP), Dewan Pengurus Pusat (DPP, Majelis Pertimbangan Pusat (MPP), dan Dewan Syari'ah Pusat (DSP). Secara vertical pencalonan anggota DPR dari PKS melibatkan kepengurusan Pusat, Wilayah Daerah, dan Wilayah. Karena itu bagaimana kemampuan perempuan PKS mempengaruhi proses pencalonan anggota DPR dari PKS merupakan permasalahan inti dari posisi perempuan dalam relasi kekuasaan di PKS.

Masalah posisi dalam relasi kekuasaan dipengaruhi paling tidak dua factor, yaitu faktor internal diri perempuan dan faktor eksternal, khususnya respon pejabat PKS. Faktor internal yang berpengaruh adalah kelemahan-kelemahan yang harus dibuang dan ciri-ciri ideal yang harus ditumbuhkan agar menjadi subyek politik efektif. Faktor eksternal yang paling berpengaruh terhadap perempuan dalam partai yang perlu dijelaskan adalah sikap dan tindakan pejabat partai menyangkut hak politik perempuan. Karena itu faktor-faktor ini perlu diungkap secara rinci dan sistimatis.

Dengan pokok-pokok pemikiran tersebut, maka buku ini akan menjelaskan tema-tema sebagai berikut: (1) Bagaimana posisi perempuan dalam struktur kewenangan di PKS. Struktur kewenangan perlu dijelaskan karena menggambarkan otoritas yang mempunyai pengaruh terhadap hak politik perempuan dan proses pencalonan anggota DPR dalam bentuk pelibatan perempuan dalam struktur partai. (2) Bagaimana pandangan perempuan PKS terhadap hak politik mereka. (3) Bagaimana kemampuan perempuan PKS mempengaruhi proses pencalonan anggota DPR yang dilakukan oleh kepengurusan PKS tingkat Pusat. (4) Bagaimana sikap dan tindakan pejabat PKS terhadap hak politik perempuan PKS. (5) Bagaimana pengaruh factor-faktor dari diri dan kelompok perempuan terhadap kemampuan perempuan menjadi subyek politik yang setara laki-laki dalam relasi kekuasaan di PKS.

Signifikansi Pokok-Pokok Penjelasan dalam Buku

Posisi perempuan dalam relasi kekuasaan di Partai Keadilan Sejahtera dipilih menjadi tema buku ini karena beberapa pertimbangan. *Pertama*, perempuan masih mengalami masalah dalam relasi kekuasaan dengan laki-laki di PKS. Berbagai data yang dikemukakan dalam bagian yang lebih awal proposal ini menunjukkan hal tersebut. PKS adalah sebuah partai Islam yang dapat disebut sebagai "*a rising star*", begitu muncul langsung hampir dapat menyamai partai Islam besar lainnya yang sudah lama berdiri, yaitu PPP. Sementara itu, PBB dan

PBR sebagai partai Islam lainnya tidak terlalu signifikan pengaruhnya terhadap kehidupan politik, bahkan keduanya mengalami kesulitan lolos dari ketentuan *electoral treshold*. PPP sebagai partai Islam yang cukup besar selama ini hanya mampu mendorong pencapaian keterwakilan politik perempuan antara 5,2%-6,7%.⁴³ Kenyataan bahwa kader aktif di PKS lebih banyak perempuan dibanding laki-laki, kenyataan bahwa jumlah perempuan dalam pencalonan pemilu legislatif oleh PKS lebih banyak dibanding laki-laki, meski demikian perempuan masih terhalang mencapai keterwakilan politik 30% serta kenyataan bahwa perempuan belum sepenuhnya menjadi subyek politik di PKS membutuhkan upaya sungguh-sungguh untuk memahami bagaimana sebenarnya posisi perempuan di PKS.

Kedua, tulisan ini mengkritisi hubungan antara struktur (yaitu partai, dalam hal ini PKS) dengan agen (dalam hal ini perempuan PKS pengurus partai maupun calon anggota legislatif dari PKS) dengan cara meletakkan partai sebagai subyek penting dalam studi perempuan dan politik. Signifikansi hubungan antara PKS sebagai struktur yang berpengaruh terhadap perempuan PKS sebagai agen dalam studi politik dikemukakan oleh Colin Hay⁴⁴. Menurutnya, pendekatan institusional yang terlalu meletakkan lembaga sebagai aktor penting dalam studi politik menafikan peran penting individu sebagai aktor yang juga berperan dalam kehidupan politik. Sementara itu pandangan kelompok behavioralis yang mengasumsikan bahwa individu adalah aktor politik independen yang selalu dapat membuat pilihan-pilihan tindakan yang rasional menafikan pengaruh struktur yang merupakan lingkungan dimana individu tinggal.

Selain itu Moya Lloyd⁴⁵ menyatakan bahwa studi tentang perempuan dan politik harus kembali difokuskan pada lokasi dimana persaingan kekuasaan (antara laki-laki dan perempuan) terjadi, yaitu dalam partai politik. Seperti diketahui bahwa postmodernisme dan post-strukturalisme yang menjadi keyakinan ideologis feminis post-strukturalis telah berhasil mendekonstruksi studi politik sampai tingkat yang disebut sebagai "*the end of politics*". Hal ini disebabkan penganut kedua ideologi ini menganggap bahwa semua sikap dan tindakan individu adalah tindakan politik sehingga tidak ada batas mana sikap dan tindakan politik dan mana yang tidak. Tulisan ini mengkritisi pandangan tersebut dengan meletakkan partai sebagai supra struktur politik terpenting sebagai tema bahasan. Studi tentang perempuan dalam relasi kekuasaan politik harus meletakkan batas yang jelas mengenai mana yang merupakan wilayah studi politik dan mana yang tidak.

Ketiga, seperti dinyatakan lebih lanjut oleh Lloyd bahwa sebuah studi tentang politik penting untuk mengungkap mengenai bagaimana "*power and domination*" terjadi,⁴⁶ maka studi ini juga mempermasalahkan mengenai bagaimana "*power and domination*" (antara pejabat struktur PKS dengan perempuan PKS) terjadi dalam pengelolaan partai dan dalam proses pencalonan anggota legislatif Partai Keadilan Sejahtera. *Keempat*, jika studi tentang

⁴³ Lihat Tabel 4 dan Tabel 5 Lampiran.

⁴⁴ David Marsh dan Gerry Stiker. 1997. *Theory and Methods in Political Science*. New York: ST. Martin's Press Inc.

⁴⁵ Moya Lloyd. 2005. *Beyond Identity Politics, Feminism, Power and Politics*. London Sage Publication. Hal. 2.

⁴⁶ *Ibid*

perempuan dan politik pada umumnya mengasumsikan bahwa perempuan mempunyai pengalaman politik yang sama, yaitu mengalami diskriminasi dalam kehidupan politik, studi ini justru dimaksudkan untuk mencari keragaman pengalaman dan kemampuan perempuan mempengaruhi proses politik di partai (PKS) dan dalam proses pencalonan anggota legislatif 2009.

Secara singkat, buku ini diharapkan dapat memberi kontribusi tentang studi-studi tentang perempuan dan politik di PKS dengan memotret dari sudut pandang yang lebih komprehensif dengan teori yang masih cukup baru. Hal ini perlu dikemukakan secara khusus karena buku-buku tentang perempuan dan politik yang mengangkat paradigma feminisme liberal terlalu mengabaikan latar belakang jenis kelamin dengan menganggap siapapun, baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk berperan dalam kehidupan politik. Sementara itu tulisan tentang perempuan dan politik berparadigma feminisme radikal justru menjadikan perbedaan jenis kelamin (antara laki-laki dan perempuan) sebagai satu-satunya faktor penjelas perbedaan posisi perempuan dalam hubungan kekuasaan politik. Bagi para feminis radikal, jenis kelaminlah yang menyebabkan perempuan mengalami diskriminasi dalam kehidupan politik, bukan faktor yang lain.

Patriarkhi: konsep dasar untuk menjelaskan hubungan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan

Patriarkhi dalam literatur perempuan dan politik sering dimaknai sebagai *male supremacy/dominance* atau supremasi/dominasi laki-laki. Hal ini antara lain dikemukakan oleh Vicky Randal⁴⁷ yang menyatakan bahwa analisis feminisme kontemporer menjadikan patriarkhi sebagai tema sentral analisisnya. Menurut Randal, patriarkhi berasal dari bahasa Latin "*patriarches*" yang berarti "*head of the tribe*" atau pemimpin kelompok suku. Istilah ini mendapat referensinya dalam *the Old Testament* atau Kitab Perjanjian Lama yang menggambarkan patriarkhi sebagai *tribal heads* (para pemimpin suku), yang dalam perkembangannya kemudian, istilah ini dipakai untuk merujuk para *pemimpin paling kuat dalam struktur gerja Kristen*, termasuk Sri Paus. Dalam studi politik, istilah ini dikembangkan oleh Robert Filmer, seorang teoritis politik konservatif, yang mengemukakan konsep *patriarchism* sebagai *sistim kepemimpinan dimana kekuasaan tertinggi raja ditiru dan diperkuat oleh ayah dalam rumah tangganya*. Sementara itu, McDonagh dan Harrison menyatakan bahwa patriarkhi adalah "*a specific relation of domestic production, in which the head of the household owned or controlled the means of production and organized the labour of its members*", dan Weber menyatakan bahwa patriarkhi adalah "*a particular form of household organization in which the father dominated other members of an extended kinship network, and controlled the economic production of the household*"⁴⁸

⁴⁷ Vicky Randal. 1987. *Women and Politics. An International Perspective*. Chicago: University of Chicago Press. Hal. 19-21

⁴⁸ *Ibid.* hal. 19

Meski berbagai definisi ini tidak sama persis, tetapi mereka memiliki kesamaan dalam hal bahwa patriarkhi berarti adanya kekuasaan dan kewenangan laki-laki kepala keluarga, dimana kekuasaan itu ditiru dari kekuasaan raja dan direfleksikan dalam wilayah yang lebih luas, yaitu *kinship network* (jaringan kekerabatan). Patriarkhi yang dari akar katanya sebenarnya menerangkan tentang struktur kekuasaan dalam keluarga, pada akhirnya mempunyai pengaruh cukup besar terhadap struktur kekuasaan dalam dunia publik. Hal ini terjadi karena dari awalnya memang struktur patriarkhis keluarga ditiru dari kekuasaan raja.

Merujuk pada pendapat Randal di muka, maka konsep patriarkhi mempunyai akar sejarah yang sangat panjang. Dia berakar pada masyarakat suku-suku, ketika konsep negara nasional belum dikenal. Hal ini terlihat dari makna kata yang berarti *head of the tribe*. Masyarakat suku-suku meletakkan kekuasaan yang sangat besar pada ayah dan juga *head of the tribe* karena secara faktual aspek keselamatan fisik keluarga dan masyarakat sangat bergantung kepada laki-laki. Hal ini terjadi pada masyarakat *hunting and fishing*. Domestikasi perempuan sangat menonjol pada tahap perkembangan masyarakat ini.

3. Bagi para feminis, patriarkhi pada umumnya diartikan sebagai “*rule by men*” (pemerintahan/aturan oleh laki-laki) atau *male power over women*. Munculnya pemikiran bahwa dunia publik perlu diatur oleh laki-laki bersumber dari adanya pemikiran bahwa patriarkhi merupakan kekuasaan yang disediakan khusus untuk (*is reserved for*) laki-laki atas dasar kekuasaan/kewenangan laki-laki dalam rumah tangga. Menurut Vicky Randal apapun istilahnya, apakah patriarkhi, dominasi atau supremasi laki-laki, kesemua istilah tersebut berarti adalah dominasi (laki-laki atas perempuan) yang mempunyai implikasi-implikasi yang sangat luas.⁴⁹

Patriarkhi yang menyebabkan dominasi laki-laki atas kehidupan politik bertentangan dengan demokrasi karena menghalangi adanya kerjasama yang sungguh antara laki-laki dan perempuan dalam pengelolaan masalah-masalah kemasyarakatan dan politik. Hal ini sesuai dengan *Universal Declaration on Democracy* yang berbunyi:

*The achievement of democracy presupposes a genuine partnership between men and women in the conduct of the affairs of society in which they work in equality and complementarity, drawing mutual enrichment from their differences*⁵⁰

Dalam buku Judith Squires digambarkan bahwa asumsi-asumsi cara berfikir patriarkhis bahkan telah menghalangi munculnya pemikiran dalam teori politik yang sensitif terhadap cara pandang feminis. Dengan demikian patriarkhi dan asumsi-asumsi patriarkhis bukan hanya menghambat munculnya sikap dan tingkah laku yang sensitif terhadap kebutuhan perempuan, tetapi juga menghalangi munculnya pemikiran yang sensitif terhadap perbedaan laki-laki dan perempuan. Dalam hal ini, pemikiran dan teori politik telah memisahkan dengan tegas dunia *public versus privat*, dimana selama ini politik diasumsikan sebagai

⁴⁹ Vicky Randal. *Op.cit.* hal 20

⁵⁰ Council of the Inter-Parliamentary Union. 1997. *Universal Declaration on Democracy*.

peristiwa terkait dengan dunia publik, sehingga patriarkhi bukanlah peristiwa politik karena dia terjadi di dunia privat.⁵¹ Tetapi jika politik dilihat dari sisi *power* atau kekuasaan dan semua manifestasi tentangnya, maka patriarkhi sebagai *the power of man over woman* baik dalam ranah publik maupun privat tentulah merupakan manifestasi politik juga.

Patriarkhi bukan hanya mencegah munculnya pemikiran yang responsif gender, tetapi juga menimbulkan ketidakadilan sosial karena adanya struktur dan kultur sosial yang membenarkan hegemoni laki-laki atas perempuan. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan Muhajir Darwin sebagai berikut:

Masalah ketidakadilan sosial berdasar identitas gender terkait dengan struktur dan kultur sosial yang cenderung membenarkan hegemoni dan diskriminasi dari pihak yang dominan kepada tersubordinasi. Struktur sosial yang meletakkan laki-laki pada posisi dominan dan perempuan pada posisi subordinat menjadi kokoh karena didukung oleh nilai-nilai patriarkhis yang hidup di masyarakat.⁵²

Patriarkhi pada masa sekarang diyakini para feminis bukan sekedar sebagai sebuah organisasi sosial, tetapi telah menjadi keyakinan atau ideologi yang mempengaruhi pandangan, sikap dan tindakan politik individu. Meski demikian, berbeda dengan pandangan Vicky Randal yang lebih melihat patriarkhi sebagai sebuah dogma seragam yang ditandai dengan supremasi laki-laki atas perempuan, Moya Lloyd⁵³ justru melihatnya sebagai sebuah fenomena yang tidak seragam. Relasi perempuan dan laki-laki dalam struktur kekuasaan tidaklah seragam, tetapi dinamis⁵⁴. Relasi ini berubah menurut waktu, menurut konteks kejadian dan menurut aktor-aktornya. Perubahan menurut waktu berarti bahwa tingkat supremasi laki-laki atas perempuan pada sesuatu waktu berbeda dengan waktu lainnya. Perubahan menurut konteks kejadian berarti tingkat supremasi pada kondisi tertentu berbeda dengan kondisi yang lain; dengan demikian dalam hal-hal tertentu tingkat supremasi tersebut menguat tetapi melemah pada hal-hal lainnya. Perubahan menurut aktor berarti tingkat supremasi seorang (laki-laki terhadap perempuan) akan berbeda dengan orang lainnya. Dengan demikian tingkat subordinasi seorang perempuan akan berbeda dengan perempuan lainnya. Bahkan dalam hal tertentu mungkin seorang perempuan menjadi lebih dominan dibanding laki-laki. Misalnya kebijakan-kebijakan partai mengenai masalah perempuan dan anak mungkin didominasi perempuan karena perempuan diasumsikan memiliki pemahaman dan pengalaman yang lebih baik dibanding laki-laki menyangkut masalah yang dekat hubungannya dengan dunia domestik⁵⁵; tetapi sejauhmana dominasi perempuan terhadap kebijakan partai mengenai masalah perempuan dan anak tersebut akan tergantung kepada masing-masing perempuan.

⁵¹ Judith Squires. 1999. *Gender in Political Theory*. Cambridge: Polity Press. Hal. 12

⁵² Muhajir Darwin dan Tukiran. 2001. *Menggugat Budaya Patriarkhi*. Yogyakarta: Ford Foundation dan Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gadjah Mada. Hal. 252.

⁵³ Moya Lloyd. *Op.cit.* hal. 5.

⁵⁴ Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai asumsi bahwa patriarkhi adalah hubungan kekuasaan yang dinamis, dipaparkan lebih lanjut dalam penjelasan mengenai konsep "*subject in process*" dalam proposal ini juga.

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Muzammil Yusuf, anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Jakarta, 12 Januari 2007.

Kecenderungan dominasi suatu kelompok tertentu dalam partai dapat dijelaskan dengan menggunakan teori oligarkhi. Robert Michels⁵⁶, menggunakan sudut pandang sosiologi politik sampai kepada kesimpulannya yang terkenal tentang *The Iron Law of Oligarchy*, sebuah "hukum" yang berisi diktum bahwa kecenderungan oligarkhis tidak akan pernah dapat dihindari oleh setiap organisasi, tidak peduli apapun organisasi tersebut, termasuk partai politik. Dengan "hukum" ini, Michels menolak argumen bahwa secara internal partai politik akan dapat bersikap demokratis. Partai politik selalu akan membutuhkan para ahli organisasi untuk melakukan pengelolaan partai. Para ahli ini akhirnya akan menjadi sekelompok kecil *oligarch* yang selalu mempertahankan kepentingan dan posisinya.

Sementara itu posisi perempuan dalam relasi kekuasaan di partai sebagai sebuah fenomena yang tidak tunggal karena adanya perbedaan diantara kelompok perempuan sendiri dapat dijelaskan dengan menggunakan teori Sartori tentang partai politik dari sisi rivalitas antar sub-unit dalam partai. Sartori mengatakan:

*Whatever the organizationa -formal and informal- arrangement, a party is an aggregate of individuals forming constelations of rival groups. A party may even be, when observed from inside, a loose confederation of sub-parties. At the other extreme, the totalitarian also contains an informal group structure often characterized by intense group struggle. And these inner-party divisions, along with the kind of interactions thus resulting, are in themselves a distinct and crucial area of concern.*⁵⁷

1.5.2 Variasi Patriarkhi dalam Partai Beridiologi Islam

Cara pandang masyarakat barat terhadap posisi perempuan dalam masyarakat Islam yang menurut Winter⁵⁸ dibedakan menjadi tiga bukanlah sebuah hal yang aneh. Hal ini didasari kenyataan adanya variasi dunia Islam sendiri dalam menempatkan perempuan dalam dunia publik, terlebih-lebih dunia politik dan negara. Berdasarkan elaborasi atas berbagai referensi dan hasil-hasil penelitian terdahulu⁵⁹, cara pandang masyarakat Islam tersebut dapat dibedakan menjadi beberapa kelompok, yaitu:

1. Kelompok pandangan yang menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai peran yang berbeda karena keduanya berbeda. Pendapat Murtadha Muthahari⁶⁰, misalnya dapat dimasukkan dalam klasifikasi ini. Dalam padangan ini, laki-laki dan perempuan adalah ibarat matahari dan bulan yang saling melengkapi, tetapi keduanya beredar pada orbitnya masing-masing, tidak saling mencampuri, masing-masing melaksanakan tugas dan fungsi yang berbeda. Orbit laki-laki adalah dunia publik, dan orbit perempuan adalah dunia domestik. Mencampur-adukan keduanya

⁵⁶ Robert Michels, *The Iron Law of Oligarchy*, dalam Bernard E. Brown, 2006. *Comparaitve Politics. Notes and Readings*. Belmont, California: Thomson Wadsworth. Hal. 312-317.

⁵⁷ *Ibid.* Hal. 72

⁵⁸ Bronwyn Winter. 2001. *Fundamental Misunderstandings: Issues in Feminist Approaches to Islamism. Journal of Women's History*. Indiana: Indiana University Press.

⁵⁹ Beberapa sudut pandang tersebut lebih lanjut dikutip dalam pernyataan-pernyataan berikutnya dalam penelitian ini juga.

⁶⁰ Murtadha Muthahari. 2000. *Hak-Hak Wanita dalam Islam*. Jakarta: Lentera

hanya akan menyebabkan kehancuran umat manusia, karena manusia tidak lagi memiliki batas mengenai apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Contoh yang pada umumnya diambil mengenai kerusakan umat manusia sebagai akibat tidak adanya pemisahan ini adalah apa yang terjadi di dunia barat, yang menurut Muthahari dinyatakan bahwa alih-alih memperoleh kesejahteraan, perempuan di dunia barat justru semakin sengsara dengan berbagai beban hidup. Perempuan di dunia barat justru dieksploitasi dan tidak dilindungi sebagaimana mereka seharusnya dilindungi menurut ajaran Islam.

2. Pandangan kebalikan dari yang pertama yang justru menyatakan bahwa pemisahan perempuan dari urusan publik berasal lebih dari kesalahan interpretasi ajaran Islam dan bukan dari ajaran Islam. Fatima Mernisi⁶¹ misalnya dengan caranya yang unik berhasil membongkar bahwa tradisi *misogyny* (membenci perempuan) lebih disebabkan oleh adanya kesalahan interpretasi terhadap ajaran Islam, atau interpretasi ajaran Islam tersebut dipengaruhi kepentingan orang yang melakukan interpretasi; karenanya menurut Mernisi ajaran Islam perlu diinterpretasikan kembali dengan cara pandang yang lebih adil dilihat dari sisi sudut pandang perempuan dan laki-laki. Dia memberi contoh mengenai hijab (kain yang memisahkan jamaah wanita dari jamaah laki-laki di masjid) yang menurutnya justru turun untuk memberi peringatan kepada kaum laki-laki yang tidak sopan pada malam perkawinan nabi (dengan demikian hijab adalah untuk memisahkan dua laki-laki, yaitu nabi di ruang tidurnya dengan laki-laki para tamunya yang masih saja bertandang meski hari sudah larut malam, dan bukan dimaksudkan untuk memisahkan perempuan dari laki-laki). Interpretasi baru ini jelas menunjukkan bahwa Islam tidak menghendaki pemisahan perempuan dari urusan publik. Meski berbeda dengan Fatima Mernisi dalam sikapnya terhadap feminisme, Najmah Sa'idah dan Husnul Khotimah⁶² juga berpandangan bahwa dunia publik adalah tanggung-jawab perempuan karena perempuan memikul beban yang sama dengan laki-laki bagi keberlangsungan dan kesejahteraan masyarakat manusia
3. Pandangan yang menyatakan bahwa perempuan berhak untuk terjun ke dunia publik hanya setelah tugas utamanya di dunia domestik terselesaikan. Berbagai penelitian yang dikutip dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pandangan kebanyakan politisi laki-laki dalam PKS dan PBB serta PAN menunjukkan pandangan seperti ini⁶³.

Pengklasifikasian atas dasar tulisan dalam beberapa buku dan hasil penelitian seperti ini mirip dengan pengklasifikasian yang dibuat oleh Yusuf Qardawi. Yusuf Qardawi menjelaskan terdapat tiga kelompok besar pandangan tentang peran publik dan peran politik perempuan. Kelompok pertama adalah kelompok yang sama sekali tidak menginginkan peran publik dan peran politik perempuan. Menurut kelompok ini perempuan hanya melakukan 3 macam perjalanan, yaitu perjalanan kelahiran ke dunia, perjalanan dari rumah orang tua ke rumah suami,

⁶¹ Fatima Mernisi. 1997. *Menengok Kontroversi Peran Wanita dalam Politik*. Surabaya: Dunia Ilmu. Hal. 54-105

⁶² Najmah Sa'idah dan Husnul Khatimah. 2003. *Revisi Politik Perempuan. Bercermin pada Shahabiyat r.a.* Bogor: IdeA Pustaka

⁶³ M. Deden Lily Qz. 2004. Yonalita Vevia. 2003.

dan perjalanan dari rumah suami ke liang kubur. Kelompok kedua merupakan kebalikan kelompok pertama. Kelompok kedua berpandangan bahwa karena tidak ada perbedaan penciptaan perempuan dengan laki-laki, maka perempuan berhak atas semua hak yang dimiliki laki-laki. Kelompok ketiga adalah kelompok moderat yang menginginkan batasan-batasan tertentu atas peran publik dan peran domestik perempuan.

Sebagaimana menjadi keyakinan Judith Squires dan Moya Lloyd, maka hubungan subyek-politik (dalam partai) yang mencerminkan patriarki tidaklah bersifat tunggal dan juga tidak statis. Dia bersifat dinamis dan tergantung pada siapa yang memandang, terhadap apa, kapan, dan dalam konteks apa. Laki-laki dan perempuan pada umumnya diasumsikan mempunyai pandangan yang berbeda diametral, tetapi bahkan diantara masing-masingpun juga terdapat pandangan-pandangan yang berbeda. Posisi subyek obyek antara laki-laki dan perempuan dan diantara masing-masingpun tidaklah tunggal, dia tergantung terhadap apa patriarki tersebut dilihat. Dalam hal pengambilan keputusan yang “bersifat domestik dalam partai”, misalnya, perempuan dapat mempunyai peran yang besar, tetapi tidak besar misalnya dalam hal pencalonan dan jabatan-jabatan strategis. Waktu juga akan mempengaruhi hubungan subyek-politik. Hari ini subyek mungkin dominan, tetapi tidak pada hari lain. Patriarki dinamis menurut waktu dan tidak statis. Dilihat dari konteks kejadian, diantara perempuan sendiri kecenderungan dominasi perempuan akan terlihat, tetapi tidak jika berhubungan dengan laki-laki. Perempuan cenderung tidak malu menunjukkan dominasi diantara sesamanya, tetapi segan menunjukkannya jika bersama dengan kelompok yang berbeda. Hal ini akan sangat tergantung kepada aspek apa yang ingin ditonjolkan untuk diketahui oleh orang lain dari seorang subyek dan aspek-aspek apa yang justru ingin disembunyikan.

Dalam hal dinamika hubungan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan di PKS dalam proses pencalonan anggota DPR, maka dinamika posisi subyek-politik itu akan ditentukan oleh:

1. keyakinan ideologis yang menjadi dasar pandangan, sikap dan tindakan politik baik dari laki-laki pengurus PKS maupun dari kalangan perempuan PKS sendiri.
2. perbedaan-perbedaan kemampuan politik diantara perempuan PKS dilihat dari posisi yang berhasil dicapai dalam struktur kewenangan di PKS dan pengaruh mereka terhadap kebijakan-kebijakan partai menyangkut proses pencalonan anggota DPR Periode 2009-2014. Perbedaan ini menunjukkan dimensi *multiple subject* diantara perempuan.
3. ciri-ciri atau sifat-sifat kepemimpinan politik yang pada umumnya dianggap ciri atau sifat yang melekat pada laki-laki yang pada umumnya belum dimiliki oleh perempuan. Dengan kata lain dinamika juga ditentukan oleh sejauhmana perempuan masih menunjukkan karakter sebagai *subject of lack*.
4. ciri-ciri dan sifat-sifat yang diasumsikan melekat pada perempuan dan ingin dibuang karena menghambat perempuan menjadi subyek politik yang setara laki-laki (*deferred subject*).

Feminisme: Pendekatan untuk Menjelaskan Perkembangan Teoritik dalam Studi tentang Perempuan dan Politik

Menurut Vicky Randal⁶⁴ feminisme terbagi menjadi 3, yaitu feminisme reformis, radikal, dan sosialis/marxis. *Feminisme Reformis*. Kelompok yang paling kuat dalam tradisi feminisme reformis adalah kalangan *feminis liberal* di Amerika Serikat. Kelompok ini terbagi dua kubu dalam melihat hubungan gender. Kelompok pertama melihat bahwa perempuan harus mengadakan perubahan sosial secara radikal sebelum perempuan "dapat dimerdekakan", karena itu perempuan harus mempunyai organisasi terpisah dari laki-laki. Kelompok kedua melihat bahwa masalah yang dihadapi perempuan dalam hubungan gender hanya bersifat "minor" atau tidak terlalu substansial, karena itu yang penting dilakukan adalah perjuangan untuk adanya perubahan perundangan dan kebijakan yang dapat diperoleh melalui lobby tingkat rendah dan dilakukan oleh individu⁶⁵.

Feminisme Radikal Dalam pandangan penganut *feminisme radikal* (radical feminism),

sex is the fundamental division in society to which all other differences, such as social class or race are merely secondary. Radical feminists have argued that,, there has always been a sexual division of labour underpinning and reinforced by systematic male dominance or "patriarchy" (jenis kelamin merupakan pembagian utama dalam masyarakat yang menjadi dasar perbedaan-perbedaan lainnya. Para feminis radikal berargumentasi bahwa selalu terjadi pembagian kerja atas dasar jenis kelamin yang melandasi dan diperkuat oleh dominasi laki-laki atau disebut "patriarki")⁶⁶.

Feminisme Marxist/sosialis. Feminis Marxist/sosialis berpendapat bahwa *"the struggle between the sexes could not be reduced to its parameters, but had a history of its own and would not automatically disappear with the overthrow of capitalism* (bahwa perjuangan antar jenis kelamin tidak dapat diturunkan ke arah parameter-parameternya, tetapi dia mempunyai sejarah sendiri yang tidak akan hilang dengan dihapuskannya kapitalisme). Pandangan ini dengan tegas menyatakan bahwa relasi perempuan dan laki-laki dan subordinasi perempuan dalam hubungan tersebut tidak akan secara otomatis menghilang ketika masyarakat yang lebih luas berhasil menghapuskan hubungan struktural yang timpang antara pemilik modal dan buruh. Alasan utamanya adalah masalah terkait dengan peran reproduksi dan otonomi ideologi yang hampir tidak pernah dapat dipertahankan perempuan dalam konteks hubungan dengan laki-laki, membuat perempuan akan selalu bergantung kepada laki-laki.⁶⁷

Dalam buku yang sama, Vicky Randal⁶⁸ lebih lanjut menyatakan bahwa makna feminisme akhirnya sangat tergantung pada konteks pembahasannya. Feminisme dapat berupa "ideologi", tetapi juga dapat berupa strategi dan taktik.

⁶⁴ Vicky Randal. *Op. cit* hal. 10.

⁶⁵ *Ibid*, hal. 9

⁶⁶ *Op.cit.* hal. 6

⁶⁷ *Ibid*, hal 8

⁶⁸ *Ibid.* hal 9

Feminisme bisa berwajah radikal, Marxist/sosialis atau reformis, bahkan juga "gerakan *backlash*"⁶⁹ (yang sebenarnya justru antifeminisme karena tuntutan utamanya justru adalah "mendomestikkan kembali" perempuan dari peran publiknya). Feminisme bisa berupa strategi dan taktik melalui mana perempuan dan kelompok perempuan (termasuk laki-laki yang memperjuangkan kepentingan perempuan) memperjuangkan kepentingan perempuan.

Pandangan yang sama mengenai pembagian feminisme dalam tiga kelompok besar juga dipegang oleh Valerie Bryson.⁷⁰ Dalam bukunya, Bryson membagi feminisme dalam tahapan waktu, dari *early feminist thought*, ke *liberal feminism*, *socialist* dan *marxist feminist*, serta *modern feminist thought* (yang dibagi lebih lanjut menjadi *modern liberal feminism*, *modern socialist marxist feminism* dan *modern radical feminism*).

Dalam buku yang berbeda, Myra Marx Ferree dan Beth B Hess⁷¹ juga mengklasifikasikan feminisme dengan cara yang sama dengan Vicky Randal, yaitu dengan membaginya dalam tiga kelompok utama, radikal, Marxist/sosialis dan liberal. Meski demikian mereka menambahkan kategori keempat, yaitu feminisme karir (*career feminism*) dengan fokus perjuangan pada "desegregating the labor force" atau memisahkan kelompok tenaga kerja. Beberapa masalah yang mendapat perhatian kelompok feminisme karir ini antara lain adalah soal "ghetto" para pekerja perempuan yang sering berfungsi sebagai wilayah pelecehan perempuan, masalah hubungan serikat buruh dan pekerja perempuan (yang tidak otomatis memperjuangkan kepentingan buruh perempuan), masalah perlunya pengembangan jaringan kerja dan pelatihan khusus bagi buruh perempuan (yang seringkali jenis kerja dan ketrampilan yang dibutuhkan berbeda dari buruh laki-laki), masalah kekerasan dan pelecehan terhadap buruh perempuan (persoalan yang hanya dihadapi buruh perempuan dan bukan buruh laki-laki), dan isu-isu sejenis.

Dalam penelitian ini feminisme akan dipergunakan bukan semata-mata sebagai dasar konsepsi untuk melihat hubungan gender dalam pengelolaan partai politik, tetapi juga untuk melakukan analisis mengenai bagaimana masing-masing aktor yang berbeda dalam partai politik (laki-laki dan perempuan) melihat asal mula perbedaan kekuasaan laki-laki dan perempuan dan refleksinya dalam ideologi yang diyakini, ciri-ciri apa yang dianggap merupakan representasi jenis kelamin, bagaimana mereka meletakkan prioritas-prioritas apa yang ingin dicapai dengan keterwakilan politik perempuan (apakah perubahan kebijakan, peningkatan partisipasi, "pembebasan perempuan", atau merubah "way of life" partai politik) serta sikap dan tindakan sebagai refleksi keyakinan tersebut.

Sebagai sebuah pemikiran, feminisme telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Judith Squires⁷² menyatakan bahwa orientasi studi feminisme telah mengalami tiga jenis *trajectories* atau perkembangan, yaitu studi-studi yang bersifat *inclusion*, mempertanyakan mengenai bagaimana perempuan dapat lebih terlibat dalam dunia politik, ahlinya disebut sebagai

⁶⁹ Myra Marx Ferree dan Beth B Hess, 1985, *Controversy and Coalition: the New Feminist Movement*, G.K. Hall & Company, hal. 142-149.

⁷⁰ Valerie Bryson. 1992. *Feminist Political Theory. An Introduction*. Houndmills, Basingstoke, Hampshire: The Macmillan Press

⁷¹ Myra Marx Ferree dan Beth B. Hess. 19 5. *Op. cit.* hal 141-169

⁷² Judith Squires. *Op. cit* hal. 7-20.

feminis liberal; bersifat *reversal*, mempertanyakan bagaimana perempuan ”menggantikan” peran-peran yang semula didominasi laki-laki, ahlinya sering disebut feminis radikal; dan *displacement*, yang berorientasi pada mendestabilisasi oposisi yang sangat jelas dari kelompok inklusif dan reversal,

*speak of subject positions and of gendering (as a verb) rather than gender (as a noun) and espouse a diversity politics. They (catatan: teoritis displacement) are often labelled as postmodern or post-structuralist feminists*⁷³.

Karena itu klasifikasi studi feminisme versi Judith Squires berbeda dengan Vicky Randal dalam hal klasifikasi tentang post-modernisme dalam studi feminisme. Vicky Randal mengklasifikannya dalam tiga jenis, yaitu liberal, radikal dan Marxist/sosialis, sementara Judith Squires mengklasifikasikan dalam kelompok liberal, radikal dan post-modernis/post-strukturalis. Studi ini lebih banyak menggunakan konsepsi Squires, sebab lebih berorientasi teoritis dibanding praktis (melihat feminisme sebagai sebuah landasan pemikiran tentang gerakan) yang menjadi latar belakang tulisan Vicky Randal.

Kerangka pemikiran dalam tulisan ini dibangun atas dasar teori Moya Lloyd tentang subyek-dalam proses. Menurut Lloyd,⁷⁴ feminisme liberal dan feminisme radikal sama-sama gagal menjelaskan fenomena hubungan perempuan dengan kekuasaan politik. Para penganut feminis liberal mempunyai asumsi bahwa setiap manusia memiliki hak dan kebebasan individual yang sama. Karena itu individu yang menentukan sendiri apakah akan memanfaatkan hak dan kebebasan tersebut atau tidak. Sukses dan gagalnya seseorang ditentukan oleh orang itu sendiri. Feminis liberal berasumsi bahwa negara dan struktur di luar individu bukanlah faktor penting yang berpengaruh terhadap individu karena semua individu dilahirkan dalam kondisi bebas.

Dalam hal penjelasan tentang perempuan dalam hubungan kekuasaan di PKS, penganut feminis liberal akan menjelaskan bahwa partai, dalam hal ini PKS, adalah struktur netral yang tidak akan memiliki perbedaan pandangan, sikap dan tindakan berkenaan dengan semua hak politik, baik hak politik laki-laki maupun perempuan. Penganut feminis liberal akan menjelaskan bahwa baik laki-laki maupun perempuan PKS adalah individu-individu yang dilahirkan dalam kondisi yang sama, bebas. Mereka memiliki hak yang sama atas kekuasaan, dan pencapaian hak tersebut tergantung kepada individu-individu yang bersangkutan.

Asumsi seperti ini ditolak oleh T Gitlin yang menyatakan bahwa semua kelompok, masyarakat, dan asosiasi yang oleh kaum liberal diasumsikan sebagai selalu sehat dan berfungsi dalam masyarakat madani dan berasal dari pilihan-pilihan bebas. Kelompok pejuang politik identitas berasumsi sebaliknya dengan menyatakan bahwa kepercayaan dan nasib seseorang itu ditentukan oleh keseluruhan identitas pribadi seseorang yang sudah ditentukan oleh satu kekuatan dan pilihan mutlak dari luar dirinya yang tidak bisa ditolaknyanya. Hal ini terlihat dari pernyataan T Gitlin berikut:

The clubs, societies and associations that liberals regard as healthy and functional to civil society arise from oncoerced choices. Identity-based groupings, by contrast, promote a sectarian and deterministic logic

⁷³ *Ibid* hal. 3.

⁷⁴ Moya Lloyd, *op. cit.* hal. 5-22

*whereby one arbitrary, unchosen part of a person's overall identity is rendered a defining feature of their beliefs and destiny.*⁷⁵

Lloyd juga menolak argumen feminis radikal yang berasumsi bahwa semua diskriminasi yang dialami perempuan disebabkan perbedaan jenis kelamin. Dalam pandangan feminis radikal, semua perempuan mengalami diskriminasi, subordinasi dan marginalisasi karena mereka perempuan. Faktor lain di luar faktor jenis kelamin tidaklah penting dalam menjelaskan diskriminasi, subordinasi dan marginalisasi yang dialami perempuan.

Menurut Lloyd, kedua argumen (feminis liberal dan feminis radikal) gagal menjelaskan fenomena hubungan perempuan dengan kekuasaan politik. Menurutnya struktur di luar individu perempuan, dalam hal ini PKS, bukanlah struktur netral yang tidak memiliki kepentingan terhadap hak-hak politik perempuan. Partai adalah struktur dengan ideologi, mekanisme, sikap dan tindakan yang tidak selalu netral. Meski demikian dia juga menolak argumen bahwa perempuan dalam partai pasti mengalami pengalaman diskriminatif yang sama. Menurut Lloyd, hubungan perempuan dengan kekuasaan dalam partai bersifat *mobile*, selalu dalam proses perubahan. Karena itu Lloyd menyusun argumen bahwa posisi perempuan dalam relasi kekuasaan politik itu adalah selalu dalam proses berubah. Dia menyebut perempuan adalah *subject-in process*.

Teori Lloyd tentang perempuan sebagai subyek-dalam proses dibangun atas 5 konsepsi,⁷⁶ yaitu perempuan sebagai subyek jamak dengan berbagai peran (*the multiple subject*), perempuan sebagai subyek dengan berbagai pandangan atau citra diri (*the constituted subject*), perempuan subyek dengan berbagai tindakan politik (*the performative subject*), perempuan sebagai subyek dengan berbagai kelemahan (*the deferred subject*), dan perempuan dengan berbagai ciri yang diinginkan (*the subject of lack*). Kelim aspek inilah yang menurut Lloyd selalu berada dalam kondisi perubahan dan perlu dijelaskan untuk mengkaji posisi perempuan dalam relasi kekuasaan politik.

Apapun klasifikasi cabangnya, semua feminisme memiliki tujuan yang sama, yaitu memperjuangkan kepentingan perempuan. Dalam lingkup internasional, perjuangan kepentingan politik perempuan mendapatkan perhatian serius dari lembaga parlemen internasional. Sebuah studi yang dilakukan *Inter-Parliamentary Union/IPU* menunjukkan bahwa kehadiran perempuan dalam parlemen di negara-negara yang disurvei telah menunjukkan adanya berbagai perubahan, yaitu:

*a shift in political priorities and outcomes, emphasis on solution not power, changing the political process, a shift in political behavior and practices, a broader and enriched political process, politics more responsive to the people's needs, a better response to women's needs, a move towards true gender equality, better democracy, increased transparency, improved governance, a conciliatory human approach to politics, more confidence in politics from citizens, and an evolution in political and parliamentary language and mores.*⁷⁷

⁷⁵ Michael Kenny, *Op. cit.* hal 23

⁷⁶ Moya Lloyd, *op. cit.* hal 5-22

⁷⁷ Inter-Parliamentary Union, 2000. *Series "Reports and Documents" Number 36. Politics: Women's Insight.* Hal. 30-52

Perkembangan terbaru dalam perjuangan politik perempuan mencapai kesetaraan politik dengan laki-laki dilakukan melalui mekanisme yang disebut *affirmative action*. *Affirmative action* adalah tindakan yang diambil untuk mencapai kesetaraan posisi dengan cara memberi kompensasi atas diskriminasi, sub-ordinasi dan opresi atau tekanan yang didapat di masa lalu oleh satu kelompok tertentu dalam masyarakat. Berkenaan dengan *affirmative action*, Irish Marion Young mengupasnya secara panjang lebar. Pada intinya dia menyatakan bahwa *affirmative action* yang secara sepintas terlihat melanggar prinsip perlakuan setara, tetapi dia tetap dibutuhkan bukan hanya untuk memberi kompensasi atas diskriminasi yang terjadi di masa lalu, tetapi juga menciptakan keadilan sosial atas sub-ordinasi dan opresi atau tekanan yang muncul dalam bentuk pandangan *stereotype* dan tindakan-tindakan yang merugikan suatu kelompok. Hal ini dinyatakan Young dalam penjelasannya berikut:

Thus my discussion will be restricted largely to considering how affirmative action policies violate a principle of equal treatment, and to illustrating how much affirmative action discussion presumes a distributive paradigm of social justice....

*Many institutions have in good faith eliminated explicitly discriminatory practices, women and people of colour continue to be subject to often unconscious stereotypes, reactions, and expectations of decision makers. Affirmative action procedures are a necessary and just means of combating such assumptions and perceptions, which persist in excluding and disadvantaging women and people of colour.*⁷⁸

Meski demikian, perjuangan pencapaian kesetaraan posisi dengan laki-laki dalam hubungan kekuasaan akan tergantung kemampuan perempuan menggalang kekuatan bersama diantara mereka sehingga mereka dapat mempunyai posisi tawar untuk memperjuangkan perubahan yang diinginkan. Dalam hal ini menurut Simone de Beauvoir perempuan terhambat oleh kenyataan bahwa para perempuan tidak memiliki sarana nyata untuk mengorganisir diri menjadi unit yang kuat dalam berhubungan dengan laki-laki. Argumen de Beauvoir terlihat dalam pernyataannya berikut:

*Throughout history, they (catatan: perempuan) have always been subordinated to men..... They do not authentically assume a subjective attitude... The reason for this is that women lack concrete means for organizing themselves into a unit which can stand face to face with the correlative unit.*⁷⁹

Sementara itu Anne Philips mengemukakan argumen bahwa perjuangan perempuan dalam demokrasi berkenaan dengan perjuangan yang disebutnya sebagai "*the politics of presence*" (politik mengenai perlunya kehadiran perempuan di lembaga politik dan perwakilan). Hal ini dikemukakan oleh Anne Philips dalam pernyataannya berikut:

Many of the current arguments over democracy revolve around what we might call demands for political presence: demands for equal

⁷⁸ Irish Marion Young. 1990. *Justice and the Politics of Difference*. New Jersey: Princeton University Press. Hal. 194.

⁷⁹ Simone de Beauvoir. *Op. cit* hal. 30

representation of women with men; demands for political inclusion of groups that have come to see themselves as marginalized or silenced or excluded. In this major reframing of the problems of democratic equality, the separation between "who" and "what" is to be represented, and the subordination of the first to the second, is very much up for question. The politics of ideas is being challenged by an alternative politics of presence.⁸⁰

Berbeda dengan pandangan demokrasi liberal yang menganggap perbedaan dalam demokrasi semata adalah masalah perbedaan ide,⁸¹ Anne Philips berpendapat bahwa kelompok-kelompok yang termarginalisasi dan tersingkir dari lembaga perwakilan perlu hadir di dalamnya karena menurutnya:

We might all wish to be represented by people we regard as wiser or more able than ourselves, but, faced with a choice between someone more competent and someone whose views we can share, we usually feel safer in giving our support to the later.⁸²

Menurut Anne Philips, hanya orang yang memiliki kesamaan pandangan dengan kitalah yang benar-benar dapat kita percayai untuk mewakili kepentingan kita, bukan orang yang lebih berkompeten atau berkualitas. Jika harus memilih antara kompetensi dan kualitas dengan kesamaan pandangan, maka kesamaan pandanganlah yang lebih penting untuk perwakilan politik perempuan. Karena itu perlu ada perempuan yang mewakili kepentingan perempuan karena perempuanlah yang memiliki kesamaan pandangan dan kepentingan dengan perempuan lainnya.

Kesamaan pandangan sebagai prasyarat perwakilan politik adalah merupakan bagian dari strategi perjuangan identitas kelompok politik. Hal disebabkan karena perjuangan politik identitas menurut Hoover telah memberikan kepada individu-individu:

A connection to political projects based on elements that are very basic to their self conception. Members of these groups see themselves as having in common certain important characteristics that set them apart from the larger population- a commonality that is based on difference.⁸³

Menurut Hoover, perjuangan identitas suatu kelompok didasarkan pada fakta adanya karakteristik penting yang membuat sebuah kelompok terpisah dari populasi yang lebih besar. Kelompok ini memiliki kesamaan atas dasar perbedaan sifat dengan populasi yang lebih besar tersebut. *Group commonality* atau kesamaan kelompok adalah dasar dari perjuangan identitas kelompok. Menurut argument Hoover ini, perjuangan perempuan untuk kesetaraan politik adalah perjuangan kelompok perempuan untuk identitas dalam hubungan kekuasaan dengan laki-laki.

⁸⁰ Anne Philips. 1995. *The Politics of Presence*. Oxford: Oxford University Press. Hal. 5

⁸¹ *Ibid.* Hal. 1.

⁸² *Ibid.* Hal 1.

⁸³ *Ibid.*

Berkenaan dengan pendapat Hoover yang dikutip oleh Michael Kenny ini, perlu diulang kembali dalam hal ini apa yang diyakini Moya Lloyd tentang debat para feminis tentang hubungan antara identitas politik perempuan dan peristiwa politik yang melatarbelakanginya. Lloyd menyatakan:

*In this debate opponents tend to be ranked according to whether they see identity forming the basis of politics or politics forming the basis of identity. I argue that such a dichotomy reifies one side of the debate at the expense of the other and as such ignores the dynamic relationship between the two sides. Their relation is not one of opposition or negation; it is....an agonistic relation of tension and interplay.*⁸⁴

Karena itu menurut Lloyd, hubungan antara identitas sub kelompok dengan peristiwa politik yang terjadi tidaklah bersifat saling menegasi (saling meniadakan) dan juga tidak saling berlawanan, tetapi bersifat hubungan ketegangan dan permainan yang sulit dan menyakitkan, bukan sesuatu hubungan yang mudah dan nyaman.

Kaitan erat antara upaya represi atau penekanan terhadap kelompok dengan karakter tertentu dengan munculnya *identity based politics* (politik berdasar identitas tertentu) juga dikemukakan oleh Anne Philips untuk mendukung argumennya tentang perlunya *the Politics of Presence*. Philips mengemukakan:

*Contemporary demands for political presence have often arisen out of the politics of new social movements, and they reflect inequalities other than social class Women do not want to change their sex, or black people the colour of their skin, as a condition for equal citizenship; nor do they want their differences discounted in an assimilationist imposition of "sameness". ... The politics that characterizes this determinedly anti-paternalist, and reflects that explosion of self-confident and autonomous organization which developed in the civil rights movement in the USA, and the women's movements of the 1960s and 1970s.*⁸⁵

Perjuangan identitas diri perempuan menunjukkan bahwa identitas diri tersebut harus dibentuk, bukan sebuah sifat yang terjadi begitu saja. Hal ini sesuai dengan pernyataan Judith Butler yang disadur oleh Moya Lloyd:

*Butler argues that gender is performative.....This means that what we take to be an internal essence of gender is manufactured through a sustained set of acts, posited through the stylization of the body....gender is not an expression of what one is; it is something that one does.*⁸⁶

Untuk memperjuangkan identitas dirinya dalam dunia politik yang penuh pertentangan kepentingan, moderasi dan inklusifitas adalah ciri yang harus terus ditumbuhkan dan dipelihara karena dengan dua sifat inilah kepentingan perempuan bisa terakomodasi. Tanpa moderasi dan inklusifitas, maka partai secara otomatis akan lebih mengedepankan eksklusifitas kepentingan kelompok dominan. Hal ini dengan jelas dikemukakan oleh Judith Squires ketika dia mengemukakan argumennya tentang perlunya dua pendekatan pemberdayaan

⁸⁴ *Ibid*

⁸⁵ *Op. cit.* Hal. 8

⁸⁶ Moya Lloyd, *op.cit.* Hal. 25

politik untuk perempuan, yaitu pendekatan *the politics of ideas* dan *the politics of presence*. Esensi pendekatan yang dikehendakinya adalah adanya 4 (empat) argumen kunci yang harus diwujudkan., yaitu perlunya representasi sebagai simbol keberadaan perempuan, perlunya upaya menangkis ide lama bahwa kepentingan politik perempuan bisa diwakili siapa saja, perlunya upaya advokasi lebih keras untuk kepentingan politik kelompok yang lemah, dan penekanan politik transformasi terus-menerus agar kebijakan semakin terbuka. Dia menyatakan:

*I identify four key arguments which can be briefly summarized in terms of the importance of symbolic representation, the need to tackle those exclusion that are inherent in the party packaging of political ideas, the need for more rigorous advocacy on behalf of the disadvantage groups, and the importance of a politics of transformation in opening up the full range of policy options.*⁸⁷

Untuk mempertanyakan, apa yang semestinya menjadi fokus kajian jika kita membahas perempuan dalam relasi kekuasaan di partai perlu dikemukakan di sini pendapat Joni Lovenduski dan Pippa Norris tentang aspek gender dalam partai politik. Dalam buku mereka yang berjudul "*Gender and Party Politics*"⁸⁸, Lovenduski dan Norris membahas hubungan antara ideologi partai dengan struktur dan mekanisme partai; juga hubungannya dengan program partai. Program adalah menyangkut hal-hal apa yang akan dan tidak akan dilakukan oleh partai baik sebagai pencerminan ideologi maupun kepentingan yang lebih bersifat pragmatis. Sementara struktur partai adalah mengenai bagaimana dan siapa yang akan melakukan pengelolaan partai. Lebih lanjut Lovenduski dan Norris⁸⁹ menyatakan bahwa dilema muncul mengenai apakah perempuan yang harus mempengaruhi lembaga partai sebelum partai merubah sikapnya terhadap perempuan atau sebaliknya. Karena itu studi tentang perempuan dalam hubungan kekuasaan di partai politik perlu mengkonsentrasikan diri pada analisis mengenai bagaimana gender telah mempengaruhi politik partai dan bagaimana politik partai mempengaruhi pola partisipasi politik perempuan. Lebih lanjut keduanya menjelaskan bahwa analisis mengenai perkembangan bagaimana perempuan menyampaikan tuntutananya kepada partai politik meliputi aspek-aspek yang lebih rinci sebagai berikut: bagaimana issue tentang keadilan politik bagi perempuan dibawa ke dalam arena politik, bagaimana isu ini "dirubah" menjadi isu yang diterima umum, bagaimana perempuan membangun jaringan perempuan, bagaimana perempuan bekerja dalam dunia yang didominasi laki-laki, serta bagaimana perempuan memberi perhatian terhadap aturan-aturan partai dan mencoba merubah hubungan politik di dalam partai.

Keduanya juga menjelaskan bahwa respon partai dapat dilihat dari bagaimana partai merespon tuntutan keadilan untuk perempuan. Apakah partai menyesuaikan diri terhadap tuntutan keadilan bagi perempuan? Apakah program dan struktur partai disesuaikan dengan tuntutan perempuan? Apakah partai tidak sekedar melakukan retorika-retorika dan menjadikan isu keadilan bagi perempuan

⁸⁷ Judith Aquires. *Op. cit.* hal 25

⁸⁸ Joni Lovenduski dan Pippa Norris. 1993. *Gender and Party Politics*. London: Sage Publications, hal 12.

⁸⁹ *Ibid, hal.* 1-13.

sekedar untuk platform kampanye? Apakah partai melakukan diskriminasi positif atau melakukan *affirmative action*? Apakah partai memberi bantuan keuangan dan bantuan teknis lainnya? Apakah perempuan diberi tempat/posisi dengan kekuasaan khusus yang berpengaruh dalam pengambilan keputusan dalam partai? Apakah dalam *platform* ideologi partai terdapat tempat khusus bagi perempuan? Apakah aturan informal dan kebiasaan dalam partai bersifat sensitif gender?

Postmodernisme: Pendekatan Pilihan

Menetapkan jenis penelitian dalam studi tentang dinamika patriarki cukup sulit karena akan sangat ditentukan sudut pandang mana yang akan lebih dominan. Secara singkat, terdapat dua pendekatan yang sangat besar kemungkinannya untuk dipilih, yaitu studi kasus⁹⁰ atau pendekatan *postmodernis*⁹¹. Pendekatan studi kasus jika penelitian ditujukan untuk "menjelaskan dan memberi ilustrasi pada konsep, ... analisis menyeluruh terhadap satu kasus..... menganalisis hubungan antar bagian dari satu fenomena"⁹². Sementara itu pendekatan postmodernisme tepat digunakan jika dimaksudkan untuk melihat bagaimana aktor melihat kekuasaan melalui kacamata dirinya sendiri dan "about the nature of reality"⁹³ atau dalam hal penelitian ini adalah bagaimana aktor dalam partai melihat perempuan dalam hubungan kekuasaan dalam "kondisi senyatanya".

Postmodernis dalam studi gender dan politik mempertanyakan bagaimana patriarki terjadi, bukan "inclusion" (bagaimana perempuan dapat lebih terlibat dalam kehidupan) atau "reversal" (bagaimana perempuan menggantikan peran-peran politik yang selama ini didominasi laki-laki), tetapi "recasting power interaction" (mengemas kembali interaksi kekuasaan) atau bagaimana interaksi kekuasaan (antara laki-laki dan perempuan) terjadi dalam partai⁹⁴. Pertanyaan ini sekaligus "menggugat" mengapa patriarki sebagai sumber marginalisasi politik perempuan absen dari *text book* ilmu dan teori politik. Seperti dikatakan Judith Squires⁹⁵, patriarki yang berada dalam *private domain* memang tidak menjadi perhatian dalam "text book" ilmu politik yang dibangun di atas fondasi pandangan liberal (*defending the personal freedom against state authority*). Studi ini tidak mengambil sudut pandang postmodernisme yang mempunyai keyakinan bahwa "*personal is political*" karena harus ada batas yang jelas antara keyakinan, sikap dan tindakan individu yang masuk dalam dimensi politik dan bukan politik. Karena itu pendekatan yang dipilih adalah studi kasus karena lebih dimaksudkan untuk menganalisis hubungan antara berbagai fenomena kekuasaan (saling pengaruh antara pengurus DPP PKS dengan perempuan calon anggota legislatif dari PKS) yang terjadi dalam proses pencalonan anggota legislatif dari PKS pada pemilu 2009.

⁹⁰ Shulamit Reinharz. 2005. *Metode-Metode Feminis dalam Penelitian Sosial*. Jakarta: Women Research Institute Hal. 225-240.

⁹¹ Pranee Liamputtong Rice dan Douglas Ezzy. 1999. *Qualitative Research Methods*. South Melbourne, Victoria : Oxford University Press.

⁹² Shulamit Reinharz. Op.cit hal. 225-226.

⁹³ Pranee Liamputtong Rice dan Douglas Ezzy. .

⁹⁴ Judith Squires. .

⁹⁵ *Ibid*.

Guna kepentingan penulisan buku, telah dilakukan studi tentang perempuan dalam relasi kekuasaan di PKS dengan melakukan pengumpulan data triangulasi yang terdiri dari wawancara mendalam dengan wakil atau sampel yang berasal dari berbagai sub struktur PKS dan perempuan calon anggota legislatif PKS untuk pemilu 2009, yaitu: (1) Majelis Syura: Yoyoh Yusroh, Aan Rochana, Herlini Amran, Husna Hidayati, Ucti⁹⁶, Tifatul Sembiring, Hidayat Nurwachid, Anis Matta, dan Gufron Azis Fuadi; (2) Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP): Tifatul Sembiring sebagai Presiden PKS dan Anis Matta sebagai Sekretaris Jendral PKS; (3) Dewan Pengurus Pusat. Tifatul Sembiring, Anis Matta, Mardani Ali Sera, dan Ledia Hanifa; (4) Dewan Syariah Pusat (DSP): Herlini Amran; (5) Majelis Pertimbangan Pusat (MPP): Yoyoh Yusroh dan Aan Rochana; (6) Beberapa perempuan PKS calon anggota legislatif 2009: Yoyoh Yusroh, Aan Rochana, Ledia Hanifa, Husna Hidayati, Ucti, Sitaresmi Soekanto, Herlini Amran, Komarul Kuniyati, Kingkin Anidha.

Selain wawancara mendalam, penulis juga melakukan observasi dengan mengikuti pertemuan-pertemuan di PKS dan mengikuti proses kampanye yang dilakukan oleh PKS. Penulis juga menggunakan beberapa data dari dokumen seperti Falsafah Dasar dan Bayan PKS. Variasi sumber data ini dibutuhkan karena untuk mendapatkan gambaran yang utuh tentang posisi perempuan dalam hubungan kekuasaan di PKS diperlukan sudut pandang yang memungkinkan diperolehnya gambaran yang utuh, dan itu harus diperoleh dari semua sisi sudut pandang. Karena itu studi ini menerapkan prinsip triangulasi sumber data.

Data dikumpulkan dengan beberapa instrumen. Data primer dikumpulkan dengan instrumen wawancara mendalam (*depth interviews*) untuk memperoleh data tentang pendapat, pandangan dan preferensi pribadi perempuan PKS calon anggota DPR Periode 2009-2014 dan pengurus PKS tingkat Pusat. Wawancara dilakukan dalam rentang waktu kurang lebih 9 (enam bulan), dari bulan April 2009 sampai dengan Januari 2010. Wawancara dilakukan di berbagai tempat di Jakarta dan Lampung, antara lain di kantor DPP PKS Jln. TB Simatupang, Jakarta Selatan; di Hotel Bumi Karsa Jln. Gatot Subroto, Jakarta Selatan; di Kampus Universitas Indonesia Depok dan Salemba; di lokasi kampanye PKS di Tangerang; di kantor DPW PKS Provinsi Lampung; serta juga melalui penggunaan wawancara tertulis melalui internet. Durasi wawancara bervariasi, antara 30 menit sampai dengan sekitar 3 jam.

Suasana wawancara pada umumnya berupa pertemuan informal sehingga dapat mendukung proses penyampaian informasi secara bebas, kecuali wawancara dengan Aan Rochana dan Yoyoh Yusroh yang diselenggarakan di sela acara Rapat Kerja Nasional PKS menghadapi pemilihan presiden 2009, serta wawancara dengan Al Muzzamil Yusuf dan Hidayat Nurwachid yang dilaksanakan di sela kunjungan keduanya di Provinsi Lampung menjelang pemilihan presiden 2009. Wawancara dengan Presiden PKS, Tifatul Sembiring, dilakukan melalui wawancara tertulis lewat internet karena sampai dengan periode pengumpulan data berakhir, wawancara langsung tidak dapat dilakukan karena kesibukan yang bersangkutan memimpin PKS dan melaksanakan tugas kenegaraan lainnya. Wawancara dengan Wakil Sekjen DPP PKS, Mardani Ali Sera dilakukan pada bulan Januari 2010 di kantor DPP PKS, Jln. TB. Simatupang,

⁹⁶ Ucti adalah nama yang disamarkan atas permintaan yang bersangkutan.

Jakarta Selatan. Sementara wawancara dengan Anis Matta, Sekjen PKS dilakukan disela-sela Musyawarah Nasional II PKS di Ballroom Pacific Place pada tanggal 19 Juni 2010. Data utama (yaitu data yang diperoleh dari para perempuan PKS) dapat diperoleh melalui wawancara informal, terbuka dan panjang lebar untuk menggali berbagai pandangan, sikap, dan tindakan para perempuan PKS.

Selain menggunakan wawancara sebagai instrumen utama pengumpulan data, studi ini juga menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh berbagai data sekunder yang meliputi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PKS, Falsafah Dasar PKS, Bayan Dewan Syariah Pusat berkenaan dengan peran politik perempuan, struktur dan susunan kepengurusan Partai, daftar calon anggota DPR dari PKS serta beberapa data lain yang berhubungan dengan perempuan PKS dan proses pencalonan anggota DPR, antara lain buku-buku berjudul Keakhwatan (jilid satu sampai dengan empat) yang selama ini menjadi pedoman pembentukan karakter dalam pendidikan dan laitan kader PKS. .

Penggunaan beberapa metode pengumpulan data ini didasarkan pada kelaziman penggunaan beberapa metode pengumpulan data dalam studi feminis⁹⁷ untuk menggali sebanyak dan selengkap mungkin data karena tujuan studi feminis tidak untuk mencari kesamaan, tetapi mencari hal yang bersifat spesifik, perkecualian dan kelengkapan⁹⁸. Tentu tujuan akhirnya adalah untuk dapat menggambarkan secara utuh fenomena perempuan dalam hubungan kekuasaan di PKS dilihat dari kemampuan perempuan PKS mempengaruhi proses pembuatan keputusan tentang pencalonan anggota DPR dari PKS untuk pemilihan anggota DPR periode 2009-2014.

Data yang sudah berhasil dikumpulkan diolah dengan menggunakan metode pengolahan data kualitatif. Pertama-tama, data hasil wawancara disusun dalam transkrip hasil wawancara. Selanjutnya, proses reduksi dilakukan untuk memilah data yang relevan dan tidak relevan dengan tujuan penelitian. Data yang relevan dengan tujuan penelitian disusun dalam tabel-tabel hasil reduksi sesuai dengan sub-sub tema agar lebih mudah dibaca. Analisis data ditujukan pada hasil reduksi ini. Karena penelitian ini sepenuhnya menerapkan metode kualitatif, maka jika pada tahap reduksi dirasakan masih terdapat data yang kurang, maka pengumpulan data dilakukan kembali sehingga semua data yang dibutuhkan dapat disediakan.

Menetapkan metode analisis data dalam "penelitian feminis" bukanlah hal mudah. Pertanyaan pertama yang harus dijawab dalam penelitian ini adalah apakah tema penelitian disertasi ini termasuk dalam penelitian feminis? Jawabnya agak sulit diberikan. Seperti diimplikasikan oleh Judith Squires⁹⁹, Ahyar Yusuf Lubis¹⁰⁰, Shulamit Reinharz¹⁰¹, maka penelitian termasuk dalam lingkup feminis bukan hanya karena penelitian tersebut adalah "tentang perempuan", tetapi juga menggunakan sudut pandang perempuan dalam mengkonstruksi ilmu. Maksud

⁹⁷ Shulamit Reinharz. *Op.cit.* Hal. 226.

⁹⁸ *Ibid.* Hal. 239

⁹⁹ Judith Squires. *Op.cit.*

¹⁰⁰ Ahyar Yusuf Lubis. 2006. Dekonstruksi Epistemologi Modern, dari Postmodernisme, Teori Kritis, Poskolonialisme Hingga Cultural Studies. Jakarta: Pustaka Indonesia Satu.

¹⁰¹ Shulamit Reinharz. *Op.cit.*

pernyataan ini (terutama pernyataan Judith Squires) adalah bahwa karena jumlah ilmuwan perempuan masih sangat sedikit, maka selama ini teori dan metodologi dalam dunia ilmu (terutama ilmu politik) sangat dipengaruhi dan dikonstruksi menurut sudut pandang laki-laki. Ketiganya berpendapat bahwa mengkonstruksi kembali cara pendekatan keilmuan (dari sisi teori dan metode) menurut sudut pandang perempuan menjadi penting agar ilmu tidak menjadi bias laki-laki. Meski demikian, perlu digaris bawahi pendapat Rosalind Barnett dan Grace Baruch¹⁰² bahwa

kami menganggap diri kami "feminis" karena kami sepenuhnya percaya pada tujuan gerakan perempuan: untuk menolak kekangan lama, untuk menyadarkan perempuan akan kondisi yang membatasi pilihan hidupnya dan untuk menjamin bahwa perempuan tidak lagi dihalangi jalannya untuk mencapai posisi tertinggi dalam semua lembaga sosial.

Studi ini termasuk dalam kategori studi feminis. Hal ini terutama karena studi ini secara khusus ditujukan untuk mengkaji pandangan yang selama ini berkembang dan menjadi keyakinan para feminis radikal bahwa hak politik perempuan diasumsikan pasti terdiskriminasi dalam partai Islam. Asumsi ini demikian kuat di kalangan feminis radikal, sebuah asumsi yang dipegang teguh bahwa setiap perempuan pasti mengalami diskriminasi, lebih-lebih dalam partai Islam yang diyakini pasti berpegang teguh pada nilai-nilai tradisional tentang peran perempuan, lebih-lebih dalam dunia politik. Studi ini sekaligus juga untuk mengkaji kebenaran "propaganda" yang selama ini dibangun oleh PKS bahwa PKS adalah partai yang peduli perempuan.

Sistematika buku dapat digambarkan secara ringkas sebagai berikut. Bab 1 yang berupa pendahuluan menggambarkan latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan, kerangka teori, dan metode. Bab 2 (Perempuan dalam Struktur Kewenangan di Partai Keadilan Sejahtera) menggambarkan beberapa hal: (1) sejarah PKS; (2) ideologi PKS; (3) struktur kewenangan di Partai Keadilan Sejahtera (Majlis Syura Pusat, Dewan Pimpinan Tingkat Pusat, Dewan Syariah Pusat, Dewan Pengurus Pusat, dan Majlis Pertimbangan Pusat), hubungan kewenangan antara lembaga-lembaga ini dan kewenangan masing-masing lembaga berkenaan dengan pencalonan anggota DPR periode 2009-2014; (4) posisi dan peran perempuan pada masing-masing lembaga kepengurusan tingkat Pusat Partai Keadilan Sejahtera dan akses mereka terhadap pembuatan keputusan lembaga-lembaga tersebut berkenaan dengan proses pencalonan anggota DPR periode 2009-2014. Bab 3 (Pandangan tentang Hak Politik Perempuan di Kalangan Perempuan PKS) menggambarkan variasi pandangan perempuan PKS tentang hak politik mereka. Hak politik di sini diartikan sebagai hak untuk menduduki berbagai jabatan dalam partai politik yang akan memberi akses kepada mereka untuk dicalonkan dalam pemilu anggota DPR periode 2009-2014. Selain itu hak politik di sini juga diartikan sebagai hak untuk dicalonkan menjadi anggota DPR RI, dan hak untuk menjadi kepala negara. Pandangan tentang hak politik perlu dijelaskan karena pandanganlah yang menentukan sikap dan tindakan dalam proses pencalonan anggota DPR. Pandangan yang dengan tegas

¹⁰² *Ibid.* Hal 6.

menyatakan keyakinan bahwa perempuan mempunyai hak politik setara dengan laki-laki akan berpengaruh terhadap sikap dan tindakan yang dilakukan untuk memperoleh dan memperjuangkan hak tersebut. Sebaliknya pandangan yang menunjukkan kekurangyakinan akan menyebabkan perempuan lemah dalam sikap dan tindakan untuk memperjuangkan hak. Karena itu aspek pandangan tentang hak politik perempuan menjadi aspek yang kedua dijelaskan dalam analisis tentang perempuan dalam hubungan kekuasaan di PKS yang menjadi tema disertasi ini. Bab 4 Peran Perempuan PKS dalam Proses Pencalonan anggota DPR menjelaskan bagaimana peran perempuan dalam proses pencalonan anggota DPR. Secara khusus bab ini ditulis untuk menjelaskan kemampuan perempuan PKS mempengaruhi proses pencalonan yaitu dengan mengkaji kemampuan perempuan dari berbagai segmen organisasi PKS (yaitu dari Majelis Syura, Dewan Syariah Pusat, Dewan Pengurus Pusat, dan Majelis Pertimbangan Pusat, serta perempuan non kader PKS yang direkrut) dalam proses pencalonan anggota DPR periode 2009-2014. Secara khusus bab ini ditulis untuk menjelaskan bagaimana peran perempuan terhadap keputusan yang diambil dan proses yang dilakukan oleh sub struktur atau lembaga-lembaga di PKS tersebut.

Bab ini juga menjelaskan pandangan, sikap dan tindakan pejabat PKS yang berpengaruh terhadap kemampuan perempuan PKS mempengaruhi pencalonan mereka menjadi anggota DPR. Hal ini perlu dijelaskan pada Bab ini karena keduanya saling berkait. Secara khusus digambarkan bagaimana pandangan partai dan pejabat partai tentang hak perempuan untuk menjadi anggota DPR, sikap yang dipilih dan tindakan yang mereka yang lakukan berpengaruh terhadap proses pencalonan anggota DPR. Pandangan yang dijelaskan menyangkut bagaimana pejabat partai melihat hak politik perempuan PKS untuk menjadi anggota DPR, melihat kelemahan-kelemahan dan kekuatan-kekuatan, peluang dan hambatan yang berpengaruh terhadap kesempatan perempuan untuk menjadi anggota DPR. Sikap berupa perasaan senang atau tidak senang serta mendukung atau tidak mendukung bagi eksistensi perempuan sebagai anggota DPR. Sedangkan tindakan berupa apa yang dilakukan atau tidak dilakukan untuk kepentingan pencalonan perempuan PKS menjadi anggota DPR periode 2009-2014. Bab 5 (Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Perempuan dalam Relasi Kekuasaan di PKS) menggambarkan faktor-faktor internal dan faktor eksternal yang berpengaruh terhadap kemampuan perempuan PKS menjadikan diri sebagai subyek politik dalam relasi kekuasaan di PKS. Faktor-faktor internal yang dijelaskan adalah kelemahan di kalangan perempuan PKS serta kekuatan berupa ciri-ciri ideal yang diinginkan oleh perempuan PKS. Faktor eksternal yang dijelaskan adalah pandangan tentang, sikap dan tindakan pejabat PKS terhadap hak politik perempuan PKS. Bab 6 (Kesimpulan) berisi kesimpulan dari bab-bab sebelumnya dan implikasi teoritis dari temuan hasil penelitian sebagaimana telah digambarkan dalam kesimpulan. Sub bab pertama berisi kesimpulan tentang posisi perempuan dalam relasi kekuasaan di PKS. Sub bab kedua menyimpulkan implikasi teoritis dari temuan penelitian.

PEREMPUAN DALAM STRUKTUR KEWENANGAN DI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

Mengkaji peran perempuan dalam struktur kewenangan di PKS tidak terlepas dari peran yang telah mereka lakukan sejak masa awal berdirinya PKS. Selain itu peran perempuan di PKS tidak akan terlepas dari pengaruh ideologi yang menjadi dasar organisasi PKS. Untuk itu Bab 2 ini akan menjelaskan terlebih dahulu sejarah PKS (termasuk sejarah keterlibatan perempuan di PKS) dan ideologi PKS sebelum menjelaskan peran perempuan dalam struktur kewenangan di PKS.

Sejarah Partai Keadilan Sejahtera

Banyak tulisan telah disusun untuk menjelaskan sejarah Partai Keadilan Sejahtera. Secara garis besar, esensi berbagai informasi yang ditulis tentang sejarah PKS menjelaskan bahwa kelahiran PKS tidak dapat dilepaskan dari gerakan dakwah yang berpangkal di masjid-masjid kampus di berbagai perguruan tinggi besar di Indonesia dengan pengaruh terbesar dari aktivitas dakwah kampus Masjid Salman di ITB yang dimotori Imaduddin Abdurrahim.¹

Aktivitas dakwah kampus tersebut pada awalnya mengambil bentuk pembinaan (tarbiyah) secara intensif dengan memberikan kesadaran dan pencerahan tentang hakikat kesempurnaan Islam dari *murabbi* (pembina) kepada *mutarabbi* (anak didik).² Menurut Bachtiar Effendi, aktivitas dakwah kampus ini dari pertengahan 1980-an sampai akhir 1990-an telah terlembagakan dalam bentuk *usroh-usroh* yang dekat dengan pemikiran Ikhwanul Muslimin. Meski demikian, aktivitas dakwah kampus di Indonesia ini lebih dominan warna non-politiknya dibanding dengan Ikhwanul Muslimin yang memiliki warna politik. Dan varian baru gerakan dakwah kampus yang dipengaruhi pemikiran dari Timur Tengah inilah yang menurut Bachtiar Effendi telah menyebabkan terjadinya sinergi dua elemen gerakan dakwah, yang pertama adalah elemen yang muncul pada dasawarsa 1970-an yang mensinergikan "Islam" dan "Barat" dan elemen 1980-an sampai 1990-an yang lebih kental nuansa pemikiran Timur Tengahnya.³

Represi politik Orde Baru dinilai sebagai faktor penting mengapa kesadaran kebangkitan Islam di berbagai kampus di Indonesia mengambil bentuk tarbiyah (pembinaan) dan bukan gerakan politik. Karena itu tumbangannya rezim Orde Baru dinilai telah membuka kesempatan munculnya kembali Islam politik yang pada masa Orde Baru mendapat represi sangat kuat dari rezim ini. Dua elemen gerakan dakwah kampus ini menyikapi tumbangannya rezim Orde Baru

¹ Lihat Nashir Fahmi, 2006. *Menegakkan Syariat Islam Ala PKS*. Solo: Era Intermedia, hal. 93-120. Lihat juga artikel Dulu Dakwah Kampus, Kini Dakwah Parlemen (Tempo, 18 Januari 1999) dan artikel Bachtiar Effendi berjudul Dari Gerakan Tarbiyah Menjadi Partai Politik (Panjimas, 5 Maret 2003 yang ditulis ulang dalam Nur Hasan Zaidi, 2007. *Mereka Bicara PKS, Telaah Obyektif terhadap Perjalanan Dakwah Politik PKS*, Jakarta: DPP Partai Keadilan Sejahtera, Sekretariat Jendral Bidang Arsip dan Sejarah. Hal. 4-9 dan 22-32. Lihat juga Arief Ihsan Rathomy, 2007. *PKS dan HTI: Genealogi & Pemikiran Demokrasi*. Yogyakarta: Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM. Hal. 51-66.

² Nashir Fahmi. *Op.cit.* Hal. 106-107.

³ Nur Hasan Zaidi. Hal. 29.

dengan memelopori berdirinya sebuah Partai Islam yang benar-benar baru⁴ dalam panggung politik di Indonesia, yaitu Partai Keadilan Sejahtera.

Empat alasan menjadi dasar keyakinan gerakan dakwah kampus ini untuk mengambil bentuk perjuangan yang terlembagakan dalam bentuk organisasi politik.⁵ *Pertama*, kemampuan gerakan dakwah kampus menyalakan kebangkitan Islam dalam wajah yang utuh sebagai sistem kehidupan dan tulang punggung pemikul beban umat. *Kedua*, kegagalan kelompok nasionalis sekuler di Indonesia untuk mengemban amanat kepemimpinan kekuasaan politik. *Ketiga*, krisis besar akibat globalisasi yang menjadikan Indonesia semata sebagai figuran pentas politik dunia. *Keempat*, peningkatan kualitas pendidikan masyarakat serta partisipasi politik generasi pemimpin gerakan dakwah. Keempat hal ini secara bersama-sama telah menyebabkan munculnya keyakinan komponen gerakan dakwah kampus bahwa inilah saat yang tepat bagi mereka untuk mengambil peran aktif dalam politik formal di Indonesia. Hal inilah yang dalam sejarah partai politik di Indonesia diyakini menjadi dasar berdirinya Partai Keadilan yang mempunyai kaitan sangat erat dengan munculnya Partai Keadilan Sejahtera.

Berdirinya PKS tidak terlepas dari keberadaan Partai Keadilan (PK). PK yang didirikan pada tanggal 20 Juli 1998 merupakan cikal bakal PKS. Berdirinya PK sendiri merupakan keputusan bersama dari hampir seluruh komponen dakwah kampus. Seperti telah disebutkan di muka, tumbangannya rezim Orde Baru membuka kesempatan kelompok Islam untuk membentuk partai yang benar-benar diharapkan dapat menjadi wadah aspirasi umat Islam, tidak sekedar menjadi "pelengkap sistem kepartaian" seperti yang terjadi dengan Partai Persatuan Pembangunan pada masa Orde Baru.

Pada akhir rezim Orde Baru dan awal masa reformais, sebuah survey dengan kuesener yang disebarkan kepada aktivis dakwah kampus hampir di seluruh Indonesia, termasuk luar negeri, dilakukan untuk mengadakan peninjauan mengenai kehendak seluruh komponen ini tentang bentuk organisasi yang ingin dimunculkan oleh aktivis dakwah di masa reformasi. Bentuk yang dapat dipilih adalah organisasi massa (ormas), organisasi politik, dan yayasan atau lembaga-lembaga yang sudah mereka pilih sebagai bentuk gerakan sebelumnya. Dari kuesener yang kembali, 68% menghendaki membentuk organisasi politik, 27% menghendaki bentuk ormas, dan sisanya (5%) menghendaki bentuk yang sudah dipilih selama ini, yaitu berbentuk lembaga dakwah kampus, yayasan, dan pesantren.⁶

Menindaklanjuti hasil survey ini, 52 orang yang mempunyai latar belakang pendidikan, suku, profesi yang berbeda-beda berkumpul untuk mengambil sikap dan merumuskan pendirian PK. Dewan Pendiri PK diketuai Hidayat Nurwahid dengan Sekretaris Luthfi Hasan Ishaq. Diantara ke 52 orang pendiri PK terdapat 5 orang perempuan, yaitu Nursanita Nasution, Yoyoh Yusroh, Zirlirosa Jamil, Siti Zainab, dan Sri Utami. Yoyoh Yusroh kemudian menjadi Ketua PK Bidang Kewanitaan pertama dan tetap menjadi tokoh panutan

⁴ Benar-benar baru dimaknai sebagai sebuah partai Islam yang tidak memiliki akar sejarah dan budaya dari berbagai organisasi masyarakat Islam yang sudah ada di Indonesia pada masa sebelumnya.

⁵ Nashir Fahmi. *Op.cit.* hal. 114-116.

⁶ Arief Ihsan Rathomy. *Op. cit.* Hal. 57.

perempuan PK dan PKS sampai dengan masa PK menggabungkan diri dengan PKS.

Seperti sudah diketahui, PK tidak berhasil melewati ambang batas *electoral treshold* 2% pada Pemilu legislatif 1999. Sebagai akibatnya PK tidak dapat mengikuti Pemilu 2004 dan harus mengambil sikap menghadapi Pemilu 2004. Karena upaya PK untuk mengajukan *judicial review* atas pasal-pasal yang mengatur tentang *electoral treshold* dalam Undang-Undang nomor 31 tahun 2002 tentang Partai Politik mengalami kegagalan, maka komponen pendiri dan pengurus PK harus mempersiapkan partai baru menyongsong Pemilu 2004. Pada tanggal 20 April 2002 bertepatan dengan 7 Shafar 1423 H Partai Keadilan Sejahtera (PKS) didirikan. Pada tanggal 17 April 2003 PK menggabungkan diri dengan PKS.⁷

Ideologi Partai Keadilan Sejahtera

Peran perempuan PKS dalam struktur kewenangan partai tidak lain merupakan refleksi ideologi PKS. Peran ideologi adalah sentral dalam partai, terlebih dalam partai Islam PKS. Seperti telah disebutkan dalam pembahasan singkat sejarah PKS di bagian yang lebih awal, PKS tidak berakar pada sejarah dan tradisi kultur Islam yang sudah ada di Indonesia sebelumnya seperti PAN yang berakar pada tradisi Muhammadiyah dan PKB yang berakar pada tradisi NU. Menurut Nashir Fahmi, pemikiran kelompok tarbiyah yang menjadi cikal bakal PKS sangat dipengaruhi oleh pemikiran Al-Ikhwan-Al-Muslimun, sebuah gerakan Islam internasional yang didirikan Hasan Al-Banna di Mesir pada tahun 1928. Menurut Fahmi hal ini terlihat dari paradigma yang dikembangkan para tokoh ideolog sentral kelompok ini, yaitu Ihsan Tanjung, Rahmat Abdullah, Abu Ridho, Hidayat Nurwahid, Anis Matta, dan sebagainya.⁸ Lebih lanjut Fahmi menjelaskan bahwa buku-buku yang dijadikan rujukan oleh kelompok ini untuk aktivitas tarbiyah dalam dakwah kampus banyak diterjemahkan dari karya para pemikir dalam kelompok Al-Ikhwan-Al-Muslimun, antara lain Hasan Al-Banna, Sa'id Hawwa, Sayyid Qutub, Yusuf Qardawi, dan sebagainya.⁹

Kuatnya pengaruh pemikiran Al-Ikhwan-Al-Muslimun terhadap ideologi PKS juga dikemukakan oleh penulis lain, yaitu Arief Ikhsan Rathomy¹⁰ yang menyatakan bahwa buku-buku yang menjadi rujukan pemikiran PKS banyak diterjemahkan dari para tokoh Al-Ikhwan-Al-Muslimun, seperti buku "Petunjuk Jalan" karangan Sayyid Quthb, "Membina Angkatan Mujahid" karangan Sa'id Hawwa, dan trilogi buku "Allah", "Ar-Rasul" dan "Islam" yang menjadi materi penting dalam *Training* Organisasi Partai (TOP) PKS. Meski demikian, Rathomy menyatakan bahwa pemikiran yang berakar dari gerakan Al-Ikhwan-Al-Muslimun ini oleh PKS kemudian disesuaikan dengan pemikiran tokoh muslim lainnya dan juga dengan konteks keIndonesiaan.

Pengaruh pemikiran Al-Ikhwan-Al-Muslimun terhadap ideologi PKS juga dikemukakan oleh Nuraina dalam penelitian tesis masternya yang berjudul "Demokrasi Internal Partai Politik Islam: Studi Rekrutmen Perempuan pada

⁷ *Ibid.* hal. 64-66.

⁸ Nashir Fahmi. *Op.cit.* hal 108.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Arief Ikhsan Rathomy. *Op.cit.* hal. 53-55.

Jabatan-Jabatan Politik PKS Pemilu 2004".¹¹ Dalam salah satu poin kesimpulannya, Nuraina menyatakan pemikiran Al-Ikhwan-Al-Muslimunlah yang paling besar pengaruhnya terhadap ideologi PKS. Peneliti lain yang menyatakan pengaruh pemikiran Al-Ikhwan-Al-Muslimun terhadap Partai Keadilan (yang kemudian menggabungkan diri dengan PKS) adalah Aay M. Furqon. Hal ini terlihat dari hasil penelitian tesisnya pada tahun 2004.¹²

Ideologi PKS yang dominan dipengaruhi oleh pemikiran Al-Ikhwan-Al-Muslimun tetapi juga dipengaruhi oleh pemikiran Islam lain yang berkembang di Indonesia dan ditambah dengan konteks ke-Indonesiaan tersebut secara formal dituangkan dalam Falsafah Dasar PKS. Falsafah Dasar PKS¹³ menyebutkan terdapat 13 nilai yang menjadi dasar ideologi PKS, yaitu:

1. Teologi: tauhid sebagai landasan tata kehidupan.
2. Individu: individu harus membebaskan diri dari sikap mendzalimi diri sendiri.
3. Keluarga: lingkungan keluarga yang egaliter yang menjadi basis internalisasi dan ideologisasi nilai-nilai.
4. Sosial: hak-hak sosial terdistribusi secara proporsional sehingga terbangun kesejahteraan sosial dan kehidupan yang tenteram dan dinamis menuju terbentuknya masyarakat madani.
5. Politik: tatanan kekuasaan yang demokratis, berjalan dalam koridor hukum dan agama, dan rakyat memperoleh hak-hak politiknya secara penuh.
6. Ekonomi: ekonomi egaliter sebagai cermin sistem ekonomi yang berkeadilan.
7. Hukum: tegaknya persamaan hak di hadapan hukum bagi setiap orang dengan prosedur dan mekanisme yudisial yang berkeadilan.
8. Kebudayaan: pluralitas kebudayaan sebagai entitas yang berinteraksi secara harmonis menuju kemajuan peradaban.
9. Pendidikan: pendidikan integratif untuk membangun manusia yang mampu merealisasikan "amanah" penciptaannya menuju kehidupan yang sejahtera dan kemajuan bangsa.
10. Iptek: pemanfaatan dan pengendalian iptek secara etis sebagai modal dasar pembangunan peradaban untuk kesejahteraan manusia dan kemandirian bangsa.
11. Gender: relasi gender yang proporsional yang saling melengkapi dalam rangka merealisasikan "amanah" penciptaan manusia.
12. Keadilan: adalah pernyataan kehendak Illahi, akal budi, dan usaha manusia yang melekat, baik dalam struktur fisik dan psikis manusia, yang harus dibuktikan dalam perilakunya. Keadilan juga dimaknai sebagai meletakkan segala sesuatu pada tempatnya, tidak melampaui batas

¹¹ Nuraina. 2007. *Demokrasi Internal Partai Politik Islam: Studi Rekrutmen Perempuan pada Jabatan-Jabatan Politik PKS Pemilu 2004*. Universitas Indonesia: tesis pada PPS Ilmu Politik.

¹² Aay M. Furqon. 2004. *Pengaruh Pemikiran Al-Ikhwan-Al-Muslimun terhadap Gerakan Politik Islam Indonesia (1998-2000): Studi Kasus Partai Keadilan*. Universitas Indonesia: tesis dalam PPS Ilmu Politik.

¹³ Majelis Pertimbangan Pusat PKS. *Falsafah Dasar Perjuangan Partai Keadilan Sejahtera. Jalan Keadilan Menuju Kesejahteraan*. Tanpa tahun dan tanpa penerbit

Sebagai sebuah partai Islam, PKS menjadikan nilai tauhid sebagai dasar dari seluruh tata kehidupan manusia, termasuk dalam kehidupan politik. Dalam hal ini PKS menjadikan tauhid atas dasar ajaran Islam sebagai nilai yang mengatur bukan hanya hubungan manusia dengan penciptanya, tetapi juga dengan sesama manusia dan dengan alam lingkungan. Islam menjadi fondasi seluruh aspek kehidupan dan harus dijalankan secara menyeluruh, tidak sepotong-potong.¹⁴

Dalam kehidupan politik, PKS meyakini bahwa demokrasi harus menjadi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Rakyat harus mendapatkan hak-hak politiknya secara penuh; kekuasaan harus berada dalam bingkai hukum dan agama. Mengenai demokrasi, Anis Matta menyatakan bahwa penerimaan PKS atas prinsip demokrasi sudah final. Menurutnya hal ini disebabkan meski demokrasi bukanlah prinsip yang secara formal berasal dari Islam, tetapi substansinya memiliki kemiripan yang sangat banyak dengan prinsip-prinsip Islam. Karena itu menurutnya PKS dapat menerima bahkan mempromosikan nilai demokrasi karena dalam demokrasilah dakwah PKS di berbagai bidang kehidupan dapat dilakukan.¹⁵

Meski keseluruhan 13 nilai dasar dalam Falsafah Dasar PKS langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan peran perempuan, tetapi nilai-nilai yang lebih erat hubungannya dengan peran perempuan dalam kehidupan politik adalah nilai dasar tentang individu, keluarga, politik, pendidikan, gender, dan keadilan. Diterjemahkan secara khusus dari sisi gender, hal ini berarti: (1) perempuan PKS harus membebaskan diri dari sikap mendholimi diri sendiri; (2) harus menjadi partner setara laki-laki dalam hubungan yang egaliter dalam keluarga; (3) harus dapat melaksanakan dan menikmati tata kehidupan politik yang demokratis dalam bingkai hukum dan agama; (4) bersama laki-laki harus menciptakan pendidikan integratif untuk membangun manusia menuju kehidupan yang sejahtera dan kemajuan bangsa; (5) membangun relasi gender yang proporsional dan saling melengkapi dengan laki-laki; dan (6) mampu meletakkan segala sesuatu pada tempatnya dan tidak melampaui batas.

Dalam pandangan Anis Matta, kesetaraan gender di PKS merupakan nilai yang sesuai dengan ajaran Islam. Islam tidak membedakan derajat manusia, baik atas dasar jenis kelamin, warna kulit, maupun bangsa dan suku bangsa. Perempuan dan laki-laki saling melengkapi dan bersama-sama harus melaksanakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar.¹⁶ Lebih lanjut Anis Matta menyatakan bahwa perempuan mempunyai hak atas berbagai jabatan politik kecuali untuk posisi khalifah.

Berkenaan dengan adanya pandangan dalam kalangan internal PKS yang melarang perempuan menduduki posisi kepala negara, Anis Matta menyatakan bahwa hal ini berasal dari adanya perbedaan penafsiran tentang ketentuan apakah posisi kepala negara adalah posisi khalifah. Anis Matta menyatakan bahwa secara formal PKS mengambil sikap membedakan kedua hal ini dan karena itu PKS dapat menerima kepemimpinan Megawati sebagai kepala negara karena kepala negara bukan khalifah.

¹⁴ Disarikan dari uraian tentang Islam sebagai landasan partai dalam Falsafah Dasar PKS.

¹⁵ Hasil wawancara dengan Anis Matta di Jakarta 19 Juni 2010.

¹⁶ *Ibid.*

Pernyataan Anis Matta ini sesuai dengan ketentuan Bab 14 dalam Falsafah Dasar PKS tentang Gender¹⁷ yang memuat prinsip-prinsip hubungan gender yang diyakini PKS. Menurut isi Bab ini, ketentuan-ketentuan dalam Al-Qur'an menggariskan bahwa manusia diciptakan berpasang-pasangan. Meski memiliki ciri biologis yang berbeda, tetapi penciptaan laki-laki dan perempuan bukan untuk saling bertentangan dan saling meniadakan, tetapi saling melengkapi. Keduanya berpotensi sama untuk bisa berbuat kebajikan maupun sebaliknya. Perempuan dan laki-laki mutlak setara. Perbedaan peran karena pengaruh faktor biologis bukan alasan untuk melakukan diskriminasi, subordinasi, marginalisasi, maupun segregasi. Perempuan berhak atas akses, partisipasi, kontrol maupun manfaat yang sama dengan laki-laki atas seluruh aspek pembangunan. Bab ini bahkan menyatakan bahwa para ulama menilai pengangkatan manusia sebagai khalifahNya di bumi yang tidak membedakan laki-laki dan perempuan merupakan dasar integralisme laki-laki dan perempuan dalam kaitannya dengan kekuasaan. Ketentuan ini jelas menunjukkan bahwa doktrin ideologi PKS meletakkan perempuan pada posisi setara laki-laki, termasuk pengakuan kesetaraan perempuan dengan laki-laki sebagai khalifahNya di bumi. Prinsip tentang kesetaraan gender inilah salah satu prinsip yang disosialisasikan oleh Abu Ridho dalam sosialisasinya tentang Falsafah Dasar PKS ke berbagai wilayah di Indonesia, termasuk ke wilayah Lampung.¹⁸ Pemikiran Abu Ridho banyak mewarnai Falsafah Dasar PKS; karena itu pandangan pribadinya sama dengan Falsafah Dasar tersebut dan aktivitas sosialisasinya tentang Falsafah Dasar PKS merupakan refleksi keyakinan pribadinya tersebut.¹⁹ Salah satu poin dalam sosialisasinya tersebut adalah tentang relasi gender. Abu Ridho menyatakan bahwa : (1) manusia diciptakan berpasang-pasangan, sebuah anugerah yang memastikan laki-laki dan perempuan dapat hidup bersama dalam kerangka saling mencintai dan mengisi; (2) meski memiliki perbedaan biologis, namun secara ontologis dan etis moral memiliki kedudukan yang sama dalam arti kesatuan esensi diri sebagai pasangan yang menyebabkan laki-laki dan perempuan mengemban tanggung-jawab yang sama, berpotensi sama untuk bisa berbuat kebajikan atau dosa, harus menggali kebajikan-kebajikan yang sama, dan menjalankan visi kemanusiaan yang sama pula di hadapan Allah swt; (3) dalam tingkatan kosmik, dalam arti struktur biologis, psikologis dan sosiologis, laki-laki dan perempuan berbeda peran sebagai pasangan yang saling melengkapi; (4) berpasangan berarti kesatuan dua bagian yang secara internal memiliki perbedaan yang unik yang saling melengkapi, saling bergantung untuk menjalankan fungsi-fungsi yang berbeda untuk menjaga kesempurnaan penciptaan; (5) setiap manusia harus belajar dan tumbuh bagi laki-laki menjadi laki-laki dan bagi perempuan menjadi perempuan sehingga membentuk identitas dan peran gender yang berbeda-beda dalam masyarakat yang berbeda disebabkan perbedaan budaya dan keyakinan atau perbedaan interaksi dengan budaya dan keyakinan; (6) perbedaan itu bukan untuk saling bersaing dan saling meniadakan, melainkan untuk saling mengenal dan berinteraksi secara harmonis atas dasar keadilan; (7) dasar pijakan

¹⁷ Majelis Pertimbangan Pusat PKS. 2008. *Falsafah Dasar PKS*. Tanpa penerbit.

¹⁸ Hasil wawancara dengan bapak A dari Dewan Syariah Wilayah Lampung 2 Juni 2010 dan wawancara informal dengan bapak M, staf DPW PKS Lampung 23 Juni 2010.

¹⁹ Hasil wawancara informal dengan bapak M, staf DPW PKS Lampung di Bandarlampung 23 Juni 2010.

filosofi keadilan gender yang berkaitan dengan kekuasaan ialah pengangkatan manusia sebagai khalifah Allah di bumi sebagai dasar integralisme kekuasaan.²⁰

Esensi pemikiran Abu Ridho tentang relasi gender adalah bahwa meski perempuan dan laki-laki mempunyai kedudukan setara sebagai khalifahNya di bumi, tetapi keduanya mempunyai peran yang berbeda. Pandangan Abu Ridho ini mirip dengan pendapat Murtadha Muthahari²¹ yang menyatakan meski perempuan dan laki-laki adalah sama di hadapan Allah, tetapi seperti matahari dan bulan, keduanya harus beredar di orbitnya masing-masing karena kalau keduanya ingin beredar pada orbit yang sama, maka hal ini hanya akan menyebabkan terjadinya kerusakan di bumi. Pandangan Abu Ridho dan Muthahari menyatakan bahwa orbit utama perempuan adalah di ranah domestik. Peran di ranah publik karena itu harus dalam konteks "melengkapi" peran laki-laki yang memang peran utamanya adalah urusan publik.

Refleksi kehendak ideologis PKS terhadap hak politik perempuan PKS seperti tercermin dalam Falsafah Dasar PKS tersebut diatur lebih lanjut dalam Bayan Dewan Syari'ah PKS nomor 9/B/K/DSP-PKS/1429²² yang menetapkan bahwa:

1. Politik merupakan aspek kehidupan yang harus dilaksanakan bersama-sama antara laki-laki dengan perempuan. Dasar pedoman ini adalah sejarah hidup Nabi Muhammad SAW dan para *sahabiyat* yang jelas menunjukkan bahwa perempuan keluarga Nabi dan para *sahabiyat* melaksanakan seluruh aspek kehidupan, termasuk politik.
2. Perempuan harus mengikuti serangkaian pedoman untuk melaksanakan aktivitas dakwah dan politik tersebut, yaitu: (1) didasarkan pada prinsip kepemimpinan laki-laki atas perempuan; (2) didasarkan atas izin suami; (3) adanya pemberitahuan struktur partai kepada suami untuk memberitahu atau meminta dukungan suami atas aktivitas politik istri, khususnya bagi istri yang kontribusi aktivitas politiknya dibutuhkan oleh partai; (4) tidak mendikotomikan antara peran dalam dakwah dan politik dengan peran dalam keluarga; (5) tidak memubazirkan potensi dengan hanya berperan di ranah domestik; (6) *tawazun* (keseimbangan) antara keluarga dan dakwah; (7) muslimah boleh menjadi anggota legislatif dan pejabat eksekutif.

Kedua dokumen yang memuat ideologi PKS berkenaan dengan hak politik perempuan menunjukkan bahwa terdapat jaminan hak politik yang jelas bagi perempuan dalam ideologi formal PKS tetapi juga terdapat batasan-batasan bagi pelaksanaan dan penikmatan hak politik tersebut. Bayan yang dikeluarkan Dewan Syari'ah Pusat pada tahun 1429 H/2008 memberikan dasar hak politik tetapi sekaligus sejumlah batasan. Esensi batasan tersebut adalah soal kewajiban menyeimbangkan peran publik dengan peran domestik, kewajiban bekerjasama dengan suami, kewajiban memperoleh izin dari suami dan didasarkan atas prinsip kepemimpinan laki-laki atas perempuan. Bayan sebagai pedoman teknis pelaksanaan hak politik perempuan PKS dengan demikian memberikan batasan-batasan atas pelaksanaan hak tersebut. Dalam prakteknya, ketentuan tentang

²⁰ Dokumen sosialisasi Falsafah Dasar PKS oleh Abu Ridho untuk kader PKS Lampung di Wisma Dahlia, Universitas Lampung 27 Mei 2010.

²¹ Murtadha Muthahari. 2000. *Hak-Hak Wanita dalam Islam*: Jakarta: Lentera.

²² Dewan Syari'ah Pusat PKS. 1429H/2008. *Bayan 9/B/K/DSP-PKS/1429 tentang Aktivitas Dakwah dan Politik Muslimah*, Jakarta: tanpa penerbit

pedoman dan batasan ini dapat menjadi hambatan terhadap pelaksanaan hak politik perempuan tersebut.

Untuk mengklarifikasi mengenai bagaimana berbagai ketentuan penting ideologi PKS tersebut dipahami oleh struktur partai pada tingkat yang lebih rendah, khususnya unsur wilayah daerah, perlu dilakukan konfirmasi kepada unsur PKS pada level wilayah daerah. Konfirmasi tentang bagaimana ideologi dipahami oleh struktur partai di tingkat wilayah dianggap penting sebab berdasar hasil wawancara dengan salah satu narasumber disebutkan bahwa terdapat resistensi tentang hak politik perempuan yang lebih tinggi pada tingkat wilayah daerah dibanding di tingkat pusat.²³ Berikut adalah ringkasan hasil wawancara dengan Ketua Dewan Syariah Wilayah PKS Provinsi Lampung tentang makna berbagai ketentuan ideologis PKS yang terkait dengan hak politik perempuan yang terdapat dalam Falsafah Dasar PKS dan Bayan Dewan Syariah Pusat PKS tentang Akvitas Dakwah dan Politik Muslimah.

Tabel 2.1
Makna beberapa aspek nilai dalam Falsafah Dasar PKS

Aspek Nilai	Pengertian	Keterangan
Keadilan	Keadilan bukanlah keadilan dalam arti umum tanpa ada batasan-batasan, tapi memiliki bingkai-bingkai syari'ah Islam. Tidak diterjemahkan secara sempit tapi juga tidak secara bebas. Batasan-batasan ada dalam tiap konteks. Adil hanya bisa dilakukan oleh pemimpin sedangkan rakyat harus taat	Keadilan dengan batasan syari'ah; batasan pada tiap aspek. Adil adalah sifat pemimpin.
Kepemimpinan laki-laki atas perempuan	Tidak ada perbedaan tentang hak dan kewajiban politik antara laki-laki dan perempuan. Ada batasan syari'ah tentang kepemimpinan perempuan: perempuan mutlak tidak boleh menjadi <i>al-khilafatul uzma</i> (kepemimpinan jaringan internasional, contoh khalifah yang membawahi beberapa negara). Mayoritas ulama tidak memperbolehkan perempuan menjuadi kepala negara, termasuk yang bersangkutan, karena kepala negara mengemban wewenang teritorial	Perempuan berhak atas semua kecuali khalifah dan presiden
<i>ta'awun</i> (kerjasama)	Asal tugas rumah tangga tidak dilanggar, tidak dilarang. Tiga prinsip partisipasi: aman regulasi, aman opini, aman syar'i, khususnya ijin suami	Tiga prinsip: aman regulasi, opini dan syar'i
<i>tawazun</i> (keseimbangan)	Keseimbangan dalam semua aspek, yaitu kebutuhan spiritual (pribadi, ritual), sosial, politik, dan finansial.	Keseimbangan semua aspek
Demokrasi	Prinsip kehendak mayoritas sudah diterima. Prinsip penting adalah mencerminkan nilai-nilai Islami meski demokrasi bukan istilah Islam	Prinsip: didasarkan nilai Islam
Kesetaraan gender	Tidak ada batasan siapa yang dapat berkontribusi. Wanita tidak dibatasi memperoleh kedudukan yang sama dengan laki-laki selama tidak melanggar aturan syari'ah. Profesionalisme	Kedudukan setara, boleh atas semua, batasan syari'ah.

²³ Hasil wawancara dengan Sitaresmi di Jakarta 26 Februari 2009.

	adalah standar utama untuk penempatan	
--	---------------------------------------	--

Sumber: Hasil wawancara dengan bapak A dari DSW PKS Lampung, Rabu 2 Juni 2010 di Bandarlampung.

Pemahaman Ketua Dewan Syari'ah Wilayah PKS Lampung tentang berbagai aspek ideologi PKS berkenaan dengan hak politik perempuan menunjukkan bahwa PKS secara formal menerapkan prinsip kesetaraan gender kecuali yang dibatasi oleh syari'ah yang sudah ditetapkan. Berdasarkan ketetapan syari'ah yang diyakini, yang bersangkutan menyatakan bahwa perempuan mutlak tidak diperbolehkan menduduki jabatan kepemimpinan kekhilafahan dan mayoritas pihak internal PKS tidak menghendaki perempuan menjadi presiden. Dari wawancara ini dapat diketahui bahwa dengan demikian secara faktual PKS mengadopsi ideologi yang tidak demokratis karena masih mengecualikan perempuan dari posisi-posisi politik tertentu. Dapat dipahami kemudian mengapa terjadi resistensi cukup tinggi di tingkat akar rumput partai tentang hak-hak politik perempuan karena memang sosialisasi yang dilakukan juga menyangkut batasan-batasan. Menjadi politisi menjadi beban yang sangat berat untuk perempuan karena kultur hasil sosialisasi membentuk citra yang sulit dipenuhi perempuan PKS.

Dengan membandingkan berbagai ketentuan dalam Falsafah Dasar PKS, Bayan Dewan Syariah Pusat nomor 9/B/K/DSP-PKS/1429 tentang Aktivitas Dakwah dan Politik Muslimah, pendapat ideolog PKS, pendapat fungsionaris PKS pada tingkat wilayah daerah dan narasumber lain, bisa disimpulkan bahwa PKS meyakini dan menerapkan prinsip kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam mengemban amanah dakwah dan politik. Meski demikian, dalam penerapan prinsip tersebut terdapat perbedaan pendapat tentang hak perempuan menjadi kepala negara. Terdapat unsur dalam PKS yang tidak membolehkan perempuan menjadi kepala negara dan terdapat unsur yang tidak mempermasalahkannya karena kepala negara bukanlah khalifah.

Perbedaan pendapat dalam kalangan internal PKS mengenai hak perempuan menjadi kepala negara adalah karena hal ini tidak diatur secara tegas dalam Falsafah Dasar PKS. Hal ini menurut Anton Minardi berbeda dengan HTI yang dengan tegas menyatakan dalam Pasal 19 Undang-Undang Dasar Negara Islam yang direncanakannya menentukan bahwa pemimpin harus seorang muslim, laki-laki, merdeka, baligh, berakal, dan memiliki kemampuan dalam pekerjaannya.²⁴ Meski demikian, karena dalam Bayan DSP terdapat ketentuan yang menyatakan prinsip kepemimpinan laki-laki atas perempuan, maka kultur ideologis yang kemudian berkembang dalam lingkup internal PKS adalah meski bisa menerima perempuan menjadi kepala negara, PKS cenderung tidak mendukung perempuan menjadi kepala negara. Kasus sikap PKS terhadap kepemimpinan Megawati menegaskan kultur ideologis yang berkembang di PKS ini.

²⁴ Anton Minardi. 2007. Negara Menurut Islam: Pespektif Partai Keadilan Sejahtera dan Hizbut Tahrir Indonesia. Universitas Indonesia: disertasi pada PPS Ilmu Politik. Hal. 361.

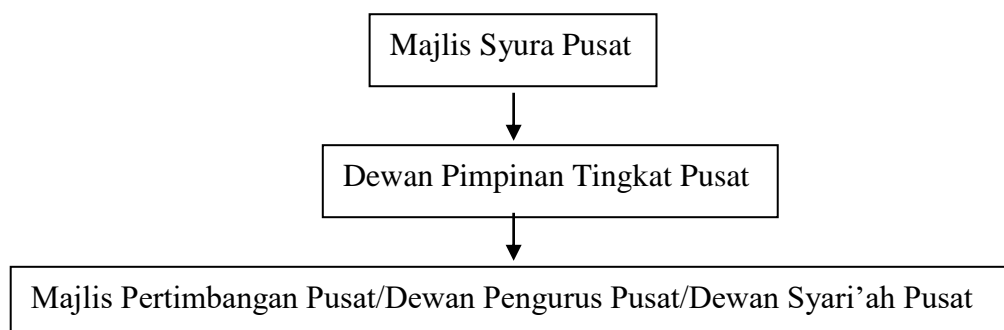
Struktur Kewenangan di Partai Keadilan Sejahtera

Uraian berikut memberikan gambaran tentang struktur kewenangan kepengurusan tingkat Pusat Partai Keadilan Sejahtera dan posisi serta peran-peran yang dilaksanakan oleh perempuan PKS dalam masing-masing struktur tersebut. .

Berdasar Bab IV Pasal (10) Anggaran Dasar Partai Keadilan Sejahtera, struktur kewenangan PKS dapat digambarkan sebagai berikut:

- (1) Strktur Organisasi di tingkat pusat:
 - a. Majelis Syuro
 - b. Dewan Pimpinan Tingkat Pusat
 - c. Majelis Pertimbangan Pusat
 - d. Dewan Pimpinan Pusat
 - e. Dewan Syari'ah Pusat
- (2) Struktur Organisasi di tingkat Provinsi
 - a. Majelis Pertimbangan Wilayah
 - b. Dewan Pimpinan Wilayah
 - c. Dewan Syari'ah Wilayah
- (3) Strktur Organisasi di tingkat kabupaten/kota
 - a. Majelis Pertimbangan Daerah
 - b. Dewan Pimpinan Daerah
 - c. Dewan Syari'ah Daerah
- (4) Struktur Organisasi di tingkat kecamatan
- (5) Strktur Organisasi di tingkat kelurahan/desa

Bagan 1. Struktur kewenangan PKS tingkat Pusat



Sumber: disarikan dari berbagai pasal dalam Anggaran Dasar Partai Keadilan Sejahtera.

Partai Keadilan Sejahtera memiliki satu lembaga tertinggi Partai, yaitu Majelis Syura Pusat (MSP), satu lembaga tinggi Partai yaitu Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP), dan 3 (tiga) lembaga kepengurusan tingkat Pusat, yaitu Majelis Pertimbangan Pusat (MPP), Dewan Pengurus Pusat (DPP), dan Dewan Syari'ah Pusat (DSP). Pengelolaan Partai sehari-hari berada di tangan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat yang berdasar ketentuan Anggaran Dasar PKS adalah badan Pekerja Majelis Syura. DPTP mengawasi dan mengkoordinasi MPP, DPP dan DSP. Hal ini berarti DPTP refleksi kekuasaan MSP dalam pengurusan sehari-hari Partai. Meski demikian, DPTP tetap harus bertanggung-jawab kepada MSP.

Sesuai dengan namanya, maka masing-masing lembaga Partai di tingkat Pusat, yaitu MPP, DPP, dan DSP mempunyai tugas dan wewenang yang berbeda-beda. MPP memberikan pertimbangan dan konsultasi baik kepada DPP maupun

DSP. DPTP melaksanakan koordinasi dan pengawasan atas struktur Partai di tingkat Wilayah, sementara DPP melaksanakan pembinaan organisasi terhadap struktur Partai di tingkat Kabupaten/Kota. DPP juga melaksanakan pembinaan kader. Sementara DSP menetapkan dan mensosialisasikan Bayan dan Pedoman untuk masalah-masalah syar'i atau hukum. Struktur kewenangan, tugas dan wewenang, seraf mekanisme kerja masing-masing lembaga tertinggi, lembaga tinggi dan 3 (tiga) lembaga PKS pada tingkat Pusat serta hubungan diantara masing-masing lembaga tersebut terlihat dalam uraian berikut. Sebelum membahas struktur kewenangan dan peran perempuan PKS dalam setiap struktur kewenangan di PKS, terlebih dulu digambarkan ideologi PKS sebagai sebuah partai politik Islam.

Majlis Syura Pusat (MSP)

Menurut ketentuan Pasal 11 ayat (1) Anggaran Dasar PKS, MSP adalah lembaga tertinggi partai yang berfungsi sebagai *Ahlul Halli wal Aqdi* atau Majelis Permusyawaratan PKS dan dipimpin oleh seorang Ketua. Menurut ketentuan ayat (2), MSP memiliki tugas dan wewenang untuk:

- a. Memilih dan menetapkan Ketua Majelis Syura segera setelah pelantikan anggota Majelis Syura terpilih oleh Anggota Inti Partai.
- b. Atas usul Ketua Majelis Syura, menetapkan:
 - 1) Ketua Majelis Pertimbangan Pusat
 - 2) Presiden, Sekretaris Jendral, dan Bendahara Umum Dewan Pengurus Pusat.
 - 3) Ketua Dewan Syariah Pusat
 - 4) Beberapa orang tertentu sebagai anggota Majelis Pertimbangan Pusat, Dewan Pengurus Pusat, dan Dewan Syari'ah Pusat.
- c. Mengubah dan menetapkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai.
- d. Menetapkan *Platform*, Visi, dan Misi Partai.
- e. Menetapkan Kebijakan Dasar dan Rencana Strategis Partai.
- f. Menetapkan anggaran belanja Majelis Syura.
- g. Membahas program kerja tahunan, rancangan anggaran, dan laporan kekayaan Partai.
- h. Membentuk Komisi-Komisi tetap dan/atau sementara di lingkungan Majelis Syura.
- i. Mengevaluasi kinerja Dewan Pimpinan Tingkat Pusat.
- j. Menentukan sikap terhadap berbagai aliran, kelompok, dan permasalahan yang berkembang di Indonesia.
- k. Menerima pengunduran diri pimpinan dan/atau anggota dari kepengurusan Partai yang diangkat berdasar Putusan Majelis Syura.
- l. Menetapkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia atas rekomendasi Dewan Pimpinan Tingkat Pusat.

Majlis Syura adalah lembaga tertinggi di PKS dengan kewenangan strategis. Menetapkan pejabat dengan wewenang tertinggi pada masing-masing lembaga tingkat Pusat PKS, menetapkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, menetapkan platform, visi dan misi PKS, menetapkan dan mengubah

AD/ART PKS adalah wewenang-wewenang paling strategis dalam Partai. Prinsip kerja Majelis Syura adalah berdasarkan prinsip permusyawaratan. Artinya semua wewenang strategis dan keputusan terpenting Partai diperoleh melalui mekanisme permusyawaratan Partai.

Meski secara substansial MSP merupakan Majelis Permusyawaratan, tetapi Ketua MSP memiliki wewenang lebih besar dibanding dengan anggota Partai dan elit Partai lainnya karena dia bukan hanya menjadi Ketua MSP, tetapi juga Ketua DPTP yang merupakan badan Pekerja MSP. Dengan demikian Ketua MSPlah yang secara faktual mengendalikan PKS karena melalui fungsinya sebagai Ketua DPTP, dialah yang mengontrol pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga PKS lainnya pada tingkat Pusat, yaitu MPP, DPP dan DSP.

Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP)

Pasal 12 Anggaran Dasar PKS menyebutkan bahwa Dewan Pimpinan Tingkat Pusat adalah lembaga tinggi Partai yang berfungsi sebagai Badan Pekerja Majelis Syura, diketuai oleh Ketua Majelis Syura, mempunyai masa kerja 5 tahun, dan beranggotakan Ketua Majelis Pertimbangan Pusat, Ketua Dewan Syariah Pusat, Presiden Partai, Sekretaris Jendral Dewan Pengurus Pusat, Bendahara Umum Dewan Pengurus Pusat. Menurut ayat (4) Pasal 12 Anggaran Dasar PKS, Dewan Pimpinan Tingkat Pusat mempunyai tugas dan wewenang:

1. Melaksanakan Putusan Majelis Syura.
2. Mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan Putusan Majelis Syura.
3. Menyelanggarakan Musyawarah Majelis Syura.
4. Mengesahkan rancangan struktur dan kepengurusan Partai di tingkat Pusat.
5. Membuat Kebijakan Partai berkenaan dengan pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, pasangan calon gubernur/wakil gubernur, dan pemilihan lainnya yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang berlaku, serta jabatan strategis lainnya.
4. Merekomendasikan nama-nama yang akan ditempatkan pada posisi jabatan-jabatan sebagaimana yang disebut pada huruf e.
5. Dapat menentukan sikap Partai, yang kemudian dilaporkan kepada musyawarah Majelis Syura berikutnya, dalam hal Majelis Syura tidak dapat melaksanakan Pasal 11 ayat (2) huruf j.
6. Menentukan sikap terhadap fitnah, kritik, pengaduan dan tuduhan yang berkaitan dengan Partai, dan/atau Anggota Partai sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, serta Peraturan Partai dan/atau peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang berlaku.
7. Menunjuk utusan untuk mewakili Partai yang akan ditempatkan pada sebuah lembaga/organisasi, atau yang akan mengikuti konggres/seminar baik yang diadakan di dalam negeri maupun di luar negeri.
8. Menugaskan kepada setiap anggota Majelis Syura untuk mengadakan kunjungan kerja perseorangan ataupun bersama-sama di daerah pemilihannya atau daerah yang ditentukan.

9. Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap Peraturan dan Kebijakan Partai, memerintahkan Dewan Pengurus Pusat membekukan struktur organisasi dan/atau kepengurusan Majelis Pertimbangan Wilayah, Dewan Pengurus Wilayah, dan/atau Dewan Syariah Wilayah melalui mekanisme yang diatur dalam Putusan Majelis Syura.
10. Membahas Laporan Tahunan dan Laporan Pertanggung-jawaban Majelis Pertimbangan Pusat, Dewan Pengurus Pusat, dan Dewan Syariah Pusat, serta
11. Menyampaikan laporan Pertanggung-jawaban kepada Majelis Syura.

Menurut ketentuan ini, DPTP lah yang secara operasional melaksanakan fungsi Majelis Syura. DPTP melaksanakan Putusan Majelis Syura. DPTP lah juga yang memiliki wewenang berkenaan dengan pencalonan anggota DPR. DPTP melaksanakan wewenang penempatan kader pada berbagai jabatan strategis lain selain anggota DPR dan calon Gubernur/Wakil Gubernur, seperti jabatan dalam komisi di DPR, pengurus fraksi PKS di DPR, jabatan Menteri, Duta Besar, Panitia-Panitia Khusus di DPR, dan sebagainya. Karena itu DPTP sebagai Badan Pekerja MSP memiliki wewenang operasional yang sangat luas.

Majlis Pertimbangan Pusat (MPP)

Majlis pertimbangan Pusat adalah lembaga yang menurut ketentuan Pasal 13 Anggaran Dasar PKS merupakan lembaga yang berkedudukan sejajar dengan Dewan Pengurus Pusat, dan Dewan Syariah Pusat. Majelis Pertimbangan Pusat memiliki masa kerja 5 tahun, berada di bawah koordinasi dan pengawasan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat serta bertanggung-jawab kepada Majelis Syura. Menurut ketentuan ayat (3) Pasal 13 Anggaran Dasar PKS, Majelis Pertimbangan Pusat mempunyai tugas dan wewenang:

- a. Memberi pertimbangan, rekomendasi, konsultasi, dan supervisi kepada Dewan Pengurus Pusat dan Dewan Syariah Pusat, terhadap perumusan peraturan, pelaksanaan kebijakan, dan program Partai untuk menjamin tetap sesuai dengan tujuan Partai dan Putusan Majelis Syura.
- b. Menetapkan dan mensosialisasikan Pedoman Partai.
- c.. Menetapkan/mengambil keputusan terhadap produk Peraturan Partai yang saling bertentangan atau tumpang tindih.
- d. Membahas rancangan pedoman atas usul Dewan Pengurus Pusat atau Dewan Syariah Pusat.
- e. Menyusun rencana program dan anggaran tahunan Majelis Pertimbangan Pusat untuk diajukan kepada Majelis Syura melalui Dewan Pengurus Pusat.
- f. Mengajukan laporan kerja dan kinerja kepada setiap 6 (enam) bulan kepada Dewan Pimpinan Tingkat Pusat.

Dari ketentuan yang ada menurut Pasal 13 AD PKS tersebut, wewenang utama MP adalah sebagai lembaga pemberi pertimbangan kepada DPP dan MSP agar semua Putusan, kebijakan, dan program kedua lembaga ini tetap sesuai dengan Putusan MSP. MPP juga memiliki wewenang mengambil keputusan terhadap produk Peraturan Partai (khususnya Peraturan DPP dan MSP) yang saling

betentangan. Selain itu MPP mempunyai wewenang memberi rekomendasi kepada DPP dan DSP atas rancangan Pedoman yang diusulkan oleh kedua lembaga ini. Karena itu berkenaan dengan pencalonan anggota DPR yang wewenang pengusulannya adalah dari DPP, MPP memiliki wewenang untuk memberi rekomendasi atas usulan tersebut.

Dewan Pengurus Pusat (DPP)

Dewan Pengurus Pusat adalah lembaga yang menurut ketentuan Pasal 14 ayat (1) Anggaran Dasar PKS merupakan lembaga yang berkedudukan sejajar dengan Majelis Pertimbangan Pusat dan Dewan Syariah Pusat. Sama dengan Majelis Pertimbangan Pusat, Dewan Pengurus Pusat juga memiliki masa kerja selama 5 tahun, serta berada di bawah koordinasi dan pengawasan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat dan bertanggung-jawab kepada Majelis Syura Pusat. Menurut ayat 3 (tiga) Pasal ini, Dewan Pengurus Pusat memiliki tugas dan wewenang:

- a. Menetapkan dan mensosialisasikan Panduan Dewan Pengurus Pusat
- b. Melaksanakan *Manhaj Tarbiyah* (Sitim Pembinaan dan Pengkaderan) Partai dan mengontrol pelaksanaannya.
- c. Presiden Partai melaksanakan pembekuan struktur organisasi dan/atau kepengurusan Partai di tingkat Kabupaten/Kota tertentu, dalam hal terjadi pelanggaran terhadap peraturan dan kebijakan Partai, atas persetujuan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat.
- d. Ketentuan tentang pembekuan struktur organisasi dan/atau kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Panduan Dewan Pengurus Pusat.
- e. Menyampaikan laporan kerja dan kinerja setiap 6 (enam) bulan kepada Dewan Pimpinan Tingkat Pusat.

DPP PKS memiliki wewenang penting dalam pengelolaan organisasi PKS dari aspek pembinaan pengkaderan dan pembinaan organisasi secara struktural terdapa DPW PKS di seluruh Indonesia. Dalam proses pencalonan anggota DPR RI, DPP memiliki wewenang menetapkan Daftar Calon Tetap anggota DPR RI dari PKS atas rekomendasi DPTP. Daftar Calon Sementara anggota DPR RI diperoleh oleh DPTP atas usulan dari wilayah-wilayah dan atas usulan DPP yang memiliki wewenang melakukan pembinaan pengkaderan.

Dewan Syari'ah Pusat (DSP)

Menurut Pasal 15 Anggaran dasar PKS, Dewan Syariah Pusat adalah lembaga yang berkedudukan sejajar dengan Majelis Pertimbangan Pusat dan Dewan Pengurus Pusat, memiliki masa kerja 5 (lima) tahun, di bawah koordinasi dan pengawasan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat dan bertanggung-jawab kepada Majelis Syura Pusat. Ayat 3 (tiga) Pasal 15 Anggaran Dasar PKS menyebutkan bahwa Dewan Syari'ah Pusat memiliki tugas dan wewenang untuk:

- a. Menetapkan dan mensosialisasikan Fatwa dan Panduan Dewan Syari'ah Pusat
- b. Menetapkan Putusan atas masalah-masalah syar'i yang dilimpahkan

oleh Majelis Syura.

- c. Menetapkan putusan atas masalah-masalah syar'i (qadha) di lingkungan Partai yang berasal dari Dewan Syari'ah Wilayah
- d. Menetapkan landasan syari'ah bagi Partai
- e. Menyampaikan laporan kerja dan kinerja setiap 6 (enam) bulan kepada Dewan Pimpinan Tingkat Pusat.

Dalam sebuah Partai Islam seperti PKS, wewenang Dewan Syari'ah sangat strategis karena lembaga inilah yang menterjemahkan nilai ideologis Partai ke dalam Fatwa dan Panduan yang harus dijadikan pedoman oleh semua lembaga di Partai, termasuk MSP dan DPTP. Dalam hal proses pencalonan anggota DPR vRI, DSP memiliki wewenang untuk menetapkan fatwa berupa bayan yang harus dijadikan pedoman oleh DPP dan DPTP serta MPP dalam melakukan proses berkenaan dengan pencalonan tersebut. Bayan DSP berkenaan dengan hak politik perempuan terkait dengan pencalonan anggota DPR adalah Bayan DSP 19/B/K/DSP-PKS/1429 tentang Aktivitas Dakwah dan Politik Muslimah.

Perempuan di Majelis Syura Pusat

Posisi perempuan dalam struktur kewenangan di PKS tidak terlepas dari karakter PKS sebagai sebuah partai. Banyak teori menjelaskan partai politik. Robert Michels²⁵, menggunakan sudut pandang sosiologi politik sampai kepada kesimpulannya yang terkenal tentang *The Iron Law of Oligarchy*, sebuah "hukum" yang berisi diktum bahwa kecenderungan oligarkhis tidak akan pernah dapat dihindari oleh setiap organisasi, tidak peduli apapun organisasi tersebut, termasuk partai politik. Dengan "hukum" ini, Michels menolak argumen bahwa secara internal partai politik akan dapat bersikap demokratis. Partai politik selalu akan membutuhkan para ahli organisasi untuk melakukan pengelolaan partai. Para ahli ini akhirnya akan menjadi sekelompok kecil *oligarch* yang selalu mempertahankan kepentingan dan posisinya.

Pada Bab 1 telah dijelaskan bahwa sebagai sebuah partai, PKS juga dapat dijelaskan dengan pendekatan yang lebih baru yaitu dari sisi struktur organisasi. Maurice Duverger adalah ahli yang menjadi pelopor pendekatan ini, yang menurut Sartori²⁶ pendekatan ini meletakkan argumen bahwa sebuah demokrasi selalu membutuhkan tatanan struktur tertentu dan bukan struktur lainnya. Di sisi lain teori organisasi lebih berfokus pada masalah organisasi dan bukan masalah demokrasi.

PKS sebagai partai juga bisa dikaji dari teori Sartori yang lebih melihat partai dari sisi internal, yaitu rivalitas antar sub-unit dalam partai. Hal ini juga telah dikemukakan dalam Bab 1 bahwa setiap partai selalu terdiri dari agregasi orang-orang yang membentuk konstelasi persaingan antar kelompok. Partai bahkan dapat disebut sebagai konfederasi longgar antara sub-sub partai. Karena itu mengkaji pengelompokan partai dalam kelompok-kelompok sub-partai dan

²⁵ Robert Michels, *The Iron Law of Oligarchy*, dalam Bernard E. Brown, 2006. *Comparaitve Politics. Notes and Readings*. Belmont, California: Thomson Wadsworth. Hal. 312-317.

²⁶ Giovanni Sartori, 1976. *Parties and Party System. A Framework for Analysis*. Cambridge: Cambridge. University Press. Hal. 71.

interaksi serta persaingan diantaranya menjadi kajian yang menarik dalam studi tentang PKS.²⁷

Di luar teori Michels, Duverger, dan Sartori di muka, terdapat teori-teori lain yang dapat dipergunakan untuk menganalisis partai politik dari sudut pandang struktur. Teori-teori tersebut antara lain adalah teori Gaetano Mosca²⁸ tentang *The Political Class* dan teori Vilfredo Pareto²⁹ tentang *The Governing Elite*. Dalam *The Rulling Class*, Mosca mengemukakan argumennya bahwa di setiap masyarakat selalu akan muncul dua kelompok manusia. Kelompok pertama adalah kelompok kecil yang melaksanakan semua fungsi politik, memonopoli kekuasaan dan menikmati semua kelebihan karena kekuasaan yang dimiliki. Kelompok kedua adalah kelompok yang merupakan bagian terbesar masyarakat dan yang diperintah serta diawasi oleh kelompok pertama. Sementara itu Pareto mengemukakan argumennya bahwa setiap kelompok manusia itu selalu akan diperintah oleh elit, oleh sekelompok kecil orang yang dipilih dari keseluruhan penduduk, dan bahwa satu oligarkhilah yang selalu memerintah.

Kesemua teori tersebut memiliki kekhasan masing-masing dalam menggambarkan fenomena kekuasaan, baik dalam partai maupun dalam masyarakat yang lebih luas. Meski berbeda sudut pandang dalam menggambarkan fenomena kekuasaan, tetapi kesemuanya menggunakan konsep kekuasaan yang sama, yaitu kekuasaan sebagai kemampuan seseorang untuk membuat orang lain melakukan sesuatu sesuai dengan keinginannya. Judith Squires³⁰ mengkritik konsepsi seperti itu dan menawarkan konsep kekuasaan yang lebih sesuai dengan kepentingan perjuangan perempuan untuk memperoleh kekuasaan, yaitu konsep kekuasaan sebagai *power to*, atau kekuasaan bukan selalu berarti kemampuan membuat orang lain mengikuti kemauan kita, tetapi lebih bermakna sebagai kapasitas untuk melakukan sesuatu, baik itu untuk mempengaruhi orang lain maupun tidak. Karena itu, berbeda dengan para teoritis yang sudah disebutkan di muka yang tidak menjadikan gender sebagai aspek penting untuk dikaji dalam studi tentang partai politik, studi ini menjadikan gender sebagai sudut pandang penting karena perempuan mempunyai masalah berbeda dengan laki-laki, baik dengan demokrasi dalam partai maupun dengan struktur kekuasaan dalam partai. Dalam studi ini, memahami posisi perempuan dalam struktur kewenangan di PKS dimaknai sebagai upaya memahami bagaimana individu-individu perempuan PKS diberi posisi dalam struktur kekuasaan di PKS

²⁷ *Ibid.* Hal. 72

²⁸ James A. Bill dan Robert L. Hardgrave, 1973. *Comparative Politics, the Quest for Theory*. Columbus, Ohio: Charles E Merrill Publishing Company. Hal. 148

²⁹ *Ibid.* Hal. 151.

³⁰ Judith Squires, 1999. *Gender in Political Theory*. Cambridge: Polity Press. Hal. 32-42.

Dalam tulisannya ini Judith Squires mengkritik konsepsi kekuasaan seperti ini karena kekuasaan selalu dimaknai sebagai *power over*. Pengertian seperti itu disebutnya problematik karena kekuasaan selalu bermakna *zero-sum* yang berarti seseorang akan berada pada posisi mempengaruhi atau dipengaruhi. Menurutnya pengertian kekuasaan sebagai kapasitas untuk melakukan sesuatu atau *power to* lebih sesuai dengan perjuangan perempuan untuk memperoleh kekuasaan. Dengan konsepsi demikian maka perjuangan perempuan untuk memperoleh kekuasaan tidak dimaknai sebagai perjuangan untuk mempengaruhi orang lain, lebih khusus laki-laki, untuk mengikuti kehendak perempuan. Dengan menggunakan konsep kekuasaan sebagai kapasitas untuk melakukan sesuatu atau *power to* maka perempuan dapat mempraktekkan kekuasaan bersama-sama dengan laki-laki untuk tujuan bersama, tidak perlu saling menegasikan.

dan bagaimana perempuan PKS mengartikulasikan kekuasaan yang diberikan kepadanya. Pemberian posisi kepada perempuan dalam struktur kekuasaan di PKS sebenarnya merupakan cerminan kehendak PKS tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh perempuan PKS dengan kekuasaan yang diberikan tersebut. Hal ini diterjemahkan dari konsepsi *the constituted subject* yang merupakan bagian dari teori Moya Lloyd tentang perempuan sebagai *the subject-in process*. Dengan mengutip pendapat Michael Foucault dalam bukunya *Two Lectures*, Moya Lloyd memaknai *the constituted subject* sebagai individu yang bukan hanya merefleksikan diri sebagai akibat kekuasaan, tetapi pada waktu yang sama juga menjadi alat artikulasi kekuasaan tersebut. Karena itu perempuan sebagai subyek politik adalah pengejawantahan dan sekaligus "kendaraan" bagi kekuasaan.³¹

Untuk mendapatkan gambaran mengenai perempuan PKS sebagai *the constituted subject* di PKS, di sini dikaji posisi-posisi kekuasaan yang diberikan oleh PKS kepada para perempuan PKS. Dikaji juga bagaimana perempuan PKS mengartikulasikan atau merefleksikan kekuasaan mereka sebagai pejabat partai. Untuk itu dikaji posisi perempuan PKS dalam 4 (empat) lembaga PKS tingkat Pusat, yaitu Majelis Syura, Dewan Majelis Pertimbangan Pusat, Dewan Pengurus Pusat, dan Dewan Syariah Pusat. beberapa pertanyaan penelitian diajukan kepada pejabat PKS di Majelis Syura Pusat, Dewan Pengurus Pusat, Dewan Syariah Pusat, dan Majelis Pertimbangan Pusat. Untuk mengumpulkan data tentang posisi perempuan PKS dalam struktur kekuasaan di PKS, beberapa pertanyaan diajukan kepada para narasumber, yaitu (1) jumlah dan posisi perempuan pada masing-masing organisasi kepengurusan pusat PKS; (2) pandangan tentang hak perempuan untuk menduduki berbagai jabatan politik dalam kepengurusan pusat PKS; (3) dasar pemikiran yang melatarbelakangi pandangan sebagaimana pada poin 2; (4) target-target yang ingin dicapai oleh PKS dengan posisi perempuan di struktur kepengurusan PKS; (5) sikap dan tindakan perempuan PKS sebagai refleksi posisinya di kepengurusan pusat PKS

Majlis Syura Pusat PKS memiliki 99 orang anggota dengan 10 orang diantaranya adalah perempuan³². Ini berarti perempuan hanya meliputi sekitar 10% keanggotaan Majelis Syura Pusat. Dengan sedikitnya jumlah perempuan di Majelis Syura Pusat maka berarti hanya sedikit perempuan PKS yang memiliki akses terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang lembaga Majelis Syura Pusat.

Sedikitnya jumlah perempuan PKS di Majelis Syura ini masih jauh dari angka *critical mass*³³ 30% sebelum kehadiran mereka dapat memberi pengaruh terhadap kebijakan dan praktek-praktek politik PKS yang dapat menguntungkan perempuan PKS. Para perempuan PKS narasumber penelitian ini mempunyai

³¹ Moya Lloyd. *Op cit.* Hal. 22

³² Jumlah ini pada saat penelitian dilakukan antara 2009-2010.

³³ Dalam buku yang dikeluarkan oleh *United Nations Research Institute for Social Development (UNRISD)* yang berjudul *Gender Equality, Striving for Justice in an Unequal World*, khususnya dalam artikel berjudul *Towards a "Critical Mass"*, jumlah perempuan yang diperlukan agar perempuan dapat mengubah kebijakan dan praktek-praktek politik agar lebih sesuai dengan kebutuhan perempuan adalah 30%. Angka kritis 30% ini diperoleh dari pengalaman Negara-negara Skandinavia yang berdasar sejarahnya menunjukkan bahwa kebijakan dan praktek politik negara-negara ini mulai lebih responsif terhadap kebutuhan perempuan setelah negara-negara tersebut memiliki perwakilan perempuan di badan perwakilan sebesar sekitar 30%

pendapat bertentangan berkenaan dengan masalah sedikitnya perempuan di Majelis Syura dan implikasinya terhadap perempuan PKS. Terdapat perempuan narasumber yang menyatakan bahwa sedikitnya jumlah perempuan di Majelis Syura bukan merupakan masalah sementara narasumber lain menyatakan bahwa sedikitnya jumlah perempuan menyebabkan suasana atau kondisi yang tidak menyenangkan untuk perempuan. Narasumber anggota Majelis Syura yang menyatakan bahwa jumlah perempuan yang sedikit di Majelis ini bukan masalah adalah ibu Y. Menurutnya³⁴ jumlah perempuan di Majelis Syura yang hanya sepuluh orang, sekitar 10% dari seluruh anggota Majelis Syura Pusat tidak masalah, cukup mewakili karena mereka bebas berbicara dalam rapat dan sidang Majelis Syura. Menurutnya perempuan PKS selalu mengupayakan *informal meeting* untuk membahas berbagai isu di luar pertemuan Majelis Syura. Meski menilai jumlah sepuluh orang tersebut sudah cukup, tetapi Yoyoh Yusroh menyatakan bersyukur jika mendapat kesempatan lebih dari sekedar 10% tersebut.

Sementara itu Ucti³⁵, anggota Majelis Syura lainnya justru menyatakan bahwa sedikitnya jumlah perempuan di Majelis Syura sering menimbulkan perasaan tidak enak di dalam pertemuan, khususnya jika terdapat perempuan anggota Majelis Syura yang tidak bisa datang ke pertemuan. Ucti menyatakan³⁶ bahwa terdapat iklim yang memberikan penghormatan berlebihan terhadap para ustad. Karena itu menurutnya jika terjadi pemilu raya internal maka para ustadlah yang lebih besar kesempatannya untuk terpilih. Lebih lanjut dia menyatakan bahwa sedikitnya jumlah perempuan sebagai anggota Majelis Syura membuat perempuan menghadapi suasana yang kurang enak pada rapat-rapat Majelis Syura, lebih-lebih jika ada perempuan yang berhalangan hadir, suasana akan semakin kurang enak karena hanya akan ada sedikit perempuan diantara sekian banyak laki-laki.

Ucti menyatakan bahwa sedikitnya jumlah perempuan di Majelis Syura memberi beban psikologis dan membuat suasana tidak cair untuk mengatakan berbagai hal. Ada juga suasana atau iklim yang disebutnya membuat dia sebagai perempuan merasa terasing.³⁷ Perempuan juga belum berhasil mengoptimalkan perannya di Majelis Syura. Aspek lain yang dikatakannya adalah bahwa iklim yang ada di Majelis Syura adalah penghormatan yang sangat tinggi terhadap para ustad, para ulama.

Menurut Ucti, dengan demikian perempuan PKS masih belum berhasil mengoptimalkan peran dalam melaksanakan wewenang Majelis Syura Pusat yang menurut ketentuan Pasal 11 Anggaran Dasar PKS adalah:

- a. Memilih dan menetapkan ketua Majelis Syura segera setelah pelantikan anggota Majelis Syura
- b. Atas usul Ketua Majelis Syura, menetapkan:
 - 1) Ketua Majelis Pertimbangan Pusat

³⁴ Hasil wawancara dengan ibu Y tanggal 4 April 2009 di Tangerang, Banten .

³⁵ Nama disamarkan atas permintaan yang bersangkutan. Wawancara dengan Ucti dilakukan di Jakarta 10 Maret 2009.

³⁶ *Ibid*

³⁷ Hal ini sesuai dengan temuan UNRISD tentang pengaruh *critical mass* terhadap kultur yang terbentuk dalam organisasi ketika *critical mass* tersebut tidak terpenuhi. Lihat UNRISD. *Op. ci. hal.149*

- 2) Presiden, Sekretaris Jendral, dan Bendahara Umum Dewan Pengurus Pusat
 - 3) Ketua Dewan Syari'ah Pusat
 - 4) Beberapa orang tertentu sebagai Anggota Majelis Pertimbangan Pusat, Dewan Pengurus Pusat dan Dewan Syari'ah Pusat
- c. Mengubah dan menetapkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai
 - d. Menetapkan *Platform*, Visi dan Misi Partai
 - e. Menetapkan kebijakan dasar dan rencana strategis Partai
 - f. Menetapkan anggaran belanja Majelis Syura
 - g. Membahas program kerja tahunan, rancangan anggaran, laporan umum, laporan penggunaan anggaran, dan laporan kekayaan Partai
 - h. Membentuk komisi-komisi tetap dan/atau sementara di lingkungan Majelis Syuro
 - i. Mengevaluasi kinerja Dewan Pimpinan Tingkat Pusat
 - j. Menentukan sikap terhadap berbagai aliran, kelompok dan berbagai permasalahan yang berkembang di Indonesia
 - k. Menerima pengunduran diri pimpinan dan/atau anggota dari kepengurusan Partai yang diangkat berdasarkan Putusan Majelis Syuro
 - l. Menetapkan pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia atas rekomendasi Dewan Pimpinan Tingkat Pusat

Pernyataan Uchti ini mengkonfirmasi temuan *Inter-Parliamentary Union*³⁸(IPU) yang pada survei tahun 1999 terhadap 189 perempuan anggota DPR dari 65 negara menemukan bahwa ada korelasi yang kuat antara keberadaan perempuan di parlemen dengan perubahan dan perbaikan beberapa variabel politik, yaitu perubahan dalam prioritas dan hasil-hasil politik, penekanan proses politik pada penyelesaian masalah dan bukan pada kekuasaan, perubahan proses politik, perubahan perilaku dan praktek-praktek politik, proses politik yang lebih luas dan kaya, politik lebih responsive terhadap kebutuhan masyarakat, tanggapan yang lebih baik terhadap kebutuhan perempuan, perubahan menuju kesetaraan gender yang sesungguhnya, demokrasi yang lebih baik, transparansi yang lebih meningkat, peningkatan pemerintahan, politik yang menggunakan pendekatan saling menguntungkan, peningkatan keyakinan masyarakat terhadap politik, dan perubahan bahasa dan semangat dalam kehidupan politik dan parlemen.

Pernyataan Uchti menunjukkan bahwa ketika perempuan hanya merupakan sedikit entitas (10%) diantara sekian banyak laki-laki anggota Majelis Syura (90%), maka perempuan akan merasakan suasana yang tidak enak, adanya tingkah laku, bahasa dan kebiasaan-kebiasaan yang tidak selalu cocok dengan kebiasaan perempuan, prioritas-prioritas politik yang tidak selalu sesuai dengan kondisi dan kebutuhan perempuan. Kenyataan bahwa sedikitnya jumlah perempuan PKS di Majelis Syura berpengaruh terhadap tidak responsifnya PKS terhadap kebutuhan dan kondisi perempuan terlihat dari pernyataan Uchti lebih lanjut, bahwa penyebab sedikitnya perempuan di Majelis Syura adalah karena

³⁸ *Inter-Parliamentary Union*, 2000. *Series "Reports and Documents". Numberr 36. Politics: Women's Insight*. Hal. 30-52.

hanya sedikit perempuan yang dapat memenuhi kriteria atau persyaratan untuk menjadi anggota Majelis Syura. Hal ini terlihat dalam pernyataan Uchti berikut:

Sebelum berbicara berapa yang dianggap lebih proporsional, lebih merepresentasi, untuk menjamin aspirasi bisa tersuarakan dengan baik, perlu saya gambarkan bahwa mengapa 10 itu tidak semata karena hanya ingin memberi jatah 10%. Karena prasyarat itu berlaku formal, berlaku sama untuk perempuan dan laki-laki. Kebetulan untuk seluruh persyaratan itu perempuan yang bisa terpilih cuma sedikit saja³⁹.

Pernyataan Uchti ini mempunyai dasar karena menurut Anggaran Rumah Tangga PKS Pasal 7 syarat-syarat untuk menjadi anggota Majelis Syura (baik yang merupakan Anggota Tetap, Anggota yang dipilih oleh Anggota Inti Partai maupun Anggota yang dipilih oleh Majelis Syura) adalah:

1. Anggota Ahli dengan masa keanggotaan tidak kurang dari 5 (lima) tahun Hijriah.
2. Berpegang teguh kepada Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, peraturan dan kebijakan Partai
3. Mampu menunaikan kewajiban-kewajiban Anggota Majelis Syura
4. Tidak mendapatkan sanksi Partai dalam 1 (satu) tahun terakhir yang menyebabkan dicabut haknya untuk dipilih
5. Berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun Hijriah
6. Berwawasan syar'i, amanah dan berwibawa.

Selain masa keanggotaan sebagai anggota ahli sekurang-kurangnya 5 tahun dan usia yang minimal 30 tahun hijriah, empat persyaratan lain bersifat kualitatif tanpa ukuran yang jelas. Untuk menjadi anggota ahli, seseorang harus memenuhi persyaratan yang menurut ketentuan pasal 5 Anggaran Rumah Tangga PKS adalah anggota inti PKS yang sudah melewati jenjang sebagai anggota pemula, anggota muda, anggota madya dan anggota dewasa serta harus diangkat oleh Dewan Pengurus Pusat. Berbeda dengan anggota ahli dan anggota purna yang diangkat oleh DPP, anggota pemula dan anggota muda diangkat oleh Dewan Pengurus Daerah (DPD), sementara anggota madya dan anggota dewasa diangkat oleh Dewan Pengurus Wilayah (DPW). Dengan kata lain seorang perempuan yang ingin menjadi atau akan dipromosikan untuk menjadi anggota Majelis Syura Pusat harus melalui proses *screening* bertingkat, pertama di DPD, kemudian di DPW dan terakhir di DPP.

PKS tentu memiliki alasan kuat untuk menyusun persyaratan bertingkat seperti itu karena kalau tidak ada persyaratan seperti itu maka disiplin kader partai yang menjadi fondasi PKS sebagai partai kader tidak akan dapat dijamin. Tetapi persyaratan seperti itu juga menjadi ciri adanya kecenderungan oligarkhi dalam PKS karena ciri terpenting partai oligarkhis menurut Michels adalah ketika para ahli organisasi yang mengelola partai sengaja menyusun berbagai persyaratan yang menghalangi terjadinya sirkulasi elit dalam partai.⁴⁰ Meski menurut Michels oligarkhi adalah kecenderungan yang terjadi pada semua partai, tetapi kecenderungan ini semakin kuat ketika terdapat aturan-aturan internal yang secara ketat mengatur mobilitas vertikal para anggotanya.

³⁹ Hasil wawancara dengan Uchti di Jakarta 10 Maret 2009.

⁴⁰ Bernard E. Brown. *Op. cit.* hal. 312-317

Ketika aturan seperti ini ada di PKS, maka perempuan PKS adalah ”korban oligarkhi partai” karena hanya sedikit yang dapat memenuhi persyaratan-persyaratan formal ini. Informasi dari Hidayat Nurwachid menyatakan bahwa perempuan PKS memulai karir politik pada usia yang sangat muda dan bahwa pada saat ini masih belum senior sehingga belum banyak yang dapat dipromosikan ke posisi tinggi dalam partai. Nurwachid menyatakan:

Karena mereka (perempuan PKS) berangkat dari umur sangat muda, jadi ketika pada umur sekarang ini mereka belum senior dibandingkan dengan yang lain. Mereka belum sangat mengakar di masyarakat dibanding dengan yang lain yang sudah lebih dulu. Jadi ini mungkin hanya karena faktor waktu saja karenanya⁴¹

Jika perempuan PKS mayoritas belum senior, maka sulit bagi mereka mencapai status anggota ahli PKS karena berarti mereka harus membina karir politik mereka secara terus-menerus. Dalam hal ini informasi dari ibu Y menunjukkan bahwa argumen tentang belum seniornya perempuan PKS tidak benar. Ibu Y menyatakan bahwa perempuan PKS memulai karir politik bersamaan dengan laki-laki pada saat mereka memulai gerakan dakwah kampus secara bersama-sama dengan laki-laki.

Sama bu, kita bareng. Di mesjid-mesjid dulu juga bareng karena aktivis masjid itu bukan hanya laki-laki, perempuan juga, jadi kita selalu bekerjasama. Tidak betul bahwa *entry* perempuan di PKS itu lebih belakangan dari laki-laki.⁴²

Pernyataan ini menolak argumen Hidayat Nurwachid bahwa perempuan PKS belum senior. Ibu Y menunjukkan bukti bahwa perempuan PKS memulai karir politik bersamaan dengan laki-laki. Meski demikian, kenyataannya hanya sedikit perempuan yang dapat menjadi anggota Majelis Syura. Perbedaan pendapat ini dapat dijelaskan dengan melihat lebih lanjut komposisi keanggotaan Majelis Syura.

Menurut ketentuan Pasal 7 (tujuh) ayat (2) dan (3) Anggaran Rumah Tangga PKS, Majelis Syura terdiri dari sekurang-kurangnya 51 orang dan sebanyak-banyaknya 99 orang. Anggota Majelis Syura terdiri dari Anggota tetap, anggota terpilih oleh Anggota Inti Partai, dan anggota terpilih oleh Majelis Syura. Selanjutnya, menurut ketentuan Pasal 8 (delapan) ayat (1) Anggaran Rumah Tangga PKS, pemilihan anggota Majelis Syura yang dipilih oleh Anggota Inti Partai diselenggarakan melalui pemilihan raya yang dilaksanakan oleh Panitia yang dibentuk oleh Majelis Syura. Sementara itu, menurut Pasal 8 (delapan) ayat (3), Anggota yang dipilih oleh Majelis Syura adalah orang-orang yang diperlukan oleh Partai dan terdiri dari pakar dan tokoh yang jumlahnya tidak melebihi jumlah yang dipilih oleh Anggota Inti Partai. Agar dapat dipilih oleh Majelis Syura untuk menjadi anggota Majelis Syura, kepakaran dan ketokohan ini ditentukan oleh kemampuan untuk berpikir makro dan strategis dan memiliki keahlian-keahlian spesifik yang menggambarkan universalitas Islam. Dengan demikian, kepakaran dan ketokohan ini tidak semata-mata ditentukan oleh pemahaman keIslaman seseorang, tetapi juga keahlian lain yang mendukung upaya menunjukkan bahwa Islam bersifat universal, tidak eksklusif yang secara khusus hanya berurusan

⁴¹ Hasil wawancara dengan Hidayat Nurwachid di Bandarlampung, 20 Juni 2009

⁴² Hasil wawancara dengan ibu Y di Tangerang 4 April 2009.

dengan urusan agama. Keahlian-keahlian lain itu antara lain adalah ekonomi, pendidikan, kesehatan, teknologi, pertanian, kelautan, kehutanan, informatika, dan sebagainya. Kepakaran dan ketokohan dengan demikian dapat dibangun melalui penguasaan berbagai bidang keahlian.

Perempuan PKS sulit masuk menjadi anggota Majelis Syura dari ketiga jalur keanggotaan. *Pertama*, tidak ada perempuan yang menjadi anggota tetap Majelis Syura karena tidak ada yang menjadi pimpinan PKS pada tingkat Pusat. Semua lembaga, yaitu Majelis Syura, Dewan Pimpinan Tingkat Pusat, Majelis Pertimbangan Pusat, Dewan Pengurus Pusat, dan Dewan Syari'ah Pusat PKS diketuai oleh laki-laki. *Kedua*, perempuan juga sulit masuk melalui jalur pemilihan oleh Majelis Syura karena perempuan harus mampu menunjukkan kepakaran yang dianggap layak untuk menduduki jabatan di Majelis Syura Pusat. *Ketiga*, perempuan juga sulit masuk melalui jalur pemilihan oleh Anggota Inti PKS karena anggota inti ini lebih senang memilih laki-laki sebagai anggota Majelis Syura. Hal ini sudah dijelaskan oleh Uchti di bagian lebih awal bahwa di PKS berkembang penghormatan, ketakziman yang sangat tinggi kepada para ustad sehingga ketika secara internal harus memilih seseorang untuk duduk di Majelis Syura anggota inti akan secara otomatis memilih para ustad tersebut

Kecenderungan oligarkhis dalam PKS⁴³ dan kecenderungan penghargaan yang sangat tinggi terhadap para ustad menunjukkan bahwa demokrasi sulit berkembang di internal PKS. Hal ini disebabkan kebebasan sebagai prinsip dasar demokrasi⁴⁴ tidak berkembang di PKS. Ketika iklim kebebasan tidak berkembang, ditambah dengan tidak terpenuhinya prasyarat *critical mass* 30% dalam struktur kekuasaan di Majelis Syura, maka perempuan PKS sulit memperjuangkan perubahan signifikan untuk mendorong agar lebih banyak perempuan dapat menjadi anggota Majelis Syura, khususnya merubah prasyarat bagi keanggotaan Majelis Syura. Jika kita kembali ke teori awal yang menjadi basis analisis bab ini, yaitu bahwa perempuan PKS sebagai *the constituted subject* adalah individu-individu yang dipengaruhi oleh kekuasaan dan pada waktu yang sama menjadi sarana artikulasi kekuasaan, maka individu seperti Yoyoh Yusroh sekedar merefleksikan apa yang menjadi kehendak penguasa atau para pemimpin PKS. Bagi ibu Y, kekuasaan yang dimilikinya adalah *power to*⁴⁵ atau *kekuasaan untuk* memperkuat argumen tentang kekuasaan yang selama ini dikembangkan di PKS, yaitu bahwa perempuan harus memenuhi prasyarat tersebut tanpa mempersoalkan apakah prasyarat tersebut adil⁴⁶ untuk perempuan atau tidak. Menggunakan konsepsi keadilan yang ditawarkan oleh para feminis sebagai *an ethics of care*, ibu Y sebagai individu dengan berbagai kelebihan tidak memahami kondisi mayoritas perempuan PKS yang sulit mencapai posisi anggota ahli karena menjadi anggota ahli harus ditetapkan oleh DPP. Proses ini sangat sulit ditempuh mayoritas perempuan PKS. Hal ini terlihat dari pernyataannya

⁴³ Kecenderungan oligarkhis dalam PKS ini bisa dilihat dari adanya aturan internal yang mengatur mobilitas vertikal anggota PKS secara sangat ketat sehingga hanya anggota-anggota yang sudah melalui proses *screening* internal berlapis-lapis yang dapat menduduki jabatan elit dalam partai.

⁴⁴ David E. Apter, 1996. *Pengantar Analisa Politik*. Jakarta: LP3ES. Hal. 137

⁴⁵ Lihat Judith Squires. *Op. Cit.* hal. 32-45

⁴⁶ Menurut Judith Squires dalam bukunya *Gender in Political Theory*, para feminis menilai konsepsi keadilan yang selama ini diterima umum, bahwa keadilan adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban, adalah konsepsi yang menunjukkan *a manifestation of male psyche* dan menghendaki adanya pendefinisian baru yang melihat keadilan sebagai *an ethics of care*.

bahwa perempuan harus menunggu diberi kesempatan dulu agar mempunyai jumlah lebih banyak di Majelis Syura. Ibu Y menyatakan:

Cukup. Tapi kalau misalnya memang ada kesempatan lebih banyak lagi kami bersyukur. Hanya saat ini sepuluh orang itu sudah bisa mewakili suara teman-teman, karena kalau kami di PKS ini kan tidak hanya memperjuangkan aspirasi perempuan, tapi aspirasi semua.⁴⁷

Ibu Y tidak menjelaskan bagaimana kesempatan itu akan datang. Dia tidak mengatakan apapun soal perlunya perubahan prasyarat keanggotaan. Dia adalah aparat partai yang sepenuhnya menjadi representasi kebijakan dan aturan partai tentang prasyarat keanggotaan Majelis Syura. Pendapat ini merefleksikan argumen inti para penentang *affirmative action*. Bagi para penentang *affirmative action*, tindakan *affirmative action* dinilai sebagai tindakan yang mengkompensasi terjadinya diskriminasi di masa lalu (yang menyebabkan suatu kelompok masyarakat tertinggal dibanding kelompok masyarakat lainnya baik atas dasar ras, etnis, kelas sosial maupun gender) dengan tindakan diskriminatif bentuk lainnya saja. *Affirmative action* berarti menguntungkan satu pihak saja yang diuntungkan dengan tindakan tersebut tetapi mendiskriminasi kelompok yang tidak diuntungkan dengan tindakan tersebut.⁴⁸

Berbeda dengan ibu Y, Ucti dan ibu L menyatakan bahwa *affirmative action* harus dilakukan karena memang ada *start* yang tidak sama antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan politik. Ucti menyatakan pendapatnya sebagai berikut:

Affirmative action untuk penetapan 30% kuota berangkat dari kesadaran ada *start* yang tidak sama antara perempuan dan laki-laki. Mekanisme yang berlaku universal telah ada, namanya mekanisme pedoman promosi seleksi, nominasi dan promosi. Jadi seluruh perjalanan itu *ter-record*, ketahuan berbagai kiprahnya, dan kemudian pada setiap level ada *assessment*, kelayakan. Dengan demikian sebetulnya akan selalu bisa diketahui data tentang berapa perolehan, berapa peningkatan kadar perempuan dan sebagainya, dan itu menjadi dasar untuk mengatakan bahwa harus didesak peningkatannya. Tetapi sebelum itu berjalan dengan baik seperti sekarang ini, sudah ada *start* yang memang tidak sama dahulu. Jadi ketika sistem itu diberlakukan universal saat ini, ada yang tidak bisa ditawarkan, mau *affirmative action* atau apapun kemudian bisa melompati beberapa prasyarat yang sangat prinsip. Itu yang kemudian tetap membutuhkan waktu untuk mengejar.⁴⁹

:

Ucti melihat bahwa perempuan mempunyai kondisi *start* yang tidak sama dengan laki-laki ketika masuk dunia politik. Karena itu *affirmative action* bisa dilakukan meski beberapa syarat yang sangat prinsip, seperti *training* bagi anggota, tetap harus dipenuhi. Perlunya *affirmative action* karena adanya kondisi *start* yang tidak sama antara perempuan dengan laki-laki juga dikemukakan oleh ibu L. Dia mengatakan:

⁴⁷ Hasil wawancara dengan ibu Y 4 April 2009 di Tangerang.

⁴⁸ Lihat diskusi masalah ini dalam Irish Marion Young, 1990. *Politics of Difference*. New Jersey: Princeton University Press. Hal..193-198.

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Ucti 10 Maret 2009 di Jakarta

Kalau di sana (negara Skandinavia) ada *affirmative*. Kita sendiri belum punya pola yang jelas *affirmative* terhadap suara perempuan, karena di kalangan perempuan banyak yang merasa “mbok jangan digitukan, perempuan seperti meminta-minta”. Bukan meminta-minta kalau *starting pointnya* sama.⁵⁰

Argumen yang dikemukakan oleh Ucti dan ibu L tentang adanya kondisi *start* yang tidak sama yang menjadi dasar perlunya *affirmative action* untuk meningkatkan keterwakilan perempuan PKS di Majelis Syura Pusat merepresentasikan paradigma perlunya keadilan sosial atau *social justice*. *Affirmative action* bukan tindakan diskriminatif terhadap kelompok yang tidak diprioritaskan, tetapi adalah tindakan yang perlu diambil untuk menciptakan keadilan sosial bagi kelompok yang selama ini secara kultur dan struktur mempunyai pengalaman hidup sebagai kelompok yang diopresi dan didominasi. *Affirmative action* bukanlah diskriminasi, tetapi adalah tindakan distribusi posisi untuk menciptakan keadilan sosial.⁵¹

Terlepas dari pandangan Ucti dan ibu L yang menyatakan perlunya *affirmative action*, data menunjukkan bahwa hanya terdapat 10 perempuan anggota Majelis Syura dari keseluruhan total 99 anggota Majelis Syura. Dari 10 perempuan anggota Majelis Syura PKS tersebut, 8 (delapan) orang adalah hubaro atau ahli yang terpilih oleh Majelis Syura, dan 2 (dua) orang terpilih oleh Anggota Inti Partai melalui mekanisme pemilihan raya atau pemira. Meski masalah senioritas dan berbagai persyaratan dinyatakan menghalangi munculnya lebih banyak perempuan menjadi anggota Majelis Syura dari jalur pemilihan oleh Majelis Syura dan pemilihan oleh anggota inti, keseluruhan narasumber tidak dapat menjelaskan mengapa jalur *hubaro* juga tidak mampu menghasilkan lebih banyak perempuan menjadi anggota Majelis Syura. Beberapa narasumber lain yang merupakan calon anggota DPR yang diwawancarai untuk penelitian ini dan bukan anggota Majelis Syura, yaitu ibu KA, ibu S, dan ibu KK menunjukkan kualitas ketokohan dan pribadi yang tidak kalah dengan para perempuan anggota Majelis Syura yang diwawancarai untuk penelitian ini. Hal ini terlihat dari rekam jejak dan kinerja yang telah mereka lakukan yang dibahas lebih lanjut dalam Bab IV.

Kontroversi tentang sulitnya perempuan masuk dalam jajaran elit kepengurusan organisasi dan dalam struktur kewenangan tinggi di tempat kerja (dalam hal ini dapat diartikan bagi keanggotaan Majelis Syura Pusat PKS yang merupakan jabatan elit PKS) meski para perempuan sudah menunjukkan kualitas yang dipersyaratkan dibahas panjang lebar oleh Young dalam tulisannya tentang *the Myth of Merit*⁵². Dalam tulisan tersebut Young mengemukakan argumennya bahwa sebenarnya kriteria *merit* atau kualitas dan pencapaian yang dipersyaratkan (untuk menduduki jabatan tertentu) dapat menjadi agenda tersembunyi untuk mencegah masuknya perempuan dalam jabatan-jabatan penting. Alasannya adalah bahwa ukuran terpenting dalam *merit system* yang mensyaratkan adanya ketrampilan tertentu yang benar-benar dapat diukur untuk menjalankan pekerjaan di organisasi adalah pencapaian pendidikan yang

⁵⁰ Hasil wawancara dengan ibu L 27 Januari 2009 di Jakarta.

⁵¹ Irish Marion Young. *Op. cit.* hal 198-200.

⁵² Irish Marion Young. *op. cit.* hal. 200-206.

memungkinkan seseorang memiliki keahlian yang dipersyaratkan. Dengan mengutip hasil penelitian Randal Collin, Young menyatakan bahwa pencapaian pendidikan hanya menunjukkan korelasi rendah dengan kemampuan orang melakukan pekerjaannya. Menurut Young, pendidikan juga bukan proses yang dapat dinikmati semua orang secara adil. Masalah kemampuan ekonomi, lokasi tempat tinggal (dalam kasus di Indonesia bisa berupa perbedaan desa- kota, wilayah barat-timur), tetap menghalangi kesempatan kelompok-kelompok masyarakat tertentu memperoleh pendidikan. Karena itu *merit system* dalam pengelolaan organisasi politik disebutkan lebih merupakan mitologi daripada kriteria yang benar-benar dapat diukur. Sebagai sebuah mitologi, maka ukurannya lebih besar kemungkinannya untuk bias daripada untuk adil.

Dilihat dari kriteria keahlian sebagai prasyarat menjadi anggota Majelis Syura Pusat, kesepuluh perempuan anggota Majelis Syura ini, yaitu Uchti, Husna Hidayati, Yoyoh Yusroh, Aan Rochana, Herlini Amran, Ledia Hanifa, Wiryaningsih, Umi Hasanah, Siti Urbayatun, dan Siti Zainab mempunyai latar belakang bervariasi. Kesepuluh orang tersebut ada yang berprofesi sebagai pendidik (guru), dosen, pemerhati masalah anak, psikolog, kesehatan masyarakat, pendidikan Islam, dan agama Islam. Keahlian-keahlian tersebutlah yang menjadi pertimbangan mereka dipilih oleh Majelis Syura untuk menjadi anggota dari unsur *hubaro* atau pakar.

Komposisi keanggotaan perempuan pada Majelis Syura yang lebih didominasi oleh perempuan yang terpilih oleh Majelis Syura dibanding yang terpilih oleh Anggota Inti Partai ini (8 banding 2) menunjukkan bahwa terdapat resistensi yang lebih kuat pada tingkat akar rumput Partai (yaitu Anggota Inti Partai) dibanding pada elit Partai (dalam hal ini anggota Majelis Syura). Hal ini berarti elit Partai lebih siap memberi peluang bagi peran politik perempuan dibanding anggota Partai pada umumnya.

Mekanisme pemilihan internal untuk memilih Ketua Majelis Syura juga semakin memperkecil akses perempuan kepada jabatan tertinggi dalam Partai karena hampir bisa dipastikan tidak akan ada anggota Majelis Syura yang bersedia memilih perempuan untuk menjadi Ketua Majelis Syura selama masih ada laki-laki yang dicalonkan. Senioritas dalam Partai yang selalu diasumsikan sebagai keunggulan moralitas, keteladanan moral dan amal, serta keluasan wawasan hanya dapat dipenuhi orang dengan posisi sangat tinggi, dan dalam partai dengan ideologi agama seperti PKS, ini dapat diasumsikan adalah para ustad paling senior, yaitu laki-laki.

Berbagai informasi yang diberikan para narasumber tentang posisi perempuan di Majelis Syura, dapat disimpulkan bahwa: *pertama*, struktur kekuasaan di Majelis Syura bersifat oligarkhis karena menghambat mobilitas vertikal perempuan PKS untuk menjadi anggota Majelis Syura. *Kedua*, terdapat perempuan PKS anggota Majelis Syura yang berpandangan bahwa sedikitnya jumlah perempuan di Majelis Syura bukan merupakan masalah sedangkan yang lain menyatakan hal itu membuat perempuan terasing di Majelis Syura dan suasana menjadi tidak cair bagi perempuan untuk menyampaikan berbagai pendapat secara bebas. *Ketiga*, terdapat perempuan anggota Majelis Syura yang sikap dan tindakannya merepresentasikan pandangan formal partai (mendukung pandangan bahwa prasyarat menjadi anggota Majelis Syura berlaku formal untuk semua baik laki-laki maupun perempuan) an mereka tidak melihat adanya hal yang dapat

dilakukan untuk merubah prasyarat tersebut) dan terdapat perempuan anggota Majelis Syura yang mendukung ide *affirmative action* untuk mendorong lebih banyak perempuan duduk dalam posisi elit di Majelis Syura. Ketiga aspek ini menunjukkan bahwa ekspresi perempuan sebagai *the constituted subject* dalam Majelis Syura tidak tunggal, mereka berbeda pandangan, sikap dan tindakan.

Perempuan PKS di Dewan Pimpinan Tingkat Pusat

Tidak terdapat seorangpun perempuan sebagai anggota Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP). Tidak adanya perempuan sebagai anggota DPTP bisa dijelaskan karena tidak seorangpun perempuan menduduki posisi tertinggi dalam berbagai lembaga PKS sedangkan DPTP yang merupakan badan pekerja atau abstraksi Majelis Syura beranggotakan pimpinan-pimpinan lembaga PKS tingkat Pusat. Hal ini terlihat dari ketentuan Anggaran Dasar (AD) PKS pasal 12 yang menyebutkan bahwa DPTP merupakan lembaga tinggi partai yang berfungsi sebagai Badan Pekerja Majelis Syura (AD PKS Pasal 12). Berdasar ketentuan pasal ini, Dewan Pimpinan Tingkat Pusat diketuai oleh Ketua Majelis Syura dan terdiri dari Ketua Majelis Pertimbangan Pusat, Presiden Partai, Ketua Dewan Syari'ah Pusat, Sekjen Dewan Pengurus Pusat, dan Bendahara Umum Dewan Pengurus Pusat. Tidak seorang perempuanpun menduduki jabatan-jabatan ini, karena itu memang tidak seorangpun yang dapat menjadi anggota DPTP.

Absennya perempuan dari keanggotaan DPTP menunjukkan tidak seorang perempuanpun yang dapat ikut serta dalam forum koordinasi dan konsultasi untuk berbagai hal penting dan strategis.⁵³ Secara rinci, menurut Pasal 12 Anggaran Dasar PKS, Dewan Pimpinan Tingkat Pusat mempunyai tugas dan wewenang:

1. Melaksanakan Putusan Majelis Syura
2. Mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan Putusan Majelis Syura
3. Menyelenggarakan Musyawarah Majelis Syura
4. Mengesahkan rancangan struktur dan kepengurusan Partai di tingkat Pusat
5. Membuat kebijakan Partai berkenaan dengan pencalonan Anggota DPR, pasangan calon gubernur/wakil gubernur dan pemilihan lainnya yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang berlaku serta jabatan strategis lainnya
6. Merekomendasikan nama-nama calon yang akan ditempatkan pada posisi jabatan-jabatan sebagaimana disebut pada huruf e
7. Dapat menentukan sikap Partai yang kemudian dilaporkan kepada musyawarah Majelis Syuro berikutnya, dalam hal Majelis Syuro tidak dapat melaksanakan Pasal 11 ayat (2) huruf j
8. menentukan sikap terhadap fitnah, kritik, pengaduan dan tuduhan yang berkenaan dengan Partai dan/atau anggota Partai sesuai dengan AD/ART, serta Peraturan Partai dan/atau peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang berlaku
9. Menunjuk utusan untuk mewakili partai yang akan ditempatkan pada sebuah lembaga/organisasi, atau yang akan mengikuti konggres/seminar baik yang diadakan di dalam maupun luar negeri

⁵³ Menurut Pasal 14 Anggaran Rumah Tangga PKS, DPTP ini merupakan forum koordinasi dan konsultasi berkenaan dengan Keputusan Musyawarah Nasional, Putusan Majelis Syura, serta tugas, kewenangan, dan fungsi Majelis Pertimbangan Pusat, Dewan Syari'ah Pusat, dan Dewan Pengurus Pusat.

10. Menugaskan kepada setiap anggota Majelis Syura untuk mengadakan kunjungan kerja perseorangan maupun bersama-sama di daerah pemilihannya atau daerah yang ditentukan
11. Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap Peraturan dan Kebijakan Partai, memerintahkan Dewan Pengurus Pusat membekukan struktur organisasi dan/atau kepengurusan Majelis Pertimbangan Wilayah, Dewan Pengurus Wilayah, dan/atau Dewan Syari'ah Wilayah melalui mekanisme yang diatur dalam Putusan Majelis Syuro
12. Membahas Laporan Tahunan dan Laporan Pertanggung-jawaban Majelis Pertimbangan Pusat, Dewan Pengurus Pusat, dan Dewan Syari'ah Pusat, serta
13. Menyampaikan laporan pertanggung-jawaban kepada Majelis Syura

Tugas dan wewenang DPTP sangat strategis, khususnya dalam memberikan rekomendasi tentang posisi-posisi politik terpenting, yaitu menjadi anggota DPR, Gubernur, dan jabatan lain sesuai dengan peraturan perundangan. Dalam prakteknya, rekomendasi ini juga menyangkut berbagai jabatan strategis, seperti jabatan menteri dan berbagai jabatan di DPR seperti jabatan ketua komisi, ketua fraksi dan berbagai Badan di DPR.⁵⁴ Perempuan juga tidak dapat ikut serta dalam forum koordinasi dan konsultasi mengenai bagaimana semua keputusan penting Majelis Syura dilaksanakan oleh masing-masing lembaga PKS di tingkat kepengurusan Pusat, termasuk keputusan strategis PKS menyangkut berbagai isu politik penting.⁵⁵ Dapat dipahami kemudian mengapa tidak seorang perempuanpun yang dapat menjelaskan mengapa jalur hubar tidak dapat mendorong lebih banyak perempuan menjadi anggota Majelis Syura seperti dijelaskan pada sub bab tentang Perempuan dalam Struktur Kewenangan di Majelis Syura. Fakta ini juga menjelaskan mengapa tidak seorang perempuan narasumberpun yang dapat menjelaskan alasan penempatan perempuan dalam daerah pemilihan dan nomor urut dalam daftar calon seperti akan diulas lebih panjang pada Bab IV karena kebijakan PKS tentang pencalonan anggota DPR adalah wewenang DPTP, bukan wewenang Majelis Syura maupun lembaga PKS tingkat Pusat lainnya..

Struktur DPTP yang demikian menunjukkan bahwa DPTP adalah struktur yang lebih oligarkhis dibanding Majelis Syura dilihat dari sisi kepentingan politik perempuan guna demokratisasi internal dalam lembaga. Karena DPTP adalah abstraksi dan Badan Pekerja Majelis Syura, maka DPTP menjadi cerminan Majelis Syura dan ini berarti adalah cerminan PKS secara keseluruhan. Dari sisi kepentingan keadilan politik perempuan PKS⁵⁶, struktur DPTP bukan hanya oligarkhis, tetapi otoriter⁵⁷ karena perempuan dipaksa menerima apapun

⁵⁴ Lihat ketentuan nomor 5 (lima) pasal 12 ART PKS ini.

⁵⁵ Lihat ketentuan ayat 1 (satu) pasal 12 ART PKS ini

⁵⁶ Seperti disebutkan dalam bagian lebih awal, keadilan politik bagi perempuan berarti adalah adanya lembaga politik yang peduli atau *care* terhadap kondisi perempuan sehingga perempuan tetap diberi akses terhadap jabatan-jabatan tertinggi meski kompetensi dinilai tidak setara laki-laki.

⁵⁷ Fareed Zakaria dalam tulisannya yang berjudul *Islam, Democracy, and Constitutional Liberalism* dalam buku Bernard E. Brown yang berjudul *Comparative Politics, Notes and Readings*, menyatakan "*certainly the Koranic model of leadership is authoritarian*" dengan menyitir berbagai ayat dalam Al Qur'an yang memberikan pujian kepada para raja yang adil. Tapi

keputusan DPTP. Ketidaksediaan Ketua Bapilu PKS untuk diwawancarai berkenaan dengan proses pencalonan anggota DPR guna kepentingan penelitian ini menunjukkan bahwa penjelasan itu tidak dapat diberikannya karena wewenang pencalonan anggota DPR bukan pada Ketua Bapilu, tetapi Ketua DPTP yang sekaligus Ketua Majelis Syura Pusat.

Fakta lebih lanjut yang menunjukkan bahwa struktur DPTP adalah oligarkhis dapat dilihat pada Pasal 14 ayat (3) ART PKS. Berdasar ketentuan Pasal 14 ayat (3) ART PKS, DPTP dapat mengundang pihak-pihak berkenaan dengan tugas-tugas Majelis Pertimbangan Pusat, Dewan Pengurus Pusat, Dewan Syari'ah Pusat. Dengan kata lain, Dewan Pimpinan Tingkat Pusat dapat "melakukan intervensi" atas pelaksanaan tugas ketiga lembaga tinggi Partai ini, kecuali mencampuri, intervensi, atau membatalkan Keputusan Dewan Syariah Pusat tentang Fatwa dan Qadha⁵⁸. Selain itu DPTP juga memiliki kewenangan untuk pengisian berbagai jabatan penting dalam Partai. Jabatan-jabatan yang perlu persetujuan DPTP adalah⁵⁹:

1. Dewan Pakar pada Majelis Pertimbangan Pusat
2. Ketua- ketua Komisi di Majelis Pertimbangan Pusat
3. Bidang-bidang pada Dewan Pengurus Pusat
4. Badan-badan pada Dewan Pengurus Pusat
5. Departemen pada Dewan Pengurus Pusat
6. Ketua-ketua Lajnah pada Dewan Syari'ah Pusat

Dalam struktur kewenangan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat, secara organisatoris Ketua Majelis Syura memiliki kewenangan tertinggi karena dia mewakili lembaga tertinggi Partai, yaitu Majelis Syura. Meski demikian, menyangkut pencalonan anggota DPR, Dewan Pengurus Pusat yang diwakili oleh 3 (tiga) orang di Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (yaitu Presiden Partai, Sekretaris Jendral dan Bendahara Partai) memiliki wewenang yang cukup besar karena promosi anggota adalah wewenang Dewan Pengurus Pusat, bukan wewenang lembaga tinggi lainnya. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 21 Anggaran Rumah Tangga PKS yang menyatakan bahwa Dewan Pengurus Pusat memiliki tugas manajerial untuk:

- a. memimpin dan mengawasi struktur organisasi Partai di bawahnya
- b. membentuk dan mengkoordinasikan lembaga-lembaga pendukung Partai
- c. mengawasi dan mengevaluasi program kerja tahunan Majelis Pertimbangan Wilayah dan Dewan Pengurus Wilayah, serta kegiatan Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah
- d. menetapkan Panduan tentang proyeksi, nominasi, promosi, dan mutasi Anggota Partai, serta
- e. merancang dan melaksanakan proyeksi, nominasi, promosi dan mutasi Anggota Partai.

Dua tugas terakhir Dewan Pengurus Pusat, yaitu menetapkan Panduan tentang proyeksi, nominasi, promosi dan mutasi Anggota Partai serta merancang

dia juga menjelaskan bahwa ada hadits yang memberi jaminan bagi rakyat untuk tidak mengikuti perintah raja atau pemimpin yang tidak menjalankan kekuasaan sesuai perintah Tuhan

⁵⁸ Pasal 14 ayat (5) Anggaran Rumah Tangga Partai Keadilan Sejahtera.

⁵⁹ Sumber informasi tentang jabatan-jabatan yang memerlukan persetujuan DPTP ini adalah beberapa pasal pada Anggaran Rumah Tangga Partai Keadilan Sejahtera

dan melaksanakan proyeksi, nominasi, promosi, dan mutasi Anggota Partai terkait langsung dengan kewenangan dalam proses pencalonan berbagai jabatan politik. Karena itu meski secara struktural posisi Presiden Partai lebih rendah dibanding Ketua Majelis Syura yang sekaligus adalah Ketua Dewan Pimpinan Tingkat Pusat, serta memiliki posisi sejajar dengan Ketua Majelis Pertimbangan Pusat dan Ketua Dewan Syaria'ah Pusat, tetapi secara faktual, Presiden Partailah yang paling menguasai informasi tentang nominasi dan promosi anggota Partai untuk menjadi anggota DPR.

Sekali lagi absennya perempuan pada DPTP yang merupakan Badan Pekerja Majelis Syura membuat perempuan tidak memiliki akses kepada pengisian jabatan-jabatan penting Majelis Pertimbangan Pusat, Dewan Pengurus Pusat, dan Dewan Syariah Pusat. Satu-satunya akses perempuan untuk semua keputusan penting DPTP menyangkut pengisian berbagai jabatan penting dalam partai adalah melalui peran mereka di Majelis Syura. Meski demikian semua anggota Majelis Syura yang diwawancarai untuk penelitian ini menyatakan bahwa Majelis Syura hanya membuat garis-garis besar kebijakan, sedangkan pelaksanaan selanjutnya menjadi wewenang masing-masing lembaga. Karena itu tidak mengherankan bahwa meski untuk pencalonan anggota DPR sudah *affirmative action* yang dilakukan PKS⁶⁰, tapi dalam lingkup internal PKS, khususnya DPTP, belum ada target-target *affirmative action* apapun yang dibuat oleh PKS. Karena itu berkenaan dengan peran perempuan dalam struktur kewenangan di DPTP, tidak ada tindakan-tindakan langsung perempuan PKS yang dapat dicatat sebagai refleksi peran mereka sebagai *the constituted subject*. Hal ini sesuai dengan pendapat Anne Philips⁶¹ yang menyatakan bahwa kalau sebuah konstituen dengan sengaja dipinggirkan dari proses politik, dan kepentingan politik kelompok yang dipinggirkan ini diwakili oleh orang yang bukan merupakan bagian dari mereka, maka politik hampir tidak mungkin akan mencerminkan semua kepentingan semua pihak yang terlibat. Meski para perempuan PKS berpendapat bahwa para petinggi PKS sangat memperhatikan pendapat dan kepentingan perempuan PKS, tetapi tidak mungkin kebijakan mereka akan mencerminkan semua kepentingan perempuan.

Dilihat dari kacamata teori patriarkhi, struktur DPTP menunjukkan bahwa PKS masih dikuasai ideologi patriarkhi. Laki-laki benar-benar menjadi *head of the tribe*⁶² dalam struktur DPTP karena tidak memberi peluang sama sekali kepada perempuan untuk menjadi anggotanya. Kenyataan bahwa PKS mengadopsi idiologi patriarkhi dengan menyingkirkan perempuan dari kesempatan untuk berpartisipasi di dalamnya juga didasarkan pada pengertian patriarkhi dari Weber bahwa patriarkhi adalah sebuah bentuk pengaturan organisasi keluarga dimana ayah mendominasi anggota-anggota keluarga yang lain dalam sebuah jaringan kekerabatan yang luas dan sekaligus mengendalikan

⁶⁰ Berdasarkan data yang ada PKS bahkan sudah mencalonkan perempuan menjadi anggota DPR lebih dari 40% pada pemilu 2004

⁶¹ Anne Phillips. 1995. *The Politics of Present. The Political Representation of Gender, Ethnicity, and Race*. Oxford: Oxford University Press. Hal 13

⁶² Vicky Randal. *Op. cit.* hal 19 menyatakan bahwa patriarkhi berasal dari bahasa Latin "patriarches" yang berarti "head of the tribe" atau pemimpin kelompok suku. Referensi istilah ini ada dalam *the Old Testament* atau Kitab Perjanjian Lama yang menggambarkan patriarkhi sebagai *tribal heads* (para pemimpin suku), yang dalam perkembangannya kemudian, istilah ini dipakai untuk merujuk para *pemimpin paling kuat dalam struktur gerja Kristen*, termasuk Sri Paus

kegiatan ekonomi produktif keluarga tersebut⁶³. Dalam kasus DPTP PKS, laki-laki PKS adalah bapak yang mendominasi anggota keluarga PKS lainnya dan mengendalikan semua “aktifitas produktif” keluarga besar PKS.

Perempuan PKS di Majelis Pertimbangan Pusat.

Pada masa penelitian ini dilaksanakan, Majelis Pertimbangan Pusat memiliki jumlah anggota 23 orang dengan 3 orang perempuan sebagai anggota atau 12%. Perwakilan perempuan di MPP ini lebih tinggi dibanding dengan perwakilan di Majelis Syura (10%) maupun DPTP yang sama sekali tidak ada perwakilan perempuannya. Ketiga perempuan tersebut, Yoyoh Yusroh, Aan Rochana, dan Nursanita Nasution adalah anggota MPP. Yoyoh Yusroh dan Aan Rochana merangkap jabatan sebagai anggota Majelis Syura Pusat sedangkan Nursanita Nasution tidak menjadi anggota Majelis Syura Pusat.

Berkenaan dengan peran Majelis Pertimbangan Pusat, ibu A menyatakan bahwa tugas anggota Majelis Pertimbangan Pusat melakukan *screening* internal untuk berbagai proses nominasi dan promosi untuk berbagai jabatan politik di PKS. Pertimbangan-pertimbangan untuk para calon disiapkan oleh Majelis Pertimbangan Pusat, meski kader juga ikut melakukan *screening* dengan memberikan nominasi atas nama-nama yang dikirim ke Majelis Pertimbangan Pusat. Hal ini dikemukakan ibu A sebagai berikut:

Dari Majelis Syuro itu untuk pemilu di Majelis Syuro. Yang di Majelis Syuro bisa dimajukan untuk jadi anggota, untuk jadi caleg. Sementara siapa yang akan dipilih oleh kaderpun sudah ada semacam karakteristik yang harus dimiliki oleh setiap calon yang dipilih oleh kader. Jadi sudah *ada fit and proper test* dari partai. Kita di MPP yang menyiapkan *screening internal* untuk melihat apakah sesuai dengan karakteristik yang diminta. Kalau misalnya tidak ada catatan-catatan dari daerah boleh diajukan siapa saja yang mau dijadikan bakal calon, bakal caleg, yang nanti akan dibuka kepada kader. Setelah itu nanti baru dipilih oleh kader. Setelah dipilih kader nanti *diranking*, siapa yang pilihan kader terbanyak nanti dicalonkan, sesuai dengan pilihan kader yang terbanyak itulah yang nanti nomor satu, sampai yang misalnya berkurang sedikit urutannya nomor dua, begitu seterusnya.⁶⁴

Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh ibu A sebagai anggota Majelis Pertimbangan Pusat merupakan salah satu tugas dan wewenang MPP yang menurut ketentuan pasal 13 ayat (3) AD PKS adalah:

1. Memberi pertimbangan, rekomendasi, konsultasi dan supervisi Kepada Dewan Pengurus Pusat dan/atau Dewan Syari'ah Pusat, terhadap perumusan peraturan, pelaksanaan kebijakan, dan program Partai untuk menjamin tetap sesuai dengan tujuan Partai dan Putusan Majelis Syura.
2. Menetapkan dan mensosialisasikan Pedoman Partai
3. Menetapkan/mengambil keputusan terhadap produk Peraturan Partai yang saling bertentangan atau tumpang tindih
4. Membahas rancangan pedoman atas usul Dewan Pengurus Pusat atau Dewan Syari'ah Pusat

⁶³Vicky Randal. *Op. cit* hal. 19

⁶⁴ Hasil wawancara dengan ibu A di Jakarta 26 April 2009.

5. Menyusun rencana program dan anggaran tahunan Majelis Pertimbangan Pusat untuk diajukan kepada Majelis Syura melalui Dewan Pengurus Pusat
6. Mengajukan laporan kerja dan kinerja setiap 6 (enam) bulan kepada Dewan Pimpinan Tingkat Pusat.

Dengan melihat tugas dan wewenang MPP, maka penjelasan ibu A tentang apa yang dilakukannya sebagai anggota MPP sebenarnya hanya meliputi tugas dan wewenang yang pertama, yaitu memberikan pertimbangan tentang nama-nama calon yang diajukan oleh daerah baik untuk ikut pemilihan raya anggota Majelis Syura maupun untuk pemilihan anggota DPR. Ibu A menjelaskan bahwa setiap nama yang dikirim oleh daerah sudah mengikuti *screening internal* di daerah, baru kemudian mengikuti *screening* di MPP. Fungsi yang dilakukan MPP dalam hal ini adalah fungsi administratif untuk mengkaji apakah semua persyaratan calon sudah dipenuhi sehingga calon dinyatakan layak untuk dipilih oleh kader. Sementara itu, fungsi strategis pencalonan anggota DPR ada pada DPTP. .

Majelis Pertimbangan Pusat tidak memiliki kewenangan langsung untuk mengeksekusi program-program, tetapi hanya memberi pertimbangan, rekomendasi, konsultasi, dan supervisi dalam perumusan peraturan, kebijakan, program Partai agar sesuai dengan tujuan Partai dan Putusan Majelis Syura. Selain itu Majelis juga mengambil keputusan terhadap produk Peraturan Partai yang saling bertentangan atau tumpang tindih. Karena itu, sesuai dengan kewenangannya, maka kewenangan Majelis Pertimbangan Pusat berkenaan dengan prosen pencalonan anggota DPR adalah:

1. mengawasi agar proses tersebut sesuai dengan Putusan Majelis Syura
2. mengawasi agar proses tersebut sesuai dengan tujuan Partai
3. mengawasi agar proses tersebut tidak saling bertentangan dan tumpang tindih sehingga akan merugikan bagi proses promosi dan nominasi anggota dalam rangka mencapai tujuan Partai, dalam hal ini menempatkan sebanyak mungkin Anggota Partai menjadi Anggota DPR.

Mempertimbangkan tugas dan kewenangan MPP, dapat diketahui bahwa MPP tidak terlalu berperan dalam membuat keputusan strategis berkenaan dengan nominasi dan promosi untuk berbagai jabatan politik, baik di internal PKS maupun dalam lingkup politik yang lebih luas di negara. Selain itu kewenangan MPP juga hanya terkait dengan DPP dan DSP serta sama sekali tidak terkait dengan MSP dan DPTP. Karena itu peran MPP PKS berbeda dengan Dewan Penasehat Golkar pada masa Orde Baru atau Penasehat Partai Demokrat pada Orde Reformasi yang mempunyai kewenangan besar berkenaan dengan keputusan-keputusan strategis kedua partai.⁶⁵

Dilihat dari tugas dan kewenangannya serta posisinya dalam struktur kewenangan di PKS, MPP tidak memiliki peran besar dalam melanggengkan

⁶⁵ Baik Suharto maupun Susilo Bambang Yudoyono sebagai penasehat kedua partai tersebut selalu disebut oleh elit kedua partai pada saat mereka memberikan argumen terhadap keputusan-keputusan penting partai. Dalam hal Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudoyono bahkan memiliki kewenangan yang hampir, tunggal dalam memutuskan pemerintahan koalisi yang dibanggunya dengan partai-partai lain.

kepentingan elit PKS karena secara langsung tidak memiliki wewenang untuk mempengaruhi proses promosi jabatan-jabatan penting. Meski demikian, dilihat dari kepentingan politik perempuan PKS, maka MPP dapat dikatakan menjadi lembaga yang dapat menghambat mobilitas vertikal perempuan PKS ke posisi yang lebih tinggi. Hal ini disebabkan perempuan PKS hanya diletakkan pada satu posisi Komisi Kaderisasi dan Kewanitaan.⁶⁶ Pemberian tempat khusus seperti ini sering menimbulkan dilema untuk perempuan. Lovenduski dan Norris⁶⁷ misalnya, melihat kesungguhan partai memberikan keadilan politik bagi perempuan dengan melihat apakah program dan struktur partai disesuaikan dengan tuntutan perempuan dan apakah partai tidak sekedar melakukan retorika-retorika dan menjadikan isu keadilan bagi perempuan sekedar untuk *platform* kampanye. Menurut mereka, peletakan dalam “kotak khusus” seperti ini dapat berakibat buruk terhadap perempuan karena tidak memberi kesempatan “*exposure*” terhadap jabatan-jabatan yang lebih luas dan dapat menjadi agenda terselubung partai untuk “mengungkung” perempuan. Hal ini akan berbeda kalau selain ditempatkan pada tempat khusus seperti itu perempuan juga memiliki akses yang luas terhadap jabatan-jabatan lainnya. Karena itu keberadaan komisi khusus untuk kaderisasi dan kewanitaan pada MPP ini perlu dikaji apakah secara sungguh-sungguh mampu memberi akses lebih luas kepada perempuan untuk berbagai jabatan politik dalam struktur dan apakah secara sungguh-sungguh memberi kesempatan kepada perempuan PKS untuk lebih terampil melakukan fungsi-fungsi politik sehingga sebagai elit mereka mampu melakukan perwakilan kepentingan politik perempuan PKS di MPP.

Dua narasumber anggota MPP yang diwawancarai untuk kepentingan penelitian ini menunjukkan bahwa secara individual mereka memiliki pandangan, sikap dan tindakan yang lebih merupakan ekspresi pejabat partai dan bukan merupakan ekspresi wakil perempuan. Dengan kata lain mereka mengekspresikan pandangan yang buta gender atau *gender blind* karena tidak mengerti bahwa perempuan mempunyai kondisi-kondisi awal yang berbeda dengan laki-laki sewaktu terjun ke dunia politik. Hal ini terlihat dari pernyataan ibu A sewaktu ditanyakan apa yang dapat dilakukannya untuk mendorong lebih banyak perempuan lain mendapatkan posisi penting di partai dan posisi menguntungkan dalam pemilu:

Kita tidak bisa menetapkan perempuan kuotanya harus sekian, karena kalau dari kader tidak mengajukan, kita tidak bisa memaksa mereka. Tapi peluangnya nanti ada lagi dari yang lain, yaitu dari dewan pakar. Misalnya tahun 2004, ternyata kita yang sudah di DPR itu tidak boleh masuk lewat penjangingan, jadi kita dibuka dari dewan pakar. Di dewan pakar itu nanti ada perempuannya. Ditetapkannya oleh lembaga tinggi partai yang dijadikan sebagai dewan hariannya Majelis Syuro. Mereka yang menetapkan.⁶⁸

⁶⁶ Berdasar pasal 13 AD PKS, MPP terdiri dari seorang Ketua, seorang sekretaris dan Komisi-Komisi, yaitu Komisi Legislasi, Organisasi dan Kewilayahan, Kaderisasi dan Kewanitaan, Kebijakan Publik, dan Kajian Strategis.

⁶⁷ Joni Lovenduski dan Pippa Norris. 1993. *Gender and Party Politics*. London: Sage Publications, hal 12.

⁶⁸ Hasil wawancara dengan ibu A di Jakarta 26 April 2009.

Sebagai anggota MPP, ibu A tidak memahami apa relevansi keberadannya di MPP bagi perempuan lain. Dia menyatakan bahwa sebagai aparat partai di MPP kewajibannya adalah mematuhi semua aturan tanpa kecuali. Dia tidak melihat alternatif tindakan lain yang bisa dilakukannya untuk mempromosikan lebih banyak perempuan tanpa perlu melanggar aturan partai. Sebagai individu, tindakannya sebagai *the constituted subject* atau subyek yang merupakan aparat sekaligus obyek pengaruh PKS semata merupakan tiruan terhadap sikap dan tindakan elit yang lain. Hampir sama dengan ibu A, ibu Y juga menunjukkan sikap yang mirip dengan menyatakan bahwa partai sudah memberikan peluang yang sama kepada perempuan tetapi perempuan sendiri yang masih malu-malu untuk aktif mengambil kesempatan tersebut. Ibu Y menyatakan hal itu dalam pernyataannya berikut:

Peluang itu dari struktur ada, tapi dari kader perempuannya yang malu-malu untuk berperan aktif. Ini yang selalu saya *push* pada mereka, kalau berbicara hak jangan malu. Artinya. .. kalau hak kita, kita mendapatkan hak untuk meningkatkan kualitas, mendapatkan apa saja, kalau itu hak kita harus kita ambil. Hak itu boleh diambil boleh tidak, tapi kalau kita anggap penting, harus kita ambil.⁶⁹

Pernyataan ibu Y tersebut menunjukkan bahwa adanya sikap yang buta gender karena dia tidak memahami bahwa kultur yang berkembang di kalangan perempuan PKS adalah kultur untuk tunduk kepada pata ustad yang umumnya laki-laki seperti dinyatakan oleh Ucti dalam pembahasan tentang perempuan PKS dalam Majelis Syura Pusat di bagian lebih awal bab ini. Karena itu mayoritas perempuan PKS tidak memiliki keberanian untuk "menuntut hak" karena bukan sikap itulah yang selama ini disosialisasikan kepada mereka. Dia bahkan tidak menyadari bahwa secara individu dia mempromosikan sikap tunduk sepenuhnya kepada otoritas partai seperti terlihat dalam pernyataannya berikut:

Saya mungkin tipe yang taat pada aturan partai. Komitmen saya terhadap partai itu tinggi karena saya merasa nyaman di partai. Jadi apapun, misalnya kalau selama partai membutuhkan saya, saya siap, sampai hari tua seperti apa, komitmen saya terhadap partai insya Allah tidak akan berubah. Kalau misalnya saya dianggap cukup untuk menjadi penasehat di partai, tidak perlu lagi aktif turun ke bawah, misalnya, saya siap. Kalaupun saya harus turun ke bawah lagi untuk sosialisasi ya saya siap. Jadi tidak ada target pribadi.⁷⁰

Ibu Y menyatakan bahwa perempuan harus aktif memperjuangkan hak jika hal itu dianggap baik. Tapi secara pribadi dia mempromosikan sikap yang sepenuhnya harus tunduk pada partai dan pimpinan. Dilihat dari sikap dan tindakan kedua narasumber, maka keduanya adalah individu yang sepenuhnya merupakan wakil partai, bukan wakil mayoritas perempuan PKS. Sebagai anggota MPP, mereka tidak memperlihatkan sikap yang dapat mendorong lebih banyak perempuan memperoleh posisi penting di partai dan di luar partai melalui peran mereka di MPP. Mereka bahkan menyatakan sebagai pribadi tidak pernah memiliki *interest* pribadi dengan kekuasaan. Jika sikap seperti ini yang selama ini mereka sosialisasikan kepada perempuan PKS, maka mereka sebenarnya juga

⁶⁹ Hasil wawancara dengan ibu Y di Tangerang, 4 April 2009

⁷⁰ *Ibid.*

mempromosikan sikap ketertundukan total kepada partai dan para pemimpin partai. Sikap dan tindakan ibu A dan ibu Y sebagai pengurus partai merupakan cerminan sikap dan tindakan perempuan sebagai individu yang memposisikan diri sebagai *the object* atau *the Other*, bukan sebagai *the subject* atau *the One*. Simone de Beauvoir⁷¹ mengemukakan argumen bahwa perempuan tidak pernah dapat menentukan sikap dan tindakan tanpa mengambil referensi sikap dan tindakan apa yang dikehendaki oleh laki-laki sebagai *the subject* "The One".

Perempuan di Dewan Pengurus Pusat

Tidak jauh dengan Majelis Pertimbangan Pusat, posisi perempuan PKS di Dewan Pengurus Pusat (DPP) juga diletakkan dalam sebuah Bidang khusus, yaitu Bidang Kewanitaan. Hal ini dapat dilihat dari struktur kepengurusan DPP yang terdiri dari Presiden, Sekretaris Jendral dan beberapa Wakil Sekretaris Jendral, Bendahara Umum dan beberapa Wakil, Bidang Pembinaan Kader dengan 3 (tiga) Departemen, Bidang Polhukam dengan 3 (tiga) Departemen, Bidang Pembinaan Pemuda dengan 3 (tiga) Departemen, Bidang Kewanitaan dengan 3 (tiga) Departemen, Bidang Kesra dengan 4 (empat) Departemen, Bidang Ekuitek dengan 5 (lima) Departemen, Bidang Pembinaan Wilayah dengan 9 (sembilan) Ketua Wilayah Daerah (Wilda), serta Badan-Badan yaitu Pemenangan Pemilu, Legislatif, Perencanaan Dakwah, Hubungan Luar Negri, dan Kehumasan, dan BPDO. Struktur seperti ini seperti dinyatakan Lovenduski dan Noris di bagian lebih awal Bab ini dapat mengandung dilema untuk perempuan. Dia dapat bermakna positif jika struktur khusus ini dimaksudkan untuk memberi kesempatan lebih kepada perempuan untuk menyelesaikan masalah-masalah khusus yang tidak tertangani oleh sub struktur yang lain dengan asumsi perempuan tetap mendapat akses seluas-luasnya untuk duduk dalam sub struktur lainnya. Struktur seperti ini menimbulkan masalah bagi perempuan jika akses perempuan terhadap sub struktur lain tidak terbuka karena ada asumsi sudah banyak perempuan yang berada pada sub struktur khusus untuk perempuan tersebut.

Menggunakan pendapat Lovenduski dan Noris untuk mengkaji posisi perempuan dalam struktur kekuasaan di DPP PKS periode 2004-2009, terlihat bahwa kecenderungan kedualah yang terjadi. Hal ini dapat dilihat bahwa tidak satu orangpun perempuan PKS yang menduduki posisi dari tingkat paling atas sampai paling bawah di DPP kecuali di Bidang Kewanitaan. Dengan demikian, tidak terdapat seorang perempuanpun yang menjadi Sekjen dan 6 (enam) Wakil Sekjen, Bendahara Umum dan 3 (tiga) Wakil Bendahara Umum, serta 6 (enam) Ketua Bidang dan 19 Ketua Departemen, 9 (sembilan) Ketua Wilayah Daerah, dan 6 (enam) Ketua Badan. Dengan demikian, keterwakilan perempuan dalam kepengurusan Dewan Pengurus Pusat PKS hanya meliputi sekitar 7.6% atau 4 dari 53 orang, jauh lebih rendah dibanding keterwakilan perempuan di Majelis

⁷¹ Untuk diskusi konsepsi laki-laki sebagai *the subject*/*the One* dan perempuan sebagai *the object*/*the Other*, baca Simone de Beauvoir, Introduction from the *Second Sex* dalam Ann E. Cudd dan Robin O. Andersen, *Feminist Theory a Philosophical Anthology An Anthology*, Blackwell Publishing, Hal. 27-29. Terminologi berbeda dipergunakan oleh Moya Lloyd yang berargumen bahwa sikap dan tindakan perempuan sebagai individu atau *self* hanya dapat diartikulasikan dengan cara meletakkan laki-laki sebagai *an other/Other* yang perlu ditirunya. Baca Moya Lloyd, *op.cit.* hal 17-18.

Syura (sekitar 10%) dan Majelis Pertimbangan Pusat (sekitar 13.63%). Sangat sedikitnya jumlah perempuan di DPP PKS dan “dikotakkannya” perempuan PKS pada satu Bidang khusus menunjukkan kecenderungan oligarkhis yang nyata di DPP PKS. Kecenderungan oligarkhis ini juga terlihat dari sangat kecilnya reward yang diterima perempuan PKS (dalam bentuk sedikitnya perempuan PKS yang berada pada posisi strategis di DPP) dibanding dengan kinerja mereka yang menurut beberapa narasumber “sungguh luar biasa”. Beberapa kutipan informasi tentang kinerja Bidang Kewanitaan yang “luar biasa” disertakan di sini. Ibu Y, misalnya, mengatakan:

PKS tidak dapat berjuang tanpa mengikutsertakan perempuan, tanpa melibatkan perempuan dalam perjuangannya. Karena saya lihat kader-kader di bawah itu justru kerja keras luar biasa yang perempuan. Mereka juga dengan anak banyak, kadang-kadang tanpa pembantu, mereka tetap kerja, sampai *direct.selling*, mereka tidak ada yang nganggur, baik struktur ataupun kader. Kader perempuannya luar biasa pertumbuhannya. Kita punya 4500 Pos Wanita Keadilan se Indonesia. Pos WK ini untuk mensosialisasikan partai, kemudian merekrut anggota⁷²

Sementara itu bapak M membuat pernyataan yang intinya hampir sama dengan ibu Y, yaitu bahwa Bidang Kewanitaan adalah Bidang yang dinilai memiliki kinerja paling bagus dibanding Bidang yang lain, baik dalam menjaga kontinuitas aktivitas, dalam melakukan konsolidasi internal, dalam mengemban fungsi khusus lembaga, maupun dalam menggalang komunikasi dan kerjasama dengan pihak-pihak di luar PKS.⁷³

Sementara itu ibu L juga memberikan pernyataan-pernyataan yang mengkonfirmasi pendapat kedua narasumber ini. Dia bahkan menambahkan bahwa dia sedang memperjuangkan PKS umumnya, dan Bidang Kewanitaan khususnya dapat melakukan pengelolaan organisasi secara modern, membangun partai yang kuat yang terdapat kader-kader yang cukup yang masing-masing dapat berkonsentrasi untuk tugas-tugas pengelolaan partai secara internal dan tugas-tugas politik di luar partai. Untuk kepentingan ini, maka menurutnya perempuan PKS harus memperjuangkan bukan hanya porsi yang lebih banyak untuk kepentingan pemilihan anggota DPR, tetapi juga untuk posisi internal dalam partai. Lebih lanjut ibu L menyatakan bahwa ke depan perempuan harus memiliki wakil pada posisi Wakil Sekretaris Jendral sehingga menurutnya semua keputusan dan pengelolaan partai dapat secara cepat dan otomatis merespon kebutuhan perempuan. Ibu L menganggap bahwa posisi di bendahara partai tidak terlalu perlu diperjuangkan karena menurutnya selama ini Bidang Kewanitaan sudah termasuk Bidang yang diprioritaskan dalam penganggaran partai selain Bidang Pengkaderan.⁷⁴

Ibu L lebih lanjut menjelaskan bagaimana dia mencoba merubah sikap dan tingkah laku pejabat partai dari sub struktur di luar Bidang Kewanitaan untuk bersama melakukan upaya agar lebih banyak perempuan dapat aktif di PKS dan

⁷² Hal ini dinyatakan oleh ibu Y dalam wawancara sewaktu ditanyakan mengenai mengapa PKS menyatakan berkomitmen memenuhi ketentuan kuota pencalonan.

⁷³ Dinyatakan oleh bapak M dalam wawancara di Jakarta 10 Januari 2010

⁷⁴ Hasil wawancara dengan ibu L di Jakarta 27 Januari 2009.

agar mereka lebih peduli terhadap persoalan-persoalan perempuan PKS. Hal ini dinyatakan ibu L dalam penjelasannya berikut:

Mulai 2004 sudah mulai, mulai beri dukungan, mulai pendanaan, mulai pelatihan, mulai sosialisasi..dan mulai 2006 yang melakukan sosialisasi itu bukan cuma kewanitaan karena kita kan punya keterbatasan dana sosialisasi. Siapa yang pergi sosialisasi kami bekali (dengan materi tentang perempuan) Mungkin dia orang Pembinaan Kader, punya kesempatan ke daerah kita bekali dengan CDnya, dengan panduannya, dengan juknisnya. Kita bicarakan dulu, di *coach* dulu. Ternyata bukan cuma perempuan yang bicara. Ada laki-laki yang menganggap itu bagus. itu lebih mudah. Ada di suatu tempat itu justru perubahannya luar biasa. Jadi pendanaan itu difokuskan justru pada itu. *Recruiting* bisa dimuali dari situ..dan kemudian juga, buat perempuan itu ternyata politik masih terlalu mengerikan. Jadi dengan pola seperti itu mereka mau...(terlibat dalam kegiatan PKS).⁷⁵

Ibu L berusaha sungguh-sungguh agar terjadi perubahan nilai di PKS sehingga urusan perempuan dijadikan urusan partai, bukan hanya urusan perempuan. Dalam pernyataannya tersebut secara implisit dia menyatakan bahwa penerimaan dan kerjasama laki-laki pengurus PKS untuk mengurus masalah perempuan adalah hal penting dan harus diperjuangkan (antara lain melalui pemberian coaching, CD yang berisi petunjuk tentang bagaimana pengembangan dan pengelolaan Pos Wanita Keadilan dilakukan dan pemberian petunjuk teknis tentang Pos WK tersebut. Ibu L bukan hanya berjuang agar lebih banyak perempuan dapat berpartisipasi dalam kegiatan PKS, khususnya Bidang Kewanitaan, tapi dia sedang berusaha merubah iklim dan kultur agar lebih ramah dan sensitif gender. Menggunakan bahasa Ronald Inglehart,⁷⁶ ibu L adalah individu pejabat PKS yang sedang memperjuangkan nilai postmaterialisme dalam lingkup internal PKS karena dia sedang memperjuangkan agar PKS sungguh peduli terhadap masalah perempuan, agar PKS menciptakan iklim yang lebih ramah gender (dalam hal ini perempuan menjadi tidak takut terjun dalam dunia politik), dan memperjuangkan agar ide-ide khas perempuan dihargai oleh seluruh struktur yang ada di PKS, bukan hanya oleh Bidang Kewanitaan. Michael Kenny⁷⁷ menyebut upaya seperti ini sebagai *the politics of collective identity*, sementara Judith Squires menyebutnya sebagai *the politics of diversity*.⁷⁸

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ Ronald Inglehart. 1999. *Culture Shift in Advanced Industrial Society*. Princeton, NJ dan Oxford: Princeton University Press. Dalam buku ini Inglehart menyusun tesis yang disebutnya *Scarcity hypothesis* yang intinya berisi argumen tentang adanya *cohort effects*, yaitu bahwa orang yang dibesarkan dalam suasana kekuarangan dan kemiskinan maka sepanjang hidupnya akan selalu mencari keamanan material, sedang orang yang dibesarkan dalam suasana kecukupan akan mencari nilai-nilai postmaterialisme. Penghargaan terhadap kebebasan berbicara, peran yang lebih tinggi di lingkungan kerja, masyarakat yang peduli, kota yang indah, penghargaan terhadap ide, peran yang lebih tinggi dalam urusan pemerintahan adalah nilai-nilai postmaterialisme tersebut.

⁷⁷ Michael Kenny. 2004. *The Politics of Identity*. Cambridge: Politiy Press. Hal. 23

⁷⁸ Judith Squires. 1999. *Gender in Political Theory*. Cambridge: Politiy Press. Hal. 115- 139.

Dalam pembahsaan salah satu bab berjudul Equality, Squires membedakan 3 hal yang diperjuangkan oleh perempuan dalam dunia politik, yaitu *equality* atau kesetaraan, *difference* atau perbedaan, dan *diversity* atau keragaman. Menurutnya hal yang diperjuangkan para feminis kubu post-strukturalis adalah agar politik itu menerapkan prinsip dan mekanisme yang lebih beragam atau memperjuangkan *diversity*, buka *equality* ataupun *difference* karena *equality* berarti

Sebagai perempuan yang menduduki jabatan tertinggi di PKS, ibu L tidak melihat adanya Bidang Kewanitaan sebagai upaya "mengkotakkan" perempuan. Dia menyatakan perempuan tetap bebas bergabung dengan bidang-bidang lain yang merupakan keahliannya, tetapi Bidang Kewanitaan tetap dibutuhkan agar ada perempuan yang "concern more" untuk urusan-urusan perempuan.⁷⁹ Jadi ibu L melihat struktur seperti itu sebagai penerapan prinsip "complementarity" dan bukan "substitution".

Terlepas dari upaya-upaya yang dilakukan Bidang Kewanitaan dan khususnya upaya ibu L serta kinerja perempuan PKS yang luar biasa, perempuan masih menjadi minoritas di struktur DPP PKS. Karena tidak terdapat seorangpun perempuan menjadi Ketua Bidang ataupun Ketua Departemen dalam Bidang-Bidang di luar Bidang Kewanitaan, maka meski terdapat perempuan yang menjadi staf Bidang-Bidang lain, maka tentu saja perempuan PKS akan kehilangan akses terhadap pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang berbagai Bidang tersebut. Hal ini didasarkan pada argumen ibu L yang sudah dinyatakan di depan bahwa kalau perempuan tidak ada di sub-struktur tertentu, maka sub-struktur tersebut tidak akan secara otomatis dan cepat merespon *concern* dan kepentingan perempuan. Berikut akan dipaparkan dalam hal-hal apa perempuan PKS akan kehilangan akses karena tidak adanya perempuan PKS pada posisi Ketua Bidang dan Ketua Departemen di luar Bidang Kewanitaan.

DPP PKS adalah lembaga tinggi PKS yang mempunyai tugas dan wewenang terbesar untuk melakukan tugas pengelolaan PKS sehari-hari. Hal ini bisa dikaji dari tugas dan wewenang DPP sebagai pelaksana pengkaderan, pelaksana tugas-tugas struktural, tugas konsepsional, tugas manajerial, dan tugas operasional. Wewenang DPP PKS adalah⁸⁰:

1. Menetapkan dan mensosialisasikan Panduan Dewan Pengurus Pusat
2. Melaksanakan *Manhaj Tarbiyah* (Sistim Pembinaan dan Pengkaderan) Partai dan mengontrol pelaksanaannya
3. Presiden Partai melakukan pembekuan struktur organisasi dan/atau kepengurusan Partai di tingkat kabupaten/kota tertentu dalam hal terjadi pelanggaran terhadap peraturan dan kebijakan Partai, atas persetujuan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat
4. Ketentuan tentang pembekuan struktur organisasi dan/atau kepengurusan sebagaimana diatur pada ayat (3) diatur dalam Panduan Dewan Pengurus Pusat
5. Menyampaikan laporan kerja dan kinerja setiap 6 (enam) bulan kepada Dewan Pimpinan Tingkat Pusat.

Sedangkan tugas struktural DPP PKS adalah:

1. melaksanakan Keputusan Musyawarah Nasional dan Putusan Majelis Syura;

perempuan ingin menjadi menjadi sama dengan laki-laki sedangkan *difference* berarti perempuan menginginkan femininisme menggantikan maskulinisme dunia politik. Di Indonesia, terminologi *equality* atau kesetaraan lebih menyerupai konsep *diversity* Squires. Berbagai buku yang dikeluarkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dapat dijadikan referensi untuk terminologi ini

⁷⁹ Hasil wawancara dengan ibu L di Jakarta 27 Januari 2009

⁸⁰ Pasal 14 Anggaran Dasar Partai Keadilan Sejahtera

2. menarik dan mengelola Iuran Anggota Partai;
3. membentuk dan menetapkan struktur dan kepengurusan Majelis Pertimbangan Wilayah dan Dewan Pengurus Wilayah;
4. menetapkan struktur dan kepengurusan Dewan Syari'ah Wilayah, atas pembentukan yang diajukan oleh Dewan Syari'ah Pusat;
5. menerima dan mengelola waqaf, hibah, dan sumbangan sukarela yang halal, sah, dan tidak mengikat;
6. menyampaikan laporan perbendaharaan dan keuangan Partai serta evaluasi secara berkala kepada Ketua Majelis Syura melalui Dewan Pimpinan Tingkat Pusat;
7. Menetapkan daftar calon tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas rekomendasi Dewan Pimpinan Tingkat Pusat;
8. melakukan seleksi atas daftar nama calon sementara anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi yang diusulkan musyawarah Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah melalui Dewan Pengurus Wilayah;
9. menetapkan calon tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi; serta
10. menetapkan calon kepala daerah/wakil kepala daerah tingkat Provinsi atas rekomendasi Dewan Pimpinan Tingkat Pusat.⁸¹

Berkenaan dengan pencalonan anggota DPR RI, DPP PKS memiliki wewenang untuk membuat ketetapan partai tentang Daftar Calon Tetap atas rekomendasi Dewan Pimpinan Tingkat Pusat. Dengan demikian rekrutmen calon anggota DPR RI dilakukan oleh Dewan Pimpinan Tingkat Pusat melalui dua mekanisme, yaitu proses *bottom up* lewat penjurangan melalui mekanisme pemilihan oleh kader partai dan proses *top down* melalui pencalonan dari unsur *hubaro* (ahli). Proses ini menunjukkan bahwa rekrutmen calon anggota DPR RI dalam struktur kewenangan PKS tidak sepenuhnya tersentralisasi tetapi juga tidak sepenuhnya demokratis dari usulan *grassroots* partai (yaitu kader partai di tingkat paling bawah), melainkan menggabungkan kedua mekanisme ini.

Dewan Pengurus Pusat memiliki tugas yang cukup penting dalam proses pengisian jabatan politik tingkat provinsi. Jabatan-jabatan tersebut adalah pengisian kepengurusan Majelis Pertimbangan Wilayah, Dewan Pengurus Wilayah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat provinsi, serta calon kepala daerah tingkat provinsi (atas rekomendasi Dewan Pimpinan Tingkat Pusat). Untuk pengisian jabatan Dewan Syari'ah Wilayah provinsi, Dewan Pengurus Pusat hanya berwenang menetapkan saja atas rekomendasi Dewan Syari'ah Pusat. Dewan Pengurus Pusat juga berwenang menetapkan daftar calon tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas rekomendasi Dewan Pimpinan Tingkat Pusat.

Selain tugas struktural, Dewan Pengurus Pusat memiliki tugas konsepsional yang menurut ketentuan Pasal 20 Anggaran Rumah Tangga Partai adalah:

1. menyusun rencana program dan anggaran tahunan Dewan Pengurus Pusat dan struktur organisasi Partai dibawahnya;

⁸¹ Pasal 19 Anggaran Rumah Tangga Partai Keadilan Sejahtera

2. mengkompilasi rencana program dan anggaran tahunan Dewan Pengurus Pusat dengan rencana program dan anggaran tahunan Majelis Pertimbangan Pusat dan Dewan Syari'ah Pusat;
3. mengajukan rencana program dan anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Majelis Syura, serta
4. menetapkan produk-produk konseptual untuk bidang-bidang tugas dan struktur organisasi Partai di bawahnya.

Tugas manajerial Dewan Pengurus Pusat menurut Pasal 21 Anggaran Rumah Tangga Partai adalah:

1. memimpin dan mengawasi struktur organisasi Partai di bawahnya;
2. membentuk dan mengkoordinasikan lembaga-lembaga pendukung Partai;
3. mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja tahunan Majelis Pertimbangan Wilayah dan Dewan Pengurus Wilayah, serta kegiatan Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah;
4. menetapkan Panduan tentang proyeksi, nominasi, promosi, dan mutasi Anggota Partai; serta
5. merancang dan melaksanakan proyeksi, nominasi, promosi, dan mutasi Anggota Partai.

Sementara itu menurut ketentuan Pasal 22 Anggaran Rumah Tangga Partai, tugas operasional Dewan Pengurus Pusat Partai adalah:

1. melakukan sosialisasi hasil kesepakatan musyawarah Dewan Pimpinan Tingkat Pusat sesuai dengan urgensi dan kompetensinya;
2. menerbitkan dan mensosialisasikan pandangan dan pernyataan resmi Partai;
3. menyelenggarakan kaderisasi Anggota Partai;
4. melaksanakan koordinasi Anggota Partai yang menjabat sebagai anggota legislatif dan eksekutif; serta
5. atas persetujuan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah sejauh struktur organisasi dan kepengurusan Partai di tingkat provinsi tersebut belum terbentuk atau tidak efektif.

Dari berbagai pemaparan di muka, dapat dilihat keluasan dan urgensi posisi DPP PKS. Karena itu perempuan PKS berada pada posisi sangat tidak diuntungkan dengan tidak adanya perempuan pada semua Bidang dan Badan yang ada di DPP PKS, kecuali Bidang Kewanitaan. Perempuan mempunyai masalah dan kepentingan khusus dengan berbagai Bidang dan Departemen yang ada di PKS, yaitu ekonomi, keuangan, teknologi, kepemudaan, pembinaan kader, politik, hukum, dan keamanan, kesejahteraan, pembinaan wilayah, pemenangan pemilu, legislatif, dakwah, hubungan luar negeri, kehumasan, dan BPDO. Tidak adanya perempuan pada berbagai sub struktur penting di DPP PKS akan menyebabkan perjuangan ibu L untuk merubah iklim, kultur, mekanisme dan prioritas program

PKS agar lebih responsif gender⁸² menjadi sangat sulit. Resistensi terhadap perjuangan ibu L datang bukan hanya dari laki-laki pejabat PKS, tetapi juga dari kalangan elit perempuan PKS dan dari akar rumput kader PKS di daerah-daerah.⁸³

Secara ringkas dapat disimpulkan bahwa ibu L sebagai pejabat salah satu sub struktur PKS telah melakukan peran *the constituted subject* untuk merubah iklim, mekanisme dan prioritas program yang responsif gender di DPP PKS. Upayanya tersebut masih mendapat resistensi kuat dari kenyataan masih adanya pengkotakan perempuan pada salah satu Bidang saja di DPP PKS karena tidak ada satupun perempuan yang menduduki posisi strategis pada Bidang-Bidang dan Departemen-Departemen di luar Bidang Kewanitaan. Seberapa jauh upaya ibu L akan berhasil sangat ditentukan oleh respon pihak elit DPP dan kemampuan Bidang Kewanitaan memperluas segmen perempuan PKS yang responsif gender dan bukan buta gender.

Fakta sangat sedikitnya jumlah perempuan pada posisi strategis di DPP PKS padahal seluruh narasumber menyebutkan bahwa DPP PKS tidak mengadopsi aturan yang melarang perempuan menduduki jabatan-jabatan strategis tersebut menunjukkan bahwa secara faktual masih terjadi subordinasi terhadap perempuan di DPP PKS. Pandangan subordinatif terhadap perempuan bahkan juga diadopsi beberapa perempuan narasumber. Menggunakan argumen Simone de Beauvoir, fakta ini dapat dijelaskan bahwa perempuan PKS tidak memiliki sarana untuk mengorganisir diri menjadi satu unit yang dapat secara bersama menghadapi unit yang berhubungan, dalam hal ini pengurus laki-laki dalam DPP PKS.⁸⁴

Subordinasi yang telah terjadi sepanjang perjalanan sejarah umat manusia menurut de Beauvoir menyebabkan perempuan secara sukarela menerima subordinasi tersebut. Karena itu, berbeda dengan diskriminasi yang diartikan sebagai tindakan yang secara sengaja mengurangi atau berakibat pada berkurangnya penikmatan hak oleh suatu kelompok, subordinasi tidak selalu merupakan tindakan yang disengaja, tetapi lebih merupakan praktek dalam hidup yang terjadi secara "alamiah" dan dilakukan serta diterima secara sukarela.

Perempuan PKS di Dewan Syari'ah Pusat

Di Dewan Syariah Pusat, keterwakilan perempuan adalah sekitar 12% atau 2 orang perempuan⁸⁵ dari seluruh anggota 17 orang anggota Dewan Syariah Pusat. Berkenaan dengan perannya di Dewan Syariah Pusat untuk memperjuangkan perempuan dalam proses pencalonan anggota DPR, ibu H menyatakan:

Prinsipnya memang DSP itu tidak memberikan jumlah berapa, tetapi siapa yang memiliki kapabilitas, selama dia memang mampu silakan. Jadi nggak pakai batasan. Mungkin kalau di luar dituntut harus 30%, tapi bagi kita beda. Siapa yang memungkinkan, kalau banyak ya banyak, kalau sedikit ya jangan dipaksakan.

⁸² Responsif gender mempunyai pengertian bahwa program dan struktur disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan khusus perempuan agar perempuan dapat terintegrasi dan memberi pengaruh terhadap program dan struktur tersebut.

⁸³ Resistensi dari akar rumput partai terhadap perjuangan perempuan dibahas lebih lanjut pada bab IV disertasi ini.

⁸⁴ Simone de Beauvoir. *Op. cit* hal. 30

⁸⁵ Berdasar data sekunder yang berhasil dikumpulkan, 2 orang tersebut adalah ibu Herlini Amran dan ibu Susi Mardiani

Ajaran Islam itu jelas, bahwa tidak ada yang menghambat, bahkan mendukung kalau memang dia mampu. Kita di PKS berusaha untuk menerapkan nilai-nilai Islam seperti ini. Di DSP sendiripun begitu. Awalnya dulu DSP itu nggak ada perempuan, semuanya laki-laki. Dari awal kurang lebih 20 orang (anggota DSP), 2 orang perempuan.⁸⁶

Pandangan ibu H seperti terlihat dalam pernyataan di muka adalah pandangan yang disebut pandangan buta gender. Ibu H tidak melihat kelemahan dari sedikitnya jumlah perempuan dalam Dewan Syariah Pusat. Bagi ibu H, keterwakilan 30% harus dilihat dari kemampuan perempuannya sendiri, jika sedikit yang berkualitas maka sedikit juga yang dapat dicalonkan. Ibu H tidak mengenal istilah "affirmative action" karena menurut pendapatnya Islam menghendaki adanya kemampuan untuk dapat melaksanakan fungsi perwakilan. Jadi tidak ada yang salah dengan sedikitnya jumlah perempuan di Dewan Syari'ah Pusat. Bagi ibu H, perannya dalam mengeluarkan bayan tentang wanita berpolitik sudah cukup memadai, meski sebenarnya apa yang diperjuangkannya dengan bayan justru memberikan beban tambahan bagi perempuan yang ingin menjadi calon anggota DPR karena mereka harus mendapat ijin tertulis dari suami. Hal yang menurut ibu H positif, dalam pandangan feminis justru dinilai sebagai kekangan bagi aktivitas politik perempuan. Pendapat ibu H terlihat dalam pernyataannya berikut:

Apa yang terkait dengan bayan tentang wanita berpolitik, rambu-rambu wanita dalam berpolitik, saya memberikan masukan untuk minta dukungan suami, tapi lebih di bawah kontrol partai. Jadi ketika istri memiliki (kualitas) SDM yang lebih kuat dan memang dibutuhkan oleh partai, kita perlu promosikan, (ada) permintaan khusus...kita buat surat pernyataan mendukung. Jadi kalau istri atau perempuan itu dicalonkan, ada surat dari partai kepada suami setuju atau tidak.⁸⁷

Sebagai aparat partai, ibu H mempunyai sikap dan tindakan sebagai refleksi the *constituted subject* yang justru memperkuat posisi laki-laki baik di rumah maupun di partai.⁸⁸ Di partai, ibu H memperkuat posisi para elit yang diberinya wewenang untuk memintakan ijin bagi aktifitas politik perempuan, dan di rumah ibu H juga memperkuat posisi suami sebagai pihak yang akan memutuskan mendukung atau tidak aktifitas politik istrinya. Dalam pandangan feminis radikal, ibu H justru sedang mengupayakan agar perempuan kehilangan kontrol atas badan dan dirinya sendiri karena semua keputusan tentang diri perempuan diserahkan kepada pihak lain.⁸⁹ Selain itu ibu H juga tidak

⁸⁶ Hasil wawancara dengan ibu H di Jakarta 26 April 2009

⁸⁷ *Ibid.*

⁸⁸ Hal ini bisa dilihat bahwa Bayan DSP tentang Aktifitas Perempuan dalam Dakwah dan Politik selain memuat prinsip-prinsip dasar keharusan perempuan terjun ke dunia politik juga berisi aturan-aturan yang lebih bersifat membatasi (seperti ketentuan cara berpakaian, berbicara, dan tunduk kepada laki-laki), dan bukan berisi petunjuk mengenai bagaimana perempuan dapat menjadi subyek politik yang efektif.

⁸⁹ Kristin Luker. 1985. *Abortion and the Politics of Motherhood*. Los Angeles, California: University of California Press. Dalam bukunya Kristin Luker mengemukakan argumen bahwa jika dokter dan bukan perempuan yang berhak memberi keputusan apakah seorang perempuan bisa melakukan aborsi atau tidak, maka perempuan kehilangan kontrol atas badannya sendiri.

mengidentikkan diri dengan perjuangan perempuan untuk diberi kesempatan atau akses yang lebih luas untuk berbagai jabatan politik baik di partai maupun di luar partai.

Karena bayan adalah cerminan nilai yang harus menjadi pedoman dalam semua pandangan, sikap dan tindakan perempuan PKS dalam kehidupan politik, dan ini disosialisasikan secara terus-menerus, jelas peran ibu H sangat kontradiktif dengan upaya ibu L. jika ibu L memperjuangkan agar iklim politik di internal PKS lebih ramah dan responsif gender, ibu H justru berjuang agar perempuan kehilangan kontrol atas dirinya. Menggunakan konsep Greimas⁹⁰ ibu H adalah anti subyek bagi perjuangan perempuan PKS untuk mendapatkan kondisi politik internal yang lebih ramah dan responsif gender, dan khususnya perjuangan ibu L. Karena bayan adalah keputusan DSP sebagai sebuah lembaga, jika ditarik kesimpulan yang lebih umum maka DSP adalah anti subyek bagi perempuan PKS.

Pada akhir Bab 2 tentang posisi perempuan dalam struktur kewenangan di PKS dapat dijelaskan beberapa kesimpulan sebagai berikut. Perempuan PKS sudah mulai terlibat dalam kegiatan PKS semenjak masa embrio Partai Keadilan dalam aktivitas dakwah kampus yang berfokus pada kegiatan tarbiyah atau pembinaan di masjid-masjid kampus di Indonesia. Kualitas dan kuantitas perempuan aktivis dakwah kampus hampir sama dengan laki-laki. Meski demikian, jumlah perempuan yang terlibat sebagai pendiri Partai Keadilan yang merupakan embrio PKS sangat sedikit dibanding jumlah laki-laki. Hal ini menjelaskan mengapa hanya sedikit perempuan yang pada akhirnya dapat menduduki posisi sebagai pengelola partai.

Berkenaan dengan hak politik perempuan, Falsafah Dasar PKS menganut prinsip kesetaraan gender. Meski demikian, kesetaraan gender tersebut dilaksanakan dengan prinsip perbedaan peran karena secara psikologis, sosiologis diyakini perempuan berbeda dari laki-laki. Terdapat perbedaan pemahaman diantara unsur PKS tentang hak perempuan menjadi kepala negara. Terdapat unsur yang tidak memperlumahkan hak perempuan menjadi kepala negara, tetapi terdapat unsur yang tidak dapat menerimanya. Secara formal, meski tidak memberikan dukungan, PKS dapat menerima perempuan menjadi kepala negara.

Dengan membandingkan posisi perempuan dalam berbagai substruktur kewenangan di PKS, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. *Pertama*, sub struktur yang paling oligarkhis di kepengurusan Pusat PKS adalah DPTP. *Kedua*, struktur kekuasaan di Majelis Syura bersifat oligarkhis karena menghambat mobilitas vertikal perempuan PKS untuk menjadi anggota Majelis Syura. *Berikutnya*, perempuan PKS di Majelis Syura berbeda sikap tentang ide *affirmative action*; sebagian mendukung sebagian tidak mendukung. *Selain itu*, absennya perempuan pada DPTP yang merupakan Badan Pekerja Majelis Syura membuat perempuan tidak memiliki akses kepada pengisian jabatan-jabatan penting Majelis Pertimbangan Pusat, Dewan Pengurus Pusat, dan Dewan Syariah Pusat.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa perempuan di MPP lebih mewakili pandangan, sikap dan tindakan elit partai, bukan wakil mayoritas perempuan PKS. Sementara itu perempuan di Bidang Kewanitaan DPP PKS telah melakukan peran *the constituted subject* untuk merubah iklim, mekanisme dan

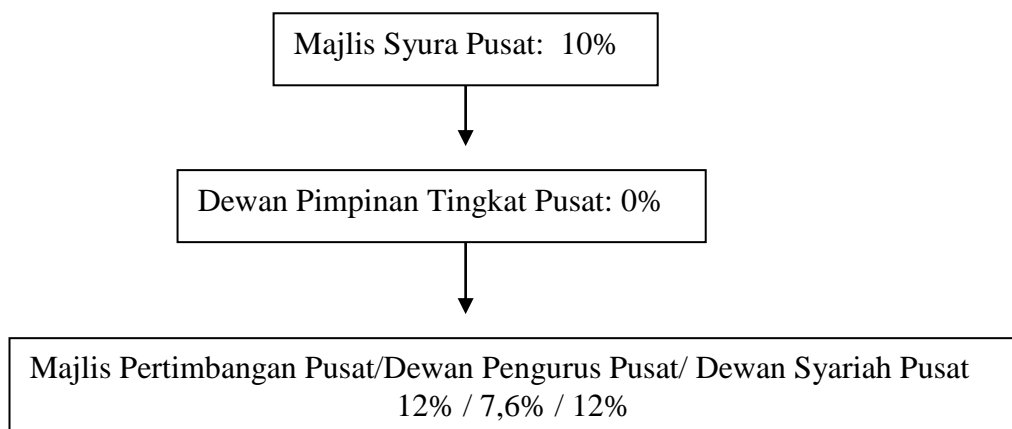
⁹⁰ A.J. Greimas. 1966. *Structural Semantics, An Attempt at a Method*. Lincoln, NE dan London: University of Nebraska Press.

prioritas program yang responsif gender di DPP PKS. Upaya Bidang Kewanitaan tersebut masih mendapat resistensi dari struktur partai dan dari segmen perempuan PKS yang lain. Seberapa jauh upaya ini akan berhasil sangat ditentukan oleh respon elit DPP dan kemampuan Bidang Kewanitaan memperluas segmen perempuan PKS yang responsif gender dan bukan buta gender.

Terakhir, peran wakil perempuan PKS di Dewan Syari'ah Pusat PKS kontradiktif dengan upaya Bidang Kewanitaan DPP PKS. Bidang Kewanitaan memperjuangkan agar iklim politik di internal PKS lebih ramah dan responsif gender, DSP justru menghasilkan Bayan yang mempertegas prinsip kepemimpinan laki-laki atas perempuan dan memberi persyaratan yang dapat menjadi beban tambahan bagi perempuan untuk berperan dalam aktivitas politik. Karena bayan adalah keputusan DSP sebagai sebuah lembaga, maka DSP adalah anti subyek bagi perempuan PKS.

Berbagai teori yang dipergunakan untuk menjelaskan fenomena posisi perempuan dalam struktur kewenangan di PKS menunjukkan bahwa masih terjadi subordinasi terhadap perempuan PKS dalam struktur kewenangan PKS. Subordinasi pertama terdapat dalam Bayan yang dapat menjadi penghambat peran perempuan dalam struktur kewenangan PKS. Selain itu perempuan juga minoritas dalam kewenangan berbagai sub-struktur di PKS, dengan peran paling rendah di DPTP. Hal ini menyebabkan perempuan PKS sulit melakukan mobilitas peran politik karena terbatasnya akses mereka terhadap keputusan penting PKS.

Keterbatasan peran dalam struktur partai juga menyebabkan perempuan PKS tidak memiliki kesempatan meningkatkan ketrampilan politik untuk memenuhi kualifikasi untuk dicalonkan menjadi anggota DPR, baik untuk memenuhi harapan kader PKS yang mempunyai hak untuk mengusulkan calon anggota DPR lewat jalur pemilihan oleh kader maupun untuk memenuhi kualifikasi untuk dipilih melalui jalur *hubaro* atau kepakaran. Dua jalur ini menjadi sulit dipenuhi perempuan PKS karena mereka tidak memiliki kesempatan meningkatkan ketrampilan politik melalui posisi dalam jabatan kepengurusan partai. Secara khusus ketiadaan perempuan wakil di DPTP telah membuat perempuan tidak memiliki akses terhadap keputusan tentang pencalonan anggota DPR karena lembaga inilah yang mempunyai wewenang pencalonan anggota DPR.

Bagan 2 Persentase Perempuan dalam Struktur Kewenangan PKS

HAK POLITIK DALAM PERSPEKTIF PEREMPUAN PKS

Analisis mengenai posisi perempuan PKS dalam hubungan kekuasaan internal partai dapat dilihat dari kemampuan mereka mempengaruhi proses pencalonan anggota DPR. Menurut Moya Lloyd¹, studi tentang politik penting untuk mengungkap mengenai bagaimana "power and domination" terjadi. Seperti sudah diungkapkan pada Pendahuluan, studi ini mempermasalahkan bagaimana "power and domination" terjadi antara pejabat struktur PKS dengan perempuan calon anggota legislatif PKS. Untuk melihat posisi perempuan dalam hubungan kekuasaan atau dalam *power and domination* tersebut, analisis perlu dilakukan terhadap aspek-aspek yang lebih rinci, yaitu: *pertama*, keyakinan ideologis yang menjadi dasar pandangan, sikap dan tindakan politik baik dari laki-laki pengurus partai maupun dari kalangan perempuan PKS sendiri.² Secara teoritik, keyakinan ideologis anggota partai yang sama adalah sama karena orang bergabung dalam partai pertama-tama adalah karena kesamaan ideologis.³ Meski demikian tuntutan perempuan akan keadilan politik dalam partai adalah isu yang masih cukup baru,⁴ dan di Indonesia bahkan baru mendapat perhatian serius semenjak dikeluarkannya ketentuan tentang kuota bagi perempuan dalam pencalonan anggota DPR.⁵ Bagi PKS, aspek ini penting dibahas karena PKS adalah partai Islam yang dalam spektrum ideologi politik diasumsikan tidak responsif terhadap tuntutan keadilan politik bagi perempuan karena kuatnya pandangan patriarkhis yang bersumber dari penerjemahan ajaran agama (Islam) secara sepihak oleh laki-laki.⁶

Kedua, perbedaan-perbedaan kemampuan politik diantara perempuan PKS dilihat dari posisi yang berhasil dicapai dalam struktur kekuasaan di PKS dan kemampuan mempengaruhi pembuatan keputusan pencalonan anggota DPR dari PKS. Perbedaan ini menunjukkan dimensi *multiple subject* diantara perempuan. Dalam hal ini perlu dilihat perbedaan kemampuan perempuan PKS mempengaruhi

¹ Moya Lloyd. 2005. *Beyond Identity Politics, Feminism, Power and Politics*. London Sage Publication. Hal. 2.

² Russel J. Dalton dalam salah satu bab dalam bukunya yang berjudul *Citizen Politics in Western Democracies* menggambarkan bahwa meski semakin lemah, agama masih mempunyai pengaruh cukup penting terhadap sikap dan tindakan para pemilih di beberapa Negara barat. Sementara itu Fareed Zakaria dalam tulisannya tentang *Islam, Democracy and Constitutional Liberalism* melihat adanya *resurgence* atau kebangkitan kembali Islam politik dalam bentuk yang cukup mengkhawatirkan bagi perkembangan demokrasi, yaitu fundamentalisme yang sebenarnya hanya dianut sebagian kecil masyarakat Islam.

³ Analisis lebih dalam tentang hubungan antara ideologi dan keanggotaan dalam partai dapat dilihat pada buku Giovanni Sartori, 1976. *Parties and Party System. A Framework for Analysis*. Cambridge: Cambridge University Press.

⁴ Vicky Randal. 1987. *Women and Politics. An International Perspective*. Chicago: University of Chicago Press. Dalam buku ini Randal menjelaskan bahwa tuntutan keadilan politik yang disampaikan perempuan di Amerika Serikat relatif baru dengan adanya tuntutan *universal suffrage* (hak pilih yang berlaku umum) yang baru diperoleh kalangan perempuan pada awal abad XX dibanding sejarah partai politik yang sudah cukup tua.

⁵ Ketentuan ini pertama kali dimuat dalam Pasal 65 Undang-Undang nomor 12/2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD.

⁶ Fatima Mernisi dalam bukunya yang berjudul *Menengok Kontroversi Peran Wanita Dalam Politik* menjelaskan betapa dalamnya pandangan patriarkhis yang bersumber dari hadits-hadits yang dipertanyakan keabsyahannya telah ber- 102 m masyarakat Islam sehingga masyarakat di ta dalam masyarakat Islam sebagai fitnah zaman.

penempatan dirinya dalam proses pencalonan anggota DPR periode 2009-2014. *Ketiga*, ciri-ciri atau sifat-sifat kepemimpinan politik yang pada umumnya dianggap ciri atau sifat yang melekat pada laki-laki yang pada umumnya belum dimiliki oleh perempuan. Dengan kata lain dinamika juga ditentukan oleh sejauhmana perempuan masih menunjukkan karakter sebagai *subject of lack*. *Keempat*, ciri-ciri dan sifat-sifat yang diasumsikan melekat pada perempuan dan ingin dibuang karena menghambat perempuan menjadi subyek politik yang setara laki-laki (*deferred subject*).

Dari keempat aspek tersebut, bab ini secara khusus menyoroti aspek pertama, yaitu pandangan ideologis tentang hak politik bagi perempuan. Kemampuan perempuan mempengaruhi proses pencalonan anggota DPR dari PKS dijelaskan pada berikutnya. Bab berikutnya juga membahas pandangan, sikap dan tindakan pejabat partai yang berpengaruh terhadap proses pencalonan perempuan PKS menjadi anggota DPR RI.

Bagaimana perempuan memandang hak politik bagi perempuan dan bagaimana dia menerjemahkan kekuasaan seperti apa yang diinginkannya termasuk dalam pengertian politik identitas.⁷ Disebut politik identitas karena dalam hal ini perempuan dihadapkan pada pilihan apakah akan menerima dogma-dogma yang selama ini telah diterima umum yang menempatkan perempuan pada posisi khusus dalam kekuasaan ataukah memilih untuk mempertanyakan dogma-dogma tersebut dan menerjemahkannya dengan perspektifnya sendiri.

Keyakinan ideologis diantara perempuan PKS tentang hak politik bagi perempuan dapat dilihat dari pandangan-pandangan narasumber yang terekspresikan dalam wawancara. Terdapat tiga cara pandang tentang kekuasaan⁸ yang mungkin akan muncul dari penjelasan para perempuan narasumber tentang hak politik mereka. *Cara pandang pertama* adalah cara pandang yang menginginkan *gender neutrality* (netralitas gender) dalam kekuasaan. Cara pandang yang berakar dari asumsi liberal ini memberi nilai tinggi terhadap perempuan yang dapat menumbuhkan maskulinitas yang diterima sebagai norma standar dalam kehidupan politik. Kubu ini menginginkan kesetaraan politik (*political equality*) antara perempuan dan laki-laki. *Cara pandang kedua* menginginkan kebalikannya, yaitu bahwa perempuan harus memberi warna gender lain (menginginkan *gender visibility*) terhadap kehidupan politik yang selama ini diasumsikan sebagai netral gender. Perempuan harus mampu merubah iklim politik yang maskulin menjadi feminin. *Cara pandang ketiga* adalah cara pandang yang menginginkan keberagaman (atau *diversity*) sehingga politik semestinya dikerjakan bersama-sama oleh laki-laki dan perempuan dengan mengadopsi berbagai cara pandang, baik maskulin maupun feminin.

Penelitian ini berhasil mengumpulkan data dari berbagai segmen yang terlibat dalam proses pencalonan anggota DPR oleh PKS. Terdapat sembilan perempuan narasumber yang dapat diwawancarai untuk kepentingan penelitian ini. Kesembilan perempuan narasumber penelitian yang merupakan calon anggota DPR ini berasal dari beberapa segmen yaitu: (1) Majelis Syura; (2) Dewan Syari'ah Pusat; (3) Dewan Pengurus Pusat; (4) Majelis Pertimbangan Pusat; (5)

⁷ Hal ini dibahas antara lain oleh Michael Kenny dalam buku *The Politics of Identity*; Judith Squires dalam buku *Gender in Political Theory*; dan Moya Lloyd dalam buku *Beyond Identity Politics, Feminism, Power and Politics*.

⁸ Judith Squires. *Op. cit.* hal 115-139

Unsur usulan wilayah daerah (disebut juga unsur Dewan Pakar); (6) Unsur non kader Partai Keadilan Sejahtera. Selain itu penelitian ini juga berhasil mengumpulkan data dari beberapa laki-laki pengurus PKS tingkat pusat, yaitu Presiden PKS (yang sekaligus anggota Dewan Pimpinan Tingkat Pusat PKS dan anggota Majelis Syura), satu anggota Majelis Syura yang sekaligus anggota Majelis Pertimbangan Pusat dan mantan Presiden PKS, satu orang anggota Majelis Syura yang juga mantan Presiden Partai Keadilan, dan satu orang anggota Majelis Syura yang berasal dari unsur perwakilan daerah. .

Untuk mengumpulkan data tentang pandangan perempuan PKS tentang pandangan mereka tentang kekuasaan politik, beberapa pertanyaan diajukan kepada mereka. Pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah:

1. Pandangan yang bersangkutan tentang makna kekuasaan bagi perempuan
2. Pandangan yang bersangkutan tentang hak perempuan menjadi anggota DPR
3. Pandangan yang bersangkutan tentang hak perempuan menjadi pejabat partai
4. Pandangan yang bersangkutan tentang hak perempuan menjadi presiden.
5. Alasan yang mendasari pandangan-pandangan dari nomor 1-4 tersebut.

Wawancara mendalam yang dilakukan menunjukkan bahwa pandangan dan keyakinan ideologis para narasumber tentang hak politik perempuan, khususnya hak untuk menjadi anggota DPR, bervariasi. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara berkenaan dengan pandangan tentang kekuasaan.

Perspektif "Netral Gender" tentang Hak Politik Perempuan.

a. Kesetaraan Misi dan Posisi

Ketika ditanya tentang apa makna kekuasaan bagi perempuan, ibu A menyatakan bahwa keterlibatan perempuan dalam politik, khususnya menjadi anggota DPR, adalah:

Agar ada keterlibatan kaum perempuan menyelesaikan masalah perempuan dan juga masalah masyarakat secara umum, bukan cuma persoalan perempuan, anak-anak, keluarga, tapi juga sedapat mungkin ikut menyelesaikan persoalan secara umum.⁹

Bagi ibu A, kekuasaan bagi perempuan, khususnya bagi dirinya sendiri, adalah sebuah media untuk menyelesaikan masalah-masalah kemasyarakatan, bukan hanya persoalan perempuan semata. Selain itu kekuasaan bermakna sebagai sarana penyelesaian masalah-masalah umum atau masalah publik. Meski demikian, masalah publik yang dimaksud oleh ibu A ternyata masih merupakan masalah seputar perempuan. Pandangan ini tercermin dalam pernyataannya lebih lanjut seperti berikut:

⁹ Hasil wawancara dengan ibu A di Jakarta 26 April 2009

Jadi kalau ada masalah perempuan itu mereka menanyakan dulu ke kita, bagaimana ini ibu-ibu, maunya bagaimana, terus perasaan sebetulnya apa? *Sharing*, karena yang tau persis (masalah perempuan) kita kaum perempuan.¹⁰

Pernyataan bahwa perempuan bukan hanya perlu memperjuangkan kepentingan perempuan, tetapi memperjuangkan aspirasi semua orang dan semua kepentingan dikemukakan juga ibu Y. Misi perempuan adalah untuk mewakili kepentingan semua orang. Hal ini dikemukakan ibu Y sebagai berikut:

Kalau kami di PKS ini tidak hanya memperjuangkan aspirasi perempuan, tapi aspirasi semua. Artinya kita bebas berbicara berbagai hal, begitu¹¹

Ibu A menyatakan bahwa “eksklusifitas” posisi perempuan PKS pada Bidang Kewanitaan tidaklah bermakna negatif. Baginya, hal ini justru dibutuhkan karena secara riil masalah-masalah perempuan berkenaan dengan masalah-masalah publik sangat banyak, dan hal ini membutuhkan banyak pemikir dan pelaksana kegiatan. Karena itu, banyaknya jumlah perempuan di Bidang Kewanitaan (dan bukan pada Bidang lain) bukanlah kelemahan, tetapi kebutuhan sesuai dengan fakta yang ada. Meski ibu A menyatakan bahwa banyaknya jumlah perempuan pada Bidang Kewanitaan PKS bukanlah hal negatif dan bukan kelemahan, tetapi dia mengakui bahwa perempuan belum merupakan subyek kekuasaan yang setara laki-laki karena mereka pada umumnya hanya menjadi staf dan juga belum dominan pada bidang lain yang juga dibutuhkan eksistensinya bagi perempuan. Hal ini terlihat dari pernyataannya berikut:

Kalau menurut saya nggak semuanya di bidang kewanitaan. Kita di setiap departemen itu ada perempuan-perempuan yang diakomodir. Cuma memang nggak banyak dan pada umumnya sebagai staf. Cuma masalahnya perempuan itu sebagian terbesar ada di tengah-tengah bangsa ini yang persoalannya juga sangat banyak. Jadi bidang kewanitaan juga banyak orangnya.¹²

Ibu A menolak melakukan tindakan khusus untuk menolong agar perempuan memperoleh kekuasaan di partai dan di luar partai karena menurutnya semua persyaratan untuk jabatan politik itu berlaku sama, baik untuk laki-laki maupun perempuan.¹³ Pandangan ibu A menunjukkan bahwa yang dia inginkan adalah kesamaan antara perempuan dengan laki-laki agar perempuan dapat melaksanakan semua urusan kemasyarakatan, seperti laki-laki mengurus semua urusan kemasyarakatan. Untuk itu dirinya harus bersikap netral gender karena netralitas genderlah yang diinginkan oleh partai. Jika dia tidak menjaga netralitas gender, maka dia merusak tatanan nilai normatif tentang kekuasaan yang diinginkan oleh PKS.

¹⁰ *Ibid*

¹¹ Hasil wawancara dengan ibu Y di Tangerang 4 April 2009

¹² *Ibid*

¹³ *Ibid.*

Dalam klasifikasi yang dibuat oleh Judith Squires¹⁴, pandangan ibu A ini masuk dalam kategori pandangan yang menginginkan netralitas gender sebagai nilai yang harus diperjuangkan oleh perempuan. Kapasitas politik yang setara antara perempuan dengan laki-laki adalah hal yang diinginkan oleh ibu A. Dia tidak menginginkan iklim politik yang berbeda baik dalam partai maupun dalam lingkup yang lebih besar sehingga semua perempuan PKS dapat merasa nyaman di dalamnya sebagai nilai yang utama untuk diperjuangkan.

Pandangan ibu A tentang netralitas gender dan keinginannya akan kesetaraan gender (yang bermakna kapasitas perempuan yang setara dengan laki-laki agar perempuan dapat efektif menjadi efektif sebagai aktor politik) merupakan pandangan politik yang merepresentasikan cara berfikir liberal yang asumsi dasarnya adalah bahwa masyarakat ideal adalah masyarakat yang masing-masing kelompok adalah setara dan dapat membuat pilihan-pilihan tanpa paksaan. Padahal bagi para feminis post-strukturalis (disebut para penganut *identity-based politics*) identitas diri yang tidak dapat dihindarkan dan tidak dapat dipilih (karena sudah ditentukan dan dipikirkan oleh kekuatan di luar diri individu yang bersangkutan) merupakan kepercayaan dan nasib yang harus diterima (oleh kelompok atau sub kelompok minoritas). Pilihan yang benar-benar bebas bagi perempuan hampir tidak ada, demikian kata para penganut politik identitas. Menurut T Gitlin kepercayaan dan nasib seseorang itu ditentukan oleh keseluruhan identitas pribadi seseorang yang sudah ditentukan oleh satu kekuatan dan pilihan mutlak dari luar dirinya yang tidak bisa¹⁵. Karena itu asumsi kaum liberal bahwa setiap manusia memiliki hak dan kebebasan individual yang sama sehingga individu adalah yang menentukan sendiri apakah akan memanfaatkan hak dan kebebasan tersebut atau tidak, apakah akan sukses atau gagal ditolak oleh T Gitlin. Menurut Gitlin semua semua kelompok, masyarakat, dan asosiasi yang oleh kaum liberal diasumsikan sebagai selalu sehat dan berfungsi dalam masyarakat madani dan berasal dari pilihan-pilihan bebas sesungguhnya tidak mungkin benar-benar bebas bagi setiap individu karena setiap individu memiliki pilihan-pilihan yang tidak bebas atas kelompok, organisasi dan asosiasi yang mungkin bisa dipilihnya. Perempuan miskin tidak mungkin masuk dalam asosiasi kelompok perempuan kaya, perempuan kulit berwarna tidak mungkin masuk dalam kelompok sosial perempuan kulit putih, kelompok perempuan jemaat sebuah gereja tidak mungkin terbuka dimasuki perempuan ateis. Terdapat kekuatan di luar diri manusia yang membuat manusia tidak memiliki pilihan bebas atas asosiasi, organisasi dan kelompok.

Pandangan ibu A tentang netralitas gender mewakili sudut pandang liberal tentang kekuasaan politik karena didasarkan pada asumsi bahwa perempuan dapat membuat pilihan politik bebas, padahal menurut para penganut politik identitas, sebenarnya apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh perempuan ditentukan oleh kekuatan di luar dirinya.

¹⁴ Judith Squires. *Op. cit.* Hal . 116-117

¹⁵ Michael Kenny. *Op. cit.* hal 23

b. Tidak ada Marginalisasi dan Diskriminasi terhadap Perempuan di PKS

Berkenaan dengan marginalisasi dan diskriminasi terhadap perempuan, Ibu Y menyatakan bahwa keterlibatan perempuan dalam kehidupan politik merupakan tindakan meniru sunah rasul. Dia menyatakan:

Karena PKS dasarnya Islam, perjuangan kita itu insya Allah berupaya untuk meniru perjuangan rasulullah. Rasulullah tidak pernah memarginalkan perempuan, selalu melibatkan perempuan. Bahkan wanita hamil tuapun diajak untuk pergi berjuang. PKS seperti itu kalau saya lihat.¹⁶

Bagi ibu Y, tidak ada perbedaan peran laki-laki dan perempuan dalam kehidupan politik di PKS. Perempuan memikul beban yang sama dengan laki-laki dalam kehidupan politik, dan hal ini bersumber dari sejarah kehidupan rasul (Muhammad saw) yang tidak pernah memarginalkan peran perempuan, termasuk perempuan hamil dalam kehidupan publik, termasuk pergi berperang. Ibu Y tidak mengenal perbedaan peran tersebut, sangat yakin bahwa PKS menjunjung tinggi perempuan. Dia juga merasa sangat yakin terhadap kapasitas dirinya untuk bisa efektif menjalankan peran politik sehingga dia tidak mengakui adanya diskriminasi (terhadap peran politik perempuan di PKS), seperti dinyatakannya:

Alhamdulillah, selama ini Majelis Syuro itu sangat terbuka, sangat akomodatif terhadap aspirasi anggotanya, baik pria maupun wanita. Artinya tidak ada diskriminasi dalam memberikan kesempatan berbicara kepada anggota. Alhamdulillah selama ini kami bebas-bebas saja untuk mengeluarkan pendapat dalam berbagai hal, baik kita menanggapi atau mengusulkan.¹⁷

Pengalaman pribadi ibu Y dalam melaksanakan fungsinya sebagai anggota Majelis Syura adalah adanya majlis yang sangat akomodatif terhadap aspirasi anggotanya. Dia merasa bebas mengemukakan pendapat tentang berbagai hal. Tetapi “berbagai hal” tersebut tidak dijelaskannya lebih lanjut, khususnya berkenaan dengan aspirasi perempuan tentang kekuasaan.¹⁸

Karena menurutnya PKS tidak mengenal diskriminasi terhadap peran politik perempuan, maka menurutnya perempuan harus mengambil kesempatan untuk berperan aktif dalam kehidupan politik seperti pernyataannya lebih lanjut bahwa:

Ini yang selalu saya *push* pada mereka, kalau berbicara hak jangan malu, Artinya kalau hak kita, kita mendapatkan hak untuk meningkatkan kualitas, mendapatkan apa saja, kalau itu hak kita harus kita ambil. Hak itu boleh diambil boleh tidak, tapi kalau kita anggap itu penting, harus kita ambil.¹⁹

¹⁶ Hasil wawancara dengan ibu Y di Tangerang 4 April 2009

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ Sebagai tokoh perempuan PKS ibu Y tidak pernah mempertanyakan mengapa tidak ada satupun perempuan yang duduk pada posisi pimpinan PKS, baik di Majelis Syura, DPTP, MPP, DPP, maupun DSP

¹⁹ Hasil wawancara dengan ibu Y di Tangerang 4 April 2009

Menurutnya, termasuk hak perempuan di kehidupan politik khususnya menjadi anggota DPR jika perempuan yakin bahwa dia memiliki kapasitas untuk itu. Karena itu hak menjadi anggota DPR harus diambil oleh perempuan jika hal itu dianggap penting, baik bagi perempuan itu sendiri maupun lebih-lebih bagi kepentingan umat yang lebih luas, dan jika perempuan itu mempunyai kapasitas untuk tugas tersebut. Ibu Y tidak memahami bahwa mayoritas perempuan PKS masih memandang kekuasaan sebagai sesuatu yang mengerikan²⁰, atau sesuatu yang asing dan tidak pantas diperjuangkan.²¹

Ibu Y yakin bahwa perempuan bisa memiliki kekuasaan yang setara laki-laki karena dia tidak merasakan pengalaman diskriminatif. Sejak kecil dia sudah menjadi tokoh publik dan aksesnya terhadap kekuasaan politik, khususnya jabatan sebagai anggota DPR, lebih terbuka dibanding akses perempuan lain. Karena secara pribadi dia merasa sebagai partner setara laki-laki dalam kehidupan politik dan bisa secara efektif menjalankan peran politiknya, maka dia tidak merasakan bahwa perwakilan politik yang masih rendah dalam kehidupan politik, khususnya dalam internal organisasi PKS, dan lebih khusus lagi di Majelis Syura yang hanya terdapat sepuluh perempuan dari 99 anggota, sebagai diskriminasi. Hal ini bisa dilihat dari pernyataannya berikut:

Kalau menurut saya sepuluh orang itu juga alhamdulillah cukup mewakili ya. Cukup. Tapi kalau misalnya memang ada kesempatan lebih banyak lagi ya kami bersyukur. Hanya saat ini sepuluh orang itu sudah bisa mewakili suara teman-teman.²²

Hampir sama dengan ibu Y yang meyakini tidak ada diskriminasi terhadap perempuan di PKS, ibu H menyatakan bahwa Islam dan PKS sangat mendukung peran politik perempuan. Dia menyatakan:

Islam itu sangat mendukung peran wanita di publik, termasuk politik. Ini banyak sekali contoh-contohnya di masa nabi, bagaimana peran sahabiyat. Artinya sangat mendukunglah partai kami untuk keberadaan wanita di politik, karena memang banyak ayat yang terkait dalam hal mendukung ini. Saya contohkan satunya dalam bayan itu disebutkan dalam surat 9:71 bahwa perempuan beriman, laki-laki beriman mereka ini satu sama lain amar makmur nahi munkar. i.²³

Ibu H meyakini bahwa baik dalam tataran nilai yang dipegang maupun peran yang dilakukan oleh perempuan di PKS untuk berdakwah dan melakukan amal ibadah adalah sama pentingnya dengan laki-laki. Dia meyakini bahwa PKS telah memegang dan melaksanakan prinsip-prinsip kesetaraan ini. Hal ini dapat dilihat dari pernyataannya bahwa partainya (PKS) sangat mendukung peran wanita di dunia publik, termasuk dunia politik. Dia yakin bahwa hal perempuan aktif di dunia publik dan politik adalah hal yang dikehendaki Islam, seperti telah dijalankan oleh para sahabiyat Nabi (Muhammad saw). Hal ini didukung pernyataannya lebih lanjut bahwa Dewan Syariah Pusat PKS juga telah memberi dukungan bagi keberadaan perempuan dalam organisasi partai:

²⁰ Hasil wawancara dengan ibu L di Jakarta 27 Januari 2009.

²¹ Hasil wawancara dengan ibu KK di Bandarlampung 6 Mei 2009.

²² Hasil wawancara dengan ibu Y 4 April 2009 di Tangerang

²³ Hasil wawancara dengan ibu H di Jakarta 26 April 2009

Kita tau sendiri bu bagaimana sebenarnya ajaran Islam itu, bahwa tidak ada yang menghambat, bahkan mendukung kalau memang dia mampu. Kita di PKS itu berusaha untuk menerapkan nilai-nilai Islam seperti ini. Di DSP sendiripun begitu. Awalnya dulu DSP itu nggak ada perempuan, semuanya laki-laki. (sekarang) Kurang lebih 20 oranglah (jumlah anggota DSP), 2 orang perempuan.²⁴

c. Seperti Ayah dan Suami: Politik sebagai Media Dakwah

Keyakinan diri ibu Y terhadap tidak adanya perbedaan peran politik perempuan dari laki-laki berasal dari sejarah hidupnya yang sejak kecil memang sudah dilatih orang tuanya (terutama ayahnya) untuk menjadi ustadzah yang selalu berhubungan dengan masyarakat luas. Baginya, melakukan fungsi perwakilan politik adalah satu kesempatan dakwah seperti kesempatan dakwah di aspek lain dengan cara berbeda. Dia menyatakan:

Saya memang lahir dari majlis taklim. Dari kecil saya biasa berceramah, Dari SD saya sudah dibiasakan ayah saya berceramah ke berbagai tempat. Jadi sekarang jaringan majlis taklim itu luar biasa. ... Berjuang di PKS bukan hanya melalui legislatif, tapi kita bisa berdakwah di arena lain²⁵

Pengabdian diri sepenuhnya kepada partai membuat ibu Y menjadi panutan bagi anggota dan tokoh PKS lainnya.²⁶ Ibu HH, misalnya, mengatakan bahwa suaminya akan mengijinkannya menjadi aktor politik sepenuhnya jika memang memiliki kualitas pribadi seperti ibu Y. Dengan memberikan komentar demikian, para tokoh PKS menganggap bahwa ibu Y adalah “partner setara laki-laki” dalam kehidupan politik karena dapat efektif seperti diri mereka yang laki-laki yang juga tokoh politik.

Seperti ibu Y yang melihat partisipasi politik sebagai pelaksanaan peran dakwah, ibu HH juga mengatakan hal yang sama. Dia menyatakan bahwa berpolitik baginya bukan sebuah pilihan karena merupakan bagian dari kewajiban dakwah. Dia menyatakan:

Memang ini jalannya yang harus kita lalui, bagian dari dakwah, Ketika saya terjun dalam dunia dakwah, maka partai menjadi bagian dari dakwah saya. . Sekarang kita juga berdakwah tapi mungkin dalam bentuk partai. Kalau nanti partai tidak diperlukan kita tetap berdakwah. Jadi makna berpartainya begini: ketika sejak awal saya sudah memilih untuk menekuni jalan dakwah, dan salah satu alasan kita membuat partai ini adalah partai adalah wasilah, sarana untuk berdakwah. Kita bergerak dimanapun adalah dalam kerangka dakwah, mau jadi politisi, mau jadi guru, mau jadi dokter atau siapapun adalah dalam kerangka dakwah. Ketika sarana itu dibutuhkan, kita pakai, ketika sarana itu tidak kita butuhkan, kita ganti²⁷

²⁴ *Ibid*

²⁵ Hasil wawancara dengan ibu Y di Tangerang 4 April 2009

²⁶ Ibu HH dan bapak G menyatakan hal ini dalam wawancara mereka 5 Mei 2009 dan 14 Juli 2009.

²⁷ Hasil wawancara dengan ibu HH 5 Mei 2009

Partai adalah *wasilah*, dan berpartai adalah bagian dari keharusan berdakwah. Partai bisa ditinggalkan ketika tidak diperlukan lagi, tetapi dakwah tetap harus selalu dilakukan. Dengan demikian, kekuasaan dan politik di partai adalah salah satu wasilah atau sarana, bukan satu-satunya sarana. Karena partai adalah wasilah, maka kekuasaan dalam partai dan kekuasaan yang diperoleh sebagai akibat berpartai adalah wasilah, bukan tujuan. Kekuasaan adalah sarana berjuang, bukan tujuan perjuangan, seperti pernyataannya bahwa “Kita berpartai ini untuk berjuang, bismillah, nanti Allah bantu”

Pandangan ibu HH bahwa partai hanyalah sebuah wasilah atau sarana untuk dakwah dan bukan satu-satunya wasilah diperkuat oleh pandangannya yang pada awalnya tidak menyetujui pendirian Partai Keadilan. Dia menyatakan hal itu dalam pernyataannya berikut:

Sebenarnya jujur saja bu, saya termasuk orang yang tidak setuju pada saat itu untuk membuat partai. Jadi kalau mau dibilang dari 100 persen itu, enam puluh yang setuju membuat partai, empat puluh yang tidak (setuju membuat partai), dan saya termasuk yang empat puluh. Tetapi pada akhirnya karena kami terbiasa dalam dakwah itu ketika tidak ada lagi alasan-alasan secara syar’i yang membenarkan, jadi ketika dalil-dalil itu sudah menentukan demikian, bismillah, diterima.²⁸

Penerimaan ibu HH atas berdirinya partai sebagai salah satu wasilah dalam dakwah (pada saat itu adalah Partai Keadilan, belum Partai Keadilan Sejahtera) adalah karena dia tidak lagi menemukan alasan syar’i untuk menolaknya, bukan karena sepenuhnya meyakini bahwa partai adalah satu-satunya media untuk penyaluran aspirasi politik. Untuk ibu HH, “karena mayoritas sudah menerima ide tentang partai dan saya tidak menemukan alasan syar’i yang membenarkan (penolakan atas partai), maka saya menerimanya”.

Seperti ibu A, ibu Y dan ibu HH yang menyatakan bahwa peran politik di Partai adalah untuk berdakwah, ibu H juga menyatakan bahwa PKS adalah Partai dakwah. Kewajiban berdakwah bagi perempuan sama seperti kewajiban berdakwah bagi laki-laki. Ibu H menyatakan:

Partai Keadilan Sejahtera ini adalah partai dakwah, jadi memang keberadaan kita di legislatif atau di parlemen tujuannya juga untuk berdakwah, dan peran perempuan sama pentingnya dengan peran laki-laki²⁹

d. Politik sebagai Kepatuhan Kepada Partai

Ibu Y menyatakan bahwa Islam mengajarkan sikap tawadlu atau ketertundukan kepada cara nabi dalam seperti pernyataannya “Islamlah yang mengajarkan kita *tawadlu*, mengikuti cara nabi dalam berpikir, dalam beribadah,”³⁰. Meski demikian, *tawadlunitas* yang diajarkan Islam menurut ibu Y bukan menghalangi sifat kritis. Kekritisian tetap diperlukan dalam hal Partai dinilai menyimpang dari tujuan. Ibu Y mengemukakan hal ini dalam pernyataan berikut:

²⁸ *Ibid*

²⁹ Hasil wawancara dengan ibu H di Jakarta 26 April 2009.

³⁰ Hasil wawancara dengan ibu Y di Tangerang 4 April 2009

Saya pikir orang yang taat beribadah bukan berarti tidak kritis. Justru kita sangat kritis, terutama saat partai kita sudah menyimpang dari tujuan yang sesungguhnya. Selama misalnya masih tetap dalam koridor, kita semua taat. Selama ini kenyataannya partai kita alhamdulillah masih berjalan dalam rel. Saya sendiri termasuk yang bisa galak sekali ketika terjadi pelanggaran terhadap prinsip-prinsip partai. Itu kalau masalah akhlak, tapi kalau masalah aqidah alhamdulillah selama ini kita bisa dikatakan masih mengikuti koridor.³¹

Meski kader boleh bersikap kritis jika Partai dinilai menyimpang dari tujuan, ibu Y menyatakan bahwa PKS masih berjalan di rel yang seharusnya. Menurutnya selama ini jika ada masalah pada umumnya hanya menyangkut akhlak, bukan masalah aqidah. Karena itu kekritisannya juga semata menyangkut masalah akhlak, bukan aqidah. Dia memandang selama ini aqidah masih menjadi pedoman tindakan di internal PKS. Dengan demikian baginya kekuasaan politik yang benar adalah yang sepenuhnya selaras dengan aqidah (Islam) dan dilakukan secara akhlak yang baik. Karena akhlak yang baik dan ketaatan kepada partai adalah nilai yang dijunjung tinggi olehnya, maka ibu Y adalah partner elit PKS yang tidak menoleransi “akhlak menyimpang”, seperti berbicara keras, kasar atau menggugat³² pandangan, sikap dan tindakan partai.

Seperti ibu A, ibu Y memiliki perspektif yang menghendaki kekuasaan yang netral gender. Perempuan harus menunjukkan kapasitas diri yang sama dengan laki-laki, berjuang bersama laki-laki, melakukan pengabdian kepada partai sebagaimana laki-laki mengabdikan diri mereka untuk partai. Ibu Y menghendaki kepatuhan total perempuan kepada partai dan kepada para pemimpin partai, tidak boleh mempertanyakan keputusan partai. Ketertundukan total terhadap partai adalah nilai yang diinginkan oleh ibu Y. Pandangan ibu Y tentang kekuasaan yang merefleksikan pandangan yang “buta gender” (atau tidak memahami kondisi mayoritas perempuan yang masih ter subordinasi) adalah refleksi wacana hegemoni yang terkonstruksi melalui pembiasaan. Ibu Y sejak kecil sudah memiliki “posisi istimewa” dalam masyarakat karena sejak kecil sudah menjadi ustadzah dan berkeliling berdakwah bersama ayahnya. Menggunakan pendapat Muhajir Darwin, tokoh seperti ibu Y tidak mampu melihat masalah ketidakadilan gender karena sejak kecil dia termasuk dalam kelompok dominan. Hal ini dapat dilihat dari penjelasan Muhajir Darwin seperti pada Bab 1 yang menyatakan bahwa masalah ketidakadilan sosial berdasar identitas gender terkait dengan struktur dan kultur sosial yang cenderung membenarkan hegemoni dan diskriminasi dari pihak yang dominan kepada ter subordinasi.³³

Sama seperti ibu Y yang melihat kepatuhan sebagai sikap yang dituntut dari para kader Partai, ibu H juga menyatakan bahwa PKS menegakkan prinsip *tawadlunitas* bagi peran politik perempuan. Hal ini terlihat dari pernyataannya berikut:

³¹ *Ibid.*

³² Ibu K sebagai narasumber penelitian ini menunjukkan bukti bahwa PKS tidak menoleransi perbedaan pandangan dan sikap politik dirinya.

³³ Muhajir Darwin dan Tukiran. 2001. *Menggugat Budaya Patriarkhi*. Yogyakarta: Ford Foundation dan Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gadjah Mada. Hal. 252.

Secara umum masyarakat Islam dimanapun di dunia ini kalau menurut pandangan Dr. Yusuf Qardawi itu terbagi tiga (dalam) memandang wanita dalam Islam, peran wanita dalam Islam. *Pertama* mereka beranggapan, perempuan itu harus dirumahkan. Ini memang memakai dalil yang menurut Dr. Yusuf Qardawi tidak kuat. Jadi wanita itu tiga hanya boleh bepergian. Lahir ke dunia, satu, dari rumah orang tua ke rumah suami, dari rumah suami ke liang kubur. Itu pandangan sebagian umat Islam yang merumahkan perempuan. Yang kedua itu terlalu berlebihan, membebaskan sebebas-bebasnya tanpa ada rambu-rambu. Artinya liberal, semuanya boleh .karena perempuan dan laki-laki sama. Yang moderat, yang ketiga, PKS berada di pandangan ini, perempuan memiliki peran, memiliki hak dan tanggungjawab tapi ada bingkainya. Bingkai yang perlu kita jaga itu adalah *tawadlunitas*.³⁴

Berkenaan dengan ideologi PKS, ibu H berpendapat bahwa PKS menolak 2 (dua) pandangan ekstrim tentang peran perempuan. *Ekstrim pertama* sama sekali tidak mengizinkan peran publik perempuan dalam bentuk apapun. Ekstrim ini bahkan hanya mengenal konsep bepergian bagi perempuan dalam tiga hal, yaitu lahir ke dunia, pergi dari rumah orang tua ke rumah suami, dan pergi ke liang kubur. *Eksrim kedua* adalah pandangan yang sama sekali tidak memberi batasan apapun terhadap peran publik perempuan. PKS menolak dua ekstrim ini dan menganjurkan moderasi bagi peran publik dan peran politik perempuan. *Moderasi* ini dalam bahasa ibu H disebut sebagai *tawadlunitas*.

Tawadhunitas ini bisa kita artikan seimbang atau proporsional, artinya dia boleh aktif di luar tapi jangan lupa rumah tangganya. Bingkai itu yang kita perlukan. Keluarnya itu adalah membawa manfaat. Jadi bukan berarti dia keluar rumah tangganya berantakan.³⁵

Keseimbangan merupakan kata kunci dalam konsep moderasi yang dikehendaki mengenai peran publik dan peran politik perempuan oleh PKS. Keseimbangan antara peran publik dan rumah tangga, kemanfaatan dan mencegah kemudlaratan adalah kondisi-kondisi yang harus dipenuhi sebelum perempuan dapat aktif di dunia publik dan dunia politik. Keseimbangan ini perlu dijamin agar keluarga sebagai fondasi masyarakat Islam yang dikehendaki oleh PKS tidak goyah. Untuk itu, ibu H menyatakan bahwa ijin suami adalah syarat utama bagi perempuan PKS untuk terjun ke dunia politik. Dia menyatakan:

Dari suamilah terutama karena kalau suaminya tidak mendukung pasti tidak diijinkan keluar. Karena dalam Islam, termasuk sikap PKS, ijin suami itu adalah hal yang penting. Harus seperti itu. Jadi istri ijin ke suami, anak ijin ke orang tua. Alhamdulillah, para suami di PKS itu karena sudah dididik diberikan pemahaman yang sama, suami sangat mendukung istri.³⁶

Pada kenyataannya, ijin yang diberikan oleh para suami dari perempuan aktivis partai di PKS tidak hanya berupa ijin semata, tetapi juga dukungan.

³⁴ *Ibid*

³⁵ Hasil wawancara dengan ibu H di Jakarta 26 April 2009.

³⁶ *Ibid*

Berbagai perempuan nara sumber yang diwawancarai dalam rangka pengumpulan data disertasi ini menunjukkan bahwa para suami mereka sepenuhnya mengizinkan mereka beraktivitas politik secara penuh, bahkan memberikan dukungan pikiran, tenaga dan biaya. Agar keluarga tetap terurus dengan baik, para suami "mengalah" dengan memberi kesempatan dan mendukung karir politik istri.

Pencapaian kondisi keseimbangan ini tidak semata harus diupayakan sendiri oleh perempuan, tetapi harus diupayakan oleh suami istri dengan bantuan partai. Secara organisatoris partai membantu agar keseimbangan, moderasi atau *tawadlunitas* sebagai syarat peran politik perempuan dapat dicapai oleh keluarga-keluarga perempuan aktivis politik PKS. Untuk itu PKS mengembangkan program pembinaan keluarga yang disebut ahilyah.

Ahilyah, program penguatan keluarga. Ada tiga lembaga tinggi di partai ini di bawah Majelis Syuro: DPP, MPP, dan DSP. DSP membuat rambu-rambu, nanti bagaimana teknisnya dibuat oleh DPP bagian kaderisasi. Bagian *ahilyah* itu bagian kaderisasi. Jadi merekalah yang menggodog kurikulum untuk bisa sampai pada kader. Kalau DSP ini hanya membuat hukum. Kalau dapurnya kader partai ini di DPP, di kaderisasi, kaderisasilah yang membuat program itu (*ahilyah*).³⁷

Pernyataan-pernyataan ibu H di muka menunjukkan bahwa baginya makna kekuasaan politik bagi perempuan adalah *pertama*, ibadah dan dakwah yang wajib dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. *Kedua*, PKS menolak ekstrimitas peran politik perempuan. *Ketiga*, PKS sudah menerapkan prinsip kesetaraan dan mendukung peran politik perempuan. *Keempat*, *tawadlunitas* atau keseimbangan adalah prasyarat peran politik perempuan. *Kelima*, *tawadlunitas* diupayakan bersama antara perempuan (istri) dengan laki-laki (suami) dengan dukungan partai.

Dengan mengasumsikan bahwa PKS menganjurkan moderasi atau *tawadlunitas*, ibu H menggambarkan seolah-olah seluruh kader dan struktur kepengurusan PKS mempunyai perspektif yang sama. Asumsi ini tidak sepenuhnya benar karena pandangan formal PKS belum tentu diikuti oleh seluruh kader dan struktur kepengurusan PKS pada semua tingkatan. Penjelasan pandangan tentang hak politik perempuan dari kubu *diversity*³⁸ atau keberagaman pada sub bab berikut akan menunjukkan bahwa pendapat ibu H tidak benar karena di PKS terdapat segmen kader dan struktur kepengurusan yang menolak hak politik perempuan, lebih-lebih hak menjadi kepala negara.

Posisi Kepala Negara Bukan untuk Perempuan

Di kalangan perempuan PKS terdapat pandangan yang menyatakan bahwa posisi sebagai kepala negara bukanlah hak perempuan. Perempuan lebih baik berada "di belakang layar dalam kehidupan politik", tidak perlu terjun langsung ke

³⁷ *Ibid*

³⁸ Sebagaimana dijelaskan dalam bagian lebih awal, kubu *diversity* menghendaki bukan hanya posisi politik untuk perempuan, tetapi iklim politik yang sesuai dengan kondisi dan keinginan perempuan.

dalamnya, khususnya menjadi kepala negara Hal ini terlihat dari pernyataan ibu HH berikut:

Kalau sebagian besar ulama itu mengatakan tidak boleh. Tapi kalau saya aplikasikan di lapangan, saya secara pribadi melihat, wajar, karena perempuan itu kan memang didominasi perasaan, dominasi yang lain-lain itu kadang-kadang lebih besar. Kemudian juga kalau saya mungkin lebih senang dibalik pintu. Kalau saya pikir lebih baik kita di belakang layar tapi kita lebih banyak bisa berbuat³⁹

Keberatan ibu HH terhadap peran perempuan di garda terdepan kehidupan politik dikarenakan pandangannya bahwa perempuan pada umumnya lebih dikuasai perasaan (dibanding oleh akal). Maka tidak mengherankan bahwa baginya, hampir tidak mungkin seorang perempuan menjadi kepala negara karena baginya, selama masih ada laki-laki yang mampu, maka dia mempertanyakan kenapa perempuan yang menjadi kepala negara.

Perspektif *Diversity* atau Keberagaman tentang Hak Politik Perempuan

Berbeda dengan “kubu netral gender” yang menghendaki kesetaraan dan adanya keahlian politik perempuan yang setara dengan laki-laki sehingga perempuan dapat menjadi seefektif laki-laki dalam menjalankan fungsi politik, dan berbeda dari “kubu perbedaan (*difference*)” yang menginginkan karakter feminin menggantikan karakter maskulin dalam dunia kekuasaan politik, kubu keberagaman (*diversity*), menghendaki bahwa kekuasaan politik perlu dijalankan oleh laki-laki dan perempuan secara bersama dengan menerapkan cara pandang maskulin maupun feminin dalam pengelolaan kehidupan politik.⁴⁰ Hal ini sesuai dengan *Universal Declaration on Democracy* yang pada intinya menyatakan bahwa demokrasi mensyaratkan kerjasama sungguh-sungguh antara laki-laki dan perempuan dalam pengelolaan masalah-masalah kemasyarakatan dengan cara mereka saling bekerjasama dalam kesetaraan dan saling melengkapi dengan memanfaatkan kelebihan-kelebihan yang datang dari perbedaan diantara mereka.⁴¹

Dalam perspektif ini, perempuan tidak selalu harus memiliki keahlian politik yang sama dengan laki-laki agar menjadi setara, juga tidak perlu menggantikan pendekatan maskulin dengan pendekatan feminin terhadap kekuasaan, tetapi perlu bekerja sama untuk memecahkan masalah kemanusiaan dengan bekerja sama atas dasar kesetaraan dan saling melengkapi dengan memanfaatkan perbedaan-perbedaan yang ada antara laki-laki dengan perempuan. Perbedaan justru menjadi modal saling memperkuat, bukan mendiskriminasi atau mensubordinasi.

³⁹ *Ibid*

⁴⁰ Judith Squires. *Op. cit.* hal. 124

⁴¹ Council of the Inter-Parliamentary Union. 1997. *Universal Declaration on Democracy*.

a. Politik adalah Dakwah dan Mencari Cinta Allah

Berbeda dengan narasumber perempuan PKS kubu pertama yang mengadopsi cara pandang netral gender dan menginginkan kesetaraan dengan laki-laki dalam kehidupan politik, narasumber pada kubu keberagaman memberi penerjemahan secara berbeda tentang kekuasaan politik yang mereka inginkan. Mereka tidak hanya menghendaki “*equality*” atau kesetaraan, tetapi juga menghendaki *complementarity* atau saling melengkapi sehingga politik tidak hanya didominasi laki-laki baik dari sisi kuantitas maupun ide, tetapi juga menjadi kehidupan yang lebih sesuai dengan kondisi perempuan dan mengadopsi cara pandang perempuan.⁴²

Ibu K, misalnya, mempunyai pandangan bahwa kekuasaan mempunyai berbagai makna, yaitu:

Kekuasaan adalah amanah. Saya mencoba bersandar kepada..yang mempunyai keputusan, saya bersandar yang memiliki keputusan adalah Allah, saya ingin mendapatkan cinta Allah, dan saya ingin umat ini lebih sadar kepada Islam. Jadi tidak terlalu muluk. Daripada saya bersandar kepada logika politik lebih baik saya bersandar kepada logika dakwah.⁴³

Pandangan ibu K tentang makna kekuasaan memuat beberapa dimensi. *Pertama*, kekuasaan adalah amanah Allah swt. Pandangan ini menunjukkan bahwa kekuasaan bukan semata masalah manusia dan hasil dari interaksi antar manusia, tetapi merupakan amanah Allah. *Kedua*, eksistensi perempuan dalam kekuasaan politik adalah eksistensi untuk mencari cinta Allah. Eksistensi perempuan dalam kekuasaan politik mempunyai makna bukan semata media mencari popularitas atau mencari pengaruh atas kebijakan pemerintah, tetapi media mencari cinta Allah. *Ketiga*, upaya mencari cinta Allah melalui kekuasaan tersebut adalah dengan membuat manusia sadar kepada Islam. *Keempat*, kesadaran masyarakat terhadap Islam tersebut diperoleh melalui makna keempat kekuasaan politik, yaitu kekuasaan sebagai media dakwah.

Ibu KK, narasumber lain mengemukakan pandangan tentang makna kekuasaan yang mirip dengan pendapat ibu K. Ibu KK⁴⁴ menyatakan bahwa baginya kekuasaan, dan lebih khusus pengabdianya kepada PKS adalah “tiket ke surga”. Dengan menjadikan kekuasaan sebagai arena mencari “tiket ke surga”, maka ibu KK menganggap apapun hasil kesertaannya dalam pemilu tidak akan merubah sikapnya untuk selalu mengabdikan kepada PKS meski dia sendiri bukanlah kader PKS. Dia mempunyai pandangan yang sama dengan PKS karena keikutsertaannya atas ajakan untuk ikut pemilu 2009 melalui PKS didasarkan pada kesamaan ideologi, yaitu Islam.

Lebih lanjut dia menyatakan bahwa pengabdianya di PKS adalah untuk membesarkan partai. Dia menyatakan

⁴² Judith Squires dalam bukunya *Gender in Political Theory* (halaman 143- 165) menyebut keadilan dan kepedulian (*justice and care*) sebagai prinsip-prinsip politik yang diperjuangkan oleh feminis kubu keberagaman ini. Perempuan juga menginginkan *maternal citizenship* atau kewarganegaraan dari garis ibu sebagai prinsip yang juga perlu diadopsi dalam konsep kewarganegaraan,

⁴³ Hasil wawancara dengan ibu K di Bandar Lampung 23 Maret 2009

⁴⁴ Hasil wawancara dengan ibu KK di Bandar Lampung 6 Mei 2009.

Insyah Allah saya membesarkan partai, walaupun nggak “nyantol”. Karena saya sudah diamanati PKS, saya nggak mau setengah-setengah, maksimal, semampu saya. Dari awal pelepasan calon-calon itu saya ingat kalimatnya, bismillah, berjuanglah, tanamkan dalam hati anda bahwa berdakwah. Jadi dari awal sudah seperti itu, jadi kelihatannya saya siap⁴⁵

Bagi ibu KK, partisipasinya di partai adalah untuk ikut membesarkan partai. Karena itu, meski dia sadar bahwa dia belum tentu terpilih dalam pemilu 2009, dia tetap bekerja maksimal dan tidak setengah-setengah karena merasa sudah diamanati oleh partai untuk ikut dalam proses pemilu 2009. Dia menjunjung tinggi amanat partai untuk berjuang, berdakwah dan memperlakukan tiket yang diberikan oleh PKS (untuk ikut serta dalam pemilu) sebagai tiket masuk surga. Membesarkan partai, berjuang, berdakwah dan mencari surga adalah makna kekuasaan yang pertama bagi ibu KK.

Selain itu ibu KK berpandangan bahwa dia bergabung dalam proses pencalonan anggota DPR dari PKS karena memiliki ideologi yang sama. Sebagai tokoh daerah Lampung yang besar dari perannya dalam berbagai organisasi dakwah dan ormas Islam, dia mencari partai yang satu ideologi dengannya. Mantan anggota DPRD Provinsi Lampung dari Partai Golkar ini menyatakan “Selama ini insyallah saya bergabung dalam arti visi misinya memang cocok dengan saya, lebih kental nuansa Islamnya.”⁴⁶ Hal ini didukung dari pernyataannya bahwa perekrutan dirinya sebagai calon anggota DPR dari PKS memang didasarkan dari potensi dirinya sebagai tokoh perempuan Islam

Uchti, narasumber lain, menyatakan bahwa politik bagi perempuan merupakan kewajiban karena hal ini terkait dengan kewajiban dakwah bagi siapa saja, tetapi dengan batasan. Dia menyatakan:

Dalam konteks partai dakwah maka menjalankan dakwah adalah wajib, tidak terkecuali bagi perempuan dan laki-laki. Ketika dakwah itu kemudian dianggap harus dilakukan menjadi sebuah *system* agar lebih efektif, agar memiliki kekuatan untuk bisa meraih tujuan-tujuan kemaslahatan, maka membentuk partai politik, ikut terlibat, berkontribusi, perempuan juga tetap harus pada konteks tertentu, dengan tetap ada batasan.⁴⁷

Bergabung dalam partai politik, berkontribusi, dalam konteks tertentu menjadi kewajiban bagi perempuan. Demikian pendapat Uchti. Beberapa hal yang dapat diartikan sebagai “konteks tertentu” dalam pernyataan narasumber tersebut adalah antara lain tetap menjaga akhlak, mengedepankan tugas-tugas utama, mendapat dukungan dari suami. Pernyataan Uchti menunjukkan bahwa para suami dari perempuan aktivis PKS tidak diperbolehkan menghambat karir politik istri jika istri potensial untuk itu. Dukungan suami dibutuhkan agar hubungan dalam keluarga tetap dapat seimbang. Uchti mengemukakan pendapatnya dalam pernyataan berikut:

Di bayan itu ada keterangan apa yang menjadi nilai dasar sebuah kewajiban., tetapi ada yang dipersyaratkan, misalnya tetap menjaga

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ *Ibid*

⁴⁷ Hasil wawancara dengan Uchti di Jakarta 10 Maret 2009

akhlak, mengedepankan tugas-tugas utama dia, harus mendapatkan dukungan, berusaha mendapatkan dukungan, tetapi kepada yang laki-laki, kepada suami juga tetap ada arahan untuk mendorong...nggak boleh dengan kata-kata...kamu istri saya, saya larang..nggak boleh, itu ada begitu. Jadi,,tapi ada ada upaya untuk memberi gambaran itu menjadi lebih proporsional menjadi arah panduan ketika seseorang.. (tidak jelas, kemungkinan “dicalonkan”). Bagaimana Dewan Syariah membuat itu adalah sebuah representasi dari bentuk kebijakan yang diarahkan oleh Majelis Syuro.⁴⁸

b. Perempuan Memiliki Semua Hak Politik

Berbeda dengan perempuan PKS pada kubu pertama yang masih ada yang mengatakan bahwa jabatan presiden bukan hak perempuan, beberapa perempuan PKS berkeyakinan bahwa perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki untuk menjadi kepala negara. Ibu K, misalnya, menyatakan:

Kita sudah punya satu pemahaman yang sama bahwa sepanjang negara bukan *daulah Islamiah*, boleh (perempuan menjadi presiden). Yang dimaksud *imamah qubro* itu kalau negaranya *daulah Islamiah*. Tapi sepanjang negaranya bukan seperti ini, itu masih diberikan kebebasan bagi mereka yang memang memiliki kapasitas. Kita kenal Ratu Bilqis yang bisa mengayomi negerinya bersama dengan kabinetnya. Tapi sekali lagi bagaimana kita bisa mendapatkan sosok Ratu Bilqis pada masa sekarang, itu yang sulit. Tapi kita kan punya referensinya di dalam Al Quran. Jadi kita nggak bisa menafikan hal ini. Jadi saya kira pelajarannya adalah buat kita di sini melihat kekuasaan itu sebagai sesuatu yang biasalah, tidak menjadi sesuatu yang menyeramkan.⁴⁹

Ibu K mempunyai pandangan bahwa perempuan mempunyai hak yang sama dengan laki-laki atas posisi kepala negara, khususnya di Indonesia karena menurutnya Indonesia bukanlah negara Islam. Jika perempuan terhalang menjadi kepala negara, masalahnya bukan pada soal perempuan atau laki-laki, tetapi lebih karena kualitas. Dia mengambil contoh bahwa berdasar sejarah yang diyakini umat Islam sudah pernah ada perempuan yang dapat menjadi kepala negara yang dapat melaksanakan kepemimpinannya secara efektif. Karena itu sebagai warga PKS dia meyakini bahwa meski PKS adalah partai Islam, tetapi tidak ada masalah bagi perempuan di Indonesia untuk menduduki posisi kepala negara. Meski begitu dia tidak yakin apakah pendapatnya ini juga diyakini oleh warga PKS lainnya. Lebih lanjut, baginya kekuasaan politik bukanlah sesuatu yang menyeramkan. Sedikit berbeda dengan narasumber lain yang . lain yang memaknai kekuasaan lebih sebagai ”anugerah”, Kingkin Anidha melihat kekuasaan sebagai ”beban” yang harus dijaga.

Berkenaan dengan hak perempuan untuk menjadi kepala negara, ibu S memiliki pandangan yang mirip dengan ibu K. Menurut ibu S, perempuan memiliki hak politik apapun, kecuali dalam posisi khalifah. Dia menyatakan:

Sepanjang yang pernah saya pahami sebenarnya yang nggak boleh sama sekali itu pemimpin perempuan dalam pengertian dunia, khilafah.

⁴⁸*Ibid*

⁴⁹ Hasil wawancara dengan ibu K di Bandar Lampung 23 Maret 2009.

Khilafah itu nggak boleh perempuan. Karena sebetulnya dulu ada Ratu Balqis. Tapi benar *imamah qubro* itu *khalifah*, bukan *daulah*. Justru di situ ada peluang presiden perempuan. Kalau yang benar-benar mutlak tidak boleh ya *imamah qubro*. Pemimpin dari segi *kekhilafahan*, seperti negara-negara-negara federasi Uni Eropa. Jadi khilafah itu seperti federasi Uni Eropa. Kalau mau jadi ketua semua itu, itu yang mutlak nggak boleh. Karena itu saya bilang masih ada peluang presiden perempuan.⁵⁰

Pendapat ibu S menyatakan bahwa perempuan bisa menjadi presiden, tetapi tidak bisa untuk yang lebih tinggi dari itu, misalnya yang berbentuk federasi banyak negara, seperti Uni Eropa. Pendapat ibu S dan ibu K ini juga dinyatakan oleh mantan Presiden Partai Keadilan⁵¹ yang dalam kesempatan wawancara untuk pengumpulan data pendahuluan riset ini menyatakan bahwa soal kepemimpinan perempuan sebagai kepala negara “masih menjadi perdebatan internal”, artinya belum ada sikap final tentang hal ini meski secara formal PKS sendiri tidak mempermasalahkan kepemimpinan perempuan (dalam kasus Megawati sebagai presiden). Artinya diakui memang dalam elemen internal PKS terdapat pihak yang setuju terhadap kepemimpinan perempuan sebagai presiden, tetapi juga ada yang masih menolak meski tidak secara formal kelembagaan.

Sementara itu, berkenaan dengan posisi perempuan sebagai kepala negara, ibu L mempunyai pandangan sebagai berikut:

Kita liat kompetensinya. Kalau kompetensinya memadai kenapa enggak? (bagi perempuan untuk jadi presiden). Sampai sekarang kalau presiden kita kelihatannya belum akan memberikan *endorse* pada perempuan. Kita masih belum pernah membahas itu secara detil. Laki-laki atau perempuan yang akan menjadi kita masih belum (membahas secara detil). Dan kita tidak pernah membahas itu secara lebih detil lagi. Dalam prinsipnya begini, mudharat yang lebih besar itu yang dihindari. Sampai sekarang kita tidak akan mengukung presiden perempuan karena memang belum ada yang memadai. Dalam hal itu, kita juga nggak berpikir sampai ke situ, masih harus punya kajian panjang. Biasanya yang melakukan kajian itu adalah Dewan Syariah. Saya nggak mau memikirkan satu orang yang akan jadi. Saya mau memikirkan ratusan juta orang yang justru haknya belum terpenuhi.⁵²

Ibu L mendukung pandangan yang memberikan hak kepemimpinan sebagai kepala negara kepada perempuan. Meski demikian, dia memberi catatan bahwa kompetensilah yang akan menentukan didukung tidaknya seorang perempuan menjadi kepala negara. Selain itu, meski dia memiliki pandangan positif terhadap hak perempuan menjadi kepala negara, tetapi sikapnya lebih lanjut akan ditentukan oleh sikap PKS yang secara formal belum pernah membahas masalah ini secara rinci.

Pandangan-pandangan ibu L terhadap hak politik perempuan ini banyak dipengaruhi oleh pergaulannya dengan para feminis, antara lain dengan kelompok Kaukus Perempuan Politik, Kaukus Perempuan Parlemen, dan dengan Puskapol

⁵⁰ *Ibid*

⁵¹ Wawancara dengan Al Muzzamil Yusuf di Gedung DPR RI 25 November 2006

⁵² *Ibid*

Ul. Dia juga banyak belajar dari kunjungannya ke partai-partai di luar negeri, antara lain ke Malaysia dan Australia. Karena itu ibu L mempunyai pandangan bahwa PKS masih harus banyak melakukan perbaikan agar bisa menjadi partai modern sepenuhnya.

Inti pendapat ibu L tentang hak politik perempuan adalah bahwa laki-laki dan perempuan itu keduanya harus berkontribusi dalam kehidupan politik. Baginya, kekuasaan adalah media untuk membangun dan untuk melakukan perbaikan secara terus menerus. Ibu L menolak semua bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan dia berpandangan bahwa perempuan mempunyai semua hak politik, termasuk menjadi kepala negara meski pada saat ini (tahun 2009) PKS belum memberikan dukungan kepada seorang perempuan menjadi presiden karena karena masalah kualitas.

c. Prinsip Politik Moderasi, Inklusivitas, Mengayomi

Ibu K menyatakan bahwa kekuasaan bukanlah arena saling menguasai, tetapi justru harus melindungi dan mengayomi. Hal ini terlihat dari pernyataannya⁵³ bahwa "saya melihat sepanjang kekuasaan itu memberi peraturan yang bijak, melindungi, mengayomi, memperbaiki, nggak ada masalah buat perempuan". Bagi ibu K kekuasaan harus bersifat memberi peraturan bijak, melindungi, mengayomi, memperbaiki, bukan menguasai, merusak atau mengabdikan kepada kepentingan sendiri.

Narasumber berikutnya, ibu S menyatakan bahwa PKS menganut prinsip persaudaraan antara laki-laki dan perempuan. Dia mengatakan:

Kalau dari ajarannya sendiri, Islam memberikan peluang yang sama. Ada hadits-hadits "perempuan itu saudara kandung laki-laki". Islam menekankan prinsip moderasi, inklusif, dan sangat mengakomodasi kepentingan perempuan. Perempuan adalah saudara kandung laki-laki.⁵⁴

Ibu S berpendapat bahwa Islam yang menjadi keyakinan dasar PKS meletakkan perempuan pada posisi setara dengan laki-laki. Islam itu moderat dan inklusif, tidak ekstrim dan eksklusif. Dengan demikian Islam tidak menghendaki hubungan-hubungan ekstrim antara laki-laki perempuan dimana laki-laki sepenuhnya adalah pemegang kekuasaan dan perempuan adalah kelompok yang dikuasai. Selain itu Islam juga tidak menghendaki eksklusivitas peran dimana laki-laki sepenuhnya berperan di ranah publik dan perempuan di ranah domestik, keduanya saling melengkapi dan bekerjasama seperti saudara kandung. Meski demikian, Sitaresmi mengakui bahwa konsep hubungan ideal laki-laki dan perempuan menurut Islam ini tidak selalu menjadi pandangan semua elemen dalam masyarakat Islam, bahkan dalam internal PKS sendiri. Dia menyatakan alasan bagi terjadinya hal ini, yaitu adanya nilai-nilai komunal yang mempengaruhi cara berpikir laki-laki tentang konsep hubungan ideal antara laki-laki dan perempuan menurut Islam. Dia menyatakan:

Tapi kemudian terpulang kepada *Islamic values*, kepada *group values*. Ada nilai-nilai komunal, nilai-nilai Islam itu sendiri. Nilai-nilai komunal ini yang kadang-kadang adalah karena selain pemahamannya juga

⁵³ Hasil wawancara dengan ibu K di Bandar Lampung, 27 Maret 2009

⁵⁴ Hasil wawancara tanggal dengan ibu S di Jakarta 25 Februari 2009

experience mereka. Jadi laki-laki di rumahnya, sosialisasi yang diterima itu mau tidak mau mempengaruhi.⁵⁵

Lebih jauh ibu S menyatakan bahwa PKS berusaha menjembatani perbedaan-perbedaan pandangan tentang peran laki-laki dan perempuan ini, yaitu pandangan-pandangan ekstrim dan eksklusif tadi agar lebih moderat dan inklusif. Menurutnya, “ya karena nyatanya juga masih berproses orang-orang di dalamnya itu”. Dengan demikian, pandangan moderat dan inklusif tentang perempuan masih sedang dalam taraf berproses, belum sepenuhnya diterima. Masih terdapat perbedaan cara pandang tersebut. Hal ini terlihat dari pernyataannya sebagai berikut:

Kalau pimpinan-pimpinanya sangat (memahami hak perempuan), tapi di *middle*, di menengah di bawah, di lapangan, tidak semuanya, masih ada pandangan (yang tidak mendukung perempuan). Di PKS itu sendiri latar belakang pendidikan agama mereka macam-macam, ada yang dari pesanteran atau apa, paradigma mereka tentang peran politik perempuan juga belum merata. Contohnya untuk kita bisa sebagai pembicara di depan kalangan laki-laki di dalam partai itu saja masih agak sulit dibanding ketika kita mungkin ke luar. Jadi masih berproses.⁵⁶

Berkenaan dengan pandangan tentang kekuasaan, ibu L menyatakan bahwa sistem yang dibangun di PKS (bahkan sejak PK) adalah sistem yang basisnya adalah bahwa setiap laki-laki dan perempuan itu keduanya harus sama-sama berkontribusi⁵⁷ (dalam kehidupan politik, khususnya di partai). Selanjutnya ibu L menyatakan sebagai bentuk apresiasi terhadap perempuan maka PKS memberikan kebebasan kepada perempuan untuk mengapresiasi pendapatnya kepada PKS. Dia menyatakan bahwa:

Kalau ada hal-hal yang tidak saya setuju dengan partai saya bisa dengan enak mengemukakan. Kemudian bisa diterima bisa enggak, laki-laki juga begitu, bisa diterima bisa tidak. Dan kalau ada hal-hal yang mengganjal bisa dengan mudah mengakses kepada Presiden partai atau ketua Majelis Syuro atau ke sejen. Dengan mudah kita memberikan masukan, relatif diakomodirlah⁵⁸

Selain itu, ibu L mengemukakan beberapa pandangan tentang kekuasaan yang hamper sama dengan pendapat ibu K, yaitu bahwa kekuasaan adalah media untuk membangun dan untuk memperbaiki. Karena itu meski tidak terpilih dalam pemilu, dia tidak pernah “mutung” (patah semangat). Kekuasaan adalah sebuah kesempatan “*learning process*” dimana dia bisa memberikan kontribusi tetapi juga dapat belajar darinya. Hal ini dinyatakannya dalam pernyataannya sebagai berikut:

Kita punya harapan, walaupun kita nggak jadi, kita tetap punya idealisme kita ingin membangun, memperbaiki, bukan akhirnya mutung. Dan saya pikir saya bukan yang *achievementnya* dalam bentuk posisi, tapi dalam

⁵⁵ *Ibid*

⁵⁶ Hasil wawancara dengan ibu S di Jakarta 25 Februari 2009

⁵⁷ Hasil wawancara dengan ibu L di Jakarta 27 Januari 2009

⁵⁸ *Ibid*

bentuk bagaimana saya bisa memberikan kontribusi. Saya berpikir saya berkontribusi lebih banyak di sini, saya bisa mengambil banyak pelajaran, saya juga bisa memberi pelajaran, begitu.⁵⁹

Keyakinan dirinya terhadap kemampuan dirinya untuk dapat memberikan kontribusi yang sama besarnya dengan laki-laki dalam partai berasal dari masa kecilnya yang dibesarkan dalam suasana yang memberikan perlakuan yang sama kepada anak laki-laki dan perempuan. Dia menyatakan:

Saya besar dalam lingkungan yang tidak terlalu membedakan laki-laki dan perempuan. Hal-hal seperti itu (rasa inferior atau superior dengan laki-laki) jarang muncul. Kecuali pada keadaan dimana saya memang tidak menguasai bahasan.⁶⁰

Karena dibesarkan dalam keluarga yang tidak terlalu membedakan anak laki-laki dan perempuan, maka tidak mengherankan bahwa dia mempunyai sensitifitas yang sangat tinggi terhadap ketidakadilan yang terjadi terhadap perempuan, sehingga menurut salah seorang narasumber, di kalangan PKS dia sering diberi label sebagai feminis. Dengan posisi dan kekuasaan yang dipegangnya di PKS dia menghendaki

Saya sedang memikirkan (dapat) berkontribusi dalam *scope* yang lebih luas lagi seperti dalam sebuah kelembagaan yang lintas partai, yang fokusnya lebih pada *upgrading political skill*, kalau Allah ijinkan saya nanti di sana, di dewan. *Voter education* untuk perempuan di *grass roots*, kita nggak mau menjerumuskan perempuan masuk tapi nggak punya *competence* akhirnya jadi menjatuhkan semua perempuan. Punya cita-cita PKS mesti terdepan dalam ukuran partai politik modern.⁶¹

d. Merubah Pandangan yang Belum Mendukung Hak Politik Perempuan

Menurut ibu S, segmen terbesar dalam PKS sudah menerima pandangan tentang hak perempuan dalam kehidupan politik. Segmen ini sudah meliputi sekitar 70% masyarakat internal PKS. Selain itu, semakin tinggi posisi seseorang dalam hirarkhi kekuasaan, apresiasi terhadap hak politik perempuan juga semakin baik. Meski demikian, apresiasi lebih lanjut terhadap hak politik perempuan ini belum dapat berjalan ideal karena yang menentukan lebih lanjut apakah perempuan akan mendapat porsi yang besar pada posisi kekuasaan di PKS adalah wilda-wilda, atau wilayah-wilayah daerah. Wilayah daerah adalah struktur kewenangan dalam PKS yang membawahi beberapa provinsi dalam satu wilayah yang sama, dengan demikian struktur kewenangan wilayah daerah lebih rendah dibanding pengurus pusat.

Mungkin sekitar 70%. Memang masih ada yang ini (tidak mendukung), tapi tidak terlalu dominan, karena mereka dibenturkan pada kenyataan-kenyataan, sangat tidak populer kalau kemudian partai masih seperti itu (tidak mendukung hak politik perempuan). Apalagi ada keputusan

⁵⁹ *Ibid*

⁶⁰ *Ibid*

⁶¹ *Ibid*

affirmative action 30% perempuan. Jadi itu mau tidak mau memaksa mereka semua untuk merubah paradigmanya. Menurut saya itu terus berproses. Ustad Hilmi luar biasa, Ustad Hidayat Nurwahid luar biasa, tapi yang menentukan tadi wilda-wilda.⁶²

Wilayah daerah yang berada pada struktur kewenangan lebih rendah dibanding Pengurus Pusat banyak dipengaruhi pandangan yang lebih tradisional dalam melihat hak politik perempuan. Hal ini sesuai dengan pandangan Lovenduski dan Noris⁶³, bahwa tingkat "akar rumput" dalam partai selalu memiliki resistensi lebih besar terhadap hak-hak politik perempuan. Menurut Muhajir Darwin tingkat akar rumput partai juga merupakan struktur sosial yang cenderung membenarkan hegemoni dan diskriminasi dari pihak yang dominan kepada ter subordinasi. Struktur sosial ini cenderung meletakkan laki-laki pada posisi dominan dan perempuan pada posisi subordinat karena didukung oleh nilai-nilai patriarkhis yang hidup di masyarakat.⁶⁴

Meski ibu S yakin bahwa PKS mendukung hak-hak politik perempuan, tetapi dia sadar bahwa dengan bersikap moderat dan inklusif, maka PKS mendapat pandangan kritis, terutama dari internal warga PKS sendiri yang kritis terhadap hak-hak politik perempuan, bahwa PKS telah bersikap "lembek", tidak "kental lagi", seperti dinyatakannya dalam wawancara bahwa:

Tapi sekali lagi itu nanti terpulang fatwanya karena banyak elemen-elemennya, meskipun sedikit di PKS, yang masih tidak siap dengan berbagai perubahan. PKS yang sekarang dianggapnya "lebih cair", kurang kental, ada pergeseran ideologi, padahal tidak. Ini nilai-nilai Islam yang sejatinya. Cuma justru kita sering terpengaruh hal-hal yang sifatnya ekstrim, itu yang selalu harus diperbaiki.⁶⁵

Dengan bersikap lebih akomodatif terhadap kepentingan politik perempuan maka PKS sebenarnya beresiko kehilangan dukungan dari pendukung-pendukung tradidionalnya, terutama yang masih dipengaruhi pandangan tradisional terhadap hak-hak politik perempuan. Dalam pandangan ibu S, kubu yang berpandangan tradisional ini terutama berasal dari tingkat akar rumput partai, termasuk perempuannya sendiri. Hal ini bahkan dapat dilihat oleh pihak di luar PKS sebagaimana terlihat dari pernyataan ibu S bahwa:

(Resistensi dari) Perempuan yang di bawah. Saya makanya rajin memberikan penyuluhan sampai ke bawah, untuk memberikan ke mereka *self confidence*. Saya dianggap partai yang paling peduli kepada perempuan Tapi Nursyahbani Katjasungkana pernah mengejek begini "cuma kalian aja yang di atas, di DPP, yang dibawah coba pandangannya ini *rigid*."⁶⁶

⁶² *Ibid*

⁶³ Joni Lovenduski dan Pippa Noris. *Loc cit*

⁶⁴ Muhajir Darwin dan Tukiran. 2001. *Menggugat Budaya Patriarkhi*. Yogyakarta: Ford Foundation dan Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gadjah Mada. Hal. 252.

⁶⁵ Hasil wawancara dengan ibu S di Jakarta 25 Februari 2009

⁶⁶ *Ibid*

Dilema PKS tentang hak politik perempuan ini berasal dari segmen internal PKS yang secara nyata masih banyak yang berparadigma lama. Hal ini dinyatakan oleh ibu S lebih lanjut sebagai berikut:

Ini lebih pada ketidaksiapan teman-teman yang sudah punya paradigma lama. Ketika bergabung masih membawa paradigma lama. Karena kalau sejak awal, secara konsep, PK atau PKS sendiri sudah bicara tentang peran politik perempuan. Cuma bergabungnya orang-orang ini ke dalam PKS membawa paradigma-paradigma lama. Justru kalau *genuin* dari Islam itu sangat akomodatif terhadap peran politik perempuan. *Culture-culture*, mungkin dari NU, atau dari Persis, atau yang paling keras dari salafi, masih membawa paradigma-paradigma lama yang kemudian menyebabkan terjadi proses interaksi nilai-nilai ke dalam PKS. Kita perlu kerja keras untuk membuktikan bahwa perempuan bisa signifikan perannya.⁶⁷

Ibu S berpendapat bahwa masih adanya resistensi terhadap peran politik perempuan di PKS adalah karena adanya sub-sub kelompok dalam PKS yang sewaktu bergabung dengan PKS masih membawa kultur asli tempat asal masing-masing seperti NU, Persis dan kelompok salafi. Menurut ibu S, sub kelompok dari salafilah yang paling keras resistensinya terhadap peran politik perempuan, dan paling minim peran politik perempuannya. Tetapi menurutnya sub-sub kelompok dan sub-sub kultur internal PKS ini sedang dipaksa situasi untuk menerima perubahan, untuk menjadi *up to date*.

e. **Jabatan adalah Pembebanan, Bukan Kemuliaan**

Salah satu pandangan tentang kekuasaan yang menjadi keyakinan perempuan PKS adalah bahwa jabatan politik bukanlah sebuah kemuliaan, tetapi pembebanan. Ucti misalnya menyatakan:

Ada konsep jabatan itu adalah *taklif*, bukan *tashrif*. pembebanan bukan kemuliaan. Makanya orang nggak mau dapat jabatan. Ada norma yang ditanamkan ke kita untuk tidak mengejar jabatan, tetapi bagi kita kesempatan untuk *fastabiqul khoirot*, berlomba-lomba untuk perolehan suara partai,

Buat saya sendiri, ini konteks keimanan saya, kalau itu sudah diputuskan sebagai hasil syuro oleh pimpinan saya maka saya tidak boleh berrkhiatan kecuali mengatakan *samaah wa thoah fiima akhaba al karih*, saya harus mendengar, saya harus mencoba taat betatapun sebetulnya saya punya kecenderungan pribadi saya tidak suka⁶⁸

Pembebanan tersebut diterima Ucti karena sudah diputuskan melalui syuro atau permusyawaratan Partai. Terhadap hasil permusyawaratan partai. Ucti tidak ingin berkhianat dengan menolak amanat untuk ikut proses pencalonan anggota DPR meski secara pribadi dia sebenarnya kurang senang. Lebih lanjut, Ucti menyatakan bahwa berkah tidaknya kekuasaan itu ditentukan oleh kekuatan syura, karena menurutnya:

⁶⁷ *Ibid*

⁶⁸ Hasil wawancara dengan Ucti di Jakarta 10 Maret 2009

Semua berawal dari keyakinan akan norma-norma Islam yang mengatakan kekuatan syuro, kekuatan bermusyawarah, adalah sebuah kekuatan yang menjadi penentu, menentukan berkah atau tidaknya perjalanan (kekuasaan)...⁶⁹

Karena itu ketertundukan kepada Majelis Syura merupakan keharusan bagi setiap warga PKS, termasuk perempuan. Meski demikian dia menyatakan lebih lanjut bahwa Majelis Syura bukanlah *superbody* yang dapat melakukan apapun sekendak hatinya sendiri. Majelis Syura adalah lembaga yang menentukan arah kebijakan yang akan dilaksanakan PKS.

Berkenaan dengan pertanyaan mengenai bagaimana pandangannya tentang cara pandang tradisional yang masih meletakkan peran domestik kepada perempuan dalam kaitannya dengan peran politik perempuan, Uchti⁷⁰ menyatakan bahwa dia mengkritik cara pandang seperti itu, dan menurutnya perempuan akan sulit menjalankan fungsi politik ketika peran-peran itu secara khusus dilekatkan kepada perempuan. Dia juga mengkritik mengenai masih adanya keengganan sebagian laki-laki di PKS untuk mendukung aktivitas politik perempuan, khususnya istri-istri mereka. Cara pandang dan sikap seperti ini menurutnya masih ada di PKS. Uchti menghendaki adanya perubahan cara berpikir demikian karena tanpa perubahan cara berpikir, tidak mungkin perempuan PKS akan sungguh-sungguh mendapatkan ekadilan politik dan dapat menjalankan peran politik secara maksimal.

f. Kekuasaan Bukan Sesuatu yang Asing untuk Perempuan

Bagi ibu KK, kekuasaan politik bukanlah sesuatu yang asing dan konsepsinya tentang kekuasaan sudah jelas. Menurut perempuan PKS lainnya pada umumnya masih belum memiliki konsep yang jelas tentang kekuasaan. Dia menyatakan:

Saya melihat perempuan PKS memaknakan politik bukan harus langsung terjun ke wilayah kekuasaan. Bahkan mereka menganggap kalau memaknakan politik langsung ke wilayah kekuasaan itu pemikiran yang diadopsi dari kapitalis. Ketika seorang insan sudah melaksanakan maksimal usahanya untuk kepentingan masyarakat, berarti dia sudah dakwah..berarti dia sudah bergerak di bidang politik. Yang lebih dominan di hati mereka adalah ketika seseorang sudah berbuat untuk kepentingan masyarakat, meskipun hanya dalam bentuk *pressure*, dia sudah berbuat untuk kepentingan politik.⁷¹

Dia beranggapan bahwa perempuan PKS mempunyai ambiguitas terhadap konsep politik. Politik tidak dimaknai sebagai hal yang berhubungan dengan kekuasaan. Politik adalah dakwah, melakukan tugas untuk masyarakat, melakukan *pressure* untuk kepentingan masyarakat. Mengaitkan politik secara langsung dengan kekuasaan adalah suatu yang tabu karena ide seperti itu adalah ide yang berakar pada kapitalisme. Karena itu politik bagi kebanyakan perempuan PKS adalah pengorbanan, bukan *power struggle*. Tentu konsepsi

⁶⁹ *Ibid*

⁷⁰ *Ibid*

⁷¹ *Ibid*

seperti itu sangat bagus untuk menciptakan kader militan yang mau berkorban untuk partai, tetapi ini bisa melemahkan semangat perjuangan ketika harus terjadi persaingan kekuasaan dalam pemilu, baik persaingan internal (dalam partai) maupun eksternal (dengan politisi partai lain)

Membandingkan berbagai pandangan narasumber tentang kekuasaan, dapat dijelaskan di sini bahwa meski para narasumber berasal dari partai yang sama yang dikenal dengan disiplin partai yang tinggi, terdapat pandangan yang bervariasi tentang makna tersebut bagi mereka. Berikut adalah tabel untuk membandingkan perbedaan pandangan para perempuan narasumber tentang hak politik bagi perempuan di PKS.

Tabel 3.1
Perspektif Perempuan PKS tentang Hak Politik Perempuan

Perspektif Netral Gender	Perspektif Keberagaman
Kesetaraan misi: menyelesaikan masalah kemasyarakatan	Politik adalah dakwah dan mencari cinta Allah
Posisi dalam struktur kekuasaan	Perempuan memiliki semua hak politik
Marginalisasi dan diskriminasi terhadap perempuan di PKS	Prinsip moderasi, inklusivitas, mengayomi
Politik sebagai media dakwah	Merubah pandangan yang belum mendukung hak politik perempuan
Politik sebagai kepatuhan kepada Partai	Jabatan adalah beban, bukan kemuliaan
Posisi kepala negara bukan untuk perempuan	Kekuasaan bukan sesuatu yang asing untuk perempuan

Pandangan narasumber tentang kekuasaan politik memiliki beberapa kesamaan, tetapi juga terdapat banyak perbedaan, bahkan ada yang bertentangan. Hal ini mengkonfirmasi tesis Moya Lloyd bahwa perempuan adalah subyek dalam proses. Terdapat kelompok yang menginginkan netralitas gender dalam kehidupan politik, terdapat kelompok yang menginginkan keberagaman gender dalam kehidupan politik. Menggunakan terminologi Sartori, diantara kelompok perempuan PKS terdapat faksi-faksi atau klik-klik⁷² yang mendukung hegemoni laki-laki dengan mengadopsi cara pandang yang sama dengan para elit PKS tentang sudah tidak adanya cara pandang dan sikap diskriminatif di PKS, menolak kuota, tidak mengakui hak perempuan menjadi kepala negara, tidak menghendaki sikap kritis terhadap partai dan elit partai. Sebaliknya, terdapat kelompok perempuan PKS yang mewacanakan kekuasaan yang inklusif dan moderat, menginginkan cara pandang dan sikap laki-laki yang lebih menghargai perempuan, menghendaki penerjemahan kembali identitas perempuan sehingga tidak secara khusus dilekati peran-peran domestik, mengakui hak perempuan atas semua jabatan politik, menolak diskriminasi dalam semua bentuk. Menggunakan

⁷² Giovanni Sartori. *Op. cit.* hal. 71-105

terminologi Michael Kenny⁷³ kedua kubu ini sedang memperjuangkan identitas sub kelompok yang berbeda, yang satu menginginkan netralitas gender dalam kekuasaan, yang lain menginginkan keragaman dalam kekuasaan.

Secara lebih rinci, perbedaan pandangan antara dua kubu tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. *Perbedaan mendasar* adalah pandangan menyangkut bagaimana sebenarnya makna keberadaan perempuan dalam hubungan kekuasaan di PKS. Ibu Y, ibu H, ibu A, dan ibu HH melihat bahwa perempuan merupakan partner setara laki-laki di PKS. Mereka tidak melihat adanya diskriminasi terhadap perempuan di PKS, tidak melihat adanya pandangan yang merendahkan atau tidak menganggap perempuan sebagai partner setara laki-laki. Fakta sedikitnya perempuan dalam struktur kepengurusan PKS tingkat Pusat, fakta sangat sedikitnya jumlah perempuan sebagai anggota DPR dari PKS dilihat semata sebagai akibat belum banyaknya perempuan yang memenuhi kualifikasi untuk menduduki jabatan-jabatan tersebut. Fakta mengelompoknya perempuan PKS pada Bidang Kewanitaan dilihat sebagai hal yang justru menguntungkan karena banyak perempuan yang mengurus masalah perempuan, bukan sebagai fakta yang mengungkung perempuan pada satu bidang saja sehingga sulit untuk menapak karir politik di PKS pada bidang lain. Jika perempuan PKS berada pada bidang lain umumnya hanya menjadi staf, dan hal ini tidak dilihat sebagai diskriminasi, tetapi semata karena belum banyak perempuan yang memiliki kualifikasi untuk menduduki posisi strategis pada bidang-bidang tersebut. Mereka tidak melihatnya sebagai sebuah fenomena yang memang didasari pandangan yang menganggap perempuan sebagai "aktor yang tidak kompeten", atau selalu meragukan kemampuan perempuan sehingga perempuan selalu dilihat sebagai aktor yang tidak mampu memegang jabatan politik

Kubu kedua (ibu L, ibu S, ibu K, ibu KK, Ucti) melihat masih adanya resistensi terhadap hak politik perempuan, khususnya dari organisasi PKS pada tingkat yang lebih rendah dan pada akar rumput partai. Mereka melihat bahwa hal ini tidak akan selesai dengan sekedar memberikan berbagai pelatihan kepada perempuan agar memiliki keterampilan berpolitik yang lebih baik

Perbedaan kedua diantara mereka adalah dalam melihat apakah kekuasaan itu merupakan hak atau justru menjadi beban bagi perempuan. Konsep yang muncul mengenai hal ini sangat beragam. Yang pertama kekuasaan adalah hak yang harus diperjuangkan. Yang lain melihat kekuasaan semata sebagai keputusan syura yang harus. Pandangan kebalikan dari pendapat pertama yang menyatakan bahwa menjadi calon anggota DPR adalah "beban berat" yang harus dipikul.

Perbedaan ketiga adalah menyangkut pandangan terhadap perjuangan perempuan untuk dapat meningkatkan keterwakilan politik melalui upaya *affirmative action* dalam undang-undang pemilu, yaitu dengan adanya ketentuan bagi partai untuk mencalonkan sedikitnya 30% perempuan dalam pencalonan anggota DPR. Para "feminis" di PKS upaya tersebut merupakan keharusan karena tanpa itu perempuan PKS akan sangat sulit meningkatkan keterwakilan politik di DPR. Tetapi pandangan kebalikan hal ini memalukan karena membuat perempuan "meminta-minta" untuk dicalonkan menjadi anggota DPR.

⁷³ Michael Kenny. *Op. cit.* hal 43-63

Perbedaan pandangan berikutnya adalah menyangkut hal yang tidak terkait langsung dengan proses pencalonan anggota DPR, yaitu menyangkut hak perempuan untuk menduduki posisi kepala negara. Kelompok pertama menyatakan bahwa hal itu bukanlah masalah. Perempuan boleh menduduki posisi kepala negara, tetapi dilarang menduduki posisi khilafah yang diterjemahkan sebagai pemerintahan dari banyak negara. Sementara kelompok kedua menyatakan bahwa karena perempuan mempunyai banyak halangan, maka meski posisi perempuan sebagai kepala negara masih ”*debatable*”, sebaiknya perempuan berada di belakang layar saja. Perempuan perlu menjadi kepala negara jika memang tidak ada laki-laki yang mampu menjadi kepala negara.

Meski memiliki perbedaan prinsip dalam pandangan tentang kekuasaan, sebagai kader partai yang sama, kedua kubu juga mengadopsi beberapa cara pandang yang sama. *Kesamaan yang utama* adalah cara pandang mereka yang melihat kekuasaan politik sebagai sarana dakwah. Tidak terdapat narasumber yang tidak mengaitkan kekuasaan politik dengan kegiatan dakwah. Para narasumber *juga* mempunyai pendapat yang sama bahwa kekuasaan adalah amanah Allah yang harus dijaga dan dijadikan sarana mencari cinta atau ridlo Allah. Bahasa spesifik yang dipergunakan untuk itu adalah ”mencari tiket ke surga”. *Selain itu* mereka juga mempunyai pandangan yang sama bahwa PKS secara formal telah mengadopsi pandangan yang memberikan apresiasi tinggi terhadap keberadaan perempuan PKS dalam dunia politik. *Mereka juga* memiliki pandangan yang sama bahwa para pemimpin tertinggi partai menunjukkan pandangan yang menghargai peran politik perempuan PKS, mendukung keberadaan perempuan dalam dunia politik dan menghargai partisipasi politik perempuan. Para narasumber *juga* bersepakat bahwa *PKS menghendaki moderasi* atau prinsip nen ekstrim dalam partisipasi politik perempuan. Perempuan bebas berpartisipasi politik tetapi tetap dalam bingkai atau batas-batas tertentu, yaitu moralitas yang baik. Mereka *juga* sependapat bahwa PKS menegakkan prinsip *tawadlunits atau keseimbangan* bagi peran politik perempuan sehingga peran politik perempuan tidak membawa mudlarat, khususnya bagi keluarga. Untuk itu PKS tidak mengendaki suami istri sama aktif berpolitik dalam waktu yang bersamaan, khususnya jika aktivitas tersebut menyita waktu dan perhatian intensif. Menurut mereka ini dilakukan agar keluarga sebagai fondasi masyarakat tetap bisa stabil dan berfungsi dengan baik.

Dua teori feminisme⁷⁴ dapat dipergunakan untuk menganalisis pandangan perempuan PKS tentang kekuasaan. Teori pertama adalah feminisme radikal yang menyatakan bahwa patriarki adalah dogma seragam yang ditandai dengan supremasi laki-laki atas perempuan. Yang kedua feminisme post strukturalis yang melihat bahwa patriarki bukanlah dogma seragam karena hubungan laki-laki dan perempuan yang membentuk struktur patriarkhis bukanlah hubungan yang seragam, melainkan dinamis dan berubah dari satu individu ke individu lainnya. Moya Lloyd⁷⁵ adalah salah satu feminis post strukturalis yang mengadopsi pandangan demikian dengan membangun teorinya tentang “Subyek dalam proses”. Konsep ini dikembangkannya untuk menunjukkan bahwa kemampuan perempuan menjadikan dirinya sebagai subyek dalam hubungan dengan laki-laki bukanlah fenomena seragam, tetapi fenomena yang berbeda dari

⁷⁴ Vicky Randal. *Op. Cit.* hal. 5-15

⁷⁵ Moya Lloyd. *Op. Cit.* hal 2-7

satu orang ke orang lainnya. Dalam diri individu perempuan sendiri kemampuan ini juga berubah menurut waktu dan konteks kejadian. Secara ringkas dia menyatakan bahwa femininitas sebagai karakter yang menandai pengalaman hubungan perempuan dengan laki-laki berubah menurut waktu dan kejadian.

Berbagai data yang ditampilkan pada bab ini menunjukkan bahwa keseluruhan perempuan nara sumber mempunyai beberapa pandangan yang sama tentang makna kekuasaan, tetapi juga mengadopsi berbagai pandangan yang berbeda untuk mengenai hal ini. Berbagai pandangan yang sama itu antara *bahwa* kekuasaan politik merupakan sarana dakwah, *bahwa* kekuasaan adalah amanah Allah yang harus dijaga dan dijadikan sarana mencari cinta atau ridlo Allah, *bahwa* PKS secara formal telah mengadopsi pandangan yang memberikan apresiasi tinggi terhadap keberadaan perempuan PKS dalam dunia politik, *bahwa* para pemimpin tertinggi partai menunjukkan pandangan yang menghargai peran politik perempuan PKS, mendukung keberadaan perempuan dalam dunia politik dan menghargai partisipasi politik perempuan. Para narasumber juga bersepakat *bahwa* PKS menghendaki moderasi atau prinsip non ekstrim dalam partisipasi politik perempuan (yaitu perempuan bebas berpartisipasi politik tetapi tetap dalam bingkai atau batas-batas tertentu, yaitu moralitas yang baik), *bahwa* PKS menegakkan prinsip *tawadlunitas* atau keseimbangan bagi peran politik perempuan sehingga peran politik perempuan tidak membawa mudlarat bagi dirinya maupun keluarganya.

Kesamaan pandangan para narasumber tentang kelima hal ini tidak dapat dikategorikan sebagai pandangan yang menunjukkan bahwa para narasumber mempunyai pandangan patriarkhis yang sama. Alasannya adalah bahwa empat dari lima pandangan para nara sumber menyangkut hal yang lebih berdimensi individual, yaitu kekuasaan sebagai sarana dakwah, kekuasaan sebagai sarana ibadah dan mencari cinta Allah, bahwa PKS menegakkan prinsip moderasi dan tawadlunitas sebagai prasyarat partisipasi perempuan dalam dunia politik. Hanya satu pandangan yang sama yang berdimensi non individual yaitu pandangan bahwa PKS telah mengadopsi prinsip yang menghargai peran politik perempuan (versus laki-laki tentunya). Patriarkhi menyangkut hubungan kekuasaan (antara perempuan dan laki-laki) karena itu bukan menyangkut hal yang bermakna individual. Ekspresi yang intinya menyatakan "saya ingin berdakwah, saya ingin beribadah dan memperoleh cinta Allah, PKS menerapkan prinsi moderasi (antara kungkungan total dan kebebasan total), dan tawadlunitas (keseimbangan antara peran domestik dan peran publik bagi perempuan)" adalah ekspresi menyangkut hal-hal yang bersifat individual.

Sementara itu perbedaan pandangan para narasumber adalah menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan pengalaman patriarkhis. Dikatakan demikian karena perbedaan pandangan tersebut menyangkut hal-hal yang berkenaan dengan pengalaman perempuan narasumber dalam berhubungan kekuasaan dengan laki-laki. Data hasil penelitian menunjukkan bahwa para narasumber berpendapat berbeda tentang makna keberadaan perempuan dalam hubungan kekuasaan di PKS. Sebagian narasumber menyatakan pendapat yang kurang lebih bermakna "perempuan adalah partner setara laki-laki di PKS", "tidak ada diskriminasi (gender) di PKS". Sementara itu sebagian besar narasumber menyatakan hal yang merupakan kebalikan yang bermakna kurang lebih "masih ada kelompok-kelompok dalam PKS yang belum menerima perempuan sebagai partner laki-laki

dalam kehidupan politik”, ”awal-awal dulu saya bahkan dilarang berkampanye di panggung” (oleh para pengurus partai di tingkat bawah), ”saya mah dengan bapak seperti bumi dengan langit”, ”masih ada resistensi pada tingkat organisasi yang lebih rendah dan pada tingkat akar rumput”, ”perempuan PKS masih tabu mengaitkan partisipasi dengan kekuasaan karena bicara kekuasaan adalah ide kapitalisme”. Selain itu perempuan narasumber berbeda pendapat mengenai apakah kekuasaan itu merupakan hak (yang harus diperjuangkan oleh perempuan vis a vis laki-laki) atau justru menjadi beban bagi perempuan. Konsep yang muncul mengenai hal ini sangat beragam, dan beberapa yang penting adalah yang dikemukakan narasumber-narasumber berikut. Meski menyatakan bahwa kekuasaan bukanlah ambisi pribadi, tetapi Yoyoh Yusroh melihat kekuasaan sebagai hak yang harus diperjuangkan. Mereka juga berbeda pendapat tentang *affirmative action* dalam undang-undang pemilu, satu pihak memaknainya sebagai meminta-meminta hak (kepada laki-laki) sedang pihak lainnya menganggap sebagai upaya yang semestinya diambil untuk mengejar ketertinggalan perempuan dari laki-laki dalam ranah politik. Para nara sumber juga berbeda pendapat tentang hak perempuan untuk menduduki posisi kepala negara. Ada yang menerima sepenuhnya dan ada yang menganggapnya tidak perlu selama masih ada laki-laki yang dapat memegang jabatan tersebut.

Jelas terdapat variasi tajam dalam pandangan narasumber tentang hubungan perempuan dengan laki-laki dalam berbagai aspek kekuasaan politik di PKS. Hal ini mengkonfirmasi ide Judith Squires dan Moya Lloyd tentang post strukturalisme yang menandai hubungan perempuan dengan laki-laki dalam kekuasaan politik. Perempuan PKS yang tidak mempunyai atau hampir tidak mempunyai pengalaman diskriminatif dalam kehidupan politik di PKS (khususnya dalam proses pencalonan anggota DPR periode 2009-2014) mempunyai pandangan positif terhadap PKS dengan menyatakan bahwa tidak ada pandangan diskriminatif dalam PKS, merasa bahwa perwakilan perempuan di PKS yang masih rendah bukan masalah. Dalam bahasa kelompok feminis radikal, perempuan demikian menjadi ”*male identified*” atau mengidentifikasi diri dengan laki-laki, pandangan-pandangannya menjadi sangat mirip dengan laki-laki (yang cenderung menganggap bahwa ketertinggalan perempuan dari laki-laki bukan karena diskriminasi, bukan karena pandangan dan sikap patriarkhis, tetapi lebih karena ”kesalahan perempuan sendiri” karena tidak mampu meningkatkan kualitas seperti laki-laki).

Menariknya data menunjukkan bahwa kecenderungan ”*male identified*”) ini lebih kelihatan pada perempuan narasumber yang latar belakangnya adalah *hubaro* atau ahli dengan keahlian dari tarbiyah dan keagamaan dengan profesi sebagai ustadzah. Sementara itu perempuan narasumber dari kalangan ”*hubaro*” (ahli/pakar) yang berlatar belakang pendidikan dan profesi lainnya (psikologi, komunikasi, kebijakan kesehatan masyarakat serta dosen) mempunyai pandangan yang berbeda; mereka melihat masih adanya kultur diskriminatif dan patriarkhis pada sebagian unsur organisasi PKS. Dua orang dari 4 (empat) orang yang cenderung ”*male identified*” ini terpilih dalam pemilu 2009, sementara hanya 1 (satu) dari 5 (lima) orang dari kalangan ”*hubaro*” yang terpilih dalam pemilu 2009 tersebut. Tentu terpilih tidaknya calon dalam pemilu 2009 tidak hanya dipengaruhi oleh pandangan individu calon, tetapi juga faktor lain misalnya jumlah pemilih PKS pada daerah tersebut yang menyebabkan daerah tersebut

menjadi daerah "kantong PKS" atau bukan. Meski demikian karena pemilu 2009 sudah mengadopsi prinsip semi distrik, maka preferensi individual calon sangat berpengaruh pada terpilih tidaknya calon tersebut. Maka selain fenomena "*male identified*" lebih kelihatan pada narasumber dari kalangan ustadzah, kalangan ustadzahlah yang lebih banyak terpilih pada pemilu 2009. Satu calon dari kalangan "*hubaro*" terpilih karena dia adalah Ketua Bidang Kewanitaan DPP PKS (sehingga tentu saja sangat populer di kalangan perempuan pemilih PKS) dan dicalonkan pada daerah kantong PKS (Kota Bandung, Jawa Barat). Fakta ini menunjukkan bahwa konstituen PKS lebih menyukai tipe calon yang lebih "tradisional" dalam melihat hubungan kekuasaan antara perempuan dengan laki-laki.

PERAN PEREMPUAN PKS DALAM PROSES PENCALONAN ANGGOTA DPR

Peran perempuan PKS dalam proses pencalonan anggota DPR bukan semata-mata peran untuk memperjuangkan diri agar ditempatkan dalam daerah pemilihan dan daftar calon, tetapi adalah perjuangan perempuan memperoleh hak politik yang setara dengan laki-laki dalam dunia politik perwakilan. Perwakilan politik yang merupakan representasi sistem politik demokratis tidak bisa dilaksanakan semata dengan prinsip "perwakilan ide", tetapi membutuhkan kehadiran semua kelompok, khususnya kelompok yang selama ini tersingkir atau tidak terwakili dalam lembaga perwakilan. Hal ini dikemukakan oleh Anne Philips dalam pernyataannya bahwa berbagai argumen tentang demokrasi yang ada pada saat ini tentang demokrasi berkisar pada debat tentang tuntutan kebutuhan kehadiran politik: tuntutan tentang kesetaraan perwakilan politik perempuan dengan laki-laki; tuntutan tentang inklusi politik kelompok-kelompok yang selama ini termarginalkan atau tersumbat aspirasinya atau dengan sengaja disingkirkan dari perwakilan politik. Pertanyaannya adalah seputar masalah pemisahan antara "siapa" dan "apa", mengenai siapa yang mewakili dan apa yang perlu diwakili, dan subordinasi "siapa" terhadap "apa" perlu dipertanyakan kembali. Politik ide digugat oleh alternatif tentang *the politics of presence* (politik kehadiran), yaitu dibutuhkannya orang dengan kesamaan pandangan untuk mewakili.¹

Berbeda dengan pandangan demokrasi liberal yang menganggap perbedaan dalam demokrasi semata adalah masalah perbedaan ide,² Anne Philips berpendapat bahwa kelompok-kelompok yang termarginalisasi dan tersingkir dari lembaga perwakilan perlu hadir di dalamnya karena menurutnya orang bisa saja berharap untuk diwakili oleh orang yang bijaksana atau lebih mampu dibanding kita sendiri, tetapi ketika kita dihadapkan pada pilihan antara orang yang kompeten atau orang yang memiliki pandangan hidup yang sama dengan kita, tentu kita akan lebih percaya dengan orang yang mempunyai pandangan yang sama dengan kita.³ Lebih lanjut Anne Philips menyatakan bahwa hanya orang yang memiliki kesamaan pandangan dengan kitalah yang benar-benar dapat kita percayai untuk mewakili kepentingan kita, bukan orang yang lebih berkompeten atau berkualitas. Jika harus memilih antara kompetensi dan kualitas dengan kesamaan pandangan, maka kesamaan pandanganlah yang lebih penting untuk perwakilan politik perempuan. Karena itu perlu ada perempuan yang mewakili kepentingan perempuan karena perempuanlah yang memiliki kesamaan pandangan dan kepentingan dengan perempuan lainnya.

Tulisan ini dibangun atas tesis Moya Lloyd yang pada intinya menolak pendapat bahwa identitas atau sifat, atau karakter merupakan penyebab peristiwa politik. Lloyd berpendapat bahwa bukan sifat, karakter atau identitas diri perempuanlah yang membuat perempuan tidak mampu menjalankan peran politik, tetapi peristiwa di luar diri perempuanlah yang menyebabkan perempuan

¹ Anne Philips. 1995. *The Politics of Presence*. Oxford: Oxford University Press. Hal. 5

² *Ibid.* Hal. 1.

³ *Ibid.* Hal 1.

mempunyai karakter sebagai individu yang lemah dalam kehidupan politik. Lloyd menunjukkan bahwa identitas politik adalah akibat dari peristiwa politik. Teori ini sebenarnya sudah dikemukakan dalam bagian lebih awal, tapi dikemukakan kembali di sini untuk menggambarkan bahwa menurut Lloyd ide bahwa identitas mempengaruhi kemampuan politik adalah tidak benar karena dalam konteks perempuan, identitas diri perempuan justru merupakan produk atau diakibatkan oleh peristiwa politik yang terjadi di lingkungannya. Dia juga menyatakan bahwa proses terbentuknya identitas diri perempuan sebagai akibat peristiwa yang terjadi di lingkungannya tersebut terjadi melalui proses internalisasi secara sangat alamiah sehingga terlihat seperti merupakan sifat alamiah.⁴

Dalam pandangan Lloyd, identitas politik bukanlah merupakan kondisi yang mengakibatkan terjadinya peristiwa politik, tetapi peristiwa politiklah yang membentuk identitas politik. Dengan kata lain, menurut Moya Lloyd, polarisasi pandangan para perempuan PKS terhadap kekuasaan politik seperti digambarkan pada bab sebelumnya bukanlah faktor yang menjadi penyebab mereka bisa menjadi aktor politik yang kompeten atau bukan, tetapi polarisasi pandangan itu merupakan akibat peristiwa politik yang terjadi, baik di PKS maupun di luar PKS. Lebih lanjut Moya Lloyd menyatakan bahwa terbentuknya identitas politik memerlukan proses pembiasaan sehingga terlihat bahwa identitas politik merupakan sifat alamiah yang melekat yang mengakibatkan terjadinya peristiwa politik. Selain itu menurut Lloyd politisasi identitas politik dibutuhkan agar sebuah kelompok dapat mengajukan tuntutan politik. Dengan kata lain, bukti adanya politisasi identitas perempuan dalam kehidupan politik di PKSlah yang kemudian dapat menjadi dasar tuntutan perempuan PKS untuk keadilan politik dalam proses pencalonan anggota DPR. Bab ini merupakan analisis bagaimana proses politisasi identitas politik perempuan (yang pada umumnya memberikan label atau *stereotyping* perempuan sebagai subyek yang tidak kompeten dalam dunia politik) baik oleh laki-laki maupun oleh perempuan di kepengurusan Pusat PKS berpengaruh terhadap proses pencalonan anggota DPR yang telah terjadi. Bab ini lebih lanjut menggambarkan bagaimana perempuan melakukan upaya-upaya untuk menunjukkan diri sebagai subyek yang kompeten dalam kehidupan politik atau bagaimana perempuan berupaya membentuk identitas politik yang baru.

Sebelum dibahas lebih lanjut tentang bagaimana peristiwa politik yang terjadi mempengaruhi identitas politik yang kemudian terbentuk, perlu diklarifikasi lebih lanjut apa yang dimaksud dengan identitas dan politik identitas dalam penelitian ini. Michael Kenny menyebutkan bahwa politik identitas merefleksikan perubahan dari pengelompokan politik atas dasar ideologi atau kepentingan individual ke arah sebuah budaya dimana warganegara mengelompok atas dasar tanda-tanda yang dimiliki secara bersama oleh kelompok tersebut, dengan personalitas kolektif dan budaya mereka sendiri.⁵ Terdapat tiga kata kunci dalam pendapat Kenny tentang politik identitas ini, yaitu pengelompokan atas dasar kesamaan tanda-tanda yang mudah dikenali, adanya personalitas kolektif, dan adanya budaya khas kelompok.

⁴ Moya Lloyd, 2005. *Beyond Identity Politics*. London: Sage Publication. Hal. 14.

⁵ Terjemahan dari versi asli dalam bahasa Inggris dalam Michael Kenny, 2004. *The Politics of Identity*. Cambridge: Polity Press. Hal 1.

Kenny melanjutkan bahwa kemunculan politik identitas yang memperjuangkan kepentingan politik sekelompok orang dengan ciri identitas tertentu dilatarbelakangi oleh adanya kenyataan tidak dianggap pentingnya atau disembunyikannya atau ditekannya identitas kolektif tertentu, baik oleh kultur politik liberal yang dominan maupun agenda politik lainnya.⁶ Karena itu perjuangan politik identitas menurut Hoover telah memberikan kepada individu-individu hubungan atau keterkaitan dengan proyek-proyek politik berdasar unsur-unsur yang bersifat dasar bagi konsepsi pribadi individu tersebut. Anggota-anggota kelompok-kelompok ini melihat diri mereka memiliki sifat-sifat penting tertentu yang sama yang memisahkan mereka dari kelompok atau populasi yang lebih besar, sebuah kesamaan atas dasar perbedaan dengan kelompok yang lebih besar.⁷

Kenny menyatakan bahwa perjuangan politik identitas adalah respon terhadap upaya penyampingan, atau penekanan terhadap kepentingan dan ideologi kelompok minoritas dengan sifat atau karakter tertentu yang tidak sama dengan mayoritas. Berkenaan dengan pendapat Michael Kenny ini, perlu diulang kembali dalam hal ini apa yang diyakini Moya Lloyd tentang debat para feminis tentang hubungan antara identitas politik perempuan dan peristiwa politik yang melatarbelakanginya. Lloyd menyatakan bahwa pihak-pihak yang saling berlawanan yang berdebat tentang masalah ini dapat dikategorikan atas dasar apakah mereka melihat identitas sebagai basis peristiwa politik ataukah peristiwa politiklah yang menjadi terjadinya identitas politik. Lloyd mengemukakan argumen bahwa dikotomi seperti itu memperkuat satu sisi pandang dan meniadakan sudut pandang yang lain dan menafikan hubungan dinamis anatar keduanya. Menurutnya hubungan antara dua hal itu tidaklah bersifat saling meniadakan atau saling berlawanan; tetapi sebuah ketegangan dan permainan yang sulit dan tidak nyaman prosesnya.⁸

Kaitan erat antara upaya represi atau penekanan terhadap kelompok dengan karakter tertentu dengan munculnya *identity based politics* (politik berdasar identitas tertentu) juga dikemukakan oleh Anne Philips untuk mendukung argumennya tentang perlunya *the Politics of Presence* seperti dinyatakan bahwa tuntutan tentang *the politics of presence* yang terjadi pada masa akhir-akhir ini seringkali muncul dari perjuangan politik sebuah gerakan sosial baru yang bersumber pada kondisi ketidakadilan yang bukan masalah kelas sosial. Gerakan ini merupakan gerakan yang bukan berarti perempuan ingin merubah jenis kelamin atau warga kulit berwarna ingin merubah warna kulit mereka agar mereka memperoleh status kewarganegaraan yang setara dengan laki-laki. Perjuangan perempuan dan masyarakat kulit berwarna adalah bagian dari kesadaran yang muncul sebagai akibat dari perjuangan hak sipil dan perjuangan gerakan perempuan yang terjadi pada periode 1960-an dan 1970-an.⁹

Studi ini menjadikan proses pencalonan anggota DPR sebagai arena kontestasi perjuangan identitas politik perempuan PKS. Menggunakan reformulasi teori subyek-dalam-prosesnya Moya Lloyd, lima nilai atau aspek

⁶ *Op. cit.* hal 3.

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid*

⁹ *Op. cit.* Hal. 8

perlu dianalisis untuk melihat gambaran perubahan-perubahan dinamis yang terjadi pada perempuan PKS, yaitu gambaran tentang *the multiple subject* (atau subyek yang terus berubah dilihat dari berbagai peran yang pernah dilakukan oleh para perempuan PKS calon anggota DPR), *the subject of lack* (dilihat dari berbagai kelemahan dan hambatan mereka dalam proses pencalonan anggota DPR), *the deferred subject* (dilihat dari ciri-ciri yang ingin ditumbuhkan oleh para perempuan PKS agar menjadi subyek politik yang kompeten), *the constituted subject* (dilihat dari tindakan para perempuan narasumber sebagai aparat partai), dan *the performative subject* (dilihat dari kemampuan perempuan PKS menciptakan citra diri melalui pengaruh mereka terhadap pencalonan mereka menjadi anggota DPR). Untuk kepentingan analisis secara sistimatis, bab ini secara khusus merupakan analisis atas gambaran perempuan PKS sebagai subyek dalam proses dilihat dari dimensi *the multiple subject*, *the constituted subject*, dan *the performative subject*.

Perempuan PKS Sebagai *the Multiple Subject* (Subyek Jamak)

Dalam teori Lloyd tentang subyek-dalam proses atau *the subject-in-process*, konsepsi *the multiple subject* dimaksudkannya sebagai sebuah konsep yang menunjukkan bahwa sebagai seorang individu sikap dan tindakan perempuan sebagai refleksi identitas dirinya adalah jamak atau bermacam-macam dan merupakan akibat dari banyak faktor. Hal ini seperti dikatakan Lloyd seperti telah dijelaskan pada Bab 1 bahwa semua subyek merupakan hasil dari dan berada dalam beberapa sumbu atau aksis. Subyek selalu berada dalam kondisi berubah. Subyek yang demikian tidak pernah bersifat tetap, tetapi identitasnya selalu terbuka terhadap proses artikulasi ulang.¹⁰

Untuk menggambarkan perempuan PKS sebagai individu jamak dalam proses pencalonan anggota DPR periode 2009-2014, digambarkan berbagai latar belakang dan peran yang pernah dilakukan untuk menjadi politisi PKS, khususnya menjadi pengurus PKS. Untuk itu kepada para narasumber ditanyakan latar belakang diri mereka sampai mereka menjadi politisi PKS pada saat ini (saat penelitian ini dilakukan). Kepada mereka juga ditanyakan peran-peran yang telah dilakukan dalam posisi sebagai politisi PKS dari masa awal keterlibatan mereka di PKS sampai dengan saat ini. Hal ini penting diketahui untuk memperoleh gambaran berbagai peran politik yang pernah dilakukan oleh perempuan PKS sebagai refleksi mereka sebagai subyek jamak. Gambaran berikut menunjukkan bahwa perempuan PKS mempunyai berbagai peran politik yang tidak selalu menunjukkan kesamaan peran, bahkan terdapat peran yang saling bertentangan

Peran-Peran Tradisional

Narasumber pertama, ibu A, menggambarkan dirinya sebagai orang yang sudah mempunyai pengalaman berliku di PKS. Dia mengartikulasikan dirinya sebagai orang yang sudah mempunyai banyak pengalaman sehingga terpilih menjadi anggota MPP dan Majelis Syura, seperti pernyataannya:

¹⁰ Moya Lloyd. 2005. *Beyond identity politics*. London: Sage Publications. Hal. 15.

Kalau persoalannya kenapa baru sedikit yang di Majelis Syuro, karena partai kita termasuk partai yang masih muda, masih baru, jadi otomatis mereka melihatnya siapa yang kiprahnya sudah lama.¹¹

Sebelum menjadi anggota MPP di PKS selama 2 (dua) periode, ibu A pernah menjabat posisi penting di Departemen Kaderisasi Bidang Kewanitaan Partai Keadilan. Dia juga menjadi anggota Majelis Syura Pusat PKS, menjadi anggota DPR dari Partai Keadilan selama satu periode (meski hanya menduduki posisinya selama sebulan melalui mekanisme Penggantian Antar Waktu) dan menjadi anggota DPR dari PKS untuk periode 2004-2009. Dia kembali dicalonkan menjadi anggota DPR periode 2009-2014 dan tidak terpilih. Dia mengatakan:

Saya menjadi anggota Majelis Pertimbangan Partai sudah dua periode. Sebelumnya saya di bidang kewanitaan, di ketua bidang kaderisasi kader perempuan ketika Partai Keadilan. Ketika Partai Keadilan Sejahtera saya jadi staf di Majelis Pertimbangan Partai, sampai sekarang. Saya ikut Pemira, tahun 1999 saya diajukan untuk caleg dari Kabupaten/Kota Cirebon dan Indramayu, waktu masih Partai Keadilan. Dulu di Jakarta Selatan Barat itu nomor satu doktor Hidayat, nomor dua saya. Sebelumnya sebenarnya suami saya, tapi suami saya mengundurkan diri karena nggak mungkin dua-duanya maju.¹²

Sementara itu dia menggambarkan dirinya sebagai orang yang mempunyai keahlian di bidang pendidikan keagamaan.

Saya keahliannya pendidikan keagamaan. terus misalnya bu W dari FISIP dan Komunikasi. Jadi semua dilihat dari latar belakang pendidikan dan kiprahnya selama ini. Kalau kiprah kita semua sama, dakwah, kalau nggak dosen, atara dua itu..¹³

Informasi ibu A menunjukkan bahwa dia telah dan sedang menjalani banyak peran di PKS. Semua peran yang telah dan sedang dijalannya saat ini membentuk identitas dirinya saat ini. Dalam konsep "mobile subject"nya Lloyd, perempuan sebagai subyek yang terus bergerak ibarat seorang nomaden yang tidak betah berada pada satu tempat. Dia selalu berada dalam kondisi berpindah dan menolak kestabilan identitas yang tetap dan pasti.¹⁴ Untuk bisa berpindah berbagai peran politik yang sudah dijalannya, ibu A menyatakan bahwa dia harus memenuhi berbagai persyaratan, yaitu:

Pertama masalah kompetensi yang mencakup kompetensi terpadu, dari masalah moralnya, intelektualnya, juga dari sisi praktek di lapangannya. Di sini kita menyiapkan orang-orang untuk terjun langsung di masyarakat tapi punya bekal-bekal moral yang bagus, kemampuan intelektual yang juga memadai. Kalau misalnya mereka bisa memenuhi hal itu sekaligus dengan pengalaman yang dapat dibuktikan secara nyata di lapangan, itu

¹¹ Hasil wawancara dengan ibu A di Jakarta 26 April 2009

¹² *Ibid*

¹³ *Ibid*.

¹⁴ Moya Lloyd. *Op. cit* hal. 17

akan lebih mudah lagi untuk tumbuh lebih cepat tanpa perlu *diupgrade*, dipaksa oleh program.¹⁵

Tiga persyaratan yang harus dipenuhi perempuan untuk dapat mudah melaksanakan berbagai peran politik adalah moral, intelektual dan pengalaman. Menggunakan bahasa ibu A, perempuan yang dapat membuktikan diri memiliki 3 kapasitas tersebut tanpa input program partailah yang akan dengan mudah mendapat berbagai peran politik, di partai maupun di masyarakat. Meski demikian ibu A tidak dapat menjelaskan lebih lanjut bagaimana implementasi ketiga persyaratan tersebut dipergunakan oleh partai untuk melakukan promosi bagi perempuan untuk berbagai peran politik di partai dan di masyarakat. Sewaktu ditanya komentarnya tentang fenomena bahwa berbagai persyaratan promosi jabatan yang terdapat dalam AD ART PKS memberatkan perempuan, antara lain persyaratan moralitas, intelektualitas dan pengalaman, dan upaya *affirmative action* apa yang dapat dilakukannya sebagai anggota MPP, ibu A mengatakan:

Panduannya, sistimnya itu sudah baku. Artinya sudah tidak bisa dirubah-ubah. Sehingga sekarang kita justru mendorong kaum perempuan agar bisa cepat merespon panduan yang ada sehingga dia bisa lebih cepat berkembang.¹⁶

Hal ini menunjukkan bahwa meski sudah menduduki berbagai posisi politik dalam partai dan di luar partai, sudah menyatakan diri mempunyai kapasitas moral, intelektual dan pengalaman yang memadai, ibu A belum dapat menterjemahkan segmen kepentingan perempuan apa yang diwakilinya. Identitas yang diinginkannya adalah justru "menjadi sama dengan laki-laki" karena dia menyatakan bahwa "sistim sudah baku, nggak bisa dirubah-rubah", artinya syarat-syarat tersebut diberlakukan sama untuk laki-laki dan perempuan tanpa melihat bahwa perempuan berbeda dari laki-laki sehingga meski kriteria sama, tetapi metode pengukurannya semestinya berbeda karena pengalaman hidup dan kepentingan perempuan dengan kekuasaan sungguh berbeda dari laki-laki. Selain itu, jika pernyataannya dibalik, maka logikanya adalah karena pada saat ini identitas perempuan masih terlihat "masih kurang moralnya, kurang intelektualitasnya, dan kurang pengalamannya", jadi tidak ada ruang bagi perempuan lain untuk menduduki berbagai peran seperti dirinya. Cara pandang ibu A menunjukkan bahwa dia adalah figur yang buta *gender* atau *gender blind*.¹⁷

Berbagai persyaratan yang diminta agar perempuan dapat memperoleh akses terhadap hak politik menunjukkan bahwa perjuangan *affirmative action* untuk representasi politik perempuan menghadapi "mitologi prestasi kerja" atau *the myth of merit*.¹⁸ Bagi Young, penerapan prinsip *merit* atau dalam kasus PKS

¹⁵ Hasil wawancara dengan ibu A di Jakarta 26 April 2009

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ Dalam buku tulisan Tim Pemberdayaan Perempuan Bidang Agama Departemen Agama RI tahun 2001 yang berjudul *Keadilan dan Kesetaraan Gender (Perspektif Islam)* disebutkan bahwa buta gender berarti adalah tidak adanya pemahaman dan kesadaran dalam diri seseorang bahwa gender adalah factor cultural yang mempengaruhi pilihan-pilihan hidup yang tersedia baginya dalam masyarakat. Ia selalu menganggap diskriminasi sebagai suatu takdir.

¹⁸ Iris Marion Young. 1990. *Justice and the Politics of Difference*. New Jersey: Princeton University Press. Hal 192.

seperti diinformasikan ibu A adalah adanya "panduannya, sistimnya itu baku", yaitu harus memenuhi kualitas moral, intelektual dan pengalaman justru bertentangan dengan tujuan menciptakan kesetaraan antara perempuan dengan laki-laki. Bagi Young:

*Equality, defined as the participation and inclusion of all groups in institutions and positions, is sometimes better served by differential treatment. This argument shifts the context for discussing the justice of affirmative action policies that favor member of oppresed or disadvantaged groups.*¹⁹

Jelas di sini bahwa argumen ibu A merupakan kebalikan dari argumen Young. Young menyatakan bahwa kesetaraan perempuan terhadap laki-laki justru akan tercapai kalau ada perbedaan perlakuan dengan lebih memprioritaskan dan menguntungkan kelompok yang tertekan atau kelompok tidak beruntung. Jika prinsip perlakuan sama diterapkan baik terhadap kelompok dominan maupun kelompok minoritas atau kelompok tidak beruntung, maka kesetaraan tidak akan pernah tercapai.

Jika perjuangan perempuan dengan kekuasaan politik adalah "memberi identitas feminin terhadap kekuasaan" seperti kesimpulan studi *Inter-Parliamentary Union* (IPU) tahun 2000²⁰, maka sulit dibayangkan identitas feminin kekuasaan seperti apa yang dapat dipahami dan diperjuangkan oleh ibu A. Dogma "*collective identity*" sebagai prasyarat perjuangan politik yang syah menurut teori politik liberal²¹ memang telah ditolak oleh kelompok feminis post-strukturalis. Tetapi perjuangan identitas feminin adalah agenda terbesar kalangan perempuan karena tanpa hal tersebut akan sangat sulit terjadi perubahan kebijakan politik dan tindakan-tindakan politik dari partai. Jika moralitas adalah ukuran utama yang dikehendaki oleh PKS, maka moralitas perlu diterjemahkan kembali dengan ukuran-ukuran yang lebih adil dari perspektif gender, antara lain dengan kriteria kesetiaan, kesabaran, ketabahan menghadapi tekanan, mengalah, melayani. Semua karakter ini merupakan atribut feminin dari kekuasaan. Jika intelektualitas yang menjadi ukuran, sangat banyak perempuan yang sudah mampu mengenyam pendidikan tinggi. Jika pengalaman yang dibutuhkan, maka pengalaman perempuan menyusun prioritas anggaran rumah tangga yang terbatas untuk memenuhi semua kebutuhan hidup keluarga serta menjalaninya secara disiplin dalam pengelolaan keuangan sehari-hari perlu diberi ruang dalam praktek pengelolaan partai dan negara.

Seperti ibu A, ibu Y juga menunjukkan diri sebagai kader perempuan PKS yang mempunyai pengalaman politik cukup banyak tetapi tanpa kesadaran

¹⁹ *Op. cit.* Hal 195.

²⁰ Studi IPU tahun 2000 yang berhasil mengumpulkan jawaban dari 187 responden perempuan anggota parlemen dari 65 negara yang disurvei menghasilkan kesimpulan bahwa kehadiran perempuan di parlemen berhasil memperbaiki berbagai hal yaitu merubah praktek dan perilaku politik, memperluas dan memperkaya proses politik, menjadikan politik lebih responsive terhadap kebutuhan masyarakat, respon yang lebih baik terhadap kebutuhan perempuan,, menghasilkan langkah menuju keadilan gender yang sesungguhnya, menghasilkan demokrasi yang lebih baik, meningkatkan transparansi dan memperbaiki tata pemerintahan, pendekatan politik yang lebih manusiawi dan tanpa konflik, keyakinan yang lebih terhadap politik dari warga masyarakat, serta adanya perubahan bahasa dan sikap dalam kehidupan parlemen.

²¹ Michael Kenny, 2004. *The Politics of Identity*. Cambridge: Politiy Press. hal. 23

tentang perlunya perjuangan untuk perempuan lain. Pengalaman politik ibu YYh lebih panjang dan lebih kaya dari ibu A. Dia sudah menjadi anggota DPR sejak masa keanggotaan 1999-2004 melalui Partai Keadilan (dia menjadi anggota DPR melalui mekanisme PAW untuk periode 14 bulan), menjadi anggota DPR 2004-2009 dan kembali terpilih untuk masa keanggotaan 2009-2014. Dia termasuk pendiri Partai Keadilan dan Ketua Departemen Wanita yang pertama.

Ibu YY dibesarkan dalam lingkungan yang sangat kuat berpegang pada nilai yang diakuinya sebagai nilai Islam yang hakiki. Menjadi ustadzah sejak masa kecil mengikuti jejak ayahnya, membuatnya banyak berhubungan dan mendapat dukungan dari berbagai kelompok Majelis Taklim. Sebagai Ketua Departemen Wanita pertama di Partai Keadilan yang merupakan cikal bakal Partai Keadilan Sejahtera, Yoyoh Yusroh menjadi *role model* atau pola anutan kader perempuan PKS. Dia adalah Wakil Ketua Komisi 8 DPR dan merasa mempunyai pengaruh terhadap banyak kebijakan Komisi 8. Dia sering mendapat penugasan penting dari partai termasuk mewakili partai dalam seminar di luar negeri, melakukan pembinaan terhadap kader, khususnya kader perempuan agar mereka dapat memahami sepenuhnya filosofi dan ajaran PKS agar serta tidak menyimpang dari nilai akhlak yang dijunjung tinggi di PKS. Hal ini terlihat dari pernyataan Yoyoh Yusroh berikut:

Saya menikmati, mengikuti sejarah perkembangan PKS dari awal, karena dulu saya ketua kewanitaan pertama di PK. Saya salah satu pendiri dan ketua wanita pertama, ketua departemen wanita.. Saya anggota Majelis Syuro, dipilih oleh pemilihan raya internal. Saya memang lahir dari majlis taklim. Dari kecil saya biasa berceramah. Dari SD saya sudah dibiasakan ayah saya berceramah ke berbagai tempat. Jadi sekarang jaringan majlis taklim itu luar biasa.

Mungkin PKS satu-satunya partai yang sangat memperhatikan pendidikan agama kader. Itu yang disebut tarbiyah.. Jadi kita selalu dididik setiap pekan untuk mendapatkan wawasan keagamaan. Di PKS itu ada komitmen-komitmen pribadi terhadap.. pribadi sebagai seorang muslim atau muslimah, yang merupakan azas Islam. Jadi Islamlah yang mengajarkan kita *tawadlu*, mengikuti cara nabi dalam berpikir, dalam beribadah. Karena PKS sebagai partai Islam, Islam sebagai landasan, kita berupaya untuk mengarahkan seluruh kadernya memahami tarbiyah Islamiyah, pendidikan Islam, setiap pekan kita ikut dalam tambahan wawasan keagamaan.²²

Sebagai orang yang ikut mendirikan partai, Yoyoh Yusroh mempunyai ketaatan yang sangat tinggi terhadap partai. Meski demikian, terlihat bahwa Yoyoh Yusroh tidak membedakan pengertian partai dengan pejabat partai. Dia menyatakan:

Kalau saya tipe yang taat pada aturan partai. Komitmen saya terhadap partai itu tinggi karena saya merasa nyaman di partai itu. Jadi apapun, misalnya kalau selama partai membutuhkan saya, saya siap. Sampai hari tua seperti apa, komitmen saya terhadap partai insya Allah tidak akan berubah. Kalau misalnya saya dianggap cukup untuk menjadi penasihat di

²² Hasil wawancara dengan Yoyoh Yusroh di Tangerang 4 April 2009..

partai, tidak perlu lagi aktif turun ke bawah, saya siap.. Walaupun saya harus turun ke bawah lagi untuk sosialisasi, saya siap. Jadi tidak ada target pribadi.²³

Konsep *dynamic role* sebagai esensi subyek yang terus berubah memang ditunjukkan Yoyoh Yusroh. Dia sebagai produk dari berbagai latar belakang diri dan apa yang dilakukannya sebelumnya telah melakukan berbagai peran dan siap melakukan peran apapun yang dikehendaki partai. Dia menunjukkan identitas diri yang dapat memerankan berbagai peran dan melakukan perubahan-perubahan diri untuk berbagai peran yang dijalani di partai maupun dalam masyarakat. Meski demikian terlihat bahwa identitas dirinya yang sudah terbentuk dengan sangat kuat oleh latar belakang dirinya sebagai ustadzah membuatnya tidak mampu melihat perbedaan dan perubahan yang terjadi dalam perjuangan politik perempuan. Pengalaman hidupnya dari kecil yang telah membuat dirinya dapat tumbuh menjadi aktor politik yang efektif membuatnya tidak dapat melihat sisi lain tentang pengalaman diskriminatif yang dialami perempuan lain. Hal ini terlihat dari pernyataannya bahwa:

Kalau saya lihat para pejabat partai dari awal berdirinya partai tidak pernah memarginalkan perempuan. Ketika Majelis Syuro, ketika mendirikan partai, misalnya, kita 50 orang, lima perempuan. Alhamdulillah, selama ini Majelis Syuro sangat terbuka, sangat akomodatif terhadap aspirasi anggotanya, baik pria maupun wanita. Artinya tidak ada diskriminasi dalam memberikan kesempatan berbicara kepada anggota. Alhamdulillah, selama ini kami bebas-bebas saja untuk mengeluarkan pendapat dalam berbagai hal, baik kita menanggapi atau mengusulkan. Bagi kami sangat akomodatif pimpinan Majelis Syuro itu untuk menerima aspirasi kami. Kalau menurut saya sepuluh orang itu juga cukup mewakili karena kalau kami di PKS tidak hanya memperjuangkan aspirasi perempuan, tapi aspirasi semua. Artinya kita bebas berbicara berbagai hal.²⁴

Selama ada perempuan yang duduk di Majelis Syura, selama perempuan diberi kesempatan bicara di Majelis Syura, itu sudah cukup bagi Yoyoh Yusroh. Dia tidak melihat apakah kebebasan berbicara bagi perempuan tersebut benar-benar mempunyai pengaruh signifikan terhadap hal-hal prinsip seperti mempersoalkan posisi Ketua Majelis Syura, Presiden partai, Ketua Dewan Syariah, Ketua Majelis Pertimbangan Pusat, Ketua-Ketua Bidang, dan Ketua-Ketua Departemen. Meski dirinya adalah Wakil Ketua Komisi 8 DPR, dia juga tidak mempersoalkan prinsip non-diskriminasi dalam rekomendasi-rekomendasi PKS (khususnya rekomendasi DPTP sebagai lembaga yang memiliki wewenang untuk mengeluarkan rekomendasi seperti itu) untuk pengisian jabatan-jabatan politik di luar partai, seperti menjadi kepala daerah (tingkat kabupaten/kota maupun provinsi) dan menjadi menteri. Dia bahkan mereduksi prinsip non-diskriminasi menjadi sekedar pemenuhan 10% keterwakilan perempuan di Majelis Syura. Yoyoh Yusroh bahkan mereduksi pencapaian politik perempuan PKS menjadi sekedar pencapaian dirinya dengan dua temannya di DPR seperti pernyataannya

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*

sewaktu diminta memberi penilaian terhadap apa yang sudah dicapai perempuan PKS dalam dunia politik. Dia menyatakan:

Untuk sekarang ini mungkin 8,5 (nilai yang sudah dicapai perempuan dari rentang nilai 1 – 10) karena kalau saya berikan nilai tujuh sudah banyak prestasi yang diberikan. Bu Nursanita untuk di legislatif, di BURT, sudah banyak yang dilakukan. Bu Aan Rohana di anggaran. Saya sebagai wakil ketua komisi 8 banyak juga kebijakan-kebijakan yang saya terlibat di dalamnya.. Itu di lembaga negara. Sementara di partai sendiri kita selalu terlibat.²⁵

Baik Aan Rochana maupun Yoyoh Yusroh keduanya adalah individu-individu yang buta gender atau *gender blind* yang tidak mampu melihat fakta bahwa di luar diri mereka mayoritas perempuan masih mengalami subordinasi dan marginalisasi sehingga tidak dapat menikmati hak-hak politik mereka. Bagi keduanya, ketidakmampuan perempuan mencapai hak politik adalah karena kekurangan perempuan sendiri yaitu ketidakmampuan memenuhi kualifikasi yang diminta, tentunya oleh partai dan lebih khusus lagi pejabat partai yang tentunya laki-laki, bukan persoalan adanya struktur dan kultur opresif. Aan Rochana dan Yoyoh Yusroh mengadopsi pandangan Aristototle yang menyatakan "*The female is a female by virtue of a certain lack of qualities...we should regard the female nature as afflicted, with a natural defectiveness.*"²⁶ Dengan selalu mengacu kepada prasyarat formal partai dan ketidakmampuan perempuan memenuhi berbagai persyaratan tersebut keduanya sebenarnya bersikap dan bertindak bahwa apapun persyaratan yang ditentukan pejabat partai yang tentunya laki-laki itulah yang benar. Hal ini seperti dinyatakan Simone de Beauvoir bahwa:

*A man would never get the notion of writing a book in the peculiar situation of the human male. But if I wish to define myself, I must first of all say "I am a woman".....A man is in the right in being a man, it is the woman who is in the wrong.*²⁷

Perempuan selalu dilihat sebagai pihak yang salah. Perempuan adalah makhluk dengan kekurangan. Menjadi laki-laki berarti menjadi selalu benar sedang menjadi perempuan berarti selalu menjadi salah. Simone de Beauvoir menanyakan mengapa perempuan tidak mempersoalkan otoritas laki-laki. Dia mengemukakan teorinya bahwa perempuan sebagai *the Other* diletakkan pada posisi sebagai *the Other* oleh laki-laki sebagai *the One* pada saat dia mendefiniskan dirinya sebagai *the One*. Dengan demikian, perempuan tidak pernah dapat menterjemahkan siapa dirinya sendiri tanpa mengambil referensi atas pendapat laki-laki tentang dirinya sendiri. Inilah esens teori de Beauvoir tentang perempuan sebagai *the Second Sex*.²⁸

Lebih lanjut, pernyataan Yoyoh Yusroh bahwa sepuluh orang perempuan cukup mewakili keseluruhan perempuan PKS berlawanan dengan pernyataan salah satu narasumber, Ucti, yang menyatakan bahwa jumlah sepuluh orang

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Simone de Beauvoir, Introduction from the *Second Sex*. *Dalam Feminist Theory, A Philosophical Anthology on Anthology*. Blackwell Publishing. Hal. 28-29.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*

perempuan di Majelis Syura tidaklah memadai karena membuatnya merasa terasing, dan jika ada salah satu yang berhalangan akan sangat mempengaruhi suasana karena perempuan menjadi sangats edikit. Hal ini dinyatakan Uchti dalam pernyataannya berikut:

Kadang-kadang masih ada kesungkahan. Jadi pada saatnya memungkinkan, jumlahnya harus ditambah. Karena kita juga mau ngomong menjadi seperti terasing. Sepuluh (orang), kalau ada satu dua berhalangan jadi semakin sedikit di antara sekian banyak anggota Majelis Syura yang laki-laki.²⁹

Yoyoh Yusroh menyatakan bahwa dirinya adalah pribadi yang kritis. Pribadi kritis adalah karakter subyek yang terus berubah dalam arti hanya orang yang kritis dan dapat merubah diri secara terus menerus berdasarkan perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungannya yang dapat memberi kontribusi terhadap peningkatan status perempuan. Tetapi ternyata yang dimaksudkannya sebagai bersikap kritis adalah sekedar upayanya agar kader, khususnya kader perempuan, tidak menyimpang dari akhlak. Hal ini terlihat dari pernyataannya berikut:

Saya pikir orang yang taat beribadah bukan berarti tidak kritis. Justru kita sangat kritis terutama saat partai kita sudah menyimpang dari tujuan yang sesungguhnya. Selama masih tetap dalam koridor, kita semua taat. Selama ini kenyataannya partai kita masih berjalan dalam rel. Saya sendiri termasuk yang bisa galak sekali. Kalau masalah aqidah alhamdulillah selama ini kita bisa dikatakan masih mengikuti koridor. Kalau akhlak misalnya kalau teman berbicara yang agak kasar, saya akan menegur, atau misalnya dalam bermuamallah.³⁰

Yoyoh Yusroh bahkan tidak melihat ambiguitas sikap PKS terhadap kader perempuan mampu mengenali diskriminasi yang dihadapi kader perempuan PKS yang tidak mendapatkan promosi apapun atas semua prestasi yang telah mereka raih. Dia membuat berbagai pernyataan yang menunjukkan bahwa perempuan PKS telah bekerja sangat keras membesarkan partai, melakukan *direct selling*, merekrut kader tanpa mengharapkan imbalan, bahkan mengorbankan hak berkaitan dengan fungsi reproduksi, misalnya hak mengambil cuti melahirkan.

Kita tidak pernah ketinggalan. Dari sisi pengajiannya, kader perempuannya luar biasa pertumbuhannya. Kita sama memulai perjuangan untuk partai. Di mesjid-mesjid dulu juga karena aktivis masjid itu bukan hanya laki-laki, perempuan juga, jadi kita selalu bekerjasama.

Pulang malam, saya tidak pernah minta dispensasi untuk pulang lebih awal. Bahkan pernah juga anak usia sebulan, saya, atas perintah partai, seminar di Libanon

PKS tidak pernah menyuruh cuti, kita juga tidak minta cuti. Sikap itu dari diri kita sendiri. Kalau kita merasa sakit kita tidak segan-segan minta ijin. Tapi kalau kita sehat tidak boleh pura-pura sakit. Saya kira yang paling

²⁹ Hasil wawancara dengan Uchti di Jakarta 10 Maret 2009.

³⁰ Hasil wawancara dengan ibu YY di Tangerang 4 April 2009.

mengetahui kondisi seseorang itu dia sendiri, baik kondisi kejiwaan atau kondisi fisiknya.³¹

Yoyoh Yusroh juga tidak mempermasalahkan ketidakpedulian partai terhadap prestasi perempuan sebagai kader politik yang kompeten sehingga tidak mempermasalahkan sedikitnya perempuan yang dipromosikan pada posisi menguntungkan pada pemilu. Dia hanya menyatakan bahwa partai sudah meningkatkan jumlah perempuan yang dicalonkan pada pemilu 2009 dan bahkan melewati angka 30 sebagaimana pernyataannya berikut:

Kader-kader perempuan PKS itu intelek, mereka juga bisa bermasyarakat, melek politik, berani untuk menyuarakan aspirasi. Saya pikir perpaduan itu semua. Ketika saya ke daerah, saya berdialog dengan kader-kader perempuan, apa mereka mendapat apresiasi atau tidak dari peran-peran yang dilakukan selama ini, ternyata tidak masalah. Peluang dari struktur ada, tapi dari kader perempuannya yang malu-malu berperan aktif. Ini yang selalu saya *push* pada mereka, kalau berbicara hak jangan malu Artinya kalau hak kita, harus kita ambil. Hak itu boleh diambil boleh tidak, tapi kalau kita anggap itu penting, harus kita ambil.³²

Yoyoh Yusroh bahkan menyalahkan perempuan atas sikap malu-malu yang mereka tunjukkan untuk mengambil hak politik, untuk mengambil hak yang dianggap penting. Dia lupa bahwa sosialisasi yang diterima kader perempuan selama ini adalah sosialisasi tentang keutamaan sikap tunduk, patuh, tawadlu atas semua perintah partai. Mayoritas perempuan tidak mendapat sosialisasi untuk berbicara di depan publik seperti dirinya, tidak mendapat sosialisasi untuk mengambil inisiatif-inisiatif, tetapi menunggu apa yang diperbolehkan oleh partai kepada mereka. Sosialisasi yang diterima perempuan adalah berkorban, bukan menuntut hak seperti dinyatakan oleh beberapa narasumber seperti telah dikemukakan dalam bab III tentang konsep *sama'ah wa thoa* atau saya mendengar dan saya patuh/taat.

Pendapat Yoyoh Yusroh berikut menunjukkan bahwa baginya partai sudah cukup memberikan kesempatan peran politik kepada perempuan dengan memberikan posisi Ketua Bidang Kewanitaan. Selain itu juga memberikan kesempatan menjadi staf di berbagai bidang lain atau melakukan *hearing* atau *musytasar* untuk lembaga tinggi lain yang tidak ada perempuan. Pernyataan-pernyataannya berikut menunjukkan hal tersebut:

Memberikan sarana berupa bidang. Jadi salah satu ketua PKS itu adalah perempuan. Struktur ke bawah juga mengikuti itu. Kalau DPW ada deputi, kalau DPD sampai Depera itu ada seksi kewanitaan. Ini kan sarana untuk mereka. Jadi di situlah perempuan bisa mengapresiasi dirinya, mengekspresikan dirinya, aktualisasi dirinya di lembaga. Jadi kita memberikan berbagai sarana kepada perempuan

Kalau kebijakannya kader perempuan tidak harus di departemen perempuan. Di *mix*, tergantung kemampuannya. Kalau dia misalnya sarjana politik ada juga yang di kebijakan publik. Kalau misalnya ada lembaga tinggi yang..perempuan tidak ada di situ, nanti ada *hearing*,

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*

istilah kita itu *musytasar*, sebelum diputuskan, dipanggil, akhwat didengarkan dulu, dari bidang kewanitaan. Misalnya Dewan Syariah, memutuskan sesuatu membutuhkan kita, kita juga diminta *hearing*. Saya di DPR misalnya membuat keputusan tentang UU Pornografi, yang berkaitan dengan pasal-pasal krusial saya juga minta masukan Dewan Syariah. Jadi akses selalu terbuka. Misalnya saya membuat UU penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, *draft*nya juga saya sampaikan kepada pimpinan-pimpinan lembaga di PKS.³³

Berbagai informasi Yoyoh Yusroh tentang siapa dirinya menunjukkan bahwa dia tidak melakukan persentuhan budaya dengan kelompok perempuan Islam reformis yang memperjuangkan kesetaraan gender dalam berbagai aspek kehidupan. Jika perempuan dari kalangan Islam reformis menginginkan kesetaraan gender di semua aspek kehidupan,³⁴ baginya arena politik tidak lain adalah perluasan arena rumah tangga dengan sedikit modifikasi pada siapa perempuan harus taat. Kalau di rumah tangga perempuan taat kepada suami, maka di partai perempuan taat kepada para pemimpin yang mayoritas laki-laki. Dalam hal karakter subyek yang terus berubah, maka meski Yoyoh Yusroh sudah melakukan berbagai peran politik, tetapi dia tidak dapat diharapkan melakukan "penjelajahan budaya" menentang budaya patriarkhis. Dalam bahasa Muhajir Darwin, apa yang diyakini, menjadi sikap dan tindakan Yoyoh Yusroh merupakan pengejawantahan wacana hegemoni, bukan wacana kesetaraan. Hal ini seperti terlihat pada pernyataan Muhajir Darwin bahwa pada saat ini, perjuangan ke arah kesetaraan *gender* tidak hanya dilakukan oleh kaum perempuan feminis, tetapi banyak pula didukung oleh kaum laki-laki pro-feminis. Perjuangan ini memang bukanlah merupakan perang antara perempuan dengan laki-laki, tetapi perbenturan wacana antara wacana hegemoni dan wacana kesetaraan. Tidak semua laki-laki berpihak pada wacana hegemoni, seperti juga tidak semua perempuan berpihak pada wacana kesetaraan. Dengan begitu, obyek perlawanan di sini bukanlah laki-laki, tetapi kultur patriarkhi yang secara umum telah terkonstruksi baik pada diri laki-laki maupun perempuan.³⁵

Sikap dan tindakan Yoyoh Yusroh yang menjadi bagian wacana hegemoni bertentangan dengan prinsip PKS yang menurut Herlini Amran PKS menginginkan moderasi peran politik perempuan. Dalam bab III telah dijelaskan bahwa moderasi dimaksudkan sebagai sebuah konsep yang merujuk pada kondisi bahwa perempuan dapat berperan dalam semua aspek kehidupan, termasuk politik, dengan batasan-batasan tertentu. Batasan-batasan yang merupakan rambu-rambu peran politik perempuan terdapat dalam Bayan Dewan Syari'ah Pusat Nomor 19/B/K/DSP-PKS/1429 tentang Aktivitas Dakwah dan Politik Muslimah sama sekali tidak membatasi perempuan dari semua jabatan politik yang ada, baik di partai maupun dalam negara. Jika Yoyoh Yusroh meyakini Bayan dan menjadikannya pedoman dalam berbagai peran politik yang diembannya, sebagai mantan Ketua Bidang Kewanitaan yang mempunyai mandat

³³ Hasil wawancara dengan Herlini Amran di Jakarta 26 April 2009.

³⁴ Siti Musdah Mulia dan Marzani Anwar, 2001. *Keadilan dan Kesetaraan Gender (Perspektif Islam)*. Jakarta: Tim Pemberdayaan Perempuan Bidang Agama Departemen Agama RI.

³⁵ Muhajir Darwin dan Tukiran, 2001. *Menggugat Budaya Patriarkhi*. Universitas Gadjah Mada: Pusat Penelitian Kependudukan. Hal: 252

meningkatkan peran perempuan PKS dalam dakwah dan politik, sudah semestinya dia melihat ambiguitas partai dalam melihat peran politik perempuan PKS dan menjadikannya mandat perjuangan, bukan justru menjadi bagian dari wacana hegemoni.

Kecenderungan peran politik perempuan PKS yang tidak sejalan dengan perjuangan kesetaraan gender terlihat dari apa yang dilakukan oleh Herlini Amran sebagai wakil perempuan PKS di DSP. Herlini Amran aktif berperan dalam proses terbentuknya Bayan Dewan Syari'ah Pusat Nomor 19/B/K/DSP-PKS/1429 tentang Aktivitas Dakwah dan Politik Muslimah. Bayan atau rambu-rambu peran perempuan dalam dakwah dan politik adalah sebuah pedoman tentang bagaimana perempuan PKS harus berperan dalam dakwah dan politik. Tetapi alih-alih menjadi sebuah pedoman bagaimana perempuan dapat efektif dalam kedua aktivitas tersebut, Bayan justru memberikan rambu-rambu yang membatasi gerak perempuan. Memang dalam Mukaddimah disebutkan ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits yang menjadi landasan filosofis tentang posisi perempuan sebagai makhluk mulia, tetapi isi bayan justru tidak menunjukkan bagaimana kemuliaan itu harus diekspresikan. *Pertama*, bayan menegaskan laki-laki sebagai pemimpin bagi perempuan dalam rumah tangga. Penegasan ini ditunjukkan dengan cetakan dokumen Bayan dalam bentuk *bold* untuk kata-kata "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan" dalam terjemahan Surat An-Nissa ayat 34, sedang terjemahan sisanya dalam cetak biasa tanpa penegasan. Bayan tidak memberi pedoman bagaimana implementasi diktum ini dalam dunia publik, apakah laki-laki juga pemimpin bagi perempuan di dunia publik. Dengan sengaja tidak memberikan pedoman dalam hal ini, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa PKS menghendaki kepemimpinan laki-laki atas perempuan tidak hanya di ranah domestik, tetapi juga publik. *Kedua*, bayan berisi pedoman-pedoman tentang keharusan istri memperoleh ijin suami untuk aktivitas dakwah dan politik yang dilakukannya. *Ketiga*, ketentuan untuk saling tolong antara suami istri dalam kebajikan dan taqwa. *Keempat*, adanya ketentuan bahwa struktur partai harus memberitahukan dan meminta dukungan bagi aktivitas istri kepada suami jika suami adalah kader inti partai, dan ketentuan bahwa struktur partai harus meminta ijin suami bagi aktivitas dakwah bagi istri jika suaminya belum kader inti partai.

Dengan berperan aktif dalam proses terbentuknya Bayan ini, Herlini Amran sedang menjalankan peran kekuasaan yang justru akan menghambat perjuangan perempuan memperkuat identitas dirinya. Meski tidak secara langsung melakukan upaya atau tindakan yang membatasi perempuan untuk menjadi subyek yang setara laki-laki, tetapi upayanya justru menjadi bagian yang mendukung posisi pemegang kekuasaan dalam konflik laten antara pemegang kekuasaan (dalam hal ini para pemimpin PKS) dengan pihak yang dipinggirkan kekuasaan (dalam hal ini mayoritas perempuan PKS). Hal ini sesuai dengan pendapat Steven Lukes yang menyatakan:

*Conflict maybe neither overt nor covert, but latent: existing in 'a contradiction between the interests of those existing power and the real interests of those they exclude*³⁶

³⁶ Judith Squires, 1999. *Gender in Political Theory*. Cambridge: Polity Press. Hal.34.

Secara fisik memang di PKS tidak ada konflik internal antara para pemimpin partai dengan kader dan kelompok perempuan. Hal ini dinyatakan oleh Komarul Kuniyati bahwa kondisi di PKS itu

Sejuk seperti air mengalir kalau di PKS karena tidak ada benturan-benturan atau usulan-usulan. Jadi suasananya tidak ada lonjakan³⁷

Tapi jika dikaji lebih dalam, sebenarnya terdapat juga ketidakpuasan terhadap sikap PKS menyangkut status perempuan yang lebih banyak didefinisikan dalam posisi sebagai aktor domestik. Hal ini terlihat dalam pernyataan Uhti sebagai berikut:

Sebetulnya kalau..kesadaran akan pentingnya perempuan itu ada, tetapi bahwa antara kesadaran dengan bentuk dukungan konkrit, termasuk pembangunan *supporting system* yang memudahkan optimalnya peran perempuan di PKS masih harus diagendakan, diperjuangkan. Seperti saya selalu mengatakan bahwa kalau kita mau membuat perempuan optimal di sini sementara kemudian ada yang secara fitrah dilekatkan sebagai peran utama dia, itu tidak bisa. Harus ada sistim yang dibangun untuk mendukung, *mensupport*.³⁸

Dengan membuat pernyataan seperti itu, Uhti menyatakan bahwa sikap partai yang mendefinisikan perempuan sebagai ibu rumah tangga, sebagai ibu bagi anak-anak, sebagai teman bagi suami seperti terdapat dalam Bayan Dewan Syari'ah PKS seperti sudah disebutkan, membuat perempuan PKS akan sulit untuk menjalankan peran politik secara optimal. Dengan demikian konflik laten terjadi di PKS menyangkut perbedaan kepentingan antara para pemimpin partai dengan mayoritas perempuan tentang pendefinisian siapa perempuan sebenarnya. Meski Bayan Dewan Syariah menyebutkan bahwa laki-laki dan perempuan harus saling tolong dalam kebaikan dan harus bertanggung-jawab bersama-sama terhadap keberlangsungan rumah tangga, tetapi prinsip pertama, bahwa laki-laki adalah pemimpinan perempuan, dan bahwa peran utama perempuan adalah sebagai istri dan ibu lebih mendominasi kultur yang berkembang di PKS. Pendapat Uhti menunjukkan bahwa pendefinisian PKS tentang perempuan mengandung prinsip-prinsip yang saling bertentangan, dan bahwa perempuan harus membuat agenda bersama agar ada pendefinisian kembali siapa perempuan sebenarnya. Inilah sebenarnya *the real interest* sebagai dasar terjadinya konflik laten sebagaimana disebutkan oleh Steven Luke di muka. Kepentingan yang sesungguhnya para perempuan PKS adalah pendefinisian kembali siapa perempuan itu sebenarnya, karena pendefinisian itulah yang akan menentukan identitas perempuan.

Pelaksanaan peran perempuan narasumber yang justru potensial merugikan perjuangan perempuan PKS juga ditunjukkan oleh narasumber lain, yaitu Husna Hidayati. Husna Hidayati yang merupakan perempuan PKS yang cukup berpengaruh (terlihat dari terpilihnya dirinya menjadi anggota Majelis Syura melalui Pemilihan Raya), pernah memegang berbagai peran penting di PKS di wilayahnya, antara lain mantan pengurus Bidang Kewanitaan DPW Lampung, mantan Ketua Bidang Kaderisasi DPW PKS Lampung, pernah menjadi anggota Majelis Pertimbangan Wilayah PKS Lampung, saat ini menjadi anggota Majelis

³⁷ Hasil wawancara dengan Komarul Kuniyati di Bandarlampung 6 Mei 2009

³⁸ Hasil wawancara dengan Uhti. di Jakarta 10 Maret 2009.

Syura Pusat PKS. Dia juga pernah ditugasi untuk melakukan seleksi atas calon anggota DPRD Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, DPRD Provinsi Lampung, dan DPR RI yang mewakili Provinsi Lampung.

Peran-peran yang pernah disandang Husna Hidayati sangat strategis dan berpengaruh terhadap proses pencalonan perempuan menjadi anggota DPR. Husna Hidayati telah mempunyai pengalaman bergerak dari satu peran ke peran lain dalam kepengurusan PKS. Dia menolak mengidentikkan diri dengan Bidang Kewanitaan dengan mengatakan:

Saya dari dulu tidak cenderung ke situ (Bidang Kewanitaan) Jadi dari pertama sempat mampir di wanita (maksudnya Bidang Kewanitaan) sebentar, kemudian saya lebih banyak di kaderisasi.³⁹

Kecenderungannya untuk tidak mengidentikkan diri dengan kepentingan politik perempuan terlihat dari pernyataannya bahwa:

Sebetulnya saya juga melihat partai ini memberikan kesempatan yang sama. Cuma persoalannya persoalan kuota, saya bilang kenapa mesti minta 30%? Kalau menurut saya, kalau kita mampu 70% kenapa kita tidak dapat 70, tapi kalau ternyata di lapangan kita tidak layak menempati 30, ya malulah. Jadi kalau saya kuncinya, kita tunjukkanlah kualitas kita. Kalau memang kualitas kita baik orang akan perlu kita, akan cari kita, orang akan pakai kita.⁴⁰

Dalam kedudukannya sebagai anggota tim seleksi calon anggota DPRD Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung dan anggota DPRD Provinsi Lampung, khususnya bagi perempuan calon, Husna Hidayati memerankan peran yang sebenarnya justru dapat menyebabkan beban atau rintangan tambahan untuk perempuan yang dicalonkan menjadi anggota DPR dan DPRD. Sesuai dengan pedoman tentang promosi kader PKS ke berbagai jabatan politik, maka promosi perempuan menjadi calon anggota DPR harus dilakukan dengan mengkaji berbagai aspek peluang, hambatan dan tantangan bagi perempuan dan keluarganya. Husna Hidayati mengatakan:

Ada beberapa kriteria khusus yang kita buat untuk perempuan. Misalnya, kriteria ancaman dan peluang. Si A ini bagus, suaranya terjaring banyak, dan dia menempati peringkat tertinggi untuk kabupaten/kota atau provinsi. Tapi kita melihat ada ancaman di dalam rumahnya, anaknya banyak, diantara sekian anaknya ada yang bermasalah. Ini jadi pertimbangan kita. Suaminya nyalon atau tidak. Kalau tidak mungkin ini bisa diminimalisir. Tapi kalau suaminya nyalon juga, seberapa tingkat kebutuhan partai akan suaminya. Jadi pertimbangan-pertimbangan itu detil. Kalau perempuan memang dilihat betul peluang dan ancamannya. Kita buat *ring, ring* satu, *ring* dua, *ring* tiga. Kalau ring satu itu betul-betul kita taruh karena waktu itu kan masih nomor urut, di nomor jadi, nomor satu, nomor dua, nomor tiga, gitu. Ini khusus untuk perempuan. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan khusus. Misalnya dia punya peluang besar, tapi dia punya ancaman di rumah, ancaman ini tidak bisa diselesaikan sendiri, kita lebih butuh dia, kita siapkan secara sistim apa yang bisa kita lakukan untuk

³⁹ Hasil wawancara dengan Husna Hidayati 5 Mei 2009 di Bandarlampung

⁴⁰ *Ibid.*

membantu dia kelak kalau dia jadi. Misalnya persoalan anaknya, secara sistim disiapkan.⁴¹

Ketidakadilan yang muncul yang disebabkan pelaksanaan peran Husna Hidayati sebagai anggota tim seleksi adalah bahwa aspek evaluasi ancaman terhadap keluarga hanya diterapkan untuk mengevaluasi perempuan calon. Jika Bayan 3 Dewan Syariah (yaitu perempuan dan laki-laki harus saling tolong dalam urusan rumah tangga), maka sebenarnya kriteria ini juga harus dijadikan pertimbangan untuk laki-laki calon anggota DPR. Apalagi penyelesaian yang diambil adalah meletakkan perempuan pada ring dua dan tiga (berarti nomor urut 4-6 dan 7-9 dalam daftar calon dari PKS) meski perempuan tersebut berpotensi tetapi mempunyai ancaman yang besar di rumahnya. Jelas sikap dan tindakan Husna Hidayati sebagai anggota tim seleksi merupakan sebuah tindakan diskriminatif untuk para perempuan calon anggota DPR dari PKS. Mestinya jika perempuannya memang berpotensi, maka beban untuk menyelesaikan ancaman ditanggung berdua dengan suami sehingga nilai ancaman bagi perempuan calon tidak menghalanginya untuk diletakkan pada nomor prioritas.

Alasan bagi diterapkannya prinsip *screening* rinci untuk perempuan calon anggota DPR menurut Husna Hidayati adalah agar partai tidak *dholim* terhadap keluarga yang bersangkutan, khususnya jika perempuan tersebut mempunyai beban besar di rumah menyangkut anak dan jika suami juga *all out* untuk PKS. Jika Husna Hidayati benar-benar ingin mempromosikan perempuan untuk pencalonan anggota DPR, khususnya untuk memenuhi ketentuan 30% keterwakilan perempuan secara sungguh-sungguh, maka dalam kasus seperti ini kesempatan pertama seharusnya justru diberikan kepada istri karena mencari perempuan yang potensial lebih sulit dibanding mencari laki-laki potensial. Peran Husna Hidayati sebagai tim seleksi justru menunjukkan adanya bias gender dalam pandangannya tentang peran istri dalam rumah tangga dan diskriminatif dalam menerapkannya dalam tindakan-tindakannya sebagai anggota tim seleksi calon anggota DPR dan DPRD. Memang menurut Husna Hidayati hal ini semata-mata memenuhi ketentuan yang ada dalam pedoman promosi kader PKS. Tetapi sebagai perempuan yang semestinya lebih sadar terhadap masalah perempuan Husna Hidayati dapat melakukan advokasi untuk mendorong semakin banyaknya perempuan yang dicalonkan pada posisi yang memungkinkan terpilih menjadi anggota DPR.

Jika disarikan, peran-peran yang dilaksanakan oleh perempuan PKS dalam kubu "tradisional" justru mempersulit perjuangan perempuan untuk memperoleh keadilan dalam proses pencalonan anggota DPR. Ketidaksediaan memperjuangkan kuota 30% untuk pencalonan perempuan, sikap menuntut kompetensi yang sama antara laki-laki dengan perempuan, berperan dalam Dewan Syariah Pusat yang justru memperkuat dominasi laki-laki atas perempuan adalah contoh peran-peran yang menunjukkan terdapatnya segmen perempuan PKS yang menunjukkan tradisionalitas peran yang memperkuat *stereotyping* keunggulan laki-laki dan ketidakmampuan perempuan dalam dunia politik.

Kuatnya peran kelompok perempuan pada kubu tradisional yang justru memperkuat *stereotyping* keunggulan laki-laki dan ketidakmampuan perempuan

⁴¹ *Ibid.*

dalam dunia politik ternyata tidak hanya merupakan fenomena yang terjadi di Indonesia. Inglehart dan Noris⁴² melalui penelitian mereka menunjukkan bahwa faktor agama tetap menjadi faktor yang mempunyai pengaruh kuat atas norma sosial berkenaan pembagian peran yang dianggap sesuai atas dasar jenis kelamin, baik peran di rumah, tempat kerja maupun ruang publik, khususnya di masyarakat agraris. Mereka juga menemukan bahwa sikap terhadap perempuan bervariasi diantara penganut berbagai aliran atau sub kelompok agama; dengan catatan khusus bahwa warisan ajaran agama Islam merupakan salah satu halangan terbesar terhadap meningkatnya gelombang kesetaraan gender.

4.1.2 Peran Responsif Gender

Peran responsif gender yang memperjuangkan hak politik perempuan PKS ditunjukkan oleh narasumber-narasumber berikut. Meski Sitaresmi tidak banyak berpindah peran dalam kepengurusan PKS karena lebih banyak berkiprah di bidang dakwah, kaderisasi dan pendidikan dan latihan untuk kader PKS, tetapi dalam perbuatannya justru banyak melakukan peran yang berkontribusi bagi perjuangan keadilan politik bagi perempuan PKS. Sitaresmi misalnya pernah melakukan "penggugatan" atas wacana putra daerah dengan mengundurkan diri dari pencalonan anggota DPR tahun 1999 karena dia dinyatakan "bukan putra daerah" daerah pemilihan yang diwakilinya. Padahal yang sesungguhnya adalah bahwa orang tuanya berasal dari daerah tersebut dan sudah sejak lama melakukan dakwah di daerah tersebut. Sitaresmi juga melakukan penggugatan atas sikap diskriminatif Dewan Syariah Wilayah yang melarangnya berkampanye di panggung pada pemilu 1999 karena dia seorang perempuan. Hal ini terlihat pada pernyataannya berikut:

Menjadi caleg itu dimulai sejak 1999, saya menjadi caleg nomor 1 untuk Dapil Surabaya. Waktu itu Jawa Timur dapat 1, *stembus accord*. Saya Surabaya tertinggi, tapi kita syuro, kemudian yang berangkat ke Senayan Mas Hadi. Tahun 2004 saya dicalonkan lagi, sebenarnya caleg dapil Malang, saya caleg nomor 1, cuma saya yang mengundurkan diri karena saya selalu merasa terganggu oleh pertanyaan "apakah anda putra daerah?" Saya mulai perjalanan dakwah ke Jawa Timur sejak 1980-an, sehingga pengurus berpikir "mbak Sita berakar". Tapi saya sendiri berpikir, saya bukan putra daerah, saya tidak berdomisili di sana, jadi saya mengundurkan diri.⁴³

Selain mengundurkan diri karena merasa terganggu dengan gugatan terhadap dirinya yang bukan putra daerah Malang, Sitaresmi juga "menggugat" fiqih tradisional yang menolak penampilan perempuan di atas panggung untuk melakukan orasi di depan publik pada masa kampanye. Hal ini dinyatakan Sitaresmi seperti berikut:

Pemahaman fikih yang belum, kita memang tidak memaksakan pemahaman fikih yang seragam, tapi contoh waktu 1999 itu aku mau orasi di panggung saja sempat ada diskusi panjang. Dewan Syariah Wilayahnya berat. Akhirnya saya telpon ustad Hilmi, Dr. Salim, ketua

⁴² Ronald Inglehart dan Pippa Noris. 2003. *Rising Tide, Gender Equality and Cultural Change*. Cambridge: Cambridge University Press. Hal 7.

⁴³ Hasil wawancara dengan Sitaresmi di Jakarta 25 Februari 2009

DSP, da ustad Hidayat Nurwahid. Selesai dengan tiga orang itu saya manggung. Artinya ketika sesudah yang bicara Dr Hidayat, Dr. Salim, ustad Hilmi baru saya boleh naik panggung. Saya bilang, saya sudah ke Surabaya, kalau saya tidak boleh kampanye saya pulang saja. Akhirnya kampanye. Tapi mudah-mudahan sikap yang seperti itu semakin bekurang, semakin berkurang, *step by step*.⁴⁴

Sitairesmi juga menyatakan bahwa sama dengan di partai lain, mayoritas perempuan PKS masih diletakkan pada posisi nomor 3 pada daftar calon. Menurutnya hal ini sesuatu yang wajar dilihat dari kenyataan bahwa perempuan belum memiliki posisi yang strategis di kepengurusan partai sementara proses pencalonan anggota DPR menjadikan posisi di kepengurusan partai sebagai pertimbangan utama. Selain itu yang bersangkutan melihat kenyataan bahwa struktur kepengurusan partai secara halus mengarahkan agar calon pada nomor-nomor atas yang diutamakan untuk terpilih. Hal inilah yang secara implisit dinyatakannya sebagai merugikan perempuan. Pendapat Sitaresmi terdapat pada pernyataannya berikut:

Waktu saya *sharing* dengan sesama CAD perempuan dari 7 partai besar, semua sama, kebanyakan mereka di nomor 3. Sedikitlah yang di nomor 2. Saya sendiri bisa menerima seandainyaapun struktur itu mengarahkan sebaiknya nomor satu dibantu. Menurut saya itu wajar karena mereka dari segi kerja, kinerja mereka di partai, atau jasa mereka di partai, posisi nomor satu dua itu cerminan. Artinya walaupun secara teori ustad Hilmi mengatakan semua struktur harus memfasilitasi secara adil, kenyataannya struktur mengarahkan terutama pada nomor-nomor atas.⁴⁵

Sitairesmi juga melihat adanya kejanggalan antara kontribusi yang sudah diberikan perempuan PKS dengan sikap-sikap yang selama ini ditunjukkan oleh kalangan internal PKS sendiri yang sering masih memperlakukan perempuan secara tidak adil, misalnya dia merasakan masih sulit untuk menjadi pembicara di depan kalangan laki-laki. Sikap demikian menurutnya memang lebih banyak dari struktur organisasi yang lebih rendah.

Pos WK itu ada lima ribuan di seluruh Indonesia. Di struktur itu yang sangat berdaya itu dua, kaderisasi dan kewanitaan.

Soal ke perempuan, nyatanya juga masih berproses orang-orang di dalamnya. Tadi saya katakan kalau pimpinan-pimpinanya sangat (mendukung perempuan). Tpi di menengah dan di bawah, di lapangan, tidak semuanya (mendukung perempuan). Masih ada pandangan, paradigma mereka tentang peran politik perempuan yang belum merata. Contohnya untuk kita bisa berbicara sebagai pembicara di depan kalangan laki-laki di dalam partai itu saja masih agak sulit dibanding ketika kita ke luar. Jadi masih berproses menurut saya.⁴⁶

⁴⁴ *Ibid*

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ *Ibid.*

Berkenaan dengan pertanyaan seberapa banyak usaha yang sudah dilakukan perempuan PKS seperti dirinya untuk merubah paradigma berpikir di kalangan struktur partai dan kader PKS, Sitaresmi menyatakan:

Sudah sekitar 70%. Tapi memang masih ada yang ini (tidak mendukung perempuan), tapi tidak terlalu dominan karena mereka dibenturkan pada kenyataan-kenyataan, sangat tidak populer kalau partai masih seperti itu. Kemudian ada keputusan affirmative action 30% perempuan, mau tidak mau memaksa mereka untuk merubah paradigmanya. Dan menurut saya itu terus berproses. Memang perempuan juga harus menunjukkan bukti kerjanya.

Jadi nggak cuma dari laki-laki, perempuannya juga merasa *enjoy* saja, ada yang nomer satu untuk DPRD, tapi karena kemudian suaminya (tidak setuju, dia minta turun nomor lima. Jadi ada dari internal perempuannya yang merasa belum siap, belum mampu, takut kalau nanti rumah tangganya kenapa-kenapa mereka yang dituding sebagai penyebabnya, Dari eksternalnya bapaknya kadang-kadang juga masih ada yang setengah hati.⁴⁷

Menurut Sitaresmi terkadang perempuan sendiri yang menjadi penghalang bagi kemajuan perempuan dengan sikap menikmati atau dalam istilahnya *enjoy* untuk mendapat posisi nomor rendah dalam pencalonan. Perempuan sendiri yang takut melakukan peran-peran yang lebih bermakna karena adanya ketakutan akan terjadi sesuatu dengan rumah tangganya. Juga masih adanya sikap laki-laki yang mempersalahkan perempuan yang terlalu bersemangat melakukan peran publik dan peran politik. Menurut Sitaresmi kedua faktor tersebut berkaitan satu sama lain. Gambaran yang diberikan Sitaresmi adalah bahwa semua itu sedang berproses dan dia yakin bahwa perempuan akan semakin diterima di dunia publik dan politik, baik di lingkungan internal PKS maupun di masyarakat. Jika dibaca dengan teliti, inilah sebenarnya esensi tesis Moya Lloyd tentang perempuan sebagai subyek dalam dimensi subyek jamak atau *the multiple subject*. Sitaresmi menolak peran-peran tradisional yang dilekatkan kepada perempuan, menolak fikih yang mengekang perempuan, menggugat tindakan diskriminatif. Sikap dan tindakannya ini menurutnya akhirnya akan merubah paradigma berpikir kelompok tradisional, dan akhirnya akan membuka peluang lebih besar kepada perempuan untuk melaksanakan lebih banyak peran politik. Dia menolak berada pada satu kondisi statis, dia terus bergerak mencari dan membuka peluang bagi dirinya dan perempuan lain.

Dalam bahasa Colin Hay⁴⁸, Sitaresmi disebutnya sebagai *strategic actor within a strategic context*. Sitaresmi adalah aktor strategis yang dapat memanfaatkan pandangan-pandangan tradisional dan sikap diskriminatif yang ditujukan kepadanya sebagai sebuah kesempatan untuk melakukan perubahan, sementara struktur di luar dirinya (baik dari pengurus partai maupun lingkungan masyarakat PKS yang lebih luas) juga akhirnya dapat belajar dari tindakannya dengan menyesuaikan diri terhadap tuntutan dan aspirasi perempuan. Struktur dan lingkungannya juga sebenarnya adalah struktur yang strategis karena tanpa

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ Colin Hay, Structure and Agency dalam David Marsh dan Gery Stiker, 1995. *Theory and Methods in Political Science*. Houndmills, Basingstoke, Hampshire: Macmillan Press Ltd

melakukan perubahan maka PKS akan ditinggalkan konstituen. Jelas hal ini bukan merupakan pilihan strategis bagi PKS sebagai struktur yang berpengaruh terhadap perempuan PKS, khususnya Sitaresmi.

Peran sebagai "reformis" seperti halnya Sitaresmi juga ditunjukkan oleh Kingkin Anidha, narasumber berikutnya. Meski tidak banyak melaksanakan peran strategis di PKS, tetapi apa yang dilakukan oleh Kingkin Anidha dalam menanggapi sikap dan tindakan partai merupakan suatu perilaku yang sangat jarang ditunjukkan oleh kader PKS, lebih-lebih perempuan kader PKS. Pertama, Kingkin Anidha "menggugat" penempatan dirinya di daerah pemilihan yang jauh dari Jakarta dan bukan daerah kantong. Hal ini dinyatakan Kingkin Anidha sebagai berikut:

Dari Departemen Kepeloporan Pemuda ada Bidang Pembinaan Pemuda, mencoba kontak saya untuk mengatakan. "bu Kingkin sekarang dicalonkan untuk Lampung". Saya bilang "pak apa nggak kejauhan ke Lampung?" "Ibu ada orang tua nggak di sana?" "Ada". "Ya sudah kalau gitu ibu ke sana saja". "Boleh nawar nggak pak?", saya bilang. "Sudah bu, ibu di sana saja, mem *back up*" katanya. Maunya saya sih nawar, tapi ternyata ya sudah laksanakan saja tugasnya, begitu. Jadi ketika saya coba untuk nawar ketika dicalonkan ternyata dia memutuskan "ibu bagusya di sana saja, soalnya di tempat yang lain sudah ada calon lain".⁴⁹

Berbeda dengan perempuan PKS pada kubu tradisional yang hampir tidak pernah mempertanyakan apapun sikap dan tindakan pemimpin partai meskipun itu tindakan yang diskriminatif, Kingkin Anidha justru menunjukkan sikap kritis atas tindakan partai yang dirasakannya tidak adil dan tidak logis. Hal ini terlihat dari pernyataannya berikut:

Ada beberapa hal yg menyebabkan akhirnya .saya ditaruh di Lampung. Saya dengar sebenarnya pemilu internal saya yang suara suara terbanyak untuk Banten. Jadi memang ada kesalahan saya, ada sebuah keputusan yang saya tidak terima, Itu kesalahan saya terkait dengan koalisi karena saya tidak terima dengan keputusan koalisi di Kabupaten Tangerang Ketidaksetujuan saya bukan karena semata-mata karena pribadi saya, tapi saya membicarakannya di .tim syuro perempuan. Jadi tim itu mengatakan bahwa kita nggak bisa sekarang ini berkoalisi. Itulah yang saya bawa. Ternyata begitu saya bawa, semua yang lain menyetujui, hanya saya satu-satunya yang tidak menyetujui, dan saya satu-satunya perempuan. Itu barangkali kesalahan saya. Ya sudah diterima saja. Pembelajaran juga buat saya.⁵⁰

Menurut Kingkin Anidha, kesalahan yang membuatnya diletakkan pada daerah pemilihan yang jauh sekaligus bukan kantong suara PKS adalah tindakannya yang menolak koalisi dengan satu kekuatan politik pada pemilihan Bupati Tangerang, padahal seluruh anggota fraksi PKS yang lain yang seluruhnya laki-laki menerima keputusan koalisi. Menurut Kingkin Anidha keputusan menolak koalisi bukanlah kesalahannya karena itu merupakan kesepakatan diantara kelompok perempuan PKS. Faktor bahwa dia perempuan semakin

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Kingkin Anidha 23 Maret 2009 di Bandarlampung.

⁵⁰ *Ibid.*

memperberat kesalahannya. Meski menganggapnya sebagai pembelajaran, sebenarnya Kingkin Anidha menyatakan bahwa dia telah menerima perlakuan tidak adil dan tidak logis karena dia perempuan satu-satunya dan telah membawakan aspirasi kelompok perempuan.

Akibat tindakan pimpinan partai tersebut, Kingkin Anidha merasa dilempar. Tetapi kemudian dia mencoba mengambil hikmah dan menganggapnya sebagai kesempatan untuk lebih berbakti kepada orang tua. Dia juga pada akhirnya merasa gembira karena struktur partai di bawah menerimanya dengan baik dan memberikan dukungan yang sangat membantunya dalam proses pencalonan anggota DPR. Hal ini dinyatakannya sebagai berikut:

Pertama-tama saya merasa, ."dilempar". Tapi kemudian saya mencoba memahami hikmah ini semua, mungkin maksud Allah dengan mentakdirkan ini terjadi pada saya, saya diminta untuk lebih berbakti kepada kedua orang tua, itu saja. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya ternyata kehadiran saya itu diterima oleh teman-teman di sini. Jadi termasuk struktur alhamdulillah.menerima. Jadi saya memaknainya seperti Nabi Yusuf ditaruh di tempat yang tidak menyenangkan, .tetapi itu ternyata menghantarkan dia menjadi seorang yang lebih berarti., sehingga pergolakan-pergolakan ini bisa dieliminasi, bisa diadaptasi. Jadi semakin kemari semakin bisa menerima kondisi itu. Daipada kita bekerja dalam keterpaksaan, kekecewaan, membuat kita tidak menikmati pekerjaan ini. Sementara kita tau kita bukan bekerja untuk institusi, tetapi kita bekerja untuk yang menciptakan ..dunia ini.⁵¹

Kingkin Anidha cepat dapat menyesuaikan diri dengan perannya sebagai calon anggota DPR dari PKS di daerah pemilihan baru yang belum dikenalnya dengan baik dengan wilayah yang sangat luas dan penduduk sangat sedikit dan bukan daerah kantong suara PKS. Kemampuannya melakukan penyesuaian diri terhadap peran baru tersebut terasah oleh perannya yang tidak sekedar menjadi pengurus DPP PKS staf Departemen Kepeloporan Pemuda pada Bidang Pembinaan Kepemudaan, tetapi juga menjadi Ketua Bidang Peningkatan Peran Perempuan pada Pengurus Nasional Karang Taruna. Hal ini terlihat pada pernyataan Kingkin Anidha berikut.

Saya jadi ketua Bidang Peningkatan Peran Perempuan di Pengurus Nasional Karang Taruan. Alhamdulillah..bahwa dengan amanah itu saya bisa berkomunikasi lebih luas. Selama ini dikatakan bahwa PKS eksklusif. Tapi dengan saya masuk ke Karang Taruna jadi tau bagaimana caranya berkomunikasi dengan media yang lebih inklusif, lebih luas.⁵²

Kingkin Anidha merasa perannya di Karang Taruna membuatnya mampu berkomunikasi dengan segmen masyarakat yang lebih luas. Kingkin Anidha sekaligus melihat bahwa perannya di Karang Taruna mengasah kemampuannya untuk berkomunikasi dengan media yang lebih inklusif.⁵³ Secara implisit dia

⁵¹ *Ibid.*

⁵² *Ibid.*

⁵³ Berbeda dengan PKS yang merupakan partai Islam, Karang Taruna yang merupakan organisasi di bawah binaan Departemen Sosial menerima anggota dari seluruh latar belakang agama. Karena

melihat bahwa pergaulannya di PKS bersifat eksklusif. Eksklusifitas pergaulan di PKS juga dinyatakan oleh narasumber lain, Komarul Kuniyati, yang menyatakan bahwa perempuan PKS memiliki perilaku bergaul yang kaku, yang tidak luwes sehingga sulit diterima segmen masyarakat di luar kader PKS.

Kalau saya lihat perempuan-perempuan di PKS itu kelewat kalem, , nggak luwes, *approachnya* nggak luwes *approach* ke masyarakat itu kurang benar, eksklusif. Mungkin eksklusifnya karena dengan cara berpakaian mereka yang sepereti itu, atau memang dikondisikan oleh partai, saya tidak tau. Tapi yang jelas mereka nggak luwes *approachnya* dengan para pejabat atau dengan *penthol-penthol* masyarakat di sekelilingnya. Mereka masih membatasi diri betul, misalnya kalau tokoh masyarakatnya laki-laki nggak mungkin dia mau bicara.⁵⁴

Sikap eksklusif dan gaya yang tidak luwes para perempuan PKS bukan terjadi secara kebetulan, tetapi seperti diduga oleh Komarul Kuniyati, merupakan hasil sosialisasi yang selama ini diterima oleh perempuan kader PKS. Hal ini terjadi karena menurut Bayan Dewan Syariah Pusat seperti yang telah disebutkan di muka, perempuan PKS memang dalam melaksanakan peran publik tidak diperbolehkan melunakkan atau memanjakan suara. Dengan demikian bisa dipahami bahwa bersikap luwes dapat dikategorikan sebagai bersikap manja. Padahal menurut Komarul Kuniyati, bersikap luwes tidak selalu berarti *lenjeh* atau bersikap murahan.

Selain menginformasikan sikapnya “menggugat” keputusan pimpinan partai yang tidak adil, Kingkin Anidha juga menginformasikan adanya tindakan perempuan PKS lain yang melakukan *appeal* untuk memperjuangkan agar perempuan ditempatkan pada posisi nomor satu dalam daerah pemilihan yang merupakan kantong suara PKS. Kingkin Anidha menyatakan:

Saya sendiri belum pernah *appeal* ke Majelis Syuro, tapi mbak Ledia sudah. Mbak Ledia *appeal* ke Majelis Syuro untuk beberapa nama, seperti untuk bu Yoyoh, akhirnya jadi nomor satu di Banten, di tempat saya. Kemudian bu Herlini Amran di Babel, Bangka Belitung. Saya kira ini prestasi bu Ledia, Memang untuk yang lainnya masih belum sempurna, belum bisa dikatakan sempurna. Artinya SDM perempuan di PKS ini mungkin dari sisi kapasitasnya sendiri ada yang merasa nggak perlu menjadi calon anggota dewan, dan itu disambut..sebagian oleh bapak-bapak.⁵⁵

Peran-peran menggugat, melakukan *appeal*, menolak keputusan untuk berkoalisi, adalah peran-peran yang hanya dilakukan oleh individu bebas yang menginginkan adanya perubahan dalam lingkungannya. Kingkin Anidha berani menanggung akibat “dilempar” ke wilayah yang jauh oleh perbuatannya menolak koalisi dengan kekuatan Atut karena menurutnya itulah amanat yang harus diembannya sebagai wakil kelompok perempuan di daerah pemilihannya. Naik turun karir politik dianggap Kingkin Anidha sebagai kesempatan pembelajaran

itu dibanding PKS dan organisasi sayap lain dari PKS, termasuk Bidang Kewanitaan PKS, Karang Taruna lebih inklusif.

⁵⁴ Hasil wawancara dengan Komarul Kuniyati di Bandarlampung 6 Mei 2009.

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Kingkin Anidha di Bandarlampung 23 Maret 2009..

buat dirinya. Berbeda dengan Yoyoh Yusroh yang mengasosiasikan sikap kritis sekedar dengan bersikap terhadap akhlak kader perempuan yang menurutnya tidak baik, sikap kritis yang ditunjukkan oleh Kingkin Anidha berhubungan langsung dengan otoritas partai yang dirasakannya tidak adil. Tindakan *appeal* yang dilakukan oleh Ledia Hanifa bagi penempatan kader perempuan PKS pada posisi yang menguntungkan untuk kepentingan pencalonan pemilu juga berlawanan dengan sikap dan tindakan mayoritas perempuan PKS yang pada umumnya menganggap diri sebagai prajurit bagi para komandan, bersikap *samaah wa thoah*, saya mendengar, saya taat. Tidak mengherankan bahwa di kalangan internal PKS, Ledia Hanifa diberi label sebagai “feminis”.

Berbeda dengan kelompok perempuan dalam kubu tradisional yang pada umumnya menyatakan bahwa tidak ada lagi sikap diskriminatif di PKS, Kingkin Anidha menyatakan hal sama dengan Sitaresmi bahwa masih ada sikap diskriminatif di kalangan PKS, khususnya pada kultur PKS di tingkat lokal. Hal ini dinyatakan sebagai berikut:

Untuk kasus-kasus lokal, yang menurut kultur lokal itu memang perempuan tidak boleh mendominasi, itu yang saya rasakan. Tapi tidak semua lokal seperti itu. Laki-laki yang ngomong ”untuk apa perempuan, kalau ibu rumah tangga, mampu apa dia”. Tapi itu bisa dikatakan kalau dibandingkan dari sepuluh orang bisa dikatakan satu yang bilang begitu.⁵⁶

Kingkin Anidha menolak dogma yang menyatakan bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan dalam semua dimensi kehidupan. Dia menyatakan bahwa Islam mempunyai referensi adanya kepemimpinan negara di tangan perempuan. Dia menyatakan:

Kita kan kenal Ratu Bilqis yang bisa mengayomi negerinya bersama dengan kabinetnya. Tapi sekali lagi bagaimana kita bisa mendapatkan sosok Ratu Bilqis pada masa sekarang, itu yang sulit. Tapi kita punya referensinya di dalam Al Quran. Jadi kita nggak bisa menafikan hal ini,. Jadi saya kira pelajarannya adalah buat kita di sini melihat kekuasaan itu sebagai sesuatu yang biasalah, maksudnya tidak menjadi sesuatu yang menyeramkan⁵⁷

Bisa dipahami mengapa Kingkin Anidha melakukan peran-peran penggugat dan reformatif. Dia banyak melakukan peran di luar PKS dan mengambil referensi-referensi yang berbeda dari referensi baku yang selama ini dipergunakan oleh PKS untuk melakukan sosialisasi nilai terhadap kader perempuan. Persentuhannya dengan dunia luar PKS memperluas horizonnya dan mempermudahnya berganti peran dan posisi.

Seperti sudah dinyatakan Kingkin Anidha, terdapat satu narasumber perempuan PKS yang diberi label sebagai “feminis” karena menuntut terlalu banyak untuk promosi perempuan PKS, yaitu Ledia Hanifa. Ledia Hanifa banyak melakukan peran-peran non tradisional untuk mendorong agar lebih banyak perempuan PKS yang dapat ditempatkan pada posisi yang menguntungkan pada pencalonan anggota DPR 2009, agar PKS menjadi “partai modern”, agar lebih banyak perempuan kader PKS yang lebih berkualitas dalam segala aspek

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ Hasil wawancara dengan Kingkin Anidha di Bandarlampung 23 Maret 2009..

kehidupan, khususnya kesadaran politik mereka menjadi lebih baik. Ledia Hanifa menjelaskan berbagai peran yang dilakukannya tersebut sebagai berikut:

Kita fokus pada *up-grading* fungsionaris, pelayanan pembedayaan perempuan dan pemberdayaan politik perempuan. . Jadi fokusnya memang lebih kepada eksternal.

Untuk mengantisipasi, memperbesar kontribusi perempuan itu, tugas Bidang Kewanitaan adalah bagaimana kita mengoptimalkan potensi yang ada. Jadi kita membuat program yang disebut Pos Wanita Keadilan. Pos ini melakukan kegiatan penyadaran keagamaan, penyadaran sosial politik, penyadaran pendidikan, gizi, kesehatan lingkungan, kemudian pemberdayaan ekonomi, itu dimulai dari *small group* ini. Kita mulai *pilot project*. Agak rumit memang karena dia kan sistimnya pemberdayaan. Partai politik dengan sudut pandang partai politik dengan kita harus melakukan aktivitas yang bersifat *community development* seperti NGO. (agak rumit).⁵⁸

Ke luar, Ledia Hanifa membangun jaringan perjuangan bersama dengan media massa dan kalangan akademisi agar perempuan PKS di daerah mempunyai teman berjuang bersama. Dia melakukan hal ini karena menyadari bahwa resistensi terhadap perempuan dalam kehidupan politik, khususnya perempuan PKS, jauh lebih kuat dibanding resistensi di tingkat Pusat atau di kota-kota. Ledia Hanifa mengatakan:

Jaringan luar partai harus dibangun. Dibantu karena masih muda-muda, sementara orang-orang senior lokal itu senioritasnya kan lebih kuat daripada di pusat. Senioritasnya itu luar biasa. Jadi kita bantu, kemudian juga dengan media. Sebenarnya media lokal itu sangat *welcome* dengan kita. Kita juga cari masukan apa yang harus diperbaiki dari kinerja yang telah dilakukan oleh PKS setempat. Jadi kita menggunakan banyak jalur komunikasi. Sebenarnya media itu kan pengamat partai politik yang terbaik selain akademisi gitu. Mereka memperhatikan terus.⁵⁹

Selain dengan kalangan media massa dan akademisi, Ledia Hanifa juga mendorong terjadinya kerjasama antara perempuan PKS dengan Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) baik pada tingkat Pusat maupun Daerah. Hal ini menurutnya penting agar ada kesamaan visi dan kesatuan gerak untuk mencapai target 30% keterwakilan perempuan dalam kehidupan politik. Hal ini dinyatakan Ledia Hanifa dalam penjelasannya berikut:

Alhamdulillah kita juga bergabung di KPPI, kaukus perempuan politik. Itu juga ada di provinsi dan kabupaten/kota. Ibu-ibu juga punya hubungan dengan organisasi-organisasi itu.

Saya bisa memasukkan 30% itu termasuk kita bergerak bersama-sama teman-teman di gerakan perempuan. Kita juga dengan KKPI, dengan kementerian, lobi saja kerjanya. Sampai akhirnya di partai sendiri 30% tidak ada masalah karena sejak 2004 kita adalah partai yang paling tinggi suaranya 30% perempuan itu. 42% calegnya pada waktu itu. Waktu itu dengan kata "dapat" saja kita sudah memenuhi, nggak masalah.

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Ledia Hanifa di Jakarta 27 Januari 2009.

⁵⁹ *Ibid.*

Kemudian sekarang juga nggak ada masalah semua. Memang ada 7 dapil, dari 77 itu cuma 7 dapil yang tidak terpenuhi, ada perempuan yang nomor 3. Itu karena memang kesiapan orang lokalnya juga. Kita nggak berani menaruh orang yang nggak terlalu siap, dan kebanyakan bukan di basis-basis kita.⁶⁰

Semua aktivitas Ledia Hanifa untuk perjuangan *affirmative action* didasarkan pada pemahamannya bahwa aturan partai yang tidak diskriminatif saja tidaklah memadai untuk mendorong peningkatan perwakilan politik perempuan. Dia menyadari bahwa di kalangan internal PKS masih ada asumsi-asumsi, kebiasaan-kebiasaan dan tindakan-tindakan yang mengekspresikan adanya opresi atau tekanan, subordinasi, dan marginalisasi⁶¹ perempuan PKS. Karena itu menurutnya semua upaya dialog dengan media, dengan akademisi, dengan kelompok-kelompok pejuang hak perempuan di luar partai harus dibangun.

Selanjutnya Ledia Hanifa menyatakan dia akan terus memperjuangkan adanya *affirmative action* 30% calon anggota DPR perempuan karena menurutnya hal itu penting karena tanpa *affirmative action* maka perempuan akan tersingkir dari pencalonan atau tidak terpilih karena tidak populer, padahal belum tentu perempuan tidak memiliki kompetensi. Masalahnya hanyalah perempuan tidak populer. Dia mengatakan:

Padahal demi keadilan tidak mesti semua suara sama rata sama rasa. Ini sudah mekanisme, sistem. Di berbagai negara Eropa juga tetap ada *affirmative action* untuk profesional. Saya lupa di Skandinavia itu ada satu negara yang punya *affirmative* untuk profesional, karena dikhawatirkan mereka dari suara terbanyak ini kompetensi tidak memadai, dan cuma orang populer tapi tidak kompeten yang lebih dikenal. Itu kan sangat tergantung dari *skill* dia mendekati orang.. Saya pikir akan lebih banyak gerakan-gerakan, karena banyak diskusi dengan teman-teman puskapol, penginnya itu PKS lebih modern, lebih memperbaiki dalam bentuk partai politik yang modern⁶²

Ledia Hanifa juga mengkritisi fenomena perempuan yang cenderung buta gender sehingga menolak *affirmative action* 30% keterwakilan perempuan. Dia menyatakan:

Di kalangan perempuan banyak yang tidak setuju (terhadap ketentuan *affirmative action* 30%) karena tidak faham dan tidak melihat kondisi perempuan lain. Kalau melihat kondisi dirinya mungkin dia punya kader banyak, dia punya modal yang kuat, dia punya jaringan yang lebih. Tapi perempuan yang lain bagaimana? Dengan kultur kita memang punya

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ Iris Marion Young menyatakan bahwa konsep diskriminasi yang mengasumsikan adanya kebijakan dan tindakan yang secara khusus membatasi hak pihak tertentu mengaburkan fakta adanya opresi, subordinasi, dan marginalisasi terhadap perempuan yang tidak selalu merupakan diskriminasi yang langsung terlihat. Karena itu menurutnya *affirmative action* bukan hanya untuk “memberi ganti rugi” atas diskriminasi yang telah dialami di masa lalu, tetapi juga untuk mengatasi opresi, subordinasi dan marginalisasi yang masih saja terjadi meski aturan formal partai tidak lagi diskriminatif. Baca Iris Marion Young, *op. cit.* hal 196-197.

⁶² Hasil wawancara dengan Ledia Hanifa di Jakarta 27 Januari 2009.

keterbatasan. Karena itu sampai sekarang kita belum dapat gimana seharusnya penyelesaiannya.⁶³

Dengan menyatakan pendapatnya tersebut, Ledia Hanifa sebenarnya sedang ”menggugat” pandangan dan sikap kalangan perempuan PKS sendiri yang buta gender (*gender blind*) yang tidak menyadari kondisi mayoritas perempuan di PKS. Kubu pertama perempuan PKS sebagaimana telah digambarkan pada bagian lebih awal Bab ini mempunyai pandangan yang buta gender serta tidak melakukan peran yang substansial untuk memperjuangkan kepentingan mayoritas perempuan PKS. Mereka sebenarnya hanya mewakili diri sendiri. Ledia Hanifa justru memposisikan diri dengan kepentingan kelompok perempuan mayoritas yang tidak memiliki modal, tidak memiliki jaringan dukungan, yang mempunyai kesulitan di rumah dan sebagainya. Dia membayangkan dirinya dapat berkontribusi lebih besar menjadikan PKS sebagai mesin politik yang bagus tanpa harus menjadi anggota DPR. Tetapi dia ”mengorbankan diri” menjadi calon anggota DPR karena PKS masih membutuhkan lebih banyak perempuan untuk mengejar kuota 30% dengan calon yang benar-benar berkualitas. Sebagai Ketua Bidang Kewanitaan DPP PKS, Ledia Hanifa harus memikirkan dan berjuang untuk kemenangan perempuan di 77 daerah pemilihan, dan tidak bisa hanya memikirkan pencalonannya sendiri di daerah pemilihannya. Hal ini dinyatakan Ledia Hanifa sebagai berikut:

Saya itu..nggak pengen jadi calon anggota dewan, karena saya punya target harusnya mesin PKS itu lebih bagus lagi. Jadi sempat ngobrol dengan beberapa orang teman, apalagi kebetulan kita pernah ikut pelatihan di Australian National University, terus kita juga melihat ada orang yang 15 tahun nggak pernah nyalonin diri, mesin partai, lalu mesinnya bagus, akhirnya jalannya bagus. Kita liat, ternyata harus ada orang yang seperti itu. Sempat terpikir begitu, kita sempat diskusi. Tapi memang pada saat ini kita masih membutuhkan jumlah calon anggota dewan yang sangat banyak. Kecuali kalau sistimnya satu distrik satu, misalnya, maka akan beda. Kalau gitu kita mesti berpikir, pada tahap ini paralel, artinya mempersiapkan langkah-langkah ke depan, misalnya untuk persiapan sebagai calon anggota dewan, dan tetap menghidupkan struktur. Memang dobel, bebannya jadi dobel. Mau tidak mau. Kalau istilah teman-teman, yang satu mikirin satu dapil, kita 77 dapil.⁶⁴

Tabel 4.1
Perbedaan Peran Tradisional dan Responsif Gender
di Kalangan Perempuan PKS

Peran tradisional sebagai penghalang	Peran responsif gender sebagai pendukung
1. Menghasilkan bayan yang diskriminatif 2. Tidak mau memperjuangkan kuota 3. Tidak mengidentikan diri dengan	1. Menghendaki ketentuan Bayan DSP tentang definisi perempuan dirubah 2. ”Menggugat” wacana putra daerah

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ *Ibid.*

<p>perjuangan Bidang Kewanitaan</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Menghendaki ketaatan mutlak kepada para pemimpin partai 5. Tidak menghargai hak reproduksi perempuan 6. Menyangkal terjadinya diskriminasi terhadap mayoritas perempuan PKS 7. Mempromosikan cara pandang tradisional tentang peran politik perempuan 8. Tidak melakukan advokasi bagi Posisi perempuan dalam kepemimpinan partai 9. Menerapkan syarat-syarat yang lebih ketat bagi pencalonan perempuan menjadi anggota DPR 	<ol style="list-style-type: none"> 3. Menggugat fikih tradisional 4. "Menggugat" kebijakan kepengurusan partai yang mengarahkan pemilih untutk memilih nomor-nomor atas. 5. "Menggugat" tindakan pemimpin partai yang tidak adil dan tidak logis. 6. Mempromosikan inklusifitas 7. Membangun jaringan dengan KPPI, media massa, akademisi, ormas perempuan lain 8. Mendorong PKS menjadi partai modern
--	--

Sumber: Disarikan dari informasi para perempuan narasumber

Membandingkan peran yang dilakukan kedua "kubu perempuan PKS", dapat dilihat bahwa dimensi subyek jamak atau *the multiple subject* sebagai dimensi pertama tesis Moya Lloyd tentang subyek-dalam process (*subject-in process*), maka kubu kedua lebih mendekati konsepsi tentang subyek jamak. Informasi dari kelompok pertama menunjukkan berbagai peran yang dapat dikatakan justru menjadi penghambat perjuangan perempuan PKS untuk dapat mencapai kesetaraan gender. Peran-peran tersebut antara lain adalah menghasilkan bayan yang diskriminatif, tidak bersedia memperjuangkan kuota, tidak mengidentikan diri dengan perjuangan Bidang Kewanitaan yang menginginkan affirmative action untuk semua posisi dan program partai, menghendaki ketaatan mutlak kepada para pemimpin partai, tidak menghargai hak reproduksi perempuan, menyangkal terjadinya diskriminasi terhadap mayoritas perempuan PKS, mempromosikan cara pandang tradisional tentang peran politik perempuan, tidak melakukan advokasi bagi posisi perempuan dalam kepemimpinan partai, menerapkan syarat-syarat yang lebih ketat bagi pencalonan perempuan menjadi anggota DPR. Kebalikan dari peran-peran tradisional yang dilakukan oleh kelompok pertama perempuan PKS, kelompok kedua justru melakukan hal yang mendorong perjuangan perempuan PKS mencapai kesetaraan gender. Kelompok kedua menghendaki ketentuan Bayan DSP tentang definisi perempuan dirubah; "menggugat" wacana putra daerah, menggugat fikih tradisional; "menggugat" kebijakan kepengurusan partai yang mengarahkan pemilih untutk memilih nomor-nomor atas; "menggugat" tindakan pemimpin partai yang tidak adil dan tidak logis; mempromosikan inklusifitas; membangun jaringan dengan KPPI, media massa, akademisi, ormas perempuan lain; mendorong PKS menjadi partai modern.

Sifat atau karakter subyek jamak seperti dinyatakan oleh Lloyd adalah individu yang tidak pernah berhenti berubah, selalu terbuka terhadap pengartikulasian kembali peran dirinya, selalu bersedia mendefinisikan kembali siapa dirinya sesuai dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Moya Lloyd bahwa:

*the multiple subject is produced across, and positioned within, several axes.....their selves are never fixed...their identity is permanently open to rearticulation....the subject is in a continual state of flux....they are both temporal and relational.....*⁶⁵

Kelompok kedua menunjukkan sifat atau karakter yang lebih mudah menerima perubahan dan melakukan perubahan dengan mempertanyakan dogma dan fiqih lama tentang perempuan, mendorong modernitas dan inklusifitas, menggugat diskriminasi dan ketidakadilan serta ketidaklogisan, serta membangun jaringan dengan kelompok-kelompok yang juga menghendaki dan mengusahakan kesetaraan gender. Mereka melakukan perjuangan untuk merubah identitas perempuan agar tidak lagi dilihat semata sebagai aktor domestik ataupun jika melakukan peran publik hanya merupakan perluasan dari statusnya di ranah domestik. Kemampuan kelompok kedua menjadi subyek jamak yang dalam tesis Lloyd juga sering disebut sebagai subyek yang selalu bergerak (*the mobile subject*) juga terlihat bahwa peran yang dilakukan oleh kelompok kedua ini "lebih kaya" dibanding kelompok pertama. Mereka tidak hanya berperan di PKS dan ranah politik yang terkait dengan PKS, tetapi juga peran di luar, seperti menjadi pejabat di tempat kerja, menjadi tokoh organisasi pemuda yang tidak berafiliasi ke partai, menjadi anggota Kaukus Perempuan Politik Indonesia, menjadi mantan Ketua Badan Kerjasama Organisasi Wanita Islam, menjadi konsultan psikologi. Peran-peran ini memungkinkan mereka belajar terus menerus dan memperbaiki pandangan dan sikap secara terus menerus juga.

Meski demikian perlu digaris-bawahi bahwa meski kedua kubu memiliki peran-peran yang "berlawanan", tetapi keduanya menyatakan mempunyai tujuan yang sama, yaitu meningkatkan peran politik perempuan. Kedua kubu juga mempunyai pandangan yang sama tentang kewajiban dakwah serta menjadikan peran politik sebagai kesempatan ibadah. Karena itu jauh dari kesan berlawanan, kedua kubu menunjukkan solidaritas yang tinggi. Karena itu seperti pendapat Sitaresmi, perbedaan kedua kubu lebih merupakan perbedaan dari fenomena "yang sedang berproses", atau seperti pendapat Ledia Hanifa, "sedang berubah". Ke arah mana peran itu akan bergerak, apakah cenderung peran tradisional lebih dominan atau sebaliknya, akan ditentukan bukan hanya oleh bagaimana perempuan PKS melaksanakan peran-peran politik mereka, tetapi juga akan ditentukan oleh respon struktur di luar kelompok perempuan. Struktur di luar perempuan terdiri dari dua "*immediate structure*" (terdiri dari para pengurus dan pimpinan PKS) dan struktur di luar partai, atau masyarakat yang lebih luas. Perempuan PKS baik dari kubu tradisional maupun kubu reformis tentu harus mempelajari bagaimana respon para pimpinan PKS dan pengurus PKS lainnya dari berbagai level kepengurusan terhadap peran yang selama ini mereka lakukan. Pernyataan Wakil Sekretaris Jendral DPP PKS bahwa

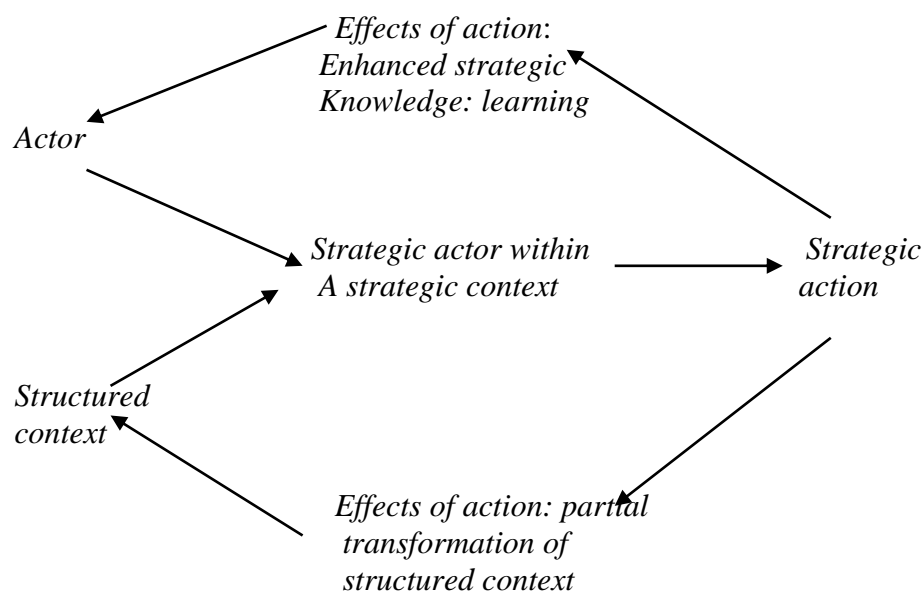
Kami tentu harus mengadakan evaluasi dan memberikan apresiasi lebih baik kepada teman-teman perempuan dengan memberikan kesempatan lebih banyak untuk memperoleh posisi-posisi strategis di luar Bidwan (Bidang Kewanitaan) agar teman-teman bisa belajar mengelola kehidupan politik dengan lebih baik. Selama ini evaluasi kami menunjukkan bahwa

⁶⁵ Moya Lloyd. *Op.cit.* hal. 15-16.

Bidwanlah Bidang yang tidak pernah berhenti bekerja bahkan setelah pemilu...dan mempunyai kinerja yang sangat baik. di internal maupun dalam kerjasamanya dengan kelompok-kelompok partner di luar partai.⁶⁶

Meski masih menjadi pendapat pribadi, tetapi respon yang ditunjukkan Wasekjen DPP PKS merupakan fenomena yang sedang berproses. Dan seperti dikatakan S lebih lanjut, mau tidak mau para pemimpin PKS dan pengurus PKS lainnya "dipaksa" merubah paradigma berpikir mereka kecuali mereka mau ditinggalkan oleh konstituen, khususnya konstituen dari luar kader. Inilah "ruang gerak" yang dapat dimanfaatkan oleh kelompok perempuan PKS untuk melaksanakan peran-peran baru mereka.

Menggunakan konsepsi Colin Hay⁶⁷ tentang hubungan antara struktur (partai) dengan agen (perempuan PKS), maka peran-peran yang dilakukan oleh kedua kubu dapat dijelaskan dengan diagram berikut:



Perempuan PKS dalam kelompok atau kubu dua merupakan aktor-aktor dengan tindakan-tindakan strategis. Mereka mampu melaksanakan peran-peran strategis untuk memperjuangkan perubahan identitas perempuan PKS pada umumnya. Tetapi peran mereka dibatasi oleh struktur partai yang juga memiliki

⁶⁶ Hasil wawancara dengan Mardani Ali Sera di Jakarta 12 Januari 2010.

⁶⁷ Colin Hay. *Op. Cit.* hal 202

pilihan-pilihan peran strategis (karena jika struktur tidak melaksanakan peran strategis maka mereka tidak akan mendapat dukungan dari kelompok perempuan pada kubu kedua ini). Sebagai aktor strategis, maka perempuan PKS pada kubu kedua telah melakukan tindakan-tindakan strategis untuk merubah identitas diri mereka dari sekedar obyek menjadi subyek dalam partai. Tindakan strategis mereka akhirnya merubah sebagian kebijakan PKS tentang perempuan, antara lain dengan membuat kebijakan kuota, serta merencanakan memberi porsi lebih besar kepada perempuan dalam struktur kepengurusan pusat PKS. Pada akhirnya PKS sebagai struktur yang berpengaruh kepada perempuan akan mengalami perubahan. Di lain pihak tindakan strategis perempuan juga memberi kesempatan perempuan untuk belajar bahwa jika mereka mau berjuang, mereka akan mendapatkan sebagian hasil yang diinginkan. Akhirnya struktur dan agen akan saling belajar untuk menghasilkan tindakan-tindakan strategis yang lebih baik dan saling memperkuat posisi masing-masing.

4.2 Perempuan PKS Sebagai *the Performative Subject*

Konsep *the performative subject* sebagai dimensi terpenting tesis *subject-in process* Moya Lloyd mengandung pengertian bahwa apa yang dimaksud status gender bukan tergantung pada ciri-ciri perempuan, tetapi tergantung dari apa yang dilakukan perempuan. Dengan demikian, jika kita mengkaji status perempuan dalam hubungan kekuasaan di PKS dalam proses pencalonan anggota DPR tergantung kemampuan perempuan melakukan tindakan untuk mempengaruhi proses pencalonan tersebut. Hal ini sesuai dengan pernyataan Judith Butker yang disadur oleh Moya Lloyd yang intinya adalah bahwa status gender bersifat *performative* yang berarti bahwa apa yang selama ini kita pahami sebagai inti sifat gender sebenarnya harus dibangun melalui satu rangkaian tindakan yang terus-menerus; melalui pembentukan tubuh dengan cara tertentu. Karena itu gender bukanlah merupakan ekspresi tentang siapa seseorang, tetapi adalah sesuatu yang dilakukan oleh seseorang⁶⁸

Sub bab ini secara khusus menggambarkan berbagai hal yang dilakukan oleh perempuan PKS untuk mempengaruhi proses pencalonan mereka menjadi anggota DPR. Pada awalnya rencananya sub bab ini hanya akan menggambarkan berbagai tindakan yang dilakukan perempuan PKS sampai dengan tersusunnya daftar calon tetap dari PKS beserta daerah pemilihannya, tetapi pada perkembangannya karena penelitian ini dilakukan setelah proses pemilihan selesai dilakukan, akhirnya para narasumber juga memberikan berbagai informasi tentang berbagai tindakan yang mereka lakukan untuk membuat mereka terpilih dalam pemilu. Karena itu sub bab ini akan mengkaji kedua hal tersebut sekaligus.

4.2.1 Sikap dan Tindakan Terhadap Pencalonan

4.2.1.1 Menerima Pencalonan Diri

Ketua Bidang Kewanitaan Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera menyatakan terdapat 3 (tiga) mekanisme besar pencalonan anggota DPR periode 2009-2014, yaitu:

⁶⁸ Moya Lloyd, *Op.cit.* hal. 25

1. Jaring Mutiara. Mekanisme ini merupakan pencalonan anggota DPR RI melalui penjaringan dari kalangan kader perempuan PKS. Sifat penjaringan adalah *bottom up*, dari tingkat organisasi perempuan paling rendah ke paling tinggi.
2. Penjaringan oleh struktur kepengurusan tingkat Provinsi dan kabupaten/Kota. Penjaringan ini adalah untuk menetapkan calon yang kemudian akan diusulkan ke DPTP melalui koordinator wilayah daerah (wilda). Dengan demikian usulan wilayah daerah sebenarnya juga bersifat *bottom up*, dari usulan tingkat organisasi lebih rendah (yaitu pengurus tingkat kabupaten/kota) ke pengurus tingkat provinsi, selanjutnya kepada koordinator wilayah daerah, dan ke DPTP.
3. Usulan oleh Bidang Kewanitaan DPP. Mekanisme ini dipilih antara lain untuk mencalonkan perempuan tokoh tapi non kader yang sudah mengikuti orientasi partai tingkat 1 agar memahami visi dan platform partai. Meski Bidang Kewanitaan bebas mencalonkan perempuan melalui mekanisme ini, Bidang Kewanitaan tetap harus meminta masukan dari kader dan struktur partai dari mana asal perempuan tokoh yang akan dicalonkan dalam pencalonan anggota DPR tersebut.

Segmen perempuan yang dapat direkrut melalui 3 (tiga) mekanisme pencalonan tersebut adalah dari DPP, Majelis Syura Pusat, Majelis Pertimbangan Pusat, Dewan Syariah Pusat dan dari usulan daerah. Menurut salah satu narasumber, Yoyoh Yusroh⁶⁹, porsi terbanyak segmen perempuan yang dicalonkan adalah dari pengurus Pusat PKS tanpa melalui penjaringan, tetapi melalui usulan Bidang Kewanitaan DPP dengan mempertimbangkan usulan dan pendapat dari kader di daerah pemilihan masing-masing calon.

Pada sub bab terdahulu telah dikaji bahwa dilihat dari peran-peran politik yang dilakukan para perempuan PKS, perempuan PKS dapat dibagi menjadi dua kubu besar, yaitu kubu yang melakukan peran tradisional yang menghambat perjuangan perempuan mencapai kesetaraan gender dan kubu yang melakukan peran-peran reformis yang mendukung upaya perempuan PKS mencapai kesetaraan gender. Sub bab ini mengkaji tindakan-tindakan yang dilakukan oleh perempuan PKS untuk mempengaruhi proses pencalonan mereka menjadi anggota DPR.

Terdapat dua pola jawaban narasumber berkenaan dengan apa yang mereka lakukan untuk mempengaruhi proses pencalonan mereka. Pola jawaban pertama adalah bahwa mereka tidak mengetahui mengapa dicalonkan pada sebuah daerah pemilihan dan mereka juga tidak melakukan upaya apapun untuk mempengaruhi proses pencalonan mereka. Pola yang kedua adalah mengetahui alasan penempatan pada daerah pemilihannya dan melakukan sesuatu untuk mempengaruhi proses pencalonan mereka menjadi anggota DPR.

Aan Rochana, seorang anggota Majelis Syura dan sekaligus anggota Majelis Pertimbangan Pusat PKS, menyatakan bahwa dia dicalonkan dari daerah pemilihan Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon dan Kabupaten Indramayu karena memang dia merupakan kader PKS yang sudah lama melakukan pembinaan untuk daerah tersebut. Aan Rochana menceritakan proses yang diikutinya untuk menjadi calon anggota DPR dari Partai Keadilan tahun 1999 sebagai berikut:

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Yoyoh Yusroh di Tangerang 4 April 2009.

Saya ikut Pemira. Tahun 1999 saya diajukan untuk caleg dari kabupaten/kota Cirebon dan Indramayu, waktu masih Partai Keadilan. Tapi waktu itu masih "membabat hutan", belum ada kader. Tahun 2004, saya waktu itu sudah di Majelis Pertimbangan Partai ternyata kader juga masih memilih saya, tapi ditempatkan oleh partai di DKI. Waktu itu saya sudah di Majelis Syuro juga. Na pas terpilih dari DKI II, Jakarta Barat dan Jakarta Selatan, kemudian proses itu di waktu itu dilanjutkan dengan pemilu raya. Dulu di Jakarta Selatan Barat itu nomor satu Doktor Hidayat, nomor dua saya. Sebelumnya sebenarnya suami saya, tapi suami saya mengundurkan diri karena nggak mungkin dua-duanya maju.⁷⁰

Untuk pemilu 2004-2009, Aan Rochana kembali dicalonkan oleh PKS untuk daerah pemilihan DKI Jakarta II melalui mekanisme penjaringan dari dewan pakar. Dia mengatakan:

Tahun 2004 kita yang sudah di DPR tidak boleh masuk lewat penjaringan, jadi kita dibuka dari dewan pakar. Di dewan pakar itu nanti ada perempuannya.. Proses pencalonannya kalau dari dewan pakar ditetapkannya oleh lembaga tinggi partai yang dijadikan sebagai dewan hariannya Majelis Syuro. Jadi Majelis Syuro itu punya dewan harian. Mereka yang menetapkan.⁷¹

Aan Rochana sudah ketiga kali mengikuti pemilu anggota DPR semenjak periode keanggotaan 1999-2004 (sewaktu masih dengan Partai Keadilan). Pada waktu itu dia sebenarnya tidak terpilih menjadi anggota DPR karena dalam istilahnya dia masih harus "membabat hutan" atau kondisi Partai Keadilan belum memiliki kader di Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, dan Kabupaten Indramayu. Tetapi dia menjadi anggota DPR melalui mekanisme PAW untuk periode kurang lebih hanya satu bulan menjelang masa jabatan anggota DPR periode 1999-2004 berakhir. Setelah itu, dia dicalonkan kembali menjadi anggota DPR dari PKS mewakili wilayah DKI Jakarta II yang meliputi Jakarta Barat dan Jakarta Selatan pada pemilu 2004-2009 dan terpilih menjadi anggota DPR. Dalam pencalonan periode 2004-2009 ini, Aan Rochana menempati posisi kedua setelah Hidayat Nurwachid. Semestinya posisi kedua ini ditempati oleh suami Aan Rochana, tetapi yang bersangkutan mengundurkan diri untuk memberi kesempatan kepada Aan Rochana mengikuti proses pencalonan anggota DPR RI periode 2004-2009. Pada pemilu 2009, Aan Rochana kembali dicalonkan untuk wilayah Jawa Barat 8 mewakili Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon dan Kabupaten Indramayu pada posisi calon kedua. Pada periode ini dia gagal menjadi anggota DPR.

Yoyoh Yusroh, seperti Aan Rochana berasal dari segmen Majelis Syura dan sekaligus anggota Majelis Pertimbangan Partai. Yoyoh Yusroh sudah menjadi anggota DPR sejak periode keanggotaan 1999-2004 (melalui mekanisme PAW menjabat sebagai anggota DPR selama 14 bulan) dan 2004-2009 (menjabat penuh 5 tahun). Berkenaan dengan pencalonannya menjadi anggota DPR periode 2009-2014, Yoyoh Yusroh menginformasikan bahwa dia sama sekali tidak mengetahui dan tidak memprediksi akan dicalonkan kembali sebab dia sudah dua kali menjadi

⁷⁰ Hasil wawancara dengan Aan Rochana di Jakarta 26 April 2009..

⁷¹ *Ibid.*

anggota DPR (pertama dari Partai Keadilan dan kedua dari Partai Keadilan Sejahtera). Dia menyatakan:

Pencalonan saya di..PKS ini sama sekali tidak saya prediksi, bahwa saya dicalonkan lagi, karena saya sudah periode ke dua, ketiga bahkan.untuk yang ini.⁷²

Sewaktu ditanyakan apakah apakah keputusan tentang daerah pemilihan dan nomor dalam daftar calon bagi dirinya merupakan usulan dari dirinya, merupakan usulan darinya, dia menyatakan:

Sama sekali tidak adadesakan pribadi. Sama sekali bukan keinginan pribadi, tapi kita diamanahkan karena PKS punya mekanisme pencalegan yang unik. Bukan caleg yang mendaftar tapi diberi amanah, diberi tugas. Termasuk di Banten ini juga saya taunya dari orang lain. Yang saya tau pertama..saya nomor urut dua. Saya bilang sama anak-anak "alhamdulillah, Umi sih nomor berapapun insya Allah siap berjuang di PKS. Tidak dapat nomerpun alhamdulillah kita bisa berjuang juga di PKS", karena berjuang di PKS bukan hanya melalui Legislatif, tapi kita bisa berdakwah di arena lain. Ternyata belakangan saya tau, dari teman juga, bahwa saya nomor urut satu, kemudian dapat surat tugas. Seperti itu saja, dapat surat keputusan DPP bahwa saya nomer urut satu di Banten 3, dapilnya Kabupaten dan Kota Tangerang. Jadi proses-proses saya nggak tau, itu keputusan murni partai yang tidak ada intervensi dari kita.⁷³

Pernyataannya jelas menunjukkan bahwa dia tidak mengetahui sama sekali alasan mengapa diletakkan pada Daerah Pemilihan Banten III yang meliputi Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang. Dia menyatakan tidak melakukan apapun untuk mempengaruhi keputusan tentang pelatakannya sebagai calon nomor satu pada Daerah Pemilihan 3 Banten. Dia bahkan menyatakan tidak mendaftar untuk menjadi calon karena pencalonan bukanlah keinginan pribadi, tetapi amanah partai. Dia bahkan mengetahui pencalonannya, termasuk Daerah Pemilihan dan nomornya dalam daftar calon dari orang lain. Dia hanya mendapat surat tugas tentang pencalonan dari Dewan Pengurus Pusat PKS. Dia tidak mengetahui sama sekali proses pencalonan anggota DPR, tidak melakukan intervensi atau usaha apapun untuk mempengaruhinya. Hal ini sebenarnya bertentangan dengan pendapatnya bahwa perempuan harus mengambil setiap hak, setiap kesempatan jika hal itu dianggap baik dan penting. Artinya, Yoyoh Yusroh sebenarnya melihat bahwa menjadi calon anggota DPR adalah hak yang baik dan penting. Hal ini dikemukakan Yoyoh Yusroh dalam pernyataannya berikut

Kalau berbicara hak jangan malu. Artinya kalau kita mendapatkan hak untuk meningkatkan kualitas, mendapatkan apa saja, harus kita ambil. Hak itu boleh diambil boleh tidak, tapi kalau kita anggap itu penting, harus kita ambil.⁷⁴

Seperti Aan Rochana dan Yoyoh Yusroh yang menyatakan tidak mengetahui mengapa dicalonkan di daerah pemilihan dan pada nomor urut

⁷² Hasil wawancara dengan Yoyoh Yusroh 4 April 2009 di Tangerang

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ *Ibid.*

tertentu dalam daftar calon dari PKS, Herlini Amran juga menyatakan tidak mengetahui mengapa dicalonkan sebagai calon nomor 1 (satu) dalam daerah pemilihannya. Meski demikian dia menduga bahwa hal itu disebabkan dia memang lahir di tempat tersebut sehingga menurutnya masuk klasifikasi sebagai "putra daerah". Dia menyatakan penempatan dalam nomor dan daerah pemilihan dalam proses pencalonan DPR oleh PKS tidak ada kaitannya dengan kepemilikan dana. Dia malah menyatakan bahwa sejak awal pencalonannya sudah menyatakan tidak memiliki uang untuk dana kampanye karena pada saat yang sama sedang membangun sebuah aula untuk kegiatan sosial keagamaan di daerahnya. Hal ini dikemukakan Herlini Amran dalam pernyataan berikut:

Saya ditempatkan di Kepri. Kita caleg itu nggak tau (mengapa ditempatkan pada daerah pemilihan dan nomor urut tertentu dalam daftar calon). Cuma mungkin karena saya lahir di Sungai Rangau, Riau. Saya lihat teman-teman mungkin ingin putra daerah, terus nyari siapa. Inilah uniknya PKS, tidak mencalonkan diri, ketika dicalonkan siap menerima, nggak ada yang minta-minta nomor satu, nomor dua, kami punya dana sekian, nggak ada, nggak bisa. Saya udah katakan ketika partai mencalegkan saya, saya nggak punya apa-apa. Jadi kalau ini, ya silakan lanjut, kalau nggak ya bagaimana lagi. Partai tidak minta sesuatu, mereka bantu saya.⁷⁵

Herlini Amran merasa bahwa proses pencalonannya menjadi anggota DPR sangat dipermudah oleh partai, bahkan dalam tahap berikutnya dia mendapat bantuan keuangan baik dari Pusat maupun dari struktur di daerah. Menurut Herlini Amran, proses pencalonan anggota DPR dari PKS yang sama sekali tidak diwarnai dengan "politik uang" mungkin hanya satu-satunya karena di partai lain kondisinya berbeda. Dia menyatakan hal itu dalam

Dari daerah juga sama (membantu). Jadi praktis sebenarnya kalau dari pribadi saya tidak terlalu (banyak mengeluarkan uang), hanya waktu dan tenaga serta pikiran. Inilah uniknya yang kadang-kadang tidak dimiliki partai lain.⁷⁶

Narasumber berikutnya, Husna Hidayati, menyatakan sebenarnya dia tidak ingin dicalonkan dalam pemilu, tetapi dia patuh pada putusan partai yang memintanya menjadi calon anggota DPR.⁷⁷ Dia juga menyatakan bahwa proses pencalonannya menjadi anggota DPR sangat tergantung pada hubungan baiknya dengan kader karena tanpa hubungan baik dengan kader maka seseorang tidak akan dapat masuk menjadi calon anggota DPR. Meski beberapa narasumber lain yang dari DPP, DSP, MPP, dan Majelis Syura menyatakan bahwa tidak ada proses pemilihan internal untuk menjadi calon anggota DPR karena pemilihan internal ini hanya untuk pencalonan anggota DPRD, tetapi Husna Hidayati menyatakan bahwa usulan dari daerah sesungguhnya berdasar pada pilihan para kader partai. Hal ini terlihat pada pernyataannya berikut⁷⁸:

⁷⁵ Hasil wawancara dengan Herlini Amran di Jakarta 26 April 2009

⁷⁶ *Ibid.*

⁷⁷ Hasil wawancara dengan Husna Hidayati di Bandarlampung 5 Mei 2009.

⁷⁸ *Ibid.*

Jadi siapapun yang bisa masuk dalam bursa pencalonan itu sebetulnya sangat tergantung juga dari kader. Jadi kalau saya bahasanya gini, kalau kita nggak baik-baik sama kader, tidak menunjukkan kinerja yang baik jangan harap kita bisa masuk. Kemudian kalau kemarin saya masuk itu sebetulnya sejak awal saya minta saya jangan dimasukkan. Cuma teman-teman di DPP waktu itu (memintanya menjadi calon anggota DPR).⁷⁹

Selanjutnya sewaktu diminta menceritakan proses pencalonannya menjadi anggota DPR dan dalam kaitan dengan aspirasi politiknya, Husna Hidayati berkata:

Kalau kita bicara soal, saya bisa sampai di sini, apakah saya minta atau mencari, tidak, saya nggak pernah minta. Saya mengikuti seperti arus air saja, seperti air yang mengalir, itu yang pertama. Yang kedua, kalau di PKS kita nggak biasa mengarah-arahkan diri kita. Kalau yang kemarin (pencalonan dirinya menjadi anggota DPR), rupanya banyak sms yang masuk ke beliau (suami). “Lihat itu Hantoni Hasan, Wakil Ketua DPRD Kota, serakah, dia nyalon, istrinya juga nyalon”. Bagaimanapun, kalau suami saya bilang, kalau kamu belum sekualitas Ustadzah Yoyoh Yusroh, belum saya lepas secara penuh untuk jadi anggota dewan. Secara pribadi saya nggak tega, abinya *all out* di DPW, beliau caleg nomer satu, saya..dan beliau juga ketua pemenang pemilu wilayah. Kayaknya nggak bijak kalau saya nggak mau kalah juga, mau keluar juga. Artinya kesadaran itu keluar dari saya. Bukan dia melarang.

Kalau dari DPP, kalau perempuan yang orang asli itu prioritasnya adalah diujung tombak. Ujung tombak kita di kabupaten/kota dan provinsi. Jadi nggak ke pusat. Justru dia lebih bagus Bergeraknya di situ dan keluarga lebih terjaga.⁸⁰

Husna Hidayati mengikuti proses pencalonan seperti air mengalir, hanya mengikuti arus yang sudah ditetapkan PKS, tidak melakukan upaya atau mengarahkan diri untuk menjadi calon anggota DPR. Informasi yang diberikan ini menunjukkan bahwa keengganannya melakukan upaya untuk mempengaruhi proses pencalonan adalah karena upaya demikian bukanlah karakter PKS. Selain itu juga karena suaminya sebenarnya keberatan dengan proses pencalonannya karena khawatir dinilai serakah karena pada waktu yang sama suami juga dicalonkan menjadi anggota DPRD Provinsi. Husna Hidayati juga menyatakan secara sukarela mengalah untuk pencalonan suaminya sehingga secara sukarela menerima posisi dirinya hanya sebagai *vote getter*, diletakkan pada posisi nomor 8 pada daftar calon dari PKS untuk daerah pemilihan Lampung 2 padahal dia adalah salah satu dari dua perempuan yang dapat terpilih secara langsung dalam pemilu raya internal untuk pencalonan anggota Majelis Syura Pusat. Hal ini berarti Husna Hidayati sangat populer di mata kader PKS di Lampung dan potensial terpilih dalam pemilu DPR. Dia juga tidak menunjukkan keberatan terhadap pandangan suaminya yang menganggapnya sebagai kader yang “belum sekelas Ustadzah Yoyoh Yusroh” sehingga belum rela melepaskannya menjadi anggota dewan.

⁷⁹ *Ibid.*

⁸⁰ *Ibid.*

Dilihat dari peran yang selama ini diemban dan berbagai tindakan politiknya selama ini, Husna Hidayati sebenarnya memenuhi kriteria subyek politiknya Moya Lloyd. Dia mampu menjadikan dirinya efektif didukung oleh konstituen. Tetapi ketidakmampuannya melakukan tawar-menawar dengan suami serta kecepatannya menyerah pada keinginan suami menunjukkan bahwa HH memiliki masalah dengan perjuangan kelompok perempuan untuk mendapatkan representasi politik yang lebih adil. Husna Hidayati tidak menganggap penting perjuangan untuk kuota, bahkan menurutnya tidak perlu.

4.2.1.2 *Screening* terhadap calon dan memenuhi kriteria

Untuk pemilu 2009-2014, Aan Rochana dicalonkan menjadi anggota DPR dari unsur Majelis Syura, meski pencalonannya juga melalui rekomendasi kader di daerah pemilihannya, yaitu Kabupaten dan Kota Cirebon serta Kabupaten Indramayu. Hal ini dinyatakan sebagai berikut:

Yang di majlis syuro bisa dimajukan untuk jadi anggota (DPR), sementara siapa yang akan dipilih oleh kaderpun sudah ada semacam karakteristik yang harus dimiliki oleh setiap calon yang dipilih oleh kader. Jadi sudah ada *fit and proper test* dari partai. Setelah dipilih kader nanti diranking. Sesuai dengan pilihan kader, yang terbanyak itulah yang nanti nomor satu, berkurang sedikit urutannya nomor dua, dan seterusnya.⁸¹

Dengan demikian sebagai anggota Majelis Pertimbangan Pusat, Aan Rochana ikut melakukan *screening* internal untuk melihat apakah persyaratan-persyaratan atau karakteristik yang diminta oleh PKS dipenuhi oleh calon anggota DPR. Semua informasi hasil *screening* ini akan dibuka kepada kader sebagai bekal bagi kader melakukan pemilihan calon.

Screening khusus juga harus dijalani oleh perempuan yang secara bersama-sama dengan suami dicalonkan menjadi anggota DPR. Husna Hidayati mengemukakan hal ini dalam penjelasannya berikut:

Kami bahas di Majelis Syuro tentang bagaimana wanita-wanita yang punya potensi suami-suaminya juga orang yang *all outdi* partai. Ada pertimbangan-pertimbangan, kondisi-kondisi tertentu, wilayah-wilayah tertentu, dimungkinkan diperbolehkan dengan *screening* khusus, artinya dengan pertimbangan-pertimbangan khusus kekaderan. Ada perjanjian-perjanjian khusus yang dibuat di atas kertas bermeterai. Kemudian *screening* khusus kaderisasi, kira-kira kalau yang seperti ini dilepas berbahaya enggak. Jangan sampai *dholim*, melepas saja tidak di kontrol. Di beberapa tempat, seperti ketika pak Anis Matta dicalonkan, istrinya juga dicalonkan. Waktu itu mau dimasukkan ke nomor jadi juga, tapi kemudian ada beberapa kader yang memprotes, nggak usahlah begitu. Karena kita juga melihat nanti katanya PKS ini KKN. Begitu kan? Itu juga menjadi pertimbangan.⁸²

. Dengan demikian, karena Husna Hidayati dicalonkan menjadi anggota DPR bersamaan dengan pencalonan suaminya menjadi anggota DPRD provinsi,

⁸¹ Hasil wawancara dengan Aan Rochana di Jakarta 26 April 2009.

⁸² Hasil wawancara dengan Husna Hidayati di Bandarlampung 5 Mei 2009.

maka kasus pencalonannya juga melalui *screening* khusus, melalui pembahasan di Majelis Syura agar tidak mendatangkan mudharat dan tidak mendholimi keluarganya. Sebenarnya dia tidak menghendaki pencalonannya, tetapi dia menyatakan bahwa teman-temannya di DPP menghendaki agar dia bersedia dicalonkan menjadi anggota DPR. Tapi sama dengan kasus Anis Matta dan istrinya yang disebutkannya, pada kenyataannya Husna Hidayati juga tidak diletakkan pada “nomor jadi” dan semata difungsikan sebagai *vote getter* di daerah pemilihannya. Terlihat bahwa pertimbangan utama pencalonannya adalah memenuhi target 30% pancalonan perempuan menjadi anggota DPR. Menurut salah seorang narasumber lain, Ucti, PKS menghendaki bahwa pemenuhan kuota 30% tidak dilakukan secara asal-asalan, artinya yang dicalonkan harus tetap dengan kualitas kekaderan yang baik. Karena itu sangat sulit bagi PKS menetapkan target kursi untuk perempuan lebih dari sekitar 10% target keseluruhan kursi PKS karena menurut narasumber lain “memang tidak ada” jumlah kader perempuan di PKS yang berkualitas yang melebihi target yang ditetapkan. Jadi target kursi perempuan sekitar 10% dari target keseluruhan kursi untuk PKS adalah target maksimal, tidak bisa lebih tinggi lagi pada saat pemilu 2009.

Berkenaan dengan pencalonan anggota DPR periode 2009-2014, Yoyoh Yusroh menyatakan banyaknya perempuan yang dicalonkan menjadi anggota DPR adalah karena terdapat cukup banyak perempuan PKS yang memenuhi kriteria untuk memenuhi target calon sebesar 30%. Mereka juga siap diletakkan di pada nomor berapa saja di daftar calon..

Saya melihat ini mengakomodir UU 30% perempuan. Perempuan-perempuan PKS juga layak untuk menyuarakan aspirasi rakyat. Perempuan PKS memang sudah lama bekerja di partai. Mereka juga punya kapasitas untuk itu, sehingga peluang ini kita padukan dengan kapasitas kader. Kita berharap perempuan bisa berkontribusi, bukan sekedar menjadi obyek pembangunan, tapi bagaimana bisa menjadi subyek pembangunan.. Saya melihat semua perempuan PKS itu siap diletakkan di nomor berapa saja. Saya tipe yang taat pada aturan partai. Komitmen saya terhadap partai itu tinggi karena saya merasa nyaman di partai itu. Jadi misalnya selama partai membutuhkan saya, saya siap. Sampai hari tua komitmen saya terhadap partai insya Allah tidak akan berubah. Kalau misalnya saya dianggap cukup untuk menjadi penasehat di partai, tidak perlu lagi aktif turun ke bawah, saya siap.. Kalaupun saya harus turun ke bawah lagi untuk sosialisasi, saya siap.⁸³

Yoyoh Yusroh menilai bahwa perempuan PKS layak menyuarakan aspirasi rakyat, melihat bahwa kesempatan untuk berpartisipasi di DPR ada tetapi belum diberi kesempatan untuk itu, perempuan PKS sudah lama bekerja dan terbukti memiliki kapasitas untuk itu, telah mengupayakan menjadi subyek pembangunan. Konsep layak menyuarakan aspirasi, melihat kesempatan untuk berpartisipasi ada, bekerja untuk partai, memiliki kapasitas, menjadi subyek pembangunan adalah bukti upaya perempuan PKS untuk dapat menjadi calon anggota DPR dari PKS. Inilah yang menurut Lloyd disebutnya sebagai ”*gender is*

⁸³ Hasil wawancara dengan Yoyoh Yusroh di Tangerang 4 April 2009..

what one does, not what one is".⁸⁴ Untuk memperoleh citra sebagai perempuan yang merupakan subyek politik, maka perempuan harus bisa membuktikan diri mampu melakukan banyak hal. Untuk layak dicalomkan menjadi anggota DPR, maka perempuan PKS sudah mampu membuktikan dapat melakukan banyak hal yaitu mampu menyuarakan aspirasi, mampu membuktikan adanya kesempatan untuk menang, sudah bekerja keras untuk partai, dan selama ini sudah melakukan banyak hal untuk masyarakat, bukan hanya untuk partai.

Pencalonan Yoyoh Yusroh yang sudah ketiga kali semenjak masa Partai Keadilan menunjukkan bahwa PKS memiliki kepercayaan yang sangat tinggi kepadanya. Hal yang membuatnya mendapat kepercayaan dari partai adalah karena dia tipe yang selalu taat pada aturan partai tetapi sekaligus bisa bersikap sangat kritis pada saat semestinya. Dia juga selalu terlibat dalam upaya memotivasi kader untuk bekerja lebih giat dan meningkatkan kualitas mereka (khususnya kader perempuan). Bersama elemen perempuan PKS yang lain dia juga melakukan upaya pemetaan kekuatan kader perempuan dan menempatkan mereka pada posisi yang sesuai, baik di bidang politik maupun bidang-bidang lain, termasuk ekonomi. Dia juga memberikan pelatihan-pelatihan kepada perempuan PKS.. Hal ini dinyatakan pada kalimat-kalimat berikut:

Kita memotivasi kader supaya lebih banyak bekerja, melalui pengajian, melalui pelatihan. Kita bikin pelatihan-pelatihan, dauroh-dauroh istilahnya, untuk berbagai *skill* yang bisa membuat mereka mampu untuk melakukan sesuatu yang lebih jauh. Kita memetakan potensi kader dengan data yang selalu di *update* sehingga bisa diarahkan sesuai potensinya. . Otimalisasi di semua bidang, melalui pengkaderan, melalui pelatihan, melalui daurah, termasuk pemberdayaan ekonomi Kita berharap dari seluruh lini kehidupan kita bisa .memiliki kader-kader yang mumpuni untuk masuk ke sana.⁸⁵

Kapasitas diri Yoyoh Yusroh yang menyebabkannya selalu mendapat kepercayaan PKS datang dari kemampuannya untuk selalu menjaga keefektifan dirinya dalam kehidupan politik. Hal ini terlihat dari pernyataannya berikut:

Selama ini kita selalu terlibat dalam semua keputusan PKS karena tidak ada keputusan yang tidak melibatkan perempuan, terutama di Majelis Kita juga bebas menyatakan sikap, memberikan aspirasi, begitu pula di MPP. Kalau misalnya ada lembaga tinggi yang..perempuan tidak ada di situ, nanti ada *hearing*, istilah kita itu *musytasar*. Misalnya saya di DPR membuat keputusan tentang UU Pornografi, yang berkaitan dengan pasal-pasal krusial saya minta masukan Dewan Syariah. Misalnya saya membuat UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, draftnya juga saya sampaikan kepada pimpinan-pimpinan lembaga di PKS. Sebagai Wakil Ketua Komisi VIII banyak juga kebijakan-kebijakan yang saya terlibat di dalamnya, sementara di partai sendiri kita selalu terlibat.⁸⁶

Meski aktif melakukan berbagai hal untuk menjaga keefektifan dirinya sebagai politisi, ketiadaan upaya atau tindakan apapun dalam rangka pencalonan

⁸⁴ Moya Lloyd. *Op. cit.* hal. 25.

⁸⁵ Hasil wawancara dengan Yoyoh Yusroh di Tangerang 4 April 2009..

⁸⁶ *Ibid.*

dirinya menjadi anggota DPR menunjukkan bahwa PKS memang menjadikan kepatuhan sepenuhnya kepada partai sebagai kriteria utama untuk dicalonkan menjadi anggota DPR. Seperti Aan Rochana, Yoyoh Yusroh juga sama sekali tidak melakukan upaya apapun untuk mempengaruhi proses pencalonan dirinya menjadi anggota DPR. Dari sisi konsep *the performative subjectnya* Lloyd, kemampuan kedua narasumber untuk menjadikan diri mereka subyek yang layak dicalonkan dalam pemilu bukan datang dari upaya aktif untuk mempengaruhi, tetapi justru dari upaya untuk patuh sepenuhnya tanpa kecuali, apapun perintah partai.

Sama dengan Aan Rochana dan Herlini Amran yang banyak melakukan peran politik, Herlini Amran menyatakan bahwa di PKS dia mempunyai peran cukup besar untuk mengusulkan dan menghasilkan Bayan (pedoman atau rambu-rambu) berkenaan dengan peran perempuan dalam kehidupan politik. Dia bahkan termasuk yang mengusulkan agar perempuan yang dicalonkan menjadi anggota DPR dan DPRD memperoleh ijin tertulis dari suami agar memiliki dukungan yang kuat. Herlini Amran menyatakan:

Kita tau bagaimana ajaran Islam itu jelas, tidak ada yang menghambat, bahkan mendukung kalau memang dia mampu. Kita di PKS berusaha untuk menerapkan nilai-nilai Islam seperti ini. Di DSP sendiripun begitu. Awalnya dulu DSP nggak ada perempuan, semuanya laki-laki, semua, dari awal. Kemudian kita diberi kesempatan. Kurang lebih 20 oranglah ya (anggota DSP), 2 orang perempuan.

Terkait dengan Bayan tentang wanita berpolitik, rambu-rambu wanita dalam berpolitik, saya memberikan masukan untuk minta dukungan suami, tapi di kontrol partai, artinya harus ada komitmen. Ketika misalnya istrinya memiliki (kualitas) SDM yang lebih kuat yang memang dibutuhkan oleh partai, kita perlu promosikan, itu membutuhkan dukungan, kita buat surat pernyataan mendukung. Jadi kalau istri dicalonkan, ada surat dari partai kepada suami setuju atau tidak. Artinya komitmennya penting bu⁸⁷

Permintaan persetujuan dari partai kepada para suami dianggap penting karena ijin tertulis merupakan jaminan bahwa suami mendukung pencalonan istri menjadi anggota DPR. Terlebih bagi perempuan yang mempunyai kualitas sumberdaya yang bagus dan dibutuhkan oleh partai serta perlu dipromosikan, ijin tersebut sangat penting karena kalau suami tidak mengizinkan maka partai akan mengalami kerugian. Bagi Herlini Amran sendiri, ijin tersebut tidak terlalu dibutuhkan karena suaminya mendukung sepenuhnya dan mempunyai komitmen terhadap proses pencalonannya menjadi anggota DPR.

Informasi yang disampaikan Herlini Amran menunjukkan bahwa dia tidak mengetahui secara persis pertimbangan PKS menjadikan dirinya calon nomor 1 (satu) untuk daerah pemilihannya. Dia menduga penyebabnya adalah karena dia merupakan penduduk asli atau putra daerah pada daerah pemilihannya. Meski demikian, pendapatnya perlu dikonfirmasi dengan data yang lain yang menunjukkan bahwa perempuan yang lain yang juga merupakan “putra daerah” tidak dicalonkan sebagai calon nomor satu pada daerah pemilihan masing-masing.

⁸⁷ Hasil wawancara dengan Herlini Amran di Jakarta 26 April 2009.

Jadi faktor putra daerah bukanlah pertimbangan utama peletakan pada nomor satu. Justru peran Herlini Amran di DSP, dan secara khusus dalam perannya membentuk berbagai bayan yang sesuai dengan nilai yang ingin dikembangkan oleh PKSlah yang menjadi pertimbangan pencalonannya tersebut.

Lebih lanjut Herlini Amran menyatakan tidak melakukan upaya apapun untuk mempengaruhi proses pencalonannya. Dia bahkan banyak mendapat bantuan dari partai (dari Pusat maupun Daerah) dalam proses pencalonannya. Herlini Amran yang merupakan satu diantara dua perempuan anggota DSP adalah tokoh PKS yang mempunyai peran penting dalam menentukan berbagai bayan atau rambu-rambu atau petunjuk bagi peran serta perempuan dalam kehidupan politik. Dia termasuk yang mengusulkan perlunya ijin dari suami untuk istri yang dicalonkan oleh partai menjadi anggota DPR/DPRD. Menurutnya, ijin ini diperlukan agar ada dukungan sepenuhnya untuk perempuan yang dicalonkan oleh partai pada pemilu legislatif.

4.2.1.3 Mencoba Mempengaruhi Pencalonan

Berbeda dengan keempat narasumber di muka, Kingkin Anidha, nara sumber berikutnya, yang mengetahui proses pencalonannya dari pemberitahuan Bidang Pembinaan Pemuda, menyatakan bahwa dia sebenarnya tidak merasa nyaman dengan daerah pemilihan tempat dia dicalonkan. Dia mencoba “menawar” agar diberikan daerah pemilihan yang lebih dekat dengan Jakarta. Tetapi ternyata keputusan tentang daerah pemilihan tersebut merupakan keputusan final yang tidak dapat dirubah lagi. Akhirnya dia menerima saja sebagai tugas, termasuk tugas yang dibebankan kepadanya untuk melakukan *back up* bagi calon lain pada daerah pemilihan tersebut. Kingkin Anidha menjelaskan berbagai hal tersebut dalam pernyataannya berikut:

Departemen Kepeloporan Pemuda di Bidang Pembinaan Pemuda mencoba kontak saya, mengatakan ”bu Kingkin sekarang dicalonkan untuk Lampung”. Saya bilang ”pak apa nggak kejauhan ke Lampung?” ”Ibu ada orang tua nggak di sana?” ”Ada” ”Ya sudah ibu ke sana aja” ”Boleh nawar nggak pak” ”Sudah, ibu di sana aja, mem *back up*”, katanya. Maunya saya nawar. Tapi ya sudah laksanakan saja. Jadi ketika saya coba untuk nawar ketika dicalonkan ternyata dia memutuskan “ibu bagusnyanya di sana saja, soalnya di tempat yang lain sudah ada calon lain. Kalau di DKI pasti ibu saingannya cukup berat, apalagi suaranya harus banyak. Ibu ke Lampung karena target Lampung itu untuk pusat dua kursi. Dan diharapkan ibu dapat”⁸⁸

Menurut Kingkin Anidha, keputusan pengurus Pusat untuk mencalonkannya untuk daerah Lampung II bukan hanya karena orang tuanya berasal dari wilayah tersebut serta sudah adanya calon lain untuk daerah yang lebih dekat, tetapi juga karena dia melakukan kesalahan institusional dengan menolak keputusan partai tentang koalisi pada pilkada di Kabupaten Tangerang. Dia menjadi satu-satunya yang menentang keputusan koalisi pilkada Kabupaten Tangerang, lebih jelas lagi dia adalah perempuan yang menentang keputusan tersebut. Menurutnya hal tersebut sebenarnya bukan sepenuhnya kesalahannya

⁸⁸ Hasil wawancara dengan Kingkin Anidha di Bandarlampung 23 Maret 2009

karena sebelumnya dia sudah mengkonsultasikan penolakan tersebut dengan kelompok perempuan di Majelis Syura. Tetap saja dia merasa "dibuang" ke wilayah yang jauh karena kesalahannya tersebut. Apalagi dia mendengar bahwa sebenarnya dia memperoleh suara terbanyak dalam pemilu raya internal untuk wilayah Banten. Pada akhirnya dia menganggapnya sebagai sebuah pembelajaran buat dirinya. Hal ini dinyatakannya sebagai berikut:

Memang ada kesalahan saya. Ada sebuah keputusan yang saya tidak terima, terkait dengan koalisi di Kabupaten Tangerang. Ketidaksetujuan saya terkait pemilihan bupati koalisi dengan kekuatan Atut bukan semata-mata karena pribadi saya, tapi saya telah membicarakannya di tim di syuro perempuan. Jadi tim itu mengatakan bahwa kita nggak bisa sekarang ini berkoalisi. Itulah yang saya bawa. Ternyata begitu saya bawa, semua yang lain menyetujui, hanya saya satu-satunya yang tidak menyetujui, dan saya satu-satunya perempuan. Itu barangkali kesalahan saya. Ya sudah diterima saja. Pembelajaran juga buat saya

Kalau logikanya begitu kita suara terbanyak di pemilu internal mestinya langsung ditempatkan di tempat itu. Tetapi kita ini di politik harus bisa diterima di semua tempat, bukan hanya oleh masyarakat, tapi juga oleh struktur, begitu kira-kira.⁸⁹

Penjelasan Kingkin Anidha tentang "dibuangnya" dirinya ke daerah pemilihan yang jauh dan tidak dikenal karena kesalahan dirinya menentang keputusan tentang koalisi dalam pemilihan kepala daerah di suatu daerah di Banten mengkonfirmasi bahwa PKS menjadikan kepatuhan sebagai kriteria utama pencalonan anggota DPR. Menggunakan kriteria Moya Lloyd tentang *the performative subject*, sebenarnya Kingkin Anidha telah melakukan upaya untuk menjadi subyek politik yang kompeten. Meski demikian ternyata dia gagal memahami kultur di PKS sehingga akhirnya tindakannya tersebut dinilai sebagai pembangkangan. Karena itu sebenarnya tindakan Kingkin Anidha bukanlah *a strategic action within a strategic context*.⁹⁰ Kingkin Anidha gagal memahami keinginan struktur yang berpengaruh terhadap dirinya (yaitu para pimpinan PKS) sehingga akhirnya dia melakukan tindakan yang tidak strategis untuk kepentingan pencalonan dirinya.

Selain menginformasikan upayanya untuk "mempermasalahkan" penempatan dirinya dalam daerah pemilihan yang tidak dikehendakinya, Kingkin Anidha menjelaskan bahwa Bidang Kewanitaan sudah melakukan upaya yang cukup signifikan untuk mempengaruhi proses pencalonan tersebut. Dia menyatakan:

Saya sendiri belum pernah *appeal* ke Majelis Syuro, tapi mbak Ledia sudah. Mbak Ledia *appeal* ke Majelis Syuro untuk beberapa nama, seperti untuk bu Yoyoh. Bu Yoyoh akhirnya jadi nomor satu di Banten. Kemudian bu Herlini Amran di Babel, Bangka Belitung. Saya kira ini prestasi bu Ledia. Saya bisa ceritakan di sini bahwa *appeal* bisa selesai. Memang untuk yang lainnya masih belum sempurna, belum bisa dikatakan sempurna.⁹¹

⁸⁹ *Ibid.*

⁹⁰ Colin Hay dalam David Marsh dan Gery Stiker. *Op. cit.* hal. 202

⁹¹ Hasil wawancara dengan Kingkin Anidha di Bandarlampung 23 Maret 2009.

Upaya tersebut adalah melakukan *appeal* ke Majelis Syura agar beberapa nama perempuan calon anggota DPR dari PKS diletakkan pada posisi nomor satu pada daerah pemilihannya. Menurut Kingkin Anidha, upaya tersebut memang membuahkan hasil, meski hanya untuk 2 (dua) daerah pemilihan, yaitu Banten dan Bangka Belitung. Dia menilai upaya ini belum sempurna karena belum dapat memperjuangkan perempuan lain untuk masuk pada nomor satu pada daerah pemilihan masing-masing. Posisi nomor satu dalam daftar calon memang sangat menguntungkan karena meski Mahkamah Konstitusi telah membuat keputusan tentang pemenang pemilu ditetapkan melalui mekanisme suara terbanyak, kader PKS sebagai pemilih utama bagi para calon dari PKS tetap cenderung mengikuti kebijakan partai dan akan memprioritaskan calon nomor satu.

Pernyataan-pernyataan Kingkin Anidha menunjukkan bahwa sebenarnya dia sudah berupaya mempengaruhi proses pencalonannya, tetapi upaya tersebut gagal menempatkannya pada daerah pemilihan yang menguntungkan. Dia diletakkan pada posisi nomor 2 (dua) dalam daftar calon untuk daerah pemilihan yang sebenarnya tidak diinginkannya.

Ketidakmampuan melakukan posisi tawar pada pencalonan juga dialami oleh Komarul Kuniyati. Komarul Kuniyati, seorang tokoh wanita dari daerah yang bukan merupakan kader PKS tapi direkrut menjadi calon anggota DPR dari PKS menyatakan bahwa dia “diajak” oleh salah satu tokoh PKS untuk bergabung dengan PKS setelah dia secara resmi keluar dari Golongan Karya. Komarul Kuniyati bukan hanya tokoh dari Golongan Karya yang pernah menjadi anggota DPRD Provinsi, tetapi juga seorang dosen dan tokoh wanita Islam di Provinsi Lampung. Sama dengan narasumber lain, Komarul Kuniyati menyatakan tidak mengetahui alasan peletakan dirinya dalam daerah pemilihan dan nomor yang ditetapkan untuk dirinya.

Barangkali masing-masing calon berbeda ya. Kalau saya mungkin karena kedekatan saya dengan pak Hakim. Jadi kira-kira dua tahun sebelum pemilu “unda, bunda kan sudah menyatakan resmi keluar dari Golkar” ”terus kenapa?” “ayo gabung saja dengan PKS” Ya selama ini kan insya Allah saya bergabung dalam arti visi misinya kan memang cocok dengan saya, lebih kental nuansa Islamnya. Terus dia nggak ngomong apa-apa. Tau-tau pas kurang setahun”dampingi saya di pusat” ”eh, maksudnya apa pak Hakim?” ”ya pokoknya saya berharap anda bisa lolos dalam pemilu ke depan ini. Saya kepingin anda mendampingi saya di pusat.”⁹²

Pencalonannya dalam pemilu 2009 adalah atas ajakan salah satu tokoh PKS Lampung yang merupakan anggota DPR RI periode 2004-2009, mantan anggota DPRD Lampung periode 1999-2004 dari Partai Keadilan dan juga mantan Ketua DPW PKS Lampung. Dengan demikian proses yang dilalui oleh KK adalah melalui rekomendasi “pak Hakim” kepada Wilayah Daerah Sumatra Bagian Selatan untuk diteruskan kepada DPTP melalui Bapilu PKS. Karena Komarul Kuniyati bukan kader PKS, maka menurut keterangan Ketua Bidang Kewanitaan DPP PKS KK harus mengikuti orientasi partai tingkat I terlebih dulu untuk mendapatkan pemahaman tentang visi dan platform PKS. Selain itu,

⁹² Hasil wawancara dengan Komarul Kuniyati di Bandarlampung 6 Mei 2009

menurut Ketua Bidang Kewanitaan, calon non kader juga harus mendapatkan persetujuan terlebih dulu dari kader dan struktur partai untuk wilayah yang diwakilinya, lebih khusus adalah daerah pemilihannya. Berikut adalah penjelasan Ketua Bidang Kewanitaan DPP PKS tentang siapa calon anggota DPR yang bisa direkrut dari unsur non kader, yaitu:

Mereka-mereka yang sudah mengikuti orientasi partai tingkat I untuk memahami visi dan *platform*. Mereka juga tetap dicalonkan dengan meminta masukan dari kader dan struktur (partai pada wilayah yang diwakili)⁹³

Sementara itu sewaktu ditanyakan mengapa dia tidak dicalonkan pada daerah pemilihan yang merupakan wilayah kerja utamanya sebagai tokoh dan sekaligus mantan Ketua BMOWI (Badan Musyawarah Organisasi Wanita Islam) di wilayah tersebut, Komarul Kuniyati menyatakan:

Yang laki-laki juga nggak bicara masakan aku yang perempuan *gelathakan*. Ya sudah. Takut terkesannya rewel (kalau mempersoalkan penempatan dalam DP) Prosesnya itu kami memang pada saat pengumuman dan pembagian SK nggak banyak bicara. Mekanismenya, tau-tau ada SK dari Pusat. Mungkin karena ruwet ya sudahlah⁹⁴

Komarul Kuniyati menyatakan bahwa dia tidak melakukan upaya untuk menanyakan, apalagi mempengaruhi peletakan namanya pada daerah pemilihan dan nomor calon yang kurang menguntungkan baginya karena dia merasa tidak pantas *gelathakan* atau melakukan upaya membongkar-bongkar, mencari-cari sementara para laki-laki saja tidak melakukannya. Dia takut terkesan rewel dan akhirnya menerima saja pencalonan dirinya pada daerah pemilihan tersebut. Dia juga tidak menanyakan apapun pada saat penyerahan SK pencalonan. Dia hanya mengetahui bahwa pencalonan tersebut ruwet dan diatur oleh “Pusat”.

Selanjutnya Komarul Kuniyati menjelaskan bahwa memang tidak hadir dalam pertemuan-pertemuan yang melakukan pembahasan pencalonan anggota DPR, baik oleh kader maupun struktur partai di daerahnya. Alasannya adalah dia bukan kader dan tidak diundang. Seandainya diundang dia ingin menyampaikan uneg-uneg berkenaan dengan pencalonannya tersebut. Akhirnya dia hanya menyampaikannya kepada “pak Hakim” yang telah merekomendasikan namanya. Dia mengatakan:

Saya mau hadir, saya ini bukan kader. Kalau nggak diundang saya kira nggak pas saya hadir. Kalau saya diundang barangkali pengen saya mengemukakan uneg-uneg. Saya paling ngemukakan uneg-uneg dengan pak Hakim⁹⁵

4.2.1.4 Tidak bebas bicara dan terkejut dengan pencalonan

Berbeda dengan perempuan narasumber dari unsur kader dari pengurus Pusat yang rata-rata menyatakan adanya kebebasan bagi perempuan untuk ikut berbicara dalam berbagai forum, Komarul Kuniyati melihat bahwa di daerahnya perempuan PKS kurang diberi kesempatan berbicara. Dia mengatakan:

⁹³ Hasil wawancara dengan Ledia Hanifa melalui pesan pendek telepon seluler 20 Januari 2010

⁹⁴ Hasil wawancara dengan Komarul Kuniyati di Bandarlampung 5 Mei 2009

⁹⁵ *Ibid.*

Enggak (apakah perempuan diberi kesempatan bicara masalah pencalonan menjadi anggota DPR) karena mungkin ada wadah sendiri DPP perempuan. Setau saya, sekian kali saya mengikutikurang diberikan kesempatan oleh si partai, oleh kebijakan partai untuk perempuan ikut berbicara.⁹⁶

Dilihat dari berbagai penjelasan tentang hal-hal yang dilakukan oleh Komarul Kuniyati dalam proses pencalonannya menjadi anggota DPR dari PKS, Dia sebenarnya sudah memahami kultur politik di PKS yang kental nuansa Islamnya dan menghendaki kepatuhan total dari kader atau siapa saja yang direkrut PKS menjadi calon anggota DPR. Meskipun demikian Komarul Kuniyati akhirnya menerima saja dijadikan *vote getter* karena hanya diletakkan pada posisi tidak menguntungkan dalam daftar calon dan juga di daerah pemilihan yang selama ini tidak menjadi fokus garapnya sebagai tokoh wanita Islam di Lampung.

Meski sadar dijadikan *vote getter*, Komarul Kuniyati tidak menunjukkan kekecawaan yang berlebihan dengan mengatakan "*nek ora nyanthol yo wis* (kalau nggak masuk ya sudah), hitung-hitung ikut membesarkan partai". Dia juga tetap mempunyai harapan bahwa ke depan PKS tetap merekrut calon dari unsur non kader dengan mengatakan: "ke depan maunya PKS tetap merekrut calon dari unsur non kader, tetapi jangan sekedar dijadikan *vote getter*".

Narasumber lain yang bukan hanya tidak berusaha mempengaruhi proses pencalonannya tetapi justru sangat terkejut dengan pencalonannya adalah Uchti, seorang kader PKS yang sudah sangat lama bergabung dengan PKS (bahkan semenjak Partai Keadilan). Berkenaan dengan pencalonan dirinya menjadi anggota DPR, Uchti menyatakan bahwa dia sebenarnya awalnya tidak diproyeksikan untuk menjadi calon anggota DPR karena sudah diproyeksikan untuk jalur karir yang berbeda. Dia akhirnya dicalonkan menjadi anggota DPR karena ada desakan kuat dari wilayah daerah agar dia dicalonkan dalam pemilu serta PKS sendiri memiliki target mencapai kuota 30% perempuan dalam pencalonan DPR. Uchti menginformasikan bahwa meski konsep *samaah wa thoa* (saya mendengar dan saya taat) diyakini setiap individu di PKS, tetapi daerah tetap memiliki peluang untuk menolak kehendak Pusat jika itu mempersulit pengurus dan kader di daerah. Wilayah Daerah asalnya mendesak Pusat agar mencalonkan Uchti dalam pemilu 2009 karena Uchti memiliki sejarah panjang pengembangan PK dan PKS di wilayah daerah tersebut, semenjak masa belum ada kader sampai dengan tahap perkembangan yang sangat maju pada saat ini. Karena itu pengurus wilayah daerahnya mendesak pengurus pusat, dan akhirnya Uchti menerima dengan semangat *samaah wa thoa* tadi.

Saya termasuk yang sangat tertegun ketika keputusan untuk maju menjadi caleg itu sampai ke saya, tertegun sekali karena saya sedang punya skenario yang sangat berbeda. Tadinya saya berpikir saya ada sebuah arahan lain, saya diproyeksikan di tempat lain. Tapi kemudian ada pengejaran kuota 30%. Jadi dalam konteks saya, ada desakan dari wilda (Banten, Jakarta, Jawa Barat, disingkat Wilda Banjabar) Saya katakan ada satu *evidence* bahwa daerah punya wewenang, punya peran, punya ruang, untuk mengartikulasikan, mengatakan sesuatu, termasuk saya. Saya bisa

⁹⁶ *Ibid.*

menjadi contoh untuk mengatakan bahwa Wilda ngotot sekali, padahal DPP mengatakan “tidak” karena saya diproyeksikan (untuk karir) lain, saya mau dikokohkan di X. Jadi sudah diproyeksikan⁹⁷

Ucti menjelaskan bahwa PKS sudah mempunyai pedoman nominasi, seleksi dan promosi yang jelas untuk tiap kader PKS guna ditempatkan pada posisi-posisi yang paling tepat dan paling strategis untuk kepentingan pengembangan dakwah PKS di masa datang. Tetapi Ucti menjelaskan bahwa proses *head hunting* atau pencarian bakat atau figur yang dilaksanakan tidak selalu berlangsung formal melalui institusi dan prosedur yang baku dan kaku. Ada proses dan mekanisme yang informal dilakukan untuk mencari figur yang tepat.

Sebetulnya mengacu kepada AD ART, mengacu kepada berbagai pedoman, atau panduan tadi, promosi, seleksi, nominasi dan sebagainya, sudah ada *track record* untuk mengatakan seseorang kemudian sepatutnya berada di sini dengan kapasitasnya. Tetapi pada saat di lapangan, memang ada proses *searching* sedemikian rupa, ada proses *head hunting* yang tidak selalu berlangsung dengan formal..⁹⁸

Jika konsep *the performative subject* mensyaratkan kemampuan perempuan melakukan berbagai hal untuk menciptakan citra diri sebagai subyek politik yang kompeten, Ucti sebenarnya memenuhi kriteria tersebut. Ucti dijadikan calon anggota DPR karena kiprahnya selama ini di PKS, baik di Pusat maupun di wilayah daerahnya. Faktor lain adalah juga karena Ucti telah menunjukkan kemampuannya mencapai posisi strategis di tempat kerjanya sehingga diproyeksikan untuk dimantapkan ke posisi yang lebih strategis lagi. Sewaktu ditanyakan siapa sebenarnya yang memiliki wewenang sehingga jalur karir politik untuknya begitu mudah dirubah, Ucti menjawab tidak terdapat pola baku. Bisa DPP, tetapi bisa juga dari DPD atau DPC. Dia memberikan contoh bahwa dirinya pernah “turun jabatan” menjadi pengurus DPD setelah sebelumnya menjadi pengurus DPP. Ucti menyatakan bahwa penurunan karir politik ini tidak karena kesalahan atau hukuman, tapi karena struktur kepengurusan partai di bawah mendesak pengurus DPP agar dirinya diijinkan kembali menjadi pengurus DPD. Dalam konteks partai lain, hal ini dapat diinterpretasikan sebagai hukuman, tapi di PKS tidak demikian. Berikut adalah penjelasan Ucti tentang hal tersebut:

Siapa penentunya? Ada dua. Bisa wilayah untuk mengatakan siapa yang dianggap layak untuk diajukan.. Bisa juga dari DPP dengan melihat *track record*. Kadang-kadang nggak ada juga pola yang sangat baku. Ada pendekatan-pendekatan formal yang mencoba untuk didekati, tapi bisa kemudian secara kasusistik terjadi hal yang unik-unik..⁹⁹

Lebih lanjut Ucti menyatakan bahwa sebenarnya perempuan sudah diposisikan pada tempat-tempat yang cukup untuk mengejar target 5 (lima) kali peningkatan perolehan kursi, dari sebelumnya 3 (tiga) menjadi sekitar 15 orang. Dengan kata lain target tersebut adalah merupakan peningkatan sebesar 400% dari

⁹⁷ Hasil wawancara dengan Ucti di Jakarta 10 Maret 2009.

⁹⁸ *Ibid.*

⁹⁹ *Ibid.*

kondisi semula. Tetapi keputusan MK tentang penetapan pemenang kursi berdasar suara terbanyak membuat semua target tersebut menjadi sulit direalisasikan.

Memang targetnya, hitung-hitungan, perempuan sendiri sudah diposisikan pada tempat-tempat yang cukup untuk mengejar target 5 kali dari sekarang. Kemarin 3 sekarang sekitar 15. Naiknya berarti 400%, Tadinya itu. Begitu muncul keputusan MK ini kemudian menjadi sesuatu (yang sulit direalisasikan).¹⁰⁰

Menurut Ucti, bukan hanya perempuan yang mengalami masalah dengan keputusan MK karena target perolehan kursi menjadi sulit direalisasikan. Tetapi beberapa Pengurus Pusat PKS yang mempunyai peran besar mengurus partai dan selama ini melakukan peran-peran penting dibalik layar kemungkinan besar tidak akan terpilih karena tidak memiliki waktu untuk berkomunikasi langsung dengan masyarakat. Sementara ada tokoh PKS yang memang sangat populer di mata kader dan masyarakat tetapi tidak merasa cocok dengan dunia politik di DPR malah mempunyai kemungkinan besar sekali untuk terpilih. Hal-hal ini merupakan fenomena yang penting untuk dicatat untuk menjelaskan masalah target perolehan kursi untuk perempuan dan fenomena-fenomena yang berkaitan. Hal-hal ini dijelaskan Ucti sebagai berikut:

Tidak mudahnya target perempuan terpenuhi dari semula, sebenarnya bukan cuma secara umum perempuan. Justru nama-nama yang bukan perempuan, yang ditargetkan untuk jadipun belum tentu jadi. Misalnya ketua MPP, Suharna, beliau konseptor, berada di belakang pembuatan *platform* dan sebagainya. Tetapi dia sama sekali tidak populer. Pada mulanya kita memang menginginkan orang-orang ini yang akan punya kontribusi besar di masa mendatang dengan buah pikiran dan sebagainya untuk pengelolaan negara. Tapi masalahnya orang-orang yang tokoh besar, pemimpin besar di partai, habis waktunya untuk membangun partai, menegakkan pilar-pilar, waktu untuk berinteraksi langsung ke masyarakat minim. Di sisi lain, ada seorang ustad yang *muhasabahnya*, kecenderungannya untuk kehidupan ruhiahnya itu tinggi sekali. Dia merasa dunia politik bukan dunianya. Beliau senang sekali berada di posisi lima di dapil Jawa Barat 1, ikhlas menjadi *vote getter* untuk memenangkan nomer satu, dua dan sebagainya. Beliau itu ustad yang sangat populer di daerah Bandung., amat besar kemungkinan terpilih. Itu sangat meresahkan beliau.¹⁰¹

Dengan penjelasannya tersebut Ucti ingin menunjukkan bahwa meski partai sudah menyusun target siapa yang benar-benar diinginkan menjadi anggota DPR, tetapi partai tidak memiliki kontrol siapa yang benar-benar akan menjadi anggota DPR. Meski demikian, pernyataan Ucti ini dapat dinilai sebagai pernyataan yang menunjukkan bahwa Ucti kurang memahami pola pilih konstituen utama PKS yang menunjukkan bahwa mereka adalah konstituen yang “patuh pada kehendak partai”. Hal ini akan dibahas lebih lanjut pada sub bab

¹⁰⁰ *Ibid.*

¹⁰¹ *Ibid.*

tentang tindakan–tindakan yang dilakukan oleh perempuan PKS untuk menghadapi pemilihan umum dan hasil-hasilnya.

4.2.1.5 Mempersiapkan Diri untuk Karir Politik

Sebagai seorang kader partai yang dicalonkan menjadi anggota DPR, Ucti memiliki sejarah panjang di PKS yang menunjukkan karir politiknya. Berikut adalah gambarnya tentang apa saja yang telah dilakukannya untuk partai sehingga dia menjadi individu yang sangat diinginkan oleh pengurus PKS wilayah Daerah Jawa Barat untuk menjadi calon anggota DPR dari wilayah tersebut.

Saya bergabung di Majelis Syura diposisikan sebagai anggota dari *hubaro*, bukan yang terpilih tetapi melengkapi dari sisi ketokohan, kepakaran. Saya waktu itu bersama Herlini Amran berdua masuk bergabung ke sana Kemudian dilakukan pemilihan raya di seluruh struktur menentukan pilihan siapa yang dianggap dapat mewakili mereka untuk bergabung di Majelis Syuro. Saya adalah satu-satunya perempuan yang terpilih di seluruh Indonesia, tidak ada yang lain yang murni terpilih melalui pemira, saya satu-satunya perempuan. Kalau nggak salah saya urutan 8 dari 9 atau sembilan. Tapi kemudian yang akhirnya masuk menjadi anggota Majelis Syuro pertama kali di periode baru itu menjadi dua, saya dengan Husna dari Lampung karena yang tepat di atas Husna yang pilihan suaranya lebih banyak berhalangan tetap. Jadi posisi yang di bawahnya jadi naik. Saya bersyukur sekali karena kalau tidak saya sendiri satu-satunya perempuan di sana.¹⁰²

Terpilihnya dirinya menjadi anggota Majelis Syura Pusat melalui pemilihan oleh kader partai menunjukkan kualitas dan kapasitas diri yang baik karena hal ini cukup sulit dalam sebuah partai yang mempunyai kader yang menurut beberapa narasumber penelitian ini masih banyak yang konservatif dalam melihat peran politik perempuan. Seperti teori Pipa Noris dan Joni Lovenduski¹⁰³ menggambarkan, resistensi terhadap peran politik perempuan cenderung lebih kuat pada tingkat akar rumput dibanding pada tingkat elit. Terpilihnya Ucti dalam pemira yang pemilihnya adalah kader pada tingkat akar rumput partai merupakan sebuah capaian fenomenal, sebuah prestasi sangat baik. Pencalonan Ucti pada pemilu yang mengadopsi sistem pemilu semi distrik sebenarnya potensial menguntungkan PKS karena Ucti terpilih dalam pemira yang sistimnya juga semi distrik dimana kader PKS memilih beberapa anggota Majelis Syura. Selain itu Ucti juga memiliki posisi sangat kuat di antara kader PKS perempuan di wilayah daerahnya karena dia pernah memimpin Bidang Kewanitaan DPW PKS di wilayah itu dalam jangka waktu cukup lama.

Ucti adalah kader PKS yang efektif. Hal ini terlihat dari rekam jejak karirnya di PK dan PKS sebagaimana digambarkan Ucti. Efektivitas Ucti sebagai kader partai juga terlihat dari dijadikannya Ucti sebagai calon anggota DPR pada posisi yang cukup baik dari daerah pemilihan yang diperkirakan akan memenangkan kursi. Hasil wawancara menunjukkan bahwa Ucti memahami pencalonannya adalah merupakan hasil *head hunting* yang tidak berlangsung formal. Hal ini menunjukkan penghargaan khusus PKS kepadanya karena pada

¹⁰² *Ibid.*

¹⁰³ Pippa Noris dan Joni Lovenduski. Op cit

umumnya perekrutan menjadi calon anggota DPR mengikuti pola formal dan baku. Kapasitas Uchti menjadikan dirinya sebagai *the performative subject* yang cukup efektif terlihat dari kemampuannya untuk membuka berbagai kesempatan karir bagi dirinya sendiri. Hal ini berbeda dengan perempuan PKS pada kubu tradisional yang pada umumnya mengatakan tidak memiliki aspirasi karir politik apapun. Uchti dengan jelas mengatakan bahwa dia “sudah diproyeksikan untuk jalur karir yang lain di tempat lain untuk memperluas cakrawala dakwah bagi PKS”¹⁰⁴. Dia juga dengan mudah melakukan adaptasi mental dan tindakan-tindakan sesuai dengan berbagai pilihan karir tersebut.

Berbeda dengan Uchti yang sama sekali tidak menyangka akan dicalonkan menjadi anggota DPR, Sitaresmi sudah lama mengetahui pencalonannya menjadi anggota DPR. Sitaresmi menggambarkan proses pencalonan anggota DPR yang pernah diikutinya, semenjak masih bersama Partai Keadilan sampai dengan pencalonan pemilu 2009. Pertama mengikuti pencalonan anggota DPR, dia dicalonkan oleh Partai Keadilan untuk Daerah Pemilihan Surabaya sebagai calon nomor 1. Dengan *stembus accord*, Partai Keadilan mendapat satu kursi, tetapi berdasar syura atau musyawarah yang akhirnya “berangkat ke Senayan” bukan Sitaresmi melainkan calon lain yang disebutnya sebagai “mas Hadi”.. Selanjutnya pada pemilu 2004 sebenarnya awalnya Sitaresmi dicalonkan untuk Daerah Pemilihan Malang. Tetapi karena banyak dipertanyakan statusnya sebagai “bukan putra daerah”, dia mengundurkan diri dari pencalonan di Daerah Pemilihan Malang dan menjadi “penggembira” untuk Daerah Pemilihan Jawa Barat 5 yang meliputi Kota Depok, Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi sebagai calon nomor 4. Pada pemilihan ini PKS memperoleh 3 (tiga) kursi di Daerah Pemilihan Jawa Barat 5, dan semua calon di atasnya akhirnya menjadi anggota DPR. Pada pemilu 2009, Sitaresmi kembali dicalonkan untuk Daerah Pemilihan yang sama, hanya dikurangi Kabupaten Bekasi.

Menjadi caleg dimulai sejak 1999, menjadi caleg nomor 1 Dapil Surabaya. Waktu itu Jawa Timur dapat 1, *stembus accord*. Saya di Surabaya tertinggi, tapi kita syuro, kemudian yang berangkat ke Senayan Mas Hadi. Tahun 2004 saya dicalonkan lagi, sebenarnya caleg dapil Malang, saya caleg nomor 1. Cuma saya yang mengundurkan diri karena saya merasa terganggu oleh pertanyaan “apakah anda putra daerah?”. Saya mulai perjalanan dakwah ke Jawa Timur sejak mulai 1980-an Sehingga pengurus berpikir “mbak Sita berakar”. Tapi saya sendiri berpikir, saya bukan putra daerah, saya tidak berdomisili di sana, jadi saya mengundurkan diri. Niatnya jadi penggembira saja di Depok, tiba-tiba diminta jadi caleg nomor 4 untuk Kota Depok, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi. Dulu namanya Jabar 5 kalau nggak salah. Dapat 3 kursi di atas saya. Saya ke 4. (Tahun) 2004 dapat 3 kursi, bu Yoyoh, pak Yusni, Naziullah. Sekarang 2009 saya sebenarnya dapilnya sama, cuma beda Jabar 6 dan dikurangi Kabupaten Bekasi. Nomor 3, satu dua di atas saya laki-laki. Yang nomor 1 Mahfud Abdurrahman, bendahara umum. Yang kedua, pak Musholli, Drs Musholli, menko kesranya kita.¹⁰⁵

¹⁰⁴ Hasil wawancara dengan Uchti di Jakarta 10 Maret 2009.

¹⁰⁵ Hasil wawancara dengan Sitaresmi di Jakarta 25 Februari 2009.

Sitairesmi selanjutnya bercerita bahwa proses penetapan pencalonan sepenuhnya menjadi wewenang DPTP dan tidak ada pemilihan umum internal atau yang lebih dikenal sebagai pemilihan raya. Mekanisme pencalonan anggota DPR menurut Sitaresmi hanya ada dua, yaitu dicalonkan oleh DPP atau wilda-wilda (wilayah daerah). Sedangkan kewenangan penetapannya ada pada DPTP. Meski kewenangan penetapan calon anggota DPR ada pada DPTP, tetapi menurutnya korwil atau koordinator wilayah yang paling menentukan apakah akan diterima atau tidak pencalonan orang-orang untuk wilayah daerah bersangkutan. Dia menceritakan hal ini sebagai berikut:

Nggak ada (PUI untuk calon DPR) Jadi itu lebih karena..karena dua hal. Apakah DPP yang mencalonkan, atau kemudian dari DPW, dari wilda, di partai lain disebut korwil. Tapi keputusannya saya lihat lebih dominan di wilda, artinya walaupun DPP mengajukan, korwil yang menentukan. Seperti Uchti, dia nggak dicalonkan dari DPP, tapi alasannya itu DPW meminta. Jadi.. dia agak terlambat (mengetahui pencalonannya), saya sudah lama (diberi tau), dia belakangan. Saya saja surprise, dia surprise karena waktu dari DPP itu nama dia nggak ada. Ustad Makmur Hasanuddin wilda Banjabar, Banten, Jawa Barat, Jakarta minta mbak T jadi nomor urut dua karena kansnya dua untuk Bandung. Permintaan dari Jawa Barat berdasarkan *track record*.¹⁰⁶

Kasus terpilihnya Uchti menjadi calon anggota DPR menurut Sitaresmi menunjukkan bahwa daerah memiliki peran penting dalam penetapan calon. Sitaresmi tidak mengetahui alasan mengapa diletakkan sebagai calon nomor tiga untuk Daerah Pemilihan Kota Depok dan Kota Bekasi. Sitaresmi bahkan menyatakan bahwa dia tidak menandatangani surat pernyataan kesediaan untuk dicalonkan menjadi anggota DPR, begitu juga dengan teman-temannya di Departemen Kaderisasi. Meski tidak menandatangani surat kesediaan ternyata nama-nama mereka, termasuk nama Sitaresmi, masuk dalam daftar calon. Sitaresmi tidak menandatangani surat kesediaan menjadi calon karena berpikir untuk menyelesaikan studi S3 dulu. Menurutnya, dimana namanya ditempatkan dan pada posisi nomor berapa dia sama sekali tidak ikut-ikutan (mempengaruhi keputusan tentang itu). Dia hanya mengetahui bahwa itu adalah usulan daerah dengan keputusan akhir di DPTP. Sitaresmi menyatakan:

Saya nggak tau (mengapa diletakkan pada nomor 3 untuk Depok dan Bekasi) Saya pernah diminta untuk menandatangani kesediaan menjadi caleg, dari tahun 2008 saya diminta menandatangani, tapi saya nggak tanda tangani karena saya berpikir ingin menyelesaikan studi S3. Ditematkannya dimana-dimana kita juga nggak pernah ikut-ikutan. Artinya, itu selain masukan dari bawah, dari wilda-wilda yang sangat berperan, keputusan akhir itu ada di DPTP.

Saya diletakkan di Depok Bekasi saja saya syukuri, alhamdulillah saya ditempatkan di dekat. Jadi penempatannya saja saya tidak tau, tapi bersukur diuntungkan, tinggal melanjutkan.¹⁰⁷

¹⁰⁶ *Ibid.*

¹⁰⁷ *Ibid.*

Apapun proses penetapannya, Sitaresmi merasa diuntungkan dengan Daerah Pemilihan dan posisinya dalam daftar calon di Daerah Pemilihannya. Hal ini dikarenakan Daerah Pemilihannya sangat dekat, merupakan daerah kantong suara PKS, serta diprediksikan mendapat kursi 3 (tiga) sehingga dia ditargetkan terpilih, serta tinggal melanjutkan apa yang sudah dimulainya pada pemilu 2004 karena dicalonkan pada daerah pemilihan yang sama dengan pemilu 2004.. Dibanding dengan teman-temannya yang ditaruh pada daerah pemilihan yang sangat jauh, dia sungguh-sungguh merasa beruntung.

Sitairesmi lebih lanjut menyatakan bahwa peletakan dirinya di daerah kantong suara PKS merupakan bentuk apresiasi terhadap dirinya. Dia juga menyatakan bahwa seandainya partai membantu calon dengan nomor urut 1 (satu) adalah sesuatu yang wajar, sebagai bentuk apresiasi terhadap kinerja yang selama ini telah ditunjukkan oleh yang bersangkutan. Sitaresmi menyatakan:

Ya syukur itu daerah kantong PKS. Yang kedua selama ini kiprah dakwah saya lebih banyak di dua daerah itu. Tentu saja saya merasakan itu sebagai sesuatu yang baik. Saya merasa sebagai apresiasi. Bahkan saya sendiri bisa menerima seandainyaapun struktur itu mengarahkan sebaiknya nomor satu dibantu. Menurut saya itu juga wajar karena dari segi kerja mereka, kinerja mereka di partai, atau jasa mereka di partai, posisi nomor satu dua itu cerminan.¹⁰⁸

Dalam pandangan Sitaresmi, posisi calon pada nomor satu itu merupakan cerminan penghargaan terhadap calon yang bersangkutan oleh partai karena pengabdian yang bersangkutan juga sudah besar. Dengan meletakkan posisi pada nomor satu, maka struktur partai sebenarnya mengharapkan para pemilih untuk memilih calon dengan nomor tersebut. Pada partai dengan disiplin kader yang tinggi seperti PKS, peletakan pada nomor calon jelas merupakan perintah partai agar para kader memilih nomor tersebut.

Meski berbeda sikap terhadap pencalonan menjadi anggota DPR, Sitaresmi adalah sama dengan Uchti dalam hal keterbukaannya menceritakan pilihan karir politik yang diinginkannya.

Kadang-kadang kita bercanda. Uchti berpikir dia menteri kesehatan, saya berpikir menteri pemberdayaan perempuan. Tapi kalau itu kita omongin itu dianggap kok orientasinya jabatan, masih begitu. Ya dua itu, apakah kita sebagai aleg (anggota legislatif) ataukah, saya berfikir saya mungkin dapat lebih berperan banyak seandainya jadi menteri pemberdayaan perempuan. Kalau Uchti merasa lebih banyak berbuat sesuai dengan bidang ilmunya, kesehatan. Jadi dari dulu apa yang kami jalani sudah menjadi cita-cita dari kecil, karena ibu kami itu seorang yang sangat peduli pada rakyat. Dari dulu beliau selalu bilang suatu hari kalian harus berbuat untuk rakyat, cuma dulu kita tidak tau berbuat untuk rakyat itu. seperti apa dan lewat apa¹⁰⁹

Menjalani karir politik di partai pada saat ini dan mungkin di eksekutif nantinya adalah pilihan sadar Sitaresmi. Dia membuat banyak persiapan untuk itu, antara lain studi sampai jenjang S3, menjadi konsultan untuk masalah yang

¹⁰⁸ *Ibid.*

¹⁰⁹ *Ibid.*

berkaitan dengan bidang ilmu yang ditekuninya. Tindakannya “menggugat fiqih tradisional” tentang perempuan sewaktu dia dilarang berbicara di atas panggung adalah bagian kesadarannya yang mencita-citakan dirinya menjadi menteri pemberdayaan perempuan sebagaimana Uchti membayangkan dirinya menjadi menteri kesehatan.

4.2.1.6 Mempersiapkan Perempuan, Mempersiapkan PKS Menjadi Partai Modern

Jika Uchti dan Sitaresmi menginginkan karir politik yang tinggi baik di legislatif atau eksekutif, cita-cita politik dan tindakan-tindakan politik Ledia Hanifa, Ketua Bidang Kewanitaan DPP PKS, justru lebih banyak untuk mempersiapkan PKS menjadi partai modern dan untuk mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas kader perempuan, bukan untuk menjadi anggota DPR. Meski demikian dia menyadari bahwa pada saat ini PKS masih membutuhkan lebih banyak perempuan untuk dicalonkan menjadi anggota DPR. Karena itu akhirnya dia menerima pencalonan dirinya menjadi anggota DPR yang berarti dia harus menanggung beban ganda, menghadapi pencalonan dirinya dan tetap mengurus Bidang Kewanitaan yang berarti harus memikirkan perempuan di seluruh 77 daerah pemilihan, bukan hanya daerah pemilihannya sendiri.

Saya pernah berpikir bahwa saya nggak pengen jadi calon anggota dewan. Saya punya target harusnya mesin PKS itu lebih bagus lagi. Saya sempat ngobrol dengan beberapa orang teman, kita juga pernah ikut pelatihan di *Australian National University*, kita melihat ada orang yang 15 tahun nggak pernah mencalonkan diri, dia itu mesin partai. Mesinnya bagus akhirnya jalan partainya bagus. Kita lihat ternyata harus ada orang yang seperti gitu. Sempat juga terpikir begitu, kita sempat diskusi. Tapi pada saat ini kita masih membutuhkan jumlah calon anggota dewan yang sangat banyak. Kalau begitu kita mesti berpikir paralel pada tahap ini. Artinya mempersiapkan langkah-langkah ke depan misalnya untuk persiapan sebagai calon anggota dewan, tapi tetap menghidupkan struktur. Memang bebannya jadi dobel. Kalau istilah teman-teman, yang satu mikirin satu dapil, kita 77 dapil.¹¹⁰

Berbeda dengan perempuan PKS pada kubu tradisional yang menyatakan tidak pernah berusaha melakukan apapun untuk memperjuangkan kepentingan untuk pencalonan perempuan menjadi anggota DPR, Ledia Hanifa justru melakukan tindakan kebalikannya, yaitu memperjuangkan agar lebih banyak perempuan dapat memperoleh posisi menguntungkan pada pemilu.

Dia melakukan banyak hal untuk meningkatkan kapasitas politik perempuan PKS dan menyatakan berfokus pada tiga hal, yaitu *up-grading* fungsionaris, pelayanan pemberdayaan perempuan dan pemberdayaan politik perempuan. Pemberdayaan politik perempuan dilakukan melalui pembentukan Pos Wanita Keadilan yang tersebar di seluruh Indonesia sebanyak sekitar 5000 titik dengan anggota berkisar antara 30 orang sampai dengan 50 orang pada masing-masing titik. Pembentukan Pos Wanita Keadilan didasarkan pada evaluasi bahwa mayoritas perempuan masih takut dengan politik dan juga

¹¹⁰ Hasil wawancara dengan Ledia Hanifa di Jakarta 27 Januari 2009.

menurutnya tidak ada gunanya mengajak perempuan terjun ke politik tanpa memperbaiki kondisi kehidupan perempuan yang rata-rata masih buruk. Dia menguraikan hal-hal tersebut dalam pernyataannya berikut:

Kita fokus pada *up-grading* fungsionaris, pelayanan pemberdayaan perempuan dan pemberdayaan politik perempuan. Jadi fokusnya memang eksternal. Untuk mengantisipasi, memperbesar kontribusi perempuan, tugas bidang kewanitaan adalah mengoptimalkan potensi yang ada. Jadi kita membuat program yang disebut Pos Wanita Keadilan. Pos Wanita Keadilan itu *small group*, 30 sampai 50, bahkan ada yang cuma 10. 10 sampai 50 orang bergabung dalam satu kelompok, rutin, melakukan kegiatan penyadaran keagamaan, penyadaran sosial politik, penyadaran pendidikan, gizi, kesehatan lingkungan, kemudian pemberdayaan ekonomi, dimulai dari *small grup* ini. *Small group* ini kesepakatan bersama, apakah mereka mau rutin setiap minggu, ataukah dua minggu sekali, tapi paling lama sebulan sekali harus pertemuan. Sampai saat ini *alhamdulillah* sudah ada 5000 titik Pos Wanita Keadilan di seluruh Indonesia. Ide Pos Wanita Keadilan dari bidang kewanitaan sejak tahun 2002. Mula-mula *pilot project*nya itu di DKI dan di Jawa Barat. Kita mulai *pilot project*. Agak rumit memang karena sistimnya pemberdayaan, sementara PKS sebagai partai politik tidak biasa dengan aktivitas yang bersifat *community development* seperti NGO.

Kita melihat kalau masyarakat tidak diberdayakan percuma kita mau bicara soal politik, karena justru di situlah letak *voter education*, *civic education*nya. Kalau tidak diberdayakan dulu mau ngapain bicara politik. Saya yang penting kebutuhan primer terpenuhi dulu, begitu. Itu lama memang, dan baru mulai melesat di 2005. Harus sosialisasi yang luar biasa, dan ditambah kami punya keterbatasan untuk sosialisasi karena yang memahami konsep bidang kewanitaan. Keterbatasannya adalah pendanaan untuk ke wilayah-wilayah. Akhirnya dibuat *pilot project*, kita buat *CD*nya, mulai 2005 mulai kita sebar. Kalau yang bagus itu sekarang Jawa tengah dan Yogya, karena ketua kewanitaannya dulu pernah lama di NGO. Jadi mereka sudah cukup faham dan cepat pemberdayaan. Mereka pemberdayaan ekonominya sangat bagus, pakai modal bergulir segala ¹¹¹

Posisinya sebagai Ketua Bidang Kewanitaan membuat Ledia Hanifa harus melakukan banyak terobosan dan upaya bukan hanya untuk dirinya, tetapi lebih-lebih untuk kepentingan perempuan lain dalam proses pencalonan anggota DPR pada pemilu 2009 lalu. Narasumber lain menyebutkan bahwa Ledia Hanifa banyak melakukan *appeal* kepada pengurus pusat agar lebih banyak perempuan diletakkan pada posisi nomor urut satu pada daftar calon dari PKS, dan upayanya ini baru berhasil untuk dua orang, yaitu Herlini Amran dan Yoyoh Yusroh yang masing-masing diletakkan pada nomor 1 (satu) pada daerah pemilihan masing-masing.

Selain membangun jaringan internal dengan membentuk Pos Wanita Keadilan, Ledia Hanifa menyatakan bahwa dia dan jajaran Pengurus Pusat Wanita

¹¹¹ *Ibid.*

Keadilan juga berupaya membangun jaringan dukungan eksternal untuk kesuksesan pencalonan perempuan menjadi anggota DPR dan khususnya DPRD. Ledia Hanifa menganggap bahwa resistensi terhadap perempuan calon anggota DPR dan DPRD yang berasal dari senioritas figur di daerah jauh lebih kuat. Hal ini dijelaskannya sebagai berikut:

Jaringan luar partai harus dibangun. Mereka perlu dibantu karena mereka (perempuan calon anggota DPR dan DPRD dari PKS) masih muda-muda sementara orang-orang senior lokal itu senioritasnya itu luar biasa. Jadi kita bantu. Kemudian juga dengan media. Sebenarnya media lokal itu sangat *welcome* dengan kita. Kita juga cari masukan apa yang harus diperbaiki dari kinerja yang telah dilakukan oleh PKS setempat. Jadi kita menggunakan banyak jalur komunikasi. Sebenarnya media itu pengemot partai politik yang terbaik selain akademisi, ngeliatin terus¹¹²

4.2.1.7 Mengupayakan Dukungan Partai untuk Pencalonan Perempuan

Untuk kepentingannya memperjuangkan kepentingan perempuan PKS dalam proses pencalonan anggota DPR, Ledia Hanifa merasa bahwa pendapat-pendapatnya diapresiasi oleh pengurus pusat PKS bahkan akhirnya ide-idenya bersama kelompok perempuan lain didanai bahkan didukung dengan sumberdaya lain. Dia menyebutkan bahwa idenya bersama perempuan PKS lain tentang Pos Wanita Keadilan mulai didukung oleh PKS sejak tahun 2004. Hal ini dikemukakan Ledia Hanifa dalam pernyataan berikut:

Mulai 2004 sudah mulai beri dukungan, mulai pendanaan, mulai pelatihan, mulai sosialisasi. Dan mulai 2006 yang melakukan sosialisasi itu bukan cuma kewanitaan karena kita punya keterbatasan dana sosialisasi. Siapa yang pergi sosialisasi kami bekal dengan CDnya, dengan panduannya, dengan juknisnya. Kita bicarakan dulu, di *coach* dulu hal-hal yang perlu disampaikan. Ternyata bukan cuma perempuan yang bicara. Ada laki-laki yang menganggap itu bagus, itu jadi lebih mudah. Ada di suatu tempat perubahannya luar biasa. Jadi pendanaan difokuskan pada itu. *Recruiting* bisa dimulai dari situ, dan buat perempuan ternyata politik masih terlalu mengerikan. Jadi dengan pola seperti itu mereka mau.¹¹³

Dengan mengambil “jalan memutar” seperti itu, Ledia Hanifa merasa bahwa idenya melakukan pembinaan perempuan agar lebih tertarik dengan kehidupan politik lebih berhasil. Perempuan-perempuan yang tadinya menganggap politik sebagai dunia yang “mengerikan” menjadi lebih tertarik untuk berpartisipasi dalam aktivitas partai politik. Meski demikian, dia menyebut memang partai jadi harus melakukan upaya seperti NGO, bukan aktivitas biasa yang pada umumnya dilakukan sebuah partai politik. Lebih lanjut Ledia Hanifa menilai bahwa Pos Wanita Keadilan memberi kontribusi suara dukungan bagi PKS yang cukup lumayan. Dia juga menyatakan bahwa terdapat perbedaan kultural dalam karakter masing-masing Pos Wanita Keadilan. Ledia Hanifa menyatakan:

¹¹² *Ibid.*

¹¹³ *Ibid.*

Penambahan suara, berkontribusi jelas, juga penambahan kader meskipun memang butuh waktu lama, baru kemudian mereka menyatakan bersedia. Tapi di daerah-daerah tertentu, juru kampanyenya justru datang dari situ. Jaringan perempuan itu jadi di situ. Dan itu sangat tergantung kultur. Kalau misalnya kultur di Jawa, dia lebih *soft*, pelan-pelan. Dia hanya di perkotaan yang luar biasa. Tapi kalau di Sulawesi ada yang saya terkejut waktu di Gorontalo. Ada acara pos wanita keadilan digabungkan dua pos. Kita ada pembekalan, didekati seorang ibu yang bicaranya berapi-api, tersistimatis. Terus saya tanya sama kader ibu itu siapa. Ibu itu kader di pos wanita keadilan di salah satu pos wanita. Dia itu dulu aleg Golkar!¹¹⁴

Untuk mendorong agar partai dapat memenuhi ketentuan kuota 30% perempuan dalam daftar calon, bersama dengan teman-temannya di KPPI dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan Ledia Hanifa melakukan lobi ke berbagai partai. Upaya ini berhasil mendorong tercapainya kuota 30% perempuan dalam daftar calon tersebut dengan sistim nomor urut.

Bisa memasukkan 30% itu termasuk kita bergerak bersama-sama teman-teman di gerakan perempuan, dengan KKPI, dengan Kementerian (Pemberdayaan Perempuan), lobi saja kerjanya. Sampai akhirnya di partai sendiri 30% tidak ada masalah karena sejak 2004 kita adalah partai yang paling tinggi suaranya 30% perempuan itu. 42% calegnya pada waktu itu. Waktu itu dengan kata "dapat" saja kita sudah memenuhi.. Kemudian sekarang juga nggak ada masalah semua. Dari 77 itu cuma 7 dapil yang tidak terpenuhi. Itu karena memang orang lokal nggak terlalu siap, dan kebanyakan bukan di basis-basis kita.¹¹⁵

Secara ringkas, berbagai informasi yang diberikan oleh para perempuan narasumber tentang peran yang mereka lakukan dalam proses pencalonan mereka menjadi anggota DPR menghasilkan gambaran ringkas sebagai berikut. Terdapat dua kubu yang berbeda dalam menyikapi dan melakukan tindakan-tindakan dalam proses pencalonan anggota DPR periode 2009-2014. Kubu pertama adalah kelompok yang menganggap bahwa *affirmative action* 30% adalah sesuatu yang tidak perlu diminta oleh perempuan. Perempuan harus bisa menunjukkan kompetensi dirinya sendiri sehingga dianggap layak untuk dicalonkan menjadi anggota DPR. Sikap seperti ini ditunjukkan antara lain oleh Aan Rochana yang mengatakan bahwa sebagai anggota Majelis Pertimbangan Pusat dia tidak dapat melakukan upaya apapun untuk mendikte kader agar mencalonkan perempuan karena pencalonan tersebut sangat tergantung kepada kemauan atau keinginan kader PKS. Husna Hidayati juga menyatakan bahwa perempuan semestinya malu meminta-minta kuota 30%. Menurutnya perempuan harus menunjukkan kualitas dirinya sehingga didukung kader untuk menjadi anggota DPR. Herlini Amran sebagai anggota Dewan Syari'ah Pusat juga bersikap demikian, begitu juga Yoyoh Yusroh yang menyatakan bahwa keterwakilan sekitar 10% perempuan selama ini tidak ada masalah. Di kubu yang lain terdapat sikap yang jelas bahwa perempuan harus berjuang untuk peningkatan kuota calon karena tanpa peningkatan kuota maka perempuan tidak akan pernah meningkat keterwakilan politiknya di DPR

¹¹⁴ *Ibid.*

¹¹⁵ *Ibid.*

karena menurut Uhti ”ada kondisi *start* yang tidak sama antara laki-laki dan perempuan”. Menariknya adalah bahwa kedua kubu ini memiliki latar belakang individu yang berbeda. Kubu pertama semuanya berasal dari latar belakang pendidikan dan keagamaan sedangkan kubu kedua lebih bervariasi yaitu mantan dosen IAIN, sarjana komunikasi, magister manajemen pengembangan sumberdaya manusia, magister kesehatan masyarakat serta sarjana psikologi. ”Kesadaran feminis” terlihat lebih menonjol pada kubu kedua.

Meski berbeda sikap terhadap kebijakan kuota, tetapi kedua kubu ini sama dalam hal pengetahuan mereka tentang alasan penempatan mereka dalam daerah pemilihan dan nomor dalam daftar urut calon dari partai. Kedua kubu sama-sama menyatakan tidak mengetahui alasan penempatan diri mereka dalam daerah pemilihan serta nomor dalam daftar urut calon bagi mereka.

Berkenaan dengan upaya untuk mempengaruhi proses pencalonan mereka menjadi anggota DPR, kecuali Ledia Hanifa yang melakukan *appeal* untuk penempatan perempuan pada daerah kantong serta Kingkin Anidha yang menyatakan ”menawar” penempatannya dalam daerah pemilihan, mereka tidak melakukan upaya apapun untuk mempengaruhi proses pencalonan mereka menjadi anggota DPR. Jika diperbandingkan penjelasan kesembilan narasumber, maka terdapat gambaran yang menarik. Husna Hidayati dan Uhti yang dalam peran-peran sebagai refleksi *the multiple subject* berasal dari kubu yang berbeda, tetapi dalam sikapnya terhadap pencalonan diri mereka mempunyai sikap yang sama, tidak menghendaki pencalonan diri mereka. Tetapi alasan keduanya berbeda. Husna Hidayati menjadikan alasan pencalonan suaminya sebagai alasan keengganannya sedangkan T menjadikan adanya rencana karir yang lain sebagai penyebab keberatannya. Herlini Amran, Aan Rochana, Yoyoh Yusroh dari kubu tradisional mempunyai sikap dan tindakan yang sama dengan Komarul Kuniyati dan Sitaresmi dari kubu kedua, yaitu menerima saja tanpa mempertanyakan pencalonan diri mereka. Dengan demikian sikap dan tindakan sebagai faktor yang berperan terhadap penciptaan citra *the performative subject* para narasumber dalam menyikapi pencalonan mereka mempunyai tiga pola, yaitu menerima dengan enggan, menerima, dan justru melakukan perjuangan untuk posisi yang lebih baik di daerah pemilihan dan nomor urut mereka dalam daftar calon.

Tabel 4.2
Tindakan Sebagai Alasan Pencalonan

Nama	Tindakan sebagai alasan pencalonan	Penempatan
AR	“membabat hutan”; mengikuti <i>fit and proper test</i> oleh kader; menjadi anggota Majelis Pertimbangan Pusat; menjadi anggota Majelis Syura Pusat; melakukan <i>screening</i> internal untuk para calon	Nomor 2 di daerah kantong

YY	Tidak mengetahui pencalonan dirinya; tidak melakukan apapun untuk mempengaruhi proses pencalonannya; merasa layak menyuarakan aspirasi; melihat kesempatan untuk berpartisipasi ada; bekerja untuk partai; memiliki kapasitas; menjadi subyek pembangunan; siap diletakkan di nomor berapapun; menjadi pendiri PK dan PKS; menjadi mantan Ketua Bidang Kewanitaan yang pertama; menjadi wakil Komisi 8 DPR RI periode 2004-2009	Nomor 1 di daerah kantong
HA	Tidak mengetahui alasan penempatan pada nomor urut calon; menghasilkan bayan tentang rambu-rambu perempuan dalam kehidupan politik yang mencerminkan nilai yang dipromosikan oleh PKS	Nomor 1 di daerah kantong
HH	Meminta untuk tidak dicalonkan tapi akhirnya menerima pencalonan; menjaga hubungan baik dengan kader; menjalani <i>screening</i> khusus; mengikuti proses seperti air mengalir, tidak mengarahkan diri; mengalah untuk suami yang juga dicalonkan menjadi anggota DPRD Provinsi; mengikuti kemauan suami yang keberatan; mengikuti pandangan suami yang menganggapnya “belum sekelas bu Yoyoh Yusroh”; menerima pendapat Pusat yang meletakkan perempuan dari Daerah lebih tepat di posisi “ujung tombak” atau menjadi anggota DPRD dan bukan DPR	Nomor 8 bukan di daerah kantong
KA	Melakukan kesalahan menentang keputusan koalisi; mencoba menawar penempatan;	Nomor 2 bukan di daerah kantong
KK	Menerima ajakan menjadi calon anggota DPR dari tokoh PKS; tidak mau “gelathakan” atau berusaha mencari tau tentang penempatan dirinya dalam nomor dan daerah pemilihan; bergabung karena merasa satu ideologi; menerima menjadi <i>vote getter</i>	Nomor 4 bukan di daerah kantong
T	Memproyeksikan diri untuk karir politik lain dan tidak menyangka dicalonkan; tidak berupaya mempengaruhi proses pencalonannya; cepat menyesuaikan diri terhadap pilihan karir politik oleh partai untuk dirinya; membuka opsi-opsi pilihan karir politik bagi dirinya sendiri	Nomor 2 di daerah kantong
S	Sudah lama mengetahui pencalonannya; tidak melakukan upaya untuk mempengaruhi proses	Nomor 3 di daerah kantong,

	pencalonannya; sudah banyak melakukan dakwah di daerah pemilihan; mempunyai aspirasi politik yang tinggi baik di partai maupun di eksekutif; melakukan persiapan-persiapan untuk mencapai aspirasi politik; merasa diuntungkan dengan daerah pemilihan dan nomor dalam daftar	ditargetkan terpilih
LH	Melakukan <i>appeal</i> untuk pencalonan perempuan PKS pada daerah dan nomor yang menguntungkan; bersama unsur perempuan di luar PKS melakukan lobi ke berbagai partai politik untuk pemenuhan kuota 30%;	Nomor 2 di daerah kantong

Sumber: disarikan dari penjelasan para narasumber

4.2.2 Tindakan Menghadapi Pemilihan

4.2.2.1 Mendapatkan Dukungan Dana Kampanye dan Memanfaatkan Jaringan Dukungan

Selain sikap menghadapi pemilihan, kemampuan perempuan PKS sebagai *the performative subject* dapat dilihat dari tindakan-tindakan yang mereka lakukan untuk menghadapi pemilihan. Dimensi ini perlu dijelaskan untuk melihat kemampuan mereka menciptakan citra sebagai eubek yang efektif dengan melihat tindakan-tindakan yang mereka lakukan agar terpilih dalam pemilu. Berikut adalah penjelasan para narasumber mengenai hal ini.

Herlini Amran tidak memiliki cukup modal untuk kepentingan kampanye menghadapi pemilu. Karena itu dia sangat tergantung kepada bantuan dana dari partai. Dia juga melakukan sosialisasi bersama dengan istri seorang wakil bupati yang juga menjadi calon anggota legislative. Meski tidak memiliki modal untuk kampanye, tetapi Herlini Amran menyatakan memiliki banyak waktu dan tenaga untuk melakukan sosialisasi atau kampanye. Herlini Amran merasa bahwa hanya di PKSlah mungkin satu-satunya partai dimana orang seperti dia yang tidak memiliki modal tetap memiliki kesempatan untuk dicalonkan dalam pemilu. Dalam kasusnya malah dia dicalonkan pada posisi yang sangat menguntungkan, pada nomor satu di daftar urut calon dari PKS. Berikut penuturan Herlini Amran.

Iyalah (mendapat bantuan dana dari PKS). Nggak dibantu? Ketika partai mencalegkan saya, saya sudah mengatakan begini, saya nggak punya apa-apa. Kebetulan saya sedang membangun aula di samping rumah untuk wakaf, untuk aktivitas sosial kita di lingkungan. Saya katakan kalau dana saya ada saya bangun aula itu. Jadi kalau saya ini (dikehendaki dicalonkan oleh partai) ya silakan lanjut, kalau nggak ya bagaimana lagi. Partai tidak tidak minta sesuatu, mereka bantu saya paling tidak dengan tiket pesawat. Kita juga sama-sama berdakwah, jadi saya dibantu oleh semua, artinya oleh berbagai lapisan struktur yang ada di tingkat pusat sampai daerah. Jadi ada *network*, ada bantuan keuangan langsung dari DPP. Dari daerah juga sama. Jadi praktis sebenarnya kalau dari pribadi saya tidak terlalu

(banyak mengeluarkan dana), hanya waktu dan tenaga serta pikiran. Jadi inilah uniknya, kadang-kadang tidak dimiliki partai lain.¹¹⁶

Sebagai perempuan, Herlini Amran merasa memiliki kedekatan yang lebih baik dengan konstituen dibanding laki-laki. Meski demikian beberapa faktor dianggapnya berperan terhadap target perolehan suara yang diinginkan perempuan PKS. Faktor tersebut antara lain adalah fenomena Partai Demokrat yang secara tidak tersangka dapat memperoleh suara begitu besar. Faktor lain adalah para pemilih yang ternyata menjadi sangat pragmatis dan lebih mempertimbangkan pemberian uang oleh calon lain dibanding dengan ikatan yang sudah dibangun selama proses sosialisasi dan kampanye.

Perolehan Demokrat ini nggak diperhitungkan. Jadi itu yang banyak mengambil peluang perempuan yang nggak jadi itu. Itu berpengaruh terhadap target PKS, 20% (kursi) jadinya cuma 8% (delapan) kurang lebih. Banyak faktor (yang berpengaruh terhadap perolehan kursi DPR). Pemilih kita kan pragmatis. Saya punya contohnya begini, di Kepri itu kita punya wakil bupati, istrinya caleg. Dia sama saya sosialisasi. Dia bisa memanfaatkan posisi sebagai istri wakil bupati ke daerah-daerah terpencil, dia sudah rawat konstituen, pokoknya sudah nggak ada masalah. Ternyata di suatu daerah, tujuh puluh orang yang sudah dia rawat, pas penyontrengan dia Cuma dapat 19. Ternyata pengakuan mereka “kita didatangi, dikasih uang, jadi kita nggak enak, ada ancaman lagi”. Inilah masalahnya.¹¹⁷

Meski tidak memiliki modal kampanye, Herlini Amran terpilih dalam pemilu 2009. Dilihat dari penuturannya bahwa dia sama sekali tidak memiliki modal dan sangat tergantung kepada bantuan partai baik dari struktur Pusat maupun daerah, maka faktor posisi dalam daftarlah yang berperan banyak membuatnya terpilih dalam pemilu. Seperti sudah dijelaskan di bagian lebih awal, posisi dalam daftar merupakan skala prioritas partai dan karenanya para kader dan konstituen utama secara otomatis memilih nomor satu. Selain itu dia juga diuntungkan oleh dukungan jaringan temannya di daerah yang sama-sama mencalonkan diri. Dia juga mencurahkan waktu, tenaga dan pikiran untuk pencalonannya, relative tidak terganggu dengan kegiatan yang lain.

Melihat penuturan Herlini Amran tentang tindakan-tindakannya menghadapi pemilu, Herlini Amran adalah tipe individu yang efektif membangun citra sehingga dipercaya oleh partai dan konstituen. Dia mencurahkan segenap waktu, tenaga dan pikiran untuk kegiatan pemilu. Dia juga tidak gentar dengan kondisinya yang tidak memiliki modal untuk kampanye. Dia juga efektif membangun jaringan kampanye bersama calon lain. Dalam konsep Lloyd tentang *the performative subject*, Herlini Amran adalah individu yang efektif membangun citra diri sebagai subyek politik dan sekaligus terpilih dalam pemilu.

Berbeda dengan Herlini Amran yang tidak banyak menceritakan tindakan-tindakannya menghadapi pemilihan umum, Yoyoh Yusroh yang diwawancarai sambil melakukan kegiatan kampanye bercerita banyak mengenai kegiatan-kegiatannya menghadapi pemilu. Agar pencalonan yang telah

¹¹⁶ Hasil wawancara dengan Herlini Amran di Jakarta 26 April 2009.

¹¹⁷ *Ibid.*

diamanahkan oleh PKS kepadanya dapat berjalan baik, Yoyoh Yusroh melakukan penggalangan dukungan melalui bebarapa jaringan dukungan. Teman-teman lama, kader dan struktur kepengurusan partai adalah jaringan yang dibangun oleh Yoyoh Yusroh untuk memperoleh dukungan suara. Dia menjelaskan:

Kita memanfaatkan jaringan kader, keluarga, rekan-rekan lama. Kader struktur..kalau di Tangerang berarti struktur dari DPD sampai Depera. Kemudian kawan lama saya, karena saya tinggal di sini, sekolah SD, teman-teman SD, SMP, mereka membantu. Kemudian keluarga besar. Jadi teman-teman PII di sini mereka juga bergerak, .teman-teman PGS bergerak. Mereka ketika melihat gambar saya langsung cari tau saya, cari nomor tilpon saya dan langsung membantu. Majlis Taklim juga¹¹⁸

Menurut penjelasan suami narasumber yang berfungsi sebagai “manajer” kampanye Yoyoh Yusroh, dukungan bagi pencalonan diupayakan melalui berbagai jaringan yang sebelumnya tidak terpikir untuk memanfaatkannya seperti keluarga dan teman lama. Jaringan ini baru digerakkan semenjak keluar keputusan Mahkamah Konstitusi tentang penetapan pemegang kursi melalui mekanisme suara terbanyak. Pada pemilu sebelumnya jaringan dukungan hanya melalui struktur dan kader partai. Yoyoh Yusroh juga melakukan kegiatan kampanye melalui sistim paket kampanye dengan calon lain dengan dukungan pimpinan pusat PKS. Dia juga didukung sepenuhnya struktur partai di tingkat Provinsi dan Kabu[at]en/Kota di daerah pemilihannya. Hal ini terlihat bahwa pada waktu kampanye Yoyoh Yusroh didampingi oleh struktur partai di tingkat bawah. Upaya-upaya Yoyoh Yusroh dan suaminya serta dukungan partai dengan menempatkannya pada posisi nomor satu dalam daerah pemilihan yang merupakan kantong suara PKS atau disebut “daerah basis” membuat Yoyoh Yusroh akhirnya terpilih dalam pemilu 2009. Dalam konsep Moya Lloyd, Yoyoh Yusroh adalah subyek yang mampu membangun citra diri sebagai subyek politik yang efektif karena mampu melakukan tindakan-tindakan yang mengantarkannya mencapai keinginannya. Dalam teori Simone de Beauvoir¹¹⁹, tindakan Yoyoh Yusroh sebagai *the Other* (sebagai perempuan) termasuk mengidentifikasi dirinya dengan laki-laki PKS sebagai *The One* sehingga oleh DPTP sebagai *the One* YY diletakkan pada daerah dan nomor yang menguntungkan dalam pemilu legislatif dan akhirnya terpilih dalam pemilu.

Sementara itu upaya yang dilakukan oleh Husna Hidayati setelah proses penatapan dirinya menjadi calon anggota DPR adalah dengan memanfaatkan jaringan yang sebelumnya sudah dibangunnya dari berbagai aktivitasnya di PKS. Jaringan tersebut adalah majlis taklim dan Ikatan Da’I Indonesia (IKADI) perwakilan Lampung. Selain itu khusus untuk jaringan Kota Bandarlampung Husna Hidayati banyak dibantu suami, baik dalam bentuk jaringan dukungan suara maupun donatur. Dia juga dibantu oleh beberapa donatur dengan beberapa barang cetakan untuk kampanye. Hanya saja karena dia justru banyak mengkampanyekan calon nomor satu, maka upayanya justru menguntungkan calon nomor satu. Dia justru tidak mempromosikan dirinya sendiri dalam kampanye, justru mempromosikan calon nomor 1(satu). Dia merasa segan atau

¹¹⁸ Hasil wawancara dengan Yoyoh Yusroh di Tangerang, 4 April 2009.

¹¹⁹ Simone de Beauvoir, Introduction from the *Second Sex* dalam Ann E Cudd dan Robin O. Andersen. *Feminist Theory: A Philosophical Anthology An Anthology*. Blackwell Publishing. Hal 27-36.

tidak sampai hati untuk mempromosikan dirinya sendiri. Dia justru berupaya membesarkan partai dan tidak mempermasalahkan siapapun yang jadi anggota DPR. Dari penjelasan Husna Hidayati tentang proses pencalonannya dan juga dari posisinya di daftar calon dari PKS dapat dilihat bahwa Husna Hidayati bukan termasuk calon yang ditargetkan untuk jadi anggota DPR. Hal ini sebenarnya merupakan kerugian sangat besar bagi perempuan PKS karena kualitas diri Husna Hidayati tidak perlu disangsikan karena dia termasuk satu dari dua orang perempuan PKS yang terpilih oleh kader dalam pemilu raya untuk anggota Majelis Syura Pusat. Artinya Husna Hidayati sangat mengakar di kalangan kader dan kalau diprioritaskan oleh PKS besar kemungkinan akan menjadi pesaing kuat bagi calon nomor 1. Tapi seperti istri Anis Matta yang menurut penjelasannya kurang didukung untuk diletakkan pada posisi atas dalam daftar calon, Husna Hidayati juga mengalami hal yang sama, posisi di daftar calon sama sekali tidak menggambarkan kualitas dirinya. Dia juga cukup “dirugikan” karena dia dianggap representasi perempuan dari daerah (bukan dari Jakarta) sehingga kurang diprioritaskan untuk terpilih.

Kalau saya pakai jaringan. Saya banyak pegang majlis taklim, saya di IKADI, ikatan dai Indonesia perwakilan Lampung, saya ketua biro perempuannya. Jadi saya pakai jaringan.

4.2.2.2 Enggan Mempromosikan Diri

Meski sudah memanfaatkan jaringan untuk memperoleh dukungan dalam pemilu, Husna Hidayati menyatakan bahwa dia masih enggan untuk secara terang mempromosikan diri agar pemilih memilih dirinya. Dia mengatakan:

Saya belum sampai hati untuk...ini “bu milih saya ya”. Saya berpikir, kita ini berjuang untuk partai ya. Siapapun orang yang jadi, yang dibesarkan oleh partai, insya Allah semua sejalan dengan kebijakan partai. Bahkan saya merasa senang, saya tetap tercantum. Saya akan *all out* bekerja untuk partai. . Jadi saya membantu Misalnya saya justru lebih banyak memasarkan pak Muzamil atau pak Agus Nurhadi, kemudian suami. Kebetulan untuk jaringan Bandarlampung memang dibantu suami.¹²⁰

Sikapnya yang enggan menerima pencalonan diri serta tindakannya yang lebih banyak memasarkan calon lain dibanding memasarkan dirinya sendiri dalam kampanye membuat Husna Hidayati tidak terpilih dalam pemilu. Sikap dan tindakan Husna Hidayati menunjukkan bahwa dia sama sekali tidak menginginkan dirinya terpilih dalam pemilu. Hal ini sebenarnya merupakan rangkaian yang logis dari pandangannya tentang politik yang baginya merupakan media pengabdian, media dakwah, pandangannya yang menolak masih adanya diskriminasi di PKS sehingga tidak perlu lagi ada perjuangan keadilan gender di internal PKS, melihat dirinya lebih tepat melakukan kaderisasi dan tidak mengasosiasikan dirinya dengan kekuasaan, menolak perjuangan kuota, serta sikapnya yang enggan menerima pencalonan dirinya menjadi anggota DPR. Dari sisi konsep *the performative subject*, Husna Hidayati adalah individu yang tidak mencitrakan diri sebagai individu politik yang efektif meski dia memiliki pendukung yang banyak di kalangan kader PKS.

¹²⁰ Hasil wawancara dengan Husna Hidayati 5 Mei 2009 di Bandarlampung.

4.2.2.3 Membuat Simpul-Simpul Dukungan Tokoh Masyarakat

Berlawanan dengan Husna Hidayati yang enggan mempromosikan diri, Kingkin Anidha melakukan upaya membangun simpul-simpul dukungan dari tokoh-tokoh masyarakat dalam upayanya menghadapi pemilihan legislatif 2009 yang lalu. Kingkin Anidha menyatakan bahwa daerah pemilihan tempat dia dicalonkan adalah daerah yang “berat” karena luasnya wilayah dan sangat jarang penduduk. Dia sebenarnya pernah merasakan perasaan tidak mau melaksanakan sosialisasi karena beratnya medan yang harus dihadapi. Meski demikian dia tetap melakukan pertemuan-pertemuan dan bersosialisasi kepada masyarakat di daerah pemilihannya. Dia menyusun simpul-simpul wilayah dan mengadakan pendekatan kepada tokoh-tokoh di wilayah pemilihannya. Hal ini dinyatakannya sebagai berikut:

Saya baca peta. Target-target setiap daerah misalnya Way Kanan itu hanya 50.000 satu (50.000 untuk satu kursi DPR). Padahal harga satu kursi DPR RI itu kan sekitar 200 ribu, angka kasarnya. Ini berarti kerja berat. Saya mencoba mem-*break down*, misalnya satu hari saya harus bertemu berapa orang. Kalau kita bersandar pada angka, pada logika, rasanya kita nggak mau jalan, apalagi harus ke pelosok-pelosok.

Saya berharap ada efek bola salju. Kita melakukan pertemuan, sosialisasi, berkenalan pada beberapa orang, kita harapkan dari beberapa orang ini kemudian Allah menggerakkan mereka untuk memperkenalkna ke jaringannya. Makanya kita bekerja bukan hanya secara ikhlas dan keras, tapi juga berusaha cerdas. Jadi..moga-moga dengan kita datang ke simpul-simpul masa, tokoh-tokoh, kita harapkan kemudian otomatis mereka akan ajak jaringannya untuk ikut.¹²¹

Kingkin Anidha menilai bahwa karena perubahan tentang daerah pemilihan yang ditetapkan untuknya, maka dia memulai sosialisasi dirinya kepada masyarakat sudah sangat terlambat. Hal ini dinyatakannya dalam pernyataan berikut:

Saya melakukan sesuatu yang semua sudah selesai. Maksudnya saya mulai dari awal, *berkenalan*, sementara calon lain sudah mulai melakukan *pembujukan* dan *pengaruh*. Tahapan-tahapan itu sudah mereka lewati, saya baru mulai memperkenalkan diri. Mungkin secara emosional kurang bisa langsung masuk di hati mereka. Tapi saya nggak mau bersandar kepada yang lain. Saya katakan kepada teman-teman, saya datang ke Lampung ini dengan cinta, saya ingin mendapatkan cinta Allah, saya ingin umat ini lebih sadar kepada Islam, itu saja. Lebih baik saya bersandar kepada logika dakwah, jadi semuanya saya rasakan ada pertolongan, Daripada kita bekerja dalam keterpaksaan, kekecewaan, membuat kita tidak menikmati pekerjaan ini. Sementara kita tau kita bukan bekerja untuk institusi, tetapi untuk yang menciptakan ..dunia ini¹²²

Strateginya untuk menutupi kekecewaannya dengan proses pencalonannya yang kurang sesuai dengan keinginannya menyangkut daerah pemilihan serta

¹²¹ Hasil wawancara dengan Kingkin Anidha di Bandarlampung 23 Maret 2009

¹²² *Ibid.*

proses yang sudah cukup terlambat dibanding dengan calon-calon lain, maka dia meyakinkan diri bahwa semua yang dilakukannya adalah dalam kerangka dakwah, untuk mendapatkan cinta Allah. Strategi ini mendatangkan energi besar kepadanya sehingga dia sanggup melakukan hal-hal yang sepertinya tidak mungkin, yaitu menyopir sendiri mobilnya dari Jakarta menuju wilayah-wilayah terpencil di Daerah Pemilihan Lampung II padahal dia baru saja selesai belajar menyopir mobil.

Selain itu, meski sedikit kecewa dengan penetapan daerah pemilihannya oleh PKS, Kingkin Anidha tetap bekerja keras melakukan sosialisasi dan berkampanye, memperkenalkan diri, membujuk para pemilih dan mencoba mempengaruhi mereka agar memilih dirinya. Upaya Kingkin Anidha menunjukkan bahwa Kingkin Anidha berjuang keras agar terpilih dalam pemilu. Penjelasannya ini menunjukkan bahwa terdapat segmen perempuan dalam PKS yang tidak melihat kekuasaan sebagai sesuatu yang tabu untuk diperjuangkan seperti beberapa narasumber lain menyatakannya. Tetapi upayanya ini tidak berhasil mengantarkannya terpilih dalam pemilu karena PKS hanya memperoleh satu kursi dari Daerah Pemilihan II Lampung.

Meski tidak terpilih dalam pemilu, tetapi Kingkin Anidha adalah subyek politik yang efektif dalam konsep Lloyd. Dia telah melakukan berbagai hal untuk menjadi efektif terpilih, tetapi PKS lah yang telah bersikap tidak adil terhadapnya. Konsep *the performative subject* tergantung apa yang dilakukan seorang individu, bukan pada hasil yang diperoleh. Satu-satunya hal yang membuatnya tidak terpilih adalah kegagalannya memahami kultur politik internal PKS yang sama sekali tidak mentolerir perbedaan sikap dan tindakan politik sehingga dia gagal mengantisipasi bahwa penolakannya untuk koalisi dalam pilkada di Tangerang akan membuatnya tersingkir dari daerah pemilihan yang menguntungkan.

4.2.2.4 Membangun Dukungan Komunitas Etnis, Menyusun Sistim “Tandem” dengan Calon Tingkat Kabupaten dan Provinsi.

Sama dengan Kingkin Anidha yang menyadari diletakkan pada daerah pemilihan dan nomor urut dalam daftar calon yang tidak menguntungkan, serta meski merasa dijadikan *vote getter* oleh PKS, Komarul Kuniyati tetap melakukan upaya sungguh-sungguh untuk terpilih dalam pemilu 2009. Dia masuk ke daerah-daerah pedalaman yang tidak didatangi calon lain baik dari PKS maupun dari partai lain. Dia mendatangi komunitas-komunitas pengajian yang memang jumlahnya sangat banyak di daerah pemilihannya, menyalurkan bantuan kambing dalam rangka iedul qurban, bahkan menginap beberapa hari di wilayah-wilayah yang sangat jauh di pedalaman sehingga dia perlu naik *kapal othok-othok*. Tanggapan masyarakat sangat baik sehingga “tim sukses” dan pendukungnya yang lain merasa yakin bahwa dia akan menang. Hal-hal ini dinyatakannya sebagai berikut:

Tidur di Tulangbawang empat hari, pulang ke sini, besoknya berangkat lagi ke Tulangbawang. Makanya saya tadinya optimis banget walaupun saya tidak dibantu oleh kader. Maksud saya tidak dibantu kader, PKS ada *direct selling*, mengarahkan penduduk supaya milih Hakim atau bu Kun. Jelas diarahkannya supaya milih Hakim karena dia kader saya bukan kader.

Saya punya komunitas pengajian. Jadi ketika bulan-bulan qurban, saya itu dapat 78 ekor kambing dari ibu-ibu majlis taklim. Saya sebar. Makanya orang-orang optimis kalau aku *nyanthol*.¹²³

Komarul Kuniyati menyadari bahwa tidak terpilihnya dia menjadi anggota DPR bukan semata karena ketidakberhasilannya mengadakan pendekatan dengan masyarakat, tetapi karena kegiatan *direct selling* yang dilakukan oleh kader PKS yang lebih mempromosikan kader PKS dibanding dirinya yang bukan kader. Dia juga merasa bahwa suaranya *ditilep*, dan juga karena perolehan suara untuk PKS jauh di bawah target yang ditetapkan sehingga daerah pemilihannya hanya mampu “mengangkat” satu kursi untuk orang yang telah merekomendasikan namanya untuk dicalonkan.

Saya sudah berusaha menghilangkan kesan bahwa PKS itu anti tahlil. Pokoknya sudah berbagai cara saya lakukan. Memang yang sampai saat ini saya nggak terima .karena saya merasa dibeer tau oleh orang-orang daerah yang selama ini kerja sama dengan saya bahwa suara untuk saya cukup banyak. Sebenarnya kalau suara saya nggak *ditilep*, cukup banyak. Tapi karena tidak dapat mengangkat dua, jelas saya akan ikhlas untuk pak Hakim¹²⁴

Meski Komarul Kuniyati meyakini bahwa ajakan “pak Hakim” baginya untuk ikut pencalonan anggota DPR merupakan ajakan tulus yang didasari kesamaan visi tentang partai yang “kental” nuansa Islamnya, tetapi pada proses pemilihan Komarul Kuniyati melihat banyak terjadi kejanggalan, terutama pada proses penghitungan suara. Menurutnya terjadi beberapa hal yang janggal, seperti dalam pernyataannya berikut:

Saya juga nggak tau kok seperti itu. Padahal saya sudah mengadakan terobosan melalui pengajian, itu orang-orang Jawa Jowo di sana mengatakan bahwa mereka memang ingin milih orang Jawa. Jadi bias dipastikan suara untuk saya banyak benar. Kami nggak tau persis selipnya dimana. Saya di”bel” Lampung Tengah “ibu dapat suara 936”. Terus saya dari Lampung Utara “yakin bu, soalnya seluruh wanita Islam memilih ibu”. Setelah saya hitung.. sendiri, banyak sekali. Tapi begitu di Lampost enam ratus, ya agak kaget saya. Ada yang satu daerah, calon-calon di tingkat dua merasa beruntung “tandem” dengan saya dan mengatakan “saya nggak tembus komunitas Panginyongan, dengan penjenengan ngisi pengajian sampai tiga empat kali yakin bu, kalau saya dapat 2000, ibu pasti dua ribu”. Mereka begitu yakin. Ada beberapa yang sudah ngirim, suara ibu dua ribu, suara ibu empat ratus, bu..panen, seluruhnya ibu. Begitu saya denger pengumuman di Lampost enam ratus, saya sangat kaget.¹²⁵

Koamarul Kuniyati menjelaskan bahwa tadinya dia optimis terpilih karena merasa suaranya sangat banyak, khususnya dari dukungan perempuan yang bergabung dalam majlis taklim dan juga dari *wong-wong Jowo* dan “komunitas

¹²³ Hasil wawancara dengan Komarul Kuniyati di Bandarlampung 5 Mei 2009.

¹²⁴ *Ibid.*

¹²⁵ *Ibid.*

panginyongan”. Meski tidak dapat menunjukkan bukti kecurangan penghitungan, tetapi KK merasa bahwa suaranya *ditilep*. Bukti yang dapat ditunjukkan adalah perbedaan laporan calon-calon yang ber”tandem” dengan dia dengan laporan jumlah perolehan suara yang dimuat di media massa. Perbedaannya sangat jauh dan menurutnya tidak mencerminkan yang sesungguhnya. Memang Komarul Kuniyati tidak memiliki saksi di TPS untuk memantau proses perhitungan suara, tetapi dia yakin kader PKS ada di setiap TPS untuk menjadi saksi pemilu. Komarul Kuniyati tidak mengetahui apakah saksi ini mengikuti proses penghitungan pada proses penghitungan suara pada tahap selanjutnya. Selain itu dia juga tidak mengetahui siapa yang *menilep* suaranya.

Meski tidak puas dengan daerah pemilihan dan posisinya dalam daftar urutan calon, KK tetap melakukan kampanye secara serius dan memanfaatkan berbagai jaringan yang selama ini telah dibangunnya sebagai tokoh wanita Islam di daerahnya. Dia juga mengadakan pendekatan cultural kepada kelompok social Panginyongan, atau kelompok warga Lampung yang merupakan keturunan warga dari wilayah Banyumas Komarul Kuniyati dengan serius berkampanye, memasang strategi yang tepat untuk melakukan sosialisasi dirinya ke masyarakat desa yang pada umumnya tidak terdidik baik, memanfaatkan berbagai program yang dijalinnya dengan berbagai kelompok perempuan. Dari berbagai aktivitasnya berkampanye, dia merasa mendapat dukungan besar dari berbagai kelompok masyarakat, khususnya majlis-majlis taklim dan etnis Jawa khususnya komunitas Panginyongan. Dia menyatakan bahwa berdasarkan laporan dari calon anggota DPR yang *tandem* dengannya dia memperoleh suara signifikan dalam pemilu 2009, tetapi merasa suara dukungan untuknya *ditilep*. Meski demikian dia tidak menyatakan siapa yang telah melakukan pencurian suara tersebut. Terakhir, KK merasakan sekedar dijadikan *vote getter* dan kurang mendapat dukungan dari kader PKS yang bekerja di lapangan. Menurutnya hal ini ke depan harus dirubah jika PKS menginginkan menjadi partai yang lebih besar.

Dari sisi tindakan-tindakannya menghadapi pemilihan, Komarul Kuniyati merupakan subyek politik yang berusaha keras menampilkan diri sebagai sosok yang kompeten. Dia bahkan menjadi andalan dari beberapa calon lain untuk dapat mendekati kelompok-kelompok masyarakat yang sebelumnya sulit ditembus calon lain tersebut. Karena itu meski tidak berhasil terpilih dalam pemilu, Komarul Kuniyati adalah individu yang efektif membangun citra dirinya sebagai subyek politik yang efektif.

4.2.2.5 Direct Selling Bersama Kader

Uchti, narasumber berikutnya tidak banyak memberikan informasi mengenai upayanya menghadapi pemilihan umum. Meski pada awalnya dia tidak siap menghadapi pencalonannya menjadi anggota DPR dan meski diletakkan pada Daerah Pemilihan yang meliputi wilayah yang cukup luas, Uchti tetap melakukan kegiatan kampanye dengan cara mendampingi para kader melakukan *direct marketing*, kampanye *door to door* memasarkan dirinya.

Kemarin saya terharu mbak, waktu ke Kabupaten Bandung, saya mendampingi teman-teman, para kader perempuan yang di *grass root* itu untuk *direct marketing*, *door to door*, mereka ke sawah, ke petani. Sebelum itu karena mereka sudah lelah, kita adakan acara semacam piknik di Pengalengan, di taman Situ Cilenca, sebuah danau. Saya memberikan

memberikan arahan. Saya nggak ngasih ceramah, saya ajak mereka bermain. Saya terharu, mereka rata-rata membawa anak, saya baru tau kalau mereka bawa anak, tapi anak itu dibawa oleh beberapa orang suami. Mereka rumahnya jauh, tapi dalam *direct marketing* di sana ada sekian suami yang mendampingi, megangin anak, dan sebagainya. Saya terharu sekali melihat yang seperti itu. Mereka berangkat dengan seadanya, makan apa yang dibawa dari rumah, termasuk ada yang bawa cireng, enak, ternyata itu memang buatan dia sendiri. Dari sisi itu saya bilang, ada banyak yang mengharukan. Ada yang kemudian sambil jual jamu, dan semangat. Jadi saya merasa banyak pelajaran bagi saya.¹²⁶

Ucti juga menyatakan menikmati dan tenang menghadapi apapun hasil yang akan terjadi. Menurutnya yang penting dia mendapat kesempatan belajar banyak di tengah masyarakat, menghadapi isu-isu nyata yang nantinya harus tetap diingat oleh siapa saja yang terpilih menjadi anggota DPR. Justru pengalamannya di lapangan menguatkan tekadnya bahwa harus ada orang yang mewakili kepentingan perempuan dan anak di parlemen.

Kalau saya *enjoy* saja, tenang saja apapun hasilnya. Yang berharga menurut saya *leaning process* yang banyak. Melihat bagaimana ada anak gizi buruk, menurut saya itu pelajaran berharga. Ketika orang melihat semua itu, orang semestinya tidak akan lupa saat sudah berada di sana. Ada banyak yang begitu kuat melekat, dia harus memperjuangkan, termasuk agenda perempuan, agenda anak-anak.¹²⁷

Penjelasan Ucti tentang bagaimana reaksinya menghadapi keputusan MK tentang penetapan pemenang atas dasar suara terbanyak menunjukkan bahwa Ucti tidak benar-benar mengharapkan menjadi anggota DPR karena dia mengatakan bahwa dengan sistim seperti itu maka akan ada orang lain yang bukan dirinya yang akan terpilih menjadi anggota DPR. Pernyataannya bahwa “nanti akan dapat yang benar-benar rajin” menunjukkan bahwa Ucti tidak berusaha secara maksimal untuk terpilih dalam pemilu. Karena itu meski diletakkan pada posisi nomor 2 di daerah yang merupakan kantong suara PKS dia tidak terpilih.

Begitu muncul keputusan MK memang ini kemudian merubah skenario. Tapi kita menerimanya secara positifnya. Misalnya kita mengatakan “ya sudah ini merupakan kesempatan untuk *fastabiqul khoirot*, semua saja berlomba-lomba untuk setidaknya yang akan diuntungkan adalah perolehan suara partai”. Tapi kadang nggak begitu. Saya ingta, begitu keputusan MK keluar saya termasuk yang senang, dengan bilang “asyik, saya nggak usah ngapa-ngapain, toh nanti akan dapet yang benar-benar rajin, yang berhak dapat itu”. Tapi saya ditegur, dipanggil. Kita dikumpulkan DPP bahwa pada mulanya ditempatkan di posisi tertentu itu adalah posisi yang diproyeksi harusnya jadi. Jadi dengan demikian bukan mengatakan, “sekarang gue enak-enak, enggak, harus berjuang untuk tetap jadi”. Bukan atas nama *interest* pribadi, tetapi untuk memenuhi target partai. Jadi konteksnya ke sana¹²⁸

¹²⁶ Hasil wawancara dengan Ucti di Jakarta 10 Maret 2009.

¹²⁷ *Ibid.*

¹²⁸ *Ibid.*

Dalam konsep Lloyd tentang *the performative subject*, meski Uchti memiliki karir politik yang panjang dengan berbagai jabatan strategis yang pernah diembannya, tetapi menghadapi pemilu 2009 T bukanlah individu yang secara maksimal melakukan upaya untuk menciptakan citra yang baik sebagai subyek politik yang layak dipilih dalam pemilu. Selain itu memang daerah pemilihan tempat Uchti adalah daerah pemilihan yang menurut Ketua Bidang Kewanitaan PKS “daerah berat” dari sisi medannya yang luas. Karena itu berbagai faktor menunjukkan bahwa Uchti bukanlah individu dengan karakter subyek politik yang efektif dalam menghadapi pemilu.

Narasumber dari kubu reformis lain yang bekerja cukup keras menghadapi pemilu tetapi tidak terpilih adalah Sitaresmi. Sitaresmi menunjukkan bukti bahwa struktur partai lebih memprioritaskan calon nomor satu terlihat dalam pemilu 2009:

Cuma memang struktur mau tidak mau membantu, *mensupport*. Secara teori ustad Hilmi memang mengatakan semua struktur harus memfasilitasi secara adil untuk semua CAD, nggak boleh ada batas-batasan daerah. Kenyataannya struktur mengarahkan terutama pada nomor-nomor atas.¹²⁹

Pernyataan Sitaresmi mengkonfirmasi dugaan Komarul Kuniyati yang merasa bahwa struktur PKS lebih memprioritaskan kader partai yang dicalonkan pada posisi-posisi atas. Jika Sitaresmi sebagai calon yang berasal dari unsur kader (bahkan menjadi pengurus PKS meski hanya pada posisi staf) merasakan adanya prioritas dukungan struktur partai kepada calon pada posisi atas, maka wajar Komarul Kuniyati (sebagai calon yang berasal dari elemen non kader) merasakan bahwa ada ketidakadilan sikap pengurus PKS terhadap dirinya sehingga Komarul Kuniyati menyatakan bahwa dia sama sekali tidak dibantu oleh PKS dalam proses *direct selling* calon-calon anggota DPR. Bukti terjadinya diskriminasi dalam aktivitas *direct selling* oleh struktur PKS terlihat dari pernyataan Komarul Kuniyati berikut.

Jadi pernah Riko bawa golok. Saya tanya “kok bawa golok Riko?” “Habis *direct selling* harusnya tidak boleh mengangkat siapapun, yang penting ini ini ini calon kabupaten, silakan pilih salah satu. Tapi kok mereka bawa foto mbak K, sementara pengajian itu sudah dibina sama bunda, saya nggak terima, saya kejar pakai golok”¹³⁰

Meski Sitaresmi telah berupaya sekuat tenaga memanfaatkan berbagai jaringan yang telah dibinanya sejak lama, prioritas struktur PKS terhadap dua calon yang berada di atas namanya dalam daftar calon dari PKS untuk daerah pemilihannya membuat Sitaresmi tidak dapat memperoleh dukungan yang cukup untuk kemenangannya karena seluruh kader PKS di daerah pemilihannya pasti mendukung calon di atasnya. Guna mengoptimalkan perolehan suara untuknya, dalam proses pencalonan yang baru lalu Sitaresmi menggunakan jaringan akhwat dan jaringan eksternal, terutama kelompok-kelompok perempuan yang selama ini dibinanya di daerah pemilihannya, khususnya Kota Depok. Dia menyatakan:

¹²⁹ Hasil wawancara dengan Sitaresmi di Jakarta 25 Februari 2009..

¹³⁰ Hasil wawancara dengan Komarul Kuniyati di Bandarlampung 6 Mei 2009.

Selama ini saya memanfaatkan dua jaringan, yaitu jaringan akhwat dan jaringan eksternal. Saya merasa selama jadi CAD (calon anggota dewan) ini jaringan akhwat sangat berperan mem-*back up* saya karena memang di struktur partai itu yang sangat berdaya ada dua, kaderisasi dan kewanitaan. Masalah *networking* kita juga punya jaringan sampai ke akar rumput. Saya ketua kewanitaan *Islamic center bait al Qur'an* kota Depok, sudah sepuluh tahun. Kita rutin melakukan pelayanan masyarakat, tidak pernah henti, tidak hanya waktu pemilu. Sepanjang tahun kita melakukan pelayanan kesehatan gratis, khitanan massal, semua kerja-kerja sosial, *full*. Dan itu bukan hanya saya, kader perempuan PKS punya wadah sendiri-sendiri.¹³¹

Sebagai kader PKS Sitaresmi menyatakan bahwa selama ini dia telah membangun jaringan dengan masyarakat sampai dengan tingkat akar rumput. Sebagai ketua Ketua Kewanitaan *Islamic Center Bait Al Qur'an* Kota Depok, Sitaresmi rutin melakukan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, dukungan eksternal yang disebutkannya bersifat nyata karena selama ini telah dibangun dan dipeliharanya sepanjang tahun.

4.2.2.7 Mencarikan Dukungan untuk Kampanye, Membangun Jaringan Non Tradisional

Ledia Hanifa, narasumber terakhir, memaparkan hal-hal yang dilakukan untuk mendukung kesuksesan pencalonan perempuan PKS menjadi anggota DPR. Hal tersebut antara lain mencarikan barang promosi dengan harga termurah, mencarikan jaringan donatur, memberikan dukungan dari jaringan struktur partai khususnya melalui penggunaan Pos Wanita Keadilan, membangun jaringan dukungan dengan organisasi-organisasi perempuan seperti Kaukus Perempuan Politik Indonesia serta organisasi perempuan lainnya, serta mendorong para perempuan calon anggota DPR untuk membangun jaringan dengan kelompok-kelompok minat di luar partai seperti kelompok sepakbola, kelompok pecinta klub band dan sebagainya. Semua itu dijelaskan oleh Ledia Hanifa seperti terlihat dalam pernyataannya berikut:

Sampai sejauh ini yang bisa kami lakukan adalah mencarikan barang-barang termurah. Yag bisa kami lakukan adalah pendanaan termurah, pertama. Kedua, jaringan donatur. Kemudian yang jelas jaringan struktural, Pos wanita keadilan punya fungsi untuk sosialisasi calon-calon perempuan, selain calon-calon laki-laki tentunya. Juga jaringan-jairngan yang sudah dibangun, antara lain KPPI, kaukus perempuan politik. Itu juga ada di provinsi dan kabupaten/kota. Jadi *link* itu juga dibangun. Soal permodalan yang bisa kami lakukan adalah pelatihan untuk *fund raising* dan bagaimana mereka meng-*create* kegiatan yang bisa diberi bantuan. Kalau kita hanya berfikir baliho, baliho PKS terbatas sekali..karena sangat mahal.

Sebenarnya yang meminimalisir dana itu adalah loyalitas jaringan yang dibangun, mereka tidak meminta uang sama sekali. Walaupun ada dana,

¹³¹ Hasil wawancara dengan Sitaresmi di Jakarta 26 Februari 2009.

sekedar untuk konsumsi, untuk transpot sedikit. Itu justru yang sangat kuat. Artinya *low cost*. (Pemilu) 2004 itu ada satu anggota DPR RI yang bisa jadi, perempuan, setelah dihitung-hitung dananya tidak lebih dari 50 juta bisa jadi anggota DPR RI.

Indonesia itu kan kultural, bukan semata-mata saudara darah, sehingga bisa masuk wilayah-wilayah yang selama ini tidak dapat dijangkau partai. Misalnya ada salah satu caleg periode sekarang ini yang bisa menggerakkan komunitas slankers, karena salah satu saudaranya anggota slankers. Jadi kegiatannya itu tidak melulu sosialisasi, tapi kesepakatannya kita mengkontribusikan apa buat mereka, dan tidak dalam bentuk uang. Kita mengkontribusikan kebutuhan mereka, pengetahuan kesehatan reproduksi, bahaya HIV. Ada yang pengusaha, ada ang klub motor. Perempuan harus masuk ke situ. Ada yang dengan klub sepakbola. Jaringan-jaringan sosial itu justru menariknya di situ. Buat kita itu..dan itu pengalaman yang luar biasa.¹³²

Pengalaman melakukan banyak inovasi untuk membangun jaringan dukungan pada pemilua anggota DPR adalah pengalaman luar biasa buat perempuan-perempuan PKS. Ada yang membangun dukungan dengan komunitas *Slankers*, dengan klub sepakbola, hal-hal yang tadinya tadinya tidak terbayangkan akan dilakukan oleh perempuan PKS. Selain melakukan upaya pengembangan dukungan melalui pembentukan simpul-simpul dukungan seperti itu, Ledia Hanifa menyatakan bahwa perempuan PKS juga melakukan upaya lain untuk mensukseskan pencalonan perempuan menjadi anggota DPR. Upaya itu adalah:

Kita memfokuskan, sepakati siapa yang sebenarnya kita harapkan masuk DPR RI, masuk di provinsi, masuk kabupaten. Kita *share*, kita bicara mereka bisa mengukur diri. "Saya nggak akan bisa memberikan suara yang terlalu signifikan, meski saya sudah berusaha mati-matian". "Kalau begitu kita akan sama-sama sosialisasi". Kita sama-sama dalam *level horizontal*. Yang vertikal kita buat satu paket, tidak harus semua perempuan, paket pusat, provinsi, kota/kabupaten. Jadi kita sosialisasi bertiga. Jadi tidak ada suara pemilih yang pecah, misalnya pusatnya buat orang lain, kotanya buat siapa, partai lain. Karena 2004 pecahnya sudah mulai kelihatan, kita mensiasati. Teman perempuan yang potensial itu kita dorong bergandeng dengan laki-laki yang potensial juga. Atau perempuan yang memang potensial, gitu. Bisa jadi dua perempuan satu laki-laki, bisa jadi dua laki-laki satu perempuan. Jadi kita selalu berkoordinasi satu paket.¹³³

Melakukan pembahasan tentang siapa perempuan yang diharapkan masuk DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota diantara sesama perempuan calon, melakukan sosialisasi bersama secara horizontal diantara para calon, membentuk paket-paket calon secara vertikal adalah upaya sosialisasi calon yang diharapkan dapat efektif mengurangi biaya kampanye, mengurangi dampak friksi antar calon dan lebih efektif menjangkau daerah pemilihan yang luas karena

¹³² Hasil wawancara dengan Ledia Hanifa di Jakarta 27 Januari 2009.

¹³³ *Ibid.*

masing-masing calon juga mengkampanyekan calon lain di sub daerah pemilihan yang lain dengan cara berbagi wilayah kampanye.

Meski banyak melakukan upaya membangun jaringan dukungan serta melakukan manajemen kampanye yang lebih efektif, tetapi Ledia Hanifa menilai bahwa keputusan MK tentang penetapan pemilih berdasar suara terbanyak telah merugikan pencalonan perempuan PKS menjadi anggota DPR. Dia menyatakan:

PKS memandang Mahkamah Konstitusi ketika mencabut pasal 214 itu. tidak melihat keseluruhan UU itu sendiri. Semangatnya pertama proporsional terbuka terbatas, dengan pencabutan itu arahnya lebih kepada distrik. Kita di *supportingnya* tidak disiapkan. Di awal, PKS itu mengusulkan suara terbanyak, tapi dengan daerah pemilihan yang lebih kecil. Jadi *winner take all*, jelas orang yang mewakili tetapi dengan konstituensi yang lebih kecil. Sekarang ada satu dapil dengan 10 kabupaten, .nggak terbayang pasti *high cost*. Semua partai politik sebenarnya *setting* nomor. Begitu dicabut jadi masalah. Yang dikhawatirkan, gerakan perempuan itu mendukung dengan afirmasi. Ketika terpilih 3, satunya perempuan. Di berbagai negara Eropa juga tetap ada *affirmative action* untuk profesional. Karena dikhawatirkan dari suara terbanyak ini kompetensi tidak memadai, dan cuma orang populer, yang terpilih, tapi tidak kompeten. Kita membutuhkan orang dengan kompetensi tertentu untuk mengelola negara, bukan populer atau tidak. Kita sendiri belum punya pola yang jelas *affirmative* terhadap suara perempuan, karena di kalangan perempuan banyak yang merasa perempuan seperti meminta-minta. Bukan meminta-minta kalau *starting pointnya* sama.¹³⁴

Ledia Hanifa melihat bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut menyebabkan berbagai masalah karena akhirnya kampanye menjadi berbiaya tinggi karena calon harus melakukan kampanye pada daerah pemilihan yang umumnya sangat luas (sebagai ilustrasi Daerah Pemilihan Lampung II meliputi 5 Kabupaten dan 1 Kota dengan jarak tempuh mobil kurang lebih 6 sampai 7 jam perjalanan dari satu ujung ke ujung lainnya). Selain itu keputusan tersebut juga mendorong terpilihnya orang-orang yang sekedar terkenal, tetapi belum tentu mempunyai kapasitas mengelola negara. Orang-orang dengan kompetensi manajemen organisasi partai yang mempunyai kualitas diri yang bagus justru belum tentu terpilih karena kurang dikenal masyarakat. Meski demikian Ledia Hanifa menilai ada ironi tentang hal ini karena beberapa segmen perempuan justru mendukung ide penetapan pemenang berdasar suara terbanyak ini. Menurutnya hal ini disebabkan para perempuan tersebut tidak mempunyai pemahaman yang baik atas kondisi sebagian besar perempuan yang lain. Fenomena *queen bee*¹³⁵ seperti itu dikemukakan Ledia Hanifa dalam penjelasannya berikut:

Di kalangan perempuan banyak yang tidak setuju (dengan *affirmative action*) karena nggak faham dan tidak melihat kondisi perempuan lain.

¹³⁴ *Ibid.*

¹³⁵ “*Queen bee*” atau “lebah ratu” merupakan terminologi yang dipergunakan untuk menggambarkan perempuan yang merasa dirinya merupakan pribadi yang sangat mandiri dan dapat hidup dalam lingkungan laki-laki tanpa perlu dukungan perempuan lain. Keberadaan perempuan lain bahkan dianggap sebagai ancaman terhadap dirinya.

Kalau melihat kondisi dirinya, dia mungkin punya kader banyak, punya modal yang kuat, punya jaringan yang lebih. Tapi perempuan yang lain gimana. Dengan kultur kita kan..memang punya keterbatasan. Sampai sekarang kita belum dapat bagaimana seharusnya penyelesaiannya.¹³⁶

Pendapat kalangan perempuan yang setuju terhadap penetapan pemenang pemilu atas dasar perolehan suara terbanyak karena tidak memahami kondisi sebagian besar perempuan yang tidak punya kader yang banyak, yang tidak memiliki modal yang kuat, yang tidak memiliki jaringan yang luas, bisa menghalangi upaya perempuan untuk meningkatkan jumlah perempuan sebagai calon anggota DPR melalui pemenuhan kuota 30% calon perempuan. Ledia Hanifa menilai bahwa perempuan PKS belum memiliki cara pemecahan masalah yang muncul karena ketentuan baru tentang penetapan pemenang dengan suara terbanyak ini. Pendapat mantan Presiden PKS, Hidayat Nurwahid, merupakan pemecahan yang mungkin akan diterapkan PKS di masa datang. Hidayat Nurwahid menyatakan:

Kalau nanti sejak awal memang dengan suara terbanyak, pasti partai akan mengambil kebijakan berbeda. Mungkin katakanlah targetnya hanya empat kursi, maka hanya empat saja dicalonkan. Dan kalau empat itu nanti diukur betul kader memang potensial untuk memenangkan persaingan politik di situ. Jadi di situlah kemudian karenanya suara perempuan PKS juga menjadi amat sangat signifikan.¹³⁷

Mekanisme pencalonan dengan hanya mengajukan calon sebanyak jumlah kursi yang potensial dimenangkan atau berdasar target kursi per daerah pemilihan memang akan meminimalisir konflik internal. Meski PKS memiliki kepatuhan kader yang sangat baik, tetapi konflik internal dalam pencalonan anggota DPR periode 2009-2014 sudah terjadi karena PKS merekrut calon anggota DPR dari segmen non kader. Hal ini telah disebutkan oleh salah satu narasumber dalam bagian lebih awal Bab ini. Meski demikian jika sistem yang semakin mendekati sistem distrik ini diterapkan, bukan tidak mungkin justru akan membuat semakin sedikit perempuan yang dapat terpilih dalam pemilu.¹³⁸

Banyak hal dilakukan oleh Ledia Hanifa dalam proses pencalonan anggota DPR periode 2009-2014. Dia melakukan hal-hal yang tidak hanya bermanfaat bagi dirinya tetapi juga bagi perempuan calon anggota DPR dari PKS yang lain. Hal ini adalah karena tanggung-jawabnya sebagai Ketua Bidang Kewanitaan DPP PKS. Bersama kelompok perempuan PKS lainnya, Ledia Hanifa melakukan *up-grading* fungsionaris, pelayanan pemberdayaan perempuan dan pemberdayaan politik perempuan. Pemberdayaan politik perempuan dilakukan melalui pembentukan Pos Wanita Keadilan yang tersebar di seluruh Indonesia sebanyak sekitar 5000 titik Pos dengan anggota berkisar antara 30 orang sampai dengan 50 orang pada masing-masing titik. Ledia Hanifa juga melakukan banyak inovasi untuk membangun jaringan dukungan bagi perempuan PKS guna kepentingan

¹³⁶ Hasil wawancara dengan Ledia Hanifa di Jakarta 27 Januari 2009.

¹³⁷ Hasil wawancara dengan Hidayat Nurwachid di Bandar Lampung 20 Juni 2009.

¹³⁸ Untuk diskusi mengenai implikasi sistem pemilu terhadap perwakilan politik perempuan yang merupakan kelompok minoritas dalam kehidupan politik dapat dilihat misalnya dalam Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, khususnya dalam Bab yang membahas Partai dan Pemilu..

pemilua anggota DPR. Secara pribadi Ledia melakukan *appeal* kepada pengurus pusat PKS agar lebih banyak perempuan diletakkan pada posisi nomor urut satu pada daftar calon dari PKS pada daerah-daerah yang merupakan daerah kantung suara PKS. Sejauh ini upaya tersebut baru menghasilkan 2 orang pada 2 daerah pemilihan. Dengan demikian 75 daerah pemilihan masih didominasi laki-laki. LH juga sudah mengupayakan bantuan dana kampanye bagi para perempuan PKS, dan upayanya ini berhasil mempengaruhi DPP PKS sehingga para perempuan calon anggota DPR mendapat bantuan biaya kampanye meski jumlahnya masih sangat jauh dari memadai.

Untuk kepentingan proses pencalonan anggota DPR, sebagai Ketua Bidang Kewanitaan DPP PKS, Ledia Hanifa dan Bidang Kewanitaan berupaya mencari barang promosi dengan harga termurah, mencari jaringan donator, memberikan dukungan dari jaringan struktur partai khususnya melalui penggunaan Pos Wanita Keadilan, membangun jaringan dukungan dengan organisasi-organisasi perempuan seperti Kaukus Perempuan Politik Indonesia serta organisasi perempuan lainnya, serta mendorong para perempuan calon anggota DPR untuk membangun jaringan dengan kelompok-kelompok minat di luar partai seperti kelompok sepakbola, kelompok pecinta klub band dan sebagainya. Bersama dengan kelompok wanita di PKS Ledia Hanifa melakukan pembahasan tentang siapa perempuan yang diharapkan masuk menjadi anggota legislatif (DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota) diantara sesama perempuan calon, melakukan sosialisasi bersama secara horizontal diantara para calon, membentuk paket-paket calon secara vertikal agar sosialisasi calon dapat efektif dan efisien (mengurangi biaya kampanye masing-masing calon). Berkenaan dengan keputusan MK tentang penetapan pemilih berdasar suara terbanyak Ledia Hanifa menilai bahwa keputusan tersebut telah merugikan pencalonan perempuan PKS menjadi anggota DPR. Secara pribadi Ledia Hanifa merasa dirinya efektif sebagai kader PKS, serta selalu mengupayakan berbagai program untuk mendukung pencalonan perempuan PKS menjadi anggota DPR.

Tabel 4.3
Tindakan Perempuan PKS Menghadapi Pemilu

Nama	Tindakan Menghadapi Pemilihan	Hasil
YY	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun jaringan dukungan dari keluarga besar, kader, rekan-rekan lama, struktur partai, dan jaringan majlis taklim binaan 2. Mendorong kader sebagai konstituen utama untuk bekerja keras 3. Berkampanye secara aktif dengan didukung oleh keluarga dengan suami menjadi “manajer” kampanye 	Terpilih
HA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mencurahkan segenap waktu, tenaga, pikiran menghadapi pemilu 2. Berkampanye bersama dengan calon lain 3. Mendapat dukungan sepenuhnya dari partai 	
HH	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun dukungan dari majlis taklim dan Ikatan 	Tidak

	Dai Indonesia wilayah Lampung 2. Mengkampanyekan calon nomor satu dan nomor dua untuk daerah pemilihannya	terpilih
KA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempetakan daerah kampanye menjadi simpul-simpul wilayah 2. Membangun kerjasama dengan calon untuk provinsi dan kabupaten 3. Memberdayakan kader untuk melakukan “<i>direct selling</i>” 4. Membangun simpul-simpul dukungan dari para tokoh yang berhasil dihubungi 5. Melengkapi diri dengan ketrampilan yang dibutuhkan untuk berkampanye (cara berkomunikasi, menyetir mobil, dsb) 	Tidak terpilih
KK	Mendatangi daerah-daerah di pedalaman yang tidak didatangi calon lain; melakukan kampanye secara serius; memanfaatkan berbagai jaringan yang selama ini telah dibangunnya sebagai tokoh wanita Islam di daerahnya; memasang strategi yang tepat untuk melakukan sosialisasi dirinya ke masyarakat desa yang pada umumnya tidak terdidik baik; memanfaatkan berbagai program sosial yang dijalinnya dengan berbagai kelompok perempuan; merasa mendapat dukungan besar dari berbagai kelompok masyarakat, khususnya majlis-majlis taklim dan etnis Jawa khususnya komunitas panginyongan. KK menyatakan bahwa dia memperoleh suara signifikan dalam pemilu 2009, tetapi merasa suara dukungan untuknya “ditilep	Tidak terpilih
T	Tidak terlalu maksimal berkampanye; melakukan <i>direct marketing</i> bersama dengan kader partai; senang jika yang benar-benar rajin terpilih	Tidak terpilih
S	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun jaringan dengan masyarakat binaan 2. Memberikan pelayanan kepada masyarakat. 3. Memanfaatkan jaringan akhwat dan jaringan eksternal untuk kampanye 	
LH	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun jaringan dukungan untuk perempuan PKS, antara lain dari media massa, akademisi, ormas perempuan, KPPI 2. Mencarikan donatur 3. Membangun jaringan dukungan elwat Pos Wanita Keadilan 4. Mencarikan barang-barang termurah 5. Mengupayakan bantuan dana kampanye untuk perempuan calon 6. Mendorong kampanye bersama sehingga sistimatis dan efektif serta efisien 	Terpilih

Dilihat dari sisi sikap dan upaya perempuan PKS menghadapi pencalonan dan pemilihan mereka menjadi anggota DPR, penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan. Menggunakan konsep *the mobile subject* dan *the performative subject* dari Moya Lloyd, penelitian ini menghasilkan gambaran bahwa perempuan PKS adalah *subject-in process* atau sedang dalam proses menjadi subyek politik. Berikut adalah hasil penelitian yang menunjukkan hal tersebut.

Perempuan PKS tidak menunjukkan peran politik yang seragam terhadap perjuangan perempuan untuk memperoleh keadilan politik. Mereka terbagi menjadi dua, yaitu kubu tradisional dan kubu reformis. Kubu tradisional melakukan peran-peran yang justru memperkuat identitas perempuan sebagai subyek yang tidak setara dengan laki-laki. Sama dengan penghormatannya kepada suami di rumah, bagi perempuan PKS kubu tradisional, para pemimpin partai adalah orang dengan kekuasaan yang harus dihormati. Mereka bahkan menolak adanya diskriminasi dalam PKS meski bukti-bukti menunjukkan masih adanya diskriminasi. Mereka menghasilkan bayan yang justru membebani perempuan. Mereka tidak setuju dengan perjuangan kuota, mereka merasa tidak perlu merubah sistim rekrutmen agar lebih banyak perempuan yang dapat direkrut menjadi anggota DPR. Sebaliknya kubu dua menyadari bahwa perempuan mempunyai titik *start* yang berbeda dengan laki-laki dalam kehidupan politik. Karena itu mereka memperjuangkan kuota. Mereka juga mengatakan bahwa fiqih tradisional tentang perempuan perlu dirubah. Mereka juga mengatakan bahwa definisi perempuan dalam bayan perlu dirubah sehingga beban domestik tidak semata diasosiasikan dengan perempuan. Mereka mengasosiasikan diri dengan kelompok perempuan yang melakukan perjuangan untuk keadilan politik bagi perempuan.

Sikap dan tindakan perempuan PKS terhadap pencalonan mereka menjadi anggota DPR juga berbeda. Mereka terbagi menjadi tiga kubu. Kubu pertama adalah kubu yang sebenarnya tidak menghendaki menjadi calon anggota DPR. Ada dua alasan yang dikemukakan yaitu karena mengalah kepada suami yang sedang dicalonkan menjadi anggota DPRD Provinsi dan karena sudah memiliki rencana karir yang lain di eksekutif. Kubu dua menerima pencalonan dengan baik. Meski tidak mengetahui mengapa mereka dicalonkan pada daerah pemilihan dan pada nomor urut dalam daftar calon, mereka menerima pencalonan dengan baik. Kubu ketiga justru berjuang agar perempuan PKS mendapat posisi yang menguntungkan di daerah pemilihan dan dalam daftar urut calon. Adanya ketiga kubu ini menunjukkan bahwa terdapat sikap dan tindakan yang berbeda dari para perempuan PKS dalam dimensi performative subject. Mereka berbeda sikap dan tindakan menghadapi pencalonan.

Menghadapi pemilihan, perempuan PKS terbagi menjadi dua kubu, yaitu kubu yang berjuang sungguh dan kubu yang justru tidak maksimal melakukan kampanye dan sosialisasi agar terpilih. Sekali lagi, kubu kedua ini terdiri dari individu-individu yang segan menerima pencalonan mereka menjadi anggota DPR. Menggunakan ketiga kriteria ini, maka penelitian ini menemukan perempuan PKS sebagai kelompok yang sedang berproses menjadi subyek politik.

BAB 5

FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP PEREMPUAN DALAM RELASI KEKUASAAN DI PKS

Kemampuan perempuan PKS menjadikan dirinya sebagai subyek politik dalam relasi kekuasaan telah digambarkan secara berturut-turut dalam Bab II, III, dan IV. Bab II menggambarkan kemampuan perempuan menjadi subyek politik dalam struktur kewenangan di PKS, sementara Bab III menggambarkan pandangan kelompok perempuan PKS tentang hak politik mereka sendiri, sedangkan Bab IV menggambarkan kemampuan tersebut dari sisi peran mereka dalam mempengaruhi proses pencalonan anggota DPR periode 2009-2014. Bab V ini menjelaskan factor-faktor yang berpengaruh terhadap kemampuan perempuan PKS menjadikan diri mereka sebagai subyek politik dalam relasi kekuasaan di PKS. Faktor-faktor tersebut meliputi dua factor besar yaitu factor dari dalam diri dan kelompok perempuan yang meliputi kelemahan-kelemahan yang ada pada mereka yang dalam teori Moya Lloyd disebut sebagai ekspresi perempuan sebagai *the deferred subject*; kekuatan-kekuatan atau ciri-ciri ideal yang ingin dimiliki oleh perempuan atau ekspresi perempuan sebagai *the subject of lack*; serta faktor dari luar diri dan kelompok perempuan berupa pandangan, sikap dan tindakan pejabat PKS berkenaan dengan hak politik perempuan.

5.1 Perempuan PKS sebagai Subyek dengan Kelemahan-Kelemahan (*the Deferred Subject*)

Sebagaimana sudah dikemukakan pada Bab I disertasi ini, konsepsi *the deferred subject* dari Moya Lloyd yang merupakan salah satu dimensi perempuan PKS sebagai *subyek-dalam proses* membentuk citra diri sebagai subyek politik mengandung pengertian sebagai berikut:

*The idea of the deferred subject exposes how subject productions are always susceptible to dissolution. In this version of the subject-in-process,....emphasis is placed on what is prohibited or excluded during the course of subject production.*¹ (Ide tentang subyek dengan kelemahan menunjukkan bahwa upaya membangun ciri sebagai subyek rentan terhadap terputusnya proses pembentukan ciri-ciri tersebut, Dalam hal ini tekanan diberikan terhadap kelemahan-kelemahan apa yang dilarang atau harus disingkirkan dalam proses pembentukan ciri sebagai subyek politik tersebut)

Sub bab ini membahas mer 238 spek-aspek apa yang dianggap sebagai kelemahan oleh perempuan PKS yang menghambat mereka menjadi subjek politik yang efektif sehingga harus dihilangkan. Untuk mengumpulkan data tentang *what is prohibited or excluded during the course of subject production*, pertanyaan penelitian yang diajukan kepada para narasumber penelitian ini adalah faktor-faktor apa yang merupakan kelemahan diri dan kelompok perempuan yang selama ini menghambat keinginan mereka untuk dapat menjadi subyek politik

¹ *Op. cit.* Hal. 20.

efektif baik di partai maupun dalam masyarakat yang lebih luas. Hasil penelitian menunjukkan hal tersebut dalam informasi yang diberikan para narasumber.

Yoyoh Yusroh menceritakan bahwa seringkali perempuan PKS masih menunjukkan kesungkapan untuk menjalankan peran-peran politik. Dia mengatakannya sebagai berikut:

Jadi memang ada unsur kesungkapan dari kader partai perempuan. Tapi boleh dikatakan nggak sampai 5% dari pengalaman saya turun ke daerah. Peluang dari struktur ada, tapi dari kader perempuannya yang malu-malu, untuk berperan aktif. Ada kegamangan.²

Sifat sungkan, gamang, adalah sifat yang menurut Yoyoh Yusroh merupakan kelemahan dalam diri perempuan yang harus dibuang jika perempuan PKS ingin dapat berperan dalam kehidupan politik dimanapun. Perempuan seharusnya tidak gamang, tidak sungkan untuk menjalankan berbagai peran politik. Kegamangan dan kesungkapan hanya akan membuat perempuan ragu-ragu dan tidak berani melakukan peran politik dan mengambil inisiatif-inisiatif untuk peran politik.

Husna Hidayati, narasumber kedua menceritakan kelemahan-kelemahan perempuan PKS. Dia menyatakan bahwa perempuan memiliki keterbatasan, khususnya keterbatasan uang. Selain itu perempuan masih belum banyak pengalaman dalam kehidupan politik. Kedua hal tersebut dikemukakannya dalam pernyataan berikut:

Saya melihatnya sebetulnya bagaimanapun perempuan memang punya keterbatasan. Saya melihat di lapangan, kita udah jaga suara dan sebagainya, duit, uang. Itu salah satu keterbatasan. Yang kedua, soal pengalaman. Saya melihat, terutama kalau untuk partai, banyak teman-teman kita ini belum pengalaman. Belum tau masalah politik. Mungkin dakwah iya.³

Selain keterbatasan dan kurang pengalaman, Husna Hidayati juga menceritakan bahwa dirinya sebagai perempuan merasa tidak berbakat untuk terjun ke dunia politik, khususnya untuk mempromosikan diri, mengkampanyekan diri, mempengaruhi masyarakat agar memilih dirinya. Dia tidak sanggup berlomba meraih suara dengan cara-cara seperti itu. Dia menceritakan hal tersebut dalam pernyataannya berikut:

Saya sendiri sejak dulu banyak turun. Tapi ketika betul-betul melihat kondisi di lapangan kemarin, saya sendiri kayaknya nggak bakat. Kalau cuman tinggal duduk, tinggal bicara dan sebagainya mungkin bisa, tapi untuk berlomba meraih suara dengan sistem seperti ini, caranya seperti ini, kemudian masyarakat yang memang tingkat pemahamannya masih seperti itu, masya Allah, berat.⁴

Husna Hidayati menyadari bahwa menjalankan peran politik tidak mudah. Perempuan harus sanggup bersaing meraih suara pendukung dengan berkampanye, mempromosikan diri, melakukan tindakan yang menurutnya

² Hasil wawancara dengan Yoyoh Yusroh di Tangerang 4 April 2009

³ Hasil wawancara dengan Husna Hidayati di Bandarlampung 5 Mei 2009

⁴ *Ibid.*

kadang tidak etis karena memuji-muji diri sendiri, menunjukkan kelebihan diri. Dia merasa tidak berbakat untuk itu semua. Dalam bahasa Yoyoh Yusroh, istilah tidak berbakat dari Husna Hidayati bisa disejajarkan dengan istilah gamang, merasa tidak enak, merasa sungkan karena sosialisasi yang diterima kader PKS selama ini adalah agar jangan menonjolkan diri. Sifat utama seseorang yang terpuji dalam ajaran Islam adalah agar jangan menonjolkan kelebihan dan amalan yang sudah dilakukan. Dapat dipahami bagaimana Husna Hidayati mengalami konflik antara nilai yang selama ini diajarkan kepadanya dengan apa yang harus dilakukannya di ranah publik, lebih khusus di ranah politik. Selain bakat yang mungkin tidak ada, Husna Hidayati juga menceritakan tentang masih lambannya mayoritas perempuan PKS serta adanya persaingan yang tidak sehat diantara perempuan.

Lamban, jujur saja, benar. Kalau suami perlu dilayani istri untuk semua hal, harusnya sudah selesai. Suami nggak perlu melambat-lambatkan istrinya. Kadang-kadang kita minta keringanan, minta *rausoh*. Kita nggak berpikir orang lain juga meninggalkan hal yang sama, Lambannya itu karena keinginan untuk bisa idealis. Selama ini kita mendakwahkan perempuan yang ideal. Perempuan itu yang penting beres dulu di rumah. Semuanya di bidang perempuan. Kadang-kadang kalau sama-sama perempuan ersaingannya lebih keras. Tapi kalau kerja dengan laki-laki lebih enak karena dia lebih pakai logika.⁵

Jika Yoyoh Yusroh dan Husna Hidayati melihat kelemahan dari sisi sifat individu yang berkait langsung dengan masalah kekuasaan, Aan Rochana, narasumber berikutnya melihat faktor yang lebih terkait dengan masalah perkembangan psikologis perempuan PKS, yaitu umur. Aan Rochana melihat umur yang masih muda sebagai kelemahan perempuan sehingga belum banyak perempuan yang terlibat di berbagai jabatan politik. Aan Rochana menyatakan:

Kalau persoalannya kenapa baru sedikit yang di Majelis Syuro dan di MPP, karena partai kita termasuk partai yang masih muda muda, masih baru, jadi otomatis mungkin mereka melihatnya siapa yang memang kiprahnya sudah lama.⁶

Selain masalah umur, sebagai anggota MPP yang mempunyai tugas dan wewenang utama untuk melakukan evaluasi terhadap berbagai individu yang dinominasikan dan dipromosikan untuk berbagai jabatan politik melihat bahwa faktor moralitas sering menjadi kelemahan perempuan untuk menduduki jabatan-jabatan politik. Aan Rochana menyatakan:

Kita memahami bahwa kelebihan yang dimiliki oleh kader partai itu dari sisi yang mungkin tidak dimiliki oleh kader partai yang lain, yaitu dari sisi moralitasnya.⁷

Pedoman moralitas perempuan PKS untuk terjun dalam kehidupan politik yang secara formal menjadi pegangan PKS ada tiga, yaitu Falsafah Dasar PKS, Bayan Dewan Syari'ah Pusat PKS nomor Nomor : 19/B/K/DSP-PKS/1429

⁵ *Ibid*

⁶ Hasil wawancara dengan Aan Rochana di Jakarta 26 April 2009

⁷ *Ibid*

tentang Aktivitas Dakwah dan Politik Muslimah, dan buku Keakhwatan⁸ yang berisi 4 seri, yaitu Keakhwatan 1, Keakhwatan 2, Keakhwatan 3, dan Keakhwatan 4. Dengan menekankan pada faktor moralitas, maka AR menggunakan sangat banyak aturan atau ikatan moral. Beberapa contoh dapat diambil di sini. Dalam buku Keakhwatan 2 misalnya, terdapat begitu banyak ketentuan yang mengikat perempuan untuk dapat terjun ke dunia dakwah dan politik, antara lain kesiapan spiritual, kesiapan intelektual, kesiapan fisik, kesiapan materi, taat, memenuhi etika berpakaian dan menggunakan perhiasan, memenuhi etika berinteraksi dengan laki-laki, mengikuti contoh para sahabiyat, dan mematuhi berbagai fiqih tentang perempuan.

Berbagai pedoman tersebut memberi contoh-contoh aktivitas yang dilakukan perempuan pada masa Rasul, tetapi juga memberikan batasan-batasan etika dan moral yang sangat banyak dan rinci. Menyebut moralitas sebagai kelemahan, Aan Rochana sebenarnya sedang menyebut karakter yang tidak terbatas jumlahnya karena tidak mungkin menyebut satu persatu aspek-aspek dalam moralitas yang harus dipenuhi oleh perempuan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Lloyd berikut:

*Taking a case of gender... gender identity is "an accomplishment", but an uncertain one...The structure of this image implies that meaning is perpetually deferred in a "spiral of infinite regression in representation"*⁹

Herlini Amran, narasumber berikutnya menyebutkan pola pengasuhan di rumah pada waktu kecil oleh orang tua yang mendidik anak perempuan untuk banyak di rumah telah menjadi penyebab kegamangan perempuan masuk ke dunia politik. Herlini Amran menjelaskan:

Dari *background* memang ada semacam kendala dari pola asuh. Walaupun kita memberi pemahaman keIslaman, tapi orang punya *background* pola asuh bahwa perempuan itu harus banyak di rumah. Mungkin orang tua juga mendidik anak laki-lakinya, sudahlah yang perempuan yang di rumah saja. Ini mempengaruhi juga. Setelah era partai mungkin ada sedikit kegamangan.¹⁰

Sama dengan Husna Hidayati yang menyebut keterbatasan uang sebagai modal untuk melakukan aktivitas politik, antara lain untuk biaya perjalanan atau biaya pengasuh anak jika masih mempunyai anak kecil, Herlini Amran juga menyebut keterbatasan uang dapat menjadi penyebab perempuan sulit melakukan aktivitas politik. Dia menyatakan dirinya sendiri tidak akan pernah dapat melakukan aktivitas terkait dengan pencalonannya menjadi anggota DPR jika tidak dibantu partai. Herlini Amran menyatakan:

Saya sudah katakan ketika partai mencalegkan saya, saya nggak punya apa apa. Kebetulan saya sedang bangun aula di samping rumah untuk wakaf, untuk aktivitas sosial kita di lingkungan. Saya katakan kalau dana saya

⁸ Cahyadi Takariawan dan Mahid Ahmadi, Abdullah Sunono, Ida Nurlaila. 2005. *Keakhwatan 1, 2, 3, 4*. Solo: Era Internedia

⁹ Moya Lloyd. *Op. cit.* Hal 21.

¹⁰ Hasil wawancara dengan Herlini Amran di Jakarta 26 April 2009

ada saya bangun itu. Jadi kalau saya betul dialonkan silakan lanjut, kalau nggak ya bagaimana lagi.¹¹

Hanya dengan bantuan partailah Herlini Amran dapat meneruskan proses pencalonannya menjadi anggota DPR. Jika tidak dibantu partai tidak mungkin Herlini Amran dapat terpilih menjadi anggota DPR. Selain faktor keuangan, Herlini Amran juga menyebut soal kultur partai yang sering mengadakan rapat sampai larut malam. Hal ini menimbulkan perasaan tidak enak baginya ketika harus berada pada satu rapat dengan laki-laki sampai larut malam. Perasaan seperti ini dinyatakannya tidak ada jika pertemuannya dengan teman-temannya di Bidang Kewanitaan. Hal ini terlihat dalam pernyataannya berikut:

Kalau hambatan saya kira tidak ada. Tapi mungkin karena saya perempuan, agak nggak enak juga kalau berada di tengah-tengah laki-laki malem-malem. Jadi di DSP yang saya rasakan mereka memberikan kelonggaran, kalau maghrib kita pulang. Bahkan justru saya di kewanitaan itu sampai malem, karena perempuan semua. Ada perasaan saya itu bagian dari fithrah.¹²

Selain keengganan untuk berada pada satu rapat dengan laki-laki sampai larut malam sebagai hambatan perempuan, Herlini Amran menyebutkan ketakutan akan menelantarkan keluarga sebagai hambatan psikologis yang khas perempuan. Perempuan juga merasa khawatir tidak akan dapat melakukan peran politik secara *full*, secara *all out*. Herlini Amran memberi penjelasan sebagai berikut:

Yang menghambat itu kadang-kadang perempuan sendiri. “aduh bagaimana nanti anakku”. Secara psikologis mungkin karena iklim Indonesia, kayaknya dosa meninggalkan anak sampai malam. Sebenarnya kalau untuk penghambat bisa jadi kalau perempuan khawatir nanti nggak bisa *full*, nggak *bisa all out*. Barangkali itu saja, tidak ada unsur-unsur yang lain.¹³

Ledia Hanifa, Ketua Bidang Kewanitaan DPP PKS memberi banyak penjelasan tentang kelemahan dan hambatan peran politik perempuan. Dia menjelaskan terdapat aturan-aturan informal (misalnya acara rapat, agenda pertemuan) di PKS belum secara otomatis, belum secara spontan mengakomodasi kepentingan dan kondisi khusus perempuan. Ledia Hanifa menjelaskannya sebagai berikut:

Kebiasaan dan aturan informal yang diterapkan di partai, belum menjadi sesuatu yang spontan sensitif gender dalam mengakomodasi kepentingan khusus perempuan. Kita masih harus memperjuangkannya. Tapi secara umum mereka memang memperhatikan persoalan-persoalan tersebut¹⁴

Kelemahan kedua yang dikemukakan Ledia Hanifa adalah sifat emosional. Bagi dirinya secara pribadi, sifat emosionalnya akan muncul jika dia melihat adanya pandangan, sikap dan tindakan yang dalam benaknya dianggapnya

¹¹ *Ibid*

¹² *Ibid*

¹³ *Ibid*

¹⁴ Hasil wawancara dengan Ledia Hanifa di Jakarta 27 Januari 2009

melecehkan perempuan. Dalam kondisi seperti itu, Ledia Hanifa dapat menjadi sangat emosional dan menjadi pribadi yang menyebalkan. Dia menyatakan masih harus banyak belajar menahan diri agar tidak emosional. Ledia Hanifa mengemukakan hal tersebut dalam pernyataan berikut:

Saya banyak mengavulasi diri. Saya, orangnya emosional. Saya sangat reaktif kalau sudah berhubungan dengan orang yang cenderung, “melecehkan perempuan”. Saya bisa ribut luar biasa dan bisa jadi orang yang paling menyebalkan. Memang kadang-kadang masih harus menahan diri.¹⁵

Kelemahan ketiga dari kalangan perempuan yang dikemukakan Ledia Hanifa adalah ketrampilan sosial atau *social skill* yang masih lemah di kalangan perempuan. Penyebab lemahnya ketrampilan sosial kalangan perempuan PKS adalah keengganan mereka untuk berinteraksi secara sosial, belajar menghadapi masalah-masalah sosial di masyarakat. Menurut Ledia Hanifa, jika perempuan PKS bersedia mengasah ketrampilan sosial dengan cara terjun langsung ke masyarakat, mereka akan sama terampilnya dengan laki-laki. Ledia Hanifa mengemukakan pendapatnya tersebut dalam pernyataan berikut:

Kadang-kadang teman perempuan nggak mau berinteraksi. Nggak enak nanti begini, begini, saya bilang harus. Kita jadi lebih tau kapan kita bermain strategi yang ini kapan mau bermain strategi yang itu. Kita ini kadang-kadang takutnya lebih besar. Takut begini takut begitu. Tetapi sebenarnya banyak terobosan-terobosan yang bisa dilakukan sama teman-teman perempuan. Cuma kultur, pendidikan kita terhadap *social skill* itu semua terbatas. Persoalan terbesar menurut saya banyak perempuan yang nggak berani untuk *upgrading skill*nya dengan cara seperti itu. Dengan cara terjun berinteraksi langsung.¹⁶

Pendapat Ledia Hanifa bahwa mayoritas perempuan PKS tidak memiliki ketrampilan sosial atau *social skill* didukung oleh Komarul Kuniyati, narasumber berikutnya. Menurut Komarul Kuniyati, perempuan PKS tidak memiliki keluwesan dalam bergaul. Perempuan PKS rata-rata kaku dalam bergaul, sehingga *approach* atau pendekatan ke masyarakat kurang berhasil karena tidak luwes.

Kalau saya lihat perempuan-perempuan di PKS itu kelewat kalem, terus nggak luwes *approach*nya. Sampai Ketua DPD Lampung Tengah itu ngomong, “sebenarnya apa yang disampaikan bu Kun betul, tapi yang dikehendaki itu bukan bermakna *lenjeh*¹⁷ gitu”.¹⁸

Ketidakluwesannya cara pendekatan perempuan PKS terhadap masyarakat memang merupakan hasil sosialisasi mengenai cara perempuan PKS bergaul. Dalam Bayan DSP Nomor: 19/B/K/DSP-PKS/1429 disebutkan bahwa perempuan

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Lenjeh* adalah istilah dalam bahasa Jawa yang bermakna genit, murahan.

¹⁸ Hasil wawancara dengan Komarul Kuniyati di Bandarlampung 6 Mei 2009

PKS tidak diperbolehkan melunakkan/memanjakan suara. Ajaran ini diturunkan dari firman dalam Al-Qur'an berikut:

Hai istri-istri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti perempuan yang lain, jika kamu bertakwa. Maka janganlah kamu melembut-lembutkan dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik. (QS Al Ahzab 32)

Menurut Komarul Kuniyati, selain kaku cara bergaulnya, perempuan PKS juga eksklusif. Artinya mereka tidak mau bergaul dengan laki-laki, tidak mau mengadakan pendekatan kepada tokoh masyarakat yang laki-laki. Hal ini dinyatakannya sebagai berikut:

Kayaknya eksklusif. Mungkin eksklusifnya karena cara berpakaian mereka yang harus sepereti itu, atau memang dikondisikan oleh partai, saya nggak tau. Tapi yang jelas aku menilai mereka nggak luwes *approach*nya, apakah dengan para pejabat atau dengan *pentol-pentol*¹⁹ masyarakat di sekelilingnya. Mereka masih membatasi diri betul. Kalau tokoh masyarakatnya laki-laki nggak mungkin dia mau bicara.²⁰

Eksklusifitas perempuan PKS juga merupakan hasil sosialisasi Bayan DSP tersebut, misalnya ketentuan tentang cara berpakaian dan dalam bergaul dengan laki-laki. Aturan tersebut didasarkan pada ayat-ayat Al-Qur'an yang berarti:

Hai Nabi katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mu'min, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya keseluruhan tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal

Sementara itu kekakuan mereka dalam bergaul dengan laki-laki disebabkan adanya larangan laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim untuk berdua-dua. Ketentuan dalam Bayan tersebut didasarkan pada hadits nabi berikut:

Dari Ibnu Abbas dari Nabi saw. bersabda, "Tidak boleh seorang lelaki berdua dengan perempuan kecuali dengan mahramnya. Berkata seorang sahabat, "Ya Rasulullah, sesungguhnya istriku keluar untuk ibadah haji sedang saya diwajibkan ikut perang ini dan ini". Rasul saw. bersabda, "Pergilah berangkat haji bersama istrimu." (Muttafaqun 'alaihi)

Perempuan PKS juga selalu mendapat sosialisasi agar mereka menjaga pandangan untuk menjaga kesucian diri mereka. Ketentuan tersebut terdapat dalam ayat Al-Qur'an berikut:

Dan katakanlah kepada perempuan yang beriman, "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah

¹⁹ *Pentol-pentol* masyarakat adalah istilah dalam bahasa Jawa yang bermakna tokoh-tokoh masyarakat.

²⁰ Wawancara dengan Komarul Kuniyati di Bandarlampung 6 Mei 1009.

mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaknya mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dangan janganlah menampakkan perhiasannya. (QS An Nuur 30-31)

Bayan DSP tersebut juga memberikan larangan perempuan untuk berjabat tangan dengan laki-laki. Dasar larangan tersebut adalah 2 (dua) hadits nabi berikut:

Berkata ‘Aisyah ra., ”Dan demi Allah tangan, Rasul Shalallahu ‘alaihi wa sallam tidak menyentuh tangan wanita dalam bai’ah. Apa yang dibai’ahkan kepada mereka hanyalah perkataannya.”(HR Bukhari). Rasulullah Saw bersabda, “Sungguh seseorang ditusuk jarum besi di kepalanya lebih baik baginya daripada menyentuh seorang perempuan yang tidak halal baginya.” (HR.Tabrani dan Baihaqi)

Menurut Herlini Amran, ketentuan-ketentuan dalam Bayan tersebut merupakan batasan-batasan yang diperlukan bagi perempuan dalam melaksanakan peran publik dalam dakwah dan politik sehingga moderasi peran dapat dicapai. Seperti telah dikemukakan dalam bagian lebih awal, PKS menginginkan moderasi peran perempuan dalam dakwah dan politik. Karena itu perempuan perlu diberi batasan-batasan agar tidak terjerumus dalam peran yang bebas sebebasnya.

Prinsip moderasi dan batasan yang lebih banyak menyangkut masalah fisik seperti itulah yang dalam kalangan feminis radikal disebut sebagai politisasi seksualitas perempuan.²¹ Sementara PKS memang sudah mengambil garis tegas bahwa ”politisasi seksualitas perempuan” adalah hal yang tidak terhindarkan karena memang terdapat dasarnya dalam ayat Al-Qur’an dan hadits. Dengan menekankan pengaturan fisik perempuan, PKS terlihat tidak menyadari implikasinya bagi pelaksanaan peran publik perempuan karena akhirnya menimbulkan kekakuan-kekakuan yang justru menghambat peran dakwah dan politik bagi perempuan yang hukumnya juga wajib bagi mereka. Seperti diinformasikan Komarul Kuniyati, perempuan PKS tidak dapat melakukan pendekatan kepada para tokoh masyarakat yang mempunyai pengaruh besar terhadap masyarakat mereka masing-masing karena ”tidak mau berbicara kepada laki-laki”. Larangan berbicara berdua dengan laki-laki telah diperluas oleh para perempuan PKS menjadi tidak berbicara dengan laki-laki di tempat umum atau pada saat orang lain hadir. Kekakuan ini akhirnya menghambat peran publik dan

²¹ Kristin Luker dalam bukunya *Abortion and the Politics of Motherhood* menyebut kontroversi pengaturan hak aborsi adalah politisasi seksualitas perempuan. Politisasi ini menyangkut dua argumen yang saling bertentangan, antara pandangan yang *pro-choice (of abortion)* dan yang *pro-life (of the fetus)*. Menggunakan argumen *pro-choice*, dalam kasus perempuan PKS, maka suara perempuan, badan perempuan dan dan tangan perempuan menjadi arena politisasi oleh partai sehingga perlu diatur dalam Bayan. Sementara dalam pandangan PKS, hal-hal itulah yang memang secara prinsip harus diatur agar peran perempuan dalam dakwah dan politik tidak menimbulkan fitnah. Baca juga kontroversi dan konflik tentang politisasi seksualitas perempuan berkaitan dengan aborsi antara kelompok agama yang “*pro-life*” dan feminis radikal yang “*pro-choice*” dalam buku Myra Marx Ferree dan Beth B. Hess, 1985, *Controversy and Coalition: the New Feminist Movement*, Boston, Massachusetts: G.K. Hall & Company, hal. 130-132.

politik yang jauh lebih luas dibanding sekedar ketentuan cara pandang, cara bicara dan cara bersalaman. Dalam bahasa Masyhur Abadi²², spiritualitas agama Islam begitu luas, sehingga pendekatan doktriner yang kaku justru dapat menghambat implementasi keluasan agama tersebut.

Selain kaku dan eksklusif dalam bergaul, Komarul Kuniyati menyatakan bahwa perempuan PKS mempunyai hambatan karena selalu harus meminta ijin kepada suami sebelum pergi. Pendapat KK memang mengandung kebenaran karena ijin suami merupakan syarat bagi perempuan PKS untuk melakukan fungsi dakwah dan politik. Meski demikian, pemberian ijin ini juga menjadi kontroversi antara pihak yang mengartikannya secara kaku dan secara luwes. Pihak yang mengartikannya secara kaku mengatakan bahwa ijin memang harus diperoleh setiap akan bepergian, sedangkan pihak yang melihatnya secara luwes menyatakan bahwa jika suami mengizinkan istri melaksanakan dakwah dan kegiatan politik, maka berarti dia mengizinkan istri melakukan semua hal yang berkaitan sehingga istri tidak perlu selalu minta ijin ketika akan pergi atau melakukan kegiatan-kegiatan yang terkait.

Pendapat Komarul Kuniyati bahwa perempuan PKS kurang luwes dalam bergaul, eksklusif dan tidak komunikatif, termasuk di kalangan perempuan muda PKS merupakan satu fenomena yang menurut Inglehart dan Norris adalah fenomena yang terdapat pada negara-negara Islam khususnya pada aliran-aliran Islam tradisional. Menurut keduanya, di negara-negara Islam generasi yang lebih mudapun tetap bersifat sama tradisionalnya dengan orang tua dan kakek-nenek mereka.²³

Narasumber berikutnya, Uhti, menyatakan bahwa mayoritas perempuan PKS belum memenuhi kualifikasi untuk dipromosikan menjadi anggota DPR, khususnya memenuhi kuota 30% perempuan calon anggota DPR. Dia mengatakan:

Berangkat dari analisis situasi bahwa yang bisa memenuhi syarat untuk dimasukkan hanya sekian. Jadi kalau misalnya 30, nggak ada karena prasyarat itu berlaku formal, berlaku sama untuk perempuan dan laki-laki. Kebetulan untuk seluruh persyaratan itu perempuan yang bisa terpilih cuma segitu.²⁴

Uhti juga menyebut kemampuan mengatur diri sendiri di kalangan perempuan masih belum bagus, masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh PKS, khususnya oleh perempuan PKS sendiri. Dia mengemukakan pendapatnya palam pernyataannya berikut:

Kalau dari gambaran dari secara umum, *empowerment* belum menjadi sesuatu yang menjadi milik perempuan secara umum. Artinya perempuan dengan berbagai beban menjadi ibu, menjadi istri seharusnya memiliki

²² Lamy Al Faruqi. 1997. *Ailah, Masa Depan Kaum Wanita*. Surabaya: Al-Fikr.

²³ Ronald Inglehart dan Pippa Norris. 2003. *Rising Tide: Gender Equality and Cultural Change*. Cambridge: Cambridge University Press. Hal 6

²⁴ Hasil wawancara dengan Uhti di Jakarta 10 Maret 2009.

kemampuan manajemen waktu yang baik, kemampuan menggali potensi diri dan mengaktualisasikannya secara cemerlang. Dia semsetinya mampu mengatur sehingga dia punya ruang untuk mengeluarkan segala potensinya untuk berkiprah di partai. Itu masih menjadi pekerjaan rumah.²⁵

Menurut Ucti, selain masih adanya kelemahan mengelolal diri sendiri, masih ada perempuan yang bahkan tidak menganggap diri sejajar dengan laki-laki. Dia mengambil contoh bahwa di awal perjuangannya membesarkan PKS di Jawa Barat, dia masih mendapati perempuan istri seorang ustad yang menurutnya tidak menghargai diri sendiri. Karena menganggap posisinya sangat jauh dari suaminya, ibarat bumi dengan langit. Ucti menceritakan hal ini seperti pernyataannya berikut:

“Kalau *abdi teh sarang ustad*, sehingga bumi sarang langit, seperti bumi dengan langit”. Dia berada dalam posisi yang merasa suaminya begitu tinggi, dia tidak nyaman untuk duduk dalam posisi sejajar, bercakap-cakap, menyampaikan buah pikiran, dan sebagainya. Dan ini secara umum ada. Padahal saya katakan betapa ada sebuah debat yang panjang sekali antara Aisyah dengan Rasulullah saw, dimana Aisyah bisa bercerita panjang sekali sebuah dongeng yang rasul menanggapi, mendengar. Saya selalu sampaikan ini yang terjadi, ini yang diajarkan Islam tapi kita tidak ketahui. Ataupun kalau kita ketahui tidak kita kerjakan.²⁶

Menurut Ucti, ada ironi antara Islam yang mengajarkan perempuan untuk artikulatif dan berani menyampaikan pendapat dengan kultur yang berkembang dalam masyarakat Islam yang justru tidak mensosialisasikan hal tersebut yang akhirnya menghasilkan perempuan yang lemah dan tidak menghargai diri sendiri. Karena itu sebenarnya Bayan DSP yang lebih bersifat “mengatur”, “membatasi” perempuan dan bukan bersifat “memberdayakan”²⁷ adalah ketetapan yang kontradiktif dengan keinginan PKS untuk membangun perempuan yang tidak lemah, yang tidak takut pada hambatan, yang berani terjun ke masyarakat untuk mengasah ketrampilan sosial. Perempuan PKS akhirnya disibukkan oleh urusan menimbang-nimbang apakah tingkah-lakunya sesuai dengan Bayan atau tidak dibanding sibuk meningkatkan kualitas diri. Perempuan PKS sibuk membangun citra ideal sebagai istri yang sholehah di ranah domestik dan takut mengambil inisiatif di ranah publik. Inilah esensi “keluhan” T tentang fenomena yang umum terjadi di tingkat perempuan “akar rumput” PKS.

“Keluhan” Ucti dikonfirmasi oleh Kingkin Aanidha yang menyatakan bahwa banyak perempuan PKS yang merasa “lebih nyaman berada di rumah” dibanding melakukan aktivitas publik dan politik. Mereka memilih nyaman pada

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Pendekatan berbeda yang bermakna pemberdayaan dipilih oleh penulis-penulis tentang perempuan, Islam, dan politik. Lihat missalnya Siti Musdah Mulia dan Anik Farida dalam buku mereka, *Perempuan dan Politik*, Jakarta: Gramedia, 2005, hal. 95-130. Mereka memilih pemberdayaan sebagai kata kunci dalam hubungan perempuan dan politik. Sementara itu Lamya Al Faruqi juga menolak kecenderungan menjadi dogmatis dan lebih memilih pemberdayaan keluarga besar (‘Ailah) sebagai pilihan dukungan agar perempuan dapat berperan di ranah politik dan publik. Lihat Lamya Al Faruqi, *op.cit.* hal 113-137

dunia domestik untuk tinggal di rumah mengurus keluarga daripada harus kehilangan kenyamanan dan masuk dunia publik dan politik yang asing bagi mereka. Kingkin Anidha menyatakan bahwa pilihan ini harus dihargai. Berikut adalah pernyataan Kingkin Anidha:

SDM perempuan di PKS ini kadang merasa bahwa "saya nggak perlu turun karena saya punya dunia yang lebih nyaman, rumah tangga. Buat apa saya punya kebahagiaan di luar kalau di rumah saya tidak bahagia". Jadi sebuah pemikiran, sebuah pilihan yang harus dihargai.²⁸

Penjelasan Kingkin Anidha tentang adanya fenomena perempuan PKS "yang lebih nyaman tinggal di rumah, mengurus keluarga, tidak perlu mencari kebahagiaan di luar rumah" di tengah keinginan perempuan PKS yang lain untuk berdakwah dan menjalankan peran politik karena dakwah dan peran politik adalah kewajiban untuk laki-laki dan perempuan dapat disebut sebagai penjelasan tentang adanya gerakan *backlash*²⁹ di kalangan perempuan PKS. Gejala *backlash* yang menurut Kingkin Anidha "disambut oleh sebagian bapak-bapak" tentu mengancam upaya kelompok perempuan PKS, khususnya kelompok yang menginginkan perubahan iklim atau kultur PKS agar lebih nyaman bagi perempuan dan lebih pro-perempuan.

Kalau Kingkin Anidha menginformasikan tentang adanya gejala *backlash*, S mengemukakan pendapatnya bahwa sebagian perempuan PKS menikmati atau *enjoy* untuk tidak diletakkan pada posisi penting. Meski masih setuju mengikuti pencalonan anggota DPR tetapi yang bersangkutan menolak diletakkan pada posisi penting karena suaminya merasa keberatan. Hal ini dikemukakan oleh Sitaresmi dalam penjelasannya berikut:

Persepsi belum merata paradigmanya, masih harus ada proses penyadaran. Jadi nggak cuma dari laki-laki, perempuannya juga merasa memang *enjoy* saja. Ada yang nomer satu unttuk DPRD, tapi karena kemudian suaminya gimana begitu, dia minta turun nomor ke nomor lima waktu. Jadi dari internalnya..perempuannya yang merasa belum siap, belum mampu, takut kalau nanti rumah tangganya kenapa-kenapa mereka yang dituding sebagai penyebabnya. Itu masih seperti itu.³⁰

Selain menginformasikan tentang adanya gejala perempuan PKS yang menolak diberi peran penting, Sitaresmi juga menginformasikan tentang masih adanya pandangan yang *rigid*³¹ tentang perempuan. Dia juga menginformasikan adanya *stereotyping* sebagai feminis kepada tokoh perempuan PKS yang menuntut berbagai hal untuk kepentingan perempuan PKS.

Perempuan yang di bawah masih belum memiliki self confidence. Saya makanya rajin memberikan penyuluhan sampai ke bawah, untuk

²⁸ Hasil wawancara dengan Kingkin Anidha di Bandar Lampung 23 Maret 2009.

²⁹ *Backlash* adalah gerakan yang menginginkan kembalinya perempuan secara eksklusif ke ranah domestik dan menolak peran publik perempuan didasarkan pandangan ekstrim tentang peran laki-laki sebagai *the sole breadwinner* dan perempuan semata sebagai ibu rumah tangga. Tentang fenomena *backlash* dapat dibaca Myra Marx Ferree dan Beth B. Hess, op. cit., hal 132-137

³⁰ Hasil wawancara dengan Sitaresmi di Jakarta 26 Februari 2009

³¹ Pandangan *rigid* tentang perempuan berarti pandangan yang membuat batasan tegas antara peran laki-laki sebagai pencari nafkah dan pelaku peran public dan perempuan sebagai ibu rumah tangga dan pelaku peran domestik semata.

memberikan ke mereka *self confidence*. Pernah waktu debat caleg di Surabaya, saya dianggap partai yang paling peduli kepada perempuan. Tapi saya diejek Nursyahbani Katjasungkana, "cuma kalian saja yang di atas, di DPP, yang dibawah coba pandangannya masih *rigid*". Walaupun kadang-kadang Ledia sampai dibilang feminis, terlalu banyak nuntut buat perempuan.. Dianggap perempuan terlalu banyak maunya. Kita masih menghadapi tantangan-tantangan seperti itu.³²

Tabel 5.1
Kelemahan-Kelemahan Perempuan PKS

Nama	Kelemahan-Kelemahan Perempuan PKS
YY	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesungkungan berpolitik 2. Malu-malu dan gamang memanfaatkan peluang yang sudah dibuka oleh struktur
HH	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempunyai keterbatasan uang sebagai modal berpolitik 2. Kurang pengalaman politik 3. Lamban dan sering meminta keringanan karena adanya beban domestik dan karena ingin ideal di rumah dan di ranah publik 4. Bersaing secara tidak sehat, bekerja tidak dengan logika
AR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Umur muda, kurang pengalaman 2. Kelemahan moral
HA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pola pengasuhan masa kecil agar perempuan lebih banyak tinggal di rumah 2. Keterbatasan uang untuk modal melakukan aktivitas politik 3. Keengganan rapat bersama laki-laki sampai larut malam 4. kekhawatiran menelantarkan anak, khawatir nggak bisa <i>all out</i>
LH	<ol style="list-style-type: none"> 1. Atura informal PKS belum secara otomatis memperlihatkan sensitivitas gender, belum sesuai dengan kepentingan dan kondisi khusus perempuan 2. Emosional 3. Tidak mau berinteraksi, <i>skill</i> sosial terbatas, tidak mau meningkatkan <i>social skill</i>
KK	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cara bergaul tidak luwes, kaku 2. Eksklusif, tidak mau bergaul, bahkan tidak mau berbicara dengan laki-laki 3. Harus selalu minta ijin suami.
T	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sedikit perempuan yang memenuhi kualifikasi untuk dipromosikan menjadi anggota DPR 2. Perempuan tidak mampu mengatur/me-<i>manage</i> dirinya sendiri untuk melakukan berbagai peran dan fungsi secara cerdas 3. Perempuan merasa tidak sederajat, tidak setara dengan laki-laki.
KA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ada kelompok perempuan PKS yang menginginkan <i>backlash</i>, mereka merasa lebih nyaman tinggal di rumah mengurus keluarga, merasa tidak perlu melakukan peran publik 2. Sebagian laki-laki PKS mendukung <i>backlash</i>
S	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menikmati diletakkan pada posisi tidak penting karena suami

³² Hasil wawancara dengan Sitaresmi di Jakarta 26 Februari 2009.

	<p>keberatan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Keyakinan diri rendah. 3. Ada pandangan <i>rigid</i> tentang perempuan 4. Dilabeli sebagai feminis
--	---

Konsepsi *the deferred subject* merujuk pada “*what is prohibited and excluded during the course of subject production*”³³. Berbagai informasi yang dikemukakan para narasumber menunjukkan bahwa aspek-aspek kelemahan yang harus dibuang atau tidak boleh dimiliki oleh perempuan agar dia menjadi subjek politik yang kompeten meliputi begitu banyak aspek. Dalam bahasa Moya Lloyd, hal ini menunjukkan hampir tidak mungkin kita mengidentifikasi aspek-aspek kelemahan atau hambatan-hambatan apa saja yang harus disingkirkan oleh perempuan agar mereka menjadi subyek politik. Hal ini seperti dikatakannya lebih jauh, bahwa aspek kelemahan perempuan adalah “*structure of infinite deferral*”, “*there are many ways in which they may yet be determined*”, “*as a linguistic construct, woman lacks a proper and ‘an identifiable truth’*”

Kelemahan dan hambatan tersebut mulai dari yang bersifat fisik, yaitu umur muda dan kurang pengalaman sampai dengan yang sangat substansial yaitu keinginan untuk melakukan backlash atau menarik diri sama sekali dari ranah public dan politik. Diantara dua hal ini membentang jumlah kelemahan dan hambatan dalam jumlah *infinte*, atau tidak terhitung. Para narasumber memberikan beberapa contoh diantaranya, yaitu enggan mengambil peran aktif meski masih bersedia dicalonkan, enggan meningkatkan ketrampilan sosial, merasa tidak sederajat dengan laki-laki, tidak luwes, eksklusif, kurang modal, tidak memenuhi kualifikasi untuk diberi posisi penting, tidak mampu mengatur dirinya sendiri untuk berbagai peran yang harus dijalankan, dan sebagainya. Pada intinya, perempuan PKS adalah *the deferred subject* yang menunjukkan “*infinte regression in representation*”

5.2 Perempuan PKS Sebagai *the Subject of Lack*

Berbeda dari konsepsi *the deferred subject*, konsepsi *the subject of lack* dimaknai sebagai

*a subject for whom identity closure is impossible. ...The subject can thus only assume its subjectivity as it takes on a sexed identity, determined in relation to the symbolic signifier, the ‘phallus’, the subject in this regard is actually and necessarily created within a split – a being that can only conceptualise itself when mirrored back to itself from the position of another’s desire. Any notion of self can only be articulated through the positing of an othe/Other.*³⁴

Secara sederhana konsepsi *the subject of lack* merujuk pada aspek-aspek yang ingin ditiru oleh perempuan dari *the signifier* yaitu laki-laki agar perempuan sebagai subyek politik dapat memiliki sifat-sifat dan kemampuan setara dengan laki-laki dalam melaksanakan peran dakwah dan peran politik. Untuk mengumpulkan data tentang perempuan PKS sebagai *the subject of lack*, para

³³ Moya Lloyd, *op.cit.* hal 20.

³⁴ Moya Lloyd. *Op.cit.* hal 17

perempuan narasumber diminta menceritakan ciri-ciri serta kemampuan-kemampuan apa yang ingin ditumbuhkannya dalam dirinya sehingga dia dapat melaksanakan peran dakwah dan peran politik dengan baik. Jawaban para narasumber beragam.

Husna Hidayati, misalnya, mengatakan bahwa baginya, bekerja dengan laki-laki lebih enak karena laki-laki lebih menggunakan logika. Dia mengatakan, “tapi kalau kata orang kalau kerja dengan laki-laki lebih enak karena dia lebih pakai logika, gitu ya”.³⁵ Selain mengatakan bahwa perempuan harus lebih menggunakan logika seperti laki-laki menggunakan logika ketika bekerja, Husna Hidayati juga mengatakan bahwa perempuan sebaiknya jangan terlalu banyak omong, jangan terlalu lincah sehingga menimbulkan kesan tidak enak bagi yang melihat. Hal ini dikemukakan Husna Hidayati sebagai berikut:

Kalau rapat di DPW, saya lihat ada abinya, saya agak *ngeper*. Justru kalau berhadapan hati-hati kalau bicara karena saya ini suka nyeplos. Jadi seringkali kami rapat saya nyeplos-nyeplos, nanti dia sms, “jangan BO”, banyak omong, maksudnya. Bukan berarti dia melarang saya bicara. Mungkin secara pribadi dia nggak senang saya terlalu lincah. Tapi kalau memang dibutuhkan bicara ya bicara.³⁶

Selain sifat logis dan menggunakan logika dalam bekerja serta tidak banyak bicara, Husna Hidayati juga menilai tinggi kemampuan perempuan untuk menjadikan diri mereka sebagai pribadi yang tangguh, yang perkasa. Perempuan harus menjadi pribadi perkasa karena setiap akan melaksanakan peran public mereka harus menyelesaikan dulu berbagai tugas domestik. Hal ini tidak dapat dilakukan oleh manusia biasa, hanya manusia perkasa yang dapat melaksanakannya. Hal ini dikatakannya dalam pernyataan berikut:

Saya sering bilang, kita ini perempuan-perempuan perkasa. Bayangkan, mau berangkat pelatihan ke Bogor, kita udah siapin di rumah dulu. Kadang-kadang teman-teman di PKS perempuan PKS bawa bayi. Kadang-kadang pelatihan bawa bayi, kalau nggak bawa anak kecil. Kalaupun nggak bawa anak, kita sudah siapin di rumah. Pulang dari sana capek-capek sudah nunggu cucian, sudah nunggu segala macam urusan. Jadi saya bilang, sebenarnya kalau persoalan-persoalan beban, insya Allah, tangguh, sudah biasa.³⁷

Jika Husna Hidayati menginginkan perempuan lebih banyak menggunakan logika dalam bekerja, hemat bicara dan ketangguhan melaksanakan berbagai fungsi, Ledia Hanifa, Ketua Bidang Kewanitaan menginginkan adanya *team work* yang kuat diantara perempuan sehingga bisa saling mengisi kekurangan masing-masing. Hal ini dikatakannya dalam pernyataan berikut:

Biasanya saya tim, rapat itu ada beberapa teman. Teman-teman sudah paham, kalau sudah konteknya begini yang ngomong jangan saya, nanti akan nggak bagus jadinya. Mereka yang bicara. Gantian. Jadi kita satu tim, nggak bisa sendirian. Kita tau kapan kita lebih baik nglobi, kapan

³⁵ Hasil wawancara dengan Husna Hidayati 5 Mei 2009 di Bandarlampung.

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid*

kita ngotot. Kita bagi tugas, ini nglobi siapa, ini nglobi siapa, saya nglobi siapa. Terus nanti kita cari siapa yang harus ngomong. Misalnya saya yang menyampaikan, nanti kita memberi data tambahan. Kita berharap bahwa bapak-bapak yang sudah kita ajak bicara itu nanti juga akan mengemukakan pendapat. Sebetulnya *supportingnya* bapak-bapak itu luar biasa asal *reasoningnya* masuk ke kepala mereka. Dan kita tau pola berpikirnya bapak-bapak ini seperti apa. Jadi sangat *tricky*. Kadang-kadang begitu kita ngotot, justru bubar.³⁸

Selain bekerja dalam *team-work*, Ledia Hanifa juga menginginkan agar perempuan melatih diri untuk menjadi berani seperti kebanyakan laki-laki juga hanya bermodal berani dalam sikap dan tindakan politik mereka. Menurutnya hal itu penting kalau perempuan memilih dunia politik untuk pilihan hidup mereka.

Jadi kebanyakan orang, baik laki-laki maupun perempuan yang sudah memilih politik sebagai sesuatu yang praktikal, saya melihat cukup banyak yang sebenarnya nggak ada isinya, cuma karena berani saja. Berani ngomong. Dan itu perlu didorong ke teman-teman, modalnya berani, modal gebrak meja, modal ngotot, suara keras. Nggak ada apa-apanya. Mestinya bisa kita lakukan dengan cara yang lain. Itu butuh pelatihan, menguatkan otot jantung, kaget-kaget.

Kalau saya berpikir, ada *moment* di saat kita tidak dapat konfrontatif. Kalau kita konfrontatif, sebegus apapun ide itu *mental*. Saya melihat bukan cuma di PKS, di tempat lain. Ketika kita berhadapan dengan laki-laki, ketika kita konfrontir, ngoyo, justru tingkat penerimaannya rendah. Dan bahkan pada saat diterima itu dalam keadaan “*kasihan*” begitu. Dengan pengalaman sekian lama berorganisasi dari SMP, saya mengambil kesimpulan, pada beberapa ide tertentu saya tidak akan konfrontir tapi saya lobi dulu, baru kemudian saya akan kemukakan ide saya dengan kata-kata yang lebih halus, tapi saya yakin ketika saya menyampaikan ini akan ada orang yang lebih *endorse* dan itu pihak laki-laki.³⁹

Menurut Ledia Hanifa, perempuan perlu belajar berani mengemukakan pendapat karena seringkali pemikiran perempuan bagus tetapi tidak karena perempuan tidak berani menyuarakannya akhirnya terlihat perempuan tidak memiliki pemikiran yang baik. Menurut Ledia Hanifa laki-laki sebenarnya hanya lebih berani saja dalam mengemukakan pikiran, terkadang sampai menggebrak meja padahal belum tentu pikirannya bagus. Perempuan juga perlu mengembangkan kemampuan berpikir yang generalis, sistemik dan makro, kemampuan melakukan lobi dan tidak konfrontatif. Menurut Ledia Hanifa selama ini perempuan lebih mampu mengembangkan hubungan interpersonal dan cara berpikir yang rinci dan spesifik. Karena itu perempuan juga perlu membangun kapasitas diri seperti yang secara kultur telah dididikkan kepada laki-laki. Hal ini dinyatakan Ledia Hanifa sebagai berikut:

Saya nggak melihat seperti itu. Saya lihat perempuan justru dipersiapkan Allah untuk *social skillnya* justru lebih banyak, tapi dalam hubungan

³⁸ Hasil wawancara dengan Ledia Hanifa di Jakarta 27 Januari 2009.

³⁹ *Ibid.*

interpersonal. Dalam hubungan *interpersonal* itu banyak perempuan yang lebih bagus. Kalau laki-laki lebih banyak yang generalis, lebih tataran besar dan kemudian dia pola berpikirnya yang dibentuk oleh kultur adalah pola pikir sistemik. Pemerintahan, kebijakan, dan semua sifatnya global. Tetapi ketika kemudian harus menukik pada sesuatu yang spesifik banyak perempuan yang jauh lebih bagus. Kelihatannya di dalam sistim pendidikan itu lebih mengarahkan kepada perempuan spesifik, yang laki-laki lebih general. Lebih kepada kultur, laki-laki lebih cenderung berpikir makro. Secara psikologis mungkin begitu. Ada di dalam pendidikan kultur kita. Tapi saya lihat ada banyak perempuan yang juga berpikir makro.⁴⁰

Menurut Ledia Hanifa kapasitas diri perempuan untuk lebih mampu membangun hubungan interpersonal, kemampuan berpikir rinci dan spesifik tidak lebih buruk dibanding kemampuan laki-laki membangun cara berpikir makro, sistemik dan generalis. Meski demikian agar lebih komprehensif, perempuan perlu mengembangkan kapasitas yang secara kultur telah berhasil ditanamkan pada diri laki-laki. Tetapi Ledia Hanifa juga memberi catatan bahwa tanpa perlu meniru sifat-sifat dimiliki laki-laki pun perempuan tetap dapat melaksanakan semua fungsi politik dengan saling bekerjasama dengan laki-laki dengan saling melengkapi kekurangan dari kelebihan masing-masing.

Perempuan harus mempunyai kemampuan berfikir makro dan mikro. Makanya *social skill*nya kemudian dibangun, kemampuan mereka bekerjasama. Mereka harus kerjasama. “Saya tau bahwa dia punya kelebihan tapi saya tahu kalau dia punya kekurangan, dan saya tau saya punya kekurangan yang dia punya kelebihan”. Harusnya *dimatchkan* Jadi harus saling melengkapi, saling menguatkan. Karena saya percaya bahwa orang yang diberi kesempatan lebih banyak, punya jam terbang lebih banyak dia pasti akan lebih ahli dibandingkan dengan yang tidak punya pengalaman. *Theoretically* banyak doktor politik mungkin perempuan, tapi berapa persen yang praktisi, kan tidak banyak.⁴¹

Pernyataan Ledia Hanifa tentang perlunya perempuan dengan laki-laki saling bekerjasama dengan saling melengkapi kekurangan dan kelebihan masing-masing merupakan pernyataan yang sesuai dengan Deklarasi Semesta tentang Demokrasi yang diadopsi oleh organisasi Kerjasama Antar-Parlemen se Dunia. Pernyataan ini berisi diktum bahwa demokrasi hanya bisa diwujudkan dengan upaya saling melengkapi antara laki-laki dan perempuan dengan memanfaatkan kelebihan dari perbedaan yang ada diantara laki-laki dan perempuan. Dengan kata lain, Ledia Hanifa menyatakan bahwa identitas diri perempuan tidak harus selalu merupakan peniruan terhadap identitas *the signifier, the phallus*, tetapi dapat diterjemahkan signifikansinya dalam hubungan saling melengkapi dengan identitas laki-laki. Hal ini sesuai dengan pernyataan Lloyd⁴² bahwa “*the subject can thus only assume its subjectivity as it takes on a sexed identity, determined in*

⁴⁰ *Ibid*

⁴¹ *Ibid*

⁴² Moya Lloyd. *op. cit.* hal 17.

relation to the symbolic signifier, the 'phallus' ". Artinya makna penting femininitas perempuan untuk membangun hubungan interpersonal, berpikir rinci dan spesifik hanya akan mempunyai makna penting ketika diterjemahkan atau dilihat dalam hubungannya dengan kemampuan laki-laki untuk membangun hubungan yang bersifat umum, berpikir generalis, makro dan sistemik.

Penjelasan Ledia Hanifa tentang sifat-sifat dan kemampuan yang perlu ditumbuhkan dalam diri perempuan, baik sifat dan kemampuan yang secara kultur memang sudah dimilikinya maupun sifat dan kemampuan yang secara kultur dikuasai dan dimiliki laki-laki merupakan pencerminan bahwa identifikasi diri perempuan seringkali merupakan proses yang tidak mungkin selesai dilakukan perempuan. Karena "the wholeness" sebagai sifat ideal yang ingin ditiru dan dikuasai perempuan merupakan pertanyaan yang tidak akan terjawab sepanjang kehidupan manusia. Hal ini terlihat dalam pernyataan Lloyd berikut:

*This process of identification, which forms the very condition of possibility for the subject, is at one and the same time its condition of impossibility. The dynamic of recognition/misrecognition that structures the mirror phase signals the start of a life-long quest for 'wholeness' that is predicated on an identification with the other.*⁴³

Kingkin Anidha, narasumber berikut, menganggap bahwa perempuan perlu memiliki ketrampilan yang pada umumnya dimiliki laki-laki, yaitu kemampuan mengemudi mobil. Hal ini sangat penting bagi dirinya yang memang harus mengadakan perjalanan pergi pulang Jakarta Lampung berkali-kali untuk kepentingan kampanye. Kingkin Anidha menganggap ketrampilan ini penting sehingga dia berusaha menguasainya dalam waktu pendek. Kingkin Anidha mengatakan:

Baru lima bulan bisa bawa mobil. Jakarta Way Kanan. Bayangkan, Lampung Timur, Lampung Tengah. Jadi kalau saya bilang di kaderisasi, saya lihat kalau perempuan-perempuan PKS ini perempuan-perempuan perkasa. Saya sering menyebut diri kami wanita-wanita perkasa.⁴⁴

Penjelasan Kingkin Anidha bahwa dia berupaya untuk independen dengan belajar mengemudi mobil untuk mendukung aktivitas politiknya didukung oleh Ledia Hanifa, Ketua Bidang Kewanitaan, yang menyatakan bahwa "dan ketika bu Kingkin dicalonkan itu baru lima bulan bisa setir mobil. Dengan terpaksa, gagah berani nyetir tiap kali dari Jakarta ke Lampung".⁴⁵ Dalam pandangan Ledia Hanifa dan Kingkin Anidha, kemampuan teknis mengemudi mobil memberi kesan "gagah perkasa" karena ketrampilan ini pada umumnya diatributkan ke laki-laki dan belum menjadi ketrampilan yang umum dikuasai perempuan di Indonesia, lebih-lebih di kalangan perempuan PKS yang kultur akar rumputnya masih *rigid* atau kaku dalam melihat peran laki-laki dan perempuan.

Selain merasa perlu memperlengkapi diri dengan ketrampilan mengemudi, Kingkin Anidha juga memberi penilaian tinggi kepada kemampuan untuk "*vocal*" dalam menyuarakan kepentingan perempuan. Dia menyebut dua contoh perempuan PKS yang dinilainya mempunyai sifat demikian, yaitu Susi Mardiani,

⁴³ *Op. cit.* hal 18

⁴⁴ Hasil wawancara dengan Kingkin Anidha di Bandarlampung 23 Maret 2009

⁴⁵ Hasil wawancara dengan Ledia Hanifa 27 Januari 2009 di Jakarta.

dalam menyuarakan kepentingan perempuan di DSP dan Ledia Hanifa dalam memperjuangkan kepentingan politik perempuan PKS di lingkungan internal PKS. Hal ini dinyatakan Kingkin Anidha dalam penjelasannya berikut:

Sejauh ini yang saya ketahui mbak Susi, misalnya, orangnya sangat vokal. Memang saya belum berdialog dengan beliau secara langsung, bagaimana kekuatan beliau untuk mempengaruhi keputusan di situ. Tapi dari *statement*nya kalau dia sedang bercerita, kemudian dari aksi teman-temannya, mbak Susi ini cukup mempengaruhi.

Mbak Ledia *appeal* ke Majelis Syuro untuk beberapa nama, seperti untuk bu Yoyoh. Bu Yoyoh akhirnya jadi nomor satu di Banten. Kemudian bu Herlini Amran di Babel, Bangka Belitung. Saya kira ini prestasi bu Ledia. Saya bisa ceritakan di sini bahwa *appeal* kita bisa selesai.⁴⁶

Ketrampilan yang juga ingin dikembangkan oleh Kingkin Anidha adalah kemampuan berkomunikasi dengan media yang lebih inklusif. Dalam hal ini Kingkin Anidha memilih organisasi Karang Taruna sebagai sarannya untuk mengasah ketrampilan tersebut. Ini dinyatakan Kingkin Anidha dalam pernyataan berikut:

Selama ini dikatakan bahwa PKS eksklusif. Tapi dengan saya masuk ke Karang Taruna jadi tau bagaimana caranya berkomunikasi dengan media yang lebih inklusif, lebih luas.⁴⁷

Perlunya perempuan PKS mengasah ketrampilan berkomunikasi dan berpolitik secara inklusif tidak hanya disadari oleh Kingkin Anidha, tetapi juga Sitaresmi, Ledia Hanifa, dan Komarul Kniyati. Ketiga tokoh ini juga mengkritik masih adanya sikap eksklusif pada sebagian kader PKS yang menurut mereka bukan hanya buruk untuk citra PKS, tetapi juga tidak menguntungkan bagi perjuangan politik perempuan PKS dan bagi kepentingan masyarakat lebih luas. Hal ini tercermin dari hasil survei IPU tahun 2000 yang salah satunya menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

*A less confrontational approach to politics was strongly advocated by participants in the survey: I would expect over time that politics would be less confrontational (typically states a respondent from North America), a greater humanizations of the political world (hopes a South American respondent), a more consultative and consensus based approach to problem solving. A focus on community rebuilding and creating real security and opportunity for citizens (confirms a respondent from the Pacific).*⁴⁸

Aan Rochana menyatakan tiga persyaratan yang ingin dilihatnya dapat dipenuhi oleh perempuan PKS, yaitu “kompetensi yang mencakup kompetensi terpadu, dari masalah moralnya dari masalah intelektualnya, juga dari sisi praktek di lapangannya”.⁴⁹

⁴⁶ *Ibid*

⁴⁷ *Ibid*

⁴⁸ Inter-Parliamentary Union, 2000. op. cit. hal. 45

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Aan Rochana di Jakarta 26 April 2009.

Aan Rochana juga menghendaki pengalaman di lapangan politik bagi perempuan bukan hanya akan mengasah sensitifitas terhadap masalah-masalah politik, tetapi juga akan meningkatkan kemampuan konseptual perempuan terhadap masalah politik sehingga mereka akan mempunyai kontribusi untuk penyempurnaan pendapat dan argumen yang mendasar setiap keputusan politik. Hal ini dinyatakan Aan Rochana sebagai berikut:

Tidak hanya sekedar pengenalan di lapangan tetapi dia sekaligus ada konsep-konsep yang bisa dikontribusikan. Mungkin penyempurnaan-penyempurnaan pendapat yang sedapat mungkin bisa *disharing* dengan teman-teman satu organisasinya, atau satu *level* strukturnya.⁵⁰

Aan Rochana menilai penting kemampuan konseptual bagi perempuan. Meski demikian dia tidak menjelaskan dalam hal apa kemampuan konseptual itu penting, apakah dalam mengemukakan argumen yang bersifat umum ataukah dalam mengemukakan argumen bagi kepentingan politik perempuan. Kemampuan konseptual sangat berkaitan dengan kemampuan menggunakan bahasa secara logis dan argumentatif. Dalam dunia politik, kemampuan konseptual menjadi sangat penting karena hampir tidak ada keputusan politik yang dapat dibuat tanpa terjadi adu argumen sebelumnya. Dalam hal ini survei IPU yang sudah disebutkan menyebutkan bahwa kehadiran perempuan dalam dunia politik di parlemen terbukti merubah penggunaan bahasa dan kebiasaan-kebiasaan yang berkembang dalam dunia parlemen tersebut. Di Asia Selatan, misalnya survei IPU⁵¹ tersebut menemukan bahwa "*The presence of women in Parliament brings about restraint in men's behaviour. They speak more correctly and more politely*", sementara di Asia Tenggara survei menemukan bahwa "*Absence and abusive words are minimized, generally at least, but not always; sometimes women have to bear the language used*".

Di kalangan feminis, terdapat argumen yang menyatakan bahwa perempuan menggunakan bahasa-bahasa yang seringkali berbeda dari laki-laki. Menurut survei IPU tersebut, responden para perempuan politisi dari wilayah Eropa Barat meyakini adanya pola penggunaan bahasa yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Hal ini dinyatakan dalam hasil survei tersebut⁵² sebagai berikut:

Language used by women is fundamentally different. "Love", "empathy", "consensus", "accommodation", "respect", "reconciliation", "diversity", all these themes are regularly used by female speakers and leaders.

Karena perempuan cenderung memilih kosa kata politik yang berbeda dari laki-laki, maka pada waktu membuat konsep politikpun perempuan cenderung berbeda dari laki-laki. Pada Bab III telah dibahas tentang perjuangan perempuan pendefinisian kembali makna keadilan menjadi *ethics of care*, konsep *citizenship* atau kewarganegaraan yang mengadopsi prinsip *maternal citizenship* selain *paternal citizenship*. Inilah makna penting kemampuan konseptual perempuan yang menurut Aan Rochana perlu dimiliki oleh perempuan PKS.

⁵⁰ *Ibid*

⁵¹ Inter-Parliamentary Union, 2000. *op.cit* hal 47-48

⁵² *Op. cit.* hal. 49.

Herlini Amran, narasumber yang mempunyai posisi di DSP dan MSP mengemukakan konsep kemampuan menjaga keseimbangan sebagai kemampuan yang harus dipenuhi oleh perempuan yang ingin terjun ke dunia politik. Herlini Amran mengatakan bahwa "Selama dia bisa menjaga, betul.. selama dia bisa menjaga keseimbangan itu semua tidak masalah, bahkan didukung bu".⁵³

Menjaga keseimbangan antara peran domestik dan publik, menjaga keseimbangan hubungan dengan keluarga dan dengan masyarakat, menjaga keseimbangan moralitas dan upaya memenangkan dukungan, menjaga keseimbangan perilaku dengan standar nilai yang dipegang di PKS adalah persyaratan yang harus dimiliki dan dikuasai perempuan PKS. Kemampuan inilah yang menurut Herlini Amran akan menjamin bahwa peran politik perempuan tidak akan melenceng dari tujuan dan tidak akan membawa akibat buruk bagi dirinya, keluarganya, PKS dan masyarakat.

Jika Herlini Amran mensyaratkan kemampuan menjaga keseimbangan, Komarul Kuniyati mengatakan bahwa perempuan PKS harus menumbuhkan kemampuan melakukan pendekatan kepada masyarakat. Sebagai calon anggota DPR dari PKS dari elemen non kader, Komarul Kuniyati menilai bahwa kalangan internal PKS, khususnya perempuan kader asli PKS, tidak memiliki ketrampilan melakukan pendekatan kepada masyarakat. Komarul Kuniyati menyatakan:

"Bu Kun di sini ada tokoh masyarakat, gimana kalau malam hari ini?" (bertemu dengan tokoh masyarakat tersebut). Kadang sampai jam dua belas malam sampai jam satu. Yang begitu itu yang asli kader tidak saya lihat. Jadi yang menjinakkan, yang *pendelikan* itu saya, mereka terus *bareng-bareng*. Diantaranya pernah saya kemukakan ke ketua DPD-DPD. "Itu faktor. Pendekatan dalam arti positif, kalau kita bisa ngomong, kemudian berusaha berkiprah, kemudian berusaha untuk menyerap aspirasi, mempengaruhi dan sebagainya, kan akhirnya punya peluang."⁵⁴

Selain menghendaki kemampuan melakukan pendekatan kepada masyarakat, Komarul Kuniyati juga menilai kapabilitas pribadi dan sifat amanah sebagai sifat baik yang membuat seseorang layak memegang jabatan politik. Hal ini terlihat dari pernyataannya bahwa dia tidak akan menerima siapapun yang terpilih kalau tidak kapabel dan tidak amanah.

Saya paling mengemukakan uneg-uneg dengan pak Hakim. "Pak Hakim saya nggak *trimo* kalau bukan pak Hakim yang jadi, apapun dan bagaimanapun, karena kapabilitas sama amanahnya pak Hakim kita sudah tau."⁵⁵

Komarul Kuniyati juga menyatakan bahwa jika perempuan PKS ingin memenangkan pemilihan umum, maka cara berpikir sempit yang terlalu mementingkan kader harus dilepaskan. Kenyataannya PKS membutuhkan perempuan non kader untuk direkrut menjadi calon anggota DPR. Berpikir dan bertindak secara sempit untuk kepentingan kader semata akan merugikan

⁵³ Hasil wawancara dengan Herlini Amran di Jakarta 26 April 2009

⁵⁴ Hasil wawancara dengan Komarul Kuniyati di Bandarlampung 6 Mei 2009.

⁵⁵ *Ibid*

perempuan PKS. Karena itu cara berpikir sempit hanya untuk kader harus dibuang.

Saya yakin kalau misalnya ada terjadi A dengan B memiliki suara yg sama, saya yakin bahwa partai pasti akan mendahulukan yang kader dulu. Saya yakin itu. Walaupun mungkin yang bukan kader dari semua aspek mungkin punya kelebihan dari B, tapi mungkin nilai minusnya dia bukan kader. Jadi kayaknya masih berpikir yang seperti itu. Harusnya ke depan yang seperti itu harus dilepaskan.⁵⁶

Ucti, narasumber berikut, menjelaskan bahwa perempuan harus membangun keahlian tertentu agar dapat menembus posisi penting dalam partai, khususnya agar terpilih menjadi anggota Msjlis Syura Pusat. Ucti menyatakan sejarah bergabungnya dirinya ke Majelis Syura adalah karena pertimbangan keahlian ini.

Jadi saat saya bergabung saya diposisikan sebagai anggota dari *hubaro*, melengkapi dari sisi ketokohan, kepakaran, meskipun saya tidak merasa menjadi pakar, tetapi saya akhirnya bergabung juga. Yang dibutuhkan.milsanya ahli statistik, ahli ekonomi, seorang psikolog, dan sebagainya⁵⁷

Selain perlu memiliki keahlian, perempuan juga harus memiliki kemampuan mengelola atau *manage* berbagai urusan dan *manage* waktu dengan baik. Ucti menyatakan:

Jadi artinya termasuk bahwa seorang perempuan dengan berbagai beban menjadi ibu, menjadi istri seharusnya kemudian memiliki kemampuan *management* waktu yang baik, kemampuan menggali potensi diri dan kemudian mengaktualisasikannya secara cemerlang, sehingga kemudian dia punya ruang untuk mengeluarkan segala potensinya dan berkiprah di partai, itu masih menjadi PR⁵⁸

Perempuan juga harus mampu memenuhi berbagai syarat untuk menduduki suatu jabatan politik tertentu, baik di internal partai maupun di luar partai. Mayoritas jabatan politik di PKS mensyaratkan berbagai ketentuan sehingga hanya orang-rang dengan criteria tersebut yang dapat menduduki jabatan dimaksud. Hal ini dinyatakan T seperti berikut:

Ada prasyarat untuk menduduki sebuah jenjang karir. Dia harus mengikuti pelatihan dan sebagainya. Itu sesuatu yang tidak bisa dikejar, termasuk misalnya dia tidak pernah boleh menduduki ini kecuali telah lebih dahulu sebelumnya memegang amanah di sini.⁵⁹

Terakhir Ucti menyatakan bahwa perempuan harus memahami kultur dan nilai yang dikembangkan oleh PKSD untuk selalu tunduk kepada keputusan syura atau keputusan musyawarah. Menolak keputusan syura berarti berkhianat kepada partai dan kepada para pimpinan partai.

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ Hasil wawancara dengan Ucti di Jakarta 10 Maret 2009.

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ *Ibid*

Jadi ini konteks keimanan saya terhadap nilai-nilai bahwa kalau sesuatu sudah diputuskan sebagai hasil syuro oleh pimpinan saya maka saya tidak boleh berrkhianat kecuali mengatakan saya harus mendengar, saya harus mencoba taat betatapun sebetulnya saya punya kecenderungan pribadi saya tidak suka.⁶⁰

Yoyoh Yusroh, mantan Ketua Bidang Kewanitaan Partai Keadilan, anggota Majelis Pertimbangan Pusat, Anggota Majelis Syura Pusat dan anggota DPR RI mengemukakan banyak ciri yang diinginkannya dari perempuan PKS. Hal ini dapat disarikan dari berbagai pernyataannya berikut:

Bisa menyuarakan aspirasi karena kita juga kadang-kadang tidak hanya memperjuangkan aspirasi perempuan, tapi aspirasi semua. Kita berharap perempuan bisa berkontribusi, bukan sekedar menjadi obyek pembangunan, tapi bagaimana bisa menjadi subyek pembangunan. Kita harap perempuan PKS ini betul-betul motor penggerak karena kita sadar betul jumlah wanita Indonesia itu sekian. Harusnya yang menggerakkan juga wanita itu sendiri.⁶¹

Selain menginginkan perempuan PKS bisa menyuarakan aspirasi masyarakat, mempunyai kapasitas kader yang baik, dapat berkontribusi, mampu menjadi subyek pembangunan, Yoyoh Yusroh juga menginginkan agar semua perempuan kader PKS melek politik, dapat bermasyarakat, dan berani menyuarakan aspirasi. Selain itu Yoyoh Yusroh menekankan bahwa perempuan PKS harus menunjukkan ciri sebagai kader partai Islam. Karena itu menurutnya perempuan PKS harus menunjukkan citra sebagai Muslimah yang baik, menunjukkan diri sebagai kader yang sudah mendapat tarbiyah Islamiyah atau pendidikan Islam yang baik

Kader-kader partai, perempuan PKS itu intelek, mereka juga bisa bermasyarakat, mereka melek politik, berani untuk menyuarakan aspirasi. Mereka juga memiliki komitmen-komitmen pribadi sebagai muslimah. Islam mengajarkan kita *tawadlu*, mengikuti cara nabi dalam berpikir, dalam beribadah. Karena PKS sebagai partai Islam, Islam sebagai landasan, kita berupaya untuk mengarahkan seluruh kadernya memahami tarbiyah Islamiyah.⁶²

Selain ciri-ciri pribadi tersebut, Yoyoh Yusroh menginginkan perempuan PKS menjadi pekerja keras dan menguasai berbagai skill untuk mengoptimalkan perannya di berbagai bidang kehidupan, bukan hanya politik. Hal ini dikemukakannya dalam pernyataan berikut:

Saya selalu memotivasi kader supaya lebih banyak bekerja dan bekerja. Melalui pengajian, melalui pelatihan, *dauroh-dauroh* istilahnya, untuk berbagai *skill* yang bisa membuat mereka mampu untuk melakukan sesuatu yang lebih jauh, Jadi optimalisasi di semua bidang, melalui pengkaderan, melalui pelatihan, melalui daurah. kita berharap, dari seluruh

⁶⁰ *Ibid*

⁶¹ Hasil wawancara dengan Yoyoh Yusroh di Tangerang 4 April 2009

⁶² *Ibid*

lini kehidupan kita bisa memiliki kader-kader yang mumpuni untuk masuk ke sana.⁶³

Jika Yoyoh Yusroh menghendaki perempuan PKS menumbuhkan dan menguasai berbagai sifat atau ciri yang tidak berbeda dengan yang perlu dimiliki oleh laki-laki, Sitaresmi menghendaki agar perempuan PKS memberdayakan diri dengan sifat-sifat yang secara khusus lebih memperlihatkan ciri femininitas. Hal ini bisa dilihat dari pernyataan-pernyataan Sitaresmi berikut.

PKS menekankan pada moderasi, inklusif, juga nilai-nilainya mengakomodasi perempuan. Kita lebih menekankan pada aspek-aspek kerja, kinerja. Jadi bagaimana menerjemahkan nilai-nilai Islam tersebut pada bentuk kerja dan kinerja yang konkrit, tidak berhenti pada slogan. Termasuk kalau misalnya slogan apakah selama ini perempuan tidak diakomodir oleh partai Islam, kita mencoba untuk menunjukkan bukti yang konkrit. Walaupun menurut saya itu juga masih perlu terus diperbaiki.⁶⁴

Moderasi dan inklusifitas adalah ciri yang menurut Sitaresmi harus terus ditumbuhkan dan dipelihara karena dengan dua sifat inilah kepentingan perempuan bisa terakomodasi. Tanpa moderasi dan inklusifitas, maka partai secara otomatis akan lebih mengedepankan eksklusifitas kepentingan kelompok dominan. Hal ini dengan jelas dikemukakan oleh Judith Squires ketika dia mengemukakan argumennya tentang perlunya dua pendekatan pemberdayaan politik untuk perempuan, yaitu pendekatan *the politics of ideas* dan *the politics of presence*. Esensi pendekatan yang dikehendakinya adalah adanya 4 (empat) argumen kunci yang harus diwujudkan, yaitu perlunya representasi sebagai simbol keberadaan perempuan, perlunya upaya menangkis ide lama bahwa kepentingan politik perempuan bisa diwakili siapa saja, perlunya upaya advokasi lebih keras untuk kepentingan politik kelompok yang lemah, dan penekanan politik transformasi terus-menerus agar kebijakan semakin terbuka.⁶⁵

Selain perempuan harus memperjuangkan moderasi dan inklusifitas, secara pribadi Sitaresmi juga menghendaki etika berpolitik yang baik. Secara pribadi dia mengundurkan diri dari pencalonan ketika status dirinya digugat oleh masyarakat setempat. Dia menyatakan “Tapi saya sendiri sih berpikir, saya bukan putra daerah, saya tidak berdomisili di sana, jadi saya mengundurkan diri.”⁶⁶

Selain menginginkan politik yang beretika, Sitaresmi juga menginginkan perempuan mampu mengubah pemahaman fiqh lama tentang larangan perempuan berbicara di depan publik, mematahkan mitos dan konsep lama yang masih dipegang sebagian kelompok di PKS. Sitaresmi mengemukakan keinginannya tersebut dalam pernyataan berikut:

Termasuk pemahaman fikih. Kita memang tidak memaksakan pemahaman fikih yang seragam. Tapi ada contoh, waktu pemilu 1999 aku mau orasi di panggung saja sempat ada diskusi yang panjang. Dewan

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ Hasil wawancara dengan Sitaresmi di Jakarta 25 Februari 2009

⁶⁵ Judith Squires. *Op. cit.* hal 25

⁶⁶ Hasil wawancara dengan Sitaresmi di Jakarta 26 Februari 2009.

Syariah Wilayahnya berat. Akhirnya saya sampai telpon ustad Hilmi dan Dr. Sa salim, ketua DSP, terus ustad Hidayat Nurwahid. Selesai dengan tiga orang itu saya manggung.

Contoh lainnya, untuk kita bisa berbicara sebagai pembicara di depan kalangan laki-laki di dalam partai itu saja masih agak sulit dibanding ketika kita ke luar. Jadi masih berproses menurut saya. Dan kita harus mematahkan mitos itu, bahwa yang di dalam masih ada walalupun secara konsep itu tidak ada, baik dalam Islamnya maupun dalam AD ARTnya atau pemimpin-pemimpinnya.

Tapi itu nanti terpulang fatwanya, karena banyak juga elemen-elemen meski sedikit di PKS yang masih tidak siap dengan berbagai perubahan. PKS yang sekarang dianggapnya “lebih cair”, kurang kentel, ada pergeseran ideologi, padahal tidak. Ini nilai-nilai Islam yang sejatinya, cuma justru kita sering terpengaruh hal-hal yang sifatnya ekstrim. Itu yang selalu harus diperbaiki.

Teori sangat baik. Ini lebih pada ketidaksiapan teman-teman yang sudah punya paradigma lam. Sejak awal secara konsep, PK atau PKS sudah bicara tentang peran politik perempuan. Cuma bergabungnya orang-orang ini ke dalam PKS membawa paradigma-paradigma lama. Kita perlu kerja keras untuk membuktikan bahwa perempuan bisa signifikanlah perannya. Kita memang harus terus lebih sabar. Perempuan-perempuannya harus lebih percaya diri. Nanti juga kelihatann kalau perempuan bisa lebih memberikan pembelajaran pada yang lain, pada struktur, pada pengurus, pada laki-laki yang ada di PKS. Dan saya optimis.⁶⁷

Pendapat Sitaesmi yang menginginkan agar perempuan mampu merubah pemahaman fiqih lama dan mitos yang menghambat peran perempuan relevan dengan kenyataan mengenai masih adanya kelompok-kelompok internal PKS yang masih meyakini dan menginginkan tetap tegaknya fiqih dan mitos tersebut. Seperti dinyatakan Sitaesmi, kecenderungan pemahaman fiqih lama dan mitos yang menabukan peran perempuan terjadi pada tingkatan organisasi PKS yang lebih rendah atau tingkat akar rumput partai yang menurutnya ketika bergabung dengan PKS masih membawa nilai-nilai tradisional. Pendapat S ini dikonfirmasi oleh temuan UNRISD dalam laporannya tahun 2004 yang salah satunya menyimpulkan tentang adanya resistensi terhadap upaya peningkatan peran politik perempuan dari *traditional authorities* sebagaimana terlihat dari pernyataan bahwa lembaga-lembaga yang mempunyai wewenang tradisional hampir di seluruh wilayah di dunia ini sungguh-sungguh bersifat patriarkhal, tidak memberi kesempatan bagi perempuan untuk berbagi wewenang. Lembaga-lembaga tradisional ini juga membuat partisipasi perempuan harus disesuaikan dengan kebijakan dan sesuai dengan hirarkhi yang maskulin.⁶⁸

Berkenaan dengan masih adanya resistensi terhadap peran politik perempuan di PKS, Sitaesmi yakin bahwa hal ini secara perlahan akan berubah. Lingkungan internal PKS akan belajar dari apa yang diperjuangkan perempuan, tetapi perempuan PKS juga harus meningkatkan keyakinan diri bahwa mereka

⁶⁷ *Ibid*

⁶⁸ United Nations Research Institutes for Social Development (UNRISD), 2004. *Gender Equality, Striving for Justice in Unequal World*. France. Hal. 196

mampu mengemban peran politik. Perempuan PKS juga harus menjadi bagian yang mewariskan nilai baru dari kelompok atas ke bawah, tidak masalah meski harus diberi sebutan feminis karena semua perjuangan untuk kepentingan perempuan yang manapun memang masuk kategori feminis. Hal-hal ini dinyatakan Sitaresmi sebagai berikut:

Saya pikir ada proses pendewasaan terus-menerus, kemajuan, termasuk penerimaan terhadap peran politik perempuan sekarang sudah jauh lebih baik dibanding tahun 1998. Saya naik panggung saja nggak boleh. Perempuan jauh lebih cepat belajarnya, proses *learning*-nya. Tapi itu perempuan-perempuan yang di atas. Perempuan yang di bawah itu.. *self confidence*, segala macam masih belum.. Perlu *learning process* supaya ada pewarisan nilai dari atas ke bawah. nya.

Kadang-kadang Ledia sampai dibilang feminis, terlalu banyak tuntutan buat perempuan. Terus dianggap terlalu banyak maunya perempuan. Kadang-kadang dia harus menghadapi tantangan-tantangan seperti itu.⁶⁹

Menurut Sitaresmi, perempuan PKS yang pada umumnya ustadzah harus mempersiapkan diri untuk menghadapi "kejutan budaya" dengan berbagai pengalaman politik yang umumnya masih asing untuk mereka. Perempuan PKS juga harus mampu meningkatkan kualitas dan popularitas serta membangun jaringan dukungan.

Saya juga mengalami sedikit *shock culture* juga ketika jadi caleg dibanding ketika jadi ustadzah. Ustadzah itu kan dimana-mana dihormati. Sekarang begitu ketika menjadi caleg atau pelayan rakyat mulai merasakan, semua rakyat butuh bantuan. Ini semua resiko yang sudah kita pikirkan jika sekarang pengen jadi pelayan rakyat.

Kita juga punya kualitas dan popularitas. Kita juga punya jaringan sampai ke akar rumput yang kita bangun. Sepanjang tahun kita melakukan pelayanan kesehatan gratis, khitanan massal, semua kerja-kerja sosial, full. Dan itu bukan hanya saya, kader perempuan punya wadah sendiri-sendiri. Memang harusnya sebenarnya hal-hal ini juga dilihat oleh para bapak.⁷⁰

Tabel 5.2
Ciri-Ciri dan Kemampuan yang Diinginkan oleh Perempuan PKS

Ciri Maskulinitas	Ciri Femininitas
1. Menggunakan logika, bukan perasaan	1. Kemampuan hubungan <i>interpersonal</i>
2. Hemat bicara	2. Kemampuan lobi dan tidak konfrontatif
3. Tangguh untuk melaksanakan berbagai fungsi	3. Kemampuan bekerja dalam <i>team-work</i>
4. Kemampuan berpikir generalis, makro dan sistemik	4. Kemampuan komunikasi yang inklusif
5. Berani bicara	5. Kemampuan menjaga keseimbangan
6. Ketrampilan teknis mengemudi	

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Sitaresmi di Jakarta 26 Februari 2009..

⁷⁰ Hasil wawancara dengan Sitaresmi di Jakarta 26 Februari 2009.

<p>mobil untuk mendukung aktivitas politik</p> <p>7. Moral yang bagus, intelektual yang bagus, pengalaman politik di lapangan. untuk mengasah sensitifitas terhadap masalah-masalah politik..</p> <p>8. Kemampuan konseptual untuk penyempurnaan argumen politik</p> <p>9. Keahlian tertentu agar dapat menjadi <i>hubaro</i></p> <p>10. Mampu memenuhi berbagai persyaratan untuk jabatan politik</p> <p>11. Berani dan bisa menyuarakan aspirasi, bisa berkontribusi, mampu menjadi subyek pembangunan, meleak politik, dapat bermasyarakat, menunjukkan ciri kader partai Islam.</p> <p>12. Pekerja keras dan menguasai berbagai <i>sklill</i></p>	<p>atau <i>tawadlunitas</i> antara peran domestik dan publik.</p> <p>6. Kapasitas pendekatan kepada masyarakat.</p> <p>7 Kemampuan <i>appeal</i> untuk memperjuangkan kepentingan perempuan.</p> <p>8. Kapabilitas pribadi yang baik dan amanah dalam melaksanakan semua tugas dan kewajiban</p> <p>9. Berpikir luas untuk kepentingan jangka panjang,</p> <p>10. Kemampuan mengatur urusan dan waktu dengan baik</p> <p>11. Ketertundukan total kepada putusan syura Partai</p> <p>12. Moderat dan inklusif</p> <p>13. Etika berpolitik yang baik</p> <p>14. Mampu mematahkan fiqih dan mitos ama tentang peran politik perempuan</p> <p>15. Mampu mengatasi kejutan budaya karena adanya peran baru.</p> <p>16. Mampu membangun <i>self confidence</i></p> <p>17. Mempunyai kualitas dan popularitas</p>
---	--

Konsepsi *the subject of lack* menunjukkan bahwa dalam proses membangun diri sebagai subyek politik, identitas diri perempuan hanya akan mempunyai makna jika dilihat dalam kaitan atau hubungan dengan subyek yang menjadi panutan atau yang ingin ditirunya. Identitas perempuan dalam konsep *the subject of lack* adalah identitas yang tidak akan pernah mencapai bentuk yang pasti karena subyek panutan atau *the signifier* yang ingin ditiru juga berubah. Hal ini seperti dikatakan Lloyd bahwa "*the subject of lack is a subject whose identity closure is impossible*".⁷¹

Berbagai informasi yang disampaikan para perempuan PKS sebagai narasumber penelitian disertasi ini menunjukkan bahwa terdapat dua golongan sifat-sifat atau ciri-ciri besar yang ingin ditiru dan ditumbuhkan oleh para perempuan PKS. Golongan pertama adalah ciri atau sifat maskulin dalam kehidupan politik. Sifat-sifat, ciri dan kemampuan dalam kelompok maskulin tersebut antara lain meliputi logis, hemat bicara, tangguh, cara berfikir generalis dan makro serta sistimatis, berani, terampil secara teknis, mempunyai kemampuan konseptual yang bagus, pekerja keras, memiliki keahlian tertentu agar dapat menjadi *hubaro*, mampu memenuhi berbagai persyaratan untuk jabatan politik.

⁷¹ Moya Lloyd. *Op. cit.* hal 17.

Sementara itu Beberapa ciri femininitas antara lain adalah kemampuan hubungan *interpersonal*, kemampuan lobi dan tidak konfrontatif, kemampuan bekerja dalam *team-work*, kemampuan komunikasi yang inklusif, kemampuan menjaga keseimbangan atau *tawadlunitas* antara peran domestik dan public, kapasitas pendekatan kepada masyarakat, kemampuan *appeal* untuk memperjuangkan kepentingan perempuan, kpbilitas pribadi yang baik dan amanah dalam melaksanakan semua tugas dan kewajiban, berpikir luas untuk kepentingan jangka panjang, kemampuan mengatur urusan dan waktu dengan baik, ketertundukan total kepada putusan syura Partai, moderat dan inklusif, etika berpolitik yang baik, mampu mematahkan fiqih dan mitos lama tentang peran politik perempuan, mampu mengatasi kejutan budaya karena adanya peran baru, mampu membangun *self confidence*, mempunyai kualitas dan pularitas.

Berbagai ciri baik maskulinitas maupun femininitas yang ingin ditiru dan ditumbuhkan dalam diri perempuan PKS tersebut bukanlah keseluruhan ciri yang mungkin ada dan bisa ditiru, tetapi hanya merupakan ciri yang dapat disebutkan oleh para narasumber dalam wawancara. Di luarnya tentu masih banyak lagi. Pengelompokan dalam dua golongan besar didasarkan pada dua kelompok besar dalam feminisme dalam memperjuangkan kepentingan politik perempuan, yaitu kelompok yang menginginkan *gender visibility* dan kelompok yang menginginkan *gender neutrality*.⁷² Kelompok *gender neutrality* memperjuangkan kedudukan yang setara serta ingin meniru karakter maskulin agar perempuan dapat setara dengan laki-laki. Sementara itu kelompok *gender visibility* menginginkan adanya pengakuan atas kekhasan perempuan atau ciri keperempuanan (*femininity*) atau *the difference* untuk memiliki hak hidup yang sama dengan karakter maskulin. Menurut kelompok *gender visibility*, perempuan tidak perlu menumbuhkan karakter maskulin agar setara dengan laki-laki, tetapi perlu menunjukkan dimensi feminin dalam kehidupan politik sehingga ada keragaman paradigma dan karakter dalam kehidupan politik. Adanya berbagai karakter dan sifat yang diinginkan dalam dua golongan besar menunjukkan bahwa dari sisi sifat, ciri dan kemampuan yang ingin dimiliki dan ditumbuhkan dalam diri perempuan PKS, mereka adalah perempuan yang merupakan subyek-dalam proses. Mereka sedang membangun ciri-ciri yang masing-masing menginginkan hal yang berbeda.

Hak Politik Perempuan dalam Pandangan, Sikap, dan Tindakan Pejabat Partai Keadilan Sejahtera

Perjuangan perempuan PKS untuk memperoleh posisi strategis dalam hubungan kekuasaan di internal partai tidak semata bergantung pada upaya dan kondisi internal perempuan PKS. Hal lain yang sangat penting adalah sikap dan tindakan partai, dalam hal ini adalah tindakan pejabat partai yang bertindak mewakili dan atas nama partai. Berkenaan dengan signifikansi sikap dan tindakan partai terhadap posisi perempuan dalam hubungan kekuasaan di internal partai,

⁷² Moya Lloyd. *Op. cit.* hal. 116- 126.

dalam buku mereka yang berjudul "*Gender and Party Politics*"⁷³, Lovenduski dan Norris membahas program dan struktur organisasi partai yang berhubungan dengan hal tersebut. Program adalah menyangkut hal-hal apa yang akan dan tidak akan dilakukan oleh partai baik sebagai pencerminan ideologi maupun kepentingan yang lebih bersifat pragmatis. Sementara struktur partai adalah mengenai bagaimana dan siapa yang akan melakukan pengelolaan partai. Lebih lanjut Lovenduski dan Norris⁷⁴ menyatakan bahwa dilema muncul mengenai apakah perempuan yang harus mempengaruhi lembaga partai sebelum partai merubah sikapnya terhadap perempuan atau sebaliknya. Keduanya juga menjelaskan bahwa respon partai dapat dilihat dari bagaimana partai merespon tuntutan keadilan untuk perempuan. Apakah partai menyesuaikan diri terhadap tuntutan keadilan bagi perempuan? Apakah program dan struktur partai disesuaikan dengan tuntutan perempuan? Apakah partai tidak sekedar melakukan retorika-retorika dan menjadikan isu keadilan bagi perempuan sekedar untuk *platform* kampanye? Apakah partai melakukan diskriminasi positif atau melakukan *affirmative action*? Apakah partai memberi bantuan keuangan dan bantuan teknis lainnya? Apakah perempuan diberi tempat/posisi dengan kekuasaan khusus yang berpengaruh dalam pengambilan keputusan dalam partai? Apakah dalam *platform* ideologi partai terdapat tempat khusus bagi perempuan? Apakah aturan informal dan kebiasaan dalam partai bersifat sensitif gender? Hal-hal inilah yang secara garis besar ditanyakan kepada para laki-laki pejabat PKS.

Data untuk melihat sikap dan tindakan partai dikumpulkan baik dari laki-laki maupun perempuan PKS. Pejabat PKS laki-laki yang menjadi narasumber penelitian ini adalah Presiden PKS, mantan Presiden PKS, Wakil Sekretaris Jendral PKS, dan seorang anggota Majelis Syura Pusat. Selain itu agar data tentang, pandangan, sikap dan tindakan partai dapat dianalisis secara lebih obyektif dari sisi perempuan, maka pertanyaan-pertanyaan untuk mengumpulkan data tentang sikap dan tindakan partai juga ditanyakan kepada perempuan PKS. Berikut adalah data dan analisis tentang pandangan, sikap dan tindakan PKS terhadap hak perempuan dalam kehidupan politik.

4.3.1 Pandangan Pejabat PKS tentang Hak Politik Perempuan.

Untuk mengumpulkan data tentang pandangan pejabat PKS terhadap hak politik perempuan, beberapa pertanyaan diajukan kepada para narasumber, yaitu:

1. Pandangan tentang hak perempuan untuk menduduki berbagai jabatan politik dalam partai dan untuk menjadi calon anggota DPR.
2. Dasar pemikiran yang melatarbelakangi pandangan sebagaimana pada point 1
3. Pandangan mengenai potensi kekuasaan yang selama ini ditunjukkan oleh perempuan PKS baik secara individual (tokoh-tokoh perempuan PKS) maupun secara keseluruhan sebagai kelompok perempuan dalam PKS.
4. Pandangan tentang target-target yang ingin dicapai oleh PKS dalam posisi perempuan di struktur kepengurusan PKS dan dalam keanggotaan DPR.

⁷³ Joni Lovenduski dan Pippa Norris. 1993. *Gender and Party Politics*. London: Sage Publications, hal 12.

⁷⁴ *Ibid*, hal. 1-13.

5. Pandangan tentang hal-hal yang menyebabkan perempuan masih menjadi minoritas dalam kekuasaan politik di PKS dan di DPR

Tifatul Sembiring, Presiden PKS periode 2004-2009 mengemukakan bahwa bagi PKS, perempuan adalah *partner* laki-laki. Perempuan menduduki posisi tinggi dalam masyarakat karena dia adalah *khalifah* atau wakil Allah di muka bumi. Hal ini dinyatakan Tifatul Sembiring seperti berikut:

Laki-laki dan wanita itu adalah *partnership*. Mitra dalam perjuangan dakwah. Jadi untuk “*Khalifah*” (wakil Allah) di muka bumi untuk membangun dan memelihara kehidupan ini, laki-laki dan perempuan punya peluang yang sama.⁷⁵

Hidayat Nurwachid, mantan Presiden PKS menyatakan jawaban yang hampir sama dengan jawaban Tifatul Sembiring. Dia menyatakan:

Secara prinsip kesertaan perempuan dalam aktivitas partai PKS sesungguhnya hanya penjabaran terhadap ideologi Islam yang diyakini PKS yang mendekatinya dari pendekatan dakwah, pelayanan umat dan melibatkan seluruh kadernya, laki-laki maupun perempuan karena sejak dari awal PKS tidak melihat pembedaan laki-laki maupun perempuan, atau pembedaan atas dasar gender, karena kita justru selalu menggunakan pendekatan bahwa *almukminuna wal mukminat, bahdun auliya ubat*, kaum mukmin laki-laki dan perempuan adalah saling dukung, tolong menolong. Karenanya berangkat dari ideologi dasar tentang Islam yang jadi ideologi PKS, bahwa partai dakwah melayani umat, maka sangat wajar bahwa sejak dari awal PKS meletakkan dan memposisikan aktivitas perempuan dalam posisi setara dengan aktivis laki-laki, untuk dakwah, untuk melayani.⁷⁶

Pernyataan Tifatul Sembiring dan Hidayat Nurwachid adalah retorika formal PKS bahwa terdapat posisi dan kewajiban yang setara antara laki-laki dan perempuan untuk mengemban peran publik dan peran politik. Dari sisi filosofi dan kebijakan formal PKS, perempuan adalah aktor setara laki-laki. Bahkan jika pernyataan Hidayat Nurwachid yang dijadikan dasar, perempuan PKS secara filosofis memiliki keunggulan status dibanding laki-laki karena PKS yang merupakan partai dakwah dan menjadikan pelayanan kepada masyarakat sebagai fokus perjuangannya menjadikan perempuan PKS lebih unggul karena sifat perempuan yang terbiasa melayani keluarga dan masyarakat.⁷⁷ Dasar pemikiran tentang kesetaraan perempuan dalam kehidupan politik adalah karena Islam menghendaki demikian. Meski demikian perlu dicatat bahwa pernyataan Nurwachid menunjukkan bahwa kesetaraan perempuan dengan laki-laki adalah “untuk dakwah, untuk melayani”. Dia tidak membuat pernyataan bahwa kesetaraan tersebut adalah untuk menjadi anggota DPR atau menjadi elit partai.

⁷⁵ Hasil wawancara dengan Tifatul Sembiring melalui layanan surat elektronik.

⁷⁶ Hasil wawancara dengan Hidayat Nurwachid tanggal 20 Juni 2009

⁷⁷ Judith Squires dalam bukunya *Gender in Political Theory, op. cit.* hal. 152-163 menjelaskan bahwa teori politik perlu dikerangka ulang agar dapat menggambarkan secara imbang sudut pandang perempuan dan laki-laki. Salah satu teori yang perlu dikerangka ulang adalah teori keadilan yang perlu memasukkan etika *care* yang dapat diartikan sebagai kepedulian atau semangat melayani. Etika kepedulian dan semangat melayani diasumsikan sebagai etika yang berasal dari sisi femininitas perempuan.

Pernyataan Tifatul Sembiring (mantan Presiden PKS yang seaktu diwawancarai maish menjadi Presiden PKS) memperjelas bahwa kesetaraan tersebut tidak diterjemahkan sebagai kesetaraan menduduki posisi politik, baik menjadi anggota DPR maupun menjadi elit partai yang dapat membuka akses perempuan ke jabatan politik yang lebih tinggi. Hal ini terlihat dari pernyataan Tifatul Sembiring berikut:

Ada sedikit beda pandangan Islam terhadap ”peran”. Jadi Peran tidak selalu diartikan ”posisi”. Peran adalah ibadah yang tidak selalu sama dengan posisi jabatan. PKS lebih mendorong peran seluruh kader, karena posisi dan jabatan itu sangat terbatas.⁷⁸

Baik Hidayat Nurwachid maupun Tifatul Sembiring tidak memberikan ilustrasi pandangan mengapa kesetaraan peran tersebut tidak untuk jabatan politik. Jika keterbatasan jabatan politik adalah alasan sebenarnya, maka laki-lakipun juga menghadapi masalah yang sama. Meski secara formal perempuan merupakan *partner* setara laki-laki, Hidayat Nurwachid mengakui bahwa secara umum masih ada pandangan masyarakat yang tidak menghendaki perempuan sebagai wakil rakyat. Dia mengatakan:

Mungkin secara umum, sekalipun tampil secara terbuka, secara sama, mungkin orang Indonesia memang masih melihat bahwa keterwakilan-keterwakilan itu mereka lebih nyaman bila diberikan kepada laki-laki.. Yang perempuan juga demikian yang laki-laki juga demikian. Akibatnya muncullah caleg lebih banyak dari kalangan laki-laki.⁷⁹

Pandangan masyarakat umum yang tidak menghendaki perempuan menjadi wakil rakyat, menurut Nurwachid disebabkan masyarakat merasa lebih nyaman jika diwakili oleh laki-laki. Karena itu meski partai sudah mendukung posisi kesetaraan perempuan dalam dunia politik, hal ini tidak secara otomatis meningkatkan keterwakilan politik perempuan. Perasaan seperti ini bukan hanya terjadi di kalangan laki-laki, tetapi juga di kalangan perempuan. Nurwachid juga merujuk pada faktor usia para perempuan kader PKS yang rata-rata masih muda sehingga pada saat ini (tahun 2009) mereka masih muda dan belum berpengalaman, khususnya belum berpengalaman dalam kehidupan politik. Mereka juga masih belum mengakar di masyarakat.

Karena mereka berangkat dari umur sangat muda, jadi ketika pada umur sekarang mereka belum senior dibandingkan dengan yang lain, belum mengakar di masyarakat dibanding dengan yang lain yang sudah lebih dulu. Jadi ini mungkin hanya karena faktor waktu. Bila kemudian orientasinya tetap pada suara terbanyak dan kader-kader perempuan PKS semakin lebih dewasa, semakin menjadi tokoh, mungkin 2014 akan menjadi *booming*.⁸⁰

Pernyataan Hidayat Nurwachid bahwa kader perempuan PKS rata-rata masih berusia muda, belum senior sehingga belum mampu membangun ketokohan di masyarakat bertentangan dengan pendapat YY dan HH yang

⁷⁸ Hasil wawancara dengan Tifatul Sembiring melalui surat elektronik

⁷⁹ Hasil wawancara dengan Hidayat Nurwvchid di Bandarlampung 20 Juni 2009.

⁸⁰ *Ibid.*

pernyataannya yang telah dikutip dalam bagian lebih awal Bab IV ini yang menunjukkan bahwa kader perempuan PKS mulai karir dakwah dan politik bersamaan dengan aktivitas laki-laki PKS karena mereka memulainya secara bersama semenjak menjadi aktivis mahasiswa di kampus. Secara faktual juga dapat dilihat bahwa hampir semua narasumber perempuan yang diwawancarai untuk penelitian disertasi ini memiliki umur lebih tua dibanding dengan laki-laki PKS yang menjadi anggota Panitia Khusus Angket DPR tentang Skandal *Bailout* Bank Century. Argumen tentang kurangnya kemampuan PKS membangun ketokohan di masyarakat juga dapat dibantah dengan kenyataan bahwa kelompok perempuan PKSlah yang telah membangun sekitar 5000 Pos Wanita Keadilan se Indonesia dengan anggota masing-masing kelompok antara 30 sampai 50 orang. Pernyataan tersebut juga berbeda dengan pernyataan S⁸¹ bahwa Bidang Kewanitaan dan Bidang Kaderisasi mesin partai yang benar-benar bekerja sampai tingkat akar rumput, bahkan melakukan *direct selling* untuk partai. S juga menyatakan bahwa "suami saya pernah bilang gini, kader-kader perempuan umumnya jauh lebih populer ketimbang laki-laki."⁸²

Dengan demikian jika ketokohan diartikan dengan kerja keras membesarkan partai, perempuan PKSlah yang lebih merupakan "tokoh sesungguhnya" karena merekalah "prajurit" yang bekerja membesarkan partai. Merekalah yang juga terus menjaga mesin partai bekerja sepanjang tahun tanpa jeda bahkan dalam masa *cooling down* sehabis pemilu. Karena Tifatul Sembiring dan khususnya Hidayat Nurwachid merupakan tokoh-tokoh sentral di PKS karena mereka keduanya adalah mantan Presiden PKS (bahkan Tifatul Sembiring adalah Presiden PKS pada saat wawancara dilakukan), maka ketidaksediaan keduanya memaknai peran sebagai peran dalam posisi jabatan politik dalam hubungannya dengan peran politik perempuan PKS, menguatkan argumen Lovenduski dan J. Hills yang dikutip Vicky Randal bahwa "partai kanan" mayoritas enggan mempromosikan perempuan untuk jabatan politik tinggi, khususnya di DPR seperti terlihat dari pernyataan Vicky Randal berikut:

*Ironically women's higher proportionate membership of right-wing parties are not normally reflected at the level of party office holding' and it remains true that conservative parties do not promote women at the same rate as men. Parties on the left and, in Scandinavia also parties of the centre, are much more willing to advance women.*⁸³

Sikap enggan memaknai peran politik perempuan sebagai peran dalam posisi politik penting di partai dan di luar partai bahkan ditunjukkan secara lebih jelas oleh Gufron Aziz Fuadi, anggota Majelis Syura Pusat yang juga merupakan anggota dan pernah menjabat Wakil Ketua DPRD Provinsi Lampung. Dia menyatakan:

Saya termasuk yang secara pribadi sebenarnya kurang sreg dengan aktivitas politik yang terlalu banyak untuk perempuan. Bukan berarti saya tidak mendukung perempuan untuk terjun ke dunia politik, tapi ada hal-hal yang sebenarnya lebih baik jika dikerjakan perempuan dan ada hal-hal

⁸¹ Hasil wawancara dengan Sitaresmi di Jakarta 25 Februari 2009

⁸² *Ibid.*

⁸³ Vicky Randal. *Op. cit.* hal. 108

yang lebih baik dikerjakan laki-laki, politik termasuk wilayah yang menurut saya lebih baik atau lebih maksimal jika dikerjakan laki-laki...⁸⁴

Fuadi menolak aktivitas politik yang terlalu banyak untuk perempuan. Dia menyatakan lebih lanjut bahwa penolakannya bukan berarti dia tidak mendukung perempuan terjun ke dunia politik, tetapi menurutnya ada hal-hal yang lebih maksimal jika dikerjakan laki-laki dan ada hal-hal yang lebih maksimal jika dikerjakan perempuan. Perempuan mempunyai banyak kegiatan di rumah yang tidak dapat digantikan orang lain karena anak secara alamiah lebih memerlukan figur ibu. Sementara itu politik yang menuntut kerja ekstra bahkan kadang harus bekerja sampai jauh malam atau banyak bepergian untuk mendatangi masyarakat di desa-desa menurutnya akan lebih maksimal jika dilakukan oleh laki-laki. Dia mengemukakan pandangannya tersebut dalam pernyataannya berikut:

Karena politik menuntut kerja ekstra, termasuk lembur sampai jauh malam, atau kadang-kadang harus ada pertemuan-pertemuan sampai larut malam. Kita juga harus mendatangi masyarakat di desa-desa, kadang-kadang sampai jauh malam. Tentu akan ada masalah kalau perempuan seorang diri harus bepergian dengan laki-laki yang bukan muhrim untuk keperluan tersebut, apalagi kader-kader perempuan kita masih muda-muda. Kalau sudah senior mungkin hal ini tidak terlalu menjadi hambatan. Selain itu perempuan juga mempunyai banyak kegiatan di rumah yang tidak bisa digantikan orang lain karena secara alamiah anak-anak memerlukan ibunya.⁸⁵

Pandangan Fuadi yang menolak peran perempuan di dunia politik yang terlalu banyak dan menghendaki agar perempuan lebih memaksimalkan perannya di ranah domestik dan meninggalkan dunia politik untuk diurus laki-laki merupakan pencerminan cara pandang patriarkhis yang ekstrim karena menghendaki bukan hanya dominasi laki-laki atas perempuan di ranah publik dan politik,⁸⁶ tetapi bahkan menginginkan perempuan tidak berada di ranah politik. Fuadi menginginkan pemisahan dunia laki-laki dari dunia perempuan. Pandangan Fuadi merefleksikan keyakinan seorang tokoh Islam Iran, yaitu Murtadha Muthahhari yang menyatakan:

Wanita dan pria adalah dua bintang yang beredar pada orbit yang berbeda. *“Tidaklah patut bagi matahari untuk mendahului bulan dan malampun tidak patut mendahului siang. Masing-masing beredar pada orbitnya”* (Q. 16:40). Kondisi dasar bagi kebahagiaan pria maupun wanita, dalam kenyataannya bagi seluruh umat manusia, ialah bahwa masing-masing harus terus bergerak pada orbitnya sendiri. Kebebasan dan persamaan

⁸⁴ Hasil wawancara dengan Gufron Azis Fuadi di Bandarlampung 12 Juli 2009

⁸⁵ *Ibid.*

⁸⁶ Vicky Randal, op. cit. hal. 15-28 mengupas bahwa patriarkhi merupakan sebuah dogma yang mengatribusikan *culturally legitimated authority* atau kewenangan yang secara kultural dianggap syah kepada laki-laki daripada kepada perempuan. Perempuan secara kultural ditolak haknya terhadap wewenang di ranah publik karena masyarakat itu sebuah keluarga besar dengan laki-laki sebagai pemimpin dan perempuan sebagai pengikut meski belum tentu perempuan *powerless* atau tidak mempunyai kekuatan. Patriarkhi sering disamakan dengan male dominance atau dominasi laki-laki meski sebenarnya keduanya berbeda. Dominasi laki-laki belum tentu patriarkhi, tetapi patriarkhi sudah tentu mengandung dimensi dominasi laki-laki atas perempuan.

akan bermanfaat selama tidak ada dari mereka yang meninggalkan orbit dan arahnya yang alami. Yang telah menyebarkan kekacauan dalam masyarakat adalah bahwa mereka telah bangkit menentang aturan yang alami, dan hanya itu saja.⁸⁷

Sama dengan Muthahhari, Fuadi berkeyakinan bahwa secara alamiah perempuan⁸⁸ akan lebih bahagia jika berkonsentrasi mengurus masalah domestik sementara dunia publik akan lebih baik jika diurus laki-laki. Fuadi tidak menyadari bahwa dengan mengadopsi pandangan demikian dia sebenarnya bertentangan dengan pandangan formal PKS yang menghendaki perempuan terlibat aktif dalam dunia publik dan politik seperti dinyatakan dalam Bayan Dewan Syariah Pusat yang dalam salah satu bagiannya di Mukaddimah menyatakan:

Di masa Rasulullah saw. keluarnya kaum muslimah dari rumah untuk melaksanakan aktifitas ibadah, sosial dakwah bahkan politik dan jihad adalah sesuatu yang riil terjadi dan Rasulullah saw. tidak melarangnya. Sebagian sahabat hijrah ke Habasyah, mengikuti bai'ah, seperti bai'ah Aqabah dan bai'ah Ridwan serta hijrah ke Madinah, bahkan mengikuti jihad dan peperangan..⁸⁹

Sewaktu ditanyakan lebih lanjut apakah dukungan infrastruktur partai kepada perempuan PKS tidak mempermudah perempuan PKS melaksanakan aktivitas-aktivitas politik, Fuadi menjelaskan bahwa tetap ada pekerjaan-pekerjaan yang tidak dapat digantikan. Dia menyatakan:

Memang betul (tentang adanya sistim dukungan partai kepada perempuan PKS), tapi tetap saja ada banyak hal lain dari peran ibu yang tidak bisa digantikan orang lain. Jadi bagaimanapun saya kira kurang pas perempuan terlalu banyak terjun ke urusan publik karena hal ini akan berakibat kepada keluarganya, terutama kalau masih punya anak-anak kecil.⁹⁰

Fuadi selanjutnya menjelaskan bahwa sistim dukungan yang diberikan oleh PKS untuk perempuan bertumpu pada konsep keluarga sebagai basis masyarakat yang baik. PKS memnyusun program penguatan keluarga yang disebut dengan program “ailah atau ada yang menyebutnya sebagai ahiliah Sebagai kader PKS dia dan keluarganya juga harus mengikuti program tersebut. Berikut adalah pernyataannya menyangkut hal tersebut:

⁸⁷ Murtadha Muthahhari. 2000. *Hak-hak Wanita dalam Islam*. Jakarta: PT Lentera Basritama. Hal. XIV. Cetak miring oleh penerbit.

⁸⁸ Muthahhari menggunakan istilah wanita untuk menyebut perempuan. Meski masyarakat awam tidak mengenal perbedaan kedua istilah tersebut, tetapi secara kebahasaan keduanya berbeda. Wanita dimaknai sebagai istilah yang berasal dari bahasa Jawa “*wani di toto*” atau berani diatur, sementara perempuan dimaknai sebagai istilah dengan kata dasar empu atau orang yang sakti. Karena itu istilah perempuan dikonotasikan sebagai istilah yang menunjukkan ciri sebagai pribadi yang kuat, sementara wanita sebagai pribadi yang *submissive* atau patuh kepada yang menata.

⁸⁹ Bayan Dewan Syariah Pusat Partai Keadilan Sejahtera Nomor 19/B/K/DSP-PKS/1429 diterbitkan tanggal 20 Agustus 2008.

⁹⁰ Hasil wawancara dengan Gufron Azis Fuadi di Bandarlampung, 12 Juli 2009

Kita memang mempunyai program demikian. Dasar pandangannya adalah karena keluarga yang merupakan dasar atau basis masyarakat yang baik. Kalau keluarga nggak kuat, nggak baik maka sulit bagi kita untuk membangun masyarakat yang baik. Untuk itu setiap keluarga kader diharapkan mengikuti program tersebut.⁹¹

Program penguatan keluarga tersebut⁹² memberi pedoman agar masing-masing anggota keluarga membangun komunikasi yang baik. Untuk itu anggota keluarga, khususnya kepala keluarga diminta membuat catatan tentang apa yang dilakukan untuk membangun komunikasi tersebut dalam bentuk catatan periodik. Hal ini dinyatakan oleh Fuadi sebagai berikut:

Program ini merupakan tuntunan agar setiap rumah tangga PKS adalah rumah tangga yang kuat yang menjadi dasar munculnya keluarga yang sehat jasmani dan rohani. Harus ada pembagian tanggung-jawab antara anggota keluarga, ada komunikasi terbuka antara semua anggota keluarga. Kita melihat bahwa masalah suami istri pada umumnya muncul karena tidak adanya komunikasi yang baik diantara keduanya. Karena itu program ini meminta setiap rumah tangga kader PKS untuk membuat laporan tentang apa yang dilakukan untuk membangun komunikasi. Ada laporan periodik untuk itu. Jadi kita masing-masing harus mencatat apa yang kita lakukan.⁹³

Melihat penjelasan Fuadi, terlihat bahwa PKS menyusun program penguatan keluarga sebagai sistim dukungan bagi rumah tangga kader agar tetap dapat berfungsi dengan baik meskipun anggota keluarganya aktif dalam kehidupan politik. Sistim seperti ini juga dinilai positif oleh salah seorang penulis Amerika Serikat, Louis Lamy' Al Faruqi yang menyatakan bahwa masyarakat Timur dan khususnya masyarakat Islam mempunyai pengaturan sistim kekerabatan berdasar prinsip kekerabatan besar atau *extended family*. Sistim *extended family* ini dapat menjadi sumber dukungan ketika perempuan memutuskan mengambil peran aktif di luar rumah. Menurutnya, sistim yang merupakan keunikan Islam dan masyarakat timur ini tidak dikenal dalam masyarakat barat dan semestinya dipromosikan dan diberikan kesempatan untuk berkembang. Menurutnya, dengan sistim dukungan keluarga besar maka aktifnya perempuan di luar rumah tidak harus berakibat pada pecahnya atau terlantarnya keluarga. Dukungan demikian juga menghindarkan perempuan dari *stress* berlebihan atau perasaan bersalah karena meninggalkan keluarga.⁹⁴

Lebih lanjut Fuadi menjelaskan bahwa keberatannya terhadap aktivitas politik perempuan yang terlalu banyak didasarkan pada kenyataan adanya hambatan pada perempuan, yaitu hambatan beban keluarga, khususnya keberadaan anak-anak. Selain itu Fuadi menunjukkan data bahwa rata-rata

⁹¹ *Ibid.*

⁹² Menurut penjelasan Herlini Amran program penguatan keluarga kader tersebut disusun oleh Bidang Pengkaderan DPP PKS.

⁹³ *Ibid.*

⁹⁴ Lamy' Al Faruqi. 1991. *'Ailah, Masa Depan Kaum Wanita, Model Masyarakat Ideal Tawaran Islam*. Surabaya: Alfiqr, hal. xiii-xx

perempuan aktivis PKS mempunyai latar belakang keilmuan kependidikan dan keagamaan sehingga menurutnya kurang memberi bekal untuk aktivitas politik. Hal ini dinyatakan oleh Fuadi sebagai berikut:

Betul, tapi tetap saja menurut saya ada peran ibu kepada anak yang tidak bisa tergantikan siapapun, khususnya ketika anak masih kecil-kecil. Secara faktual perempuan tetap akan memiliki hambatan untuk sepenuhnya berkiprah di lapangan politik. Kalau bu Ari cermati, perempuan aktivis kita itu latar belakang ilmunya kebanyakan dari FKIP atau latar belakang keagamaan, bukan dari bidang ilmu politik atau ilmu sosial lainnya, sehingga ini dapat menjadi hambatan dalam membangun karir politik⁹⁵

Fuadi merujuk pada data lain, yaitu bahwa rata-rata perempuan PKS hanya aktif di dua bidang organisasi PKS, yaitu di Bidang Kewanitaan atau Bidang Pengkaderan. Meski peran di kedua Bidang ini sangat penting untuk keberlanjutan eksistensi PKS, tetapi menurutnya kurang memberi kesempatan untuk mengasah ketrampilan di Bidang lain dalam rangka membangun ketokohan.

Ya, mereka kebanyakan di pengkaderan. Saya tidak mengatakan bahwa bidang pengkaderan tidak penting, tapi tentu dibutuhkan keahlian lain yang akan memberi akses kekuasaan yang lebih luas kepada perempuan. Hal-hal lain inilah yang perlu lebih diasah oleh perempuan, tentu dengan tidak melupakan bahwa PKS adalah partai dakwah sehingga penguasaan masalah keagamaan dan moralitas tetap menjadi persyaratan utama. Kalau kita bisa punya lebih banyak perempuan yang memenuhi kriteria ini tentu akan lebih banyak perempuan yang terbangun ketokohnya sehingga masyarakat akan bersedia memilih mereka, termasuk konstituen kita sendiri.⁹⁶

Berbeda dengan Fuadi yang berkeberatan terhadap aktivitas politik perempuan yang terlalu banyak, Mardani Ali Sera, Wakil Sekretaris Jendral DPP PKS menyatakan bahwa perempuan adalah partner setara laki-laki, memiliki dan memikul beban yang sama untuk melakukan semua kebaikan di muka bumi. Hal ini terlihat dari pernyataan Mardani Ali Sera berikut:

Kami berdasarkan dokumen Falsafah Dasar Perjuangan di hubungan gender, PKS menegaskan bahwa lelaki dengan perempuan setara dalam arti mereka memiliki kewajiban yang seimbang untuk saling tolong menolong mewujudkan kebaikan di muka bumi. Sehingga lelaki dengan perempuan memiliki peran yang memang sebagaimana kesetaraannya. Jadi mereka punya peluang sama seperti lelaki punya peluang. Tentu kalau ada pembatasan itu terkait dengan kodrat kewanitaannya.⁹⁷

Sama dengan Tifatul Sembiring dan Hidayat Nurwachid, Mardani Ali Sera juga mengadopsi pandangan formal PKS tentang kewajiban yang sama kepada laki-laki dan perempuan untuk melakukan kebaikan di muka bumi. Dia

⁹⁵ Hasil wawancara dengan Gufon Azis Fuadi di Bandarlampung 12 Juli 2009.

⁹⁶ *Ibid.*

⁹⁷ Hasil wawancara dengan Mardani Ali Sera di Jakarta 12 Januari 2010.

menyatakan bahwa perempuan setara dengan laki-laki dalam kewajiban tersebut. Meski demikian dia menyatakan bahwa perempuan tetap mempunyai keterbatasan terkait dengan kodrat kewanitaannya. Dia memaknai kodrat sebagai keberadaan perempuan yang tidak mungkin terlepas dari keberadaannya dengan anak-anak dan suami dan kondisi fisik yang harus hamil dan peran-peran yang terkait dengannya. Menurutnya inilah kodrat perempuan yang sering menyebabkan adanya pembatasan aktivitas perempuan. Dia menyatakan konsepsinya tentang kodrat perempuan tersebut dalam penjelasannya berikut

Kami di PKS punya kebijakan, kalau yang laki-laki kalau rapat bisa sampai jam 11 malam, jam 12 malam. Kalau yang perempuan kami memberi izin untuk pulang jam sembilan malam. Kami berpikir, bagaimanapun ada anak di rumah yang menunggu, atau ada suami. Yang kedua terkait ketika hamil. Ketika hamil teman-teman dibolehkan cuti 3 sampai 6 bulan. Itu kodratnya seperti itu.⁹⁸

Pernyataan Mardani Ali Sera menunjukkan bahwa dia memahami konsepsi kodrat perempuan sebagai sesuatu yang terkait dengan fisik perempuan, yaitu secara fisik perempuan mempunyai anak dan suami, dan secara fisik perempuanlah yang harus hamil. Meski demikian, dia tidak menjelaskan bahwa juga kodrat laki-laki untuk memiliki istri dan anak sehingga secara kodrat jika “ada anak-anak dan suami yang menunggu di rumah” waktu istri melakukan aktivitas di luar rumah, maka juga “ada istri dan anak-anak yang menunggu di rumah” sewaktu laki-laki melakukan aktivitas di luar rumah.

Tabel 4.4:
Pandangan Pejabat PKS tentang Hak Politik Perempuan

Nama	Pandangan	Kata Kunci
Tifatul Sembiring	1. Laki-laki dan wanita itu adalah <i>partnership</i> , mitra dalam perjuangan dakwah. untuk “ <i>Khalifah</i> ” (wakil Allah) dimuka bumi untuk membangun dan memelihara kehidupan ini. 2. Peran tidak selalu diartikan ”posisi”. Peran adalah ibadah yang tidak selalu sama dengan posisi jabatan. PKS lebih mendorong peran seluruh kader. Karena posisi dan jabatan itu sangat terbatas	Partner untuk membangun dan memelihara kehidupan Peran adalah ibadah, bukan jabatan
Hidayat Nurwachid	1. Secara prinsip kesetaraan perempuan dalam aktivitas partai PKS adalah penjabaran ideologi Islam....dakwah, pelayanan umat dan melibatkan kader laki-laki maupun perempuan, tidak melihat perbedaan atas dasar gender, menggunakan pendekatan laki-laki dan perempuan saling dukung, saling tolong.. PKS	Tidak ada perbedaan gender, saling tolong dan posisi setara dalam dakwah, dalam pelayanan umat

⁹⁸ *Ibid*

	<p>meletakkan dan memposisikan aktivis perempuan dalam posisi setara dengan aktivis laki-laki, untuk dakwah, untuk melayani.</p> <p>2. Menilai bahwa orang Indonesia masih melihat bahwa keterwakilan-keterwakilan itu mungkin mereka lebih nyaman bila diberikan kepada laki-laki.. yang perempuan juga demikian yang laki-laki juga demikian</p>	<p>Ada pandangan diskriminatif dari masyarakat terhadap aktivitas politik perempuan</p>
Gufron Azis Fuadi	<p>1. Secara pribadi kurang setuju dengan aktivitas politik yang terlalu banyak untuk perempuan.</p> <p>2. Dasar pandangan adalah adanya masalah kalau perempuan seorang diri harus bepergian dengan laki-laki yang bukan muhrim untuk keperluan aktivitas yang sering sampai jauh malam.</p> <p>3. Secara khusus aktivis perempuan di Lampung rata-rata dari latar belakang kependidikan dan keagamaan, kurang ketrampilan sosial politik.</p>	<p>Tidak setuju aktivitas politik terlalu banyak untuk perempuan.</p> <p>Aktivitas dapat menimbulkan masalah</p> <p>Latar belakang keilmuan perempuan PKS kurang mendukung</p>
Mardani Ali Sera	<p>1. PKS menegaskan bahwa lelaki dengan perempuan setara, mereka memiliki kewajiban seimbang untuk saling tolong untuk mewujudkan kebaikan di muka bumi, lelaki dengan perempuan memiliki peran dan peluang setara.</p> <p>2. Peran kodrati dipertimbangkan dalam memberikan pembebanan dan tanggung jawab politik</p>	<p>Posisi dan peran setara untuk mewujudkan kebaikan di muka bumi</p> <p>Peran kodrati dipertimbangkan</p>

Membandingkan pandangan keempat laki-laki pejabat PKS tersebut, terdapat unsur-unsur kesamaan dan perbedaan diantara mereka dalam memandang hak politik perempuan. Keempatnya mengakui PKS mengadopsi pandangan bahwa perempuan mempunyai posisi, hak, dan kewajiban setara dengan laki-laki untuk mewujudkan kebaikan di muka bumi. Meski demikian secara pribadi Gufron Azis Fuadi mempunyai perasaan kurang *sreg* dengan aktivitas politik perempuan yang terlalu banyak. Menurutnya politik akan maksimal jika dikerjakan laki-laki, sementara perempuan akan lebih maksimal jika berkonsentrasi pada tugas-tugas domestik. Selain itu keempatnya juga berbeda pandangan tentang bagaimana hak politik perempuan itu harus direalisasikan. Jika Tifatul Sembiring dan Hidayat Nurwachid melihat “peran” bukan sebagai “peran dalam posisi”, Mardani Ali Sera justru menginginkan agar ke depan perempuan PKS diberi posisi-posisi yang lebih strategis sehingga.

Sementara itu meski Gufron Azis Fuadi tidak mengemukakan pendapat tentang hal tersebut, tetapi dengan pandangannya yang kurang *sreg* dengan aktivitas politik yang terlalu banyak untuk perempuan, dapat diasumsikan bahwa dia juga menolak mengaitkan mengaitka peran dengan posisi jabatan di partai dan di luar partai akan menyebabkan perempuan semakin sibuk di luar rumah.

Kesimpulan yang dapat diambil dari pandangan laki-laki pejabat PKS terhadap hak politik perempuan PKS menunjukkan adanya unsur kehendak *backlash*, khususnya pendapat Gufron Azis Fuadi. Meski pandangan tersebut bukan mewakili pandangan perempuan PKS, tetapi terlihat bahwa dalam lingkungan internal PKS terdapat unsure yang menghendaki agar perempuan PKS “kembali ke ranah domestik” karena jika perempuan terlalu banyak melakukan aktivitas di luar rumah maka keluarga akan terlantar. Pandangan demikian merupakan pandangan khas gerakan “*backlash*”⁹⁹ yang menurut Myra Marx Ferree dan Beth B. Hess yang menjelaskan bahwa gerakan *backlash* berasal dari kelompok yang mempunyai “pandangan romantis’ tentang keluarga. Mereka menyatakan:

*Opposition to feminism also arises from a romantization of the family. When the family is perceived as the only legitimate source of sexual and emotional fulfillment, anything that threatens its stability is a personal loss and public danger. Since women are charged with the maintenance of family life, it is they who bear responsibility for its apparent breakdown.*¹⁰⁰

Pandangan Ferre dan Hess yang tidak melihat alasan untuk menganggap keluarga sebagai satu-satunya sumber absyah untuk kebahagiaan dan pencapaian tujuan individu memang merupakan kebalikan filosofi PKS yang menghendaki keluarga sebagai fondasi masyarakat yang baik.¹⁰¹ Tetapi ketika PKS sudah menerapkan prinsip inklusifitas dan moderasi peran politik dan peran dakwah untuk perempuan, semestinya tidak ada lagi pandangan dalam kalangan internal PKS, khususnya pejabat tinggi partai, yang ingin “merumahkan kembali” perempuan PKS. Karena itu meski data disertasi ini tidak cukup untuk menunjukkan seberapa besar “gerakan *backlash*” ada di internal PKS, tetapi jelas fenomena tersebut ada. Hal ini juga didukung oleh pernyataan S yang sudah dikutip dalam bagian lain disertasi ini yang menunjukkan adanya kelompok di PKS yang mendukung “fiqh tradisional” yang tidak mengizinkan perempuan

⁹⁹ Ferree dan Hess, *op. cit.* hal. 132-139, menjelaskan bahwa gerakan *backlash* bukan hanya merupakan refleksi anti kesetaraan bagi perempuan, tetapi merupakan gerakan yang ingin memelihara praktek dominasi (laki-laki terhadap perempuan) hingga wilayah jangkauan jauh melampaui batas dinding keluarga. Karena itu gerakan *backlash* menentang semua campur tangan atau program apapun dari pihak manapun yang mereka nilai merongrong fungsi keluarga, termasuk menolak program pemerintah menyediakan tempat penitipan anak bagi wanita bekerja karena menurut mereka tugas mengurus anak adalah tugas perempuan, bukan tugas negara dan kewajiban perempuan adalah di rumah mengurus anak dan keluarga, bukan bekerja di luar rumah.

¹⁰⁰ Myra Marx Ferree dan Beth B. Hess. *Op. cit.* hal. 133.

¹⁰¹ Pernyataan bahwa keluarga merupakan sumber atau fondasi masyarakat yang baik dinyatakan oleh sebagian besar narasumber, baik perempuan maupun laki-laki. Bahkan kebijakan PKS untuk tidak memberi izin suami istri secara bersama dipromosikan menjadi anggota DPR atau terlalu aktif di struktur partai berasal dari kebijakan mencegah kemudharatan bagi keluarga jika keduanya bersamaan secara aktif terlibat dalam berbagai aktivitas partai dan politik. Bidang Pengkaderan menyusun program ‘ailah atau ahiliah juga untuk memperkuat keluarga-keluarga kader PKS.

berbicara di depan publik. Pernyataan T juga mengkonfirmasi hal ini sewaktu dia menyatakan bahwa akan berat bagi perempuan PKS untuk beraktivitas di ranah publik ketika terdapat peran-peran yang secara khusus dilekatkan kepada perempuan. Ketua Bidang Kewanitaan juga melihat masih adanya kelompok-kelompok di internal PKS yang belum sepenuhnya mendukung hak dan aktivitas perempuan dalam kehidupan politik. Dengan demikian pandangan pejabat PKS tentang hak politik perempuan bervariasi, dari yang secara formal menyatakan perempuan setara laki-laki sampai yang mendukung pemberian posisi yang lebih strategis bagi perempuan PKS, sampai pandangan yang menghendaki agar perempuan lebih berkonsentrasi mengurus masalah domestik dan memaksimalkan peran laki-laki di ranah publik.

4.3.2 Sikap dan Tindakan Pejabat PKS terhadap Hak Politik Perempuan

Selain pandangan pejabat partai, sikap dan tindakan mereka terhadap hak politik perempuan sangat berpengaruh terhadap mampu tidaknya perempuan PKS menjadikan diri mereka subyek politik di PKS. Berikut adalah sikap dan tindakan pejabat PKS terhadap hak politik perempuan menurut penuturan para narasumber.

Tifatul Sembiring, Presiden PKS pada waktu penelitian ini diselenggarakan, tidak menyatakan bahwa dia tidak mempermasalahkan hak politik perempuan. Hal ini dinyatakannya bahwa bagi dia “tidak ada masalah, bahkan selain DPR, perempuan bisa saja dicalonkan sebagai Cagub, Cabup atau Cawako.”¹⁰². Tifatul lebih lanjut menyatakan bahwa dukungannya terhadap hak politik adalah karena “para perempuan lebih perhatian dan mendalami masalah-masalah yang berhubungan dengan persoalan perempuan, anak-anak dan keluarga.”¹⁰³

Selain tidak mempermasalahkan hak politik perempuan dan menyatakan bahwa perempuan PKS berhak atas posisi politik karena mereka secara khusus menguasai masalah perempuan, anak-anak dan keluarga, Tifatul Sembiring menyatakan bahwa PKS melakukan beberapa hal untuk merealisasikan hak politik perempuan. Beberapa tindakan yang dilakukan DPP PKS tersebut antara lain adalah mencalonkan perempuan dalam jumlah yang cukup untuk pemilu, bahkan sejak pemilu 2004. Dalam pencalonan anggota DPR, PKS juga sudah mengkomidir ketentuan KPU tentang sistim *zipper* atau sistim zigzag dalam penempatan nama calon perempuan dan laki-laki. menempatkan :

Pemilu 2004 PKS paling besar prosentase caleg perempuannya sekitar 39%. Saat pencalonan Aleg 2009 sudah dipenuhi. Pemilu 2009 PKS mengakomodir ketentuan KPU sistim *Zipper*, 1 dari 3 caleg adalah perempuan . 1/3 dari jumlah seluruh calon, bahkan beberapa perempuan berada di nomor urut 1 (ini disusun sebelum putusan MK mempunyai, ”Suara terbanyak”). Soal terpilih, adalah pilihan rakyat, itulah realitanya.¹⁰⁴

Menurut Tifatul Sembiring, sejak Pemilu 2004 PKS sudah mengusulkan perempuan dengan persentase tinggi; bahkan pada pemilu 2004 tersebut

¹⁰² Hasil wawancara dengan Tifatul Sembiring melalui media surat elektronik

¹⁰³ *Ibid.*

¹⁰⁴ *Ibid.*

persentase perempuan calon anggota DPR dari PKS lebih tinggi dibanding dari partai-partai lain. Tifatul Sembiring juga menyatakan bahwa PKS telah meletakkan beberapa kader perempuan PKS di posisi nomor satu.

Selain melakukan tindakan dalam rangka pemilu legislatif, PKS juga mengambil kebijakan dan melakukan tindakan untuk promosi dan penguatan perempuan dalam lingkup internal partai. Kebijakan dan tindakan tersebut adalah mempromosikan perempuan untuk menjadi anggota berbagai organisasi internal, khususnya dalam lembaga terpenting partai, yaitu Majelis Syura Pusat. PKS juga memberi kesempatan Ketua Bidang Kewanitaan untuk mengikuti semua rapat di tingkat DPP. PKS juga melakukan promosi vertikal dan horizontal untuk kader-kader perempuan PKS. Berbagai hal tersebut disampaikan dalam penjelasan Tiafud Sembiring berikut:

Di Majelis Syuro, diangkat lebih kurang 6 orang anggota perempuan sebagai perwakilan *hubaro* (pakar), meskipun dalam PEMIRA anggota MS, yang bersangkutan tidak terpilih.

Ketua Bidang Perempuan ikut rapat di level DPP. Melakukan mobilitas vertikal perempuan maupun mobilitas horizontal.¹⁰⁵

. PKS juga mengangkat perempuan PKS dari unsur *hubaro* untuk duduk di MSP meski mereka tidak terpilih dalam Pemira. PKS juga memberi kesempatan Bidang Kewanitaan untuk selalu ikut rapat di DPP untuk membuat berbagai keputusan DPP PKS. PKS juga melakukan mobilitas vertikal dalam bentuk promosi dan nominasi untuk berbagai jabatan politik dan juga mobilitas *horizontal* antar berbagai departemen di DPP atau antara berbagai lembaga dalam level yang sama.

Pernyataan Tifatul Sembiring menunjukkan bahwa PKS sudah mencoba mengakomodasi tuntutan keadilan politik bagi perempuan, khususnya keadilan politik untuk berbagai jabatan politik, baik di partai maupun di luar partai. Tetapi pernyataan Tifatul Sembiring tersebut menyembunyikan beberapa kenyataan sesungguhnya karena paling tidak ada dua fakta yang tidak sesuai dengan pernyataan tersebut. Pertama, PKS memang menempatkan perempuan pada posisi nomor satu dalam daftar calon anggota DPR, tetapi hanya di 2 (dua) daerah pemilihan dari 77 daerah pemilihan yang ada di seluruh Indonesia. Kedua, dalam memberi kesempatan mobilitas vertikal, PKS tidak memberi kesempatan perempuan menempati posisi terpenting di DPTP, di MSP, DSP, dan MPP serta DPP. Di DPTP tidak ada perempuan, di MSP perempuan hanya 10% anggota dan tidak memegang posisi penting. Di DSP dan MPP juga demikian. Sementara itu di DPP yang merupakan lembaga eksekutif partai, perempuan hanya berada di Bidang Kewanitaan dan tidak ada perempuan PKS yang menduduki posisi Ketua Bidang dan Ketua Departemen di luar Bidang Kewanitaan. Dengan demikian, sampai dengan periode penelitian disertasi ini berakhir, PKS tidak melakukan upaya *affirmative action* untuk meningkatkan keterwakilan perempuan pada posisi kepengurusan internal partai. Sementara itu untuk keanggotaan DPR PKS juga hanya menargetkan sekitar 10% perempuan untuk menjadi anggota DPR dari target sekitar 120 orang. Dengan demikian, meski PKS sudah memenuhi

¹⁰⁵ *Ibid.*

ketentuan kuota 30% calon, tetapi tidak memenuhi "kuota jadi" 30%. Karena itu, menggunakan konsepsi tentang politik partai tentang gender atau *gender party politics* dari Lovenduski dan Noris,¹⁰⁶ terlihat bahwa pernyataan Sembiring tersebut lebih bernuansa retorika ketimbang upaya yang sungguh-sungguh untuk menciptakan keadilan politik bagi perempuan di PKS. Belum ada program yang secara sungguh-sungguh mendorong perempuan dapat berbagi kekuasaan secara adil dengan laki-laki, baik di partai maupun di legislatif.

Selanjutnya mengenai tindakan yang dilakukan PKS menyangkut proses pencalonan anggota DPR. Tifatul menjelaskan bahwa "Bidang Kewanitaan memberikan masukan dan catatan terhadap tokoh-tokoh yang layak dipertimbangkan, lalu dibahas di DPP dan diputuskan di DPTP."¹⁰⁷ Pernyataan Tifatul Sembiring mengkonfirmasi penjelasan para perempuan narasumber yang sudah dijelaskan pada Bab IV bahwa mereka sama sekali tidak memiliki pengetahuan atas alasan mengapa diletakkan pada daerah pemilihan dan nomor urut dalam daftar calon tertentu. Mereka semua menjawab tidak mengetahui alasan tersebut. Mereka juga hampir semuanya mengatakan tidak melakukan apapun untuk mempengaruhi proses pencalonan tersebut. Dengan tidak adanya wakil perempuan di DPTP serta dengan hanya terkonsentrasinya perempuan PKS di Bidang Kewanitaan dan tidak adanya perempuan PKS di Bapilu PKS serta Bidang Politik dan Hukum, maka perempuan PKS memang tidak memiliki akses terhadap data tentang alasan-alasan penempatan nama-nam pada proses pencalonan anggota DPR.

Hasil interaksi antara usulan dan aspirasi kelompok perempuan PKS yang diwakili oleh Bidang Kewanitaan DPP PKS dengan DPTP menyangkut pencalonan anggota DPR perempuan PKS dalam pemilu 2009 menghasilkan komposisi pencalonan sebagai berikut:

Tabel 4.1
Jumlah Perempuan Calon Anggota DPR dari PKS Berdasar Nomor Urut dalam Daftar Calon Tetap

No.	Nomor dalam DCT	Jumlah	%
1	1	2	1
2	2	16	8
3	3	56	30
4	4	10	5
5	5	12	6
6	6	42	22
7	7	7	4
8	8	16	8
9	9	13	7
10	10	6	3
11	11	6	3
12	12	3	2
	Jumlah	189	99 ¹

Sumber: Sekretariat DPP PKS, 30 Juli 2008

¹⁰⁶ Joni Lovenduski dan Pipa Noris, *op. cit.*

¹⁰⁷ Hasil wawancara dengan Tifatul Sembiring melalui surat elektronik.

¹ : angka 99% diakibatkan pembulatan

Angka-angka pada Daftar Calon anggota DPR dari PKS menunjukkan bahwa mayoritas perempuan PKS dicalonkan dari nomor 3 (tiga) ke bawah. Hanya terdapat 18 perempuan PKS yang dicalonkan pada nomor urut 1 (satu) dan 2 (dua). Seperti dinyatakan Kingkin Anidha, perjuangan perempuan PKS untuk mempengaruhi pencalonan anggota DPR yang dilakukan melalui Bidang Kewanitaan DPP PKS hanya berhasil meletakkan 2 (dua) orang perempuan PKS pada posisi nomor satu dari seluruh 77 daerah pemilihan yang ada se Indonesia. Selain itu hanya terdapat 16 perempuan PKS yang diletakkan pada posisi nomor 2 (dua) dalam daftar urut calon. Dari 16 perempuan PKS yang diletakkan pada nomor 2, hanya 5 (lima) perempuan yang dicalonkan pada daerah pemilihan yang pada pemilu sebelumnya (2004) PKS memperoleh kursi DPR RI. Dengan demikian 11 orang dicalonkan pada daerah pemilihan yang sebelumnya PKS tidak memperoleh kursi DPR.¹⁰⁸

Penempatan secara demikian menunjukkan bahwa sebenarnya target 10 orang perempuan PKS terpilih dalam pemilu 2009 terlalu tinggi karena target realistis berdasar perolehan kursi PKS pada pemilu 2004 berarti hanya 7 kursi untuk perempuan, 2 (dua) dari perempuan calon pada nomor 1 (satu) dalam daftar calon tetap ditambah dengan 5 (lima) orang yang diletakkan pada posisi nomor 2 (dua) di daerah kantong suara PKS. Target realistis inipun dengan asumsi bahwa kelimanya dapat terpilih jika kelima daerah pemilihan tersebut masing-masing menghasilkan 2 (dua) kursi untuk DPR. Asumsi ini dibuat karena bagi partai kader seperti PKS, prioritas dalam daftar calon yang disusun oleh DPTP berarti adalah perintah partai untuk diikuti. Hal ini bisa dibuktikan bahwa mayoritas anggota DPR dari PKS yang terpilih pada pemilu 2004 dan juga 2009 berasal dari posisi nomor 1 (satu) dalam daftar calon. Kegagalan perempuan PKS meletakkan kadernya pada posisi nomor 1 (satu) dalam daftar calon berarti adalah ketidakmampuan perempuan PKS mempengaruhi proses pencalonan yang dilakukan oleh pengurus pusat PKS, khususnya DPTP.

Pertanyaan kemudian adalah mengapa tidak terjadi tawar-menawar dalam proses pencalonan anggota DPR oleh PKS tersebut? Jawabannya sebagian sudah dikemukakan para perempuan narasumber yang antara lain menyatakan bahwa "di PKS iklimnya sejuk sekali, tidak ada gejolak".¹⁰⁹ Seorang narasumber lain menyebutkan bahwa kader PKS selalu diberi sosialisasi bahwa "kekuasaan adalah beban, bukan kenikmatan".¹¹⁰ Dia juga menyatakan bahwa prinsip yang dipegang oleh kader dalam proses pencalonan adalah prinsip *sama'ah wa thoah* atau saya mendengar dan saya taat. Selain itu Diktum pertama dalam Bayan DSP Nomor 19/B/K/DSP-PKS/1429 tentang Aktivitas Dakwah dan Politik Muslimah menetapkan prinsip kepemimpinan laki-laki atas perempuan. Tidak mengherankan bahwa tidak terjadi proses tawar-menawar yang sengit dalam proses pencalonan perempuan PKS untuk menjadi anggota DPR RI periode 2009-2014.

Untuk pertanyaan penelitian yang sama, yaitu sikap dan tindakan partai terhadap hak politik perempuan PKS, Hidayat Nurwachid menyatakan bahwa

¹⁰⁸ Sekretariat DPP PKS. 2008. *Bakal Calon Anggota DPR RI 2009-2014 dari PKS*.

¹⁰⁹ Hasil wawancara dengan Komarul Kuniyati di Bandarlampung 6 Mei 2009

¹¹⁰ Hasil wawancara dengan Uchti di Jakarta 10 Maret 2009.

PKS sudah “mengadakan diklat-diklat, menyediakan fasilitas, juga menyediakan departemen khusus untuk perempuan..”¹¹¹ Penjelasan Hidayat Nurwachid menunjukkan bahwa PKS melakukan tindakan untuk memenuhi “kebutuhan praktis, dan “kebutuhan strategis”¹¹² perempuan PKS.

Narasumber berikutnya. Mardani Ali Sera menjelaskan bahwa PKS tidak pernah membatasi aktivitas politik perempuan, dan juga tidak membatasi akses perempuan terhadap berbagai jabatan politik di partai dan di luar partai jika kemampuannya ada. Menurutnya bahkan PKS perlu melakukan *affirmative action* untuk meningkatkan keterwakilan perempuan terhadap jabatan strategis dalam partai. Bidang yang secara khusus dinilainya sesuai dengan kemampuan yang selama ini ditunjukkan oleh perempuan kader-kader PKS adalah Bidang Kesejahteraan Rakyat atau Kesra, termasuk berbagai Departemen di dalam Bidang ini. Dia mengatakan:

Jadi kita tidak membatasi padahal kemampuannya ada. Bahkan didisain peran dan kontribusi peran kader perempuan PKS ke depan. Kalau sekarang ini kita masih seperti belum berani melangkah jauh ke depan, Ketua Bidang itu masih Kewanitaan. Ke depan kita bahkan sudah melihat beberapa Ketua Bidang yang selama ini dipegang oleh teman-teman lelaki sangat mungkin diberikan kepada kader perempuan. Bidang kesejahteraan rakyat, bidang kesra namanya. Bahkan selain itu termasuk di wakil sekjen kemungkinan akan ada satu *plot* wakil sekjen yang perempuan karena mungkin kita juga melihat misal wakil sekjen bidang administrasi yang sekarang ini saya pegang sangat mungkin dipegang teman-teman perempuan karena punya kualifikasi. Atau wakil sekjen bidang organisasi, wakil sekjen bidang kerumahtanggaan, wakil sekjen bidang arsip, asal antara keperluan dengan kompetensi itu masuk.¹¹³

Dasar pikiran yang dikemukakan oleh Mardani Ali Sera tentang perlunya PKS melakukan upaya *affirmative action* untuk lingkup internal adalah kenyataan bahwa perempuan PKS menunjukkan kinerja organisasi yang paling bagus dibanding Bidang-Bidang lain. Hal ini terlihat dari pernyataannya berikut:

Kalau *strengthnya* kita melihat kader-kader perempuan itu punya banyak sekali kelebihan. Terkait dengan kemampuan untuk mengeksekusi program, perempuan untuk menggerakkan roda organisasi, rapatnya termasuk yang paling rutin, bahkan interaksinya dengan *partner*, .mitra di luar partai juga berjalan dengan baik...kegiatan-kegiatan yang bersifat publik juga tidak terganggu. Dan tidak pernah istilahnya ada kata berhenti sesudah pemilu. Kalau beberapa Bidang, Badan lain mungkin konsolidasi,

¹¹¹ Hasil wawancara dengan Hidayat Nurwachid di Bandarlampung 20 Juni 2009..

¹¹² Dalam khasanah studi gender di Indonesia, khususnya studi-studi tentang program pengarusutamaan gender (PUG), kebutuhan perempuan didefinisikan menjadi dua, yaitu kebutuhan praktis dan kebutuhan strategis. Kebutuhan praktis adalah kebutuhan menyangkut hal-hal yang berkenaan dengan kebutuhan yang bersifat fisik, seperti pemenuhan kebutuhan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya, sementara kebutuhan strategis didefinisikan sebagai kebutuhan yang menyangkut atau berhubungan dengan kekuasaan. Lihat misalnya Instruksi Presiden nomor 9/2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan, termasuk berbagai buku yang disusun Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan untuk sosialisasi PUG.

¹¹³ Hasil wawancara dengan Mardani Ali Sera di Jakarta 12 Januari 2010.

yang perempuan tetap tancap gas gitu ya. Kami jadi melihat, pokoknya luar biasa.¹¹⁴

Di luar kelebihan kelompok perempuan PKS, khususnya kinerja Bidang Kewanitaan yang lebih rajin dibanding Bidang dan Badan lain, Mardani Ali Sera melihat bahwa masih sangat sedikit perempuan PKS yang berada pada posisi strategis dalam partai di luar Bidang Kewanitaan. Hal ini menurutnya menyebabkan perempuan kurang memiliki akses terhadap proses-proses penting dalam pengelolaan partai.¹¹⁵ Karena itu kemudian PKS perlu memberi kesempatan lebih banyak kepada perempuan untuk menduduki jabatan politik di kepengurusan Pusat PKS. Meski demikian, menurut Mardani promosi jabatan politik kepada perempuan harus mempertimbangkan kelemahan yang ada di PKS. Kelemahan tersebut menurutnya adalah:

Terkait dengan persepsi teman-teman yang menjadi suami dari kader perempuan kita yang sebagian, sebetulnya kalau secara pemikiran mereka sudah (mendukung hak politik perempuan), karena kami sudah mensosialisasikan falsafah dasar tentang kesetaraan gender dan lain-lain. Tapi ya kalau saya pribadi juga kadang-kadang datang ke rumah tidak ada istri "kemana ini umi ini". Perasaan tradisional itu masih ada.¹¹⁶

Karena perasaan tradisional masih ada di kalangan internal PKS, maka strategi promosi perempuan PKS pada jabatan-jabatan politik adalah dengan mempromosikan perempuan dengan mempertimbangkan beban perempuan dalam keluarga. Perempuan dengan jumlah anak yang banyak tidak dipromosikan untuk jabatan yang membutuhkan banyak waktu sedangkan yang sedikit anak dan suami dapat mendukung dapat dipromosikan pada jabatan yang strategis yang pada umumnya membutuhkan waktu banyak. Hal ini dinyatakan Mardani sebagai berikut:

Kami mempertimbangkan teman-teman perempuan. Jadi gini, kalau teman-teman perempuan yang mempunyai jumlah anak yang banyak jangan mengambil pos-pos yang perlu meluangkan waktu banyak. Tapi yang memang jumlah anaknya sedikit dan suaminya juga punya waktu yang agak luang untuk turut membantu itu sangat ideal sekali.¹¹⁷

Promosi dengan mempertimbangkan beban perempuan dalam keluarga ini sesuai dengan prinsip moderasi peran politik perempuan yang diinginkan PKS. Pernyataan Mardani tentang perlunya moderasi ini didukung oleh paling tidak dua narasumber lain dalam penelitian ini yaitu Sitaresmi dan Herlini Amran.¹¹⁸ Sitaresmi dan Herlini Amran dalam wawancara untuk penelitian disertasi ini menyatakan bahwa PKS mengadopsi prinsip moderasi untuk peran politik perempuan. Mereka menyatakan bahwa prinsip moderasi tersebut berarti adalah perempuan PKS perlu terjun ke dunia politik tetapi tetap dengan batas tertentu,

¹¹⁴ *Ibid.*

¹¹⁵ *Ibid.*

¹¹⁶ *Ibid.*

¹¹⁷ *Ibid.*

¹¹⁸ Hasil wawancara dengan Sitaresmi di Jakarta 25 Februari 2009 dan Herlini Amran di Jakarta 26 April 2009.

antara lain peran tersebut tidak boleh membawa *mudharat* atau akibat buruk bagi keluarga

Sementara itu meski merasa tidak *sreg* dengan perzn politik perempuan yang terlalu banyak, Gufron Azis Fuadi menyatakan bahwa PKS sudah melakukan banyak hal untuk mendukung aktivitas politik perempuan, khususnya dalam rangka proses pencalonan anggota DPR periode 2009 yang lalu. Dia menyatakan bahwa Majelis Syura menyusun arahan tentang pencalonan perempuan menjadi anggota DPR, DPTP kemudian menggodog arahan tersebut dan membuat keputusan tentangnya. PKS juga mengambil langkah untuk memperkuat penokohan perempuan agar mereka dikenal di masyarakat dan memungkinkan terpilih dalam pemilu. Hal-hal ini dikemukakan Gufron Azis Fuadi dalam pernyataannya berikut:

Kalau Majelis Syuro itu dia hanya memberikan garis-garis saja. Kewenangan itu ada di DPTP. DPTP itu presiden partai, sekjen, ketua dewan syariah, ketua MPP dan ketua Majelis Syuro. Itu nanti yang menggodok. Sementara Majelis Syuro hanya memberikan arahan-arahan tentang perlu adanya wakil perempuan di tingkat parlemen. Oleh karenanya dulu sebetulnya kita sudah mempunyai kebijakan untuk mengangkat, saya lupa jumlahnya, berapa wanita yang harus kita jadikan tokoh, kita tokohkan. Maka kemudian kita catat orang-orangnya, kemudian kita publikasikan, kita tampilkan, kita turnamenkan biar mereka dikenal masyarakat.¹¹⁹

Menurut Gufron Azis Fuadi, arahan dari Majelis Syura adalah bahwa minimal harus ada satu perempuan diantara tiga orang yang dicalonkan. Selain itu diusahakan agar penempatan tersebut kalau tidak bisa nomor satu adalah pada nomor dua.

Jadi arahannya seperti itu. Harus ada minimal sekitar 30% diharapkan ada yang menjadi nomor satu. Waktu itu masih nomer jadi, atau minimal nomer dua. Karena itu hampir semua DPW ada yang menempatkan satu atau minimal dua yang nomer dua, kemudian untuk yang nomer dua itu hampir separuhnya wanita, itu. Kita sudah mencoba memberi dukungan agar lebih banyak perempuan yang dapat terpilih dalam pemilu. Tadinya kita berharap dengan daftar yang kita susun akan banyak perempuan yang bisa jadi anggota dewan.¹²⁰

Penempatan pada nomor tersebut menurut Gufron Azis Fuadi adalah penting karena pada waktu itu keputusan pemenang masih ditentukan berdasar pada nomor urut partai. Tetapi setelah ada keputusan Mahkamah Konstitusi tentang keputusan pemenang atas dasar suara terbanyak maka penempatan dalam nomor urut menjadi tidak relevan lagi. Hal ini disebabkan karena kalau penetapan pemenang ditentukan atas dasar suara terbanyak, maka akan lebih banyak laki-laki yang terpilih karena konstituen PKS memang lebih menghendaki laki-laki sebagai politisi dibanding perempuan. Gufron Azis Fuadi menjelaskan hal tersebut dalam pernyataan berikut:

¹¹⁹ Hasil wawancara dengan Gufron Azis Fuadi di Bandarlampung 14 Juli 2009

¹²⁰ *Ibid.*

Kita harus akui bahwa memang sikap konstituen kita sendiri, para kader PKS kelihatannya memang lebih menghendaki laki-laki sebagai politisi. Hal ini juga terlihat dalam proses pemilihan berbagai jabatan dalam partai. Pada saat diselenggarakan pemira untuk berbagai jabatan, kembali lagi laki-laki yang terpilih. Karena itu berbagai jabatan dalam partaipun akhirnya jatuh ke tangan laki-laki. Kader kita itu sangat patuh pada ustad, pada para pemimpin agama, dan kebanyakan ustad ini adalah laki-laki. Karena itu jika harus memilih, maka mereka akan tetap memilih laki-laki, bahkan kader yang perempuanpun demikian.¹²¹

Lebih lanjut Gufron Azis Fuadi menyatakan bahwa jika memang dari awal penetapan pemenang pemilu legislatif ditentukan atas dasar perolehan suara terbanyak, maka PKS dapat mengambil kebijakan lain terhadap proses pencalonan agar lebih banyak perempuan PKS dapat terpilih dalam pemilu. Kebijakan tersebut adalah dengan mencalonkan sedikit nama saja dalam tiap daerah pemilihan. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi persaingan antar kader sendiri yang dapat berakibat buruk terhadap keutuhan dan kekompakan partai. Berikut adalah pernyataan Gufron Azis Fuadi tentang hal tersebut:

Kalau dari awal kita sudah tau akan menggunakan suara terbanyak pasti kita menyusun strategi lain untuk pencalonan sehingga lebih banyak perempuan yang bisa jadi anggota dewan. Mungkin kita mencalonkan sedikit saja dalam tiap DP sehingga tidak terjadi persaingan antar calon. Persaingan antar calon ini juga tidak bagus efeknya untuk partai.¹²²

Tidak berbeda dengan pendapat para laki-laki narasumber tentang sikap dan tindakan partai terhadap hak politik perempuan, Yoyoh Yusroh juga menyatakan bahwa PKS mendukung hak politik perempuan dengan memberikan sarana berupa Bidang khusus dalam struktur organisasi PKS, yaitu Bidang Kewanitaan. Karena itu perempuan dijamin mempunyai sarana organisasional dalam etiap jenjang kepengurusan PKS. Hal ini terlihat dalam pernyataan Yoyoh Yusroh berikut:

Memberikan sarana berupa salah satu ketua PKS itu adalah perempuan.. Struktur ke bawah juga mengikuti itu. Misal DPW ada deputi, kalau DPD sampai Depera itu ada seksi kewanitaan. Ini kan sarana untuk mereka. Jadi di situlah perempuan bisa. Mengapresiasikan, berekspresi.¹²³

Selain itu menurut Yoyoh Yusroh pimpinan partai memberi apresiasi yang baik terhadap perempuan PKS. Perempuan boleh meminta hak berbicara lebih dulu. Pendapat mereka selalu didengar dengan baik dan mereka juga tidak pernah dijadikan bahan olok-olok, meski pendapat mereka belum tentu bagus. Hal-hal ini diceriterakan dalam pernyataan berikut:

Pimpinan partai memberi kesempatan bicara duluan. “Ada yang mau dibicarakan, kalau sudah tidak lagi silakan, mau tinggal boleh, mau pulang boleh, mau duduk tetap di sini boleh”. Na itu kebijakan yang luar

¹²¹ *Ibid.*

¹²² *Ibid.*

¹²³ Hasil wawancara dengan Yoyoh Yusroh di Tangerang 4 April 2009.

biasa, dan itu merupakan apresiasi yang membuat kita nyaman. Karena kami misalnya memberikan pendapat sering dipersilakan lebih dulu, terus nggak pernah diguyonin yang aneh-aneh. Kita berbicara didengar oleh semua. Apapun pembicaraan kita biasanya ada apresiasi dari pimpinan-pimpinan partai. Itu yang membuat kami merasa nyaman di PKS.¹²⁴

Informasi yang diberikan Yoyoh Yusroh menunjukkan bahwa dia bersikap positif terhadap pemberian struktur khusus untuk perempuan di PKS. Menggunakan pendapat Lovenduski dan Norris,¹²⁵ politik partai terhadap perempuan memang dapat dilihat dari dua hal, pertama adalah dari struktur yang dibuat yang memungkinkan perempuan mendapatkan akses terhadap keputusan-keputusan penting dalam partai program-program yang dirancang agar perempuan dapat melaksanakan fungsi politik secara efektif. Meski demikian perlu diperhatikan bahwa Lovenduski dan Norris membuat catatan tentang perlunya kita bersikap kritis apakah struktur yang dirancang untuk perempuan tidak justru merugikan perempuan.

Aan Rochana, narasumber berikut memberikan penjelasan bahwa terdapat tiga kebijakan PKS yang berkait dengan hak politik perempuan. Ketiganya adalah:

Pertama peluang internalisasi lewat kaderisasi. Terus yang keduanya lewat program-program yang dibuat bidang kewanitaan karena bidang kewanitaan di luar, beda strukturnya dengan kaderisasi. Terus yang ketiganya lewat kegiatan-kegiatan eksternal yang didorong mereka misalnya lewat pelatihan, seminar, kursus, dia juga aktif di tempat yang lain. Itu bisa lebih cepat mematangkan...¹²⁶

Partai mendorong percepatan peningkatan kualitas dan ketrampilan berpolitik perempuan kader PKS melalui tiga hal, yaitu lewat program dari Bidang Kaderisasi, lewat kegiatan Bidang Kewanitaan dan lewat pelatihan, seminar, dan kursus yang diselenggarakan pihak di luar PKS. Salah satu contoh yang dapat disebut dari kegiatan yang diselenggarakan pihak luar adalah kegiatan dari Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI)¹²⁷ yang baik pada level nasional maupun daerah dan lokal menyelenggarakan berbagai kegiatan untuk mendorong.

Herlini Amran menginformasikan beberapa hal yang dilakukan oleh PKS untuk mendukung aktivitas perempuan dalam berpolitik. Tindakan pertama yang dilakukan PKS adalah dengan memberikan kesempatan kepada perempuan untuk terlibat di Dewan Syariah Pusat. Keberadaan perempuan di PKS dimaksudkan untuk memfasilitasi kepentingan perempuan dalam semua fatwa dan bayan DSP. Karena itu dengan sengaja terdapat dua perempuan yang dimasukkan dalam DSP agar dapat melaksanakan fungsi menjembatani kepentingan perempuan PKS tersebut.

¹²⁴ *Ibid.*

¹²⁵ Joni Lovenduski dan Pippa Norris, *op. cit.*

¹²⁶ Hasil wawancara dengan Aan Rochana di Jakarta 26 April 2009

¹²⁷ Ledia Hanifa, Ketua Bidang Kewanitaan, beberapa kali menyebut tentang aktivitas bersama yang dilakukannya dengan KPPI untuk mendorong percepatan pencalaian kuota 30%. Di level daerah dan local, KPPI beberapa kali menyelenggarakan pelatihan-pelatihan kepemimpinan politik untuk perempuan bagi kader-kader partai-partai.

DSP sendiripun begitu. Awalnya dulu DSP itu nggak ada perempuan, semuanya laki-laki Akhirnya kita 2 (dua dari 20 anggota DSP. Ketika kebutuhan tentang bagaimana permasalahan perempuan memang sangat besar, justru yang bisa memberikan penjelasan itu perempuan. Artinya kita bisa menjadi media komunikasi antara permasalahan perempuan dengan DSP. Jadi keberadaan kita di sana itu adalah memfasilitasi.¹²⁸

Tindakan pertama yang dilakukan adalah dengan membuat Bayan DSP atau rambu-rambu, petunjuk mengenai bagaimana perempuan PKS melakukan aktivitas politik. Informasi ini disampaikan Herlini Amran dalam pernyataan berikut:

DSP, Dewan Syariah Pusat itu salah satunya fungsinya adalah mengawal partai, kalau ada penyimpangan, dialah yang mengawal, dialah yang menjaga. Kaitannya peran wanita dalam politik, kita juga membuat bayan, penjelasan, fatwa. Fatwa itu berarti sudah baku, kalau bayan penjelasan. Kita pernah buat bayan tentang aktivitas wanita berpolitik.¹²⁹

Sebagai anggota Dewan Syariah Pusat, Herlini Amran tidak hanya memfasilitasi kepentingan perempuan PKS dengan fatwa dan bayan yang bersifat “umum” seperti Bayan DSP tentang Aktivitas Perempuan dalam Dakwah dan Politik, tetapi juga mengusulkan ketentuan khusus agar aktivitas perempuan dalam kehidupan politik, khususnya untuk menduduki jabatan politik di luar partai, mendapat dukungan suami. Dukungan suami tersebut tidak diusahakan secara individu kader perempuan PKS, tetapi dengan cara partailah yang berkomunikasi dengan suami. Dengan meletakkan partai sebagai mediator bagi dukungan aktivitas perempuan dalam kehidupan politik, maka istri atau perempuan akan mendapatkan komitmen penuh dari suami. Herlini Amran menginformasikan upayanya tersebut dalam pernyataan berikut:

Bayan tentang wanita berpolitik rambu-rambu wanita dalam berpolitik. Saya memberikan masukan untuk minta dukungan suami, tapi di bawah kontrol partai. Artinya harus ada komitmen. Jadi itu masukan kita. Ketika misalnya, istrinya memiliki kualitas SDM yang lebih kuat yang memang dibutuhkan oleh partai, kita perlu promosikan, perlu ada komunikasi antara partai dengan suami, dan permintaan khusus, kita buat surat pernyataan mendukung, suami setuju atau tidak.¹³⁰

Selain mengupayakan agar partai menjadi mediator dukungan suami untuk aktivitas perempuan dalam kehidupan politik, Herlini Amran juga menyatakan bahwa dia meminta dukungan dana bagi pencalonannya menjadi anggota DPR jika PKS berniat sungguh-sungguh memintanya menjadi anggota DPR. Dukungan dana dari partai tersebut dibutuhkannya karena dia tidak memiliki dana, khususnya untuk kampanye. Hal ini menurutnya barangkali hanya ada di PKS dimana kader yang tidak memiliki dana tetap dapat menjadi anggota DPR

¹²⁸ Hasil wawancara dengan Herlini Amran di Jakarta 26 April 2009

¹²⁹ *Ibid.*

¹³⁰ *Ibid*

dengan dukungan partai. Informasi tersebut disampaikan Herlini Amran dalam pernyataan berikut:

Ya bu, dibantu. Saya sudah katakan ketika partai mencalegkan saya, ”saya nggak punya apa-apa. Jadi kalau saya ini (dicalonkan menjadi anggota DPR) ya silakan lanjut, kalau nggak ya bagaimana lagi” Partai tidak minta sesuatu, mereka bantu saya.

Dari daerah juga sama. Praktis sebenarnya kalau dari pribadi saya tidak terlalu ini (banyak mengeluarkan uang), hanya waktu dan tenaga serta pikiran. Jadi inilah uniknya, kadang-kadang tidak dimiliki partai lain.¹³¹

Pernyataan Herlini Amran bahwa apa yang dialaminya dalam pencalonan¹³² bersifat unik, khas PKS kelihatannya ada benarnya. Berbagai informasi yang beredar di kalangan masyarakat awam berkaitan dengan pencalonan anggota DPR periode 2009-2014 menyatakan bahwa hampir tidak mungkin orang yang tidak memiliki dana besar untuk dapat terpilih dalam pemilu anggota DPR periode 2009-2014 yang lalu. Karena itu pernyataan Herlini Amran bahwa dia dapat dikatakan hanya menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk pencalonannya menjadi anggota DPR dapat dinilai sebagai ”kasus unik” yang hanya ada di PKS.

Informasi dari Herlini Amran menunjukkan bahwa sebagai kader perempuan PKS yang tidak memiliki dana pemilu, dia mendapatkan manfaat dari ”program PKS” sehingga pada akhirnya dia terpilih menjadi anggota DPR. Pernyataan Ledia Hanifa bahwa pernah ada kasus seorang perempuan PKS terpilih menjadi anggota DPR setelah dihitung-hitung hanya mengeluarkan dana sebesar sekitar 50 juta rupiah¹³³ mengkonfirmasi pernyataan Herlini Amran bahwa di PKS, orang yang tidak memiliki danapun tetap dapat menjadi anggota DPR. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa PKS memang membuat kebijakan dan program¹³⁴ yang membantunya terpilih menjadi anggota DPR meski dia tidak memiliki dana untuk itu.

Berbeda dengan narasumber yang berasal dari kader PKS yang rata-rata menginformasikan hal-hal positif tentang sikap dan tindakan PKS, Komarul Kuniyati, satu-satunya narasumber yang bukan kader PKS, menyatakan bahwa terdapat tindakan-tindakan PKS yang menurutnya diskriminatif, tetapi juga terdapat tindakan yang tidak diskriminatif. Dia mengatakan:

Selama ini saya melihat partai kan berfikir sempit, dalam arti kepentingan kader. Mungkin karena dia merasa..bahwa untuk menjadi kader itu dicetak prosesnya sekian puluh tahun. Jadi kelihatannya kurang menghargai yang di luar partai. Ke depan merugikan partai, yakin saya itu. Berarti partai memang masih sangat mendukung, mengupayakan, mengkondisikan kader. Kalau bukan kader kelihatannya tergantung si *person* itu sejauh mana pekerjaannya di lapangan.¹³⁵

¹³¹ *Ibid.*

¹³² Bahwa dia mendapat dukungan financial dari PKS untuk pencalonannya menjadi anggota DPR.

¹³³ Hasil wawancara dengan Ledia Hanifa di Jakarta 27 Januari 2009..

¹³⁴ Hal ini sesuai dengan pernyataan Lovenduski dan Nirris bahwa untuk melihat apakah partai sungguh-sungguh mendorong representasi politik bagi perempuan adalah dengan melihat pada fasilitasi struktur khusus dan program khusus.

¹³⁵ Hasil wawancara dengan Komarul Kuniyati di Bandarlampung 6 Mei 2009.

Selain itu menurut KK PKS juga tidak sungguh-sungguh mendukung perempuan dapat terpilih dalam pemilu karena pada kenyataannya tidak meletakkan perempuan pada posisi strategis dalam daftar calon. Hal ini dinyatakan Komarul Kuniyati sebagai berikut:

Mana sih yang perempuan yang nomer satu, kan hanya mbak Nenden? Rata-rata yang nomer dua seperti pak Ari sesudahnya baru mbak Evi. Saya dengar memang sistim dan kebijakan di dalam PKS itu kalau yang kader itu nomer jadi. Karena waktu itu kan belum keluar MK itu. Jadi urut *siji loro*,¹³⁶ bisaanya *siji loro* sampai tiga. Ada yang hanya satu dua itu pasti kader. Kalau yang tokoh-tokoh, mulai tiga, empat, sesuai dengan dimana besar pengaruhnya.¹³⁷

Meski mencatat adanya sikap diskriminatif terhadap perempuan, Komarul Kuniyati mengemukakan tindakan PKS yang dinilainya menjadi dukungan bagi hak politik perempuan, khususnya dalam pencalonan anggota DPR. Tindakan pertama adalah merekrut perempuan untuk dicalonkan menjadi anggota DPR. PKS menggunakan mekanisme perekrutan oleh partai secara aktif dan bukan kader yang mendaftar. Komarul Kuniyati mengatakan “Barangkali e memang spesifik partai PKS itu kan tidak mencalonkan diri, tapi direkrut. Itu bedanya dengan partai yang lain.”¹³⁸

Selain secara aktif melakukan rekrutmen terhadap perempuan untuk dicalonkan dalam pemilu, seperti kasus terhadap dirinya, Komarul Kuniyati juga mencatat adanya bantuan partai untuk saksi di setiap daerah pemilihan. Dia menyatakan “kayaknya, untuk DP, seperti uang saksi, setiap DP-DP itu enampuluh juta, kalau nggak salah.”¹³⁹ Meski demikian Komarul Kuniyati menilai bahwa pemberian bantuan untuk saksi tersebut kelihatannya lebih difokuskan untuk memonitor hasil pemilu untuk para kader partai.

Kebijakan dan tindakan PKS untuk memprioritaskan kader partai, khususnya dari segmen pejabat penting partai untuk menang dalam pemilu bukan merupakan suatu hal yang aneh atau tidak wajar. Komarul Kuniyati sendiri sebagai calon yang direkrut dari segmen non kader dapat menerima kebijakan tersebut, seperti juga Sitaresmi yang dalam wawancara untuk disertasi ini juga mengatakan hal yang sama. Menurutnya:

Bahkan saya sendiri bisa menerima seandainyaapun struktur itu mengarahkan sebaiknya nomor satu dibantu. Menurut saya itu wajar karena mereka dari segi kerja, kinerja di partai, atau jasa mereka di partai, posisi nomor satu dua itu kan cerminan. Artinya apa yang sudah dilakukan untuk partai.¹⁴⁰

Meski menerima sikap partai yang memprioritaskan kader dan khususnya pejabat partai untuk menang dalam pemilu, Komarul Kuniyati tidak dapat menerima sikap pihak-pihak yang membiarkan suaranya hilang pada proses

¹³⁶ *Siji loro* adalah bahasa Jawa yang berarti nomor satu dan dua.

¹³⁷ Hasil wawancara dengan Komarul Kuniyati di Bandarlampung 6 Mei 2009.

¹³⁸ *Ibid.*.

¹³⁹ *Ibid.*

¹⁴⁰ Hasil wawancara dengan Sitaresmi di Jakarta 25 Februari 2009

penghitungan. Menurutnya semestinya para saksi yang difasilitasi partai ini harus mengawal suara semua calon dari PKS, baik kader maupun tidak. Komarul Kuniyati lebih lanjut menyatakan bahwa jika PKS ingin melebarkan segmen pendukung, maka kebijakan merekrut calon dari segmen non kader harus diteruskan dan PKS harus mengambil kebijakan yang sungguh-sungguh agar calon non kader juga dapat menjadi anggota DPR. Komarul Kuniyati menyatakan:

Jadi jangan mutlak harus kader yang di dewan. Tapi kalau misalnya kader khawatir kalau nanti visi misinya dalam menetapkan kebijakan, saya rasa kan orang-orang yang duduk di partai kan menandatangani semacam *agreement* gitu, mengurangi gaji, mengenai segala macam hal itu nggak bisa keluar dari itu. Saya rasa walaupun orang luar, bukan kader, kalau sudah masuk ke situ, yakin, mereka juga akan patuh pada ketentuan itu.¹⁴¹

Uchti, narasumber berikut, menyatakan bahwa PKS memiliki sistim nominasi, seleksi, dan promosi karir politik yang jelas sehingga memungkinkan tiap kader dinilai secara obyektif. Berdasar catatan-catatan yang ada, Uchti menilai bahwa memang peningkatan promosi untuk perempuan kader PKS sudah perlu didesak. Hal ini dinyatakan Uchti sebagai berikut:

Kalau kita hendak mengatakan apakah ada dorongan dan mekanisme yang berlaku universal, telah ada mekanisme itu, namanya mekanisme pedoman seleksi, nominasi dan promosi. Jadi seluruh perjalanan *terrecord*, ketahuan berbagai kiprahnya, dan pada setiap *level* ada *assessment*. Dengan demikian sebetulnya akan selalu bisa diketahui data tentang berapa perolehan, berapa peningkatan kadar perempuan, dan itu menjadi dasar bahwa harus didesak peningkatannya.¹⁴²

Menurut Uchti, perjalanan karir setiap kader PKS tercatat dengan baik. Kenaikan setiap jenjang didasarkan atas peningkatan kinerja atau kiprah yang jelas yang terdokumentasi dengan baik. Karena itu penilaian kelayakan kenaikan jenjang karir politik atas dasar nilai kinerja yang jelas dan obyektif. Selain menyusun pedoman nominasi, seleksi dan promosi karir politik kader, menurut Uchti PKS juga mengatur agar keluarga kader tetap stabil dengan mengatur pencalonan secara bergantian antara suami istri ketika keduanya adalah kader yang potensial. Uchti mengambil contoh dirinya yang juga harus bergantian dicalonkan dengan suaminya oleh PKS. T menyatakan:

Akhirnya suami saya stop, suami saya kan anggota dewan sekarang. Anggota dewan provinsi. (Suami) Tidak dicalonkan. Karena memang bergantian, nggak boleh berdua, pada kasus umum nggak boleh berdua, kecuali ada kasus tertentu. Ya untuk ini saja, untuk menjaga agar stabil keluarganya.

Jika Uchti menilai positif tindakan-tindakan PKS berkaitan dengan pencalonan anggota DPR, Kingkin Anidha mempunyai pengalaman yang tidak enak. Dia merasa "dilempar" oleh PKS ke daerah pemilihan yang jauh dan bukan daerah kantong suara PKS. Kingkin Anidha menyatakan:

¹⁴¹ Hasil wawancara dengan Komarul Kuniyati di Bandarlampung 6 Mei 2009.

¹⁴² Hasil wawancara dengan Uchti di Jakarta 10 Maret 2009..

Pertama-tama saya merasa, "dilempar". Tapi kemudian saya mencoba memahami hikmah ini semua, o mungkin maksud Allah dengan me..mentakdirkan ini terjadi pada saya, saya diminta untuk lebih berbakti kepada kedua orang tua, itu saja.

Tapi alhamdulillah yang punya hak veto itu semua menghargai perempuan untuk aktif.¹⁴³

Meski awalnya kecewa karena merasa dilempar ke daerah pemilihan yang tidak disukainya, Kingkin Anidha mengambil hikmah atas peristiwa tersebut dengan menyikapinya sebagai kesempatan untuk berbakti kepada orang tuanya yang memang berasal dari daerah tersebut. Sementara itu Sitaresmi merasa bahwa ada perbedaan penerimaan dan sikap serta tindakan para pejabat PKS terhadap hak politik perempuan. Dia menyatakan bahwa para pejabat tingkat tinggi akomodatif terhadap hak politik perempuan, tetapi yang di level menengah dan bawah tidak semuanya demikian. Dia menyatakan masih ada resistensi terhadap hak politik perempuan tersebut. Sitaresmi mengemukakan pendapatnya dalam pernyataan berikut:

Tadi saya katakan kalau pimpinan-pimpinanya sangat, tapi kan di *middle*, di menengah, di ini, di bawah, di lapangan, tidak semuanya mbak,..... Contohnya untuk kita bisa berbicara sebagai pembicara di depan kalangan laki-laki di dalam partai itu saja masih agak sulit dibanding ketika kita mungkin ke luar. Jadi masih berproses menurut saya mbak. Dan kita harus malah mematahkan mitos itu, yang di dalam masih ada walalupun secara konsep itu tidak ada, baik dalam Islamnya maupun dalam AD ARTnya atau pemimpin-pemimpinnya.

Termasuk dewan syariah, ketuanya, Dr Surahman bagus tapi ada anggota-anggotanya yang tidak semua pahamnya itu sangat ini kepada perempuan, tapi mereka sudah dipaksa, sudah dipaksa oleh situasi untuk *up to date*. Mereka udah dipaksa untuk modernlah.¹⁴⁴

Sitaresmi menyatakan bahwa dalam konsep Islam yang diyakini PKS, dalam AD ART PKS tidak terdapat ketentuan yang diskriminatif atau resisten terhadap hak politik perempuan. Meski demikian dalam sub-sub organisasi masih saja ada orang-orang yang belum mendukung hak politik perempuan. Meski demikian pihak-pihak yang tidak mendukung hak politik perempuan ini sudah dipaksa keadaan untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan yang ada yang menghendaki keterlibatan perempuan dalam kehidupan politik.

Selain kenyataan bahwa para pejabat tinggi partai sudah akomodatif terhadap hak politik perempuan, Sitaresmi juga menginformasikan bahwa PKS membantu pencalonan anggota DPR dengan dana untuk kampanye. Meski demikian bantuan ini sangat kecil dibanding dana yang harus dikeluarkan masing-masing calon. Selain bantuan dana, Sitaresmi menyatakan bahwa penempatannya di nomor 3 (tiga) pada daerah basis sudah merupakan bantuan yang luar biasa untuknya. Dia merasa bersyukur karena itu. Sitaresmi menceritakan informasi tersebut dalam pernyataannya berikut:

¹⁴³ Hasil wawancara dengan Kingkin Anidha di Bandar Lampung 23 Maret 2009.

¹⁴⁴ Hasil wawancara dengan Sitaresmi di Jakarta 26 Februari 2009..

Kalau dibilang dibantu, dengan ditempatkan di dapil basis, menurut saya itu sudah bantuan. Nomer tiga nggak terlalu jelek, karena kita punya target mungkin 60% kan kota Depok dan kota Bekasi. Kemudian yang berikutnya bantuan dana minim mbak, cuma pertama 8 juta, yang kedua 7,5 juta. 15,5 juta. Ledia Hanifa itu ngemis-ngemis ke TPPN. Dapatnya cuma segitu, 15,5 juta, sementara suami saya sudah menghabiskan 200 juta.¹⁴⁵

Meski menyatakan bahwa PKS membantu pencalonannya dengan menempatkannya pada daerah basis dan memberinya bantuan dana kampanye, tetapi Sitaresmi menyatakan bahwa bantuan partai difokuskan untuk nomor-nomor atas yang tentu saja bukan perempuan. Hal ini dikemukakan Sitaresmi dalam pernyataannya berikut:

Na kalau bantuan partai memang masih lebih pada nomor-nomor atas, ada bantuan partai mbak. Terutama pada nomor-nomor satu.....atas.....na kebanyakan nomor-nomor atas bukan perempuan.¹⁴⁶

Jika dikaji dengan lebih seksama, pernyataan Sitaresmi bisa benar dilihat dari kebijakan partai meletakkan lebih banyak laki-laki pada nomor-nomor atas dalam daftar calon. Tetapi jika dilihat dari bantuan dana kampanye, pernyataan Sitaresmi tidak benar karena berdasarkan penjelasan Yoyoh Yusroh, calon anggota DPR dari PKS periode 2009-2014 yang pada saat kampanye sudah menjadi anggota DPR tidak mendapatkan bantuan kampanye. Hal ini berarti karena laki-laki calon anggota DPR dari PKS yang diletakkan pada nomor atas pada saat itu banyak yang sudah menjabat anggota DPR, maka banyak diantara mereka tidak mendapat bantuan dana kampanye.

Ledia Hanifa, Ketua Bidang Kewanitaan menyatakan bahwa PKS membuat kebijakan pendanaan yang menguntungkan Bidang Kewanitaan. Dia menyatakan bahwa dari semua Bidang yang ada, maka Bidang Kewanitaan mendapat prioritas pendanaan. Karena itu sebagai Ketua Bidang dia merasa sangat ditolong oleh partai untuk melaksanakan berbagai kegiatan pembinaan ke daerah-daerah. Selain itu karena kebijakan DPP adalah memprioritaskan pendanaan untuk Bidang Kewanitaan, maka pengurus PKS di daerah-daerah sampai dengan Kabupaten/Kota juga menerapkan pola kebijakan pendanaan yang sama, yaitu memprioritaskan Bidang Kewanitaan. Informasi ini disampaikan Ledia Hanifa dalam penjelasannya berikut:

Dari semua pendanaan yang termasuk prioritas selain dari kaderisasi itu adalah kewanitaan. Prioritas pendanaan partai itu ke situ. Gitu. Jadi, e itu sangat menolong. Karena di pusat itu prioritas pendanaan itu kewanitaan, itu termasuk yang diprioritaskan, ke provinsi kan juga jadi terbawa. Ke kota/kab juga demikian.

Yang kedua yang juga didukung oleh partai adalah e artinya implikasi positif dari dukungan pendanaan itu, kita bisa jadi lebih banyak

¹⁴⁵ *Ibid.*

¹⁴⁶ *Ibid.*

melakukan kunjungan ke daerah-daerah, dan itu sangat menolong. Jadi pendanaan saya ditanggung oleh pusat, pendanaan kegiatan mereka oleh provinsi, ditanggungnya oleh provinsi, perjalanan itu oleh kota/kabupaten, gitu. Jadi itu kita punya.¹⁴⁷

Menurut Ledia Hanifa secara umum partai sudah memperhatikan persoalan-persoalan khusus yang dihadapi oleh perempuan untuk dapat beraktivitas di partai. Meski demikian, pemahaman itu belum terjadi secara otomatis, masih perlu diperjuangkan oleh Bidang Kewanitaan. Tetapi ketika Bidang Kewanitaan memperjuangkannya, pada umumnya permintaan-permintaan khusus tersebut dikabulkan. Kebutuhan-kebutuhan khusus yang dipenuhi oleh partai setelah Bidang Kewanitaan memperjuangkannya antara lain adalah:

Belum menjadi sesuatu yang spontan. Tapi secara umum mereka memang memperhatikan persoalan-persoalan itu. Misalnya kalau rapat kita juga tidak diposisikan duduk di belakang, misalnya. Kemudian kalau pendapat gilirannya juga sama kalau kita mengemukakan pendapat. Kita minta misalnya minta ada ruang menyusui khusus, dikasih, fasilitas misalnya termasuk di dalam kebutuhan bidang kewanitaan itu menyediakan barang-barang *nursery* disediakan. Kalau kita membuat kegiatan yang mengumpulkan banyak ibu-ibu dan kami tau karena masih banyak yang membawa bayi, kita ada anggaran khusus untuk pengasuh bayi itu juga diberikan.¹⁴⁸

Jadi meski belum ada *affirmative action* untuk posisi-posisi penting di partai, PKS sudah membuat kebijakan-kebijakan khusus untuk memfasilitasi kader perempuan PKS agar mereka dapat melaksanakan aktivitas politik di partai dengan lebih nyaman. Dengan memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan khusus, maka para kader perempuan PKS yang mayoritas masih muda dan berada pada usia produktif sehingga pada umumnya masih memiliki anak-anak kecil atau bayi tidak terhalang melaksanakan aktivitas politik yang diadakan oleh partai.

Selain memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan khusus untuk para kader perempuan, Ledia Hanifa menyatakan bahwa PKS mengembangkan sistem pengelolaan partai yang bisa dipercaya, paling tidak dari sisi notulensi rapat. Dia menyatakan bersyukur bahwa PKS tidak pernah merubah notulensi rapat yang sudah disepakati meski para perempuan PKS sudah meninggalkan rapat terlebih dulu. Menurutnya hal ini merupakan kelebihan PKS karena teman-teman perempuannya dari partai-partai lain sering harus menunggu sampai notulensi selesai sikitik untuk memastikan bahwa kesimpulan tidak dirubah tanpa sepengetahuan perempuan. Kelebihan PKS dalam hal ini sangat penting dilihat dari kondisi perempuan yang pada umumnya tidak dapat mengikuti rapat sampai jauh malam karena adanya anak dan suami di rumah. Kedisiplinan menjaga kesepakatan rapat menjadi hal penting untuk perempuan PKS.

Saya bersyukur kalau dibandingkan dengan teman-teman perempuan di partai lain yang mereka harus nunggu hasil notulensinya jangan sampai dirubah, gitu lo, kalau di sini enggak. Untuk itu. Karena di belakang itu,

¹⁴⁷ Hasil wawancara dengan Ledia Hanifa di Jakarta 27 Januari 2009..

¹⁴⁸ *Ibid.*

kita setiap sebelum tutup, notulensi itu dikritisi sama-sama, dilihat sama-sama, disepakati sama-sama, udah, selesai, dan itu insya Allah nggak akan ada yang merubah.¹⁴⁹

Ledia Hanifa berpendapat bahwa kebijakan PKS untuk meletakkan perempuan pada satu Bidang khusus bukan merupakan kelemahan atau tidak merugikan perempuan. Alasannya adalah bahwa menurutnya dibutuhkan satu bidang yang secara khusus memberi perhatian terhadap persoalan-persoalan perempuan untuk kebutuhan menghubungkan semua perempuan yang ada di Bidang-Bidang lain dan juga untuk percepatan peningkatan kualitas perempuan di dunia politik. Ledia Hanifa menyatakan pendapatnya dalam uraian berikut:

Jadi, kalau saya berpiki kita tidak dikotakkan dalam konteks begini. Semua departemen itu kan punya *job desc* masing-masing, dan di PKS itu kalau ada perempuan yang bagus di kepemudaan dia di kepemudaan begitu. Sampai sekarang masih ada yang di kepemudaan. Ada. Tapi tetap ada yang harus *concern more* terhadap isu-isu kewanitaan ini, jangan dilepas, gitu. Itu justru *linkage*, kita membuat *link* dengan teman-teman yang ada di departemen lain.¹⁵⁰

Untuk membuat Bidang Kewanitaan dapat berdaya guna secara maksimal dalam memenuhi kebutuhan khusus perempuan PKS dalam kehidupan politik, maka Bidang ini dibagi menjadi 3 (tiga) departemen dengan job description yang jelas. Pembagian tugas diantara 3 (tiga) Departemen dalam Bidang Kewanitaan adalah:

Jadi kalau struktur bidang kewanitaan itu kita ada 3, satu Kajian-kajian Isu-Isu Kewanitaan, kemudian termasuk UU atau Perda di tingkat provinsi, kota/kabupaten itu dibahas di sini, dikaji di sini. Jadi produknya itulah yang nanti menjadi muatan dimana kita melakukan jaringan. Yang kedua itu Jaringan Lembaga. Jaringan inilah yang membuat komunikasi dengan berbagai lembaga, tokoh. Dan muatan-muatan itu yang tadi sudah dikaji. Dan ketiga untuk Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Fungsionaris, karena kita harus tetap berfikir regenerasi, gitu. Karena itu tetap harus ada pemberdayaan perempuan.

Meski Ledia Hanifa menjelaskan bahwa keberadaan Bidang Kewanitaan bukan merupakan “upaya pengkotakan” perempuan PKS, tetapi kenyataannya berkumpulnya mayoritas perempuan PKS di Bidang ini telah membuat akses perempuan ke berbagai jabatan di luar Bidang Kewanitaan menjadi terbatas. Hal ini seperti dikemukakan oleh Sitaresmi bahwa “kalau perempuan PKS itu mentokmentoknya yang Ketua Bidang Kewanitaan”¹⁵¹ Dengan demikian, dilihat dari pendapat Lovenduski dan Noris, kebijakan struktur yang dianut oleh PKS untuk memfasilitasi perempuan dalam satu Bidang khusus justru tidak membuka akses perempuan terhadap berbagai jabatan penting dalam partai. Perempuan PKS menjadi ahli di Bidang Kewanitaan, tetapi menjadi tidak ahli di Bidang lain. Kelemahan ini kelihatannya disadari oleh Ledia Hanifa sebagai Ketua Bidang

¹⁴⁹ *Ibid.*

¹⁵⁰ *Ibid.*

¹⁵¹ Hasil wawancara dengan Sitaresmi di Jakarta 25 Februari 2009..

Kewanitaan. Karena itu menurut dia ke depan perempuan PKS harus menargetkan jabatan lain di luar Bidang Kewanitaan. Jabatan-jabatan tersebut adalah Wakil Sekretaris Jendral dan Bidang-Bidang serta Badan-Badan di luar Bidang Kewanitaan.¹⁵² Hal ini dinyatakan Ledia Hanifa sebagai berikut:

Yang jelas kalau kami di Bidang Kewanitaan itu menginginkan nanti periode yang selanjutnya itu di wasekjen¹⁵³ harus ada perempuan. Selama ini belum ada..katakanlah kalau bendum¹⁵⁴ sih nggak terlalu ya karena partai sudah punya prioritas pendanaan untuk perempuan...yang penting itu wasekjen ya, artinya...supaya pembicaraan-pembicaraan, pengambilan keputusan-keputusan itu lebih...lebih prolah kepada....artinya bukannya nggak ada tapi ..begini...kalau ada perempuan di situ kan dengan sensitifitas gender yang baik kan dia kan otomatis spontan kan. Kemudian juga mendorong teman-teman perempuan untuk masuk di Bidang-Bidang, Badan-Badan.. dan itu.. juga didorong, gitu. Kebanyakan memang tidak siapnya adalah ketika harus *full time*..*full time* di DPPnya karena mereka masing-masing juga pasti punya profesi, punya tanggung jawab yang lain. Sementara memang ketika kemudian kita harus masuk pada jabatan strategis, mau tidak mau *full time*.¹⁵⁵

Tabel 4.5:
Sikap dan Tindakan Pejabat PKS terhadap Hak Politik Perempuan

Nama	Sikap dan Tindakan Partai
Tifatul Sembiring	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menempatkan perempuan PKS pada 30% posisi dalam daftar calon. 2. Mengangkat lebih kurang 6 orang anggota perempuan sebagai perwakilan <i>khubaro</i> (pakar) 3. Melibatkan Ketua Bidang Perempuan dalam rapat di level DPP. 4. Melakukan mobilitas vertikal maupun mobilitas horizontal. Perempuan PKS
Hidayat Nirwachid	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengadakan diklat-diklat. 2. Menyediakan fasilitas, 3. Menyediakan departemen khusus untuk perempuan
Mardani Ali Sera	Melakukan <i>affirmative action</i> untuk lingkup internal organisasi partai, yaitu memberi posisi Wakil Sekjen dan Ketua Bidang di luar Bidang Kewanitaan.
Gufron Azis Fuadi	<ol style="list-style-type: none"> 1. PKS membuat arahan tentang ketentuan minimal 30% perempuan sebagai calon anggota DPR dan diusahakan sebanyak mungkin pada nomor 2 di DP 2. Memperkuat penokohan perempuan dalam masyarakat agar

¹⁵² Menurut Mardani Ali Sera, Wakil Sekjen DPP PKS, Bidang yang dinilai cocok untuk perempuan PKS karena mereka memiliki keahlian di Bidang itu adalah Bidang Kesejahteraan Rakyat.

¹⁵³ Wakil Sekretaris Jendral DPP PKS

¹⁵⁴ Bendahara Umum DPP PKS.

¹⁵⁵ Hasil wawancara dengan Ledia Hanifa, Jakarta 27 Maret 2009.

	dikenal publik.
YY	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberi sarana berupa Bidang Kewanitaan 2. Memberi kesempatan berbicara terlebih dulu kepada perempuan. 3. Mengapresiasi setiap pendapat perempuan meski belum tentu benar dan belum tentu bagus
AR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas perempuan PKS lewat Program Bidang Kaderisasi. 2. Meningkatkan kualitas kader perempuan PKS lewat program Bidang Kewanitaan 3. Mengikutkan kader perempuan PKS dalam kegiatan-kegiatan pihak luar.
HA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberi tempat khusus untuk perempuan di Dewan Syariah Pusat 2. Mengeluarkan Bayan DSP tentang Aktivitas Perempuan dalam Dakwah dan Politik 3. Memfasilitasi dukungan suami bagi aktivitas politik perempuan di bawah kontrol partai 4. Memberikan dukungan finansial untuk pencalonan perempuan menjadi anggota DPR, khususnya bagi calon yang belum menjadi anggota DPR
KK	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berlaku diskriminatif terhadap calon anggota DPR dari segmen non kader 2. Tidak meletakkan perempuan pada posisi strategis di daftar calon 3. Menyediakan saksi pemilu atas beban biaya dari partai.
T	<ol style="list-style-type: none"> 1. PKS menyusun pedoman nominasi, seleksi dan promosi karir politik yang jelas 2. Melakukan pencatatan atas perjalanan karir seluruh kader, melakukan <i>assessment</i> atas kelayakan penempatan pada jabatan atas dasar nilai kiprah kerja dari tiap kader. 3. Melakukan pengaturan pencalonan anggota DPR bagi suami istri agar keluarga tetap stabil
KA	Membuat keputusan pencalonan yang "melemparnya" ke daerah pemilihan yang jauh dan bukan daerah kantong suara PKS.
S	<ol style="list-style-type: none"> 1. Para pejabat tinggi PKS akomodatif terhadap hak politik perempuan, tetapi level menengah dan bawah sebagian masih resisten. 2. Membantu dirinya nya dengan meletakkan pencalonannya pada daerah basis

	3. Membantu dana kampanye meski sangat kecil
LH	<ol style="list-style-type: none"> 1. Partai memprioritaskan pendanaan untuk Bidang Kewanitaan 2. Memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan khusus untuk perempuan dan anak. 3. Tidak merubah kesepakatan rapat di luar pengetahuan perempuan

Berbagai informasi yang diberikan para narasumber tentang pandangan, sikap dan tindakan partai terhadap hak politik perempuan menunjukkan adanya pandangan dan sikap positif terhadap hak politik perempuan. Partai secara formal mengadopsi pandangan bahwa perempuan adalah subyek politik yang setara laki-laki. Meski demikian, dilihat dari pandangan pejabat terpenting partai tentang hak politik perempuan terhadap jabatan politik, terdapat pandangan dan sikap yang tidak konsisten dengan pandangan formal partai karena mereka¹⁵⁶ menolak mengaitkan kesetaraan tersebut dengan "peran dalam jabatan" karena jabatan tersebut menurut mereka terbatas. Selain itu secara nyata masih terdapat pandangan yang *rigid* atau kaku yang menolak hak politik perempuan diantara para pejabat partai. Satu laki-laki narasumber yang merupakan anggota Majelis Syura Pusat menyatakan panangannya yang tidak senang dengan peran politik perempuan yang terlalu aktif. Narasumber lain juga menginformasikan masih adanya resistensi terhadap hak politik perempuan (misalnya dalam bentuk penolakan bagi perempuan untuk berbicara di depan publik di atas panggung ketika kampanye, masih melabeli perempuan dengan semata-mata tugas domestik, menolak atau sangat membatasi berbicara dengan perempuan atau laki-laki bahkan untuk kepentingan pendekatan kampanye) khususnya dari kalangan pejabat partai yang lebih rendah. Dengan demikian, meski PKS secara formal mengakui kesetaraan hak politik perempuan dengan laki-laki, tetapi masih terdapat pandangan pejabat PKS yang tidak sesuai dengan pandangan formal partai.

Dasar pikiran yang melandasi pandangan tersebut adalah bahwa menurut para narasumber terdapat ayat-ayat dalam Al Quran dan Hadits yang menunjukkan kesetaraan posisi perempuan dengan laki-laki. Mereka juga mendasarkan pandangan mereka atas sejarah hidup para sahabiyat yang juga aktif melakukan tindakan publik baik di ranah dakwah agama, ekonomi, sosial, maupun politik. Sedangkan yang memiliki pandangan tidak setuju dengan aktivitas politik perempuan menyatakan bahwa aktivitas politik akan lebih maksimal jika diurus oleh laki-laki karena perempuan mempunyai banyak halangan untuk itu.

Dilihat dari sikap dan tindakan partai berkenaan dengan hak politik perempuan PKS, mayoritas narasumber mengakui adanya sikap positif dan tindakan mendukung hak politik perempuan dari partai. Partai memfasilitasi perempuan PKS dengan satu Bidang khusus yaitu Bidang Kewanitaan. PKS juga memfasilitasi berbagai program penguatan kapasitas sumberdaya kader

¹⁵⁶ Dua tokoh PKS, satu adalah Presiden PKS pada saat riset ini dijalankan dan yang lainnya adalah mantan Presiden PKS.

perempuan PKS. PKS bahkan memprioritaskan dukungan pendanaan dan fasilitas untuk Bidang Kewanitaan dan kader perempuan PKS. Meski demikian diakui bahwa fasilitasi dalam Bidang Kewanitaan tersebut masih belum membuka akses perempuan PKS terhadap keputusan-keputusan partai sehingga perempuan PKS melalui Bidang Kewanitaan menuntut adanya wakil perempuan pada posisi strategis di Bidang-Bidang lain dan di Wakil Sekretaris Jendral. Keinginan perempuan melalui Bidang Kewanitaan ini didukung oleh satu pejabat PKS yang menyatakan bahwa sudah waktunya perempuan diberi porsi jabatan tinggi pada struktur partai di luar Bidang Kewanitaan.

Selain sikap partai yang dirasakan masih belum membuka akses perempuan PKS terhadap jabatan lain di luar Bidang Kewanitaan, dua narasumber menunjukkan masih adanya sikap diskriminatif terhadap perempuan non kader yang direkrut menjadi calon anggota DPR dalam bentuk tidak memberi bantuan keuangan untuk kampanye padahal perempuan calon anggota DPR lain yang berasal dari segmen kader PKS dibantu, tidak mempromosikan mereka dalam kegiatan *direct selling* yang dilakukan kader PKS, dan tidak memprioritaskan perhatian saksi dari PKS untuk mengawasi suata yang mereka peroleh pada proses penghitungan suara. Hal ini menurut narasumber tersebut merugikan kepentingan PKS untuk memperluas segmen dukungan di masyarakat, khususnya dukungan dari luar konstituen tradisional PKS. Partai juga dinilai oleh satu narasumber bertindak tidak adil dengan "melempar"-nya ke daerah pemilihan yang tidak diidnginkannya hanya karena dia bersikap berbeda pendapat dengan garis kebijakan partai. Secara ringkas, kebijakan PKS tentang struktur dan program¹⁵⁷ berkenaan dengan hak politik perempuan mendapat penilaian positif dari para narasumber. Tetapi berdasarkan data yang ada disimpulkan masih ada pandangan yang resisten terhadap hak politik perempuan serta masih ada sikap-sikap dan tindakan yang diskriminatif terhadap perempuan. Dengan demikian PKS belum melakukan *affirmative action* yang membuka akses bagi perempuan PKS terhadap berbagai jabatan politik dalam partai serta belum melakukan tindakan-tindakan politik berdasar prinsip keadilan antara apa yang telah dilakukan oleh para perempuan kader PKS dengan hak politik mereka, khususnya hak untuk memperoleh berbagai jabatan strategis dalam partai dan dalam keanggotaan DPR. PKS hanya meletakkan 2 (dua) perempuan pada posisi nomor satu dalam daftar calon anggota DPR dari 77 Daerah Pemilihan di seluruh Indonesia. Bahkan Ketua Bidang Kewanitaan hanya diletakkan pada posisi nomor 2 (dua) pada daftar calon pada daerah pemilihannya. Hal ini menunjukkan adanya tindakan laki-laki di PKS.

¹⁵⁷ Menggunakan pendapat Joni Lovenduski dan Pippa Norris, politik partai berkenaan dengan hak politik perempuan atau *gender party politics* dapat dilihat dari dua aspek besar, yaitu struktur yang dibentuk dan kebijakan dan program yang dilakukan. Lihat Joni Lovenduski dan Pippa Norris, 1993. *Gender and Party Politics*. London: Sage Publications, hal 12.

KESIMPULAN

Penelitian disertasi ini mengambil tema posisi perempuan dalam relasi kekuasaan di Partai Keadilan Sejahtera dengan fokus pada 4 (empat) tema bahasan, yaitu peran perempuan PKS dalam struktur kewenangan di PKS, pandangan perempuan PKS tentang hak politik mereka, peran perempuan PKS dalam proses pencalonan anggota DPR RI periode 2009-2014 dari PKS dan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap perempuan dalam relasi kekuasaan di PKS. Tema perempuan dalam relasi kekuasaan di PKS dipilih untuk mengkaji secara sistematis dan rinci mengenai hubungan perempuan dengan kehidupan politik dalam partai atas dasar teori yang cukup baru dalam khasanah studi gender dan politik, yaitu teori Moya Lloyd tentang subyek-dalam proses atau *subject-in process* yang ditulisnya pada tahun 2005. Esensi teori ini adalah bahwa perempuan dan kelompok perempuan bukanlah subyek tunggal dengan kecenderungan pandangan, sikap dan tindakan politik yang seragam; mereka adalah subyek-dalam proses membentuk citra subyek politik yang efektif.

Pemilihan PKS, sebuah partai Islam, sebagai kasus penelitian disebabkan adanya berbagai artikel, hasil penelitian, buku terdahulu yang ditulis oleh berbagai narasumber dan peneliti. Berbagai tulisan tersebut menyatakan adanya pengaruh pemikiran politik yang kuat dari tradisi Il-Ikhwān-Al-Muslimun terhadap PKS. Perlu dilihat apakah sebagai akibat adanya satu pemikiran politik yang dominan tersebut perempuan PKS mempunyai kecenderungan peran, pandangan, sikap, tindakan politik, kelemahan-kelemahan dan idealitas karakter yang seragam. 4 (empat) konsepsi tentang subyek-dalam proses diuji dalam penelitian ini, yaitu konsepsi perempuan sebagai (1) *constituted subject* atau subyek yang merupakan pelaku sekaligus akibat dari kekuasaan politik; (2) *multiple subject* atau subyek dengan berbagai peran; (3) *performative subject* atau individu yang berupaya membentuk citra sebagai subyek politik yang efektif; dan (4) *deferred subject* atau subyek dengan kelemahan-kelemahan yang merupakan ciri yang ingin dibuang dan *subject of lack* atau subyek dengan ciri-ciri ideal yang diinginkan.

Hasil penelitian ini pertama mengkonfirmasi teori Moya Lloyd tentang perempuan sebagai subyek-dalam proses. Perempuan PKS merupakan subyek dengan pandangan dan keyakinan politik yang beragam berkenaan dengan hak politik mereka sendiri. Mereka juga berbeda sikap dan tindakan dalam memperjuangkan hak mereka untuk menjadi anggota DPR. Mereka berbeda pendapat tentang kelemahan-kelemahan apa yang masih terdapat dalam diri perempuan PKS sehingga mereka berkeinginan menghilangkan semua kelemahan tersebut. Mereka juga berbeda pendapat tentang ciri-ciri, sifat-sifat dan ketrampilan politik yang ingin ditiru dari laki-laki. Dengan diterimanya tesis Moya Lloyd tentang perempuan PKS sebagai subyek-dalam proses, maka penelitian ini menolak argumen feminisme radikal yang menyatakan bahwa pengalaman perempuan dalam kehidupan politik, khususnya dalam berhubungan kekuasaan politik dengan laki-laki adalah seragam, yaitu semua perempuan mengalami pengalaman diskriminatif yang sama. Penelitian ini menolak argumen tersebut karena pengalaman perempuan PKS dengan diskriminasi politik tidaklah seragam.

Temuan penelitian juga menolak argumen feminis liberal yang berasumsi bahwa partai sebagai lembaga politik bersifat netral dalam hubungan kekuasaan antara laki-laki dengan perempuan. Asumsi feminis liberal yang didasarkan atas argumen demokrasi liberal bahwa setiap individu terlahir bebas dan setiap individu memiliki hak yang sama untuk menikmati kebebasan tidaklah didukung oleh hasil penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partai tidaklah netral. PKS menjadi instrumen elit partai untuk “memaksakan” nilai-nilai,

aturan-aturan, sikap-sikap dan tindakan-tindakan sesuai kehendak partai melalui Fatwa, Bayan, Putusan, Pedoman, sosialisasi yang dilakukan, program dan kebijakan serta prioritas penganggaran.

Selain mengkonfirmasi teori Moya Lloyd tentang perempuan PKS sebagai subyek dalam proses, penelitian ini mengkonfirmasi masih cukup kuatnya pandangan patriarkhis di kalangan perempuan PKS, pejabat PKS dan di kalangan “akar rumput” PKS. Meski penelitian ini mengkonfirmasi masih cukup kuatnya patriarkhi di PKS, penelitian ini mengkonfirmasi mulai adanya dukungan terhadap teori Anne Philips tentang *the politics of presence* perempuan di dunia politik. Baik di kalangan perempuan maupun laki-laki PKS, argumen tentang perlu adanya perempuan PKS di struktur organisasi diluar Bidang Kewanitaan semakin mendapat dukungan. *Affirmative action internal* ini akan mendukung upaya *affirmative action external* pada waktunya nanti. Hal ini berarti mengkonfirmasi sudah adanya elemen perempuan PKS yang mendukung urgensi *the politics of presence* dan *the politics of difference*.

Selain mengkonfirmasi teori subyek-dalam proses, teori patriarkhi dan *the politics of presence*, penelitian ini juga mengkonfirmasi bahwa oligarkhi masih kuat di PKS. Sebagai sebuah partai kader, oligarkhi menjadi kebutuhan PKS karena tanpa oligarkhi tidak akan tercapai disiplin partai. Aturan dan *screening internal* berlapis untuk promosi jabatan diperlukan agar tercipta disiplin partai yang kuat dan terbentuk kader yang berkualitas. Secara khusus oligarkhi PKS diperkuat melalui fungsi, tugas dan wewenang 2 (dua) lembaga tertinggi dan lembaga tinggi PKS, yaitu Majelis Syura Pusat dan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat. Meski oligarkhi diperlukan karena adanya alasan tertentu, oligarkhi merugikan PKS dari dua sisi. Pertama, sebagai partai dengan mayoritas anggota masih muda, PKS membutuhkan jalur pengembangan karir dan promosi jabatan politik yang cepat untuk menghindari frustrasi kader karena perkembangan karir politik yang lambat. Selain itu oligarkhi juga menghambat akses perempuan PKS terhadap berbagai jabatan politik internal dan eksternal. Hal ini dalam jangka panjang dapat berpengaruh negatif terhadap semangat kader perempuan PKS untuk bekerja keras untuk PKS karena ternyata PKS tidak memberi apresiasi secara setara antara kinerja dan penghargaan yang diperoleh.

Penelitian ini juga menunjukkan meski PKS adalah partai yang berideologi Islam dan seluruh bangunan Falsafah Dasar, Fatwa, Bayan, Pedoman, Putusan selalu didasarkan pada nilai Islam, tetapi ternyata feminisme mulai berkembang di kalangan perempuan PKS, bahkan juga mulai terlihat di kalangan laki-laki PKS. Dalam hal ini ditemukan dua kelompok besar feminis dalam PKS, yaitu feminis liberal yang diadopsi kelompok netral gender (*gender neutrality*) dan feminis post-strukturalis yang diadopsi kelompok keberagaman gender (*genderdiversity*). Hal ini mengkonfirmasi argumen Colin Hay tentang partai dan kader sebagai *strategic actors within strategic context*. Lingkungan internal dan eksternal PKS menghendaki PKS dan perempuan kader PKS untuk selalu memilih tindakan strategis atas dasar pertimbangan respon pihak lain, baik pihak internal maupun eksternal. Feminisme yang secara harfiah berarti ideologi yang memperjuangkan kepentingan perempuan adalah konteks strategis yang harus direspon secara tepat baik oleh PKS sebagai partai maupun perempuan PKS. Jika PKS dan perempuan PKS tidak bersedia berjuang untuk kepentingan politik perempuan, maka mereka tidak akan dapat mengambil tindakan strategis jangka panjang.

6.1 Temuan Penelitian

Penelitian ini menghasilkan berbagai temuan. *Pertama*, sebagai *the constituted subject*, perempuan PKS bukan hanya menjadi akibat-akibat kekuasaan politik yang berpengaruh terhadap mereka, yaitu kekuasaan partai, tetapi juga pelaku aktif dengan agenda dan perjuangan yang jelas. Perempuan PKS telah aktif terlibat semenjak masa awal berdirinya PKS; bahkan semenjak pendirian Partai Keadilan sebagai embrio PKS. Meski demikian secara kuantitas hanya sedikit perempuan PKS yang terlibat sebagai pendiri partai; dan hal ini menjelaskan mengapa kemudian hanya sedikit perempuan yang dapat menduduki posisi penting dalam partai. Secara ideologis PKS menganut prinsip kesetaraan gender; tetapi kultur ideologis yang dikembangkan adalah perbedaan peran gender karena perempuan dinilai secara psikologis dan sosiologis berbeda dari laki-laki. Unsur PKS juga berbeda pendapat tentang hak perempuan dalam kepemimpinan politik, terdapat yang menerima dan tidak mempermasalahkan hak perempuan menjadi kepala negara, tetapi terdapat kelompok yang tidak dapat menerima hal tersebut. Analisis atas berbagai posisi dan peran yang dilakukan perempuan PKS dalam struktur kewenangan di PKS menunjukkan terdapat kelompok perempuan yang merefleksikan dan tunduk pada wacana hegemoni dalam partai. Perempuan PKS dalam Majelis Pertimbangan Pusat dan Dewan Syari'ah Pusat merefleksikan kesamaan pandangan dan sikap dengan elit partai yang buta dan netral gender; menolak ide *affirmative action* untuk perempuan, tidak melakukan tindakan memperjuangkan *affirmative action* untuk perempuan, bahkan menghasilkan Bayan yang memberi beban tambahan untuk perempuan yang akan melaksanakan aktivitas politik. Sebaliknya, perempuan dalam Bidang Kewanitaan DPP mempunyai agenda-agenda perjuangan dan melakukan berbagai tindakan untuk mempromosikan hak-hak politik perempuan. Kedua kubu ini menunjukkan bahwa meski keduanya sama-sama merupakan pelaku politik yang aktif dalam partai, tetapi kekuatan yang berpengaruh terhadap keduanya berbeda. Kelompok pertama lebih dipengaruhi oleh kekuatan pandangan elit partai sedangkan kelompok kedua yang banyak berinteraksi dengan kalangan feminis di luar partai banyak dipengaruhi oleh pemikiran para feminis tersebut.

Dilihat dari penempatan perempuan dalam struktur kewenangan PKS terlihat adanya penempatan perempuan PKS pada substruktur khusus dalam partai. Hal ini merugikan karena tidak memberi kesempatan perempuan PKS untuk mendapat pengalaman melakukan pengelolaan partai. Posisi minoritas dalam struktur kewenangan partai yang lainnya juga menyebabkan perempuan mempunyai akses yang sangat terbatas terhadap keputusan-keputusan penting partai, termasuk kesempatan untuk dicalonkan dalam pemilu. Karena kebijakan PKS adalah mencalonkan fungsionaris partai dalam pemilu legislatif, maka sangat sedikitnya jumlah perempuan sebagai fungsionaris partai mempersempit kesempatan mereka dicalonkan dalam pemilu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *affirmative action* dalam kewenangan struktural partai untuk perempuan merupakan prasyarat bagi upaya peningkatan kesempatan perempuan PKS untuk dicalonkan dalam pemilihan umum. Ini perlu dilakukan untuk meningkatkan *pool of resources* yang mencukupi untuk pencalonan perempuan menjadi anggota DPR, meningkatkan ketrampilan politik untuk perempuan, dan meningkatkan akses perempuan terhadap keputusan penting dalam partai. Meski demikian perlu diberi catatan bahwa *internal affirmative action* ini hanya akan bermakna bagi perjuangan hak politik perempuan jika terjadi perubahan pandangan kelompok perempuan yang buta dan netral gender menjadi lebih responsif gender.

Berkenaan dengan struktur kewenangan dalam partai, hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur kewenangan yang oligarkhis mempersulit mobilitas vertikal perempuan PKS untuk berbagai jabatan politik dalam partai. Meski berdasar data perempuan PKS mempunyai

rata-rata pendidikan yang setara dengan laki-laki, tetapi adanya ketentuan penjenjangan karir politik yang ketat di PKS membuat perempuan lebih sulit memenuhi berbagai kriteria kualitatif yang dipersyaratkan. Sekali lagi, *internal affirmative action* diperlukan untuk mengurangi dampak buruk struktur kewenangan PKS yang oligarkhis bagi perempuan PKS.

Kedua, penelitian ini menghasilkan temuan adanya perbedaan pandangan tentang hak politik perempuan di kalangan perempuan PKS. Kelompok pertama, kelompok buta dan netral gender menginginkan kesamaan misi perjuangan politik dengan laki-laki, mengingkari fakta masih adanya diskriminasi gender di PKS, menginginkan kepatuhan total kepada partai dan pemimpin partai, menolak hak terkait dengan fungsi reproduktif perempuan, dan menganggap bahwa posisi kepala negara tidak tepat untuk perempuan. Sementara itu kelompok kedua, kelompok keberagaman gender, melihat bahwa kultur PKS belum sepenuhnya nyaman untuk perempuan karena masih minoritas di berbagai lembaga, menginginkan politik yang inklusif dan moderat, mempunyai keyakinan bahwa perempuan berhak atas semua jabatan politik, ingin merubah pandangan yang mencerminkan fiqh tradisional agar kontekstual.

Dilihat dari kaitan antara ideologi PKS dan pandangan tentang hak politik perempuan di kalangan perempuan PKS, perbedaan pandangan kedua kubu merupakan akibat dari pemahaman yang berbeda tentang aspek-aspek dalam ideologi PKS. Kelompok pertama yang merupakan faksi buta dan netral gender lebih dipengaruhi oleh Bayan Dewan Syariah Pusat nomor 9 tahun 2008 yang pada diktum pertama memperkuat argumen kepemimpinan laki-laki atas perempuan. Sementara itu kelompok kedua yang meyakini kesetaraan politik sepenuhnya antara perempuan dengan laki-laki lebih dipengaruhi oleh Falsafah Dasar PKS yang pada prinsip ke 14 tentang gender menjelaskan kesetaraan sepenuhnya perempuan dengan laki-laki sebagai khalifahNya di muka bumi. Perbedaan cara memahami aspek dalam ideologi inilah yang menyebabkan terjadinya perbedaan pandangan tentang hak politik perempuan di kalangan perempuan PKS.

Ketiga, penelitian menunjukkan bahwa karena keyakinan-keyakinan yang berbeda tentang hak politik mereka, perempuan PKS juga melakukan peran-peran politik yang berbeda. Kelompok pertama melakukan peran tradisional yang justru menghalangi upaya perempuan PKS lainnya untuk dapat menikmati hak politik yang sama dengan mereka. Kelompok kedua melakukan peran-peran responsif gender yang mendukung perjuangan kelompok perempuan untuk hak-hak politik mereka. Hal ini menunjukkan bahwa meski berada pada lingkungan partai Islam yang sama dengan ideologi yang sama, perempuan PKS dapat melakukan peran-peran politik yang tidak sama dalam kaitan dengan perjuangan hak politik perempuan. Sebagai *the multiple subject*, peran politik kedua kelompok tidaklah sama.

Dilihat dari apa yang dilakukan perempuan PKS dalam proses pencalonan anggota DPR, meski mempunyai pandangan yang berbeda tentang hak politik perempuan, meski memiliki peran-peran yang berbeda dalam mempromosikan hak politik perempuan secara umum, kedua kubu mempunyai sikap dan tindakan yang sama baik dalam pencalonan maupun pemilihan menjadi anggota DPR; menerima keputusan pencalonan yang sudah ditetapkan oleh DPTP dan tidak melakukan upaya apapun untuk mempengaruhi proses pencalonan anggota DPR bagi mereka. Meski demikian perlu dicatat bahwa terdapat upaya mempengaruhi pencalonan oleh dua orang yang berasal dari kubu keberagaman gender, tidak ada upaya dari kubu buta dan netral gender. Sebagai *the performative subject*, perempuan PKS berbeda sikap dan tindakan politik.

Dilihat dari pandangan, sikap dan tindakan pejabat PKS terhadap proses pencalonan anggota DPR, hasil penelitian menunjukkan bahwa pejabat partai lebih mendukung perempuan

PKS dari kubu buta dan netral gender. Perempuan dari kubu buta dan netral gender lebih didukung untuk penempatan pada nomor dalam daftar dan daerah pemilihan yang menguntungkan sedangkan perempuan dari kubu keberagaman gender tidak demikian. Hal ini menunjukkan bahwa bukan hanya secara ideologis pejabat PKS buta dan netral gender, tetapi hal ini juga berpengaruh terhadap sikap dan tindakan mereka terhadap pencalonan perempuan PKS menjadi anggota DPR.

Keempat, berkenaan dengan kelemahan-kelemahan yang ada pada perempuan dan kelompok perempuan, penelitian ini menghasilkan temuan sebagai berikut. Konsepsi *the subject of lack* menunjukkan bahwa dalam proses membangun diri sebagai subyek politik, identitas diri perempuan hanya akan mempunyai makna jika dilihat dalam kaitan atau hubungan dengan subyek yang menjadi panutan atau yang ingin ditirunya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua golongan sifat-sifat atau ciri-ciri besar yang ingin ditiru dan ditumbuhkan oleh para perempuan PKS. Golongan pertama adalah ciri atau sifat maskulin dalam kehidupan politik, antara lain berpikir generalis dan makro serta sistimatis, berani, terampil secara teknis, mempunyai kemampuan konseptual yang bagus, pekerja keras, memiliki keahlian tertentu agar dapat menjadi *hubaro*, mampu memenuhi berbagai persyaratan untuk jabatan politik. Yang kedua adalah ciri femininitas, antara lain kemampuan hubungan *interpersonal*, kemampuan tidak konfrontatif, kemampuan bekerja dalam *team-work*, kemampuan komunikasi yang inklusif, kemampuan menjaga keseimbangan atau *tawadlunitas* antara peran domestik dan publik, moderat dan inklusif.

Berbagai ciri baik maskulinitas maupun femininitas yang ingin ditiru dan ditumbuhkan dalam diri perempuan PKS tersebut bukanlah keseluruhan ciri yang mungkin ada dan bisa ditiru, tetapi hanya merupakan ciri yang dapat disebutkan oleh para narasumber dalam wawancara. Di luarnya tentu masih banyak lagi. Pengelompokan dalam dua golongan besar didasarkan pada dua kelompok besar dalam feminisme dalam memperjuangkan kepentingan politik perempuan, yaitu kelompok yang menginginkan *gender diversity* dan kelompok yang menginginkan *gender neutrality*. Kelompok *gender neutrality* memperjuangkan kedudukan yang setara serta ingin meniru karakter maskulin agar perempuan dapat setara dengan laki-laki. Sementara itu kelompok *gender diversity* menginginkan adanya pengakuan atas kekhasan perempuan atau ciri keperempuanan (*femininity*) dalam dunia politik selain karakter maskulin yang selama ini telah mendominasinya. Menurut kelompok *gender diversity*, perempuan perlu menunjukkan baik karakter maskulin maupun feminin dalam dunia politik. Adanya berbagai karakter dan sifat yang diinginkan dalam dua golongan besar menunjukkan bahwa dari sisi sifat, ciri dan kemampuan yang ingin dimiliki dan ditumbuhkan dalam diri perempuan PKS, perempuan PKS merupakan *the subject of lack* dengan ideal sifat, ciri, dan kemampuan yang berbeda. Indikator ini menunjukkan bahwa perempuan PKS adalah subyek-dalam proses membentuk sifat, ciri dan kemampuan yang diinginkan yang masing-masing kubu berbeda idealnya. Mereka sedang membangun ciri-ciri yang masing-masing menginginkan hal yang berbeda.

6.2 Implikasi Teoritis

Ditolaknya asumsi teoritis feminis liberal dalam menjelaskan relasi kekuasaan antara perempuan PKS sebagai aktor politik dengan PKS sebagai struktur politik menunjukkan bahwa teori feminis liberal tidak sepenuhnya dapat menjelaskan hubungan antara partai sebagai struktur politik dalam negara dengan perempuan sebagai aktor politik dalam partai Islam PKS. Meski demikian hal ini perlu diterjemahkan secara hati-hati dalam keberlakukannya untuk konteks

partai Islam yang lain. Tipe penelitian studi kasus untuk penelitian ini membuat generalisasi tidak dapat dilakukan untuk kasus partai Islam lain. Begitu juga dengan generalisasi teoritis untuk penolakan teori feminis radikal. Tidak dapat diasumsikan apakah fenomena terdapatnya perempuan yang menolak masih terjadinya diskriminasi politik terhadap perempuan dan justru melakukan diskriminasi terhadap perempuan yang lain juga terdapat di partai Islam lain atau tidak.

Dikonfirmasinya teori Moya Lloyd tentang subyek-dalam proses oleh hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) teori ini lebih dapat menjelaskan posisi perempuan dalam relasi kekuasaan di partai dibanding feminisme gelombang pertama (dalam hal ini kelompok feminis liberal) yang mengabaikan pengaruh negara dan lembaga politik dalam negara terhadap perempuan, dan (2) feminisme gelombang kedua (dalam hal ini feminis radikal) yang menjadikan jenis kelamin sebagai satu-satunya faktor penjas diskriminasi terhadap perempuan dalam relasi kekuasaan politik di partai. Dengan demikian penelitian dengan pendekatan teoritik ini perlu diperkaya dengan penelitian sejenis untuk partai-partai dengan orientasi ideologis yang berbeda untuk melihat apakah teori ini mempunyai jangkauan penjelasan yang luas berkaitan dengan berbagai spektrum ideologi partai.

Kuatnya oligarkhi di PKS menunjukkan bahwa PKS tidak mungkin menghindarkan diri dari kecenderungan oligarkhis karena memang membutuhkannya sebagai strategi untuk menciptakan disiplin dalam partai sebagai partai kader. Oligarkhi secara khusus dibutuhkan oleh PKS untuk “mendisiplinkan perempuan” yang potensial untuk mempunyai kepentingan politik yang mungkin berbeda dengan elit partai..

Masa depan perempuan dalam relasi kekuasaan di PKS akan bergantung kepada kelompok faksi mana yang mampu dominan di PKS. Jika faksi buta dan netral gender lebih dominan, maka perempuan akan semakin sulit mencapai posisi kesetaraan politik dengan laki-laki. Sebaliknya kalau faksi keberagaman gender lebih dominan, maka perempuan PKS akan lebih besar kemungkinannya untuk mencapai kesetaraan politik dalam relasi kekuasaan di PKS.

Daftar Literatur

Buku dan Jurnal

- Abdullah, Irwan, ed. 2003. *Sangkan Paran Gender*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Abdul Mu'iz Ruslan, Utsman. 2000. *Pendidikan Politik Ikhwanul Muslimin*. Solo: Era Intermdia.
- Ackerly, Brooke A. 2000. *Political Theory and Feminist Social Criticism*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Ahmed, Leila. 1992. *Women and Gender in Islam*. Yale University Press.
- Amal, Ichlasul. 1988. *Teori-teori Mutakhir Partai Politik*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Al-Faruqi, Lamy. 1991. "Ailah, Masa Depan Kaum Wanita, Model Masyarakat Islam Ideal Tawaran Islam". Surabaya: Al-Fikr.
- Alfian. 1981. *Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Al Ghazali, Abdul Hamid. 2001. *Meretas Jalan Kebangkitan Islam*. Solo: Era Intermedia.
- Ali Nadawi, Hasan, Abdul, dkk. 1993. *Benturan Barat dengan Islam*. Bandung: Mizan.
- Apter, David E. 1985. *Pengantar Analisa Politik*, Jakarta: LP3ES.
- Asfour, Jaber. 2007. *Membela Perempuan. Antara Hak, Peran dan Tanggung Jawab*. Depok: Noha Publishing House
- Bill, James A., dan Robert L. Hardgrave. 1973. *Comparative Politics, the Quest for Theory*. Colombus, Ohio: Charles E. Merrill Publishing Company
- Blau, Francine D., Marianne A. Ferber. 1992. *The Economics of Women, Men, and Work*. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall
- Biro Bina Pemberdayaan Perempuan Pemerintah Provinsi Lampung. 2000. *Profil Perempuan Propinsi Lampung 2000*
- Brown, Bernard E. 2006. *Comparative Politics: Notes and Readings*. Belmont, California: Thomson Wadsworth.

- Bryson, Valerie. 1992. *Feminist Political Theory. An Introduction*. Houndsmills, Basingstoke, Hampshire: the Macmillan Press.
- Budiarjo, Miriam. 1989. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Chilcote, Ronald. H. 1981. *Theories of Comparative Politics*. Colorado: Westview Press.
- Dalton, Russel J. 1988. *Citizen Politics in Western Democracies*. Chatham, New Jersey: Chatham House Publishers, Inc.
- Darmastuti, Ari dan Ikram. 1997. Konsep dan Implikasi Jender. Bandarlampung: *Seri Monografi-LP Unila*.
- Darmastuti, Ari dan Erna Rochana, 2000. *Profil Potensi, Peran dan Sumbangan Perempuan Dalam Keluarga dan Masyarakat di Wilayah Pesisir*, Technical Report, Proyek Pesisir Lampung
- Darmastuti, Ari, 2001, *Gender dalam Pembuatan Keputusan Keluarga dan Masyarakat* (Studi di Desa Tejang Pulau Sebesi, Rajabasa, Lampung Selatan), Technical Report, Proyek Pesisir Lampung.
- Darwin, Muhajir dan Tukiran, 2001. *Menggugat Budaya Patriarkhi*. Yogyakarta: Ford Foundation dan Pusat Penelitian Kependudukan.
- Davis, Angela Y, *Women, Culture, Politics*, New York: Vintage Books, a Division of Random House, Inc.
- De Beauvoir, Simone. Introduction from *The Second Sex*. Dalam Cudd, Ann E. dan Robin O. Andersen. 2004. *Feminist Theory, a Philosophical Anthology an Anthology*. Blackwell Publishing Company.
- Dewan Syari'ah Pusat Partai Keadilan Sejahtera. 1429 H/2008. *Bayan/9/B/K/DSP-PKS/1429 tentang Aktivitas Dakwah dan Politik Muslimah*. Jakarta: tanpa penerbit.
- Duerst-Lahti, Georgia dan Kelly, Rita Mae, 1995. *Gender Power, Leadership and Governance*. Ann Arbor: the University of Michigan Press.
- Fahmi, Nashir, 2006. *Menegakkan Syariat Islam Ala PKS*. Solo:Eraintermadia
- Faludi, Susan, 1991. *Backlash, the Undeclared War Against American Women*. New York: Doubleday.
- Ferree, Myra Marx dan Beth B. Bess, 1985, *Controversy and Coalition: the New Feminist Movement*, G.K. Hall & Company.

- Gadamer, Hans-Georg, 1975. *Truth and Method*. New York: The Seabury Press.
- Greimas, A.J. 1983. *Structural Semantics*. Lincoln, Nebraska: University of Nebraska Press.
- Hadad, Ismid (ed.). *Kebudayaan Politik dan Keadilan Sosial*. Jakarta: LP3ES.
- Hidayat, Surahman, tanpa tahun. *Berpolitik itu Ibadah*. Tanpa kota: Sharia Consulting Centre
- Hoffman, Emily P., 1991. *Essays on the Economics of Discrimination*. Kalamazoo, Michigan: W.E.Upjohn Institute for Employment Research.
- Holloway, Wendy dan Jefferson, Tony, 2002. *Doing Qualitative Research Differently*. London: Sage Publication Ltd.
- Howard, Rhoda E., 2000. *HAM, Penjelajahan Dalih Relativisme Budaya*. J Jakarta: Grafiti
- Hutcheon, Linda. 2002. *The Politics of Postmodernism*. London: Routledge
- Ikram dan Erom Djuhendar, 2003. Aksi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan (Studi Upaya Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan di 4 (empat) Pusat Studi Wanita dan 6 (enam) Organisasi Perempuan se Sumbagsel), dalam *Jurnal Perempuan*, Vol. 5 No.1 Maret 2003
- Imawan, Riswanda. 1997. *Membedah Politik Orde Baru*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Inglehart, Ronald. 1999. *Culture Shift in Advanced Industrial Societies*. Princeton, New Jersey, dan Oxford: Princeton University Press.
- Inglehart, Ronald dan Pippa Noris. 2003. *Rising Tide, Gender Equality and Cultural Change*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Inter Parliamentary Union, 1999, *Participation of Women in Political Life*, Geneva,
- Inter Parliamentary Union, 2000, *Politics: Women's Insight*. Geneva: tanpa penerbit.
- Isaak, Alan C., 1975, *Scope and Methods of Political Science, An Introduction to the Methodology of Political Inquiry*. Homewood, Illinois: the Dorsey Press.
- Isjwara, F. 1999. *Pengantar Ilmu Politik*. Bandung: Abardin.
- Jackson, Karl. D. 1990. *Traditional Authority, Islam, and Rebellion*.

(terjemahan). Jakarta: Grafiti.

Ja'far, Muhammad Anis Qasim. 1998. *Perempuan dan Kekuasaan*. Bandung: Zaman Wacana Mulia.

Jurnal Perempuan nomor 07, Mei-Juli 1998. *Politik Bergejolak, Perempuan Di Mana?* Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta.

.....19, 2001, *Perempuan Dalam Kewarganegaraan, Di Mana?* Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta

.....32/2003, *Perempuan dan Fundamentalisme*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta.

.....33/2003, *Perempuan di Wilayah Konflik*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta.

.....35/2004, *Halo Senayan*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta

Kahin, Mc Turnan, George. 1995. *Nationalism and Revolution in Indonesia*. (terjemahan). Ithaca: Cornell University Press.

Kamaruddin. 2003. *Partai Islam di Pentas Reformasi*. Jakarta: Visi Publishing.

Kantaprawira, Rusadi. 2002. *Sistim Politik Indonesia*. Bandung: Algensindo.

Katjasungkana, Nursyahbani, Gender Equality, a Universal Struggle dalam Bouchier, David dan Hadiz, Vedi R., 2005. *Indonesian Politics and Society, a Reader*. New York: RoutledgeCurzon.

Kenny, Michael. 2004. *The Politics of Identity*. Cambridge: Polity Press.

Koirudin. 2004. *Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Kuhn, Thomas S. 1970. *The Structure of Scientific Revolutions*. Chicago; the University of Chicago Press.

Lipson, Leslie. 1964. *The Democratic Civilization*. Oxford: Oxford University Press.

Lloyd, Moya. 2005. *Beyond Identity Politics, Feminism, Power and Politics*. London: Sage Publications.

Lovenduski, Joni dan Pippa Norris. 1993. *Gender and Party Politics*. London: Sage Publications.

- Lubis, Akhyar Yusuf, 2006. *Dekonstruksi Epistemologi Modern, dari Postmodernisme, Teori Kritis, Poskolonialisme Hingga Cultural Studies*. Jakarta: Pustaka Indonesia Satu.
- Luker, Kristin. 1985. *Abortion and the Politics of Motherhood*. Los Angeles, California : University of California Press.
- Majlis Pertmbangan Pusat PKS. 2008. *Falsafah Dasar PKS*. Tanpa penerbit.
..... *Memperjuangkan Masyarakat Madani*.
Tanpa penerbit.
- Marcoes-Natsir, Lies M. dan Meuleman, Johan Hendrik, 1993. *Wanita Islam Indonesia dalam Kajian Tekstual dan Kontekstual*. Jakarta: INIS.
- Marsh, David dan Stiker, Gerry, 1995. *Theory and Methods in Political Science*. New York: ST. Matin Press, INC.
- Matta, Anis. 2006. *Mengusung Peradaban yang Berkeimanan*. Bandung: Media Qalbu.
- Mernisi, Fatima. 1997. *Menengok Kontroversi Peran Wanita dalam Politik*. Surabaya: Dunia Ilmu.
- Millet, Kate. Theory of Sexual Politics dalam Ann E. Cudd dan Robin O. Andersen. *Feminist Theory a Philosophical Anthology an Anthology*. Blackwell Publishing.
- Mills, Sara. 1997. *Discourse*. London: Routledge.
- Moleong, Lexy J. 1989. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Karya.
- Muhammad, Husein, Faqihudin Abdul Kodir, Lies Marcoes Natsir, Marzuki Wahid. 2006. *Dawrah Fiqh Perempuan*. Cirebon: Fahmina Institute.
- Mulia, Siti Musdah dan Farida, Anik, 2005. *Perempuan dan Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Mulia, Siti Musdah dan Marzani Anwar. 2001. *Keadilan dan Kesetaraan Gender (Perspektif Islam)*. Jakarta: Tim Pemberdayaan Perempuan Bidang Agama Departemen Agama RI.
- Muthahhari, Murtadha, 2000. *Hak-Hak Wanita dalam Islam*. Jakarta: Lentera.
- Moer, Deliar. 1997. *Pemikiran Politik di Negeri Barat*. Bandung: Mizan.
- Okin, Susan Moller, 1991. Humanist Liberalism. Dalam Nancy Rosenblum (ed),

- Liberalism and the Moral Life*. Harvard University Press. Cambridge, MA: 39-53.
- Pateman, Carole, 1988. *The Sexual Contract*. Cambridge: Polity Press,
- Patton, Michael Quinn, 2002. *Qualitative Research and Evaluation Methods*. London: Sage Publication Inc.
- Philips, Anne. 1991. *Engendering Democracy*. Cambridge: the Polity Press.
- 1995. *The Politics of Presence. The Political Representation of Gender, Ethnicity, and Race*. Oxford: Oxford University Press
- Rai, Shirin M., 2002. *Gender and the Political Economy of Development*. Cambridge: Polity Press.
- Rais, Amin. 1997. *Cakrawala Islam*. Bandung: Mizan.
- Randal, Vicky, 1987, *Women and Politics, An international Perspective*. Chicago: the University of Chicago Press.
- Rathomy, Arief Ikhsan, 2007. *PKS & HTI: Genealogi dan Pemikiran Demokrasi*. Yogyakarta: Laboratorium Jurusan Ilmu {emerintahan, FISIP, UGM
- Reinharz, Shulamit, 2005. *Metode-Metode Feminis dalam Penelitian Sosial*. Jakarta: Women Research Institute.
- Rice, Pranee Liamputtong dan Ezzy, Douglas, 1999. *Qualitative Research Methods*. South Melbourne, Victoria : Oxford University Press.
- Ridha, Abu. 2003. *Saat Dakwah Memasuki Wilayah Politik*. Bandung: Syaamil.
- .
- Roded, Ruth, 1999. *Women in the Middle East, A Reader*. New York: I.B. Tauris.
- Rousseau, J.J. 1986. *The Social Contract*. England: Penguin.
- Sa'idah, Najmah dan Khatimah, Husnul. 2003. *Revisi Politik Perempuan. Bercermin pada Shahabiyat r.a*. Bogor: IdeA Pustaka.
- Sartori, Giovanni. 1976. *Parties and Party System. A Framework for Analysis*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Sekretariat Jendral PKS Bidang Arsip dan Sejarah. 2007. *Dari Kader untuk Bangsa*. Bandung: Fitrah Rabbani.

- Siswoyo, Hamdani dan Ari Darmastuti, 2000, *Profil Statistik Jender Provinsi Lampung*, Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan. Jakarta: BPS, dan *Japan International Cooperation Agency (JICA)*.
- Soetjipto, Ani Widayani, 2005. *Politik Perempuan Bukan Gerhana*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.
- Squires, Judith, 1999. *Gender in Political Theory*. Cambridge: Polity Press.
- Subiyantoro, Eko Bambang, 2004. Keterwakilan Perempuan dalam Politik Masih Merupakan Kabar Burung. Dalam Jurnal Perempuan nomor 34, *Politik dan Keterwakilan Perempuan*. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.
- Susser, Bernard, 1992. *Approaches to the Study of Politics*. New York: Macmillan Publishing Company.
- Sjamsudin, Nazaruddin. 1993. *Dinamika sistem Politik Indonesia*: Jakarta: Gramedia.
- Takariawan, Cahyadi. Mahid Ahmadi, Abdullah Sunono, Ida Nurlaila. 2005. *Keakhwatan 1, 2, 3, 4*. Solo: Intermedia.
- United Nations Research Institute for Social Development (UNRISD). 2005. *Gender Rquality. Striving for Justice in an Unequal World*. France: UNRISD.
- Van Dyke, Vernon. 1978. *Political Science: a Philosophical Analysis*. Stanford, California: Stanford University Press.
- Whelehan, Imelda. *Modern Feminist Thought From the Second Wave to 'Post-Feminism'*. Washington Square, New York: New York University Press.
- Wieringa, Saskia, 2002. *Sexual Politics in Indonesia*. New York: Palgrave Macmillan
- Winter, Bronwyn. 2001. : Fundamental Misunderstandings: Issues in Feminist Approaches to Islamism. *Journal of Women's History*. Indiana: Indiana University Press.
- Wollstonecraft, Mary. Of the Pernicious Effects which Arise from the Unnatural Distinctions Established in Society dalam Ann E. Cudd dan Robin O. Andersen. 2004. *Feminist Theory a Philosophical Anthology an Anthology*. Blackwell Publishing Company.
- Yamani, Mei (ed). 2000. *Islam dan Feminisme*. Bandung: Yayasan Nuansa Cendekia.
- Young, Irish Marion. 1990. *Justice and the Politics of Difference*. New Jersey:

Princeton University Press.

Zaidi, Nur Hasan, 2006. *Mereka Bicara PKS, Telaah Obyektif terhadap Perjalanan Dakwah Politik PKS*. Bandung: Fitrah Rabbani.

Zainudin, Rahman. 1992. *Kekuasaan dan Negara Pemikiran Politik Ibnu Khaldun*. Jakarta: Gramedia.

Zayd, Nasr Hamid Abu. 2003. *Dekonstruksi Gender Kritik Wacana Perempuan dalam Islam*. Yogyakarta: Samha.

Undang-Undang

Undang-undang nomor 31 tahun 2002 tentang Partai Politik

Undang-undang nomor 12/2003 tentang Pemilihan Umum

Disertasi, Tesis, Skripsi

Affianty, Debbie, 2006. *Proses rekrutmen calon walikota dan wakil walikota oleh partai politik untuk pemilihan kepala daerah secara langsung di Kota Depok 2005 : studi kasus PKS, PD, dan PAN*. Universitas Indonesia: tesis pada PPS Ilmu Politik.

Ahmad, Amelia, 2008. *Pola rekrutmen calon Anggota Legislatif Perempuan PDI Perjuangan Tahun 1999 dan Tahun 2004*. Universitas Indonesia: disertasi dalam PPS Ilmu Politik.

1.

Aini, Nurul, 1990. *Partisipasi politik buruh perempuan pasca orde baru : studi kasus pabrik garmen PT. Tongkyung Makmur Abadi di Jakarta*. Universitas Indonesia: disertasi pada PPS Ilmu Politik

Anwar, Mohammad, 2004. *Islam dan negara dalam perspektif Partai Keadilan Sejahtera*. Universitas Indonesia: tesis pada PPS Ilmu Politik

Arifin, Nurul Q, 2007. *Perempuan dan Politik : Sebuah Studi Kemenangan Tiga Kepala Daerah Perempuan Dalam Pilkada*. Universitas Indonesia: tesis pada PPS Ilmu Politik

Azis, Abdul, 2006. *Pola komunikasi politik Partai Keadilan Sejahtera pada kampanye pemilu 2004 di wilayah Jakarta Timur*. Universitas Indonesia: tesis pada PPS Ilmu Politik

Colin, Sarah, 2007. *Pengarusutamaan gender dalam praktek : pengalaman*

Kementrian pemberdayaan perempuan dan kerjasamanya dengan lima sector pemerintah sejak 2000. Universitas Indonesia: tesis pada PPS Ilmu Politik

Coryati, Dewi, 2006. *Masalah peningkatan keterwakilan perempuan di DPR-RI (studi kasus Partai Amanat Nasional dalam Pemilu 2004).* Universitas Indonesia: tesis pada PPS Ilmu Politik

Eriadi, M. Hermawan, 2007. *Pengaruh Pemikiran Politik Masyumi di Partai Keadilan/ Partai Keadilan Sejahtera.* Universitas Indonesia: tesis pada PPS Ilmu Politik

Faridah, 2006. *Kebijakan partai politik dalam meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen (studi kasus Partai Golkar periode tahun 1999 - 2004).* Universitas Indonesia: tesis pada PPS Ilmu Politik

Fithriati, Maryam, 2006. *Peran partai dan perempuan partai dalam meningkatkan keterwakilan perempuan menjelang Pemilu 2004 (studi kasus pada enam partai peserta pemilu 2004).* Universitas Indonesia: tesis pada PPS Ilmu Politik.

Fitri, Aulia. 2003. *Efektivitas Kinerja Perempuan Anggota Legislatif dalam Proses Pengambilan Keputusan Politik (Studi di DPRD Provinsi Lampung periode 1999-2004).* Universitas Lampung: Skripsi pada PS Ilmu Pemerintahan

Fuad, Rieta, 2006. *Perempuan dan politik (kepatuhan Partai Golkar, PDI-P dan PKB terhadap pemberlakuan kuota perempuan 30% bagi caleg DPR-RI).* Univesitas Indonesia: tesis pada PPS Ilmu Politik

Furqon, Aay M. 2004. *Pengaruh pemikiran Al-ikhwan Al-muslimun terhadap gerakan politik Islam Indonesia (1998-2000) : studi kasus Partai Keadilan.* Universitas Indonesia: tesis pada PPS Ilmu Politik.

Hamdanus, 2007. *Peran Partai Keadilan dalam Proses Demokratisasi di Indonesia.* Universitas Indonesia: tesis pada PPS Ilmu Politik.

Karim, Muhammad, 2004. *Kepemimpinan politik perempuan dalam pandangan Nahdlatul Ulama (NU) berdasarkan keputusan Muktamar XXX NU tahun 1999.* Universitas Indonesia: tesis pada PPS Ilmu Politik.

Katini, Evida, 2006. *Pelaksanaan sistem kuota 30% untuk keterwakilan perempuan di DPR pada pemilu legislatif tahun 2004 di Indonesia.* Universitas Indonesia: tesis pada PPS Ilmu Politik

Komarudin, Ujang, 2006. *Strategi Partai Keadilan Sejahtera dalam memenangkan pemilu legislatif 2004 di Provinsi DKI Jakarta.* Universitas Indonesia: tesis pada PPS Ilmu Politik.

- Lily Qz. M.Deden. 2004. Dampak Keterwakilan Perempuan dalam Undang-Undang Pemilu nomor 12 tahun 2003 terhadap Penempatan Calon Anggota Legislatif dari Partai politik yang Berazaskan Islam (studi di DPW PARTAI BULAN BINTANG dan PARTAI KEADILAN SEJAHTERA).
- Maesyaroh, Nia, 2004. Diskriminasi Gender dalam Proses Rekrutmen Calon Anggota Legislatif di PAN (Studi di DPW PAN Lampung)
- Magriasti, Lince, 2005. *Pola Rekrutmen caleg dan pengaruhnya terhadap keterwakilan perempuan di DPRD Propinsi Sumatera Barat pada Pemilihan Umum 2004 (studi pada Partai Golongan Karya dan Partai Bulan Bintang)*. Universitas Indonesia: tesis pada PPS Ilmu Politik.
- Martuti, Anik Dwi, 2008. *Formulasi Kebijakan Anggaran Gender : Studi Kasus APBD DKI tahun 2005 untuk Pemberdayaan Perempuan*. Univesitas Indonesia: tesis pada PPS Ilmu Politik.
- Maryamah, S., 2007. *NU dan Keadilan Jender: Posisi perempuan dalam Perspektif Keadilan Jender di Kepemimpinan PBNU*. Universitas Indonesia: tesis pada PPS Ilmu Politik.
- Munardi, Anton, 2007. *Negara Menurut Islam: Perspektif Partai Keadilan Sejahtera dan Hizbut Tahrir*. Universitas Indonesia: disertasi pada PPS Ilmu Politik.
- Nuraina, 2007. *Demokrasi Internal Partai Politik Islam : Studi Rekrutmen Perempuan pada Jabatan-Jabatan Politik PKS Pemilu 2004*. Universitas Indonesia: tesis pada PPS Ilmu Politik.
- Perdana, Aditya, 2007. *Kesempatan Politik dan Sukses Gerakan Sosial : Gerakan Keterwakilan Perempuan di Donggala (2004-2007)* Universitas Indonesia: tesis pada PPS Ilmu Politik.
- Prabowo, Banu, 2005. *Kesadaran gender pemilih perempuan dalam pemilu legislatif 2004 (studi kasus terhadap perempuan PNS di kantor Arsip Nasional RI)*. Universitas Indonesia: tesis pada PPS Ilmu Politik.
- Rahayu, Sri, 2003. Peranan DPRD dalam Memperjuangkan Aspirasi Masyarakat di Sektor Pemberdayaan Perempuan (Studi di DPRD Kota Bandarlampung)
- Rudyastuti, Rini, 2003. *Strategi gerakan perempuan Indonesia menjelang Pemilihan Umum 1999 : studi tentang pendidikan pemilih perempuan*. Universitas Indonesia: tesis pada PPS Ilmu Politik.
- Sulatri, Endang, 2003. *Pola rekrutmen caleg perempuan Partai Persatuan*

Pembangunan pada Pemilu 1999. Universitas Indonesia: tesis pada PPS Ilmu Politik

Sumarlen, 2004. Peran Perempuan dalam Pengambilan keputusan politik (studi di DPW PKB di Provinsi Lampung). Universitas Lampung: skripsi pada PS Ilmu Pemerintahan.

Tesnawati, Ni Nyoman, 2005. *Faktor-faktor yang mempengaruhi keterwakilan perempuan di DPRD Provinsi Bali hasil Pemilu 1999*. Universitas Indonesia: tesis pada PPS Ilmu Politik.

Yunanto, Sri, 2004. *Demokratisasi gerakan fundamentalis moderat Islam di Indonesia : studi kasus Partai Keadilan Sejahtera*. Universitas Indonesia: disertasi pada PPS Ilmu Politik.

Vevia, Yonalita, 2003. Partisipasi Politik Perempuan dalam Perspektif Pengurus Partai-Partai Politik Islam (studi pada DPC PARTAI BULAN BINTANG dan PARTAI KEADILAN SEJAHTERA Bandar Lampung). Universitas Lampung: skripsi pada PS Ilmu Pemerintahan.